Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
No. 04 Tahun 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI

H. IRWANDI, SH

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I	**PENDAHULUAN**		**I --1**
	1.1	Latar belakang	I - 1
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I - 4
	1.3	Hubungan antar dokumen	I - 5
	1.4	Sistematika Penulisan	I - 11
	1.5	Maksud dan Tujuan	I - 12
BAB II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**		**II - 1**
	2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
	2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II - 1
	2.1.2	Potensi pengembangan Wilayah	II - 9
	2.1.3	Wilayah Rawan Bencana	II - 10
	2.1.4	Demografi	II - 11
	2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 12
	2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 12
	2.2.1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 12
	2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II - 23
	2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II - 29
	2.3	Aspek Pelayanan Umum	II - 33
	2.3.1	Urusan Wajib Yang Merupakan Pelayanan Dasar	II - 33
	2.3.1.1	Pendidikan	II - 33
	2.3.1.2	Kesehatan	II - 39
	2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II - 44
	2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	II - 46
	2.3.1.5	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	II - 47
	2.3.1.6	Sosial	II - 48
	2.3.2	Urusan Wajib (Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar).	II - 49
	2.3.2.1	Tenaga Kerja	II - 49
	2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Anak	II - 51
	2.3.2.3	Pangan	II - 52
	2.3.2.4	Pertanahan	II - 52
	2.3.2.5	Lingkungan Hidup	II - 54
	2.3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil	II - 56
	2.3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II - 57
	2.3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II - 59
	2.3.2.9	Perhubungan	II - 60
	2.3.2.10	Komunikasi dan Informatika	II - 62
	2.3.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II - 63
	2.3.2.12	Penanaman Modal	II - 65
	2.3.2.13	Kepemudaan dan Olahraga	II - 66
	2.3.2.14	Statistik	II - 67

	2.3.2.15	Kebudayaan.....	II - 68
	2.3.2.16	Perpustakaan.....	II - 68
	2.3.2.17	Kearsipan.....	II - 68
	2.3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II - 69
	2.3.3.1	Kelautan dan Perikanan.....	II - 69
	2.3.3.2	Pariwisata.....	II - 69
	2.3.3.3	Pertanian.....	II - 71
	2.3.3.4	Energi dan Sumber Daya Mineral.....	II - 73
	2.3.3.5	Perdagangan.....	II - 74
	2.3.3.6	Perindustrian.....	II - 74
	2.3.3.7	Transmigrasi.....	II - 76
	2.4	Aspek daya Saing Daerah.....	II - 76
	2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II - 76
	2.4.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Komponen Tertinggi Penyumbang PDRB.....	II - 76
	2.4.1.2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan.....	II - 76
	2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II - 77
	2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi.....	II - 78
	2.4.3.1	Angka Kriminalitas.....	II - 78
	2.4.4	Sumber daya Manusia.....	II - 79
	2.5	Perkembangan IPM Kota Bukittinggi.....	II - 80
BAB III	**GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN.....**		**III - 1**
	3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III - 1
	3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III - 2
	3.1.1.1	Perkembangan Pendapatan Daerah.....	III - 5
	3.1.1.2	Perkembangan Belanja Daerah.....	III - 10
	3.1.1.3	Perkembangan Pembiayaan Daerah.....	III - 21
	3.1.2	Neraca Daerah.....	III - 27
	3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III - 33
	3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III - 38
	3.2.2	Analisis Pembiayaan.....	III - 42
	3.3	Kerangka Pendanaan.....	III - 46
	3.3.1	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama.....	III - 46
	3.3.2	Proyeksi Data Masa Lalu.....	III - 47
	3.3.3	Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III - 55
	3.3.4	Kebijakan Alokasi Anggaran.....	III - 57
BAB IV	**ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .....**		**IV - 1**
	4.1	Permasalahan Pembangunan	IV – 1
	4.1.1	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah	IV – 2
	4.1.2	Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	IV – 5
	4.1.2.1	Aspek Pemerintahan.....	IV – 5
	4.1.2.2	Bidang Pendidikan.....	IV – 8
	4.1.2.3	Bidang Kesehatan.....	IV – 8

	4.1.2.4	Bidang Lingkungan Hidup.....	IV – 9
	4.1.2.5	Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM).....	IV – 12
	4.1.2.6	Sarana Pendukung Perekonomian.....	IV – 13
	4.2	Isu Strategis.....	IV – 14
	4.2.1	Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	IV – 15
	4.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019.....	IV – 23
	4.2.3	Sustainable Development Goals (SDG's).....	IV – 26
	4.2.4	Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025.....	IV – 26
	4.2.5	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi.....	IV – 28
	4.2.6	Kebijakan Pembangunan Daerah Tetangga.....	IV – 29
	4.2.7	Kerja Sama Antar Daerah.....	IV – 30
	4.3	Penetapan Isu Strategis.....	IV – 30
	4.3.1	Penerapan ABS-SBK dan Pemberdayaan Masyarakat.....	IV – 31
	4.3.2	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.....	IV – 32
	4.3.3	Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	IV – 34
	4.3.4	Lingkungan Hidup.....	IV – 35
	4.3.5	Pelaksanaan MEA.....	IV – 36
	4.3.6	Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan..	IV – 37
	4.3.7	Pembangunan Kependudukan.....	IV – 38
	4.3.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	IV – 40
	4.3.9	Penanggulangan Kemiskinan.....	IV – 41
BAB V	**VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN .....**		**V – 1**
	5.1	Visi	V – 1
	5.2	Misi	V – 2
	5.3	Tujuan dan Sasaran.....	V – 7
	5.3.1	Tujuan dan Sasaran Misi 1.....	V – 7
	5.3.2	Tujuan dan Sasaran Misi 2.....	V – 9
	5.3.3	Tujuan dan Sasaran Misi 3.....	V – 9
	5.3.4	Tujuan dan Sasaran Misi 4.....	V – 10
	5.3.5	Tujuan dan Sasaran Misi 5.....	V – 10
BAB VI	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....**		**VI – 1**
	6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Misi I	VI – 1
	6.2	Strategi dan Arah Kebijakan Misi II	VI – 4
	6.3	Strategi dan Arah Kebijakan Misi III	VI – 7
	6.4	Strategi Dan Arah Kebijakan Misi IV.....	VI – 16
	6.5	Strategi Dan Arah Kebijakan Misi V.....	VI – 21
BAB VII	**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH..**		**VII – 1**
	7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.....	VII – 1
	7.1.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 1.....	VII – 3

7.1.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 2……. VII – 7
7.1.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 3……. VII – 12
7.1.4 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 4……. VII – 23
7.1.5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 5……. VII – 30
7.2 Arah Pengembangan Wilayah..... VII – 42
7.3 Arah Pengembangan Wilayah Tetangga…….. VII – 44

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ..... VIII – 1

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH..... IX – 1

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN..... X – 1
10.1 Pedoman Transisi……. X – 1
10.2 Kaidah Pelaksanaan..... X – 1
10.3 Pengendalian dan evaluasi ..... X – 2

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Bukittinggi Per Kecamatan ..... II - 1

Tabel 2.2. Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi ..... II - 8

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi menurut Jenis Kelamin ..... II - 11

Tabel 2.4. Persentase Penyebaran Penduduk menurut Kecamatan ..... II - 12

Tabel 2.5. Nilai masing-masing Kategori dalam PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Hargan Konstan Tahun 2010 s.d 2015 ..... II - 14

Tabel 2.6. Nilai dan Kontribusi Masing-masing Kategori dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2010 s.d 2015 ..... II - 16

Tabel 2.7. Perkembangan Kontribusi Kategori dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Thaun 2010 s.d 2015 ..... II - 18

Tabel 2.8. Pertumbuhan Kontribusi Kategori PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Thaun 2010 s.d 2015 ..... II - 19

Tabel 2.9. Nilai Inflasi Rata-rata Kota Bukittinggi Tahun 2010 s.d 2015 ..... II - 21

Tabel 2.10. PDRB Perkapita Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 22

Tabel 2.11. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 24

Tabel 2.12. Angka rata-rata Lama Sekolah Di Kota Bukittinggi tahun 2010 s.d 2015 ..... II - 24

Tabel 2.13. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 25

Tabel 2.14. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 26

Tabel 2.15. Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 26

Tabel 2.16. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Bukittinggi ..... II - 27

Tabel 2.17. Penduduk Yang Bekerja Di Kota Bukittinggi Menurut Golongan Umur Tahun 2011 s.d 2015 ..... II - 28

Tabel 2.18. Angkatan Kerja di Kota Bukittinggi Menurut Golongan Umur Tahun 2011 s.d 2015 ..... II - 28

Tabel 2.19. Penduduk Yang Bekerja Di Kota Bukittinggi Menurut Lapangan usaha Tahun 2011 s.d 2015 ..... II - 29

Tabel 2.20. Kelompok Seni Tradisi yang ada di Kota Bukittinggi Tahun 2015 ..... II - 30

Tabel 2.21. Perkembangan Prasarana Olahraga Kota Bukittinggi Tahun 2010 s.d 2015 ..... II - 31

Tabel 2.22. Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 32

Tabel 2.23. Jumlah kegiatan Olahraga Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 32

Tabel 2.24. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 33

Tabel 2.25. Ketersediaan Sekolah dan penduduk Usia Sekolah Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi..... II - 34

Tabel 2.26. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan dasar tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi..... II - 35

Tabel 2.27. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2015 ..... II - 36

Tabel 2.28. Data Siswa Putus Sekolah Tahun 2014..... II - 37

Tabel 2.29. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 37

Tabel 2.30. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2015 ..... II - 38

Tabel 2.31. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 40

Tabel 2.32. Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 40

Tabel 2.33. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 41

Tabel 2.34. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2010 s.d 2015 ..... II - 42

Tabel 2.35. Jumlah Dokter Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 43

Tabel 2.36. Jumlah tenaga medis Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittiinggi..... II - 44

Tabel 2.37. Kondisi Jalan Dalam Kota ..... II - 45

Tabel 2.38. Alokasi dana untuk penanganan perumahan melalui kegiatan bedah rumah ..... II - 46

Tabel 2.39. Proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum di Bukittinggi ..... II - 47

Tabel 2.40. Ketersediaan Polisi Pamong Praja tahun 2010 s/d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 48

Tabel 2.41. Bentuk intervensi pemerintah terhadap penyandang masalah kesejahteraan social di Kota Bukittinggi ..... II - 49

Tabel 2.42. Penduduk Usia Kerja Di Kota Bukittinggi..... II - 50

Tabel 2.43 Angkatan Kerja di Kota Bukittinggi Menurut Golongan Umur Tahun 2011 - 2015 ..... II - 50

Tabel 2.44 Perkembangan penyelesaian permasalahan tanah konsolidasi By Pass kondisi tahun 2015 ..... II - 53

Tabel 2.45. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Terkelolanya Limbah/Usaha/ Kegiatan/Industri Sesuai Dengan Standar Lingkungan ..... II - 55

Tabel 2.46. Rasio Penduduk yang Telah Memiliki KTP dan Penduduk yang wajib tahun 2010-2014 Kota Bukittinggi ..... II - 57

Tabel 2.47. Jumlah Kelompok Dasawisma Tahun 2010 s.d 2014 Kota Bukittinggi ..... II - 59

Tabel 2.48. Perkembangan Prograam Keluarga Berencana di Kota Bukittinggi ..... II - 60

Tabel 2.49. Data Menara Telekomunikasi di Kota Bukittinggi di kota Bukittinggi tahun 2010 - 2015 ..... II - 62

Tabel 2.50. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi .... II - 64

Tabel 2.51. Jumlah UKM non BPR tahun 2010-2015 di Kota Bukittinggi..... II - 64

Tabel 2.52. Jumlag BPR/LKM Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 65

Tabel 2.53. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 65

Tabel 2.54. Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s/d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 66

Tabel 2.55. Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2010 s/d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 66

Tabel 2.56. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2010 s/d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 67

Tabel 2.57. Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2010 s/d 2015 Kota Bukittinggi ..... II - 67

Tabel 2.58. Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2010-2015..... II - 70

Tabel 2.59. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010-2015 ..... II - 70

Tabel 2.60. Produtivitas Padi Tahun 2010 s/d 2015 Kota Bukittinggi..... II - 71

Tabel 2.61. Produktivitas Jagung Tahun 2010 s/d 2015 Kota Bukittinggi..... II - 72

Tabel 2.62. Produktivitas Ketela Rambat Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi. ..... II - 72

Tabel 2.63. Produktivitas Ketela Pohon Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi. ..... II - 73

Tabel 2.64. Kontribusi Kategori Pertanian, Peternakan Perburuan, dan Jasa Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2015 ..... II - 73

Tabel 2.65. Kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian pada PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2015 ..... II - 73

Tabel 2.66. Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 s/d 2015 ..... II - 74

Tabel 2.67. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 s.d 2014 ..... II - 75

Tabel 2.68. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Periode 2010 s.d 2015 ..... II - 76

Tabel 2.69. Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Terhadap Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi Periode 2010 s.d 2015 ..... II - 77

Tabel 2.70. Angka Kriminalitas Kota Bukittinggi Tahun 2010 s.d 2015..... II - 78

Tabel 2.71. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bukittinggi ..... II - 79

Tabel 2.72. Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s/d 2015 Kota Bukittinggi..... II - 79

Tabel 2.73. Perkembangan IPM Kota Bukittinggi ..... II - 81

Tabel 3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 s.d 2015..... III - 3

Tabel 3.2. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Bukittinggi ..... III - 12

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bukittinggi ..... III - 14

Tabel 3.4. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Bukittinggi ..... III - 16

Tabel 3.5. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bukittinggi ..... III - 19

Tabel 3.6. Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Bukittinggi ..... .III - 22

Tabel 3.7. Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Bukittinggi..... III - 23

Tabel 3.8. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bukittinggi ..... III - 25

Tabel 3.9. Sisa Lebih (Rill) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Bukittinggi ..... . III - 25

Tabel 3.10. Proyeksi Sisa Lebih (Rill) Pembiayaan Anggaran Kota Bukittinggi .... III - 26

Tabel 3.11. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bukittinggi ..... III - 28

Tabel 3.12. Analisa Rasio Keuangan Kota Bukittinggi ..... III - 31

Tabel 3.13. Perkembangan Realisasi Pembiayaan dan Rata-rata Pertumbuhan Kota Bukittinggi ..... III - 37

Tabel 3.14. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bukittinggi ..... III - 39

Tabel 3.15. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bukittinggi ..... III - 40

Tabel 3.16. Defisit Riil Anggaran Kota Bukittinggi ..... III - 43

Tabel 3.17. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bukittinggi ..... III - 44

Tabel 3.18. Realisasi Sisa lebih Perhitungan Anggaran Kota bukittinggi ..... III - 45

Tabel 3.19. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi ..... III - 47
Tabel 3.20. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Bukittinggi..... III - 50
Tabel 3.21. Proyeksi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bukittinggi..... III - 53
Tabel 3.22 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi ..... III - 56
Tabel 3.23. Rencana Pembangunan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi ..... III - 58
Tabel 4.1. Status Capaian Indikator RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 - 2025 Tahap II Tahun 2010 - 2015..... IV - 3
Tabel 4.2. Sasaran dan Target Makro RPJMN 2014 - 2019 ..... IV - 25
Tabel 4.3. Target Kinerja RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2020 ..... IV - 27
Tabel 4.4. Hubungan Pembangunan Kota Bukittinggi dengan Daerah Tetangga ..... IV - 29
Tabel 4.5 Sandingan Isu Strategis Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Bukittnggi ..... IV - 43
Tabel 5.1. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021 ..... V - 3
Tabel 5.2. Keselarasan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 Dengan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021..... V - 3
Tabel 5.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi 2016 - 2021 ..... V - 5
Tabel 5.4. Keselarasan Isu Strategis Dengan Misi ..... V - 6
Tabel 5.5. Target dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 ..... V - 11
Tabel 6.1. Strategi dan Arah kebijakan di Misi 1..... VI - 2
Tabel 6.2. Strategi dan Arah kebijakan di Misi 2 ..... VI - 5
Tabel 6.3. Strategi dan Arah kebijakan di Misi 3 ..... VI - 12
Tabel 6.4. Strategi dan Arah kebijakan di Misi 4 ..... VI - 19
Tabel 6.5. Strategi dan Arah kebijakan di Misi 5..... VI - 24
Tabel 7.1. Kabijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah ..... VII - 1
Tabel 7.1.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 1 ..... VII - 3
Tabel 7.1.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 2 ..... VII - 7
Tabel 7.1.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 3 ..... VII - 12
Tabel 7.1.4 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 4 ..... VII - 23

Tabel 7.1.5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 5 ..... VII - 30

Tabel 7.2. Arah Pengembangan Wilayah ..... VII – 42

Tabel 7.3. Arah Pengambangan Wilayah Tetangga ..... VII – 44

Tabel 8.1. Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan berdasarkan Urusan Tahun 2016 - 2021 ..... VIII – 2

Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan ..... IX – 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi..... I - 3

Gambar 1.2. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional ..... I - 6

Gambar 1.3. Tahapan RPJP Kota Bukittinggi..... I - 7

Gambar 1.4. Hubungan Kerja Pembangunan Daerah..... I - 8

Gambar 1.5. Bagan Air Hubungan Antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah ..... I - 9

Gambar 1.6. Hubungan Antara RPJMD Kota Bukittinggi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..... I – 10

Gambar 2.1. Peta Orientasi Kota Bukittinggi ..... II - 3

Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2011 s.d 2014…….. ..... II - 13

Gambar 2.3. Pertumbuhan Masing-masing Kategori Atas Dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi Tahun 2010 s.d 2014..... II - 15

Gambar 2.4. Kontribusi Kategori PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2014 ..... II – 17

Gambar 2.5. Pertumbuhan Kategori PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Bukittinggi Tahun 2010 s.d 2014..... II – 20

Gambar 2.6. Gerak Laju Inflasi Kota Bukittinggi Tahun 2010 s.d 2014..... II – 21

Gambar 2.7. Pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi..... II – 22

Gambar 2.8. Pertumbuhan Unit Usaha dan Tenaga Kerja pada Sektor Industri di Kota Bukittinggi Tahun 2010 s.d 2015 ..... II - 75

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.1. Pendapatan Asli Daerah ..... III – 4

Grafik 3.1.2. Dana Perimbangan ..... III – 4

Grafik 3.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah ..... III – 5

Grafik 3.1.4. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah ..... III – 5

Grafik 3.2.1. Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap Anggaran Belanja ..... III – 13

Grafik 3.2.2. Proporsi Realisasi Belanja Langsung terhadap Anggaran Belanja ..... III – 13

Grafik 3.3.1. Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ..... III – 15

Grafik 3.3.2. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ..... III – 15

Grafik 3.3.3. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ..... III – 16

Grafik 3.4.1. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Belanja Tidak Langsung..... III – 17

Grafik 3.4.2. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Belanja Langsung ..... III – 17

Grafik 3.4.3. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pembiayaan Pengeluaran ..... III – 18

Grafik 3.4.4. Pengeluaran wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama..... III – 18

Grafik 3.5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ..... III – 19

Grafik 3.6. Penutup Defisit rill Anggaran..... III – 23

Grafik 3.7. komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran..... III – 24

Grafik 3.8. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ..... III – 25

Grafik 3.9. Sisa Lebih (Rill) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan..... III – 26

Grafik 3.10. Proyeksi Sisa Lebih (Rill) Pembiayaan Anggaran ..... III – 27

Grafik 3.11.1. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah - ASET..... III – 29

Grafik 3.11.2. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah - Kewajiban ..... III – 29

Grafik 3.11.3. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah – Ekuitas Dana ..... III – 29

Grafik 3.11.4. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah ..... III – 30

Grafik 3.12. Analisis Rasio Keuangan..... III – 32

Grafik 3.13. perkembangan Realisasi Pembiayaan dan Rata-rata Pertumbuhan ..... III – 38
Grafik 3.14. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ..... III – 39
Grafik 3.15.1. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ..... III – 41
Grafik 3.15.2. Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ..... III – 41
Grafik 3.51.3. Realisasi Belanja Pemenuhan Kabutuhan Aparatur ..... III – 42
Grafik 3.16. Defisit Rill Anggaran..... III – 43
Grafik 3.17. Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Bukittinggi ..... III – 44
Grafik 3.18. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran..... III – 45
Grafik 3.19.1. Proyeksi Pendapatan Daerah..... III – 48
Grafik 3.19.2. Proyeksi Pendapatan Daerah - PAD..... III – 48
Grafik 3.19.3. Proyeksi Pendapatan Daerah Dana Perimbangan..... III – 49
Grafik 3.19.4. Proyeksi Pendapatan Daerah Lain-lain Pendapatan yang Sah ..... III – 49
Grafik 3.20.1. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama – Belanja Tidak Langsung ..... III –51
Grafik 3.20.2. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama – Belanja Langsung..... III – 51
Grafik 3.20.3. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama – Pengeluaran Pembiayaan ..... III – 52
Grafik 3.20.4. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama..... III – 52
Grafik 3.20.5. Total ..... III – 52
Grafik 3.21.1. Proyeksi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Belanja Tidak Langsung ..... III – 54
Grafik 3.21.2. Proyeksi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Belanja Langsung..... III – 54
Grafik 3.21.3. Proyeksi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ..... III – 55
Grafik 3.22 kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mandanai Pembangunan Daerah ..... III – 56
Grafik 3.23. Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah ..... III – 59

WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2012 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bukittinggi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bukittinggi untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD tahun 2016-2021 merupakan:

a. Penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta Program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bukittinggi, RPJPD Provinsi Sumatera Barat, dan RPJM Nasional

b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2016-2021 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintahan, Swasta dan Masyarakat.

Pasal 4

Tujuan RPJMD adalah sebagai acuan dasar untuk:

a. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah; dan

b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 5

(1) Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Walikota disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

(2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Walikota pada akhir masa jabatan.

BAB IV
DOKUMEN RPJMD TAHUN 2016-2021

Pasal 6

(1) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan;
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
BAB IV	Analisis Isu-Isu Strategis;
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
BAB VI	Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
BAB VIII	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan;
BAB IX	Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
BAB X	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

(2) Dokumen RPJMD 2016-2021 dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;

(2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan;

c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional dan/atau;

d. Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka Walikota tahun terakhir pemerintahannya wajib melakukan penyusunan RKPD untuk tahun pertama pemerintahan berikutnya yang berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 dan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 16 Agustus 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT : (4/2016)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari suksesnya suatu program dan kegiatan dalam menghasilkan output. Akan tetapi lebih jauh dari pada itu, sejauh mana pembangunan memberikan keuntungan dan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Paradigma pembangunan yang berorientasi minimal outcome telah digulirkan pemerintah melalui berbagai regulasi terkait perencanaan pembangunan dan bidang terkait lainnya. Karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu menyusun perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah hingga jangka pendek yang substansinya saling berkaitan, dengan berbagai aspek, informasi dan data yang akurat. Perencanaan tersebut dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Secara nasional Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi serta dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya, baik berupa dokumen perencanaan sektoral maupun spasial.

Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi periode 2016-2021 telah dilantik tanggal 17 Februari 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-616 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Tentang Pengangkatan Walikota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13–616 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, seiring dengan itu adanya kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir diubah dengan Undang- Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 -2021 merupakan rencana lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025. Keberadaan RPJMD ini memiliki makna strategis karena menjadi Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah, dan sebagai pedoman dan acuan bagi dokumen perencanaan di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 , memperhatikan RPJMN, RPJPD Provinsi Sumbar tahun 2005-2025 dan RPJMD Propinsi Sumbar tahun 2016-2021 kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda- agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, dan proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas telah dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Sementara, Pendekatan Politis selain mengambil visi dan misi kepala daerah terpilih juga dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Bukittinggi.

Secara sistematis proses penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 -2021 adalah seperti gambar berikut:

Gambar 1.1
Proses Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi

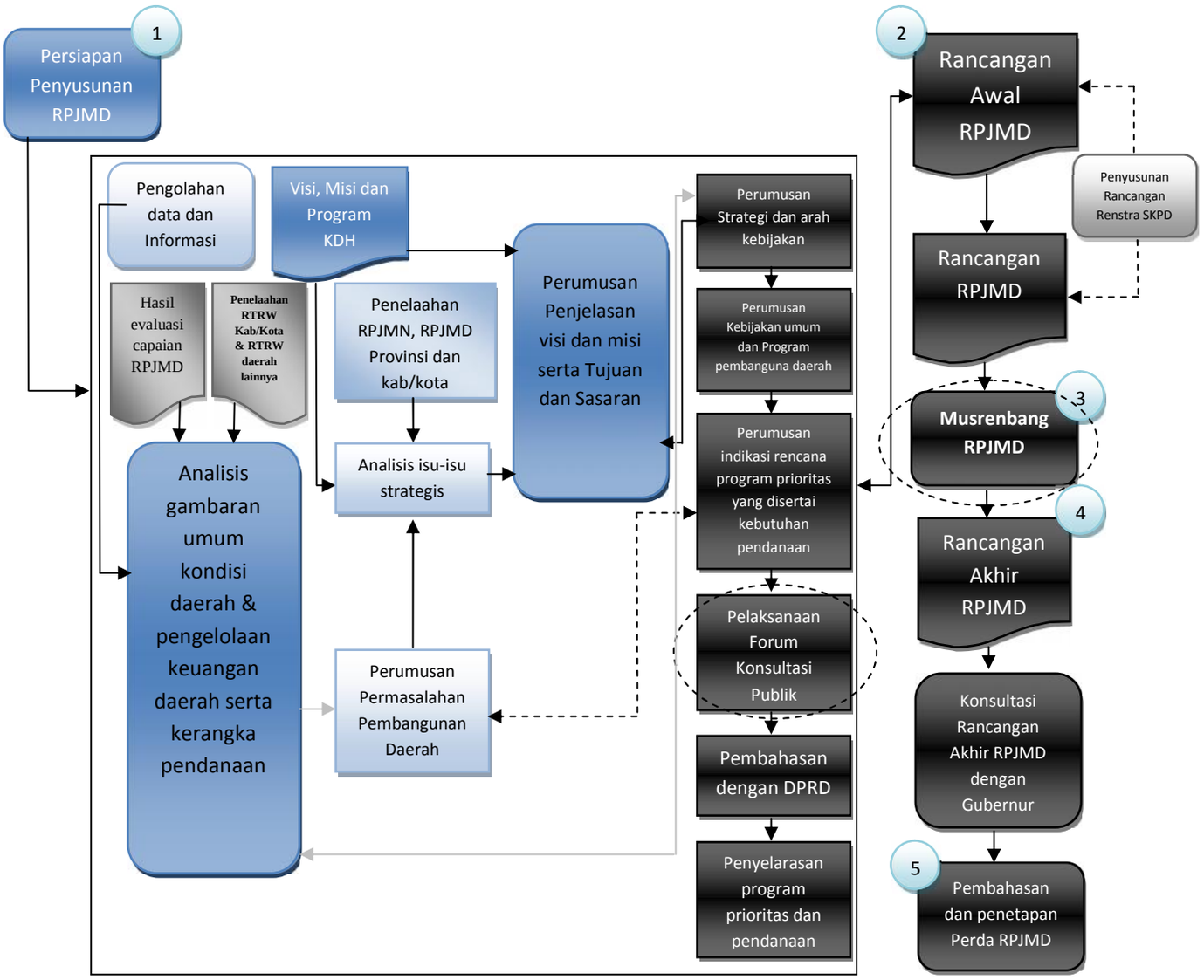

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. Merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan;
3. Merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah , yakni RKPD;
4. Merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda;
5. Merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Kerja Daerah selama 5 (lima) tahun;
6. Merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi;
7. Merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan RPJMD Kota Bukittingg Tahun 2016-2021 antara lain adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2012 nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6).
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMND dan RKPD Tahun 2017.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RPJPD Propinsi Sumbar 2005-2025, serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Agar RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD merupakan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, pada pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kedalam penyusunan atau evaluasi terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta terhadap Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Dengan dinyatakannya dalam

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 terutama pada pasal 15 ayat (1) tersebut maka KLHS merupakan Instrumen Lingkungan Hidup yang bersifat mandatory, yakni wajib dilakukan oleh para penyusun kebijakan, rencana dan program.

Secara substansi, RPJMD berisi penjabaran visi misi kepala daerah terpilih termasuk di dalamnya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan program. Sesuai Permendagri No.67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pengkajian dilakukan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan program. Berarti KLHS dilakukan terhadap seluruh isi dokumen perencanaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan. Dengan demikian dampak dan/atau resiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang dapat menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan dan penyelarasan dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.2

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional

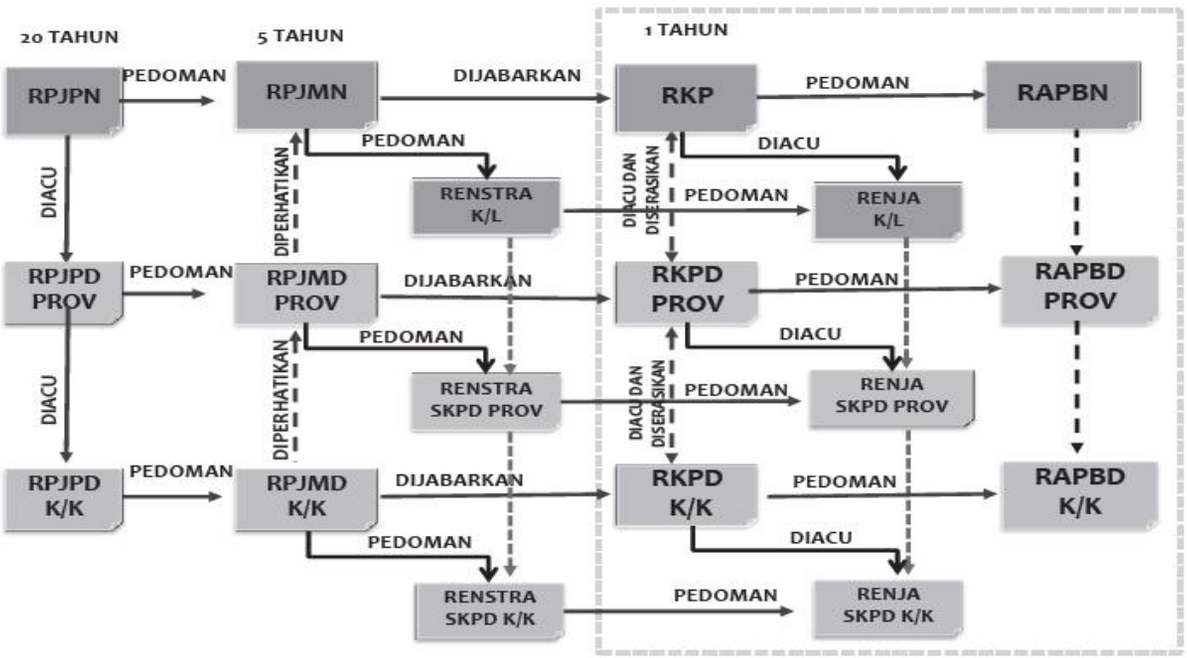

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD dengan RPJPD

RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD 2006-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi periode 2016-2021 juga mengacu pada RPJPD khususnya lima tahun ketiga. Dengan kata lain dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, maka pencapaian target pembangunan jangka panjang juga akan dapat direlisasikan.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Gambar 1.3
Tahapan RPJP Kota Bukittinggi

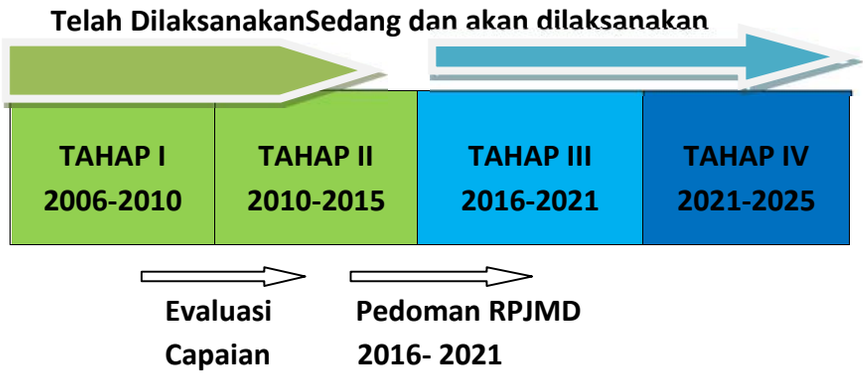

2. RPJMD dengan Renstra PERANGKAT KERJA DAERAH

RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Kerja Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Kerja Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Kerja Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi.

Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Kerja Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi Perangkat Kerja Daerah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Perangkat Kerja Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Kerja Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD. Perumusan rancangan Renstra Perangkat Kerja Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Kerja Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Kerja Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Kerja Daerah tersebut bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Kerja Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1.4
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

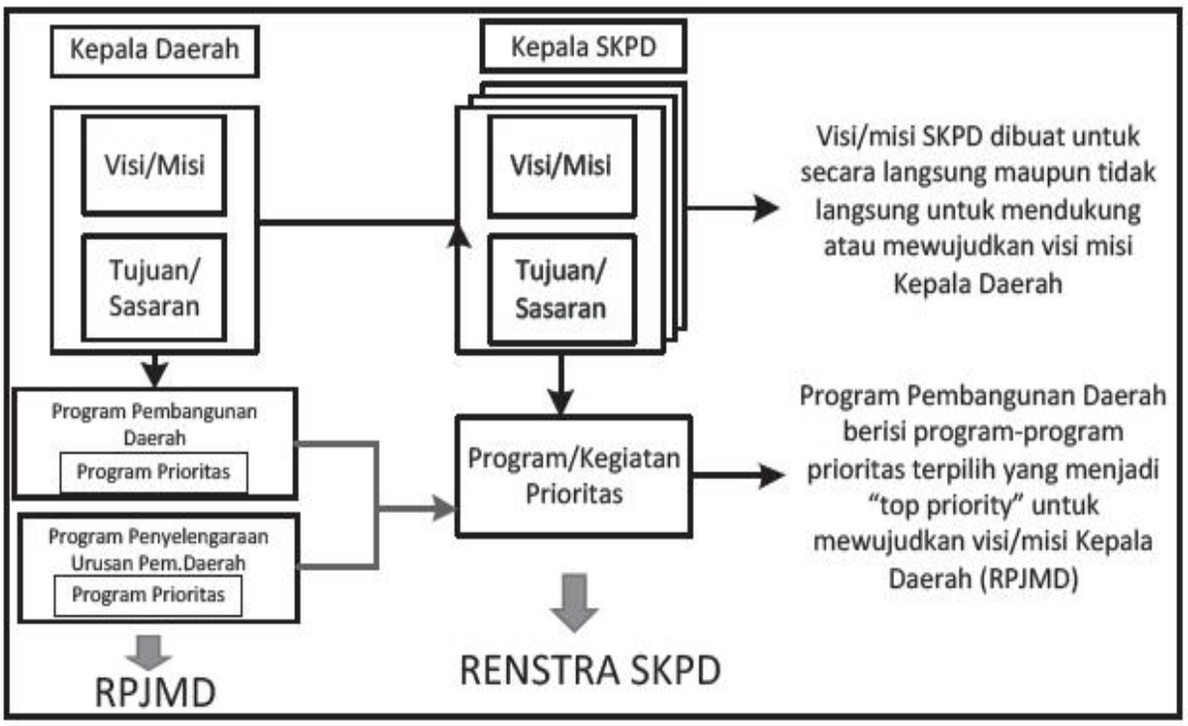

3. RPJMD dengan RKPD

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bukittinggi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

Gambar 1.5

Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

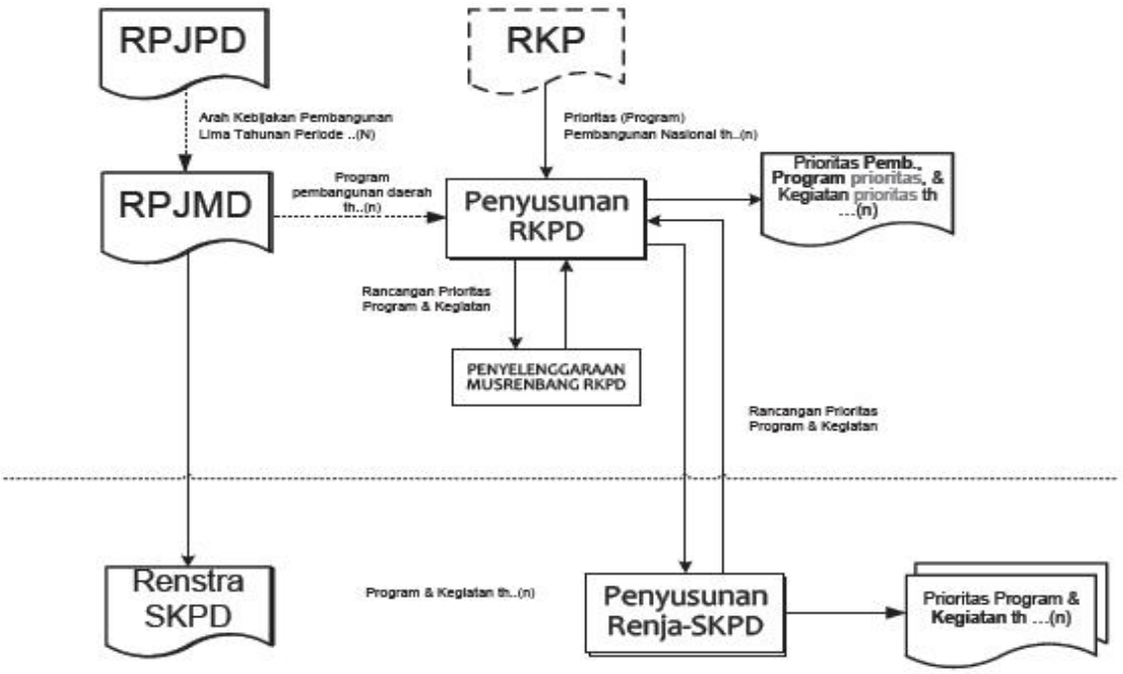

4. RPJMD Kota Bukittinggi dengan Perencanaan Lainnya

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 juga perlu ditelaah baik dokumen pada secara nasional, Provinsi Sematera Barat, Kabupaten/Kota di sekitar Kota Bukittinggi. Skema hubungan antara RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar berikut ini ;

Gambar 1.6
Hubungan antara RPJMD Kota Bukittinggi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

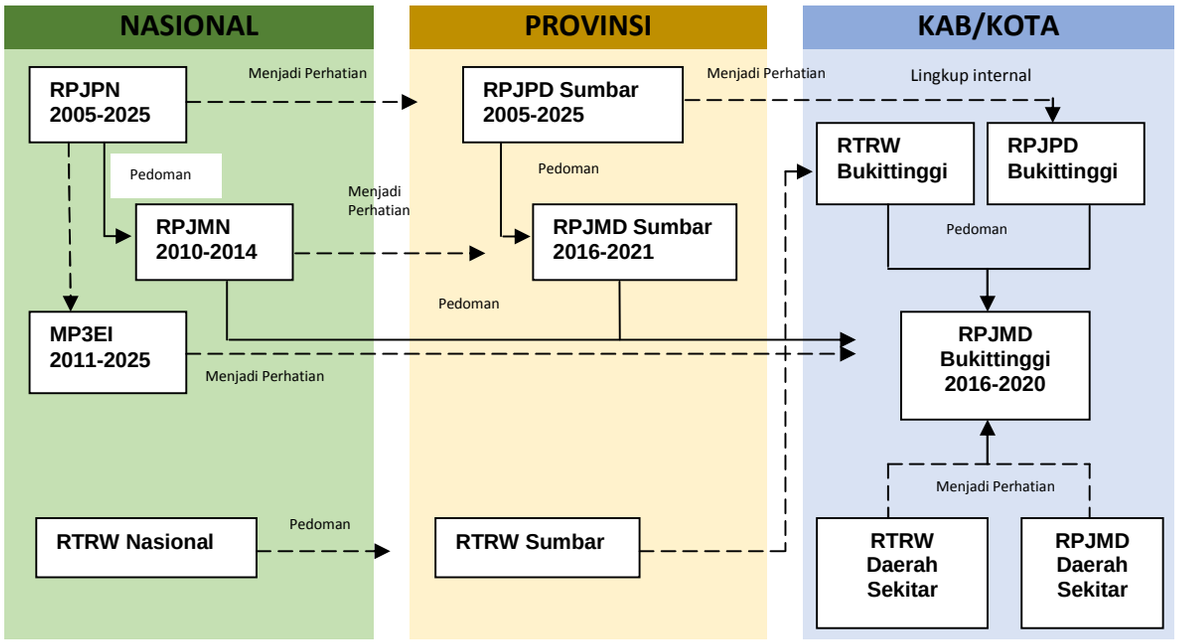

Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi berpedoman pada RTRW Kota Bukittinggi yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang . Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 - 2030, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan

rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/ kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4 . Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 10 (sepuluh bab, sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Bukittinggi secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bukittinggi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan keuangan daerah dalam jangka menengah.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan PERANGKAT KERJA DAERAH terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab PERANGKAT KERJA DAERAH.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah Kota Bukittinggi dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bukittinggi sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan Walikota periode 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.5.2. Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyusun Renstra Perangkat Kerja Daerah periode 2016-2021;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;

3. Menerjemahkan Visi dan Misi Walikota Bukittinggi dan Wakil Walikota Bukittinggi ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Kerja Daerah tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021.
5. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Kerja Daerah dan Indikator kinerja Walikota Bukittinggi dan Wakil Walikota Bukittinggi sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Bukittinggi periode 2016-2021.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Bukittinggi terletak pada posisi 100º20'- 100º25'- Bujur Timur dan 00º16' - 00º16' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,239 Km^2, yang merupakan 0,06 persen luas Provinsi Sumatera Barat. Luas tersebut merupakan 0.06% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Bukittinggi sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Bukittinggi-Kota Padang Panjang dan Kota Padang, serta Kota Bukittinggi – Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Batusangkar, Kota Lubuk Sikaping dan Kota Lubuk Basung. Di samping itu Kota Bukittinggi juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah, Bukittinggi memiliki wilayah administratif yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan, dengan luas masing-masing wilayah sebagai berikut :

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,831 km2 (683,10 ha) atau 27,07 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 kelurahan.
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal 12,156 km2 (1.215,60 ha) atau 48,16 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 kelurahan.
3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km2 (625,20 ha) atau 24,77 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 8 kelurahan.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Bukittinggi Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
1	Guguk Panjang	683,10	27,07
2	Mandiangin Koto Selayan	1.215,60	48,16
3	Aur Birugo Tigo Baleh	625,20	24,77
Jumlah		2.523,90	100,00

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2015

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan dengan lapisan Tuff dari lereng gunung Merapi sehingga tanahnya subur, namun dengan luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk, hotel, dan pasar. Lokasi pasar yang terluas terdapat di Kecamatan Guguk Panjang yaitu Pasar Simpang Aur Kuning, Pasar Atas dan Pasar Bawah.

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan Tilatang Kamang; Kabupaten Agam.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu; Kabupaten Agam.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto Gadang; Kecamatan IV Koto; Kabupaten Agam.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang; Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam

Sejarah Kota Bukittinggi Pada tahun 1925/1926 KAPTEN BAUER mendirikan benteng diatas Bukit Jirek yang sekarang dikenal dengan Benteng Ford De Kock. Sejarah kehidupan ketatanegaraan pemerintah daerah Kota Bukittinggi sekarang, telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda yaitu dengan dibentuknya Gemeente Ford De Kock yang berubah menjadi Sudsgemeente Ford De Kock yang masuk dalam Staatblad nomor 358 tahun 1938.

Kemudian pada zaman pendudukan Jepang kehidupan pemerintah daerah Bukittinggi tetap berlanjut dengan nama “Bukittinggi Shi Yaku Sho”, sewaktu itu wilayah pemerintahannya lebih luas dari wilayah penjajahan Belanda disamping mencakup Kurai Limo Jorong juga meliputi Nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, Bukit Batabuah (sekarang masuk wilayah Kabupaten Agam)

Walikota Bukittinggi sewaktu pemerintahan Jepang yang terakhir adalah KOLONEL SITO OCHIRO. Pada saat itu Bukittinggi juga merupakan tempat kedudukan Komandemen Militer se Sumatera dimana komandonya bernama SAIKO SIKIKAN KAKKA yaitu Jenderal Kabaya Shi.

Pada Zaman perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, Bukittinggi berperan sebagai Kota Perjuangan dari bulan Desember 1948 sampai bulan Juni 1949 Bukittinggi ditunjuk sebagai Ibukota Republik Indonesia setelah Yogyakarta jatuh. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 1950 menetapkan Bukittinggi sebagai Ibukota Kota Propinsi Sumatera Tengah yang meliputi Sumatera Barat, Jambi dan Riau, dan sebagai Kota Besar berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.

Pada masa setelah Republik Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Kota Bukittinggi menjalani phase perkembangan sebagai berikut :

1. Zaman permulaan kemerdekaan, wilayah administrasi Kota Bukittinggi sebagai wilayah Atandsgemeente Ford De Kock dahulu, Walikota Pertama di angkatlah Bermawi St. Rajo Ameh.
2. Kota Bukittinggi dibawah pengaturan ketetapan Gubernur No.391 tanggal, 9 Juni 1947, yaitu pembentukan Kota Bukittinggi sebagai Kota yang berhak mengatur dirinya sendiri.
3. Kota Besar Bukittinggi di bawah pengaturan UU No. 9 tahun 1956 sebagai UU pembentukan kota-kota besar lainnya dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah dan yo UU Pokok Pemerintahan Daerah No. 22 tahun 1948.
4. Kotapraja Bukittinggi sebagaimana yang diatur dalam UU Pemerintah Daerah No. 1 tahun 1957 yo.Pen.Pres No.5 tahun 1960.
5. Kota Bukittinggi sebagaimana yang diatur UU No. 18 tahun 1965 dan UU lainnya tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil seminar tersebut dan setelah mendapat persetujuan oleh DPRD Kota Bukittinggi dengan Surat Keputusan No. 10/SK/II/DPRD/1988 tanggal, 15 Desember 1988, Pemerintah Daerah dengan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-1777-1988 tanggal, 17 Desember 1988 menetapkan Hari Jadi Bukittinggi tanggal, 22 Desember 1948.

Gambar 2.1
Peta Orientasi Kota Bukittinggi

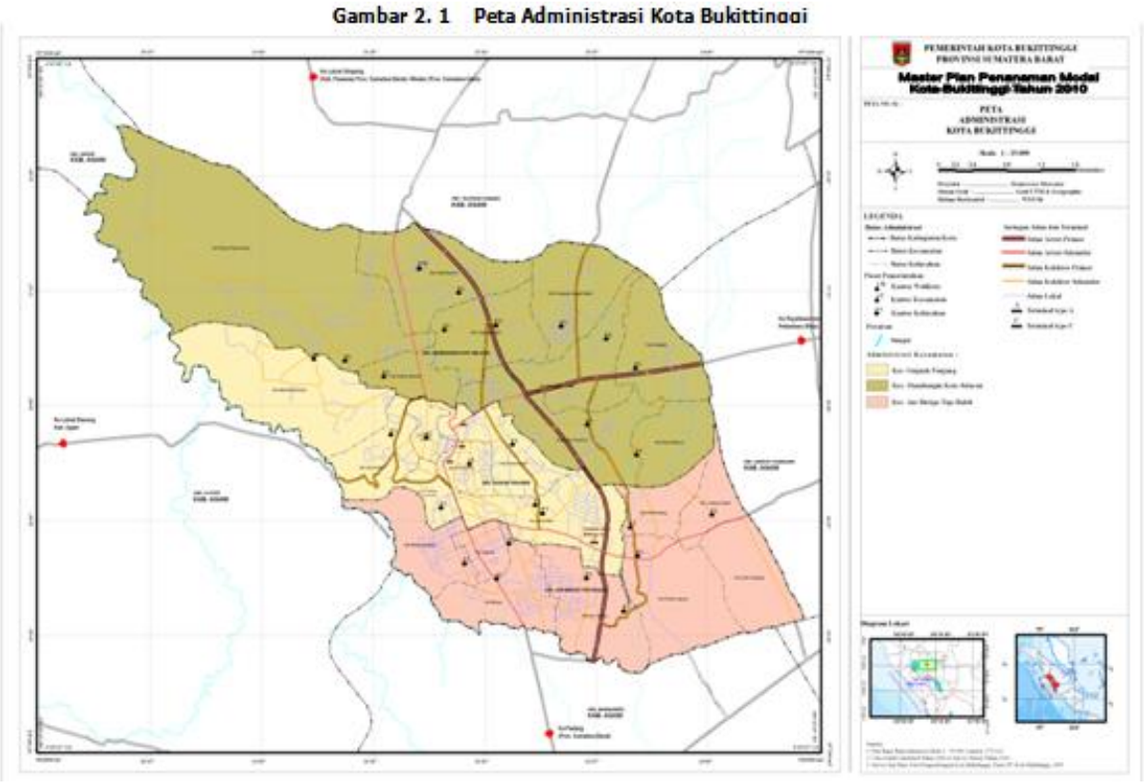

2. Kondisi Topografi

Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 756-960 m di atas permukaan laut. Kemiringan wilayah Kota Bukittinggi dengan lokasi yang berada pada dataran tinggi, sangat bervariasi dan dapat dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit dan terjal. Wilayah yang berada di kawasan ngarai sianok (15,38%), sementara daerah perbukitan (9,64%) berada disekitar ngarai, kawasan Gulai Bancah, Campago Ipuh, Campago Guguak Bulek, Benteng Pasar Atas, serta kubu Tanjung. Lahan yang memiliki kemiringan relatif datar (74,98%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian tengah dan timur.

Dalam sistem fisiografis regional, Kota Bukittinggi secara umum berada pada ketinggian antara 780 - 950 m di atas permukaan laut. Kota Bukittinggi dikelilingi oleh perbukitan di sebelah utara, timur dan barat, serta pegunungan di sebelah selatan dengan topografi wilayah pada umumnya bergelombang. Hal ini juga berakibat terhadap terbatasnya wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemukiman dan kegiatan pembangunan perkotaan

Daya dukung tanah di wilayah berbukit dan curam di sekitar Ngarai ini relatif kurang stabil dan dapat menimbulkan longsor. Berdasarkan kemampuan umum morfologinya, Kota Bukittinggi dan sekitarnya dapat dibedakan menjadi empat satuan morfologi, yaitu :

1. Satuan Morfologi Dataran
   Kemiringan lereng umumnya 10%, dengan ketinggian berkisar antara 865-920 m dpl. Penggunaan lahan umumnya untuk persawahan, kebun/ladang dan permukiman, daerah ini dibentuk oleh endapan vulkanik muda berupa tufa apung.
2. Satuan Morfologi Berelief Halus
   Kemiringan lereng antara 10-15 % dengan ketinggian 850-920 m dpl , umumnya merupakan kebun/ladang belukar, permukiman dan perwasahan. Daerah ini dibentuk oleh batuan tufa apung dan sebagian oleh metamorf.
3. Satuan Morfologi Berelief Kasar
   Umumnya dibentuk oleh batuan tupa apung dengan ketinggian daerah antara 650-900m dpl, medan cukup terjal, kemiringan lebih dari 60% satuan morfologi ini merupakan tebing Ngarai Sianok.
4. Satuan Morfologi Tubuh Gunung Berapi
   Kemiringan medan antar 10 -20% dengan kemiringan tempat 900 m lebih dpl, penggunaan lahan pada satuan ini berupa semak/belukar, dan sebahagian persawahan. Daerah dengan satuan morfologi ini sangat subur, karena dibentuk oleh hasil endapan Gunung Merapi dan Gunung Singgalang berupa lava.

Sedangkan berdasarkan kemiringan lereng, wilayah Kota Bukittinggi sangat bervariasi, dapat dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit, dan terjal. Wilayah yang terjal berada di kawasan Ngarai Sianok (15,38 %), sementara daerah perbukitan (9,64 %) berada di sekitar ngarai, Kawasan Gulai Bancah, Campago Ipuh, Campago Guguk Bulek, Benteng Pasar Atas, serta Kubu Tanjung. Sedangkan wilayah yang memiliki kemiringan relatif datar (74,98 %) terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian Barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian Barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian Tengah dan Timur.

3. Kondisi Geologi

Berdasarkan tinjauan geologi dari peta geologi wilayah Bukittingi dan sekitarnya didominasi oleh kelompok batuan beku yang berasal dari aktifitas gunung Merapi, gunung Singgalang dan gunung Tandikat serta dari kaldera Danau maninjau. Umumnya batuan tersebut bersifat andesitic.

Jenis batuan yang terdapat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya yaitu :

a. Batuan Fillit, kwarsit serta batu lanau metamorf (pTu) bewarna merah sekisan , menunjukan laminasi dan lineasi yang biasanya mendasari bukit-bukit serta merupakan batuan yang paling tua.
b. Batu Gamping hablur(pTls). Berwarna putih sampai keabu-abuan pada singkapan segar dan kelabu kotor pada yang lapuk, besar butir 0,5-5 mm, umumnya pejal dan berongga. Mempunyai ciri khas membentuk punggung-punggungan tajam dan bukit terisolir.
c. Batuan lanau bergradasi ke batuan pasir meta lunak yang sebahagian yang terdiri dari butir-butir kwarsa dalam masa lempungan. Batuan ini dijumpai di daerah Timur Laut Kota Bukittinggi.
d. Kwarsit bersifat kompak yang terdapat di beberapa tempat
e. Batuan granit dijumpai di bagian Barat Bukittinggi, berupa stok berkopensasi antara granit dan diorite kawarsa
f. Andesit dari profit dasit, umunya mengandung horn blende.

Batuan tuft batu apung mempunyai penyebaran sangat luas hampir 65 % kawasan Ngarai Sianok dan merupakan batuan penyusun utama dataran tinggi Agam. Secara umum batuan ini mempunyai sifat fisik rapuh/retas dan mudah tergerus, sehingga daya dukungnya kurang mantap dan mudah runtuh bila mengalami gangguan terutama oleh aliran air hujan dan air tanah. Dengan karakteristik batuan seperti ini, maka pembangunan khususnya di kawasan sekitar Ngarai Sianok perlu secara hati -hati dengan perhitungan yang akurat.

Dari sisi potensi sumber daya alam, di Bukittinggi tidak terdapat kekayaan berupa sumberdaya alam berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namu n Kota Bukittinggi memiliki alam yang indah dan posisi yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat– Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Kondisi yang demikian

menjadikan Kota Bukittinggi potensial sebagai sentra perekonomian tidak hanya di Provinsi Sumatera Barat tetapi mencakup wilayah Sumatera Bagian Tengah.

Struktur dan karakteristik tufa batu apung terdapat sebagai tebing Ngarai Sianok, batuan ini berwarna putih hingga coklat muda. Dalam keadaan kering bersifat cukup kompak dan agak padat, sehingga mampu membentuk tebing yang hampir vertikal setinggi puluhan meter. Di bagian atas tebing sering dijumpai kekar yang terbuka lebar terutama bila ada aliran air yang masuk kedalamnya. Berdasarkan data laboratorium pengembangan bebas (swelling) batuan ini melebihi 70%."Angka ini merupakan salah satu faktor yang menunjukkan mudah terganggunya kestabilan lereng/tebing jika dirembesi oleh air. Dalam keadaan tidak tersingkap atau terganggu, batuan ini mempunyai daya dukung cukup besar lebih dari 3.75 kg/cm2. Sedangkan tanah pelapukan berupa perlapisan lempung, lanau dan lempung pasiran, kurang lulus air dengan orde lebih kecil dari 10-6 cm/dt. Air yang mengalir diatas tanah ini akan lebih banyak mengalir pada permukaan. Selanjutnya dibawah kedalaman 2 meter, biasanya berupa tufa halus sampai kasar, sangat lapuk dengan orde kelulusan berkisar antara 10-3 – 10-4 cm/dt.Berdasarkan data sondir secara umum disimpulkan bahwa pijakan fondasi bangunan dapat diletakkan pada lapisan tufa yang umumnya berada dibawah kedalaman 4 meter.(RTRW Kota Bukittinggi, 2011).

4. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim Kota Bukittinggi termasuk tropis basah dengan Hidrologi dan reaksinya dengan lingkungan Kota Bukittinggi diuraikan sebagai berikut:

a). Daerah Aliran Sungai

Kota Bukittinggi dialiri sungai kecil, yaitu Batang Tambuo di sebelah timur dengan lebar 5-7m, Batang Sianok di sebelah barat dengan lebar 12-15m dan Batang Agam di wilayah Kota dengan lebar 5-7m. Sepanjang perbatasan sebelah barat Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam membentang lembah dalam yang disebut dengan Ngarai Sianok, yang dibawahnya mengalir Sungai Batang Sianok.Kondisi air semakin mempercantik Kota Bukittinggi untuk menjadi Kota kunjungan dengan objek wisata alamnya.

b). Sungai, Danau dan Rawa

Kota Bukittingi dengan luas wilayah yang kecil hanya memiliki sungai kecil sebagai daerah aliran sungai seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Sementara danau dan rawa tidak terdapat di Bukittinggi.

c). Debit Hidrologi

Debit hidrologi yang terjadi di Kota Bukitttinggi merupakan curah hujan, embun yang jatuh di kepermukaan bumi dan intensitas hujan dan lamanya curah hujan yang berlangsung pada saat tertentu yang terjadi secara manual (alami).

5. Kondisi Hidrolologi

Kota Bukittinggi terletak di dalam dua Sitem Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Masang Hulu dan DAS Batang Agam. Batang kedua DAS tersebut (garis pemisah air) mengikuti tebing Ngarai Sianok, bagian Barat dan bermuara di samudera Indonesia sedang di sebelah Timur bagian DAS Batang Agam yang mengalir ke daerah Timur.

Kota Bukittinggi termasuk dalam akuiveler dengan aliran melalui ruang antara butir dan tekanan batuan/tanah. Berdasarkan peta hidrologi lembar Padang, Sumatera Barat dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan, daerah Bukittinggi termasuk daerah dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi, dimana pengambilan air tanah dapat mencapai 5-10 l/dt. Kedalaman muka air tanah bebas dapat mencapai kurang dari 3 m dari muka tanah setempat, akuifer produktif mencapai kedalaman lebih 100 m.Pemunculan air tanah (mata air) yang berasal dari batuan tufa batu apung banyak terdapat di kaki Gunung Singgalang dan Gunung merapi yaitu di daerah dataran Timur laut Kota Bukittinggi, diantaranya mata air sungai Talang (150 l/dt), Sarik (70 l/dt) , Taro (62 l/dt), Galang (50 l/dt) dan mata air Bulan Gadang yang memiliki debit 150 l/dt.

Daerah sungai yang terdapat di Kota Bukittinggi merupakan sungai-sungai dengan lebar 6 m hingga 12 m serta sungai-sungai yang relatif lebih kecil. Sungai-sungai /batang yang mengalir yaitu :

a. Di wilayah Kota Bukittinggi
   - Batang Tambuo dengan lebar sungai 7 m.
   - Batang Agam dengan lebar sungai 6 m
   - Batang Sianok dengan lebar 12 m
b. Di daerah sekitar Kota Bukittinggi
   - Sungai Batang Air Katiak
   - Sungai Batang Serasah
   - Sungai Batang Agam

6. Penggunaan Lahan

Dari 25,239 km2 luas Kota Bukittinggi, 27,38% merupakan permukiman, 26,02% untuk lahan sawah, dan 11,20% penggunaannya untuk ladang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang, pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

a). Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusia.

b). Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 32 Tahun 1990 tentang tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, maka sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah:

1. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim,tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
2. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tepe ekosistem, dan keunikan alam.

Gambaran Rencana pola ruang di Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas-Ha)

Pola Ruang	ABTB	GP	MKS	Total
Kawasan Lindung				
(1) Perlindungan Setempat				
Kawasan Ngarai Sianok	58.59	83.25	124.47	266.32
(2) Ruang Terbuka Hijau				
RTH Fungsi Khusus	13.87	12.96	67.19	94.02
Sempadan Ngarai	28.58	65.26	147.67	241.51
RTH Taman Kota	0	82.02	209.08	291.1
Sub Total	101.04	243.49	548.41	892.95
Kawasan Budidaya				
(1) Kawasan Perumahan				
Perumahan Kepadatan Tinggi	106.51	113.99	64.36	284.87
Perumahan Kepadatan Rendah	250.73	113.99	64.36	225.98
(2) Perkantoran	20.45	2.65	98.69	256.01
(3) Perdagangan dan Jasa	51.01	93.84	172.05	316.9
(4) Kawasan Peruntukan Lainnnya				
Pelayanan Umum (sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan)	32.85	37.47	8.8	79.12
Pelayanan Umum (transportasi regional)	0.68	11.01	0	11.69
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1.66	0.07	2.61	4.35
Sub Total	530.5	433.07	741.46	1636.16
Total Kota Bukittinggi	631.54	676.56	1289.87	2529.11

Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2010

Berdasarkan penggolongan tersebut, maka di Kota Bukittinggi terdapat beberapa kawasan yang termasuk dalam kawasan dengan fungsi lindung, antara lain:

(1) Kawasan perlindungan setempat yaitu kawasan Ngarai Sianok dengan luasan sebesar 262,59 Ha,
(2) Ruang terbuka hijau, yang terdiri dari RTH jalur hijau dan pejalan kaki, RTH fungsi tertentu, RTH Taman Kota dan RTH Hutan Kota dengan total luasnya adalah 418,61 Ha.
(3) Kawasan cagar budaya.

Terkait dengan kawasan hutan kota, lebih diarahkan pada area perbukitan yang masih memungkinkan. Untuk kawasan budidaya, terdapat kawasan perumahan yang secara implisit tetap ada sebagai kawasan budidaya dengan fungsi perumahan dan kawasan sawah irigasi teknis yang mempunyai hamparan yang luas dengan tekanan pembangunan yang tidak terlalu tinggi.

Tabel di atas memperlihatkan, bahwa wilayah Kota Bukittinggi yang relatif kecil sudah dimanfaatkan dan dibangun untuk menunjang fungsi kota. Kondisi ini menunjukkan, bahwa lahan yang tersedia sangat terbatas, dan potensi permasalahan yang disebabkan oleh keterbatasan lahan juga sangat besar.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Bukittinggi tidak memiliki kekayaan berupa sumberdaya alam berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun Kota Bukittinggi memilki alam yang indah dan posisi yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat-Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Kondisi yang demikian menjadikan Kota Bukittinggi potensial sebagai sentra perekonomian tidak hanya Provinsi Sumatera Barat tetapi mencakup wilayah Sumatera Bagian Tengah. Selain itu, karakteristik kemiringan lereng Kota Bukittinggi yang sebagian wilayahnya merupakan bukit dan lembah (mencapai 25% dari kota) menjadi penyebab terbatasnya daya dukung pengembangan wilayah Kota Bukittinggi.

Keterbatasan Kota Bukittinggi merupakan suatu peluang bagi Kota ini untuk lebih mengembangkan ekonominya disektor perdagangan dan jasa, yang salah satu sektor unggulannya yaitu kepariwisataan. Objek wisata yang ada saat ini yang telah ada saat ini antara lain, seperti Jam Gadang, Istana Bung Hatta, Rumah Adat Baanjuang, Mesjid Jami', panorama, lobang jepang, benteng fort de kock,kebun binatang ,dll.

Permasalahan kepariwisataan saat ini adalah minimnya daya tarik objek wisata tersebut, atraksi yang masih kurang untuk menarik peminat para wisatawan. Tidak adanya kegiatan–kegiatan atau program–program baru yang dapat menambah nilai daya tarik objek wisata ini. Atraksi budaya salah satu alternatif untuk meningkatkan dan menambah daya tarik wisata ini, seperti penampilan tari-tarian tradisional dipelataran Jam Gadang, serta

pelaksanaan event-event daerah dikawasan objek wisata yang dapat menjadi sarana promosi kepariwisataan secara tidak langsung.

Untuk Pengembangan kepariwisataan di Kota Bukittinggi harus dilakukan pengembangan dari segi fisik dan non-fisik. Dari segi fisik yaitu dengan pembangunan infrastruktur pendukung seperti sarana prasana air bersih, air limbah, persampahan, parkir dan pengembangan kawasan pedestrian terutama di kawasan Jam Gadang yang merupakan icon Kota Bukittinggi. Pengembangan kawasan pedestrian ini sangat mendukung terhadap kepariwisataan karena hal ini didukung oleh kondisi alam yang indah dan udaranya yang sejuk menyebabkan para pengunjung akan betah berjalan kaki menikmati objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi.

Sedangkan dari segi non fisik, perlu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengembangan baik dari segi regulasi, peningkatan Sumber Daya Manusia, penambahan daya tarik wisata serta penambahan objek wisata baru.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi alam dan lingkungan Kota Bukittinggi, maka wilayah kota Bukittinggi termasuk daerah/kawasan rawan bencana berupa gempa bumi dan longsor. Kawasan yang rawan bencana longsor

A. Wilayah Rawan Bencana Alam

Berdasarkan jenis bencana alamnya, zona kerawanan bencana di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Zona rawan bencana gempa bumi. Zona Rawan Bencana Gempa Bumi pada umumnya dibagi menjadi 3 daerah zona yaitu zona rawan rendah, zona rawan menengah dan zona rawan tinggi. Pembagian zona daerah rawan ini didasarkan kepada:
   - Zona Rawan Rendah biasanya didasari oleh batuan berumur tersier yang relatif kompak, namun masih berpotensi terjadi longsoran apabila terjadi gempa.
   - Zona Rawan Menengah, biasanya didasari oleh endapan tufa, pasir, lempung dan lanau hasil pengendapan material gunung api yang relatif kompak.
   - Zona Rawan Tinggi, biasanya didasari oleh endapan aluvium, rawa basah dan daerah aliran sungai dengan potensi terjadi pelulukan (*liquefaction*) apabila terjadi gempa.

2. Zona Kerawanan Gerakan Tanah. Tingkat kerentanan gerakan tanah dapat dibagi atas empat tingkat yaitu : (1) Sangat rendah, gerakan tanah jarang terjadi. (2) Rendah, gerakan tanah bisa terjadi bila ada gangguan. (3) Menengah, gerakan tanah berpotensi terjadi bila curah hujan tinggi dan ada gangguan pada lereng. (4) Tinggi, sering terjadi gerakan tanah bila musim hujan dan gerakan tanah lama aktif kembali.

Kota Bukittinggi terdiri perbukitan dengan kemiringan yang beragam. Pembagian zona kerentanan gerakan tanah ini didasarkan dari kemiringan lereng sehingga dapat dibagi menjadi 4 zona yaitu :

1. Zona Kerentanan Amat Rendah, merupakan zona dataran rendah dengan kemiringan lereng < 3%, sepanjang lembah Sungai Agam.
2. Zona Kerentanan Rendah, merupakan daerah dengan dataran dengan litologi endapan Tufa Maninjau dengan kemiringan antara 3-15%,
3. Zona Kerentanan Menengah, merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 15-30% dengan litologi endapan gunung api yang relatif kompak namun dekat dengan sumber gempa atau terkena struktur geologi.
4. Zona Kerentanan Tinggi, mempunyai kemiringan lebih besar dari 30% didasari oleh litologi Tufa sepanjang Ngarai Sianok dengan lereng terjal, dekat dengan sumber gempa bumi dan terkena struktur geologi.

B. Bencana yang timbul akibat kesalahan manusia

Untuk bencana yang timbul akibat kesalahan manusia, teridentifikasi sebagai berikut:

1. Daerah rawan kecelakaan lalu lintas (karena daerahnya yang padat)
2. Daerah rawan kebakaran

Diwilayah Kecamatan Guguk Panjang yang mempunyai 3 pasar dan penduduknya paling padat merupakan Kecamatan yang kejadian bencana paling banyak.

2.1.4. Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memilki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memilki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Kota Bukittinggi terdiri atas 3 kecamatan dengan 24 kelurahan. Dengan jumlah 3 kecamatan ini penduduk Kota Bukittinggi tahun 2015 berjumlah 123.608. jiwa .

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Jenis Kelamin

NO.	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)			LAJU PERTUMBUHAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.	2010	56.224	55.768	112.010	1,93
2.	2011	54.922	58.625	113.547	1,93
3.	2012	55.276	59.117	114.393	1,93
4.	2013	57.261	60.999	118.260	1,88
5.	2014	62.025	61.385	123.410	1,88
6	2015	62.094	61.514	123.608	1,77

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka, 2016

Penduduk Kota Bukittinggi dapat dianalisis menurut struktur umurnya, sebagai informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan resiko dan kebutuhan yang berbeda-beda pada setiap kelompok. Jumlah penduduk usia kerja (25-55) tahun di Kota Bukittinggi sebanyak 46.861 jiwa (39,62%), dari total jumlah penduduk Kota Bukittinggi, sedangkan usia sekolah berjumlah 46.250 jiwa (39,115%). Jadi dari uraian di atas bahwa usia penduduk yang lebih menonjol adalah usia produktif yaitu usia 25- 55 tahun, artinya penduduk usia produktif relatif besar yang merupakan modal dasar bagi pembangunan. Jumlah penduduk yang akan mendapat pendidikan dasar dan menengah (5-10) tahun mendatang akan meningkat sehingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah harus dipersiapkan.

Tabel 2.4
Persentase Penyebaran Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Guguk Panjang	37,41	37,21	37,26	36,75	36,75	36,29
2.	Mandiangin Koto Selayan	40,36	40,56	40,50	40,98	40,98	41,40
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	22,23	22,23	22,24	22,27	22,27	22,31
	Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber BPS Tahun 2016,

Sebaran penduduk di Kota Bukittinggi terbesar adalah di Kecamatan Mandiangin Kota Selayan, yaitu 40,98% dari seluruh penduduk Kota Bukittinggi, diikuti oleh Kecamatan Guguk Panjang, yaitu 36,75% dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebesar 22,27%. Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi secara umum semakin lama semakin naik, ini dapat dibuktikan , dimana pada tahun 2011 adalah 4.500 Km^2 , Tahun 2012 sebesar 4.533 Km^2, dan pada Tahun 2013 sebesar 4.607 Km^2.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama lima tahun lalu. Kondisi aspek kesejahteraan masyarakat tersebut mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode tersebut adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang baik merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Kinerja kesejahteraan ekonomi masyarakat kota Bukittinggi dapat dilihat dari:

Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi yaitu pertumbuhan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam satu tahun di Kota Bukittinggi;

1) Laju inflasi Kota Bukittinggi yaitu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang di Kota Bukittinggi.

2) PDRB per kapita Kota Bukittinggi merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB perkapita dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, yang mengambarkan rata-rata pendapatan setiap tahunnya di Kota Bukittinggi.

Sementara manfaat dari kesejahteraan tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Untuk mengukur pemerataan ekonomi dilihat dari indeks gini/koefisien gini yang menilai tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Bukittinggi.

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Bukittinggi selama periode tahun 2010-2015 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi dan PDRB per kapita. Sementara untuk kinerja pemerataan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2010-2014 dilihat dari indikator Indeks Gini. Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut:

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Bukittinggi Tahun 2011 s.d. 2015

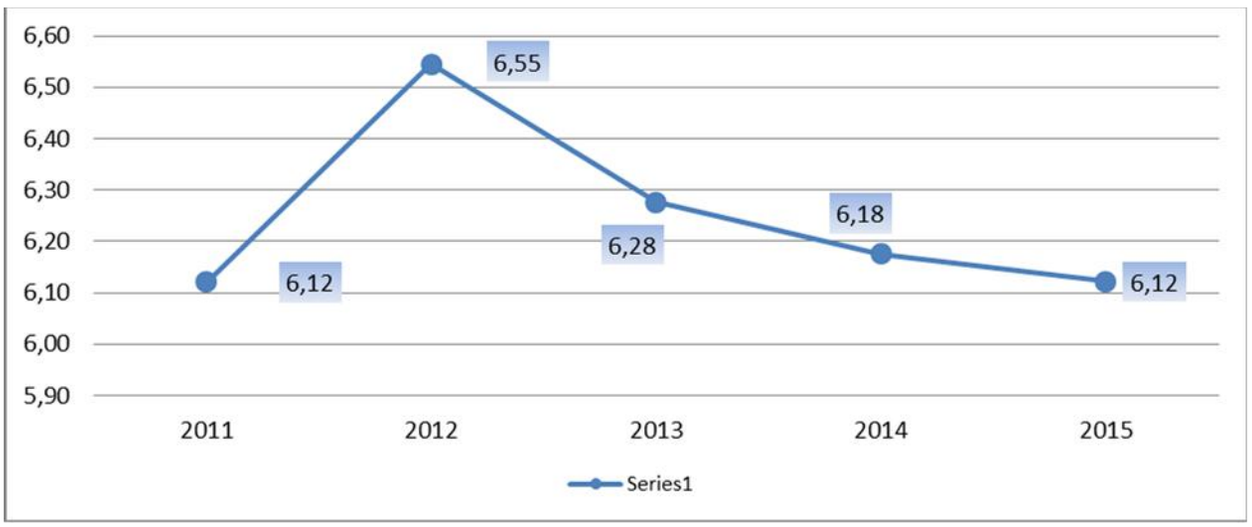

Sumber: Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2011-2014 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016 (diolah)

Perekonomian Kota Bukittinggi periode 2010 - 2012 menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan, dan sebesar 6,12% pada tahun 2011 dan 6,55% pada tahun 2012. Sementara pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 tetapi masih relatif tinggi, yaitu mencapai 6,28%, pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi turun menjadi 6,18%, namun masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 5,85%, namun pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi turun 0,06%, sehingga pertumbuhan ekonomi ppada tahun 2015 menjadi 6,18% Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2012 relatif lebih baik dan pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam 4 (empat) tahun terakhir.

Berdasarkan data dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2011 s.d. 2015), hampir semua kategori tumbuh setiap tahunnya, kecuali kategori Pertambangan dan Penggalian tidak mengalami pertumbuhan dan cenderung menurun pada empat tahun terakhir ini, hal ini disebabkan bahwa potensi Pertambangan dan Penggalian semakin berkurang.

Tabel. 2.5

Nilai Masing-masing Kategori dalam PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 s.d 2015

No.	LAPANGAN USAHA	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	64.905,5	64.519,4	63.085,4	62.852,2	65.029,8	66.735,5
2	Pertambangan dan Penggalian	134,3	132,4	130,4	128,7	126,5	125,8
3	Industri Pengolahan	304.435,7	315.644,5	333.237,4	345.281,4	358.082,8	369.144,1
4	Pengadaan Listrik dan Gas	26.018,6	27.626,3	30.068,7	31.017,9	33.471,3	34.132,1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.941,4	6.956,6	7.064,5	7.291,2	7.318,0	7.656,8
6	Konstruksi	236.041,1	241.729,7	259.393,8	282.104,1	295.207,1	312.926,8
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.147.706,3	1.229.884,2	1.318.472,0	1.397.993,1	1.501.989,4	1.598.470,2

No.	LAPANGAN USAHA	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
8	Transportasi dan Pergudangan	403.814,9	420.251,2	445.233,5	476.307,2	507.448,1	545.167,3
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	140.902,6	154.810,0	173.152,4	188.882,3	203.479,6	220.500,5
10	Informasi dan Komunikasi	257.483,0	279.755,2	310.289,3	326.688,8	348.117,7	376.058,6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	208.112,6	222.494,8	238.504,8	260.162,3	277.515,6	288.410,5
12	Real Estat	135.122,8	139.347,0	143.173,2	150.936,2	159.133,6	167.519,9
13	Jasa Perusahaan	27.165,5	28.593,3	29.669,8	30.836,4	32.074,9	33.461,3
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	237.043,2	257.896,3	259.464,7	267.142,7	270.863,5	281.454,2
15	Jasa Pendidikan	170.392,1	180.976,3	192.306,6	209.062,2	222.940,3	239.477,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101.296,0	108.595,5	119.994,6	129.345,2	139.852,9	151.302,3

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2010-2015 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016

Pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terjadi fluktuatif yaitu penurunan pada tahun 2012 dan tahun 2013, namun pada tahun 2015 tumbuh kembali. Tumbuhnya kategori ini didongkrak oleh sub kategori pertanian dan perikanan sementara sub kategori kehutanan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya.

Gambar 2.3
Pertumbuhan Masing-Masing Kategori Atas Dasar Harga Konstan
Kota Bukittinggi Tahun 2010 s.d. 2015

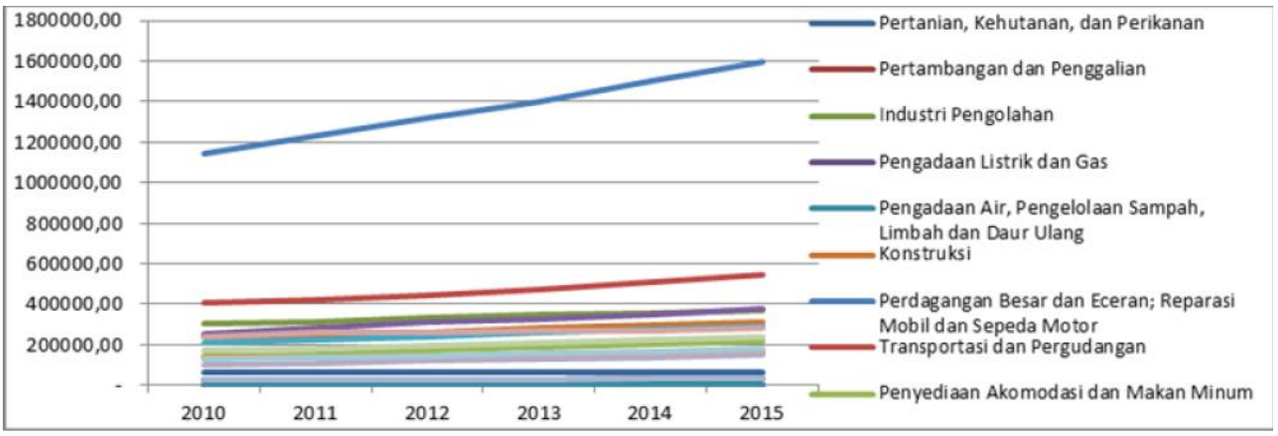

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2011-2014 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016 (diolah)

Tiga kategori yang mempunyai kontribusi terbesar dalam PDRB Kota Bukittinggi adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (33,64%), kategori Transportasi dan Pergudangan (10,90%) dan kategori Industri Pengolahan (6,86).

Tabel 2.6
Nilai dan Kontribusi Masing-Masing Kategori dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 s.d 2015

NO	Lapangan Usaha	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	64.905,5	1,80	69.327,5	1,72	70.993,9	1,58	74.648,8	1,49	82.179,0	1,46	87.489,7	1,43
2	Pertambangan dan Penggalian	134,3	0,0037	139,5	0,0035	146,0	0,0033	155,5	0,0031	180,2	0,0032	194,9	0,0032
3	Industri Pengolahan	304.435,7	8,46	337.594,1	8,39	367.933,4	8,20	389.352,9	7,76	409.898,6	7,28	419.403,1	6,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	26.018,6	0,72	25.072,6	0,62	24.047,2	0,54	22.630,7	0,45	28.734,5	0,51	38.839,9	0,63
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.941,4	0,19	7.036,0	0,17	7.261,0	0,16	7.652,1	0,15	8.211,8	0,15	9.144,4	0,15
6	Konstruksi	236.041,1	6,56	256.821,8	6,38	288.407,2	6,43	330.562,4	6,59	353.907,5	6,29	388.141,2	6,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.147.706,3	31,89	1.302.724,6	32,36	1.453.493,9	32,39	1.617.181,0	32,23	1.843.230,9	32,75	2.058.203,2	33,64
8	Transportasi dan Pergudangan	403.814,9	11,22	434.328,6	10,79	470.869,1	10,49	541.005,3	10,78	617.352,4	10,97	666.712,5	10,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	140.902,6	3,92	166.186,0	4,13	199.034,8	4,43	237.772,9	4,74	277.747,5	4,94	334.075,1	5,46
10	Informasi dan Komunikasi	257.483,0	7,15	284.395,7	7,06	322.384,1	7,18	331.846,6	6,61	371.189,4	6,60	366.362,9	5,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	208.112,6	5,78	235.902,5	5,86	266.976,3	5,95	308.688,0	6,15	347.132,0	6,17	375.008,6	6,13
12	Real Estat	135.122,8	3,75	146.662,7	3,64	157.439,3	3,51	176.445,0	3,52	197.955,1	3,52	219.265,8	3,58
13	Jasa Perusahaan	27.165,5	0,75	29.453,9	0,73	32.248,3	0,72	34.791,1	0,69	37.922,9	0,67	41.544,0	0,68
14	Administrasi Pemerintahan,	237.043,2	6,59	272.521,7	6,77	310.039,9	6,91	339.609,2	6,77	364.380,6	6,47	360.102,4	5,89

NO	Lapangan Usaha	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib												
15	Jasa Pendidikan	170.392,1	4,73	194.524,3	4,83	215.446,8	4,80	257.329,0	5,13	295.104,7	5,24	324.925,9	5,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101.296,0	2,81	115.953,1	2,88	137.423,3	3,06	156.455,6	3,12	175.148,8	3,11	189.125,9	3,09
17	Jasa lainnya	131.281,3	3,65	146.986,7	3,65	163.734,5	3,65	192.217,9	3,83	217.786,1	3,87	238.891,1	3,91
	PDRB	3.598.796,9	100	4.025.631,3	100	4.487.879,0	100	5.018.344,0	100	5.628.061,9	100	6.117.430,8	100

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2010-2015 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016 (diolah)

PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2015 menunjukkan,bahwa struktur perekonomian Kota Bukittinggi yang terbesar berada pada kelompok kategori tersier [kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (33,64 %), kategori Transportasi dan Pergudangan (10,90 %), kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (5,46 %) dan kategori Informasi dan Komunikasi (6,43 %), kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (6,13 %), kategori Real Estat (3,58 %), kategori Jasa Perusahaan (0,68 %), kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (5,89 %), kategori Jasa Pendidikan (5,31 %), kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (3,09 %) dan kategori Jasa lainnya (3,91 %)]. Dimana kontribusi kategori tersier pada PDRB Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah sebesar 84,58 %, selebihnya adalah kelompok kategori primer sebesar 1,43 % [kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,43 %) dan kategori pertambangan dan penggalian (0,003%)] dan kelompok kategori sekunder sebesar 13,99% [kategori industri pengolahan (6,86%), kategori Pengadaan Listrik dan Gas (0,63%) dan kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,15 %), dan kategori Konstruksi (6,34%)] sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.4
Kontribusi Kategori PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Bukittinggi Tahun 2015

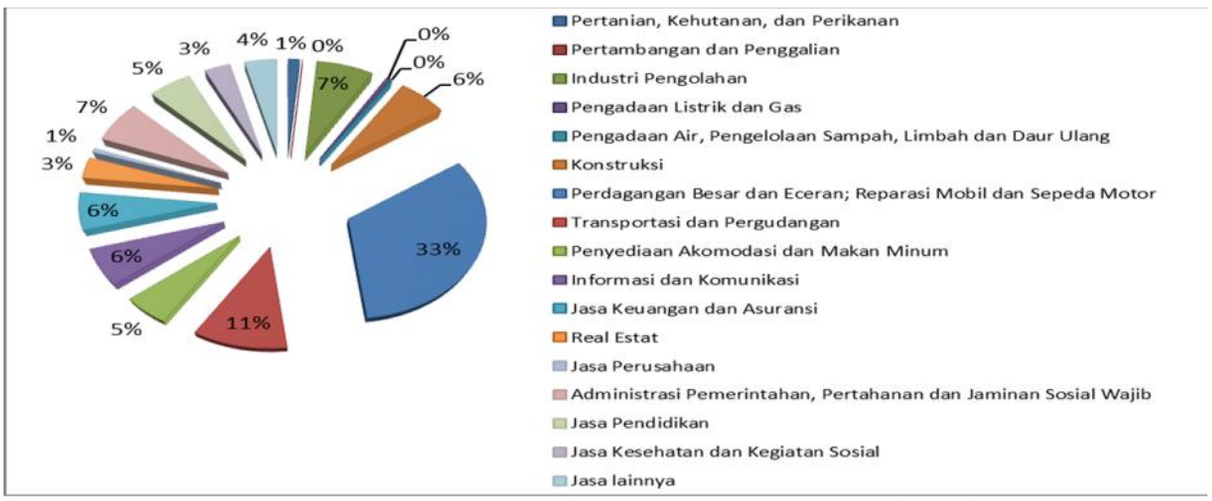

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2011-2014 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016 (diolah)

Perkembangan Kontribusi kategori dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi terhadap total PDRB terlihat bahwa terjadi pergeseran antar kategori dalam perekonomian Kota Bukittinggi.

Pergeseran kategori-kategori tersebut terjadi pada kelompok kategori primer dan kelompok kategori sekunder, dimana dalam lima tahun terakhir ini kontribusi kedua kelompok kategori tersebut dalam PDRB Kota Bukittinggi terjadi penurunan dan sebaliknya terjadi peningkat kontribusi kelompok kategori tersier dalam PDRB Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir ini. Kebijakan perekonomian Kota Bukittinggi ke depan perlu memperhatikan pergeseran struktur perekonomian tersebut, agar kebijakan pembangunan ekonomi dapat serasi dengan realita perekonomian yang berkembang di tengah masyarakat.

Tabel 2.7
Perkembangan Kontribusi Kategori dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 s.d 2015

NO	Kategori	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,80	1,80	1,72	1,69	1,58	1,55	1,49	1,45	1,46	1,42	1,43	1,37
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0037	0,00	0,0035	0,00	0,0033	0,00	0,0031	0,00	0,0032	0,00	0,0032	0,00
3	Industri Pengolahan	8,46	8,46	8,39	8,26	8,20	8,19	7,76	7,98	7,28	7,80	6,86	7,58
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,72	0,72	0,62	0,72	0,54	0,74	0,45	0,72	0,51	0,73	0,63	0,70
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,19	0,17	0,18	0,16	0,17	0,15	0,17	0,15	0,16	0,15	0,16
6	Konstruksi	6,56	6,56	6,38	6,33	6,43	6,37	6,59	6,52	6,29	6,43	6,34	6,42
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31,89	31,89	32,36	32,20	32,39	32,40	32,23	32,33	32,75	32,71	33,64	32,81
8	Transportasi dan Pergudangan	11,22	11,22	10,79	11,00	10,49	10,94	10,78	11,01	10,97	11,05	10,90	11,19
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,92	3,92	4,13	4,05	4,43	4,26	4,74	4,37	4,94	4,43	5,46	4,53
10	Informasi dan Komunikasi	7,15	7,15	7,06	7,33	7,18	7,63	6,61	7,55	6,60	7,58	5,99	7,72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,78	5,78	5,86	5,83	5,95	5,86	6,15	6,02	6,17	6,04	6,13	5,92
12	Real Estat	3,75	3,75	3,64	3,65	3,51	3,52	3,52	3,49	3,52	3,47	3,58	3,44
13	Jasa Perusahaan	0,75	0,75	0,73	0,75	0,72	0,73	0,69	0,71	0,67	0,70	0,68	0,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	6,59	6,59	6,77	6,75	6,91	6,38	6,77	6,18	6,47	5,90	5,89	5,78

NO	Kategori	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Sosial Wajib												
15	Jasa Pendidikan	4,73	4,73	4,83	4,74	4,80	4,73	5,13	4,83	5,24	4,86	5,31	4,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,81	2,81	2,88	2,84	3,06	2,95	3,12	2,99	3,11	3,05	3,09	3,11
17	Jasa lainnya	3,65	3,65	3,65	3,66	3,65	3,58	3,83	3,66	3,87	3,68	3,91	3,69
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2010-2015 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016 (diolah)

Pertumbuhan kontribusi kategori lapangan usaha memberikan gambaran terjadinya pergerakan kontribusi kategori atau terjadinya perubahan struktur perekonomian di Kota Bukittinggi dalam lima tahun terakhir ini. Kontribusi kategori yang tumbuh adalah kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 39,5%, kategori Jasa Pendidikan sebesar 12,2 %, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,8 %, kategori Jasa lainnya sebesar 7,0 %, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,0 %, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,5 %.

Tabel 2.8
Pertumbuhan Kontribusi Kategori PDRB Kota Bukittinggi
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2010 s.d. 2015

NO	Kategori	Pertumbuhan %
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-20,7
2	Pertambangan dan Penggalian	-14,6
3	Industri Pengolahan	-19,0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-12,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-22,5
6	Konstruksi	-3,3
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,5
8	Transportasi dan Pergudangan	-2,9
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39,5
10	Informasi dan Komunikasi	-16,3
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,0
12	Real Estat	-4,5
13	Jasa Perusahaan	-10,0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-10,6
15	Jasa Pendidikan	12,2

NO	Kategori	Pertumbuhan %
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,8
17	Jasa lainnya	7,0
	PDRB	-

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2010-2015 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016 (diolah)

Di lain sisi terjadi penurunan kontribusi kategori dalam lima tahun terakhir ini, yaitu kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar –22,2%, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar -20,7%, Industri Pengolahan sebesar -19,0%, Informasi dan Komunikasi sebesar -16,3%, Pertambangan dan Penggalian sebesar -14,6%, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -12,5%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -10,6%, Jasa Perusahaan sebesar -10,0, Real Estat sebesar -4,5%, Konstruksi sebesar -3,3% dan kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar -2,9%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pergeseran struktur perekonomian Kota Bukittinggi bergerak ke arah kelompok kategori tersier, karena pada kelompok primer dan sekunder terjadi penurunan kontribusi.

Pertumbuhan kategori PDRB atas harga dasar konstan dari tahun 2010-2015 yang tertinggi adalah kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 56%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 49%, informasi dan komunikasi sebesar 46%, Jasa pendidikan 41%, jasa keuangan dan asuransi sebesar 39%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 39%.

Gambar 2.5
Pertumbuhan Kategori PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Bukittinggi Tahun 2010 s.d.2015

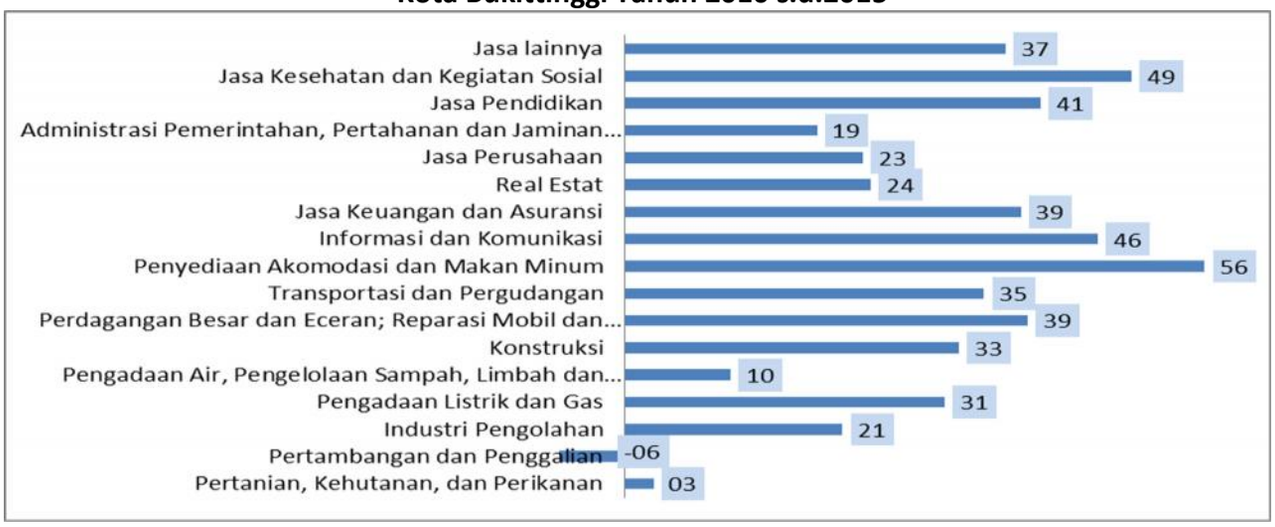

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2011-2014 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016 (diolah)

Kategori Pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 31%, Jasa lainnya sebesar 37%, transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 35%, konstruksi sebesar 33%, jasa perusahaan sebesar 23%, real estat sebesar 24%, industri pengolahan sebesar 21%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19%, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 10%, dan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 0,3%. Khusus kategori pertambangan dan penggalian terjadi penurunan sebesar -0,6, hal ini diakibat oleh potensi untuk usaha galian sudah sangat terbatas sekali dan cenderung berkurang setiap tahunnya di Kota Bukittinggi.

B. Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat

Laju inflasi Kota Bukittinggi lima tahun terakhir berfluktuasi mulai dari tahun 2010 berada pada angka 8,75%, pada tahun 2011 inflasi Kota Bukittinggi turun menjadi 5,07% begitu juga pada tahun 2012 inflasi turun menjadi 4,01%. Sementara tahun 2013 laju inflasi meningkat, yaitu mencapai 7,43% diikuti kenaikannya pada 2014 meningkat cukup tinggi yaitu mencapai 9,24%. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi cukup efektif, sehingga pada tahun 2015 inflasi di Kota Bukittinggi turun menjadi 2,84%. Rata-rata inflasi di Kota Bukittinggi selama enam tahun terakhir ini adalah sebesar 6,22%.

Tabel 2.9
Nilai inflasi rata-rata Kota Bukittinggi
Tahun 2010 s.d 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi (%)	8,75	5,07	4,01	7,43	9,24	2,84	6,22

Sumber: Stada dan Berita Resmi Statistik

Bukittinggi termasuk salah satu Kota di Sumatera Barat setelah Padang yang dijadikan barometer inflasi nasional. Inflasi Bukittinggi setiap tahunnya masih berada di bawah rata – rata nasional, kecuali tahun 2014.

Gambar 2.6
Gerak Laju Inflasi Kota Bukittinggi
Tahun 2010 s.d. 2015

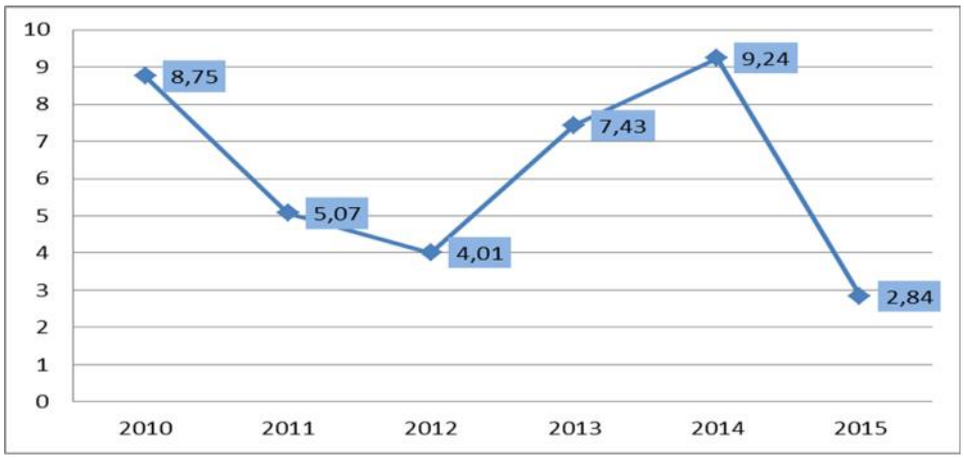

Komoditi yang berkontribusi terhadap inflasi Kota Bukittinggi setiap tahunnya berubah-ubah. Kelompok komoditi yang relatif menyumbang inflasi cukup tinggi adalah kelompok bahan makanan dan kelompok sandang, Fluktuasi laju inflasi ini antara lain dipengaruhi oleh faktor internal berupa kebijakan pemerintah berupa kenaikan harga BBM, penurunan harga BBM dan ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat.

C. PDRB Per Kapita

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB, diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita. Selama periode tahun 2010-2015 PDRB Perkapita Kota Bukittinggi mengalami pertumbuhan yang positif.

Gambar 2.7
Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi
Tahun 2010 s.d. 2015

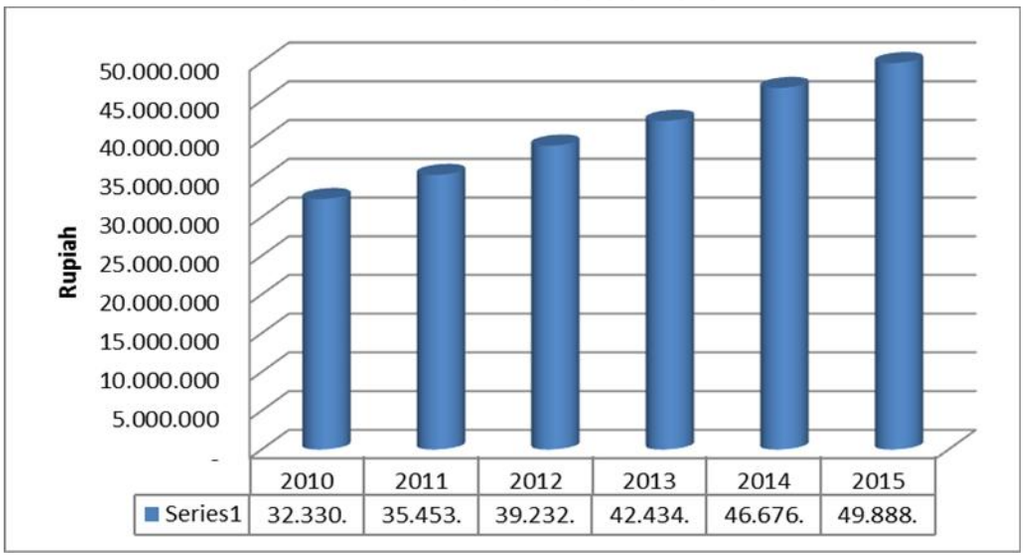

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2011-2014 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016

PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp.32.330.718,00 dan meningkat pada tahun 2011 menjadi Rp.35.453.436,00 (naik 11,9%), pada tahun 2012 juga terjadi peningkat dimana PDRB perkapita Kota Bukittinggi menjadi Rp.39.232.112,00 (naik 11,5%) dan pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp.42.434.838,00 (naik 11,8%) serta pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.46.676.741,00 (naik 12,1%) dan pada tahun 2015 mencapai Rp.49.888.933,00 (naik 8,7%). Secara umum dapat dikatakan bahwa PDRB Perkapita Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir ini terjadi peningkatan, rata-rata peningkatan tersebut sebesar 11,2%.

Tabel 2.10
PDRB Perkapita Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai PDRB (dalam juta Rp)	3.598.797	4.025.631	4.487.879	5.018.344	5.628.062	6.117.431
Jumlah Penduduk (jiwa)	111.312	113.547	114.393	118.260	120.575	122.621
PDRB perkapita (Rp/jiwa)	32.330.718	35.453.436	39.232.112	42.434.838	46.676.741	49.888.933

Sumber: BDA dan PDRB Kota Bukittinggi 2010-2015

Jika dibandingkan dengan provinsi, pendapatan per kapita (atas dasar harga berlaku) Kota Bukittinggi berada di atas level Provinsi, khususnya di Tahun 2015 di tingkat provinsi PDRB Perkapita berada pada angka 34,41 juta rupiah sementara Kota Bukittinggi sudah mencapai 49,8 juta rupiah.

D. Indeks Gini/Koefiesien Gini

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan di Kota Bukittinggi adalah dengan melihat koefisien Gini (Gini Ratio). Indeks gini Kota Bukittinggi pada tahun 2010 sebesar 0,29 yang artinya Kota Bukittinggi termasuk dalam daerah yang mempunyai ketimpangan rendah. Pada tahun 2011 indeks gini Kota Bukittinggi berada pada angka 0,33 yang artinya Kota Bukittinggi termasuk dalam daerah yang mempunyai ketimpangan sedang. Sementara pada tahun 2012 indeks gini Kota Bukittinggi sebesar 0,31, ini berarti Kota Bukittinggi masih termasuk dalam daerah yang mempunyai ketimpangan sedang, jika dibandingkan dengan indeks gini tahun 2011, maka terjadi peningkatan pemerataan.

Indeks Gini Kota Bukittinggi pada tahun 2013 sebesar 0,37 dan pada tahun 2014 indeks gini Kota Bukittinggi sebesar 0,34, hal ini menggambarkan bahwa Kota Bukittinggi masih termasuk dalam daerah yang mempunyai ketimpangan sedang. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, maka arah pemerataan pendapatan penduduk Kota Bukittinggi pemerataan pendapatan penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2014 semakin baik.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga kesehatan dan pendidikan. Dalam subbab ini akan diuraikan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial yang dilakukan terhadap indikator yang relevan.

A. Aspek Pendidikan

Untuk mengukur keberhasilan kesejahteraan sosial dari segi aspek pendidikan terdapat beberapa indikator, antara lain angka melek huruf, angka harapan sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, dan angka rata rata lama sekolah.

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek pendidikan selama enam tahun terakhir dari 2010 sampai dengan 2015.

1. Angka Melek Huruf

Indikator untuk mengukur IPM bidang pendidikan adalah dengan mengukur Angka Melek Huruf. Dari jumlah sekolah yang tersedia, maka penduduk Bukittinggi usia sekolah dapat ditampung semuanya. Salah satu alat ukur atau indikator tingkat kecerdasan siswa didik adalah sejauh maka kemampuan mereka untuk dapat membaca dan menulis, atau yang lebih dikenal dengan angka melek huruf. Angka melek huruf ini juga merupakan proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca. Semakin tinggi Angka Melek Huruf, membuktikan semakin tinggi mutu pendidikan di daerah tersebut.

Sesuai dengan data yang diperoleh, angka melek huruf di Kota Bukittinggi mencapai 99,94 %, Ini artinya hampir 100 persen penduduk Bukittinggi di usia sekolah telah mampu tulis baca. Data data Angka Melek Huruf ini, dapat juga digunakan dalam mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media. serta mampu berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Perkembangan Angka Melek Huruf dari tahun ke tahun di Kota Bukittinggi dari tahun ketahun mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidak signifikan. Tahun 2011 angka melek huruf 98,96, dan mengalami kenaikan di tahun 2012, 2013, yakni 99,95 dan 99,94 hingga tahun 2015.

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 s/d 2015
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka melek huruf	99,79	98,96	99,95	99.94	99.94	99.94

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah ini menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas, dalam menyelesaikan pendidikan formal. Kota Bukittinggi mempunyai rata-rata lama sekolah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2010 10,54, Tahun 2011 angka rata- rata lama sekolah pada angka 10,56, tahun 2012, pada posisi 10,62, Tahun 2013, 10,66 dan tahun 2014 sd 2015 pada angka 10,71 tahun. Dari data angka rata rata lama sekolah di atas dapat dibuktikan dengan angka yang ditamatkan, ini artinya kita dapat melihat secara data tingkat pendidikan rata rata penduduk Bukittinggi. Dari rata rata lama sekolah pendiduk Bukittinggi rata rata bersekolah 10,71 tahun atau dibulatkan menjadi 11 tahun. Dengan kata lain penduduk Bukittinggi mengecap pendidikan rata rata sampai kelas 2 SLTA. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Bukittinggi sudah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun.

Tabel 2.12
Angka Rata Rata Lama Sekolah Di Kota Bukittinggi
Tahun 2010 S/D 2015

NO	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1	10,54	10,56	10,62	10,66	10,71	10,79

Sumber BDA 2016

3. Angka patisipasi murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Tabel 2.13 dibawah ini, memperlihatkan APM Kota Bukittinggi namun belum termasuk dari MI/MTS/MA.

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum untuk setiap jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS dan SMA/MA/SMK di Kota Bukittinggi telah melebihi 100%. Artinya seluruh anak usia sekolah di Bukittinggi telah menempuh pendidikan sesuai

jenjang pendidikannya. Capaian ini tentunya dipertahankan melalui program dan kegiatan pemerintah.

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2010 s/d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI/						
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	13.754	12.908	14.449	14.021	18.808	15.207
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.238	12.894	12.997	13.906	11.759	12.472
1.3.	APM SD/MI	112,39	100,11	111,17	100,83	159,95	121,93
2	SMP/MTs						
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	7.520	5.840	5.972	6.827	9.181	7.175
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	5.681	6.306	6.355	6.982	6.189	6.505
2.3.	APM SMP/MTs	132,38	92,61	93,97	97,78	148,34	110,30
3	SMA/MA/SMK						
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	5.249	8.222	9.430	10.632	10.632	9.792
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	5.177	7.322	7.276	8.268	7.454	7.930
3.3.	APM SMA/MA/SMK	101,39	112,29	129,60	128,59	142,63	123,48

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan olagraga

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan APK umumnya selalu meningkat namun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kota Bukittinggi selama periode 2010 - 2015.

Tabel. 2.14
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2010 s/d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI						
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	16.023	16.924	16.676	14.619	16.596	17.056
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.238	12.894	12.997	13.9906	11.759	12.472
1.3.	APK SD/MI	130,93	131,25	128,31	105,13	141,13	136,75
2	SMP/MTs						

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	7.930	8.011	7.588	6.235	8.989	9.108
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	5.681	6.306	6.355	6.982	6.189	6.505
2.3.	APK SMP/MTs	139,58	127,04	119,40	89,30	145,24	140,02
3	SMA/MA/SMK						
3.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	10,371	9.997	10.387	9.419	10.632	13.117
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	5.177	7.670	8.194	7.276	7.454	7.930
3.3.	APK SMA/MA/SMK	200,33	130,34	126,76	129,45	142,63	165,41

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

Angka partisipasi Kasar (APK) Kota Bukittinggi pada semua jenjang pendidikan sudah melebihi angka 100%, ini bukti Bukittinggi telah menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan begitu juga dengan pendidikan tingkat atas. Kondisi ini juga menggambarkan dengan tajam Bukittinggi untuk wilayah hiterland sedang sekolah di Bukittinggi.

5. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Selama periode 2010-2015, perkembangan APT umumnya selalu meningkat namun tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Tabel 2.15
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)
Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi

	APT	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/MI	1.342	1.843	1.538	1.638	2.638	2.636
2.	SMP /MTS	1.621	2.073	1.453	1.497	1.586	2.660
3.	SMA/MA	2.779	1.193	2.663	2.934	2.974	3.583

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

B. Aspek Kesehatan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek kesehatan selama lima tahun terakhir.

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kelangsungan hidup bayi merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk kesehatnnya. Indikator yang terkait langsung dengan

angka kelangsungan hidup bayi adalah angka kematian bayi yaitu suatu angka yang menunjukan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi Kota Bukittinggi dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Bukittinggi

Tahun	Jumlah Kematian bayi usia di bawah 1 tahun	Jumlah Kelahiran hidup	AKB	AKHB
2010	12	2059	5,8	4,8
2011	10	2271	4,4	3,4
2012	10	2320	4,3	3,3
2013	19	2338	8,1	7,1
2014	19	2405	7,9	6,9
2015	26	2407	10,8	9,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

Dari data yang ada maka di Kota Bukittinggi angka kelangsungan hidup bayi dari tahun ketahun dapat ditingkatkan . Ini artinya ibu ibu hamil mampu menjaga kehamilan sehingga bayi lahir sehat dan selamat Bagi anak yang berusia di atas 1 bulan program imunasi anak berjalan dengan baik sehingga ibu dan bayi tumbuh sehat penuh gizi.

2. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup didefenisikan sebagai rata rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat di tempuh oleh seseorang sejak lahir. Dikota Bukittinggi terlihat AHH tahun 2010 sebesar 73,10 , tahun 2011 73,11 dan tahun 2012 s/d 2014 sebesar 73,12, dan tahun 2015 menjadi 71,98. Jika kita simak dan bandingkan lagi angka harapan hidup di Kota Bukittinggi dengan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat dan Nasional , terlihat AHH Kota Bukittinggi adalah 71,98 namun jika dibandingkan dengan AHH Propinsi Sumbar maka Bukittinggi masih di atas rata rata propinsi dan bahkan diatas rata rata nasional, yakni 69,87. Penurunan angka harapan hidup tahun 2015, disebabkan terjadinya peningkatan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita di Kota Bukittinggi. Hal ini disebabkan dengan alasan medis adanya penyakit penyerta yang dialami oleh yang bersangkutan, antara lain hypetensi, kelainan jantung dll. Angka kematian ibu di tahun 2015 terjadi peningatan mencapai 7 orang, bayi 26 orang dan balita 2 orang.

3. **Ketenagakerjaan**

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tahun 2010 berada di tingkat 0.91, sedangkan tahun 2015 menjadi sebesar 0,94 Dengan kata lain terdapat 93,96% dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja, sedangkan sisanya sebesar 6,04 .% masih mencari kerja atau pengangguran.

Tabel 2.17
Penduduk Yang Bekerja Di Kota Bukit Tinggi
Menurut Golongan Umur Tahun 2011 S.D. 2015

Golongan Umur	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
15-19	2,412	2,215	1,595	3,329	3,037
20-24	5,163	4,869	5,359	5,963	8,054
25-29	6,479	7,842	6,431	6,240	7,709
30-34	6,480	7,264	7,906	8,784	7,045
35-39	6,574	5,706	6,454	7,748	7,169
40-44	4,901	6,945	6,785	6,006	6,100
45-49	5,075	5,760	5,045	5,416	5,796
50-54	3,959	3,680	5,145	4,807	4,788
55-59	2,941	2,942	3,606	3,022	3,355
60-64	1,532	1,268	1,770	2,053	1,793
65+	672	781	964	1,437	1,632
JUMLAH	**46,188**	**49,272**	**51,060**	**54,805**	**56,478**

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015,diolah pusdatinaker

Tabel 2.18
Angkatan Kerja Di Kota Bukit Tinggi
Menurut Golongan Umur TAHUN 2011 S.D. 2015

GOLONGAN UMUR	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
15-19	3,255	2,958	2,187	3,973	3,461
20-24	6,472	6,131	6,119	6,882	9,372
25-29	7,135	8,345	7,028	6,576	8,591
30-34	6,694	7,264	8,002	8,904	7,147
35-39	7,079	6,033	6,542	7,748	7,322
40-44	5,094	7,110	6,880	6,122	6,466
45-49	5,163	6,000	5,226	5,520	5,918
50-54	3,959	4,000	5,145	4,807	4,982
55-59	3,341	2,942	3,606	3,022	3,423
60-64	1,532	1,374	1,890	2,053	1,793
65+	1,088	781	964	1,437	1,632
JUMLAH	**50,812**	**52,938**	**53,589**	**57,044**	**60,107**

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah Pusdatinaker

Meningkatnya aktivitas perekonomian pada beberapa sektor perekonomian, menjadi faktor pendorong utama (driving forces) dalam penyerapan tenaga kerja. Tahun 2015, sektor perdagangan memberikan lapangan kerja terbesar bagi masyarakat Kota Bukittinggi, yaitu mencapai 25,830 (45,73%). Sektor industri juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Bukittinggi pada Tahun 2015, kontribusi sektor ini menyerap 0,001% dari total lapangan kerja yang ada. Sektor jasa yang semakin menggeliat memberikan kontribusi sebesar 25,88 %, berbeda sedikit dengan tingkat penyerapan di sektor industri.

Tabel 2.19
Penduduk Yang Bekerja Di Kota Bukit Tinggi
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 S.D. 2015

Lapangan Usaha *)	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	653	405	732	1,192	2,376
Pertambangan dan penggalian	187		95	101	71
Industri pengolahan	5,540	7,920	9,076	7,474	5,867
Listrik, gas dan air	185	330	181	240	444
Bangunan	2,618	2,027	2,495	1,977	2,182
Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel	19,157	20,661	22,422	24,665	25,830
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	3,357	2,952	2,454	4,053	2,841
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan	1,551	2,106	1,719	2,270	2,249
Jasa kemasyarakatan	12,940	12,871	11,886	12,833	14,618
JUMLAH	**46,188**	**49,272**	**51,060**	**54,805**	**56,478**

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah Pusdatinaker

Walaupun capaian kesempatan kerja telah cukup baik, namun tidak dapat disangkal bahwa tingkat pengangguran yang ada masih cukup banyak. Tahun 2015 tingkat pengangguran di Kota Bukittinggi mencapai 3,629%. Selain itu tingkat persaingan yang tinggi dan cukup terbatasnya ketersediaan lapangan kerja baru juga memberikan kontribusi akan tingkat pengangguran yang ada.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

A. Kebudayaan

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kota Bukittinggi selama ini telah dikenal sebagai salah satu Kota Seni dan Budaya. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Kota Bukittinggi, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini terbukti dengan dicanangkannya Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata pada Tahun 1984.

Untuk itu kita upayakan agar seni dan budaya tradisi dalam masyarakat kita bisa berlanjut untuk masa yang akan datang walaupun dicampur dengan yang sifatnya kolaborasi, dengan artian tidak meninggalkan nilai tradisi di dalamnya. Keberadaan Kelompok Seni Tradisi menjadi bukti bahwa masyarakat Kota Bukittinggi memiliki minat yang cukup tinggi dalam pelestarian kesenian tradisi Minangkabau. Diketahui bahwa hasil rekapitulasi tahun 2011 untuk potensi seni budaya di Kota Bukittinggi berjumlah 26 kelompok seni. Uraian secara lebih detail mengenai potensi seni budaya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Kelompok Seni Tradisi yang ada di Kota Bukittinggi Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Seni	Ket
1	Mandiangin Koto Selayan	15	
2	Guguk Panjang	8	
3	Aur Birogo Tigo Baleh	3	
	Jumlah	26	

Sumber. Dinas Budaya dan Pariewisata Kota Bukittinggi (2015)

Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya tahun 2015 sebanyak 26 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah lingkup seni dan forum komunitas seni budaya di Kota Bukittinggi cenderung mengalami peningkatan. Disamping itu Wisata Kota Bukittinggi didukung oleh 6 buah sanggar seni tradisional, yang mengambarkan ciri khas kesenian dan budaya Minang Kabau.

Dengan pesatnya perkembangan sekto pariwisata di Kota Bukittinggi, juga memerlukan sarana dan prasarana seni dan budaya yang lebih representatif. Selain itu,

apresiasi generasi muda terhadap seni dan budaya daerah dirasa masih relatif minim. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kondisi ini adalah melalui pencanangan pembangunan kawasan sentra seni budaya kreatif berwawasan lingkungan hidup. Inovasi dan kreativitas seni budaya warga Kota Bukittinggi harus terus dikembangkan dan kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi adalah memfasilitasi proses kreatif tersebut.

B. Olah raga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Perkembangan jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk dan Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta) per 10.000 penduduk selama periode 2011-2015 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.21
Perkembangan Prasarana Olah raga Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015

No	Cabang Olah Raga	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sepak Bola	5	5	5	5	5	5
	Bola Volly	60	60	60	60	60	60
2	Basket	20	20	20	20	60	60
3	Bulu tangkis	40	40	40	40	40	40
4	Tenis Meja	65	65	65	65	65	65
5	Atletik	2	2	2	2	2	2
6	Tenis	10	10	10	10	10	10
7	Catur	150	150	150	150	150	150
8	Bridge	14	14	14	14	14	14
9	Bola Sodok	18	18	18	18	18	18
10	Pacu Kuda	1	1	1	1	1	1
11	Renang	4	4	4	4	4	4
12	Silat	40	40	40	40	40	40
13	Takraw	45	45	45	45	45	45
15	Gulat	1	1	1	1	1	1
	Jumlah	457	457	457	457	457	457

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi

Jumlah sarana prasarana olah raga di Kota Bukittinggi, mulai dari Tahun 2011 sampai dengan 2015 tidak mengalami peningkatan, ini disebabkan lahan yang akan dijadikan sarana prasarana yang ada sangat terbatas. Sementara jumlah organisasi olahraga dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.22
Jumlah Organisasi OlahragaTahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kecamatan ABTB	9	9	9	9	10	10
2.	Kecamatan MKS	9	9	9	9	10	10
3.	Kecamatan GP	11	11	11	11	13	13
4.	Jumlah	29	29	29	29	33	33

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi

Jumlah organisasi olah raga pada tahun 2011 berjumlah 29, sedangkan sampai tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 33 buah, ini menandakan bahwa masyarakat Kota Bukittinggi semakin menyadari akan pentingnya arti olah raga dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Namun jumlah organisasi yang ada belum berkativitas sebagaimana mestinya seperti yang terlihat pada table berikut:

Tabel 2.23
Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kecamatan ABTB	2	2	2	3	3	2
2.	Kecamatan MKS	2	2	2	3	3	3
3.	Kecamatan GP	4	4	5	5	5	3
4.	Jumlah	8	8	9	11	11	8

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi

Jumlah sarana kegiatan olah raga pada setiap tahunnya di kecamatan yang ada, sangat minim sekali di tengah masyarakat, juka dibanding sarana dan organisasi olah raga yang ada, untuk itu perlu pembinaan dan pengembangan oleh dinas terkait.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 URUSAN WAJIB YANG MERUPAKAN PELAYANAN DASAR

2.3.1. 1. PENDIDIKAN

Pendidikan dasar 9 tahun, merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sejak tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003) yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Melalui pendidikan dasar 9 tahun diharapkan di masa mendatang, pendidikan minimal penduduk Indonesia adalah lulus SMP/MTs.

Untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar 9 tahun, dibutuhkan sarana prasarana dan tenaga pendidik yang mendukung proses pembelajaran. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah yang tersedia dibandingkan dengan penduduk usia sekolah.

Tabel 2.24
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI						
1.1.	jumlah murid usia 7-12 tahun	14.381	14.489	14.124	14.021	14.408	15.207
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.611	12.894	12.997	13.906	11.759	12.472
1.3.	APS SD/MI	114,0	112,37	108,67	100,83	122,53	121,93
2	SMP/MTs						
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn	5.807	7.025	5.958	6.827	6.798	7.175
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.312	6.306	6.355	6.982	6.189	6.505
2.3.	APS SMP/MTs	919,9	111,40	93,75	97,78	109,84	110,30

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga

Gambaran pelaksanaan, perkembangan pembangunan urusan pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan.

a. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan maka ketersediaan sarana pendidikan merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan. Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program wajib belajar 9 tahun. Dinamika ini dapat dilihat dari rasio dalam pelayanan penduduk usia sekolah sebagai berikut :

Tabel 2.25
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah
Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI						
1.1.	Jumlah gedung sekolah	63	65	65	65	65	61
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.611	12.894	12.997	13.906	11.759	12.472
1.3.	Rasio	49,95	50,41	50,01	46,74	55,28	48,91
2	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah gedung sekolah	17	16	16	16	16	17
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.312	6.306	6.355	6.982	6.189	6.505
2.3.	Rasio	26,93	25,37	25,18	22,92	25,85	26,13

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

Sarana pendidikan di Kota Bukittinggi, pada tingkat SD/SDLB/MI dari 68 sekolah, terdapat 61 sekolah yang telah memenuhi kewajiban dalam pemenuhan standar minimum terhadap pengadaan sarana dan prasarana yang diwajibkan undang undang. Walaupun hanya ditargetkan sebesar 57 persen, namun realisasi pemenuhan sarana dan prasarana adalah sebesar 89,70 persen, dengan tingat capaian 157 persen.

Pemenuhan sarana prasarana pendidikan oleh Pemerintah daerah Kota Bukitinggi dilakukan secara menyeluruh , sehingga tahun 2014 telah mampu memenuhi standar untuk ke tiga jenjang pendidikan. Itulah sebabnya capaian di tahun 2015 ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 yang lalu.

Pada tingkat SLTP/SMPLB, pemenuhan syarat wajib sarana dan prasarana terhadap 9 sekolah telah terpenuhi di tahun 2015, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Dari target 60 % dapat dicapai sebesar 136%, hal ini dapat dilihat dari 11 SLTP/SMPLB yang ada di Kota Bukittinggi 9 sekolah telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan Standar pendidikan nasional. Tetapi Kota Bukittinggi masih mempunyai 3 sekolah lagi yang belum memenuhi sarana prasarana sesuai dengan SNP, hal ini disebabkan karena ketersediaan lahan yang masih belum memadai serta ketersediaan dana yang belum mencukupi untuk memenuhinya. Namun pemerintah kota Bukittinggi telah melakukan berberapa upaya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai SNP diantaranya dengan pelaksanaan Rehab dan RKB serta pengadaan peralatan.

Capaian indikator Presentase SLTA yang telah memiliki sarana dan parasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan pada Tahun 2015 ini dari target yang ditentukan sebanyak 65% telah tercapai sebesar 90.90%, capaian ini sudah melampaui target yang ditetapkan dari 22 SLTA yang ada di Kota Bukittinggi hanya 2 SLTA lagi yang belum berhasil memenuhi sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan. Namun diharapkan semua SLTA yang berada di Kota Bukittinggi dapat memenuhi sarana prasara sesuai Standar nasional Pendidikan, agar siswa yang berada di Lingkungan Kota Bukittinggi dapat memiliki fasilitas pendidikan yang dibutuhkan untuk menunjang proses belajar belajar yang baik.

Sekolah baik di tingkat SD/SDLB/MI, SLTP/SMPLB dan SLTA sebagaian besar telah memenuhi sarana prasara sesuai dengan stndar nasional pendidikan. Tingkat capaian indikator kinerja pada sasaran diatas dicapai dengan predikat baik dan mengalami kenaikan pada tahun 2012 dan 2014 seiring dengan penetapan target pada periode RPJMD, hal ini di tunjang oleh semakin besarnya anggaran daerah yang di alokasikan untuk membenahi sarana prasarana sekolah baik tingkat SD/MI, SLTP maupun SLTA. Disamping itu alokasi dana dari Pemerintah Pusat seperti DAK Bidang Pendidikan juga turut menunjang meningkatnya pencapaian sasaran ini dari tahun ke tahun.

b. Rasio Guru/ Murid

Disamping ketersediaan sarana sekolah, ketersediaan guru sebagai pengajar merupakan faktor pendukung yang tak kalah pentingnya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Perkembangan perbandingan jumlah guru dengan murid dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.26
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI						
1.1.	Jumlah Guru	943	958	1.049	902	822	884
1.2.	Jumlah Murid	16.924	16.676	14.619	16.596	16.579	16.414
1.3.	Rasio	1:17	1:17	1:14	1:18	1:20	1:19
2	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah Guru	600	558	599	486	603	451
2.2.	Jumlah Murid	8.011	7.588	8.053	8.989	7.715	6.399
2.3.	Rasio	1:13	1:14	1:13	1:18	1:13	1:14

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

Tenaga Pendidik Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan merupakan pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pemebelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian indikator kinerja Persentase SD/SDLB/MI yang telah memiliki tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan sebesar 78,06%, dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa Kota Bukittinggi belum mencapai 100% dalam pemenuhan tenaga pendidik sesuai standar nasional pendidikan. Oleh sebab itu indikator kinerja Persentase tenaga pendidik SD/SDLB/MI yang telah sesuai Standar Nasional Pendidikan masih menjadi agenda pokok dari pendidikan dasar, dari 502 tenaga pengajar SD/SDLB/MI terdapat 165 orang tenaga pendidik yang masih belum sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional yang tersebar di seluruh SD/SDLB/MI yang berada di Kota Bukittinggi.

Untuk capaian indikator Persentase SLTP/SMPLB yang telah memiliki Tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan yang ditargetkan sebanyak 60% pada tahun 2015 ini, telah terealisasi sebanyak 85,85% dengan capaian sebesar 143,08%, hal ini terlihat dari 318 orang tenaga pendidik yang tersebar diseluruh sekolah SLTP/SMPLB, 273 tenaga pendidik telah sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional. Dan bagi 45 tenaga pendidik lagi yang masih belum sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional diharapkan untuk segera melakukan pemenuhan untuk kriteria SNP bagi sekolah tersebut.

Capaian pada indicator yang telah memiliki tenaga pendidik yang memenuhi standar nasional pendidikan sebesar 119,14%, jumlah tenaga pendidik sesua Standar Nasional Pendidikan. Dari 1.343 jumlah tenaga pendidik yang dimiliki oleh Kota Bukittinggi,

63 tenaga pendidik diantaranya yang belum memenuhi Standar pendidikan nasional. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat hanya sebagian kecil dari tenaga pendidik yang masih belum sesuai dengan SNP. Untuk itu diharapkan seluruh tenaga pendidik yang ada dapat sesuai dengan SNP, agar memberikan kualitas yang terbaik bagi pendidikan di Kota Bukittinggi.

Selanjutnya jika dilihat jumlah guru dan rasio antara jumlah guru dan murid tingkat SD/MI dan SMP/Mts menurut kecamatan,dapat dilihat sebagiman tabel berikut:

Tabel 2.27
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar menurut Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2015

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kecamatan ABTB	201	3.654	1:18	31	538	1:17
2	Kecamatan MKS	296	4.804	1:16	195	964	1:4
3	Kecamatan GP	361	7.708	1:21	347	5.462	1:15
		858	16.166		573	6.964	

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

Dalam penyelenggaraan pendidikan juga terdapat adanya murid/siswa di semua tingkat pendidikan yang mengalami putus sekolah. Namun jika dilihat rasionya sangat kecil sekali. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata putus sekolah tersebut terjadi karena adanya siswa ayang pindah sekolah ke daerah lain, dan ada juga yang betul betul berhentii sekolah disebabkan karena tidak mau sekolah, dll. Data siswa putus sekolah dpat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.28
Data Siswa Putus Sekolah Tahun 2014

NO	Jenjang Pendidikan	Siswa Putus Sekolah	Jumlah Siswa Thn Sblmnya	Rasio
1	SD/MI	1	26.596	0,01%
2	SMP/MTS	9	8.909	0,10%
3	SMS/SMK/MA	32	10.632	0,30%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi

Jika dilihat rasio guru terhadap murid dimasing masing tingkat maka didapat rasio yang ideal. Di Tingkat SD rasio guru dan murid adalah 1:19, artinya satu guru membimbing 19 anak. Begitu juga dengan tingkat SMP, dengan rasio 1;17. Lebih lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.29
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI						
1.1.	Jumlah Guru	943	958	1.049	902	822	898
1.2.	Jumlah Murid	16.924	16.676	14.619	16.596	16.579	17.056
1.3.	Rasio	1:17	1:17	1:14	1:18	1:20	1:19
2	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah Guru	600	558	599	486	603	538
2.2.	Jumlah Murid	8.011	7.588	8.053	8.989	7.715	9.133
2.3.	Rasio	1:13	1:14	1:13	1:18	1:13	1:17

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

Jika dilihat rasio guru dan murid tingjat kecamatan terdapat tdak meratanya sebaran guru dan murid. Ini berarti dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerataan siswa tidak merata. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu upaya untuk pemerataan sebaran murid di semua tingkat pendidikan.

Tabel 2.30
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
menurut Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2015

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kecamatan ABTB	218	4.037	1:19	51	562	1:11

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
2	Kecamatan MKS	287	5.347	1:19	192	3.073	1:16
3	Kecamatan GP	393	7.672	1:20	295	5.498	1:19
	Jumlah	898	17.056	1:19	538	9.133	1:17

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

Indikator Persentase SD/SDLB/MI yang telah memiliki tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan dan Persentase SLTP/SMPLB yang telah memiliki tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan dicapai dengan predikat sangat baik dengan pencapaian di atas 100%, akan tetapi indikator Persentase SLTA yang telah memiliki tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan dicapai dengan predikat sedang, hal ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada tingkat pendidikan SD/MI dan SLTP dengan alokasi anggaran untuk tingkat SLTA agar tidak terdapat kesenjangan yang cukup berarti.

Khususnya pelaksanaan di bidang pendidikan luarsekolah, tingkat capaian indikator kinerja cederung sama dan statis, hal ini menunjukkan bahwa tenaga pendidik PAUD pada lembaga pendidikan yang ada, belum maksimal pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada periode tahun 2010 hingga 2012. Tingkat capaiannya belum masimal, karena lembaga ini didominasi oleh lembaga yang dikelola oleh masyarakat, sementara yang dikelola oleh pemerintah saat ini adalah TK Pembina. Dengan demikian tenaga pendidik PAUD belum dapat diikat sebagai tenaga pendidik tetap karena sangat tergantung kemampuan pembiayaan lembaga dan animo masyarakat untuk memilih lembaga PAUD yang ada. Namun demikian seluruh lembaga PAUD tetap dalam bimbingan pemerintah, dan dihimbau untuk memenuhi kualifikasi tenaga pendidik sesuai ketentuan SNP serta berbagai fasilitasi untuk pemenuhannya. Namun karena tenaga pendidik pada lembaga tersebut belum memiliki status sebagai tenaga pendidik tetap, maka capaian kinerja ini belum dapat dicapai maksimal.

Satuan-satuan pendidikan non formal yang ada di Kota Bukittinggi sebanyak 96 lembaga diantaranya;

1. Lembaga PAUD Non formal jumlah 56 lembaga;
2. Lembaga Kursus dan Keterampilan berjumlah 32 lembaga;
3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berjumlah 5 (lima) lembaga; dan
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) berjumlah 3 (tiga) buah.

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan hasil belajar untuk semua sekolah yang ada di Kota Bukittinggi, mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama/ akhlak,

kelompok mata pelajaran kewarganegaraan/kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan untuk memegang peranan dalam menentukan kelulusan siswa.

2.3.1.2. Kesehatan

A. Balita Gizi Buruk

Dari tahun 2011 sampai 2015 untuk kota Bukittinggi tidak ada Balita dengan Gizi Buruk. Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Jumlah posyandu tahun 2011 sebanyak .128 posyandu dan tahun 2015 menjadi 132 posyandu, terjadi penambahan 4 unit posyandu. Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah antara 75–100 balita. Apabila 1 unit Posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit Posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit Posyandu. Dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.31
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011 s.d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah posyandu	127	128	130	132	132	132
2.	Jumlah balita	8.982	9.276	11.668	11.896	12.338	12.638
3.	Rasio	14,14	13,80	11,14	11,06	10,6	10,4

Sumber: Profil Kesehatan 2015

Dari tabel diatas terlihat baha rasio posyandu terhadap balita tahun 2015 adalah 10,4 artinya dalam seribu balita dilayani oleh 10,4 posyandu, yaitu Kota Bukittinggi dalam 1

Posyandu melayani sebanyak 96 – 97 balita. Angka ini sudah bagus yaitu diatas standar, menurut standar idelanya 1 posyandu dapat melayani 100 balita. Dalam kurun waktu diatas terlihat bahwa rasio semakin menurun yang artinya tingkat pertumbuhan balita lebih cepat dari tingkat pertumbuhan posyandu sehingga satu posyandu melayani lebih banyak anak sehingga kualitas pelayanan bisa berkurang.

Tabel 2.32
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	JumlahBalita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kecamatan ABTB	56	2.821	19,8
2	Kecamatan MKS	29	5.119	5,6
3	Kecamatan GP	47	4.698	10
	Jumlah	132	12.638	10,44

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

Rasio posyandu terhadap balita di Kecamatan Guguk Panjang adalah 11,9, angka ini merupakan rasio yang cukup bagus dalam pelayanan posyandu di Kota Bukittinggi, karena 1 Posyandu masih melayani kurang dari 100 balita, demikina juga dengan Kecamatan mandiangin Koto Selayan dengan rasio 9,2 serta Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan Rasio 10,2. Dari jumlah posyandu ada sebanyak 132 Posyandu pada tahun 2014 terdiri dari posyandu pratama, madya, purnama dan mandiri. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi terlihat bahwa sudah sebanyak 107 Posyandu dengan Persentase 81,06% posyandu sudah aktif terutama pada posyandu tingkat purnama dengan persentase 60,16%. Hal ini membuktikan bahwa peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan terhadap posyandu yang dibentuk oleh dan bentuk masyarakat itu sendiri dengan dukungan teknis dari Puskesmas sudah cukup tinggi. Secara kuantitas jumlah rata-rata posyandu disetiap kelurahan ada sebanyak 4-7 unit posyandu disetiap kelurahan.

B. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu(Pustu)

Jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembatu dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 tidak mengalami peningkatan, ini disebabkan oleh keterbatasan lahan yang di Kota Bukittinggi, sehingga perkembangan sarana ini hanya ditingkatkan dari segi kualitas pelayanan dan obat tersedia, sehingga tidak begitu mengurangi peran pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2.33
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Puskesmas	6	7	7	7	7	7
2.	Jumlah Poliklinik	2	2	2	2	2	1
3.	Jumlah Pustu	14	14	14	14	14	14
4.	Jumlah Penduduk	111.312	113.569	114.415	118.260	120.491	122.621
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk *)	0,053	0,062	0,062	0.059	0.058	0.057
6.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	0,017	0,018	0,018	0,017	0,016	0,008
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk *)	0,125	0,123	0,122	0,118	0,116	0,114

Sumber: Profil Kesehatan 2015; BDA 2015

Dari tabel diatas terlihat rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 0,057, artinya dalam seribu penduduk dilayani oleh 0,057 puskesmas dimana Kota Bukittinggi dalam 1 Puskesmas melayani penduduk sebanyak 17.543 orang penduduk. Angka ini sudah cukup bagus dimana standar nasional 1 Puskesmas dapat melayani 30.000 penduduk. Untuk Puskesmas sudah sangat banyak dibanding dengan jumlah penduduk. Sehingga penduduk yang berkunjung ke puskesmas tidak hanya dari Kota Bukittinggi saja namun juga berasal dari luar Kota Bukittinggi.

Sementara itu untuk jumlah poliklinik pada tahun 2015 ini terjadi pengurangan, dari 2 ploliklinik pada tahun 2014 di tahun 2015 ini hanya ada 1 poliklinik yang aktif. Pengurangan 1 poliklinik ini disebabkan salah satu poliklinik ditutup karena operasional tidak berjalan dengan optimal. Sedangkan rasio pustu terhadap penduduk pada tahun 2015 adalah 0,114. Dimana rata-rata 1 Puskesmas melayani 2-3 puskesmas pembantu angak ini juga sudah cukup ideal.

C. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Rasio rumah sakit yang ada di wilayah Kota Bukittinggi jika dibanding dengan jumlah penduduk Kota Bukittinggi sudah mencukupi dan sudah bisa melayani seluruh penduduk. Kota Bukittinggi belum mempunyai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), namun dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bukittinggi, telah terdapat rumah

sakit daerah milik Provinsi Sumatera Barat dan Rumah Sakit milik pemerintah pusat , dan ditambah rumah sakit swasta berada di wilayah Kota Bukittinggi, sehingga warga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan lebih dekat dan tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun karena rumah sakit yang ada melayani masyarakat dalam wilayah provinsi Sumatera Barat, dan bahkan nasional, sehingga pemerintah daerah Kota Bukittinggi tidak dapat mengintervensi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk itu perlu difikirkan upaya untuk membangun rumah sakit umum daerah milik pemerintah kota Bukittinggi, sehingga kita dapat melakukan kebijakan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dan mencarikan solusi untuk mengatasinya.

Pelayanan sarana kesehatan dapat diukur kinerjanya antara lain dengan melihat Ratio Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, Dokter dan Tenaga Medis per satuan penduduk.

Tabel 2.34
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Tahun 2010 s/d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	3	3	1	3	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	-	1	-	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	1	1	1	1	1	1
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	0	0
	Jumlah Rumah Sakit Swasta	2	2	3	3	3	3
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	6	6	6	6	6	6
6.	Jumlah Penduduk	111.312	113.569	114.415	118.260	120.491	122.621
7.	Rasio*)	0,053	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049

Sumber: Profil Kesehatan

Rasio Rumah sakit per satuan penduduk berkisar pada angka 0,049 pada tahun 2015 ini. Jumlah Rumah Sakit di Kota Bukittinggi sebanyak 6 (enam) Rumah sakit, dimana tidak ada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. Rumah Sakit yang ada adalah milik :

1. Pemerintah Pusat, RSUP yang sekarang dikembangkan menjadi RSSN (Rumah sakit Stroke Nasional).
2. Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Sumatera barat yaitu RSAM (Rumah Sakit Achmad Muchtar).
3. Rumah Sakit Swasta yaitu Yayasan Rumah Sakit Ibnu Sina dan Rumah Sakit Ibnu Sina, Rumah Sakit Madina dan Rumah Sakit THT Sitawa Sidingin.

4. Rumah Sakit TNI AD.Tk.IV

Rasio Rumah Sakit adalah menggambarkan ketersediaan dan cakupan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Untuk pelayanan kesehatan ini, rumah sakit di Bukittinggi menyediakan 726 tempat tidur, dan dari jumlah penderita yang dirawat tahun 2014 sebanyak 72.702 orang. Data diatas menunjukan bahwa satu rumah sakit dapat melayani 20.408 orang.

D. Rasio Dokter Persatuan Persatuan Penduduk

Indikator dokter persatuan jumlah penduduk menggambarkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh dokter. Untuk melihat jumlah perkembangan dokter di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.35
Jumlah Dokter Tahun 2011 s.d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Dokter	164	217	217	187	212	212
2	Jumlah Penduduk	111.312	113.569	114.415	118.260	120.491	120.621
3	Rasio	1,473	1,911	1,897	1.581	1.759	1.757

Sumber: Profil Kesehatan 2011, 2012, 2013,2014,2015 ; BDA 2015, Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2011-2015 Bukittinggi

Data dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi menunjukan bahwa pada tahun 2015 dan 2014 terdapat persamaan jumlah dokter yang ada di Kota Bukittinggi yang tersebar pada Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan. Institusi Dinas Kesehatan/Diklat. Rasio Jumlah Dokter terhadap jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 1,757 untuk idelanya rasio dokter terhadap penduduk adalah 1 : 2500 (standar dari WHO sebesar 40 per 100.000 penduduk). Untuk Kota Bukittinggi 1 : 569 orang artinya Kota Bukittinggi sudah sangat mencukupi jumlah dokter yang ada. Diharapkan dapat memberikan kontribursi positif terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Tenaga medis yang ada di Kota Bukittinggi terdiri dari tenaga analisis labor, Temperatur dan Pengaturan rougent, anestesi. Fisioterapi, rekam medic, refoptisien yang tersebar diseluruh puskesmas, rumah sakit dan institusi.

Tabel 2.36
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2010 s/d 2015

Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Tenaga Medis	1.209	1.288	1.786	1.855	1.999	2.144
2	Jumlah Penduduk	111.312	113.569	114.415	118.260	120.491	122.621
3	Rasio	10,861	11,341	15,609	15.685	16,590	17,48

Sumber: Profil Kesehatan

Rasio tenaga medis adalah untuk mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis yang ada disuatu wilayah. Jumlah tenaga medis Kota Bukittinggi pada tahun 2013 sampai dengan 2014 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah tenaga medis 1.999 orang dengan rasio terhadap jumlah penduduk 16,590, artinya dalam seribu penduduk dilayani oleh 60 tenaga medis. Ini sangat rendah sekali secara umum jumlah tenaga medis kesehatan di Kota Bukittinggi masih belum tercukupi sesuai dengan indicator kesehatan maupun indicator WHO. Dengan demikian untuk selanjutnya sangat diperlukan dukungan pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan tenaga medis untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal di masa yang akan datang.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, maka yang menjadi kewenangan pemerintah Kota adalah Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya, Jalan, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Penangan urusan cipta karya ini lebih dikenal dengan Universal acces, dimana pada tahun 2019 ditargetkan 100% masyarakat telah terlayani dengan akses air minum, sedangkan sampai akhir tahun 2015, cakupan layanan air minum perpipaan/PDAM Kota Bukittinggi baru mencapai 43,26%.

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi darat yang penting untuk menghubungkan berbagai tempat seperti pusat industri, lahan pertanian, pemukiman, serta sebagai sarana distribusi barang dan jasa untuk menunjang perekonomian. Oleh karena itu kondisi jalan dalam Kota Bukittinggi semenjak tahun 2010 hingga 2015 terus dilakukan pemeliharaan berupa perbaikan dan peningkatan jalan yang rutin dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis terkait. Kondisi jalan dalam Kota Bukittinggi dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.37
Kondisi Jalan Dalam Kota

No	Kondisi jalan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Baik	156.33	163.05	163.05	168.76	30.25	33.85
2.	Sedang	28.91	25.26	25.26	20.56	145.19	145.19
3.	Rusak	2.39	1.35	1.35	0.97	14.92	11.32
4.	Rusak Berat	6.90	8.52	8.52	7.88	7.82	7.82
	total	198.18	198.18	198.18	198.18	198.18	198.18

Sumber: BPS 2016, satuan dalam KM

Keberadaan dan kegunaan suatu jalan dapat dimanfaatkan sepanjang umur pakainya yang telah direncanakan apabila dirancang dengan memperhatikan berbagai aspek, yang salah satunya yaitu system pengaliran air (drainase) di sekitar jalan tersebut. Dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir, akibat system drainase yang kurang bagus telah menyebabkan terjadinya genangan di beberapa titik di Kota Bukittinggi.

Urusan Penataan Ruang, berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang tersebut adalah dikeluarkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi 2010-2030 yang pada saat ini sedang dilakukan revisi guna penyempurnaan pola ruang wilayah kota sehingga dapat mengakomodir perkembangan dan pembangunan daerah.

Pola ruang dan struktur ruang Kota Bukittinggi memerlukan pembenahan secara matang dan menyeluruh agar mampu mendukung perkembangan kehidupan masyarakat. Kota merupakan tempat untuk hidup (*to live*), bekerja (*to work*), dan bermain (*to play*), sehingga kelancaran mobilitas warga dan ketersediaan sarana prasarana pendukung yang berkualitas baik merupakan syarat utama. Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum.

Luas Kota Bukittinggi adalah 25,239 km^2, berdasarkan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 maka 46,47% merupakan perumahan, 10,86% penggunaan untuk perdagangan dan jasa, 16,58% penggunaannya untuk RTH. Kota Bukittinggi merupakan kota kecil yang hanya 0,06% dari wilayah Propinsi Sumatera Barat, namun memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Keterbatasan luas wilayah ini menjadi salah satu permasalahan yang cukup dominan untuk pengembangan pembangunan daerah.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pemerintah Kota Bukittinggi secara aktif mendukung program perumahan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas perumahan guna menciptakan hunian yang layak dan terjangkau dengan kondisi yang sehat, harmonis dan berkelanjutan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Sesuai dengan kewenangan PP No. 38 Tahun 2007 penanganan perumahan rakyat yang telah dilakukan dari tahun 2011 – 2014 diantaranya adalah bedah rumah yang tidak layak huni baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi maupun oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kota Bukittinggi. Kegiatan yang dilakukan adalah Pembangunan perumahan dan permukiman juga menitikberatkan pada sarana dan prasarana lingkungan, yang dilakukan melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase, rehab rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi lingkungan berupa MCK plus, septiktank komunal dan prasarana persampahan serta peningkatan layanan air bersih melalui PDAM. Kesuksesan kegiatan perumahan didukung oleh pengalokasian dana bersumber dari Pemerintah Pusat, dana pendampingan APBD Kota Bukittinggi, Swadaya dan Baznas. Total dana yang telah diserap untuk penanganan perumahan dari tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.38
Alokasi Dana untuk Penanganan Perumahan melalui Kegiatan Bedah Rumah

No	Lokasi	TAHUN	SUMBER DANA (RP.)			
			APBN	APBD	SWADAYA	BAZNAS
1	Guguk Panjang	2011	74.500.000,-	-	-	-
		2012	106.460.000,-	-	-	-
		2013	30.000.000,-	40.000.000,-	27.555.000,-	20.000.000,-
		2014	28.300.000,-	13.750.000,-	5.667.000,-	-
		2015	47.500.000,-	13.750.000,-	4.582.000,-	20.000.000,-
2.	Aur Birugo Tigo Baleh	2011	39.000.000,-	-	5.850.000,-	
		2012	26.654.000,-	-	4.798.500,-	
		2013	114.006.000,-	60.000.000,-	42.856.000,-	20.000.000,-
		2014	94.000.000,-	13.750.000,-	42.589.000,-	20.000.000,-
		2015	62.500.000,-	27.500.000,-	54.916.000,-	40.000.000,-
3.	Mandiangin Koto Selayan	2011	-	-	-	-
		2012	60.000.000,-	-	25.600.000,-	
		2013	109.000.000,-	100.000.000,-	3.600.000,-	20.000.000,-
		2014	153.500.000,-	-	30.700.000,-	60.000.000,-
		2015	201.500.000,-	-	84.392.000,-	60.000.000,-
	Jumlah		**1.146.920.000,-**	**268.750.000,-**	**389.634.500,-**	**260.000.000,-**

Sumber: PNPM 2015- Data diolah

Urusan perumahan juga berkaitan erat dengan akses pelayanan dasar minimal yang dapat dinikmati oleh masyarakat yaitu pelayanan akan ketersedian air minum dan akses sanitasi yang layak.

Table 2.39
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan
Akses Air minum di Kota Bukittinggi

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	37,188	35,91	35,37	33,80	33,12	34,26

Sumber : BDA 2016

Dari tabel terlihat bahwa terjadi penurunan layanan air minum kepada rumah tangga yang ada di Kota Bukittinggi untuk setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya banyak kebocoran pada pipa distribusi PDAM karena pipa-pipa distribusi tersebut sudah tua dan berkarat. Untuk mengurangi tingkat kebocoran tersebut juga telah dilakukakan beberapa penggantian pipa distribusi melalui kegiatan oleh PERANGKAT DAERAH teknis terkait.

Disamping pemenuhan layanan air minum, akses sanitasi layak dari suatu perumahan juga harus diperhatikan. Hal ini sesuai dengan target universal access yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2015-2019, dimana pada tahun 2019 nanti semua masyarakat harus mendapatkan akses sanitasi dan air minum layak karena kedua hal tersebut merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih baik.

2.3.1.5 Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, dengan melakukan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bukittinggi, merujuk kepada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2010-2015 bahwa penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kota Bukittinggi relatif terkendali, hal ini terwujud berkat adanya kerjasama dan koordinasi yang kuat antara pihak kepolisian dan aparat penegak Perda.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum di Kota Bukittinggi sudah mengakar ditengah-tengah masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan adanya disetiap Kelurahan dan kawasan pemukiman masyarakat adanya Poskamling.

Menghitung ketersediaan jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk digunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 2.40
Ketersediaan Polisi Pamong Praja Tahun 2010 s/d 2015
Kota Bukittinggi

NO	Jumlah	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah polisi pamong praja	103	103	101	93	105	120
2.	Jumlah penduduk	107.783	113.569	114.415	118.260	120.469	123.608

Sumber. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2014 dengan jumlah ketersediaan petugas Polisi Pamong Praja sebanyak 105 orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 123.410 jiwa, dikali per 10.000 penduduk, yang berarti setiap 10.000 penduduk dapat dilindungi oleh 9 orang petugas Polisi Pamong Praja. Dilihat pada ketersediaan jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Bukittinggi terdapat 9 orang Polisi Pamong Praja melindungi terhadap 10.000 penduduk, hal ini menunjukkan ketersediaan jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Bukittinggi belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Seiring dengan berjalannya waktu dengan keterbatasan personil dari Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2016 ini terus berupaya dalam mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat disetiap kelurahan, dengan merekrut dari kalangan masyarakat untuk diangkat sebagai petugas Linmas dimasing-masing kelurahan di Kota Bukittinggi.

2.3.1.6. Sosial

Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Sarana sosial seperti panti asuhan hingga tahun 2015 berjumlah 3 buah dan satu panti untuk orang cacat yang bertempat di Manggis Ganting. Peningkatan sarana sosial di Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi sebagai kota kecil juga tidak terlepas dari masalah kesejahteraan sosial. Banyaknya anak jalanan, gelandangan, pengemis dapat ditemui secara mudah di beberapa ruas jalan di Kota Bukittinggi.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga kini terus diupayakan dengan berbagai cara, dan intervensi . Bentuk bentuk intervensi terhadap Penyamdanga Masalah Kesejahteraan sosial antara lain adalah:

Tabel 2.41
Bentuk Intervensi Pemerintah Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penangnan orang terlantar	80	78	81	67	42
2	Penanganan penyakit kejiwaan	23	21	19	17	15
3	Penguburan Mayat terlantar	2	3	2	2	2
4	Bantuan Lansia Miskin	200	218	215	280	270
5	Bantuan Kube Fakir Miskin	-	-	-	200	200
6	Bantuan Raskin (Kepala Keluarga)	3.165	2.731	2644	2644	2644
7	Bantuan Penyandang cacat/Bansos	50	52	51	104	2
8	Bantuan Jamkesmas	18.126	18.126	18.126	16.714	16.714
9	Bantuan Jamkesda	13.000	13.000	13.000	11.419	9.884

Sumber. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, DKK

Permasalahan penanganan PKMS ini masih terdapat adanya PMKS yang belum di intervensi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan bahwa data yang digunakan masih menggunakan data hasil PPLS Tahun 2011 dan selama ini belum pernah di verifikasi dan validasi. Pemerintah pusat tahun 2015 telah melakukan Basis Data Terpadu yang merupakan basis data tunggal yang digunakan oleh semua kebutuhan pemerintah. Basis Data terpadu tahun 2015 tersebut, telah mengakomodir seluruh indikator kemiskinan yang dibutuhkan oleh semua kementerian. Data tersebut lengkap dengan byname byadress. Kondisi saat ini, walaupun data tersebut telah di lonching di Tingkat Pusat oleh TNP2K, namun sampai saat ini masih belum dapat diserahkan oleh TNP2K ke daerah daerah. Ke depan semoga data data yang ada dalam BDT dapat kita intervensi semaksimal mungkin dengan sinergi kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2.3.2. URUSAN WAJIB (TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR)

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bukittinggi selama periode 2010- 2015 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja Kota Bukittinggi yang terlibat dalam kegiatan produktif.

Tabel 2.42
Penduduk Usia Kerja Di Kota Bukit Tinggi

Kegiatan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angkatan Kerja	**50.812**	**52.938**	**53.589**	**57.044**	**60.107**
Bekerja	46.188	49.272	51.060	54.805	56.478
Penganggur	4.624	3.666	2.529	2.239	3.629
Bukan Angkatan Kerja	**26.514**	**25.440**	**31.852**	**30.114**	**28.816**
Sekolah	8.141	9.317	14.097	12.208	9.651
Mengurus Rumah Tangga	14.234	12.062	13.227	14.007	12.367
Lainnya	4.139	4.061	4.528	3.899	6.798
Penduduk Usia Kerja	**77.326**	**78.378**	**85.441**	**87.158**	**88.923**
Tpak (%)	**65,71**	**67,54**	**62,72**	**65,45**	**67,59**
Tpt (%)	**9,10**	**6,93**	**4,72**	**3,93**	**6,04**
Tkk (%)	**90,90**	**93,07**	**95,28**	**96,07**	**93,96**

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah Pusdatinaker

Urusan ketenagakerjaan merupakanurusan yang memegang fungsi penting dalam perkembangan pembangunan daerah. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bukittingg cenderung stabil pada tahun 2011 TPAK Kota Bukittinggi sebesar 65,71% dan pada tahun 2015 naik ke angka 67,59%. Dilihat dari perkembangan tingkat pencari kerja pencari kerja yang ditempatkan selama lima tahun terakhir ini mengalami naik turun yang tidak terlalu signifikan. Dapat dilihat pada tahun 2011 sebesar 46,188 pencari kerja yang

ditempatkan dan pada tahun 2015 ini dalam dengan data kondisi Agustus 2015 tingkat pencari kerja yang ditempatkan naik menjadi 56.478 (81,78%).

Tabel 2.43
Angkatan Kerja Di Kota Bukit Tinggi
Menurut Golongan Umur Tahun 2011- 2015

GOLONGAN UMUR	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
15-19	31,05	29,39	16,65	30,65	26,45
20-24	65,95	58,75	48,48	52,63	70,88
25-29	82,32	90,04	79,33	73,07	82,60
30-34	72,09	82,46	79,82	87,29	78,61
35-39	87,02	85,14	80,37	84,77	84,51
40-44	76,83	91,65	88,66	85,89	82,14
45-49	78,29	90,36	92,25	85,50	84,91
50-54	82,69	78,13	78,79	80,90	86,82
55-59	80,68	65,20	80,17	69,82	70,14
60-64	48,62	59,43	64,73	58,29	52,64
65+	19,30	12,25	18,23	26,59	29,18
JUMLAH	65,71	67,54	62,72	65,45	67,59

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah Pusdatinaker

Tingkat pencari kerja yang ditempatkan di Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan fasilitasi dan system penyusunan informasi data penempatan oleh Dinas Tenaga Kerja mengalami perbaikan dan memiliki kontribusi positif pada penurunan angka pengangguran yang ada di Kota Bukittinggi.

Untuk tingkat pengangguran terbuka kota Bukittinggi dari masa RPJMD Kota Bukittinggi mengalami penurunan, ini dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2011 terletak pada angka 9,10% pada tahun 2015 turun secara signifikan menjadi 6.04%.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Anak

Dalam konteks angkatan kerja, persentase pekerja perempuan di kota Bukittinggi pada lembaga pemerintah meningkat setiap tahunnya. Pemberdayaan perempuan diukur dari Indek pemberdayaan gender, yang mengakomodir Jumlah perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi, teknisi, Perwakilan Perempuan di parlemen dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja . Perkembangan Indek pemberdayaan gender di Kota Bukittinggi tahun 2010 sebesar 73,78, tahun 2011 sebesar 69,74, tahun 2012, 69,84, tahun 2013, sebesar 69,67 tahun 2014 69,84 dan tahun 2015 tetap pada posisi 69,84. Dari uraian tersebut jelas terlihat, indek pemberdayaan gender setiap tahunnya meningkat jumlahnya. Peran perempuan dalam dunia kerja setiap tahunnya juga meningkat. Hal ini juga

dikerenakan struktur penduduk kota Bukittinggi yang juga lebih banyak jumlah perempuan dari pada jumlah laki-lakinya.

Kota Bukittinggi telah memperoleh penghargaan Presiden republik Indonesia menjadi Kota Layak Anak pada tahun 2015 . Dari 31 indikator yang harus dipenuhi itu, ada dua indikator umum yang wajib terlebih dahulu dipenuhi. Dua indikator itu yakni penguatan kelembagaan yang menyangkut adanya peraturan perundang-undangan pemenuhan hak anak dan adanya kebijakan persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak.Disamping itu, tersedianya SDM terlatih di kota layak anak juga harus dipenuhi, juga tersedianya data terpilah dan keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Sedangkan untuk indikator kedua yakni klaster hak anak, antara lain klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan, waktu luang, kegiatan kebudayaan dan perlindungan khusus.

Kebijakan dan pogram perlindungan anak di Kota Bukittinggi tidak hanya semata untuk pemenuhan hak dasar anak, tetapi juga untuk pengembangan 4 hak dasar anak melalui berbagai program, diantaranya dengan meningkatkan derajat kesejehteraan anak, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pelayanan pendidikan pra sekolah, pendidikan wajib belajar dan program bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu.

2.3.2.3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan

Ketersediaan pangan di Kota Bukittinggi masih tergantung dari daerah di luar Kota. Untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Bukittinggi, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Kota telah melakukan berbagai upaya, baik dengan cara mandiri maupun bekerjasama dengan daerah sekitar. Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan, diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (*Urban Farming* atau Kawasam Rumah Pangan Lestari), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat adalah menciptakan kondisi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan terpenuhinya cadangan pangan di kota Bukittinggi.

Penyediaan pangan di Kota Bukittinggi hingga saat ini masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya: (i) keterbatasan lahan, (ii) anomali iklim dan (iii) bencana banjir.

2.3.2.4. Pertanahan

Urusan Pertanahan merupakan urusan wajib. Ada 2 lembaga sebagai penaggungjawab urusan pertanahan di daerah, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah. Khusus pada Pemerintah Daerah, kewenangan urusan pertanahan ini menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah, yakni Bagian Pemerintahan Umum. Ada beberapa program yang telah dilakukan dalam menangani masalah pertanahan ini, antara lain program penyelesaian konflik pertanahan, program penataan penguasaaan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan program pengembangan sistim informasi pertanahan.

Sepanjang periode 2010-2014 untuk urusan pertanahan telah diupayakan penyelesaian permasalahan By Pass melalui pengukuran dan pendesaian ulang terhadap kavling-kavling tanah yang belum tuntas,namun disadari bahwa sampai tahun 2015 ini masih terdapat permasalahan-permasalahan konsolidasi by pass yang harus diselesaikan. Untuk penyelesaian permasalahan by pass pihak pemko secara intens dan komit dengan Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, melaksanakan pengukuran lapangan setiap hari Selasa dan Kamis, dengan melibatkan ninik mamak, dan melakukan pendekatan persuasif terhadap pihak terkait yang terkena konsolidasi Bypass. Pemerinatah daerah juga memfasilitasi penerbitan sertifikat terhadap objek tanah konsolidasi bypass melalui APBD setiap tahunnya .

Tabel 2.44
Perkembangan Penyelesaian Permasalahan
Tanah Konsolidasi Bypass Kondisi Tahun 2015

No	Kelurahan	Peta Awal	Peta Pengambilan	Selesai	Masih Dalam Proses Penyelesaian	Ket
1	Kubu Gulai bancah	86	94	91	3	Sertifikat yang telah dterbitkan 603 setifikat
2	Campago Ipuh	68	71	71	-	
3	Manggis Ganting	84	103	85	18	
4	Pulai Anak Air	242	276	221	55	
5	Tarok Dipo	145	163	96	67	
6	Aur Kuning	219	252	187	65	
	Jumlah	844	959	751	208	

Sumber. Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Bukittinggi

Permasalahan dan Kendala dalam penyelesaikan tanah Konsolidasi bypass dan masalah Masalah Tanah Masyarakat Lainnya, disebabkan karena beberapa hal :

1. Adanya pemilik tanah yang terkena konsolidasi yang tidak menerima kavling pengembalian tanah yang telah ditetapkan sehingga perlu dilakukan pendekatan secara persuasif.
2. Pemilik tanah yang telah menerima pengembalian namun dalam penerapannya tidak dapat menguasai tanah pengembalian tersebut karena masih dikuasai oleh pemilik tanah sebelumnya sehingga perlu dilakukan pengukuran dan perubahan desain.
3. Adanya pemilik tanah yang membangun diatas tanah awal, sehingga penerapan penataan tanah konsolidasi tidak bisa dilaksanakan.
4. Adanya sengketa internal dalam kaum pemilik tanah sehingga kesulitan dalam melengkapi dokumen untuk pengajuan sertifikat.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada pengelolaan sampah padat perkotaan, perbaikan akses terhadap sumber air bersih dan pengelolaan air limbah. Perlindungan kawasan konservasi dan memulihkan kembali kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri Kota Bukittinggi, jumlah indusri yang terdapat di Kota Bukittinggi dari tahun ketahun terus meningkat, pada tahun 2014 ini tercatat sebanyak 2.069 industri yang terdiri dari :

1. Industri Pangan, terdiri dari 657 industri
2. Industri sandang terdiri dari 594 industri
3. Industri Kimia dan Bahan Bangunan, terdiri dari 283 industri
4. Industri Logam dan Elektronika, terdiri dari 147 industri
5. Industri Kerajinan, terdiri dari 388 industri

Dari 2.069 industri yang ada di Kota Bukittinggi tersebut, industri yang telah memiliki dokumen AMDAL/UPL/UKL sebanyak 603 industri, berarti tingkat capaian kinerja baru 29,22% dari target 100% yang telah direncanakan. Kemudian, dari 2.069 industri tersebut yang telah memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) baru 1 industri, maka tingkat realisasinya adalah 0,05% sedangkan tingkat capaian kinerjanya hanya 0,01% karena target yang direncanakan sebelumnya adalah 15%. Tingkat capaian kinerja untuk indikator persentase jumlah industri yang memiliki IPAL ini masih sangat jauh dari target, karena belum adanya kesadaran dari para pemilik industri untuk penyediaan IPAL ini. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran aktif dari PERANGKAT DAERAH terkait seperti Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan

Umum untuk mensosialisasikan dan mendorong pemilik industri untuk menyediakan IPAL tersebut.

Persentase sarana kesehatan memiliki IPAL mencapai 56% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa seluruh sarana kesehatan pada tahun 2014 di targetkan memiliki IPAL, capaian tahun 2014 hanya sebanyak 10 sarana kesehatan yang memiliki IPAL dari 18 sarana kesehatan yang diwajibkan memiliki IPAL. Diharapkan 8 sarana kesehatan yang belum memiliki IPAL untuk menganggarkan terlebih dahulu dokumen lingkungannya. Menurut Undang-undang Kesehatan Bab VI pasal 56 menyatakan bahwa sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar, upaya kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang. Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, balai kesehatan dan sarana kesehatan lainnya.

Persentase Hotel/restoran memiliki IPAL. Bukittinggi yang menjadi kota destinasi favorit wisata, baik wisata nusantara maupun wisata mancanegara sangat didukung dengan sarana perhotelan. Mulai dari hotel bintang 4 hingga home stay banyak terdapat di kota wisata ini. Tercatat dari sebanyak 76 hotel di Kota Wisata ini yang telah memiliki IPAL baru 5 buah hotel, yang berarti tingkat realisasi indikator sasaran ini baru 6,6% dari 80% yang ditargetkan dan tingkat capaian baru 8,25%. Ini menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk indikator persentase hotel/restoran yang memiliki IPAL masih sangat rendah dari yang ditargetkan, oleh karena itu diperlukan kerja keras dari PERANGKAT DAERAH terkait seperti Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Budaya dan Pariwisata untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan guna mendorong kesadaran para pengusaha hotel untuk menyediakan IPAL.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sasaran ini adalah:

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup,
2. Pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan berdampak lingkungan,
3. Penunjang operasional tim koordinasi pos pengaduan lingkungan hidup,
4. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan,
5. Koordinasi Penyusunan AMDAL,
6. Pengkajian dampak lingkungan.

Terkelolanya Limbah Usaha/Kegiatan/Industri sesuai dengan Standar Lingkungan. Capaian kinerja sasaran ini diukur berdasarkan capaian kinerja indikator sasaran, yaitu: Persentase industri yang telah memiliki dokumen AMDAL/UPL/UKL, Persentase rumah sakit/klinik/sarana kesehatan yang telah memiliki IPAL, Persentase hotel/restoran yang

memiliki IPAL, persentase industri yang memiliki IPAL. Capaian tersebut tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Terkelolanya limbah/usaha/ kegiatan/industri sesuai dengan standar lingkungan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
		2014	2013	2012
Terkelolanya limbah/usaha/ kegiatan/industri sesuai dengan standar lingkungan	Persentase industri yang telah memiliki dokumen AMDAL/UPL/UKL	70%	70%	70%
	Persentase rumah sakit /klinik/ sarana kesehatan yg telah memiliki IPAL	56%	56%	56%
	Persentase hotel yang memiliki IPAL	8,25%	16%	10%
	Persentase restoran yang memiliki IPAL	91,25%	73%	55%
	Persentase industri yang memiliki IPAL	0,01%	-	-

Sumber. Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi

Dari capaian yang ditargetkan di tahun 2014, persentase industri yang telah memiliki dokumen AMDAL/UKL/UPL tingkat capaian kinerjanya adalah 70%. Ini berarti bahwa tidak ada peningkatan jumlah industri yang memiliki dokumen AMDAL/UPL/ UKL semenjak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Hingga tahun 2014 jumlah industri yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi adalah sebanyak 2.069 industri. Kemudian indikator kinerja persentase rumah sakit/klinik/sarana kesehatan yang telah memiliki IPAL, dari 18 sarana kesehatan yang diwajibkan memiliki IPAL, telah ada 10 sarana kesehatan yang memiliki IPAL, yang berarti tingkat capaian kinerja untuk indikator ini adalah 56%. Kemudian untuk indikator kinerja persentase hotel menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013, hal ini disebabkan karena pada tahun 2013 jumlah Hotel hanya 32 buah sedangkan pada tahun 2014 ini tercatat ada 76 hotel, sedangkan yang memiliki IPAL tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 5 hotel. Capaian kinerja untuk indikator restoran yang memiliki IPAL ada peningkatan menjadi 91,25% di tahun 2014. Sedangkan capaian persentase jumlah industri yang memiliki IPAL sangat rendah sekali yaitu hanya sebesar 0,01% karena dari 2.069 industri yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan hanya ada 1 (satu) industri yang memiliki IPAL.

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Capil

Dari sistim aplikasi SIAK ini online dengan berbasis internet dan Single Identity Number ini, dapat digunakan sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat atas berbagai manam kebutuhan yang berhubungan dnegan administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil, antara lain Kartu KeluargaKartu Tanda penduduk dan Akta catatat Sipil. Penduduk suatu wilayah dibuktikan salah satunya dengan kartu tanda penduduk yang mempunyai nomor induk kependudukan tunggal. Pengendalian penduduk salah satu indikatornya adalah seberapa jauh kesadaran masyarakat untuk memiliki dan melengkapi administrasi kependudukannya antara lain kartu tanda penduduk. Untuk hal ini pemerintah pusat telah menetapkan KTP secara elektronik yang terkoneksi dalam data based di pusat.

Dari data yang ada dari tahun ketahun terlihat masih ada penduduk yang dalam usia wajib KTP yang belum mempunyai KTP, walaupun rasionya relatif meningkat setiap tahun. Idealnya penduduk yang wajib KTP sama dengan penduduk yang memiliki KTP. Kenyatan sebagai contoh di tahun 2014, penduduk yang telah mempunyai KTP sejumlah 48.108 jiwa sedangkan kelompok umur wajib KTP hanya sejumlah 85.071 jiwa, atau rasio 56,55, yang mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Dari data data diambil kesimpulan bahwa masih banyak dari pendududk yang tidak memiliki KTP.

Untuk menindak lanjuti hal di atas, peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus ditingkatkan dalam hal ini, dengan memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya melengkapi administrasi kependudukan antara lain KTP, melakukan razia kependudukan, serta memperbanyak himbauan kepada seluruh stakeholkder kota agar menyertakan persyaratan dalam setiap pengurusan dengan wajib KTP. Kerjasama seluruh elemen kota sangat dimintakan dan saling bersinergi untuk meningkatkan tentang wajib KTP bagi setiap penduduk usia wajib KTP dimaksud. Jika hal ini telah terlaksana dengan baik maka siapapun itu dimanapun berada dapat dipantau dengan adanya sistim administrasis kependudukan (SIAK) yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan basis nomor induk kependudukan secara tunggal. Secara lengkap dapat kita dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46
Rasio Penduduk Yang Telah Memiliki KTP dan
Penduduk Yang Wajib Tahun 2010- 2014 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Penduduk yang telah memiliki KTP	21.112	34.840	41.288	30.645	48.108
2	Penduduk wajib KTP	71.976	82.990	85.986	53.294	85.071
3	Persentase	29,33	41,98	48.01	57,50	56,55

Sumber : BDA 2015

Data di atas jelas terlihat bahwa masih banyak penduduk Kota Bukittinggi yang belum memiliki KTP pada saat usia wajib KTP. Dengan adanya peningkatan program kegiatan pada PERANGKAT DAERAH terkait dapat memperkecil masalah administrasi kependudukan

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Lembaga yang memiliki peran didalam pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Rukun Warga (RW).

LPM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi:

a) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d) Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat pelestarian dan pengembangan, hasil-hasil pembangunan secara partisipatif,
e) Tumbuh kembang dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
f) penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
g) Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
h) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
i) Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
j) Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan peran sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga miskin, meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan masyarakat secara aktif untuk bergotong royong.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis.

Kelompok dasawisma inilah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dibawah naungan PKK untuk menyampaikan pesan program dan kegiatan . Untuk mengaktifkan fungsi dan kualitas Dasawisma ini diperlukan peran masyarakat dan pemerintah. Perkembangan kelompok dasawisma dari tahun ketahun di Kota Bukittinggi relatif tetap, dan sesuai dengan jumlah penduduk, maka kelompok dasawisma terbanyak terdapat ada kecamatan MKS yakni 425, disusul kecamatan Guguk Panjang 3878 dan ABTB 288 . kelompok ini dibentuk dalam 10 rumah tangga menjadi 1 Dasawisma pada setiap kelurahan. Peran wanita sebagai ibu rumah tangga diupayakan untuk terus meningkat dan berperan sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan, maka melalui kelompok dasawisma ini merupakan salah satu bentuk peningkatan peran perempuan dimaksud. Perkembangan lebih lengkap dasa wisma dapat dilihat ada tabel berikut :

Tabel 2.47
Jumlah Kelompok Dasa Wisma Tahun 2010 s.d 2014
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	MKS	428	428	425	425	425	425
2.	GP	388	388	388	388	388	388
3.	ABTB	281	282	288	288	288	288
	Jumlah	1.097	1.098	1.101	1.101	1.101	1.101

Sumber: TP PKK Kota Bukittinggi

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tantangan bagi pembangunan kesejahteraan di Kota Bukittinggi. Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 101.024 Jiwa , terdiri dari 50.630 jiwa laki laki atau 50,12% dan 50.394 jiwa perempuan atau setara dengan 49,88%. Sedangkan jumlah anak sebesar 18.168 jiwa terdiri dari 9.311 anak laki – laki atau 5,25% dan 8.857 anak perempuan atau 48,75% . Apabila kita tambahkan jumlah penduduk perempuan dan jumlah anak di Kota Bukittinggi mencapai 68.562 jiwa atau 67,88%. Artinya struktur penduduk Bukittinggi telah dengan jelas mereferensi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memfokuskan manfaat pembangunan kesemua penduduk terutama perempuan dan anak, Karena baiknya sebuah Kota bahkan Negara memang lebih banyak ditentukan oleh kwalitas perempuannya dan pola asuh keluarga terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Apalagi dikaitkan dengan puncak bonus demografi tahun 2028, dimana struktur penduduk Kota Bukittinggi jumlah penduduk produktif (18 s/d 65 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk non produktif (≤ 17 s/d ≥ 66 tahun). Artinya kebijakan pembangunan yang tidak memastikan penduduk produktif memiliki kompetensi dan berkwalitas, justru akan mendatangkan permasalahan yang sangat komplek. Pemerintah harus memastikan, penduduk produktif harus memiliki pekerjaan dan tabungan, harus berpendidikan, harus sehat, harus memiliki fondasi agama dan budaya yang kuat. Sehingga dengan kondisi tersebut, struktur penduduk tahun 2028 tersebut dipastikan memberikan bonus. Apabila kondisi tersebut tidak terjadi maka yang di tahun 2028 kondisi yang ada justru bencana demografi, karena jumlah penduduk yang besar tersebut tidak berkwalitas. Apabila ditarik ketahun 2017, maka penduduk yang berumur mulai 7 tahun sampai dengan penduduk berumur 54 tahun harus dipastikan mendapat porsi pembinaan dan pembangunan yang terintegrasi dan memastikan mereka memiliki kwalitas dan kompetensi yang baik.

Program Keluarga Berencana berkaitan dengan dapat ditekannya angka kematian ibu dan anak dan dapat mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi. Memiliki anak lebih sedikit dan lebih sehat dapat mengurangi beban ekonomi pada keluarga miskin, dan memungkinkan mereka menginvestasikan sumberdayanya dalam pengasuhan, perawatan dan sekolah anak, sehingga nantinya dapat memutuskan mata rantai kemiskinan. Investasi KB juga membuka “a window of opportunity” (jendela kesempatan) bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat melalui penurunan fertilitas dan perubahan struktur umur populasi dan angka ketergantungan (dependency ratio). Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

Tabel 2.48
Perkembangan Program Keluarga Berencana di Kota Bukititinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Peserta program KB Aktif	11.231	11.000	11.418	11.287	11.433	11.304
2	Jumlah Akseptor KB	5.118	5.216	4.447	3445	4148	3432
3	Jumlah Pasangan Usia Subur	16.213	16.007	16.263	16.240	16.345	16.385
4	Jumlah Pasangan usia subur ber KB	10.721	10.819	11.039	10.295	9350	9350

2.3.2.9. Perhubungan

Perkembangan penduduk kota Bukittinggi yang tiap tahun terus meningkat menuntut jalur perhubungan darat yang semakin baik dan dapat menjangkau semua tempat. Infrastruktur utama pendukung perhubungan yakni jalan. Panjang jalan di Kota Bukittinggi dalam periode 5 tahun ini relatif tidak menagalami penambahan yang signifikan yakni pada tahun 2011 sepanjang 194,18 Km, tahun 2012 sepanjang 198,18 Km, tahun 2013 sepanjang 198,18 dan pada tahun 2014 Kota Bukittinggi telah memiliki Fly Over pertama yang berlokasi di pasar Aur Kuning dengan panjang 675 M melalui alokasi dana APBN, dengan kehadiran Fly Over ini diharapakan dapat mengurai masalah kemacetan di pasar Aur Kuning. Kondisi jalansebagian besar telah diaspal yakni terakhir sepanjang 197,51 Km

Disamping kondisi jalan, infrastruktur terminal yang nyaman juga akan sangat mendukung perkembangan perhubungan, terminal yang ada di Bukittinggi terdiri atas terminal Bis dengan luas 1200 M2 dengan daya tampung 121 unit. Revitalisasi terminal bis Simpang Aur dari tahun ke tahun terus diupayakan dengan stakeholder kota untuk mengembalikan fungsi terminal sebagaimana mestinya. Disamping terminal bis, juga terdapat 1 terminal angkutan kota dengan luas 500M2 dengan daya tampung 30 unit.

Perkembangan angkutan umum dari tahun ke tahuan mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas yakni pada tahun 2011 angkutan umum di kota Bukittinggi berjumlah 410 unit, pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 406 pada tahun 2013 meningkat yakni 478 unit dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah 536 unit Angkutan umum yang tersedia dapat melayani 28.944.300 penumpang. Jumlah angkutan umum yang tersedia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bukittinggi masih belum seimbang dimana angkutan umum yang seharusnya tersedia adalah sebanyak 704 unit.

Untuk mendukung lalu lintas jalan, sepanjang tahun 2011-2014 telah dilakukan upaya penambahan marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, pemasangan cermin tikung, pengadaan Warning Light Solar, pembuatan pita kejut, pemasangan Guardra, pemsanagan alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) serta pemeliharaan traffic light. Dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah rambu yang ada sebanyak 396 unit, sedangkan jumlah rambu yang seharusnya ada yakni 600 unit
- Jumlah marka yang ada yakni 1500 unit dari 39000 unit yang seharusnya tersedia.
- Jumlah guardrail yang ada sebanyak 500 unit, sedangkan yang seharusnya ada berjumlah 2500 unit.

Hal-hal ini diupayakan untuk mengurangi angka kecelakaan lau lintas, terakhir tercatat angka kecelakaan lalu lintas yakni sebanyak 236 kali dengan korban meninggal sebanyak 50 orang, luka berat 43 orang dan luka ringan 356 orang.

Disamping peningkatan infrastruktur jalan dan terminal, pembangunan prasarana parkir yang representatif terus diupayakan, hal ini untuk mengurangi parkir-parkir liar yang terus menjamur dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan pengunjung. Keinginan pemerintah kota untuk membangun gedung parkir yang representatif mendapat

dukungan dari Pemerintah Propinsi dan melalui fasilitasi pemerintahan propinsi ditetapkanlah lokasi pembangunan pada tanah milik Eks Dinas Kehutanan Provinsi di Jalan Perintis Kemerdekaan dengan luas 1927,87M2. Begitu juga halnya dengan DPRD yang mendukung secara penuh melalui kesepakatan pengalokasian anggaran pembangunan gedung parkir pada APBD Tahun 2012,2013 dan 2014. Gedung parkir yang terdiri atas 4 lantai tersebut dan mampu menampung 295 unit mobil diharapkan dapat mengurangi permasalahn parkir di Kota Bukittinggi.

Disamping meningkatkan sarana pendukung lalu lintas, pemerintah juga melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan bagi para sopir angkutan umum dan masyarakat akan pentingnya keselamatan lalu lintas, bahkan untuk para sopir angkutan diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya kegiatan pemilihan sopir angkutan teladan dengan indikator kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan lalu lintas.

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bukittinggi sepanjang tahun 2011-2014 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengadaan peralatan pendukung jaringan dan penambahan Bandwidh untuk akses internet dari 1 MBps menjadi 3 MBps. Pada tahun 2011 dilakukan penambahan Bandwidh untuk akses internet menjadi 6 MBps dengan adanya penggunaan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan LPSE (layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Bukittinggi, maka baru termanfaatkan jaringan Intranet dan Internet Pemko Bukittinggi. Meskipun bandwith untuk akses internet telah ditambah menjasi 6 MBps, tetap saja akses aplikasi SIPKD dari masing-masing PERANGKAT DAERAH terasa lambat. Melihat Kondisi jaringan yang seperti ini,maka pada tahun 2012 dilakukan penambahan radio di semua PERANGKAT DAERAH. Dengan penambahan radio ini akan mempengaruhi akses jaringan Intranet, dimana dengan peningkatan kapasitas radio dari 54 MBps menjadi 300 MBps akan bisa meningkatkan akses aplikasi yang dijalankan melalui jaringan.

Tahun 2013 dilaksanakan penambahan jaringan ke 6 puskesmas..Semua komputer di Lingkungan Sekretaris Daerah dan semua PERANGKAT DAERAH, Kecamatan dan Puskesmas yang terkoneksi ke jaringan sudah online dan sekaligus tersambung ke internet. Pada tahun 2014 dilaksanakan pemindahan hosting website dari penyewa hosting ke server Bukittinggi serta penyediaan Web server dan mail server dan juga pengembangan beberapa aplikasi diantaranya aplikasi laporan belanja modal, aplikasi kartu kendai, aplikasi surat nikah untuk kelurahan, aplikasi inventaris barang pakai habis, aplikasi SIMPEG.Masih pada tahun yang sama dilakukan juga pemasangan VoIP ke beberapa PERANGKAT DAERAH.

Untuk mengetahui perkembangan jumlah menara telekomunikasi di Kota Bukittinggi periode 2010-2014 seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.49
Data Menara Telemomunikasi Di Kota Bukittinggi
Tahun 2010-2015

NO	Tahun	Jumlah Menara
1	2010	29
2	2011	33
3	2012	33
4	2013	33
5	2014	34
6	2015	34

Sumber : Dishubkominfo 2010-2015

Dalam hal perkembangan infomasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media cetak, setiap tahunnya pemerintah Kota Bukittinggi selalu membuat MoU kerjasama dengan berbagai media cetak yang terbit di Bukittinggi, dan begitu juga dengan radio, sampai dengan tahun 2015 ini Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Radio Elsi secara rutin pada tiap minggunya mengagendakan acara yang bertajuk Dialog Interaktif "Selamat Pagi Walikota" yang membahas berbagai permasalahan Kota dengan narasumber Walikota dan Kepala PERANGKAT DAERAH.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemberitaan kegiatan pemerintah secara aktif dipublikasikan melalui website Pemerintah Kota Bukittinggi yakni www.bukittinggikota.go.id, pada tahun 2012 telah dipublish sebanyak 438 content berupa berita, berita foto dan artikel sedangkan pada tahun 2014 meningkat sebanyak 479 content berita.

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan urusan ini antara lain adalah peningkatan jumlah koperasi dan penambahan jumlah usaha kecil dan menengah di Kota Bukittinggi. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode 2011-2015 di Kota Bukittinggi pada masing-masing indikator akan diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi aktif

Pada tahun 2011, sudah ada 102 koperasi yang terdaftar secara resmi di Pemerintah Kota Bukittinggi dan yang aktif adalah sebanyak 77 koperasi atau 75,49%. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan 5 koperasi yang aktif, sehingga koperasi yang aktif menjadi

83 koperasi atau 82,18%, pada tahun 2012 juga diiringi dengan menurunnya jumlah koperasi di Kota Bukittinggi menjadi 101 koperasi. Pada tahun 2013 jumlah koperasi yang aktif menurun menjadi 82 koperasi atau 81,18%, begitu juga pada tahun 2014 jumlah koperasi yang aktif terjadi penurunan sebanyak 1 koperasi sehingga koperasi yang aktif menjadi 81 koperasi atau 81% dan diiringi dengan penurunan jumlah koperasi menjadi 100 koperasi dan pada Tahun 2014 terjadi kenaikan jumlah koperasi yang aktif yaitu 83 koperasi atau 83%. Perkembangan koperasi di Kota Bukittinggi tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah koperasi aktif	75	77	83	82	81	83
2	Jumlah koperasi	106	102	101	101	100	100
3	Persentase koperasi aktif	70,8	75,49	82,18	81,18	81,00	83,00

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi

2. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM

Jumlah seluruh UKM/UMKM selalu mmeningkat setiap tahunnya, peningkatan yang terjadi setiap tahun rata-rata mencapai 46%. Hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang produktif, karena adanya pertumbuhan dan iklim usaha mikro dan kecil yang membaik dan kondusif. Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi, usaha kecil dan mikro lebih resisten dibanding perusahaan perusahaan yang lebih besar. Hal inilah yang akan terus dijaga dan ditingkatkan melalui rencana fasilitasi permodalan yang mampu mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat yang tidak hanya aktif namun juga benar sehat sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembangan usaha mikro dan kecil.

Tabel 2.51
Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2011 s.d 2015
Di Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah seluruh UKM/UMKM	-	-	4.559	7.803	9.544	9.302
2.	Jumlah BPR/LKM	49	49	49	49	49	49
3.	Jumlah UKM non BPR/LKM	-	-	4.510	7.753	9.495	9.341

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi

Namun pada Tahun 2015 terjadi penurunan jumlah UMKM, karena UMKM yang berusaha pada lokasi yang tidak ada izin tidak lagi menjadi objek pendataan.

a. Jumlah BPR/LKM

Perkembangan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bukittinggi selama tahun 2011-2015 tidak mengalami pertumbuhan, dimana dalam kurun waktu tersebut jumlah BPR yang beroperasi tetap berjumlah 3 unit. Demikian juga halnya untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga tidak mengalami pertambahan jumlahnya. Pada kurun waktu yang sama jumlah LKM yang beroperasi tetap berjumlah 46 unit, seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 2.52
Jumlah BPR/LKM Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah BPR	3	3	3	3	3	3
2	Jumlah LKM	46	46	46	46	46	46
3	Jumlah BPR dan LKM	49	49	49	49	49	49

Sumber: Buku Statistik Ekonomi Keuangan Bank Indonesia Tahun 2010-2015,

Jumlah BPR dan LKM yang ada di Bukittinggi relatif mampu mendukung perkembangan UMKM yang ada di Bukittinggi dalam bentuk penyediaan fasilitas kredit, dengan demikian jumlahnya sudah mencukupi permintaan yang ada.

2.3.2.12. Penanaman Modal

Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) di Kota Bukittinggi pada tahun 2014 mencapai 5 investor dengan 15 perusahaan aktif dengan nilai investasi sebesar Rp. 58.578.000.000,-

Tabel 2.53
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015
Kota Bukittinggi

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2010	Jumlah Investor	-	-	-
2011	Jumlah Investor	-	-	-
2012	Jumlah Investor	-	-	-
2013	Jumlah Investor	-	-	-
2014	Jumlah Investor	5	-	5
2015	Jumlah Investor			

Sumber: BP2TPM Kota Bukittinggi

Tabel 2.54
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015
Kota Bukittinggi

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	JumlahProyek	Nilai Investasi	JumlahProyek	Nilai Investasi
2011	-	-	-	-
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2014	- 19 perusahaan aktif - 9 perusahaan tidak aktif sementara	58.758.000.000 31.500.000.000	19 perusahaan aktif	58.758.000.000
2015	-	-	-	-

Sumber: BP2TPM Kota Bukittinggi

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan Pemerintah Kota Bukittinggi. Bidang Pemuda Kota Bukittinggi melakukan terobosan-terobosan untuk memberikan bimbingan, pembinaan terhadap Organisasi kepemudaan di Kota Bukittinggi, Organisasi Kepemudaan di Kota Bukittinggi sebanyak 33 Organisasi.

Khusus Pembenahan sarana dan prasana olahraga selama 5 tahun terakhir. Disdikpora Kota Bukittinggi telah melaksanakan perbaikan sarana olahraga antara lain rehabilitasi lapangan Sepak Bola Atas Ngarai khusus bagian track lapangan pada tahun 2012 sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat maupun atlit yang melaksanakan latihan dan aktivitas olahraga. Tahun yang sama lapangan Bola Basket Atas Ngarai juga dilaksanakan perbaikan pada bagian lapangan oleh karena lapangan tersebut tidak layak lagi untuk tempat berolahraga. Tahun 2014 lapangan Sepak Bola Atas Ngarai khususnya tribun juga dilakasanakan rehabilitasi, demikian juga lapangan Basket Atas ngarai yaitu berupa pembuatan tribun mini, hal ini dilaksanakan untuk menimbulkan kenyamanan bagi masyarakat terutama pengguna lapangan olahraga Bola Basket.

Tabel 2.55
Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kecamatan ABTB	9	9	9	9	10	10
2.	Kecamatan MKS	9	9	9	9	10	10
3.	Kecamatan GP	11	11	11	11	13	13
4.	Jumlah	29	29	29	29	33	33

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi

Dari data tersebut di atas, terdapat peningkatan jumlah organisasi keolahragaan di Kota Bukittinggi, namun pemerataan pada masing masing kelurahan masih belum terlihat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.56
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kecamatan ABTB	2	2	2	2	2	3
2.	Kecamatan MKS	2	2	2	2	2	3
3.	Kecamatan GP	2	2	2	2	2	4
	Jumlah	6	6	6	6	6	10

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi

Tabel 2.57
Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kecamatan ABTB	2	2	2	3	3	3
2.	Kecamatan MKS	2	2	2	3	3	3
3.	Kecamatan GP	4	4	5	5	5	5
4.	Jumlah	8	8	9	11	11	11

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kota Bukittinggi

Terlihat aktiitas kepemudaan di bidang olah raga sangat sedikit sekali. Jika pemuda kurang disibukkan dengan aktifitas, termasuk aktifitas olaharaga maka pemuda akan menjadi kurang kreatif dan kurang menggali potensi diri. . Untuk itu akan banyak timbul masalah sosial. Oleh sebab itu, maka ke depan kita perlu meningkatkan aktifitas kepemudaan termasuk bidang keolahragaan agar generasi muda menjadi kreatif.

2.3.2.14. Statistik

Urusan statistik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Dinas Pertanian. Buku Kota Bukittinggi Dalam Angka selalu tersedia dari tahun ke tahun . Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kota Bukittinggi dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan.

2.3.2.15. Kebudayaan

Sejak tahun 2013 diselenggarakan 1 acara seni dan budaya yang bernama Bukittinggi Baralek Gadang (BBG). Acara ini diselenggarakan oleh DInas Kebudyaan dan Pariwisata dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bukittinggi. Di dalam acara bernuansa islami ini terdapat berbagai acara dan lomba seni dan budaya antara lain makan bajamba, lomba baju kurung basiba dan perlombaan adat lainnya untuk seluruh masyarakat Kota Bukittinggi. Kegiatan serupa juga berlanjut pada tahun 2013 dan 2014 untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Bukittinggi.

Disamping menyelenggarakan dan melestarikan kegiatan-kegiatan budaya, pelestarian benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya juga mendapat perhatian Pemerintah Kota. Berpedoman pada lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 tahun 2012 tentang Daftar dan Kategori Benda Cagar BUdaya dan Peninggalan Sejarah di Kota Bukittinggi terdapat 42 benda cagar budaya dan peninggalan sejarah diantaranya Jam Gadang, Istana Bung Hatta, Gua Jepang Panorama (Lobang Jepang), Benteng Fort De Kock dan rumah kelahiran Bung Hatta dan lain-lain.

2.3.2.16. Perpustakaan

Walaupun Kota Bukittinggi hanya memunyai 1 perpustakaan, namun minat baca masyarakat khususnya pelajar masih bisa teratasi dengan adanya perpustakaan sekolah mulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi. Pustaka yang sederhana pada masing masing sekolah mampu untuk mengatasi dan menyalurkan hobby membaca setiap pelajar dan mahasiswa. Namun kondisi saat ini perpustakaan sekolah masih mempunyai sarana dan prasarana yang seadanya, sehingga para pelajar juga banyak meminjam buku pustaka untuk dinikmati di rumah.

Disamping itu untuk pelayanan minat baca pelajar di tingkat Sekolah Dasar maka sejak tahun 2010 dilengkapi dengan adanya mobil perpustakaan keliling, yang setiap harinya mengelilingi 4 sekolah dasar secara bergiliran. Murid murid dapat meminjam buku,tanpa dipungut biaya. Jika dibandingkan dengan jumlah sekolah dasar yang ada, mobil perpustakaan keliling inipun jauh dari memadai, dan harus dilakukan penambahan armada.

2.3.2.17. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kota Bukittinggi sejak tahun 2011 masih mengunakan sistem manual. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan yang handal dan profesional perlu ditingkatkan agar arsip dapat dijamin.

Urusan wajib kearsipan ini menjadi kewenangan dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD). Untuk penyelenggaraan urusan ini, sejak tahun 2011, KPAD mempunyai 3 program, yakni program penyelamatan dan pelestaraian dokumen/arsip daerah, program pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan dan program peningkatan kualitas pelayanan informasi. KPAD berkewenagan untuk melakukan pembinaan arsip-arsip penting yang ada di PERANGKAT DAERAH, melalui pembinaan, sosialisasi dll.

Khusus Pengelolaan Arsip In-Aktif, PERANGKAT DAERAH yang arsipnya dibawah jangka waktu 10 tahun dapat mengelola arsipnya di PERANGKAT DAERAH masing-masing, sedangkan masa retensi arsipnya minimal 10 tahun, dapat menyerahkan arsipnya ke lembaga kearsipan (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bukittinggi). Namun kenyataan PERANGKAT DAERAH masih menyimpan pola arsip sendiri yang mudah diingat dan dimengerti sendiri dan belum maksimal mempedomani tata pola penyimpanan arsip pola baru yang tercantum dalam Perwako 20 tahun 2012.

2.3.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Kota Bukittinggi merupakan daerah perbukitan dan tidak mempunyai laut yang berkontribusi untuk menghasilkan produksi ikan. Namun untuk segi perikanan tidak begitu menonjol, dan lebih banyak menghasilkan ikan untuk dikunsumsi rumah tangga sendiri. Untuk konsumsi ikan pada umumnya berasal dari daerah luar Kota Bukittinggi.

2.3.3.2. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Bukittinggi dan menyumbangkan kontribusi paling besar terhadap perekonomian Kota Bukittinggi. Pengembangan sektor pariwisata dapat diarahkan pada destinasi pariwisata. Selain itu, terobosan dalam ketersediaan sarana prasarana pendukung pariwisata menjadi salah satu perhatian penting untuk meningkatkan kunjungan wisata, diantaranya dapat melalui bus/tram wisata, sepeda wisata serta pengadaan fertival dan destinasi wisata baru, agar Kota Bukittinggi tetap aktraktif dan didukung dengan media promosi yang efektif.

Kota Bukittinggi merupakan destinasi wisata unggulan Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Perkembangan pariwisata Kota Bukittinggi ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata perkotaan dalam bentuk berbagai fitur kota, baik elemen primer maupun sekunder seperti: pengetahuan, sejarah, budaya, *heritage*, kuliner, belanja dan lainnya.

Objek wisata unggulan Kota Bukittinggi berjumlah 15 lokasi, yang didukung oleh beberapa wisata kuliner yang diminati wisatawan baik dalam negeri maupun manca Negara. Penunjang wisata lainnya dengan yaitu 16 hotel berbintang dan 46 hotel melati, 35 buah rumah makan/ restoran, 17 bank, 8 rumah sakit, 20 buah tour dan travel serta 6 sanggar seni.

Kota Bukittinggi saat ini juga didominasi oleh kegiatan wisata belanja, khususnya dengan adanya tiga pasar besar yaitu pasar aur kuning, pasar bawah dan pasar atas., serta wisata berbasis sejarah juga menjadi unggulan utama kawasan wisata ini.Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi selama periode 2010-2015 terjadi peningkatan yang signifikan.

A. Kunjungan Wisata

Bukittinggi merupakan destinasi tujuan utama untuk pariwisata di Propinsi Sumatera Barat yang didukung oleh banyak daya tarik wisata yang dapat dikunjungi, antara lain Jam Gadang yang merupakan ikon Kota Bukittinggi, Gedung Istana Negara Bung Hatta, Benteng Fort De Kock, TMSBK, Panorama, Panorama Baru, Musium Rumah Kelahiran Bung Hatta, Lobang Jepang, Jenjang Seribu, Musium Rumah Adat Nan Baanjuang, Musium Tri Daya Eka Dharma. Disamping udaranya yang sejuk didukung oleh akomodasi yang memadai serta fasilitas pendukung lainnya, sehingga dapat melayani kebutuhan wisatawan baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Tabel 2.58
Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2010-2015

No.	Wisatawan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Mancanegara	34.882	26.629	26.802	32.067	32.501	25.970
2.	Domestik	291.531	332.246	360.191	404.145	400.537	434.935
	Jumlah	326.413	358.875	386.993	436.212	433.038	460.905

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Jumlah wisatawan asing sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 yang datang ke Kota Bukittinggi terjadi penurunan namun untuk wisatawan domestik cenderung naik dengan laju pertumbuhan wisatawan domestik 1,08% pertahun dan secara total laju pertumbuhan wisatawan enam tahun terakhir ini adalah 1,07% per tahun.

B. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Sektor pariwisata dalam sistem perekonomian Kota Bukittinggi diasumsikan masuk ke dalam sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam struktur PDRB. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan 2010, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Tahun 2011-2015

No.	Kontribusi Sektor Pariwisata	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	ADHB	3,92	4,13	4,43	4,74	4,94	5,46
2.	ADHK	3,92	4,05	4,26	4,37	4,43	4,53

Sumber: PDRB Bukittinggi 2011-2014dan BDA

Dilihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010, Kontribusinya dalam PDRB Kota Bukittinggi berkisar pada angka 4%-6% setiap tahun dan kontribusinya cenderung meningkat. Nilai tambah di sektor pariwisata ini didukung oleh ketersediaan hotel, restoran dan pendukung lainnya yang ada di Kota Bukittinggi.

2.3.3.3. Pertanian

2.3.3.3.1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Sebagai daerah perkotaan Kota Bukittinggi masih memiliki lahan untuk pertanian seluas 633 Ha. Daerah yang merupakan sentra pertanian adalah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan karena masih mempunyai lahan yang luas. Produksi pertanian terbesar adalah produksi padi yang disusul dengan ketela rambat, ketela pohon dan jagung yang merupakan bahan pangan utama lokal lainnya selain padi.

Perhitungan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya didapat dari perhitungan perbandingan antara produksi tanaman padi atau bahan pangan utama

lokal lainnya (ton) dengan luas area tanaman padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (ha). Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya dapat dilihat pada beberapa tabel berikut.

Tabel 2.60
Produktivitas Padi Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

No.	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2010	4.485	831	53,97
2.	2011	4.041	783	51,61
3.	2012	5.471	800	68,40
4.	2013	4.463	823	54,24
5.	2014	5.063	763	64,53
6.	2015	4.200	633	66,7

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2010-2015

Produktivitas padi sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 terjadi fluktuatif dimana produktivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 68,4 kwintal per hektar dan pada tahun pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 54,24 kwintal per hektar. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 mulai naik kembali, namun tidak sebesar produktivitas pada tahun 2012.

Tabel 2.61
Produktivitas Jagung Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

No.	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2010	316,00	79	20,97
2.	2011	207,64	59	35,19
3.	2012	197,12	56	35,20
4.	2013	360,39	47	76,68
5.	2014	111,06	18	61,70
6.	2015	104,84	15,6	67

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2010-2015

Produktivitas jagung sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 terjadi fluktuatif dimana produktivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 76,68 kwintal per

hektar dan pada tahun pada tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 61,70 kwintal per hektar. Pada tahun 2015 produktivitas jagung mulai naik kembali, namun tidak sebesar produktivitas pada tahun 2013.

Tabel 2.62
Produktivitas Ketela Rambat Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

No.	Tahun	Produksi Ketela Rambat (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2010	407,00	23	176,96
2.	2011	533,80	17	314,00
3.	2012	785,00	25	314,00
4.	2013	596,60	19	314,00
5.	2014	587,92	16	367,45
6.	2015	367,50	14	262,50

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2010-2015

Produktivitas ketela rambat sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 terjadi fluktuatif dimana produktivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 258,09 kwintal per hektar dan pada tahun pada tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 245,19 kwintal per hektar begitu juga pada tahun 2015 terjadi penurunan produktivitas ketela rambat.

Tabel 2.63
Produktivitas Ketela Pohon Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

No.	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2015	367,50	14	262,50
2.	2014	587,92	16	367,45
3.	2013	596,60	19	314,00
4.	2012	785,00	25	314,00
5.	2011	533,80	17	314,00
6.	2010	407,00	23	176,96

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2010-2015

Produktivitas ketela pohon sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 terjadi fluktuatif dimana produktivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 367,45 kwintal per

hektar namun pada tahun 2015 terjadi penurunan produktivitas ketela pohon menjadi 262,50 kwintal per hektar.

2.3.3.3.2. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kontribusi kategori pertanian terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Selain terjadinya penurunan lahan pertanian juga disebabkan oleh faktor musim.

Tabel 2.64
Kontribusi Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 s.d. 2015

No.	Kategori	Tahun (%)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,80	1,72	1,58	1,49	1,46	1,43

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2010-2014 dan BDA

2.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral selama periode 2010-2015 terlihat pada kontribusi pertambangan dan penggalian pada perekonomian kota Bukittinggi.

Tabel 2.65
Kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian pada PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010- 2015

No.	Kategori	Tahun (%)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Pertambangan dan Penggalian	0,0035	0,0033	0,0033	0,0031	0,0032	0,0032

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2010-2014

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB dari tahun 2010 hingga tahun 2015 sangat kecil sekali dan secara umum mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi dikarenakan kegiatan pertambangan khususnya bahan tambang galian C tidak mempunyai potensi yang banyak dan secara bertahap sudah mulai berkurang aktivitasnya.

2.3.3.5. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Bukittinggi dan terus menunjukkan trend perkembangan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Bukittinggi. Jika tahun 2010 kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB mencapai 31,89% dengan nilai nominal Rp.1,114 Triliun, pada tahun 2015 kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB sudah mencapai 33,64% dengan nilai nominal Rp. 2,058 triliun.

Tabel 2.66
Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2010 s.d. 2015

No.	Kategori	Tahun (%)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perdagangan Besar dan Eceran	31,89	32,36	32,39	32,23	32,75	33,64

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2010-2015 dan BDA

Pelayanan di bidang perdagangan dilakukan melalui peningkatan sarana prasarana di tiga lokasi pasar yaitu Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur dalam rangka menciptakan suasana yang nyaman bertemunya para pedagang dan pembeli untuk bertransaksi.

Sektor perdagangan Kota Bukittinggi ditopang oleh keberadaan 3 pasar tradisional (Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur). Keberadaan pasar tradisional perlu juga direvitalisasi agar menjadi sarana ekonomi warga yang nyaman, bersih dan tidak mengganggu lalu lintas serta merupakan solusi untuk penanganan para PKL. Revitalisasi kawasan Pasar Bawah dan Pasar Atas secara bertahap sebagai langkah awal telah dilakukan. Upaya yang telah dilakukan adalah pendataan terhadap para pedagang yang berjualan di toko dan lapak serta pedagang kaki lima di kawasan pasar tersebut, melakukan sosialisasi serta menyusun DED dan sertifikasi lahan.

2.3.3.6. Perindustrian

Pertumbuhan kategori industri pengolahan dalam PDRB Kota Bukittinggi sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 cenderung menurun setiap tahunnya hal ini sejalan dengan kontribusi yang juga mengalami penurunnya setiap tahunnya.

Tabel 2.67
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 s.d. 2015

No.	Kategori	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Industri Pengolahan	8,46	8,39	8,20	7,76	7,28	6,86

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2010-2015 dan BDA

Penurunan kontribusi pada kategori industri pengolahan di Kota Bukittinggi antara lain disebabkan karena industri pengolahan di Kota Bukittinggi sebagian besar masih bergantung pada bahan baku dari luar Kota Bukittinggi.

Namun Industri yang beroperasi di Kota Bukittinggi, jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah industri yang beroperasi di Kota Bukittinggi mencapai 1.929 unit usaha dan pada tahun 2015 sudah mencapai 2.122 unit usaha. Tenaga kerja yang berkerja pada sektor industri juga cenderung meningkat setiap tahunnya di Kota Bukittinggi pada lima tahun terakhir ini. Pada tahun 2010 tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri berjumlah sebanyak 7.975 orang dan pada tahun 2015 sudah mencapai 8.835 orang.

Gambar 2.8

Pertumbuhan Unit Usaha dan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Di Kota Bukittinggi Tahun 2010 S.D. 2015

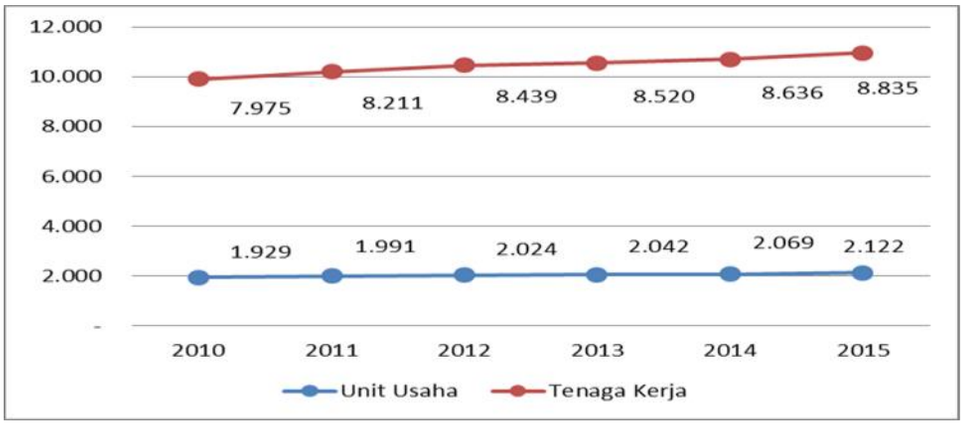

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Rata-rata pada setia industri mempekerjakan 4 orang tenaga kerja, Pertumbuhan unit usaha di sektor industri secara nyata memberikan peluang untuk penyediaan lapangan kerja dan cukup baik dalam mengurangi pengangguran di Kota Bukittinggi.

2.3.3.7. Transmigrasi

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Jumlah penempatan transmigrasi menjadi indikator hasil kinerja urusan. Penempatan peserta transmigrasi dari ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat dan kesepakatan dengan pemerintah daerah lokasi transmigrasi. Karena wilayah Kota Bukittinggi yang kecil, maka tidak terdapat lokasi transmigrasi yang resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Yang ada hanya migrasi biasa, yang disebabkan banyaknya penduduk sekitar yang pindah untuk mencari pekerjaan, bekerja, berdagang, serta sebagai tujuan tempat pendidikan bagi wilayah sekitar.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1.Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Komponen tertinggi penyumbang PDRB.

Komponen tertinggi penyumbang PDRB menurut penggunaan pada tahun 2010 adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 2.069.129,7 terhadap total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa ditinjau dari sisi pengeluaran, perekonomian Kota Bukittinggi sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2015 pengeluaran

konsumsi rumah tangga (atas dasar harga berlaku) di Kota Bukittinggi mencapai Rp 3.532.537,80 (juta)

Tabel 2.68
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015

Kelompok Pengeluaran	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Konsumsi Rumah Tangga	2.069.129,72	2.290.917,41	2.548.773,27	2.814.578,44	3.170.111,00	3.532.537,80
• Makanan	957.593	1.035.154,66	1.145.006,63	1.232.988,77	1.308.119,11	1.414.032,36
• Non Makanan	1.111.536	1.255,757,76	1.403,766,64	1.581.589,67	1.861,991,89	2.118.505,44
PDRB	3.598.796,76	4.025.631,57	4.487.879,23	5.023.308,47	560.931,11	6.322.459,17

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Bukittinggi Tahun 2010-2015

Secara total pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki trend yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kota Bukittinggi yang membaik .

2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan

Sejak tahun 2011 konsumsi non-makanan memiliki proporsi yang lebih besar dari konsumsi makanan. Pada tahun 2011 konsumsi makanan mencapai 53,72% dan naik menjadi 54,01% pada tahun 2015 (atas dasar harga berlaku), artinya masyarakat Kota Bukittinggi lebih banyak melakukan pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan selain makanan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan makanan telah terpenuhi dengan baik sehingga beranjak untuk memenuhi kebutuhan selain makanan.

Tabel 2.69
Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non-Makanan terhadapPengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi Periode 2010-2015

Kelompok Pengeluaran	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Atas Dasar Harga Berlaku						
· Makanan	46,28	45,19	44,92	43,81	41,26	45,99
· Non Makanan	53,72	54,81	55,08	56,19	58,74	54,01
TotaL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Atas Dasar Harga Konstan						
· Makanan	46,28	47,40	45,11	44,08	42,81	-
· Non Makanan	53,72	52,60	54,89	55,92	57,19	-
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Bukittinggi Tahun 2010-2015 dan BDA

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

a. Luas wilayah terkena banjir

Akibat cuaca ekstrim di Kota Bukittinggi terjadi genangan air (ketinggian lebih dari 30 cm selama 2 jam). Kondisi genangan air yang di Kota Bukittinggi terdapat di 7 (tujuh) titik yang tersebar di 4 (empat) kelurahan yaitu di Kelurahan Tarok Dipo, Pulai Anak Air, Campago ipuh dan Puhun Pintu Kabun. Genangan air ini terjadi karena kurang berfungsinya drainase yang disebabkan oleh tingginya sedimen dan tidak seimbangnya volume air dengan dimensi saluran/drainase yang ada.

Untuk mengatasi genangan air ini maka perlu dilakukan pengerukan sedimen secara rutin serta rehabilitasi saluran drainase dengan memperhatikan SPM sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota.

B. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Di Kota Bukittinggi terdapat 35 Rumah Makan/Restoran yang tersebar di beberapa kawasan dengan beragam variasi masakan dan minuman. Keberagaman kuliner yang dimiliki Kota Bukittinggi merupakan salah satu potensi terbesar untuk menarik wisatawan serta daya tarik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia.

C. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Terdapat 16 hotel berbintang dan 46 hotel Melati di Kota Bukittinggi, ditambah dengan 8 penginapan/losmen/guest hause yang tersebar di Kota Bukittinggi mendorong datangnya berbagai kelas turis domestik maupun asing dapat menyesuaikan kebutuhan akomodasi mereka dengan dana yang mereka miliki.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada.

Tabel 2.70
Angka Kriminalitas Kota Bukittinggi
Tahun 2010 s/d 2015

No	Jenis Kriminal	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kasus Narkoba	35	26	26	32	27	31
2.	Kasus Pembunuhan	-	1	-	1	-	-
3.	Kejahatan Seksual	12	11	10	9	8	6
4.	Kasus Penganiayaan	138	121	128	120	143	62
5.	Kasus Pencurian	155	164	192	223	273	183
6.	Kasus Penipuan	29	21	25	25	28	33
7.	Kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	369	418	480	520	586	360
9.	Jumlah Penduduk	107.783	113.569	114.415	118.260	120.469	123.608
10.	Angka Kriminalitas	29.20	36,80	41,95	43,97	48,64	52,20

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi

Seperti halnya kota-kota lainnya di Indonesia, Bukittinggi juga mempunyai tingkat kriminalitas tidak terlalu tinggi, untuk ukuran sebuah kota. Jumlah kriminilitas di Kota Bukittinggi selama tahun 2011 cukup mengalami peningkatan, dimana tahun 2011 terjadi tindak kriminal sebanyak 418, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 480, dan pada tahun 2013 terjadi juga peningkatan sehingga menjadi 520 dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan sehingga menjadi 586 kejadian. Akan tetapi pada tahun 2015 ini terdapat penurunan sehingga angka kriminilitas menjadi 360 kejadian. Kasus pencurian merupakan jenis kriminalitas yang paling tinggi terjadi di Kota Bukittinggi. Pada tahun 2011, pencurian terdapat 164 kejadian dan mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga pada tahun 2014 terdapat 273 kejadian. Masih tingginya tingkat pengangguran yang ada di Kota Bukittinggi diprediksi akan tetap memicu peningkatan kriminalitas. Respon warga terhadap gejala ini antara lain nampak dari penjagaan keamanan diri secara spontan dalam bentuk penutupan akses ke kawasan-kawasan permukiman (terutama dari golongan mampu) yang sekaligus menimbulkan kesan eksklusivisme; selain kegiatan ronda sebagai wujud penjagaan keamanan komunitas.

2.4.4. Sumber Daya Manusia

A.Rasio lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2010-2015 cukup berfluktuasi

Tabel 2.71
Rasio Lulusan S1/S2/S3Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah lulusan S1	8.822	9.187	8.875	9.246	9.379
2.	Jumlah lulusan S2	691	733	723	773	798
3.	Jumlah lulusan S3	58	53	50	48	43
4.	Julah lulusan S1/S2/S3	9.571	9.973	9.648	10.067	10.220
5.	Jumlah penduduk	122.821	126.598	119.967	123.410	123.608
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	779,26	787,76	804,22	815,73	826,81

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi

Tahun 2015 rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Bukittinggi mencapai 826,81. Artinya, terdapat 10.220 orang lulusan S1/S2/S3 dari 123.608 penduduk Kota Bukittinggi.

B.Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan Kota Bukittinggi tahun 2010. Jika Tahun 2011 rasio ketergantungan hanya sebesar 21,26, maka Tahun 2012 meningkat menjadi 55,97, Tahun 2014 rasio ketergantungan menurun menjadi 46,95. Sampai Tahun 2015 Rasio Ketergantungan menjadi 48,46%. Dengan kata lain setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif), di Kota Bukittinggi, mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi

Tabel 2.72
Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s.d 2015
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	33.207	33.468	33.172	31.956	33.100
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	5.282	7.591	5.272	7.476	7.249
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	38.489	41.059	38.444	39.432	40.349
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	75.080	73.356	79.816	83.978	83.259
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	51,26	55,97	48,17	46,95	48,46%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi

Jika dibandingkan dengan tingkat Nasional, rasio ketergantungan di Kota Bukitinggi memiliki nilai lebih kecil, dimana secara Nasional tahun 2010 mencapai 51,31%. Kondisi ini membuka kesempatan bagi Kota Bukittinggi untuk dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

2.5. Perkembangan IPM Kota Bukittinggi

Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah seluruhnya diarahkan untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan melakukan pengelolaan yang lebih sistematis dan terarah agar dapat sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada, serta dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan (environmental friendly). Seluruh aspek tersebut bersinergi dalam mewujudkan peningkatan IPM sebagai tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Perkembangan indikator makro selama kurun waktu tahap kedua RPJPD (2010-2015), merupakan cermin kinerja pembangunan Kota Bukittinggi, yang juga mengindikasikan sejauh mana dampak pembangunan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga Kota Bukittinggi. Indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial maupun ekonomi. Secara umum pembangunan manusia di Kota Bukittinggi selama kurun waktu 2010-2015 terus mengalami peningkatan.

Indek Pembangunan Manusia juga merupakan aspek daya saing daerah di bidang sumber daya manusia. Presiden Republik Indonesia dengan 9 (Sembilan) agenda prioritas yang lebih dikenal dengan Nawa Cita , dimana pada agenda ke 5, yakni " Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia". Salah satu cara untuk dapat mengukur sejauh mana kualitas hidup manusia tersebut, adalah dengan mengukur Indek Pembangunan Manusia.

Penyediaan data IPM ditujukan sebagai alat perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah. Indikator IPM menggambarkan keberhasilan target pembangunan pemerintah. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakansebagai salah satu alokasi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Adapun tujuan IPM masih sama, yakni sebagai alat atau suatu nilai yang mewakili (proksi) ukuran pembangunan manusia. Membangun manusia mengandung arti meningkatkan status kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan, menurunkan kesenjangan, menyediakan lapangan pekerjaan, membangun modal sosial, dan lain sebagainya. Data IPM dapat dijadikan sebagai alat advokasi bagi kebijakan politik, dapat dibandingkan antar daerah dan antar waktu.

Seiring waktu, indikator IPM mengalami perubahan. Penghitungan IPM lama masih menggunakan indikator Angka harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Angka rata rata lama sekolah,27 Komoditas Pengeluaran Per kapita.

Selanjutnya, seiring perkembangan waktu, Perubahan metode penghitungan IPM dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Beberapa indikator seperti Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Maka terhitung tahun 2015, untuk menentukan Indek Pembangunan Manusia, ditetapkan beberapa indikator, yakni Angka harapan Hidup, Angka rata rata lama sekolah,Angka harapan Lama Sekolah ,96 Komoditas Pengeluaran Per kapita.

Tabel 2.73

Perkembangan IPM Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Harapan Hidup	73,11	73,12	73,12	73,12	73,12	73,52
2	Angka rata Rata Lama Sekolah	10,51	10,56	10,62	10,66	10,71	10,79
3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,21	13,42	13,87	14,47	14,65	14,92
4	Pengeluaran Perkapita (JUTA)	**Rp. 11.597**	**Rp. 11.728**	**Rp. 11.856,-**	**Rp. 12.002,-**	**Rp. 12.137,-**	**Rp. 12.330,-**
	IPM	76,12	76,30	76,92	77,67	78,02	78,72

Sumber data: BDA 2016

Berikut kami uraiakan aspek daya saing daerah yang ditinjau dari sisi Indek pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:.

1. Angka Harapan Hidup.

Angka harapan hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai oleh seseorang. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatan seseorang.

Dari data terlihat bahwa angka harapan hidup di Kota Bukittinggi semakin tinggi. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan selama empat tahun terakhir, dimana pada tahun 2014 berkisar pada umur 73 tahun.

2. Angka Rata Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah ini menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas, dalam menyelesaikan pendidikan formal. Kota Bukittinggi mempunyai rata-rata lama sekolah 10,71 tahun. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Bukittinggi sudah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun.

3. Angka Harapan Lama Sekolah .

Angka harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya. Angka harapan lama sekolah ini dihitung dari umur 7 tahun ke atas. Angka ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistim pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan akan dicapai oleh setiap anak.

Dari data tersebut terlihat kecendrungan harapan lama sekolah di Kota Bukittinggi semakin lama semakin meningkat, ini pertanda positif untuk pembangunan pendidikan di Kota Bukittinggi .

4. Pengeluaran Riil Perkapita (Dari 96 Komoditas)

Pengeluaran perkapita merupakan indikator dalam pengukuran indek Pembangunan Manusia dari bidang ekonomi. Pendapatan rill perkapita yang disesuaikann (daya beli) adalah merupakan suatu tolak ukur kemajuan suatu daerah. Apabila pendapatan perkapita rendah dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat di daerah tesebut masih rendah. Begitu sebaliknya jika pendapatan daerah tersebut tinggi , maka mekanisme ekonomi masyarakat di daerah tersebut juga tinggi. Tapi kita juga tahu bahwa pendapatan tersebut bukan hanya didapat dari mekanisme ekonomi saja. Banyak hal yang menyebabkan penurunan atau kenaikan pendapatan tersebut .

IPM Kota Bukittinggi tersebut merupakan IPM nomor 2 tertinggi di Propinsi Sumatera Barat. Ini artinya, kualitas pembangunan manusia di Kota Bukittinggi termasuk kategori nomor 2 tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Propinsi Sumatera Barat. Pengukuran/penilaian IPM ini dikategorikan atas 4 kelompok, yaitu, lebih atau sama dengan 80 dengan predikat sangat tinggi, 70 s/d 80 predikat tinggi, 60- 70 predikat sedang dan 60-70 predikat rendah. Selama 4 tahun terakhir IPM Kota Bukittinggi dalam kategori tinggi dan selalu terdapat peningkatan.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah**.**

Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Bab XI pasal 279-330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jo. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara spesifik pengelolaan keuangan Daerah Kota Bukittinggi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Periode kinerja keuangan Kota Bukittinggi disajikan untuk periode tahun 2010-2015, serta untuk memenuhi teknis penghitungan rata-rata pertumbuhan. Data kinerja keuangan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 diperoleh dari Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2015. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2010-2015.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD Kota Bukittinggi terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

Komponen Pendapatan:

1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2) Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Komponen Belanja:

1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Komponen Pembiayaan:

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Ringkasan APBD Kota Bukittinggi berdasarkan rincian obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2010 s.d. 2015
Kota Bukittinggi

NO	URAIAN	2010 (% Distribusi)	2011 (% Distribusi)	2012 (% Distribusi)	2013 (% Distribusi)	2014 (% Distribusi)	2015 (% Distribusi)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Pendapatan		**338.421.473.678**	**401.417.194.463.**	**461.396.488.849.**	**527.475.062.408.**	**595.424.983.587.**	**593.323.296.014**	**10,45**
Pendapatan Asli Daerah		**33.847.174.752 (10%)**	**42.223.418.002. (10,52%)**	**45.076.555.841. (9,77%)**	**55.203.591.605. (10,47%)**	**61.613.681.043. (10,35%)**	**66.027.359.716 (11,13%)**	**12,32**
1.	Pajak Daerah	11.728.705.362 (34,65%)	17.461.926.058. **(41,36%)**	19.848.460.300. **(44,03%)**	22.560.666.814. **(40,87%)**	27.314.135.978. **(44,33%)**	29.002.326.911 **(43,92%)**	**16,02**
2.	Retribusi Daerah	12.609.831.129 (37,26%)	14.019.848.821. **(33,20%)**	14.748.993.711. **(32,72%)**	16.593.461.861. **(30,06%)**	18.043.436.304. **(29,28%)**	17.032.946210 **(25,80%)**	**5,64**
3.	Hsl.Pegl.Kekyan Daerah Yg Dipisahkan	1.829.523.928 (5,41%)	3.038.188.054. **(7,20%)**	2.892.369.763. **(6,42%)**	3.691.819.262. **(6,69%)**	3.452.740.700. (5,60%)	3.884.306.585 **(5,88%)**	**11,28**
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	7.679.114.333 (22,69%)	7.703.455.069. **(18,24%)**	7.586.732.067. **(16,83%)**	12.357.643.668. **(22,38%)**	12.803.368.061. **(20,79%)**	16.107.780.010 **(24,40%)**	**12,28**
Dana Perimbangan		**279.481.878.176 (82,58%)**	**305.965.314.648. (76,22%)**	**365.938.810.846. (79,31%)**	**408.814.962.363. (77,50%)**	**452.713.545.419. (76,03%)**	**449.872.722.059 (75,82%)**	**8,92**
1	**DBH Pjk/DBH Bkn Pjk**	18.988.138.176 (6,80%)	15.621.671.648. **(5,11%)**	24.281.551.846. **(6,63%)**	18.143.222.363. **(4,44%)**	15.279.128.419. **(3,38%)**	12.555.527.059 **(2,79%)**	**(12,03)**
2	**DAU**	242.306.440.000 (86,70%)	272.853.718.000. **(89,18%)**	326.224.306.000. **(89,15%)**	368.311.195.000. **(90,09%)**	404.285.567.000. **(89,30%)**	408.640.651.000 **(90,83%)**	**9,80**
3	**DAK**	18.187.300.000 (6,50%)	17.489.925.000. **(5,71%)**	15.432.953.000. **(4,22%)**	22.360.545.000. **(5,47%)**	33.148.850.000. **(7,32%)**	28.676.544.000 **(6,38%)**	**6,12**
Lain-Lain Pdpt Yg Sah		**25.092.420.750 (7,41%)**	**53.228.461.813. (13,26%)**	**50.381.122.162. (10,92%)**	**63.456.508.440. (12,03%)**	**81.097.757.125. (13,62%)**	**77.423.214.239 (13,05%)**	**16,96**
1	**Hibah**	-	26.136.000. **(0,05%)**	-	**-**	-	-	-
2	**Dana Darurat**	**-**	**-**	-	-	-	-	-
3	**DBH Pjk Prov**	9.110.622.360 (36,31%)	11.633.826.985. **(21,85%)**	10.859.729.931. **(21,56%)**	12.218.976.000. **(19,25%)**	17.263.679.125. **(21,29%)**	21.308.056.239 **(27,52%)**	**14,78**
4	**Dana Otsus**	-	10.112.825.000. **(19%)**	-	49.740.773.000. **(78,39%)**	61.623.658.000. **(75,99%)**	52.991.158.000 **(68,44%)**	**0,60**
5	**Bantuan Keuangan**	307.600.000 (1,23%)	589.200.000. **(1,11%)**	-	1.496.759.440. **(2,36%)**	2.210.420.000. **(2,73%)**	3.124.000.000 (4,04%)	**22,07**
6	**Lain-Lain Pdpt Yg Sah**	15.674.198.390. (62,47%)	30.866.473.828.. **(57,99%)**	39.521.392.231. **(78,44%)**	-	-	-	**14,22**

GRAFIK 3.1.1

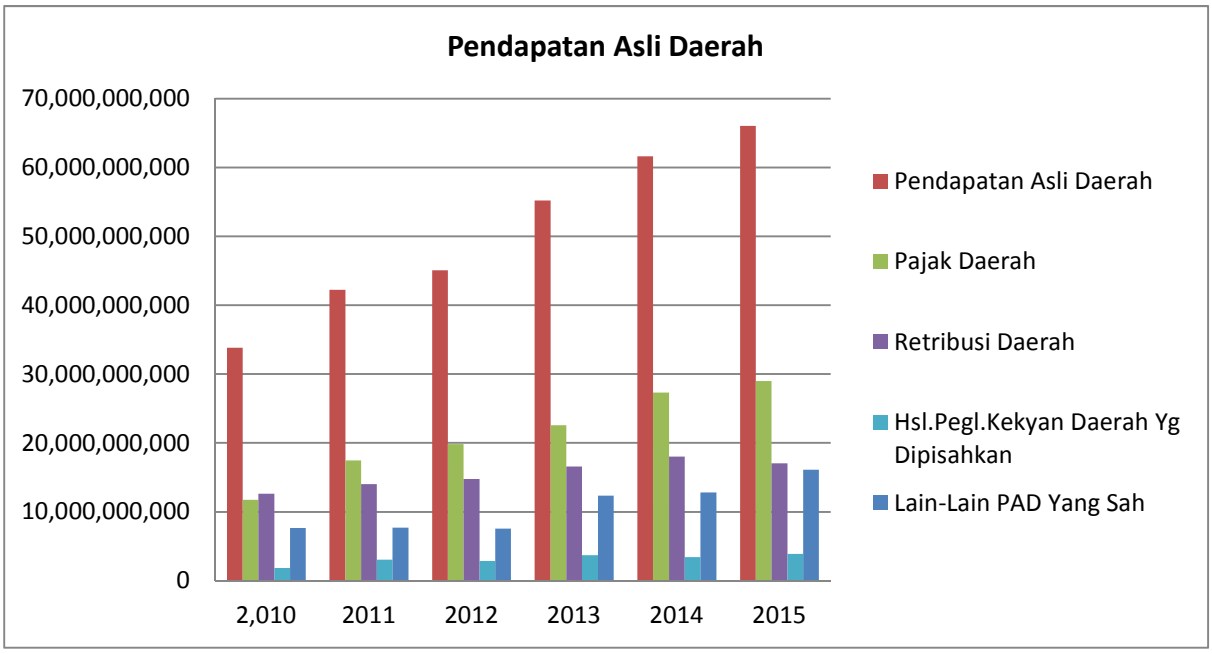

GRAFIK 3.1.2

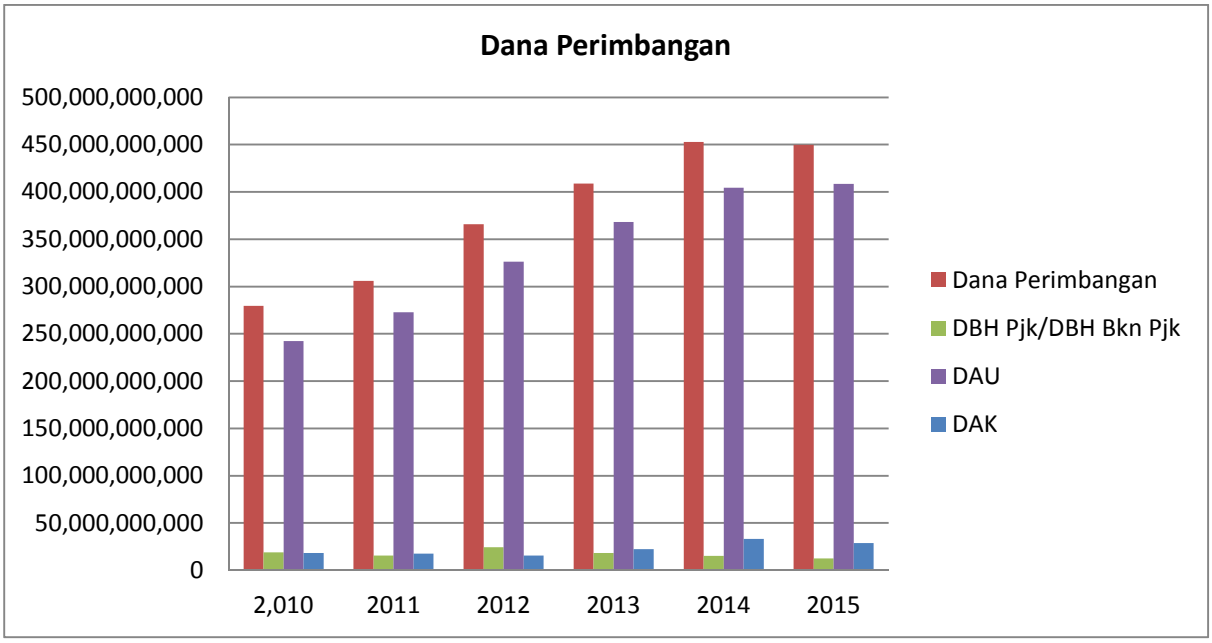

GRAFIK 3.1.3

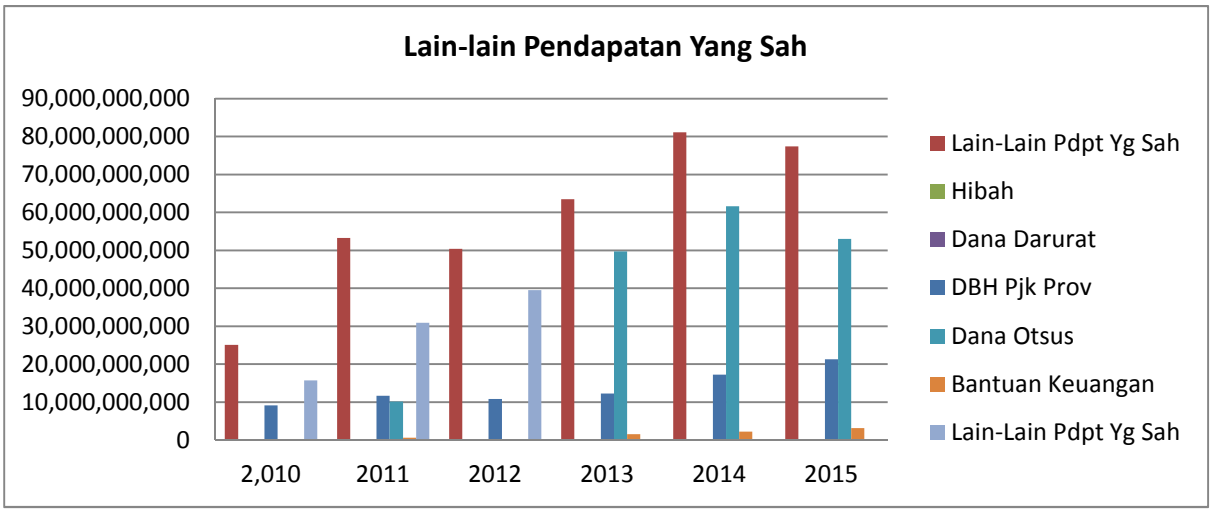

GRAFIK 3.1.4

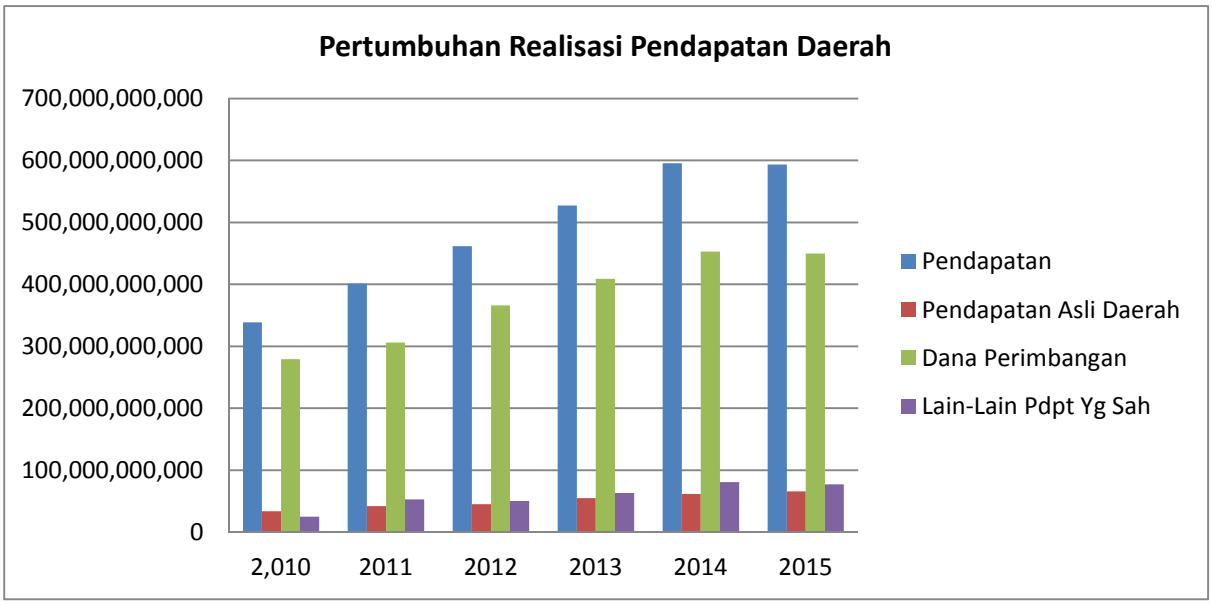

3.1.1.1. Perkembangan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Analisis kemampuan Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah selama tahun 2010 – 2015 yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun, kecuali pada tahun 2015 pendapatan daerah turun sekitar (0,35%) atau sekitar

Rp.2.101.687.573,- namun secara rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 10,45%, seperti terlihat pada Tabel.3.1

Berdasarkan tabel rata-rata realisasi pertumbuhan dan kontribusi pendapatan rata-rata selama tahun 2010-2015 sebesar 10,45% per tahun dan kontribusi pertumbuhan rata-rata per-obyek pendapatan terhadap total pendapatan daerah dominasi paling besar adalah dana perimbangan dengan persentase sebesar 76,98% dari Total Pendapatan, sedangkan PAD sebesar 10,44% dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 12,58%.

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami rata-rata pertumbuhan selama tahun tahun 2010 – 2015 sebesar 11,99% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah telah berhasil melampaui target yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2010 – 2015 yang ditargetkan rata-rata sebesar 8,63% per tahun. Pencapaian target tersebut merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam upaya meningkatkan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yaitu dengan melakukan langkah-langkah identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi/ pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat. Namun demikian jika dilihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah masih relatif kecil, ketergantungan Pemerintah Kota Bukitinggi terhadapPemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup tinggi. **Kontribusi penerimaan yang berasal dari dana perimbangan sebesar 76,98%, PAD sebesar 10,44%, dan lain-lain penerimaan pendapatan daerah yang sah sebesar 12,58%,** hal tersebut dapat diartikan bahwa kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih bergantung pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Perkembangan realisasi Penerimaan Daerah dari Dana Perimbangan juga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,36% per tahun, dengan kontribusi terbesar pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,82% per tahun. Kenaikan Penerimaan Dana Perimbangan tersebut menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menggali potensi pada pos-pos Dana Perimbangan menunjukkan hasil yang positif.

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami pertumbuhan yang meningkat, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan. Penerimaan pada Pos ini bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota untuk mendanai program/kegiatan pembantuan yang ada di Kota Bukittinggi. Berdasarkan kinerja pertumbuhan dan kontribusi pendapatan daerah rata-rata selama 5 tahun terakhir, untuk pemenuhan pendanaan pembangunan dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya intensifikasi dan ektensifikasi

pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah kota dengan menganut prinsip-prinsip; (1)Potensial, lebih menitik beratkan pada potensi dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (2) Tidak memberatkan masyarakat; (3) Tidak merusak lingkungan; (4) Mudah diterapkan dan dilaksanakan; dan (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya. Sedangkan asumsi target penerimaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, dari hasil akumulasi target tahunan sebesar Rp **314.841.617.600,-** realisasinya tercapai sebesar Rp **303.991.780.959,-** atau **96,55** persen, Realisasi Pajak Daerah selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, dimana dari total target Pajak Daerah sebesar Rp **130.209.442.522,-**, terealisasi sebesar Rp **127.916.221.423,-** atau tercapai **98,24**persen.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, target Retribusi Daerah secara akumulasi sebesar Rp. **106.913.814.509,-** dan realisasinya belum mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. **93.048.518.036,-** atau **87,03** persen.

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diperoleh dari Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara akumulasi sebesar Rp. **18.975.995.491,-** realisasinya mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. **18.733.089.292.,-** atau **101,30** persen.

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah utamanya bersumber dari: (a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Jasa Giro; (c) Pendapatan Bunga; (d) Tuntutan Ganti Rugi (TGR); (e) Komisi, (f) Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah; (g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (h) Pendapatan Denda Pajak; (i) Pendapatan Denda Retribusi; (j) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; (k) Pendapatan dari Pengembalian; (l) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (m) Pendapatan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; (n) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; dan (o) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, target Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. **58.798.224.074,-** sedangkan realisasinya melebihi target yang ditetapkan, mencapai Rp. **64.238.093.208,-** atau mengalami pencapaian sebesar **109,25** persen.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 diproyeksikan sebesar 8,63% per tahun, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,99%;

b. Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diserahkan ke Pemerintah daerah pada tahun 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diserahkan ke Pemerintah Daerah pada tahun 2014; serta

c. Upaya serius dari pemerintah Kota Bukittinggi dalam menggali potensi sumber-sumberpendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Pada penerimaan PAD yang menjadi unggulan dan memiliki kontribusi besar dalam menyokong penerimaan PAD adalah **Pajak Daerah** sebesar **42,90 %** yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan. **Retribusi Daerah** sebesar **30,21%** yang meliputi **Retribusi Jasa Umum** (Ret.Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan, Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, **Retribusi Jasa Usaha** (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Retribusi Rekreasi dan Olah Raga, **Perizinan Tertentu** (Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Trayek, dan penerimaan lain PAD yang sah sebesar **20,53%,** serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar **6,36%.**

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus. Secara keseluruhan, target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **2.286.534.516.457,-** Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang setiap tahun diterbitkan, akumulasi Dana Perimbangan yang dapat direalisasikan sebesar Rp. **2.217.787.233.515,-** atau **96,99** persen dari target, Secara keseluruhan, target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 adalah sebesar Rp. **103.018.779.457,-**sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. **104.869.239.515,-** atau **101,80** persen dari target, Penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 adalah sebesar Rp. **2.022.621.877.000,-** sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. **2.022.621.877.000,-** atau **100** persen dari target, Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus selama periode 2010 - 2015 adalah sebesar Rp.**160.893.860.000,-** sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. **135.296.117.000,-** atau tercapai sebesar 84,09 persen**.**

Proyeksi penerimaan dari Dana Perimbangan pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 sebesar 10%, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu lima tahun terakhir yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10,36%.

b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan pos yang memiliki Kontribusi terbesardalam menyokong penerimaan Dana Perimbangan yakni sebesar 89,71%. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, DAU diberikan berdasarkan celah fiskal/keuangan danalokasi dasar. Celah fiskal/keuangan merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal/keuangan daerah. Kebutuhan daerah merupakan variable-variable yang ditetapkan undang-undang antara lain penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan indeks harga, perhitungan kapasitas keuangan didasarkan atas PAD dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah, sedangkan alokasi dasar merupakan pemenuhan gaji PNS. Kebutuhan fiskal Kota Bukittinggi ditahun-tahun mendatang akan mengalami peningkatan seiring dengan Penduduk Kota Bukittinggi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,87% per tahun, luas wilayah, penduduk miskin relatif sebesar 5,6% dan pengadaan CPNS Kota Bukittinggi dengan pemenuhan akan gaji PNS daerah.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, (d) Dana Transfer Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f) Lain-lain Penerimaan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah secara akumulasi melampaui target. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, ditargetkan sebesar Rp. **340.842.743.990,-**dengan realisasi sebesar Rp. **350.679.484.529,-** atau sebesar **102,89** persen.

Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah tidak ditargetkan jumlah pendapatannya, namun pada tahun 2011 Kota Bukittinggi mendapatkan Hibah sebesar Rp.**26.136.000,-.** Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ditargetkan sebesar Rp. **186.794.979.000,-** sedangkan realisasinya sebesar Rp. **174.468.414.000,-**atau mencapai sebesar **93,40** persen, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya secara akumulasi, targetnya sebesar Rp. **77.118.320.818,-** sedangkan realisasinya mencapai Rp. **82.394.890.640,-** atau tercapai sebesar **106,84** persen, yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya secara akumulasi targetnya sebesar Rp. **7.141.518.600,-**sedangkan realisasinya mencapai Rp. **7.729.979.440,-** atau tercapai sebesar **108,21** persen, yang bersumber dari lain-lain Penerimaan secara akumulasi targetnya sebesar Rp. **69.766.723.000,-** sedangkan realisasinya mencapai Rp. **86.062.064449,-** atau sebesar **123,36** persen.

Penerimaan pada pos ini juga diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar10,97% per tahun. Kontribusi terbesar pada pos Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 48,36%, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya sebesar 22,29%, dan Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 2,06% serta Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Lainnya sebesar 27,29%. Dalam upaya optimalisasi penerimaan pendapatan, maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus secara intensif melakukan koordinasi menggali potensi penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pemerintah daerah lainnya. Penerimaan pendapatan daerah pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 yang terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10% per tahun.

3.1.1.2. Perkembangan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran Kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (pro-poor), pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dan perluasan lapangan kerja (pro-job).
Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, dari akumulasi target Belanja Daerah sebesar Rp3.343.124.025.465**,-** terealisasi sebesar Rp. **2.834.893.644.355,-** atau **84,80** persen, Belanja daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja yaitu: (a) Belanja Tidak Langsung (BTL) dan (b) Belanja Langsung (BL).

1) Belanja Tidak Langsung (BTL)

Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, dan (f) Belanja Tidak Terduga. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 terealisasi sebesar Rp. **1.739.746.049.355,-** atau **91.64**persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. **1.898.433.383.308,-**

Target Belanja Pegawai Kota Bukittinggi selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **1.757.677.357.269,-** dengan realisasi sebesar Rp. **1.413.091.313.487,-** atau **80,40** persen, Target Belanja Hibah selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 adalah sebesar Rp. **84.628.170.220,-** dengan realisasi sebesar Rp. **69.532.386.181,-** atau **82,16** persen Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. **33.878.792.553,-** atau **80,34** persen dari target sebesar Rp. **42.169.401.279,-**, Target Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 Rp. **3.420.839.799,-** dengan realisasi sebesar Rp. **1.909.810.999,-** atau **55,83** persen, Target Belanja Tidak Terduga (BTT) selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **6.937.614.741,-** dengan realisasi sebesar Rp.**1.227.178.239,-** atau **17,69** persen. Penganggaran belanja tidak terduga tidak dapat diprediksi dan diluar kendali

Pemerintah Daerah. Belanja ini merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa, bersifat berjaga-jaga.

2. Belanja Langsung (BL)

Belanja Langsung terdiri dari: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Selama periode Tahun Anggaran 2010-2015, rata-rata realisasi Belanja Langsung secara akumulatif tidak mencapai target, yaitu terealisasi sebesar Rp. **1.095.147.595.000,-** dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. **1.444.690.642.156,-** atau **75,81** persen.

Target Belanja Pegawai pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **277.560.660.266,-** dengan realisasi sebesar Rp. **236.484.907.837,-** atau **85,20** persen, Target Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **656.615.740.294,-** sedangkan realisasinya sebesar Rp. **487.791.423.754,-** atau **74,29** persen, Belanja Modal pada Belanja Langsung, selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 terealisasi Rp. **370.871.263.409,-** atau **72,65** persen dari target sebesar Rp. **510.514.241.596,-.** Struktur belanja Pemerintah Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa Belanja Langsung (39,03%) lebih kecil dari pada Belanja Tidak Langsung (60,97%).

Gambaran Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi selama tahun 2010 – 2015 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel.3.2
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010 (% Distribusi)	2011 (% Distribusi)	2012 (% Distribusi)	2013 (% Distribusi)	2014 (% Distribusi)	2015 (% Distribusi)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**232.783.921.527**	**260.866.438.337.**	**289.830.843.899.**	**292.653.417.491.**	**323.711.738.644.**	**339.899.689.457.**
1	Belanja Pegawai	209.549.305.264 **(90,02%)**	243.442.955.461. **(93,32%)**	270.874.433.012. **(93,46%)**	284.139.179.620. **(97,08%)**	301.399.665.287. **(93,11%)**	322.784.474.843. **(94,94%)**
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	8.897.878.673 **(3,82%)**	5.978.878.028. **(2,29%)**	15.749.150.310. **(5,43%)**	4.406.252.136. **(1,51%)**	18.619.220.084. **(5,75%)**	15.881.006.950. **(4,68%)**
5	Belanja Bantuan Sosial	13.328.869.690 **(5,73%)**	10.916.510.148. **(4,18%)**	1.968.440.000. **(0,68%)**	3.594.680.177. **(1,23%)**	3.249.026.000. **(1%)**	821.266.538. **(0,24%)**
6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	551.521.298. **(0,19%)**	501.521.298. **(0,17%)**	443.827.273. **(0,14%)**	412.941.126. **(0,12%)**
8	Belanja Tidak Terduga	1.007.867.900 **(0,43%)**	528.094.700. **(0,21%)**	687.299.279. **(0,24%)**	11.784.260. **(0,01%)**	-	-

No	Uraian	2010 (% Distribusi)	2011 (% Distribusi)	2012 (% Distribusi)	2013 (% Distribusi)	2014 (% Distribusi)	2015 (% Distribusi)
B	**Belanja Langsung**	**130.452.272.279**	**144.554.138.037.**	**157.611.909.658.**	**211.456.840.658.**	**218.530.943.293.**	**239.615.593.710.**
1	Belanja Pegawai	29.824.976.178 **(22,86%)**	33.546.024.904. **(23,21%)**	37.427.444.376. **(23,75%)**	45.311.233.704. **(21,43%)**	45.311.233.704. **(20,73%)**	45.063.994.971. **(18,82%)**
2	Belanja Barang dan Jasa	52.709.480.286 **(40,41%)**	60.550.867.273. **(41,89%)**	69.449.826.690. **(44,06%)**	89.852.281.671. **(42,49%)**	89.852.281.671. **(41,12%)**	125.376.686.163. **(52,42%)**
3	Belanja Modal	47.917.815.815 **(36,73%)**	50.457.245.860. **(34,90%)**	50.734.638.592. **(32,19%)**	76.293.325.283. **(36,08%)**	76.293.325.283. **(38,15%)**	69.174.912.576. **(28,76%)**

GRAFIK 3.2.1

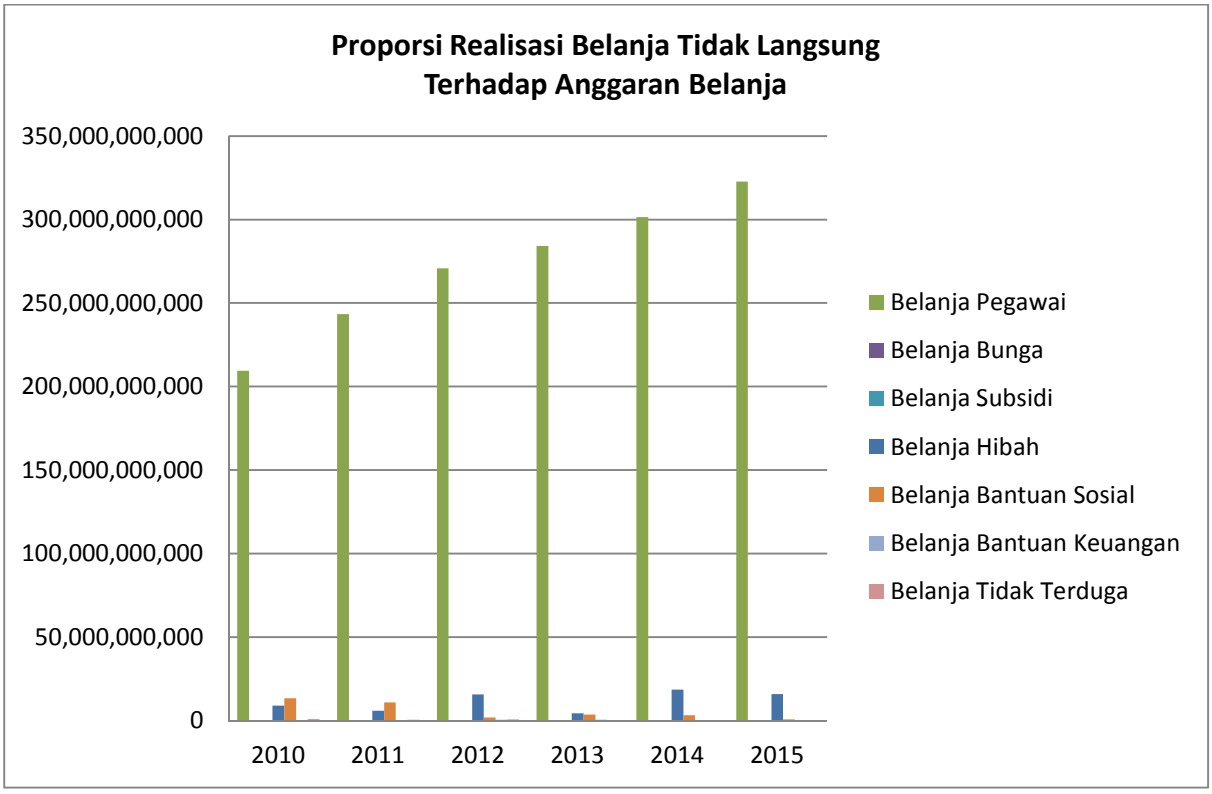

GRAFIK 3.2.2

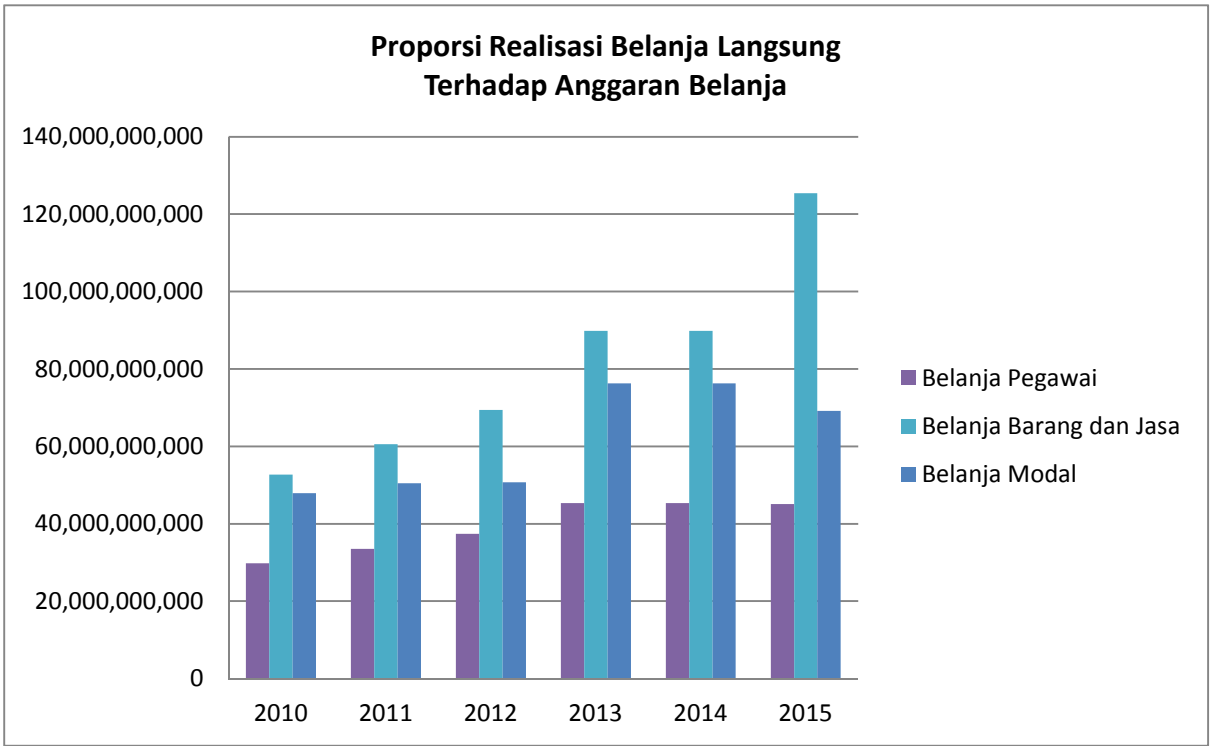

Dari tabel dan grafik di atas, menunjukkan bahwa selama tahun Tahun 2010 - 2015 proporsi rata-rata penggunaan anggaran **Belanja Tidak Langsung** terhadap jumlah Anggaran Belanja sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dengan proporsi rata-rata 94,36%, belanja hibah sebesar 3,81%, belanja bantuan sosial sebesar 1,45%, belanja bantuan keuangan sebesar 0,15%, belanja tidak terduga sebesar 0,23%, sedangkan proporsi rata-rata **Belanja Langsung** terbesar digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar 44,40% dan belanja Modal sebesar 34.01%, sedangkan belanja pegawai hanya 21,59%. Gambaran proporsi anggaran Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Bukittinggi selama tahun 2010 – 2015 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel.3.3
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	**Belanja Tidak Langsung**	**210.599.184.116**	**242.666.447.174.**	**270.191.741.190.**	**283.326.771.150.**	**299.838.901.630.**	**324.221.452.977**
1	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	147.046.237.783	164.771.618.464.	178.215.649.652.	185.985.440.660.	197.064.506.190.	214.692.593.464.
2	Belanja Tambahan Penghasilan	60.176.956.874	73.958.452.529.	87.459.426.900.	92.175.563.098.	97.270.638.979.	104.580.877.282.
3	**Belanja Penerimaan Ang. Dan Pimpinan DPRD Serta operasional Kdh/Wkdh**	3.199.452.752	3.332.439.992.	3.649.736.471.	4.199.132.184.	4.405.669.919.	3.689.180.780
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	176.536.707	603.936.189.	866.928.167.	966.635.208.	1.098.086.542.	1.258.801.451.
B	**Belanja Langsung**	**35.534.337.856**	**33.995.652.476.**	**35.162.787.069.**	**50.561.521.927.**	53.472.374.581.	68.384.490.073
1	Belanja Honorarium PNS	12.403.606.403	12.510.184.050.	11.136.296.069.	16.789.032.864.	12.964.456.206.	20.229.771.900

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	**Belanja Uang Lembur**	1.404.642.300	1.884.238.000.	2.734.034.000.	3.600.115.000.	3.979.190.750.	4.165.511.700
3	**Belanja Bea Siswa Pendidikan**	797.456.000	548.300.000.	535.893.000.	561.503.150.	584.210.365.	234.608.000
4	**Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek**	627.893.475	520.036.135.	787.715.210	888.661.090	830.859.952.	642.728.505
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.217.984.830	2.489.712.000.	2.712.693.435.	2.872.919.450.	4.981.817.083.	4.909855.265
6	Belanja Makan dan Minum Peg.	4.956.029.522	3.207.082.092.	3.759.767.985.	5.214.657.399.	5.980.111.696.	10.140.300.301
7	Belanja Pakain Dinas Atribut	1.507.265.820	1.538.136.925.	256.207.000.	1.321.315.330.	2.276.571.360.	1.345.893.373
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	31.335.800	38.489.000.	35.329.800.	68.381.800.	78.000.000.	102.030.500
9	Belanja Perjalanan Dinas	10.476.123.706	11.197.635.624.	13.127.357.120	18.181.935.069.	20.850.842.969.	26.613.790.529
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Peg.	1.112.000.000	61.838.650.	77.493.450.	896.120.300.	946.314.200.	-
12	**Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan Dll)**	**47.917.815.815**	**50.457.245.860.**	**50.734.638.592.**	**76.293.325.283.**	**76.551.550.636.**	69.174.912.576
	TOTAL	**294.051.337.787**	**327.119.345.510.**	**356.089.166.851.**	**410.181.618.360.**	**429.862.826.847.**	**461.780.855.626**

GRAFIK 3.3.1

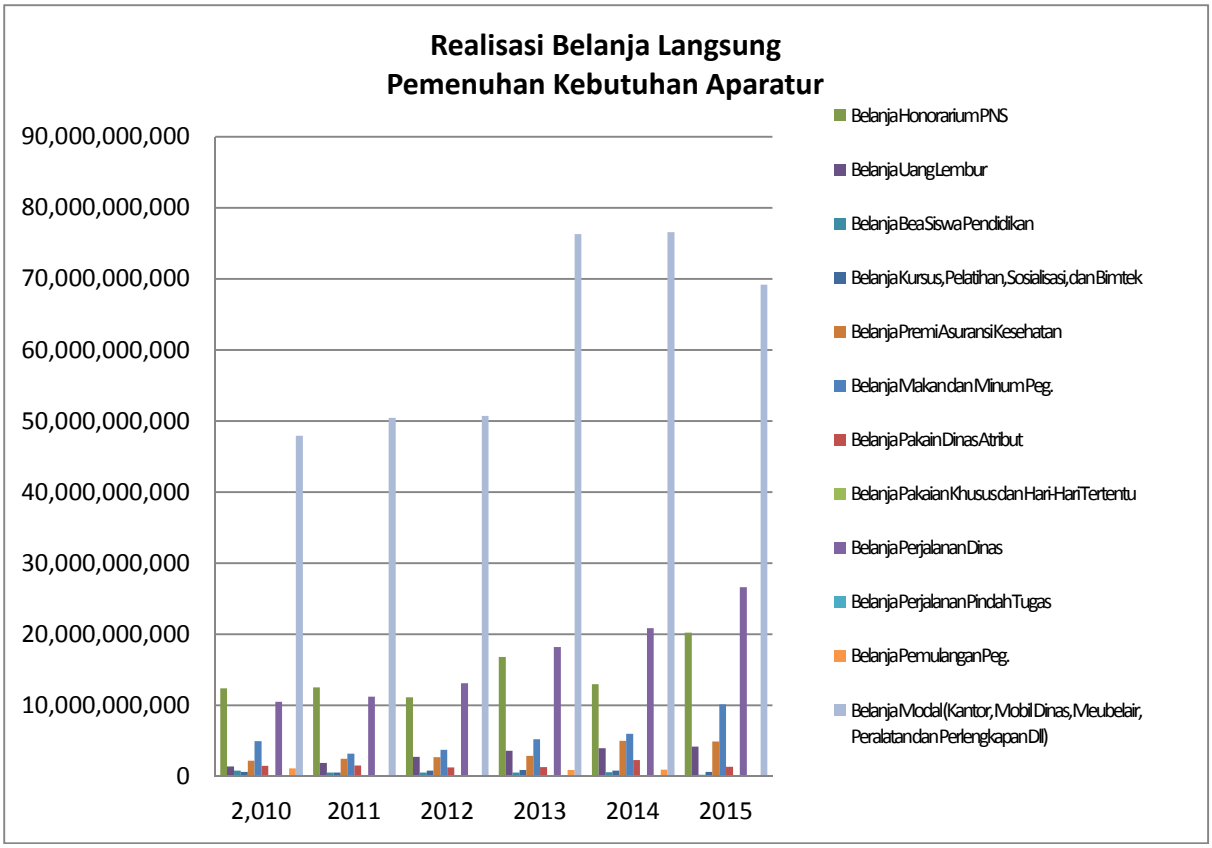

GRAFIK 3.3.2

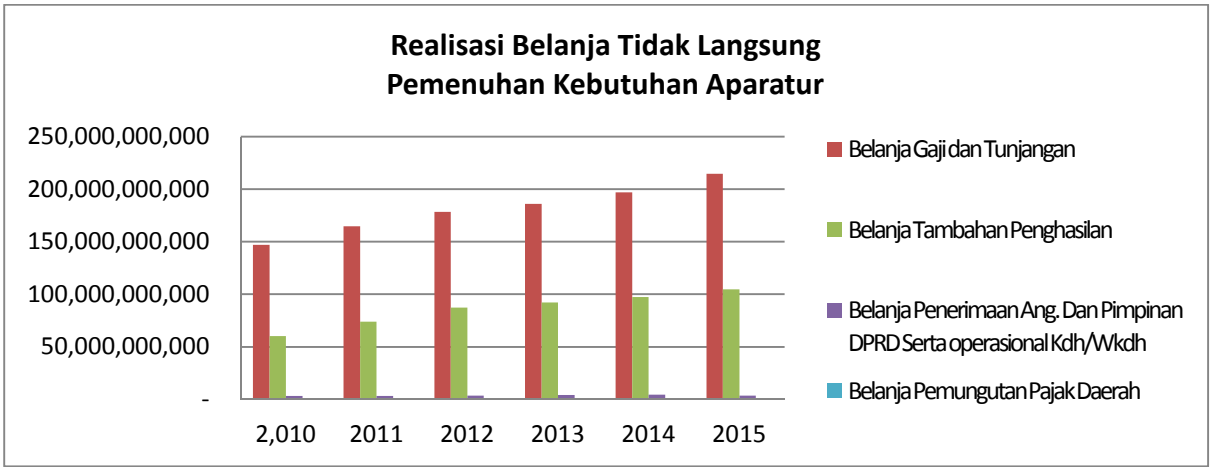

GRAFIK 3.3.3

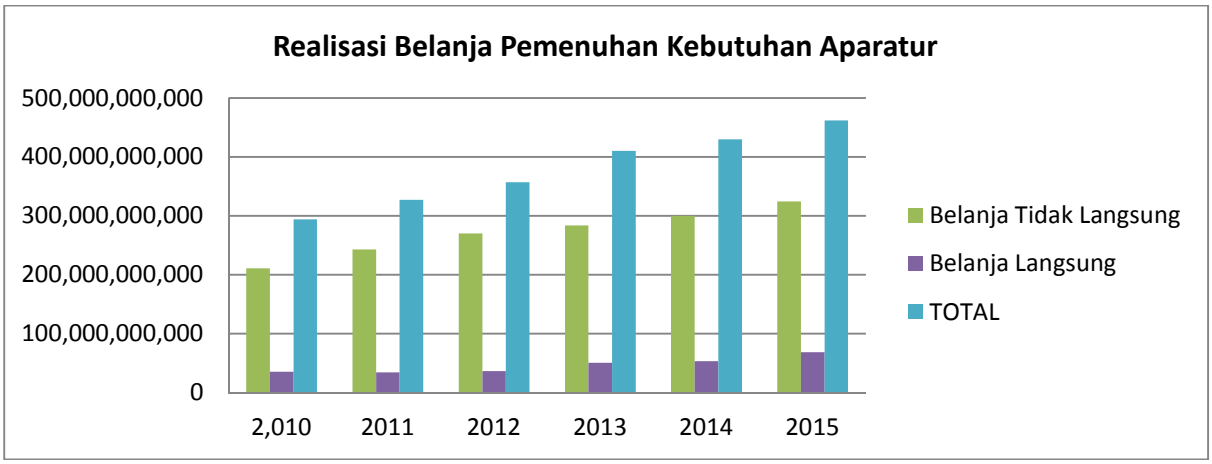

Dari tabel dan grfik diatas menunjukkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terbesar bila dilihat dari sisi Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan serta belanja Tambahan Penghasilan. Sedangkan pada sisi Belanja Langsung dipergunakan untuk belanja honorarium PNS dan belanja perjalanan dinas, jika dilihat dari total pengeluaran belanja, maka pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama lima tahun terakhir tahun 2010 – 2015 secara berturut-turut sebesar ±Rp.327,715 milyar, ± Rp.356,017 milyar, ±Rp.410,794 milyar, dan ± Rp.430,270 milyar, dan ± Rp.460,565 milyar Gambaran Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel.3.4
Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan
A	**Blj.Tidak Langsung**	**232.783.921.527**	**260.866.438.337**	**289.830.843.899**	**292.653.417.491**	**323.711.738.644**	**339.899.689.457**	**7,21**
1	Blj.Gaji dan Tunjangan	**147.046.237.783**	164.771.618.464.	178.215.649.652.	185.985.440.660.	197.064.506.190.	214.692.593.464.	7,27
2	Blj.Penerimaan Ang. Dan Pimpinan DPRD Serta Op.Kdh/Wkh	**3.199.452.752**	3.332.439.992	3.649.736.471	4.199.132.184	4.405.669.919	3.689.180.780.	8,54
3	Blj.Bunga	**-**	-	-	-	-	-	-
4	Blj.Bagi Hasil	**-**	-	-	-	-	-	-
	Belanja Tidak Langsung Lainnya	**82.538.230.992**	**92.762.379.881**	**107.965.457.776**	**102.468.844.647**	**122.049.295.571**	**121.517.915.213**	**7,83**
B	**Blj.Langsung**	**130.452.272.279**	**144.554.138.037**	**157.611.909.658**	**211.456.840.658**	**218.530.943.293**	**239.615.593.710**	15,68
1	Blj.Honorarium PNS Khusus Untuk Guru dan Tenaga Medis	**788.297.053**	1.223.033.200.	1.887.828.469.	1.698.050.454.	393.625.000.	**683.772.500.**	**10,81**
2	Blj.Bea Siswa Penddk.PNS	**797.456.000**	548.300.000.	535.893.000.	561.503.150.	584.210.365.	234.608.000	5,57
3	Blj.Jasa Ktr, (Khusus Tagihan Bulanan Ktr Sprt.Listrik, Air, Telepon dan Sejenisnya)	**2.847.863.435**	3.047.381.427.	3.453.703.075.	3.558.018.243.	3.761.389.601.	**5.178.107.918**	15,63
4	Blj.Sewa Gdg Ktr (Yang Telah ada Kontrak Jgk Panjangnya)	**-**	-	-	-	-	-	-
5	Blj.Sewa Perlengkapan dan Peralatan Ktr (Yg Tlh Ada Kontrak Jgk Panjangnya)	**-**	-	-	-	-	-	-
	Belanja Langsung Lainnya	**126.018.655.791**	**139.735.423.410**	**151.734.485.114**	**205.639.268.811**	**213.791.718.327**	**233.519.105.292**	**15,99**
C	**Pembiayaan Pengeluaran**	**20.000.000**	**2.311.546.513**	**2.370.000.000**	**18.932.000.000**	**29.583.000.000**	**23.883.000.000**	**20,27**
1	**Pembentukan Dana Cad.**	**-**	-	-	15.000.000.000.	25.000.000.000.	15.000.000.000.	13,33
2	**Pembyrn Pokok Utang**	**20.000.000**	198.664.615.	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Pengeluaran Lainnya	**-**	**2.112.881.898**	**2.370.000.000**	**3.932.000.000**	**4.583.000.000**	**8.883.000.000**	**47,06**
	TOTAL (A+B+C)	**363.256.193.806**	**407.732.122.887**	**449.812.753.557**	**523.042.258.149**	**571.699.414.973**	**603.398.283.167**	**11,87**

GRAFIK 3.4.1

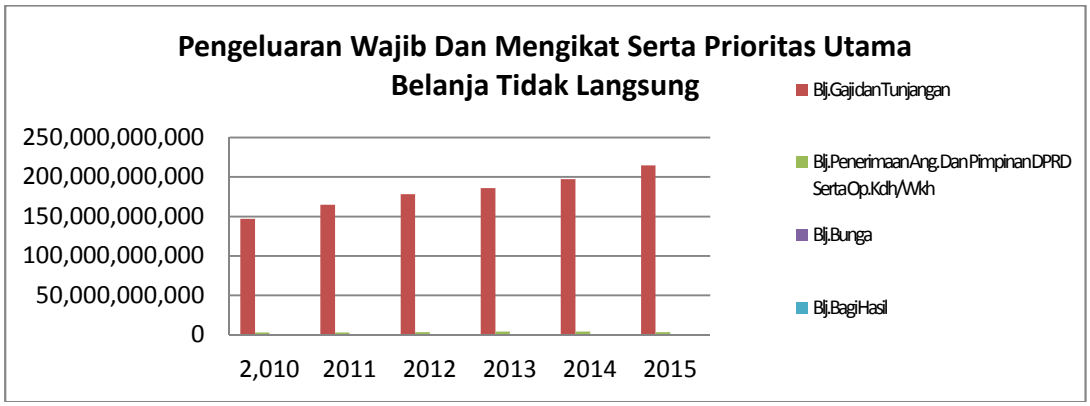

GRAFIK 3.4.2

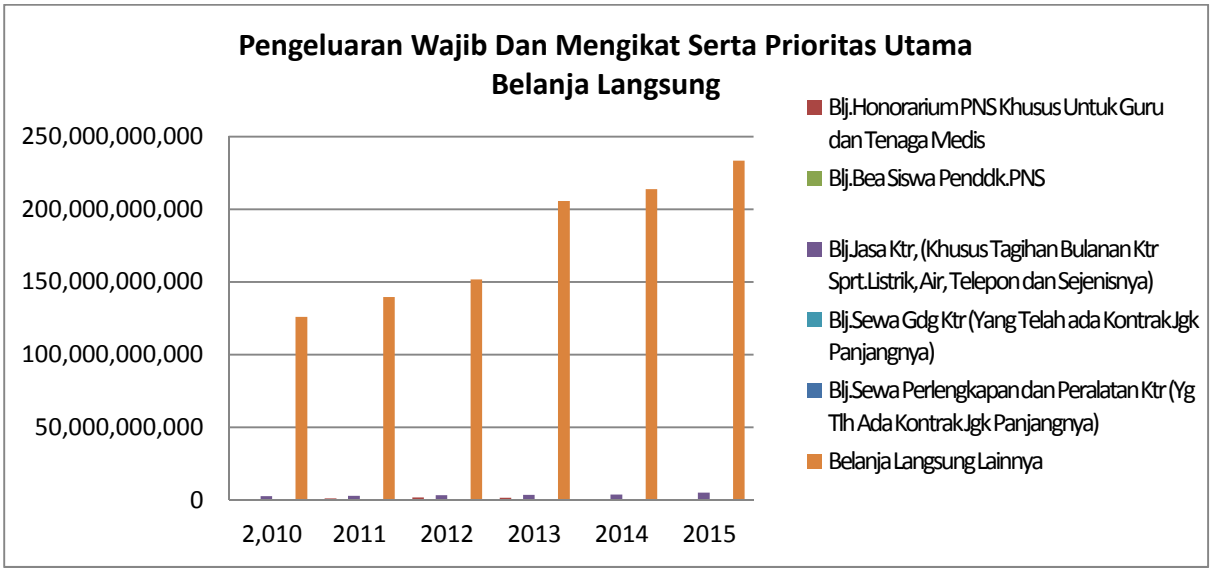

GRAFIK 3.4.3

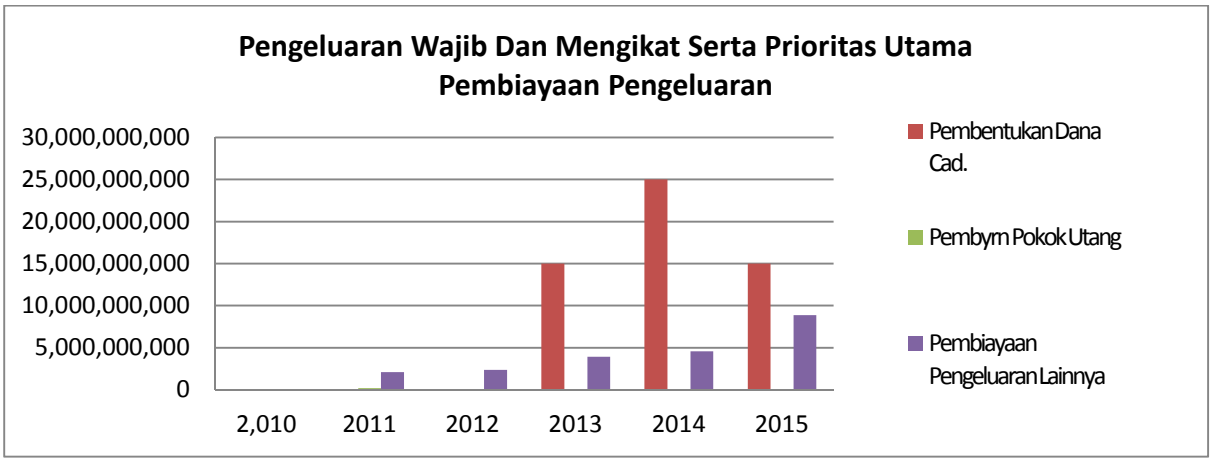

GRAFIK 3.4.4

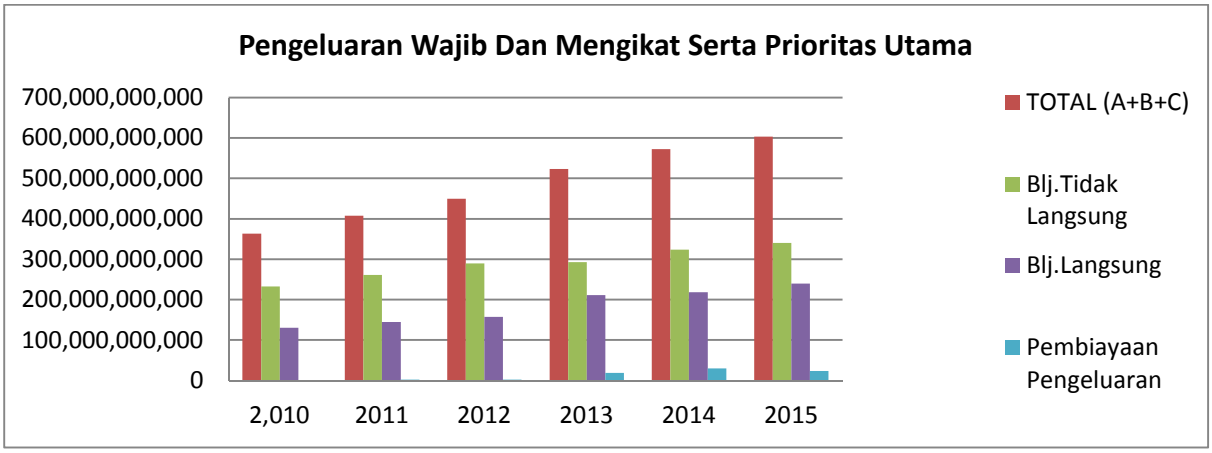

Dari tabel dan grfik diatas menujukkan bahwa belanja periodik yang wajib dibayar dan tidak dapat ditunda pembayarannya pada **belanja langsung** adalah belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan Kantor seperti Listrik, Air, Telepon dan Sejenisnya), yang proporsi rata-rata pertumbuhannya pertahun sebesar 14,54 %, belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis rata-rata pertumbuhan sebesar 10,30% dan belanja beasiswa pendidikan PNS dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,41%, sedangkan untuk **belanja tidak langsung** adalah belanja gaji dan tunjangan yang proporsi rata-rata pertumbuhannya pertahun sebesar 6,85%, dan belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional Wako/Wawako dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,54%.

Dengan memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama sebagaimana tabel diatas, maka dapat diproyeksikan anggaran belanja selama 5 tahun kedepan (2016 -2021) untuk menghitung kerangka pendanaan pembangunan.

Tabel.3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Bukittinggi

N0	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2010	294.051.337.787	363.256.193.806	80,95
2	Tahun Anggaran 2011	327.119.345.510	407.732.122.887	80,23
3	Tahun Anggaran 2012	356.089.166.851	449.812.753.557	79,16
4	Tahun Anggaran 2013	410.181.618.360	523.042.258.149	78,42
5	Tahun Anggaran 2014	429.862.826.847	571.699.414.973	75,19

N0	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
6	Tahun Anggaran 2015	461.780.855.626	603.398.283.167	76,53

GRAFIK 3.5

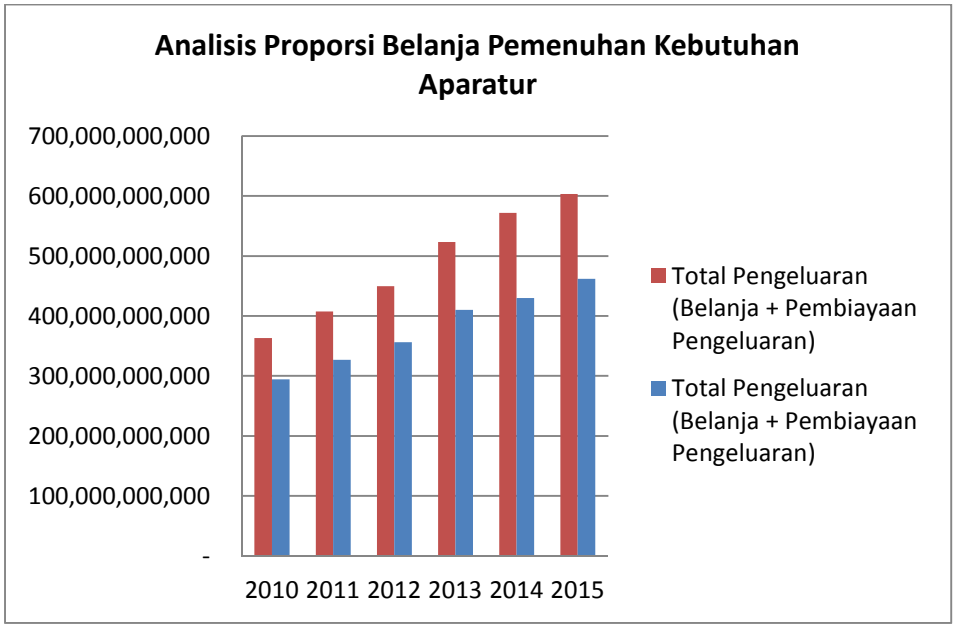

Dari tabel dan grfik diatas menunjukkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terbesar dipergunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan dengan pertumbuhan rata-rata selama tahun 2010-2015 adalah 6,85%. Sedangkan jika dilihat dari total pengeluaran belanja, maka pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2010 – 2015 secara berturut-turut sebesar 80,95%, 80,23%, 79,16%, 78,42%, 75,19%, dan 76,53%.

Belanja tidak langsung yang tidak wajib dan tidak mengikat yang terdiri dari belanja hibah, bantuan sosial, belanja bunga dan belanja tidak terduga, yang direncanakan digunakan untuk :

1. Belanja Hibah

Belanja Hibah dipergunakan untuk mendorong lembaga/badan/organisasi untuk berperan aktif dalam pembangunan. Belanja ini direncanakan akan diberikan secara hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 298 ayat (5) tentang Pemerintahan Daerah, yang ada di Kota Bukittinggi antara lain :

* Komisi Pemilihan Umum
* Panitia Pengawas Pemilu

* KONI Kota Bukittinggi;
* Pramuka Kwarcab;
* Palang Merah Indonesia;
* Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
* Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD);
* Badan Amil Zakat
* Dewan Pendidikan Kota Bukittinggi;
* Organisasi lainnya yang aktif di Kota Bukittinggi.

2. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial direncanakan untuk mendukung program-program Pemerintah Kota Bukittinggi dalam upaya peningkatan kehidupan sosialmasyarakat, antara lain :

* Belanja bantuan sosial kepada LSM dan Organisasi Masyarakat;
* Santunan;
* Bantuan Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap baik Swasta, Non Dinas Pendidikan, maupun Negeri;
* Bantuan kepada siswa yang tidak mampu baik untuk sekolah negeri maupun swasta
* Bantuan bedah Rumah, dan Sarana prasana wilayah ;
* Bantuan Penyandang Cacat, pemulangan orang terlantar dan korban bencana;
* Bantuan operasional panti sosial dan panti asuhan, serta pendidikan non formal ;
* dan bantuan lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja ini dperuntukan bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kota Bukittinggi serta kegiatan yang tidak biasa/tanggap darurat.

Untuk belanja langsung yang tidak wajib dan tidak mengikat digunakan untuk berbagai program/ kegiatan dengan tetap mengedepankan program/kegiatan prioritas.

Prioritas program/kegiatan tersebut dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Demikian selanjutnya Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan pendanaannya.

Program Prioritas I merupakan pembangunan daerah dengan Visi dan Misi atau program unggulan/ *dedicated* Kepala Daerah yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada periode lima tahun mendatang.

Program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaatyang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya serap yang tinggi pada capaian

visi dan misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah .

Program Prioritas II merupakan program prioritas di tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran per urusan yang berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
Program Prioritas III merupakan program prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan ASN, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, dan belanja tidak terduga.

3.1.1.3 Perkembangan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan**.**
Target penerimaan Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2010-2015 sebesar Rp. **369.371.306.722,-** sedangkan realisasinya mencapai Rp. **369.371.306.722,-** atau **100** persen.

Gambaran Pembiayaan Riil Daerah selama tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel.3.6
Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	**Realisasi Pendapatan daerah**	**338.421.473.678**	**01.417.194.463**	**61.396.488.849**	**527.475.062.408**	**595.424.983.587**	**593.323.296.014**
	Dikurangi Realisasi:						
2	**Belanja Daerah**	**363.236.193.806**	**05.420.576.374**	**47.442.753.557**	504.110.258.149	**535.168.579.302**	**579.515.283.167**
A	**Defisit Riil**	**(24.814.720.128)**	**(4.003.381.911)**	**13.953.735.292**	**23.364.804.259**	**60.256.404.285**	**13.808.012.847**
	Ditutup Oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
4	Sisa Lebih Perhitungan Ang. (SILPA) TA Sblmnya	90.459.676.600	65.622.525.392	59.307.566.800	70.892.029.222	75.324.136.518	98.224.0.27.131
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6	Hsl Penjln.Kekyan Daerah Yg	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
	Dipisahkan						
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**90.459.676.600**	**65.622.525.392**	**59.307.566.800**	**70.892.029.222**	**75.324.136.518**	**98.224.027.131**
A_B	**Sisa Lebih Pembiayaan Ang. Tahun Berkenaan**	65.644.956.472	61.619.143.481	**73.261.302.092**	**94.256.833.481**	**135.580.540.803**	**112.032.039.978**

GRAFIK 3.6

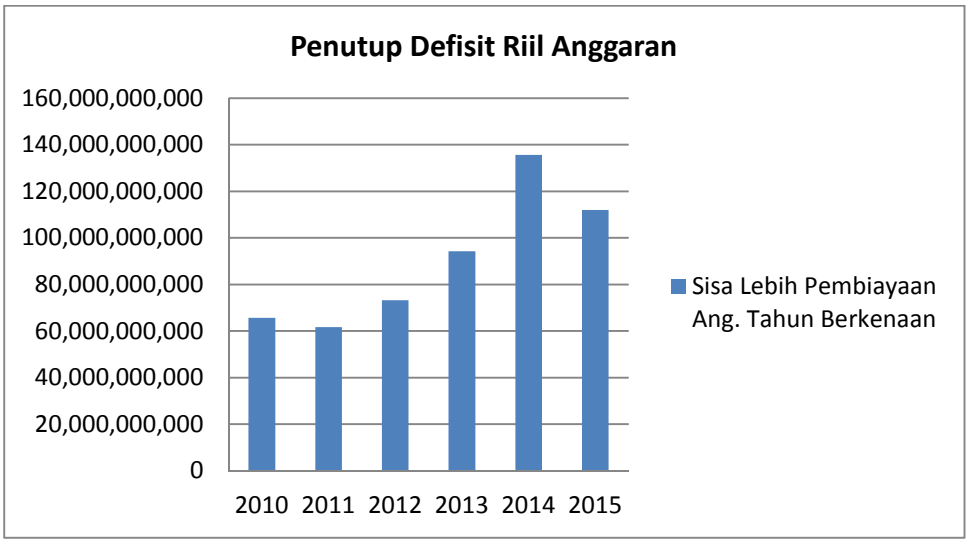

Pada tabel dan grafik penutup defisit riil diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 dan 2011Belanja Daerah lebih besar dari pada realisasi pendapatan, yang berarti terjadi defisit anggaran, sehingga diperlukan anggaran penutup defisit riil pada tahun 2010 dan 2011, oleh karena itu SiLPA tahun sebelumnya dialokasikan guna menutup defisit, dan akan mengurangi SiLPA tahun berkenaan yang selanjutnya akan menjadi bagian sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, serta tahun 2015 terjadi kondisi yang Surplus Anggaran. Gambaran komposisi penutup defisit anggaran seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) sebagamana tabel dibawah ini :

Tabel.3.7
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Bukittinggi

No	Uraian		Proporsi Dari Total Defisit				
		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Ang. (SILPA) Tahun Ang.Sblmnya	364,55	1.639,18	425,03	303,41	125,01	711,36
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Hsl Penjln.Kekkyan Daerah Yg dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Ang. Tahun Berkenaan	264,54	1.539,18	525,03	403,41	225,01	811,36

GRAFIK 3.7

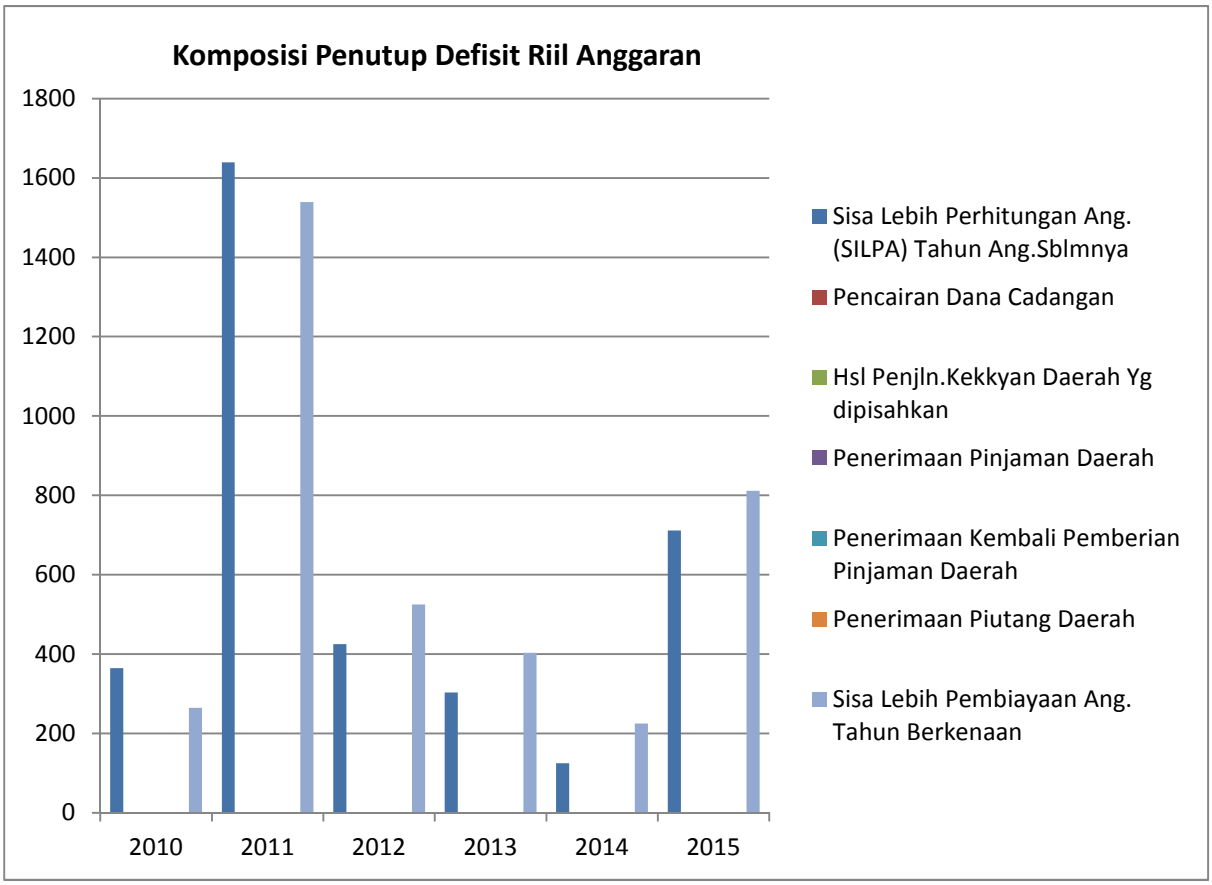

Pada tabel dan grafik penutup defisit riil diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 Realisasi Belanja Daerah masih dibawah (lebih kecil) dari pada realisasi pendapatan, yang berarti tidak terjadi defisit anggaran atau surplus sebesar Rp.13.953.735.292,- sehingga tidak diperlukan anggaran penutup defisit riil pada tahun 2012, oleh karena itu SiLPA tahun sebelumnya (tahun 2011) tidak dialokasikan guna menutup defisit melainkan dialokasi sepenuhnya sebagaipenerimaan pembiayaaan pada tahun berkenaan (tahun 2012) dan akan menambah SiLPA tahun berkenaan (tahun 2012) yang selanjutnya akan menjadi bagian sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada tahun anggaran 2013. Demikian pula untuk tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015 terjadi kondisi yang sama yaitu Surplus Anggaran. Gambaran komposisi penutup defisit anggaran seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) sebagamana tabel dibawah ini :

Tabel.3.8
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Bukittinggi

No	Uraian	210		2011		2012		2013		2014		2015		Rata-Rata Pertumbuhan
		Rp	% Dari Silpa	Rp	% Dari Silpa	Rp	% Dari Silpa	Rp	% Dari Silpa	Rp	% Dari Silpa	Rp	% Dari Silpa	
1	Jumlah SILPA	90.459.676.600		65.622.525.392		59.307.566.800		70.892.029.222		75.324.136.518		88.868.356.913		6,70
2	Pelampauan Penerimaan PAD	0		0	0	0	0	557.235.655	0,79	1.035.383.121	1,37	2.937.693.604	2,99	**134,77**
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0		0	0	856.907.495	1,44	0	0	0	0	0		-
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah	21.371.218.178	23,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	70.004.789.127	77,39	63.832.777.833	97,27	74.761.072.571	126,06	86.545.886.582	122,08	106.104.043.829	131,73	106.981.811.167		**11,89**
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai dengan Akhir tahun belum terselesaikan	202.935.093	0,22	20.199.919	0,03	727.131	0,001	5.051.841	0,001	-	0	9.405.856	0,001	116.91
7	Kegiatan lanjutan	9.971.996.830	11,02	14.780.228.400	22,56	22.700.042.400	38,28	19.786.332.540	27,93	19.124.307.540	25,37	290.281.915	**0,29**	**19,35**

GRAFIK 3.8

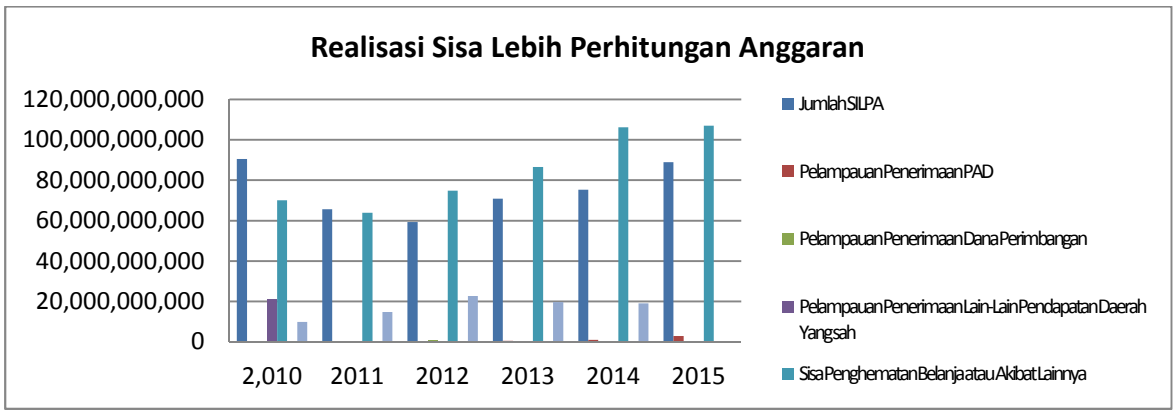

Tabel.3.9
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Tingkat Pertumbuhan
1	**Saldo Kas Neraca Daerah**	**65.695.717.990**	**59.393.818.252**	**70.940.237.555**	**75.329.687.713**	**98.942.864.066**	**88.448.727.749**	**8,12**
	Dikurangi:							
2	Kewajiban Kpd Pihak Ketiga S.d Akhir Tahun Blm Terselesaikan	202.935.093	20.199.919	727.131	5.051.841	-	9.405.856	116.91
3	Kegiatan Lanjutan	9.971.996.830	14.780.228.400	22.700.042.400	19.786.332.540	19.124.307.540	290.281.915	(12,23)
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**55.520.786.067**	**44.593.389.933**	**48.239.468.024**	**55.538.303.332**	**79.818.556.526**	**88.149.039.978**	**14,81**

GRAFIK 3.9

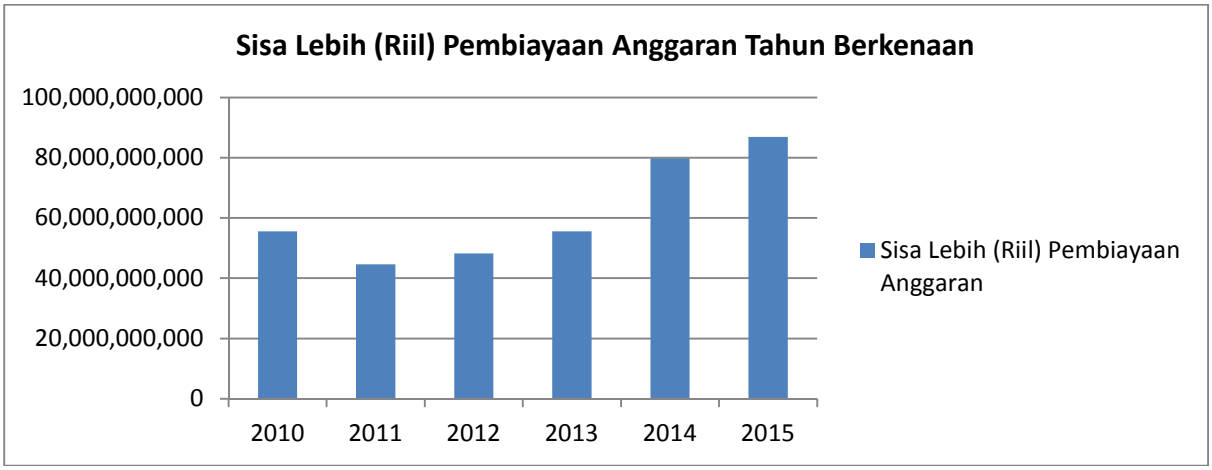

Berdasarkan gambaran sisa lebih riil perhitungan pembiayaan anggaran tahun berkenaan, maka dapat dihitung proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021), sebagaimana tabel berikut:

Tabel.3.10
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Kota Bukittinggi

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tgkt Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	**Saldo Kas Neraca Daerah**	88.448.727.749	8,12	95.630.764.442	103.395.982.514	111.791.736.294	120.869.225.281	130.683.806.373	141.295.331.450
	Dikurangi:								
1	Kewajiban Kpd Pihak Ketiga S.d Akhir Tahun Belum Terselesaikan	9.405.856	116.91	20.402.242	44.254.503	95.992.443	208.217.210	451.643.950	979.660.892
2	Kegiatan Lanjutan	290.281.915	(12,23)	254.780.436	223.620.789	196.271.966	172.267.905	151.199.540	132.707.836
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	88.149.039.978	14,81	101.203.912.798	116.192.212.283	133.400.278.922	153.156.860.230	175.839.391.230	201.881.205.071

GRAFIK 3.10

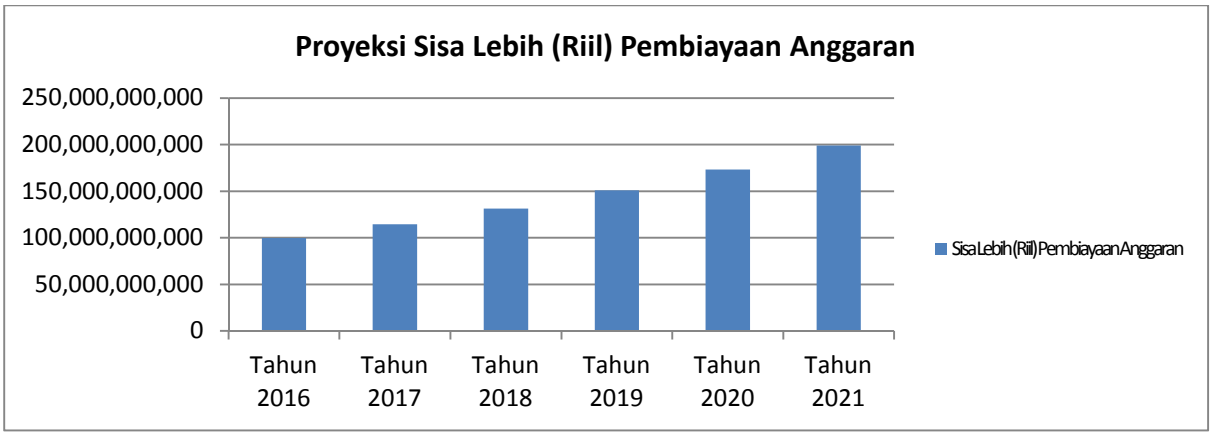

Berdasarkan proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran sebagaimana terlihat pada tabel diatas, saldo kas neraca terjadi pertumbuhan sebesar 18,99% dengan proyeksi untuk lima tahun kedepan sebagaimana terlihat pada tabel diatas, untuk kewajiban kepada pihak ketiga s.d akhir tahun belum terselesaikan terjadi fluktuasi, tahun 2011 ke tahun 2012 terjadi penurunan, sementara itu pada tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi kenaikan, dan tahun2014 tidak ada kewajiban kepada pihak ketiga dan tahun 2015 terjadi lagi kenaikan, sehingga secara rata-rata terjadi pertumbuhan 116,91% (lihat Tabel.3.9), sementara itu untuk kegiatan lanjutan terjadi penurunan rata-rata sebesar (12,23%), tidak ada pertumbuhan, hanya pada tahun 2012 terjadi kenaikan, sementara untuk tahun 2013,2014, dan 2015 terjadi penurunan, sementara itu sisa lebih riil pembiayaan anggaran terjadi pertumbuhan 19,35% dengan proyeksi untuk lima tahun kedepan sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama Neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2011-2015 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.3.11
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.	**ASET**	**1.647.080.468.131**	**1.693.863.731.064.**	**1.770.303.733.783.**	**1.839.142.768.365.**	**2.035.683.171.614.**	**1.443.534.285.031.**	**(5,82)**
1.1	**ASET LANCAR**	**73.925.032.590**	**67.972.610.254.**	**81.813.582.303.**	**87.064.814.661.**	**125.893.872.600.**	**103.480.554.692.**	**8,03**
1.1.1	Kas	65.582.909.596	59.393.818.252.	70.940.237.555.	75.329.687.713.	98.942.864.066.	88.488.727.749	8,12
1.1.2	Piutang	4.114.864.294	4.151.565.531.	5.424.939.245.	6.290.844.354.	19.904.482.562.	9.755.358.070	6,43
1.1.3	Persedian	4.114.450.305	4.427.226.470.	5.448.405.503.	5.444.282.593.	6.048.985.639.	5.236.468.873.	3,29
	Investasi Jgk Pendek	-	-	-	-	-	-	-
	Investasi Jgk Panjang	**7.413.118.102**	**9.238.677.065.**	**18.073.784.806.**	**22.113.627.441.**	**26.511.210.495.**	**35.660.268.277.**	**43,37**
1.2	**ASET TETAP**	**1.563.223.985.583**	**1.613.167.884.525.**	**1.661.077.718.836.**	**1.666.428.687.903.**	**1.803.735.892.058.**	**1.216.951.312.750.**	**(9,37)**
1.2.1	Tanah	518.029.956.300	517.774.373.300.	518.377.133.300.	457.780.109.582.	508.370.855.477.	510.559.945.477.	0,03
1.2.2	Peralatan dan Mesin	105.562.406.148	117.356.451.466.	130.962.613.948.	146.372.364.787.	163.735.157.071.	182.629.812.609..	10,47
1.2.3	Gedung dan Bangunan	588.817.432.761	599.438.880.063.	609.286.262.225.	623.008.436.418.	673.969.357.697.	701.876.690.710.	3,84
1.2.4	Jalan,Irigasi, dan Jaringan	328.168.526.179	352.107.458.329.	367.775.308.299.	393.279.388.827.	414.098.020.595.	432.796.508.953.	5,30
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	12.673.667.365	15.754.965.303.	16.643.639.568.	18.293.698.980.	22.746.507.886.	20.021.649.448.	5,08
1.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.971.996.830	18.032.761.496.	18.032.761.496.	27.694.689.307.	20.815.993.332.	29.972.037.727.	18,30
1.3	**ASET LAINNYA**	**2.518.331.856**	**3.484.559.220.**	**9.338.647.837.**	**48.530.175.561.**	**39.369.424.437.**	**31.864.160.227.**	**24,16**
1.4	**DANA CADANGAN**	**-**	-	-	**15.000.410.958.**	**40.172.772.023.**	**55.577.989.083.**	**51,58**
	JUMLAH ASET DAERAH	**1.647.080.468.131**	**1.693.863.731.064.**	**1.770.303.733.783.**	**1.839.142.768.365.**	**2.035.683.171.614.**	**1.443.534.285.031.**	**(5,82)**
2	**KEWAJIBAN**	**1.447.002.702**	**1.248.822.328**	**1.225.399.540**	**1.919.725.104.**	**2.222.792.157.**	**2.919.583.554.**	**17,95**
2.1	**Kewajiban Jgk Pendek**	**1.447.002.702**	1.248.822.328.	1.225.399.540.	1.919.725.104.	2.222.792.157.	2.919.583.554.	**17,95**
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	202.935.093	20.199.919	727.131	5.051.841	-	9.405.856.	172,79
2.1.2	Uang Muka Dari Kas Daerah	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	177.078.719.	-
2.1.4	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**	**1.224.672.409**	1.224.672.409	1.224.672.409	1.224.672.409	1.224.672.409	1.224.672.409	**-**
2.1.5	**Utang Belanja**	**-**	-	-	-	-	1.496.416.602	**-**
2.1.6	**Utang Jangka Pendek Lainnya**	**19.395.200**	3.950.000	-	688.409.414	998.119.748	12.009.968.	**(2.045,1)**
2.1.7	**Utang Pajak**	**-**	-	-	1.591.440	-	-	**-**
2.2	**Kewajiban Jgk Panjang**	**-**	-	-	-	-	-	**-**
3	**EKUITAS DANA**	**1.645.633.465.429**	**1.692.614.908.736.**	**1.769.078.334.243.**	**1.837.217.991.420.**	**2.033.460.379.457.**	**1.440.614.701.477**	**(5,87)**
3.1	**Ekuitas Dana Lancar**	**72.478.029.888**	67.952.410.335.	81.812.855.172.	87.058.171.380.	123.671.080.443.	-	**17,24**
3.1.1	SILPA	65.670.700.925	59.355.742.333.	70.939.477.624.	75.323.044.432.	98.943.344.066.	-	14,27
3.1.2	Cadangan Piutang	4.114.864.294	4.151.565.531.	5.424.939.245.	6.290.844.354.	19.904.482.562.	-	65,68
3.1.3	Cadangan Persedian	4.114.450.305	4.427.226.470.	5.448.405.503.	5.444.282.593.	6.048.985.639.	-	9,01
3.2	**EKUITAS DANA INVESTASI**	**1.573.155.435.541**	**1.625.891.120.810.**	**1.688.490.151.479.**	**1.737.072.490.905.**	**1.869.616.526.991.**	**-**	**3,60**
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1.563.223.985.583	1.613.167.884.525.	1.661.077.718.836.	1.666.428.687.903.	1.803.735.892.058.	-	2,87

No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	2.518.331.856	3.484.559.220.	9.338.647.837.	48.530.175.561.	39.369.424.437.	-	142,21
3.2.3	Diinvestasikan Dalam Investasi Jgk Panjang	7.413.118.102	9.238.677.065.	18.073.784.806.	22.113.627.441.	26.511.210.495.	-	34,47
	Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	15.000.410.958	40.172.772.023	-	**42**
	Ekuitas Dana Untuk Konsolidasi	-	-	-	-	-	-	**-**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.647.080.468.131**	**1.693.863.731.064.**	**1.770.303.733.783.**	**1.839.142.768.365**	**2.035.683.171.614.**	**1.443.534.285.031.**	**(5,82)**

GRAFIK 3.11.1

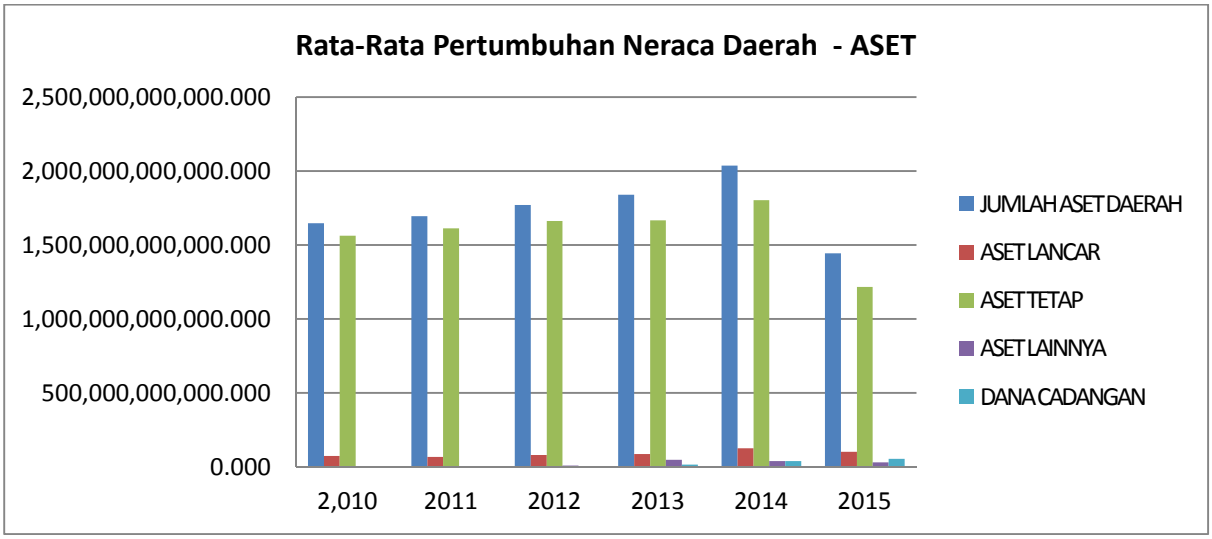

GRAFIK 3.11.2

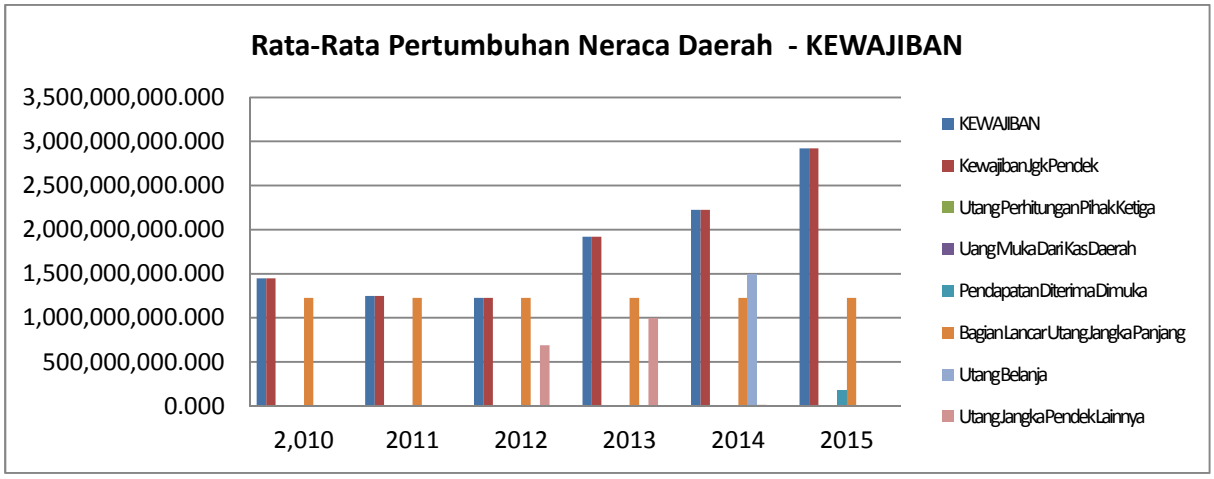

GRAFIK 3.11.3

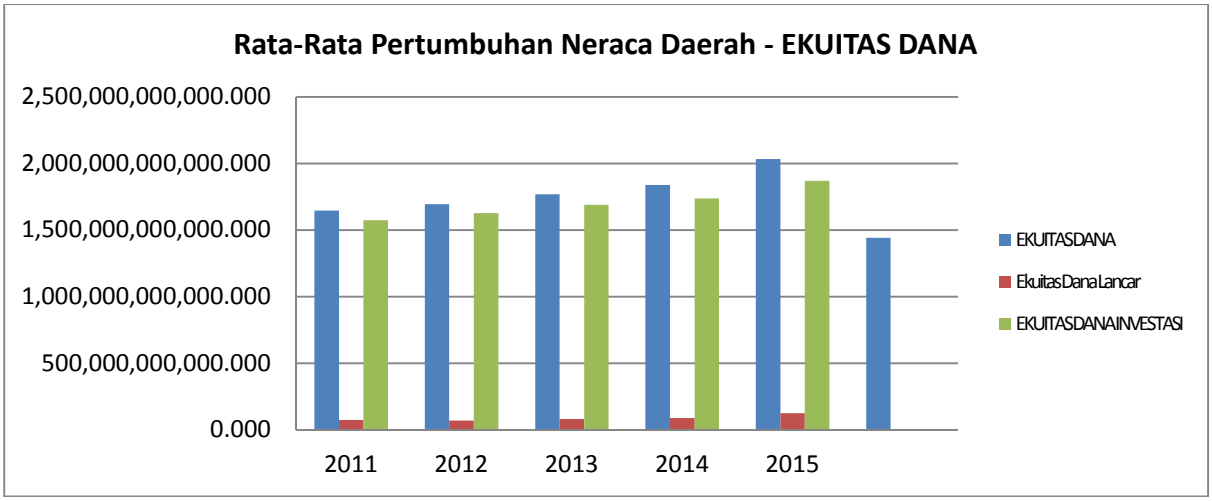

GRAFIK 3.11.4

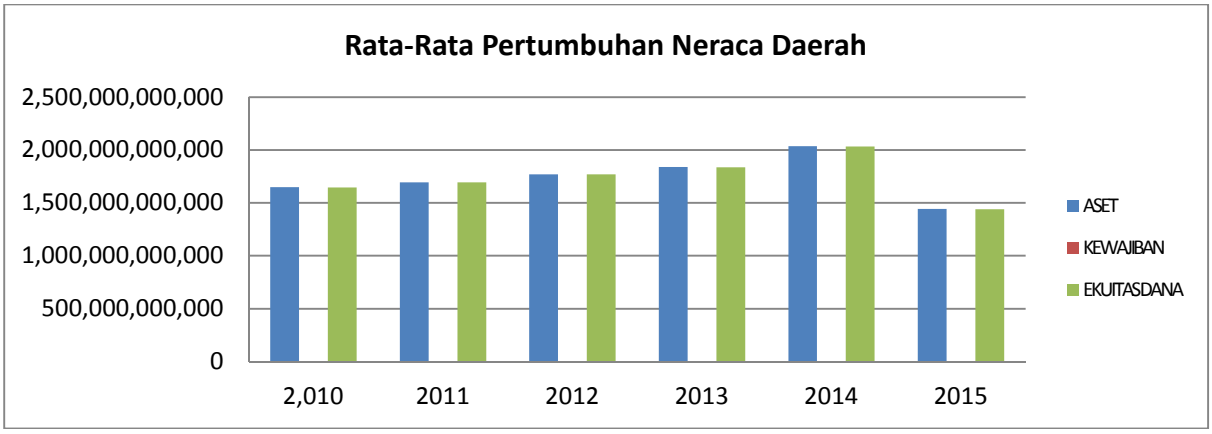

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Pada tahun 2010, Kota Bukittinggi memiliki aset senilai Rp. 1,647 trilyun, walaupun pada tahun 2010 sampai tahun 2014 terjadi kenaikan nilai aset, namun pada tahun 2015 nilai aset terjadi penurunan, sehingga secara rata-rata terjadi penurunan nilai aset sekitar 1,82%. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2010 mencapai Rp.1.563 trilyun. Aset tetap ini meliputi 95,27 persen dari seluruh aset Pemerintah Kota Bukittinggi.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah

daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 1,447 milyar. Dari tahun 2010 hingga tahun 2015 jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2012 dan tertinggi tahun 2015. Karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan.Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Bukittinggi Tahun 2010 mencapai Rp. 1,645 trilyun, dan mengalami pertumbuhan dari 2010-2014, namun pada tahun 2015 terjadi penurunan, sehingga secara rata-rata terjadi penurunan ekuitas sebesar 5,87 persen.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. **Rasio solvabilitas** adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.

Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan **Rasio kewajiban terhadap ekuitas** adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar *(current ratio)* karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kota Bukittinggi setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Tabel.3.12
Analisa Rasio Keuangan
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Rasio Lancar	51,09	54,42	66,76	45,35	56,64	35,44
2	Rasio Quick	48,25	50,88	62,32	42,52	53,92	33,65
3	Rasio Total Utang Terhadap Total Aset	0,09	0,07	0,07	0,10	0,11	0,20
4	Rasio Utang Terhadap Modal	0,09	0,07	0,07	0,10	0,11	0,20
5	Rata-Rata Umur Piutang	5,59	3,76	3,79	4,05	8,03	9,53
6	Rata-Rata Umur Persedian	376,09	352,11	330,80	365,15	346,76	392,47

GRAFIK 3.12

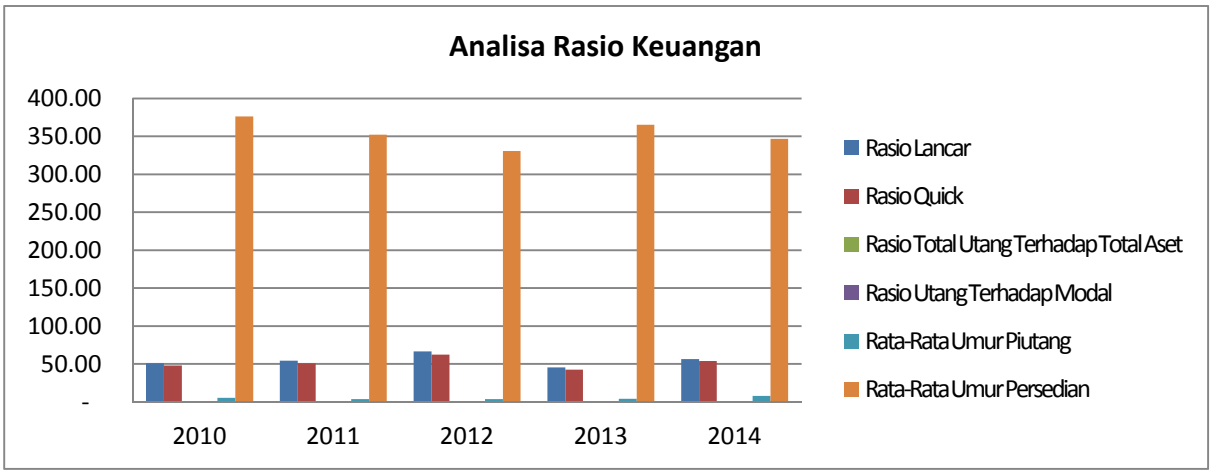

Current ratio **dan** ***quick ratio*** atas keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. Hal ini merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan kepada publik.

Ratio aktivitas adalah untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas Pemerintah daerah dalam menggunakan dananya secara efektif dan efisien. Ratio ini dapat mengukur efisiensi kegiatan operasional birokrasi Pemerintah daerah, karena rasio ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran pada waktu periode tertentu. Untuk Neraca keuangan daerah, rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata-rata umur persedian. Rasio rata-rata umur piutang adalah 365 hari

dibagi dengan perputaran piutang, perputaran piutang tersebut diperoleh dari Pendapatan Daerah dibagi dengan Rata-rata Piutang Pendapatan Daerah, sedangkan Rata-Rata Piutang Pendapatan Daerah diperoleh dari Saldo Awal Piutang Ditambah dengan Saldo Akhir Piutang dibagi 2 (dua), sedangkan rasio rata-rata umur persedian adalah 365 hari dibagi dengan perputaran persedian, perputan persedian tersebut diperoleh dari Nilai Persedian Yang Digunakan Dalam Satu Tahun dibagi dengan Rata-Rata Nilai Persedian, sedangkan Rata-Rata Nilai Persedian diperoleh dari Saldo Awal Persedian ditambah Saldo Akhir Persedian dibagi 2 (dua).

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2010-2015 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggung jawaban APBD.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2010-2015 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Selama Periode Tahun Anggaran 2010-2015, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara on-line dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.

2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

3. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

5. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

6. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah.

Terkait dengan kebijakan Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut diatas, diperlukan langkah-langkah strategis dalam peningkatan PAD, sehingga tingkat ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari Pemerintah Pusat tidak terlalu besar, antara lain dengan melakukan;

1. Melakukan analisis potensi rill penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Pengelolaan sumber daya daerah secara lebih profesional melalui peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
3. Intensifikasi PAD melalui penyesuaian tarif pajak dan tertribusi.
4. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Peningkatan kebijakan PAD yang berasal dari pajak daerah, khususnya pajak hotel, restoran, penerangan jalan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB.
6. Pembenahan sistem retribusi perparkiran, pelayanan pasar, penyedian dan penyedotan kakus dan persampahan.
7. Peningkatan NJOP yang berkaitan dengan BPHTB dan PBB.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2010-2015, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2010-2015 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain :

1. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

2. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan.

3. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan Kelompok UKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur.

4. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

5. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost)* dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM).

6. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bukittinggi yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

7. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :

   a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
   c) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
   d) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD dan/atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
   e) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

8. Langkah-Langkah strategis dan target yang terukur untuk meningkatkan realisasi belanja langsung dimasa mendatang, sebagai berikut;

   a) Program dan Kegiatan yang diajukan oleh Perangkat Daerah harus jelas output dan outcomenya.
   b) Program dan Kegiatan yang dananya bersumber dari DAK harus jelas Juklak dan Juknisnya, sehingga dalam pelaksanaanya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
   c) Penganggaran belanja modal yang merupakan salah satu komponen belanja langsung penganggarannya harus jelas dan mengacu kepada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
   d) Perangkat Daerah dalam mengajukan program dan kegiatan harus mengutamakan program yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

9. Merumuskan kebijakan yang strategis dan konkrit untuk menekan belanja kebutuhan aparatur, sebagai berikut;

   a) Melakukan rasionalisasi terhadap belanja kebutuhan aparatur, khususnya kebutuhan aparatur yang ada pada belanja langsung seperti perjalanan dinas, honorarium, uang lembur dan belanja makan minum rapat/diklat/pertemuan.

   b) Melakukan rasionalisasi terhadap belanja kebutuhan aparatur, khususnya kebutuhan aparatur yang ada pada belanja tidak langsung seperti belanja tambahan penghasilan pegawai, merampingkan jabatan struktural dan jabatan fungsional serta mengurangi jumlah pegawai.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, dan (b) pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Penganggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang besaran angkanya diperkirakan sewaktu melakukan pembahasan anggaran tahun yang akan datang atau besaran angkanya yang pasti diperoleh setelah dilakukan audit oleh BPK, sementara itu Pengeluaran pembiayaan bersumber dari Pembentukan dana cadangan dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Secara umum Silpa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk menutupi defisit setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam rangka melaksanakan proses perencanaan pembangunan, dengan arti kata Silpa tahun sebelumnya direncanakan untuk mengerakan pembangunan pada tahun berikutnya.

Setiap tahunnya Pemerintah Kota Bukittinggi terjadi kenaikan Silpa yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan

pada setiap Perangkat Daerah serta kurang akuratnya dalam perhitungan belanja, baik pada belanja tidak langsung maupun pada belanja langsung.

Berikut pada tabel dibawah ini dapat dilihat perkembangan realisasi pembiayaan dan rata-rata pertumbuhan Kota Bukittinggi dari tahun 2010 sampai tahun 2015, yang cendrung naik setelah dilakukan audit oleh BPK.

Tabel.3.13
Perkembangan Realisasi Pembiayaan dan Rata-Rata Pertumbuhan
Kota Bukittinggi

NO	URAIAN		TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Pembiayaan Daerah	**90.438.297.347**	**63.310.978.879**	**56.937.566.800**	**51.960.029.222**	**45.741.136.518**	**74.341.027.131**	**-**
A	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**90.458.297.347**	**65.622.525.392**	**59.307.566.800**	**70.892.029.222**	**75.324.136.518**	**98.224.027.131**	**8,86**
1	Silpa Tahun Sebelumnya	**90.458.297.347**	65.622.525.392	59.307.566.800	70.892.029.222.	75.324.136.518	98.224.027.131	**8,86**
2	Hasil Pengl.Kekay. Daerah Yg Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	
3	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	
B	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**20.000.000**	**2.311.546.513**	**2.370.000.000**	**18.932.000.000**	**29.583.000.000**	**23.883.000.000**	**25,52**
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	15.000.000.000	25.000.000.000	15.000.000.000	13,33
2	Penyertaan Modal	-	2.112.881.898	2.370.000.000	3.932.000.000	4.583.000.000	8.883.000.000	28,30
3	Pembayaran Pokok Hutang	**20.000.000**	198.664.615	-	-	-	-	-

GRAFIK 3.13

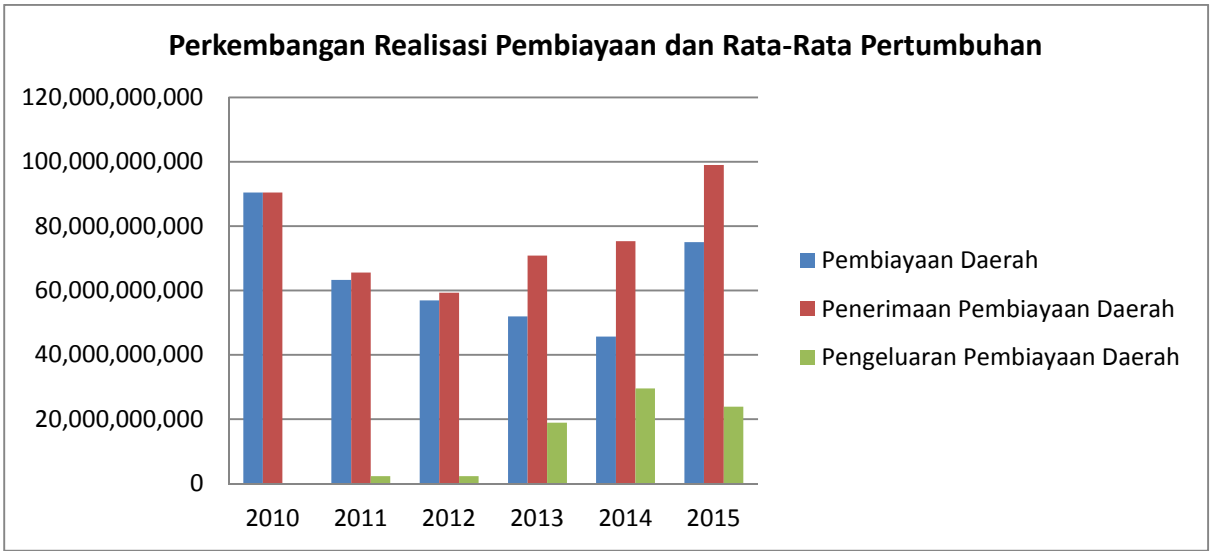

Dari tabel dan grafik tersebut diatas dapat dilihat bahwa Silpa tahun sebelumnya cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 8,86%, begitu juga dengan penyertaan modal yang cendrung naik dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 28,30%. Selisih dari Penerimaan

pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan akan diperoleh Pembiayaan Daerah yang dapat digunakan untuk mengerakan pembangunan di Kota Bukittinggi.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur cenderung menurun. Pada tahun 2010, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 80,95 persen, menurun menjadi 80,23 persen tahun 2011, dan menurun lagi menjadi 79,16 persen pada tahun 2012, 78,42 persen pada tahun 2013, 75,19 persen pada tahun 2014, dan di tahun 2015 naik menjadi 76,53 persen, lihat (Tabel.3.14). Kondisi ini sepintas memperlihatkan bahwa APBD Kota Bukittinggi masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik karena sebagian besar APBD Kota Bukittinggi digunakan untuk belanja pegawai. Perlu dipahami bahwa belanja pegawai sebagian besar untuk belanja aparatur bidang pendidikan dan kesehatan.

Tabel.3.14

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bukittinggi

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2010	294.051.337.787	363.256.193.806	80,95
2	Tahun Anggaran 2011	327.119.345.510.	407.732.122.887	80,23
3	Tahun Anggaran 2012	356.089.166.851.	449.812.753.557	79,16
4	Tahun Anggaran 2013	410.181.618.360.	523.042.258.149	78,42
5	Tahun Anggaran 2014	429.862.826.847.	571.699.414.973	75,19
6	Tahun Anggaran 2015	461.780.855.626	603.398.283.167	76,53

GRAFIK 3.14

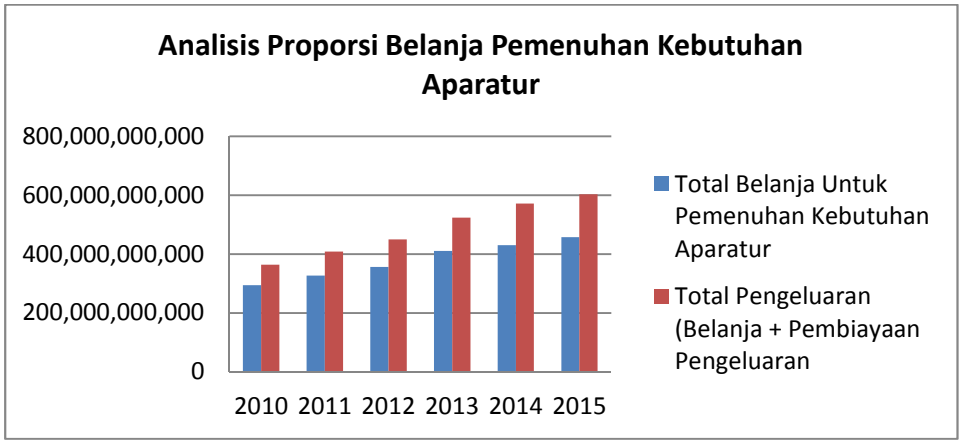

total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada data tersebut diatas dari tahun 2010 s.d 2015 secara prosentase terjadi penurunan, sebagaimana terlihat pada Tabel.T-3.14 diatas, dan data tersebut diatas diperoleh dari perhitungan tabel Realisasi belanja pemenuhan aparatur dibawah ini dengan membandingkan total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran):

Tabel.3.15
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata
A	**Belanja Tidak Langsung**	**210.599.184.116**	**242.666.447.174.**	**270.191.741.190.**	**283.326.771.150.**	**299.838.901.630.**	**324.221.452.977**	**6,97 %**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	147.046.237.783	164.771.618.464.	178.215.649.652.	185.985.440.660.	197.064.506.190.	214.692.593.464.	6,39 %
2	Belanja Tambahan Penghasilan	60.176.956.874	73.958.452.529.	87.459.426.900.	92.175.563.098.	97.270.638.979.	104.580.877.282.	8,20 %
3	Belanja Penerimaan Ang. Dan Pimpinan DPRD Serta operasional Kdh/Wkdh	3.199.452.752	3.332.439.992.	3.649.736.471.	4.199.132.184.	4.405.669.919.	3.689.180.780	1,77 %
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	176.536.707	603.936.189.	866.928.167.	966.635.208.	1.098.086.542.	1.258.801.451.	16,35 %
B	**Belanja Langsung**	**35.534.337.856**	**33.995.652.476.**	**35.162.787.069.**	**50.561.521.927.**	**53.472.374.581.**	**68.384.490.073**	**14,85%**
1	Belanja Honorarium PNS	12.403.606.403	12.510.184.050.	11.136.296.069.	16.789.032.864.	12.964.456.206.	20.229.771.900	6,94 %
2	Belanja Uang Lembur	1.404.642.300	1.884.238.000.	2.734.034.000.	3.600.115.000.	3.979.190.750.	4.165.511.700	17,29 %
3	Belanja Bea Siswa Pendidikan	797.456.000	548.300.000.	535.893.000.	561.503.150.	584.210.365.	234.608.000	2,04 %
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek	627.893.475	520.036.135.	787.715.210.	888.661.090.	830.859.952.	642.728.505	2,28 %
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.217.984.830	2.489.712.000.	2.712.693.435.	2.872.919.450.	4.981.817.083.	4.909.855.265	13,12 %
6	Belanja Makan dan Minum Peg.	4.956.029.522	3.207.082.092.	3.759.767.985.	5.214.657.399.	5.980.111.696.	10.140.300.301	24,11 %
7	Belanja Pakain Dinas Atribut	1.507.265.820	1.538.136.925.	256.207.000.	1.321.315.330.	2.276.571.360.	1.345.893.373	17,79 %
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	31.335.800	38.489.000.	35.329.800.	68.381.800.	78.000.000.	102.030.500	18,81 %
9	Belanja Perjalanan Dinas	10.476.123.706	11.197.635.624.	13.127.357.120	18.181.935.069.	20.850.842.969.	26.613.790.529	19,24
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	-	-	**0**
11	Belanja Pemulangan Peg.	1.112.000.000	61.838.650.	77.493.450.	896.120.300.	946.314.200.	-	**29,21%**
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan Dll)	**47.917.815.815**	50.457.245.860.	50.734.638.592.	76.293.325.283.	76.551.550.636.	69.174.912.576	5,94 %
	TOTAL	**294.051.337.787.**	**327.119.345.510.**	**356.089.166.851.**	**410.181.618.360.**	**429.862.826.847.**	**461.780.855.626**	**8,14 %**

GRAFIK 3.15.1

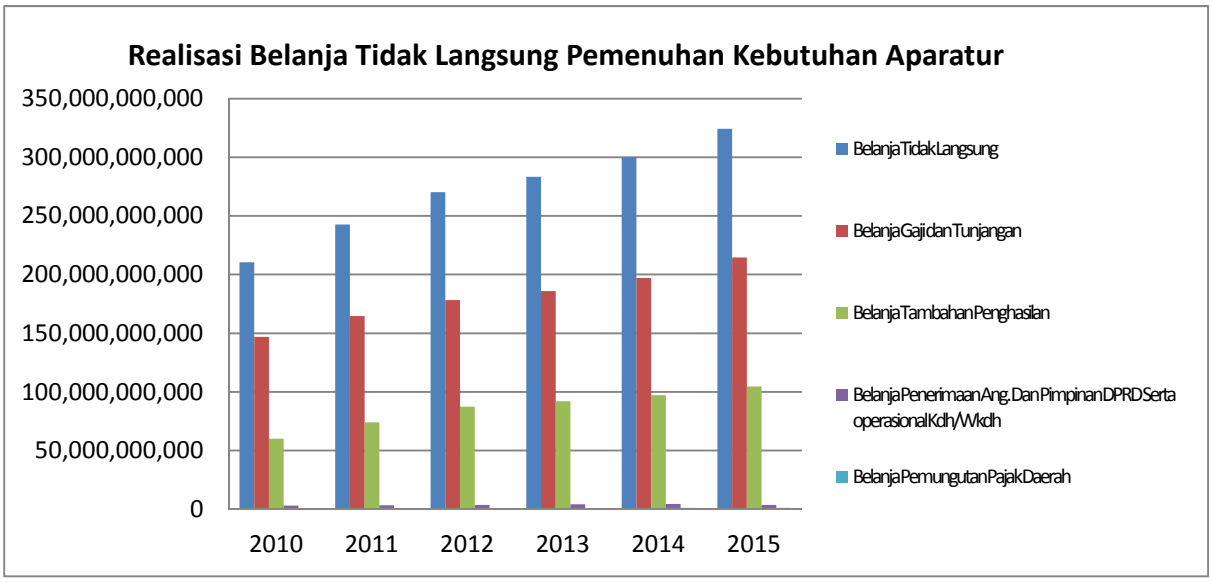

GRAFIK 3.15.2

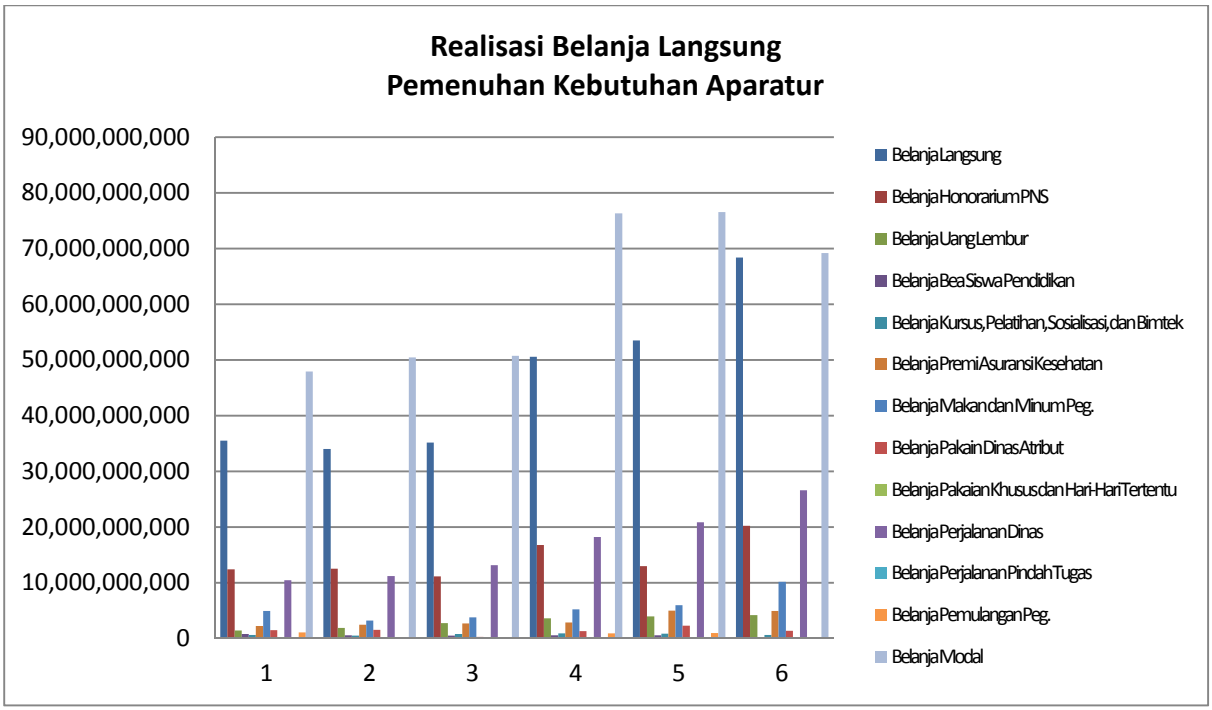

GRAFIK 3.15.3

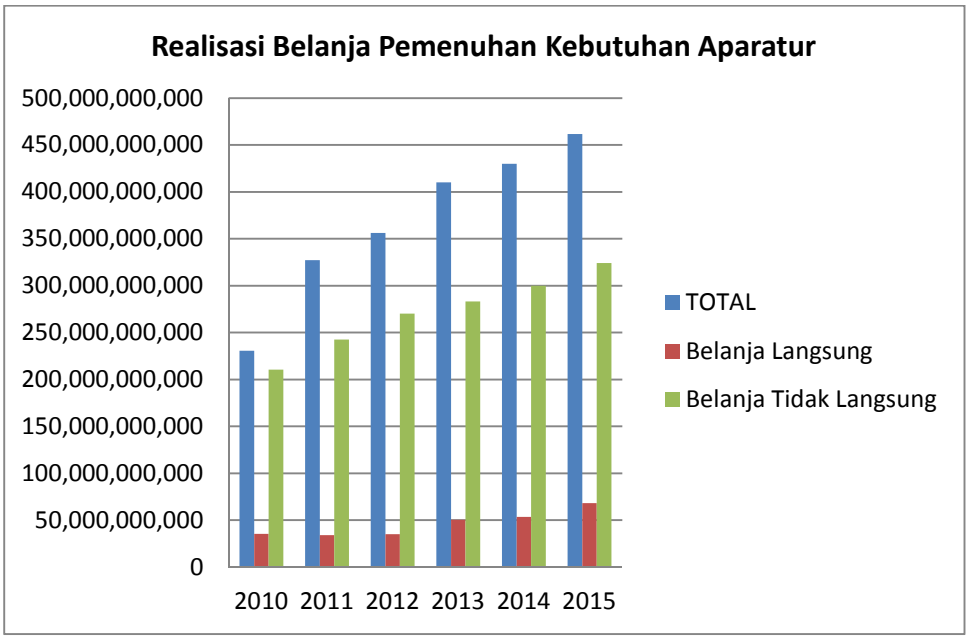

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk mengetahui lebih lanjut defisit riil Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel.3.16
Defisit Riil Anggaran
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	338.421.473.678	401.417.194.463	461.396.488.849	527.475.062.408	595.424.983.587	**593.323.296.014**
	Dikurangi Realisasi:						
2	Belanja Daerah	363.236.193.806	405.420.576.374.	447.442.753.557.	504.110.258.149	535.168.579.302.	**579.515.283.167**
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.000.000	2.311.546.513.	2.370.000.000.	18.932.000.000.	29.583.000.000.	**23.883.000.000**

No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
	Defisit Riil	(24.834.720.128)	(6.314.928.424)	11.583.735.292.	4.432.804.259.	30.673.404.285.	(10.074.987.153)

GRAFIK 3.16

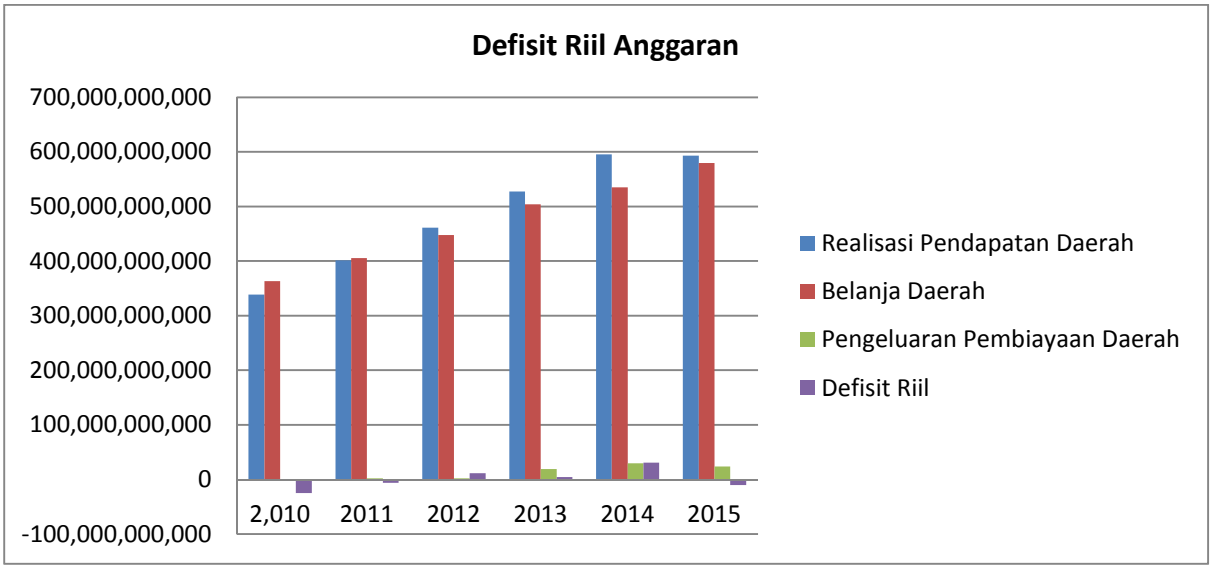

Berdasarkan tabel dan grafik diatas selama kurun waktu 2010-2015, defisit riil anggaran Kota Bukittinggi mengalami fluaktuasi, pada tahun 2010, 2011 dan 2015 yang mengalami defisit sebesar Rp.24.834.720.128, Rp.6.314.928.424,- dan Rp.10.074.987.153,- sedangkan untuk tahun 2012 sampai dengan 2014 mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi total realisasi belanja daerah setelah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah, masing-masing sebesar Rp. 11.583.735.291,46 dan Rp. 4.432.804.258,40 serta Rp.30.673.404.285,-.

Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.

Tabel 3.17
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Bukittinggi

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	90.458.297.347	65.622.525.392	59.307.566.800	70.892.029.222	75.324.136.518	98.224.027.131
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-

GRAFIK 3.17

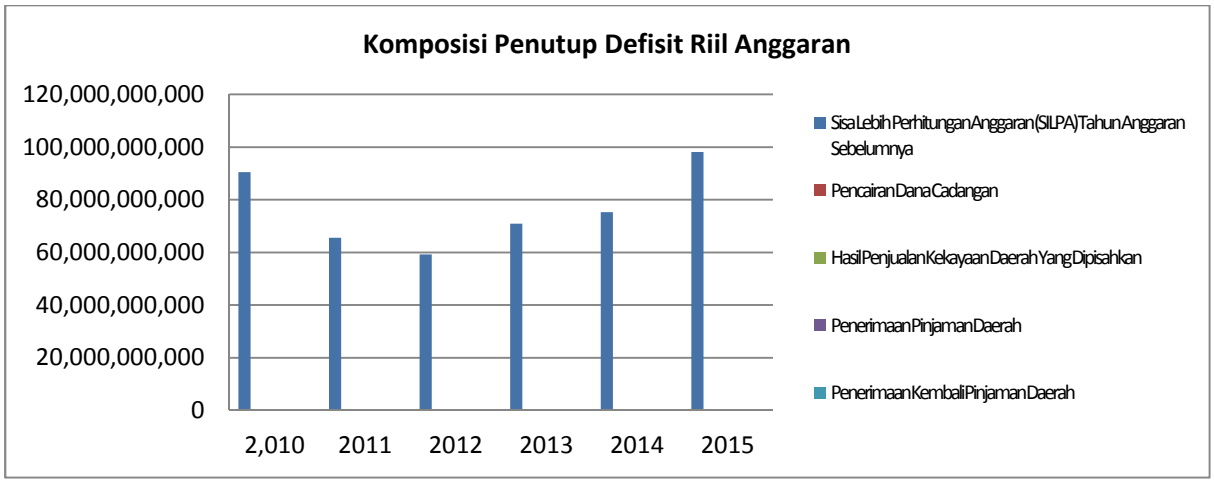

Tabel.3.18
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	% Dari Silpa	(Rp)	% Dari Silpa	(Rp)	% Dari Silpa	(Rp)	% Dari Silpa	(Rp)	% Dari Silpa	(Rp)	% Dari Silpa
1	Jumlah Silpa	90.459.676.600		65.622.525.392	-	59.307.566.800	-	70.892.029.222	-	75.324.136.518	-	98.224.027.131	-
2	Pelampauan Penerimaan PAD			-		-	-	557.235.655	0,79	1.035.383.121	1,37	2.937.693.604	3,30
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan			-	-	856.907.495	1,44	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah	21.371.218.178	22,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	70.004.789.127	77,39	63.832.777.833	97,27	74.761.072.571	126,06	86.545.886.582	122,19	106.104.043.829,00	140,86	106.981.811.167,00	120,38
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	202.935.093	0,22	20.199.919	0,03	727.131	0,001	5.051.841	0,006	-	-	9.405.856.	0,01
7	Kegiatan Lanjutan	9.971.996.830	11,02	14.780.228.400	22,52	22.700.042.400	38,28	19.786.332.540	27,91	19.124.307.540	25,39	290.281.915	0,33

GRAFIK 3.18

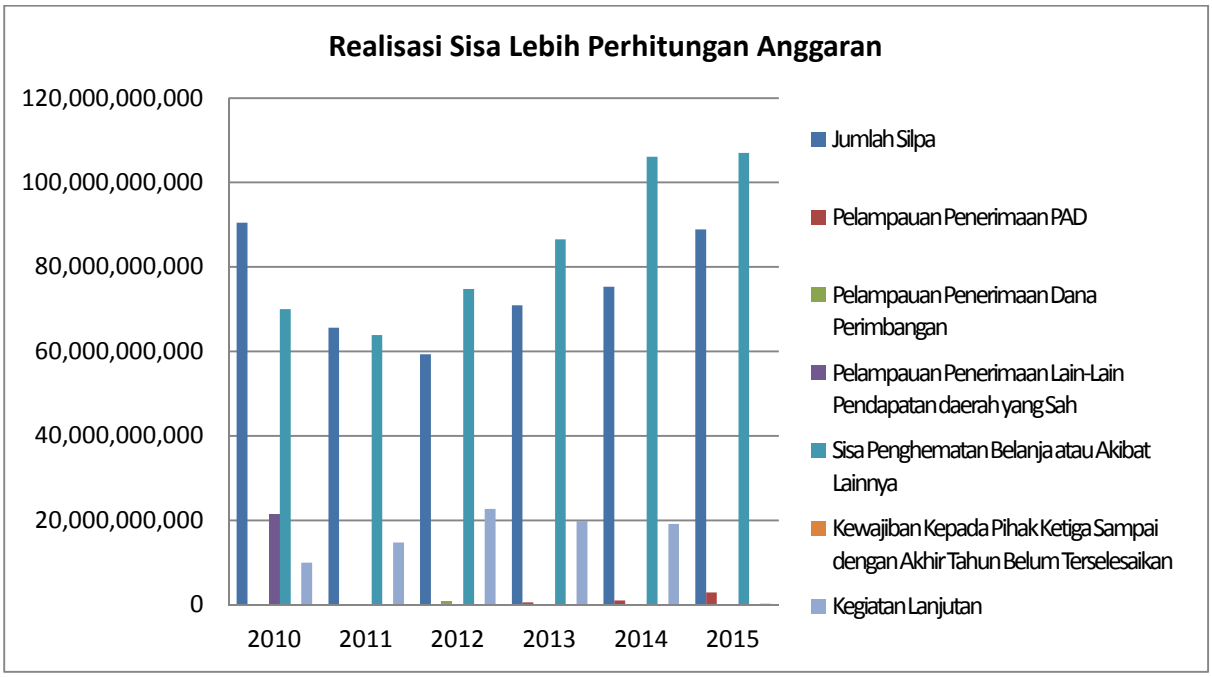

Dari Tabel.T.3.16 diatas terlihat bahwa pada tahun 2012-2014 Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil, sehingga pada tahun tersebut surplus riilnya mencapai Rp.11.583.735.291,- Rp. 4.432.804.258,- dan Rp. 30.673.404.285,- Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung.

SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif.

Bermakna positif Jika SILPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi over target dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah.Sedangkan SILPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada pemerintah daerah.

SILPA yang terdapat pada APBD Kota Bukittinggi sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SILPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SILPA Kota Bukittinggi dapat diperkecil.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Pertumbuhan belanja periodik prioritas utama untuk belanja tidak langsung Kota Bukittinggi berasal dari belanja gaji dan tunjangan dan belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta Op.Kdh/Wkdh, masing masing 7,27% dan 8,54%. Sedangkan untuk belanja langsung pertumbuhan berasal dari belanja jasa kantor, belanja bea siswa pendidikan PNS, dan belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis masing-masing 15,63% , 5,57% dan 10,81%.

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah. Ini karena akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi : proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Proyeksi pendapatan

Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun.Proyeksi pendapatan ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan selama tahun 2010-2015. Berdasarkan penghitungan tersebut, proyeksi pendapatan untuk tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 655,325 milyar, dan meningkat menjadi Rp. 723,807 milyar pada tahun 2017. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2016-2021, pendapatan akan menjadi Rp. 1,077 triliun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan.

Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Adapun proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.3.19
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Bukittinggi

No	Uraian	Proyeksi					
		Th.2016 (Rp)	Th.2017 (Rp)	Th.2018 (Rp)	Th.2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
	Pendapatan Daerah	**655.325.580.447**	**723.807.103.603**	**799.444.945.929**	**882.986.942.778**	**975.259.078.298**	**1.077.173.651.980**
A	**PAD**	**74.161.930.433**	**83.298.680.262**	**93.561.077.670**	**105.087.802.438**	**118.034.619.698**	**132.576.484.844**
1	Pajak Daerah	33.648.499.682	39.038.989.331	45.293.035.421	52.548.979.695	60.967.326.242	70.734.291.906
2	Retribusi Daerah	17.991.825.075	19.006.564.009	20.078.534.219	21.210.963.549	22.407.261.893	23.671.031.463
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.322.456.367	4.810.029.445	5.352.600.766	5.956.374.132	6.628.253.134	7.375.920.087
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	18.087.916.759	20.309.112.937	22.803.072.005	25.603.289.247	28.747.373.166	32.277.550.590
B	**Dana Perimbangan**	**490.001.368.866**	**533.709.490.968**	**581.316.377.562**	**633.169.798.440**	**689.648.544.460**	**751.165.194.625**
1	Bagi Hsl Pjk/Bkn Pjk	14.065.956.964	15.758.091.586	17.653.790.038	19.777.540.975	22.156.779.154	24.822.239.686
2	DAU	448.687.434.798	492.658.803.408	540.939.366.142	593.951.424.023	652.158.663.577	716.070.212.607
3	DAK	30.431.548.492	32.293.959.259	34.270.349.565	36.367.694.958	38.593.397.889	40.955.313.839
C	**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**	**90.554.191.373**	**105.912.182.230**	**123.874.888.336**	**144.884.069.397**	**169.456.407.566**	**198.196.214.289**
1	Dana Bagi Hsl Pjk Provinsi	24.457.386.951	28.072.188.742	32.221.258.238	36.983.560.205	42.449.730.403	48.723.800.556
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.309.104.948	53.628.959.577	53.950.733.334	54.274.437.734	54.600.084.360	54.927.684.866

GRAFIK 3.19.1

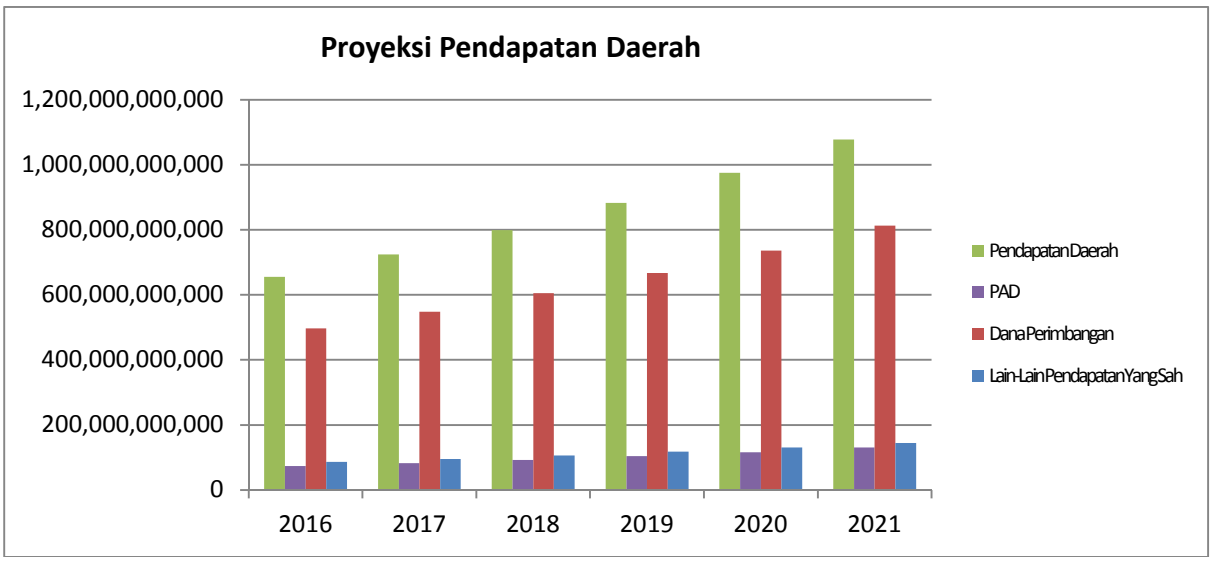

GRAFIK 3.19.2

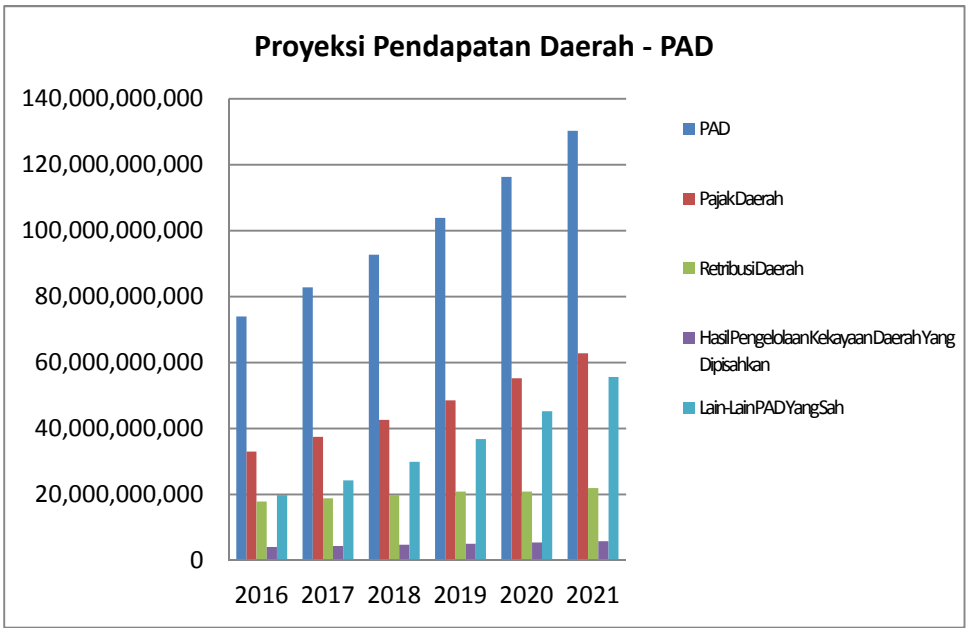

GRAFIK 3.19.3

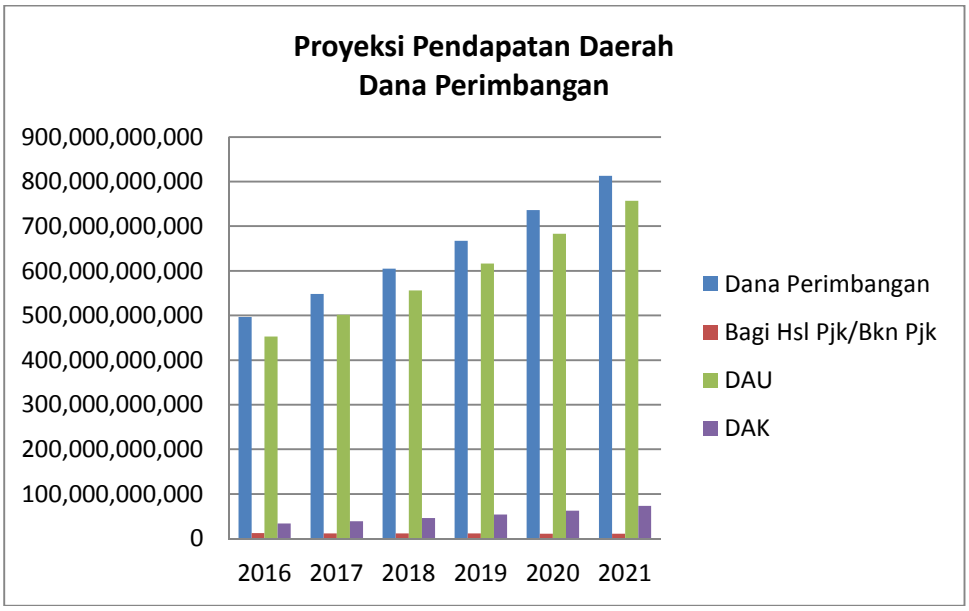

GRAFIK 3.19.4

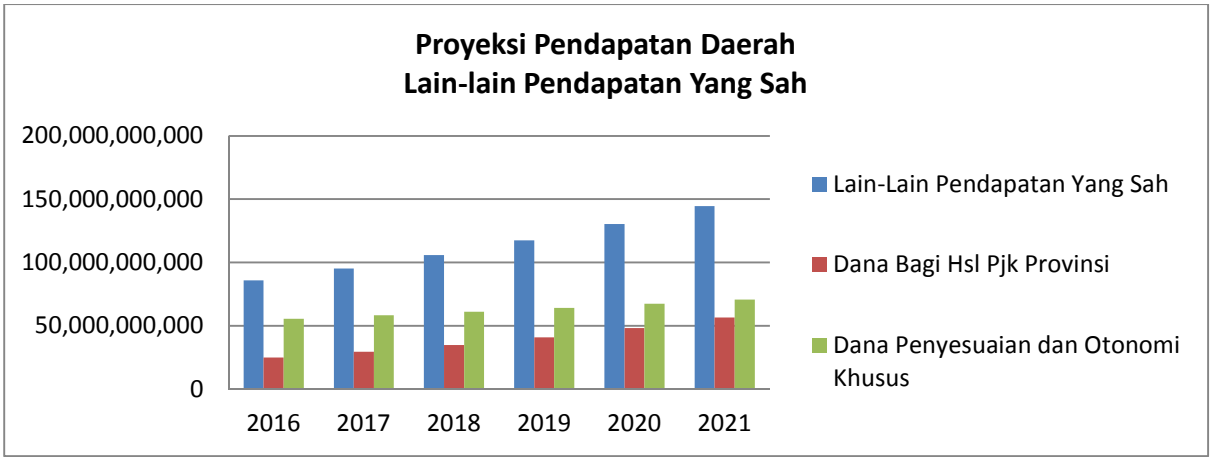

Tabel dan grafik tersebut diatas berdasarkan perhitungan dari Tabel 3.1 dengan mempergunakan sebagai tahun dasar tahun 2015 yang dikalikan dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, yaitu Pendapatan daerah tumbuh rata-rata sebesar 10,45%, PAD sebesar 12,32%, Pajak daerah sebesar 16,02%, Retribusi daerah sebesar 5,64%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 11,28%, Lain-lain PAD yang sah sebesar 12,28%, Dana perimbangan sebesar 8,92%, Dana bagi hasil pajak/Bukan pajak turun sebesar sebesar (12,03%), DAU sebesar 9,80%, DAK sebesar 6,12%, Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 16,96%, Dana bagi hasil pajak propinsi sebesar 14,78%, dan Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 0,60%.

Adapun asumsi dasar yang digunakan dalam rangka melakukan proyeksi terhadap Pendapatan daerah untuk Tahun 2016 – 2021, adalah sebagai berikut;

1. Memperhatikan tingkat pertumbuhan rata-rata dari setiap komponen pendapatan pada tahun 2010 – 2015 .
2. Tidak adanya perubahan yang mendasar terhadap regulasi yang mengatur tentang Pendapatan Daerah.
3. Tidak adanya perubahan terhadap komponen- komponen pendapatan daerah.

2). Proyeksi Belanja Dan Pengeluaran Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama

Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama tahun 2016-2021 diproyeksikan cenderung meningkat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.3.20
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Bukittinggi

No	Uraian	Data Tahun Dasar	Tingkat Pertumbuhan (%)	PROYEKSI					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
A	**Blj.Tidak Langsung**	339.899.689.457.	7,21	**364.406.457.066**	**390.680.162.620**	**418.848.202.344**	**449.047.157.733**	**481.423.457.805**	**516.134.089.112**
1	Blj.Gaji dan Tunjangan	214.692.593.464	7,27	230.300.745.008	247.043.609.170	265.003.679.556	284.269.447.059	304.935.835.860	327.104.671.127
2	Blj.Penerimaan Pimp. Dan Ang.DPRD serta Op.Kdh/Wkdh	3.689.180.780.	8,54	4.004.236.681	4.346.198.505	4.717.363.857	5.120.226.730	5.557.494.092	6.032.104.087
.3	Blj.Bunga	-	-						
4	Blj.Bagi Hasil	-	-						
	Blj Tidak Langsung Lainnya	**121.517.915.213**	**7,83**	**131.032.767.974**	**141.292.633.706**	**152.355.846.925**	**164.285.309.739**	**177.148.849.491**	**191.019.604.406**
B	**Blj.Langsung**	239.615.593.710.	15,68	277.187.318.803	320.650.290.391	370.928.255.924	429.089.806.452	496.371.088.103	574.202.074.717
1	Blj.Honr.PNS Khusus Utk.Guru dan Tenaga Media	683.772.500	10,81	757.688.307	839.594.413	930.354.569	1.030.925.897	1.142.368.986	1.265.859.073
2	Blj.B.Siswa Pddk.PNS	234.608.000	5,57	247.675.665	262.471.199	277.035.144	292.466.001	308.756.357	325.954.086
3	Blj.Jasa Ktr (Khusus Tagihan Bln.Ktr,Sprt. Air, Tlpn dan Sejenis)	5.178.107.918	15,63	5.987.446.185	6.923.284.023	8.005.393.315	9.256.636.290	10.703.448.542	12.376.397.549
4	Blj.Sewa Ged.Ktr (Yg ada Kontrak Jkg.Pjg)	-	-						
5	Blj.Sewa Perlkp dan Perltn Ktr (Yg Tlh Ada Kontrk Jgk Pjg)	-	-						
	Blj Langsung Lainnya	**233.519.105.292**	**15,99**	**270.858.810.228**	**314.169.133.983**	**364.404.778.506**	**422.673.102.589**	**490.258.531.693**	**568.650.870.910**
C	**Penglrn.Pembyaan**	**23.883.000.000.**	**20,27**	**28.724.084.100**	**34.546.455.947**	**41.549.022.567**	**49.971.009.441**	**60.100.133.054**	**72.282.430.024**
1	Pembtk.Dana Cad.	15.000.000.000	13,33	**16.999.500.000**	**19.265.533.350**	**21.833.628.945**	**24.744.051.683**	**28.042.433.772**	**31.780.490.193**
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-						
	Penglrn Pembiayaan Lainnya	**8.883.000.000**	**47,06**	**13.063.339.800**	**19.210.947.509**	**28.251.619.407**	**41.546.831.500**	**61.098.770.403**	**89.851.851.754**
	TOTAL A+B+C	**603.398.283.167**	**11,87**	**675.021.659.378**	**755.146.730.346**	**844.782.647.238**	**945.058.347.465**	**1.057.236.773.309**	**1.182.730.778.300**

GRAFIK 3.20.1

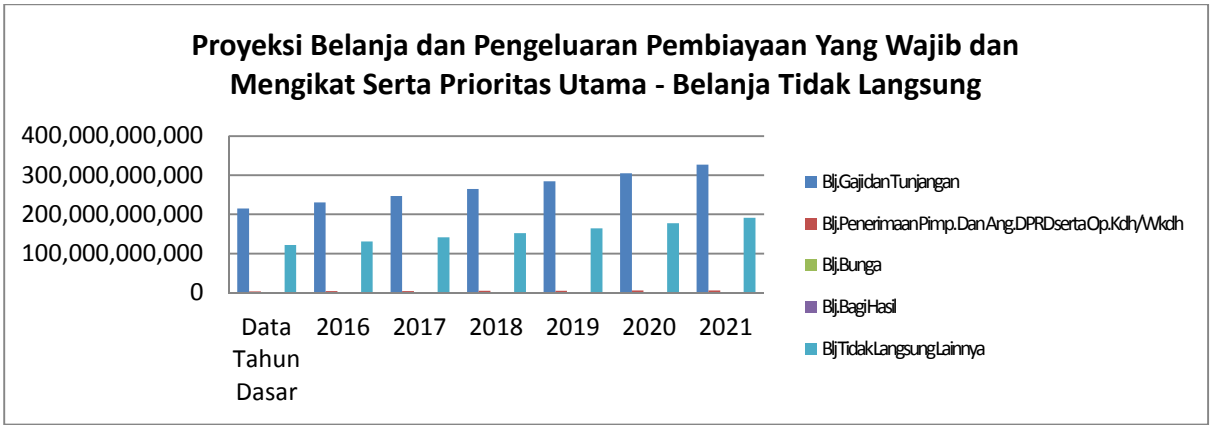

GRAFIK 3.20.2

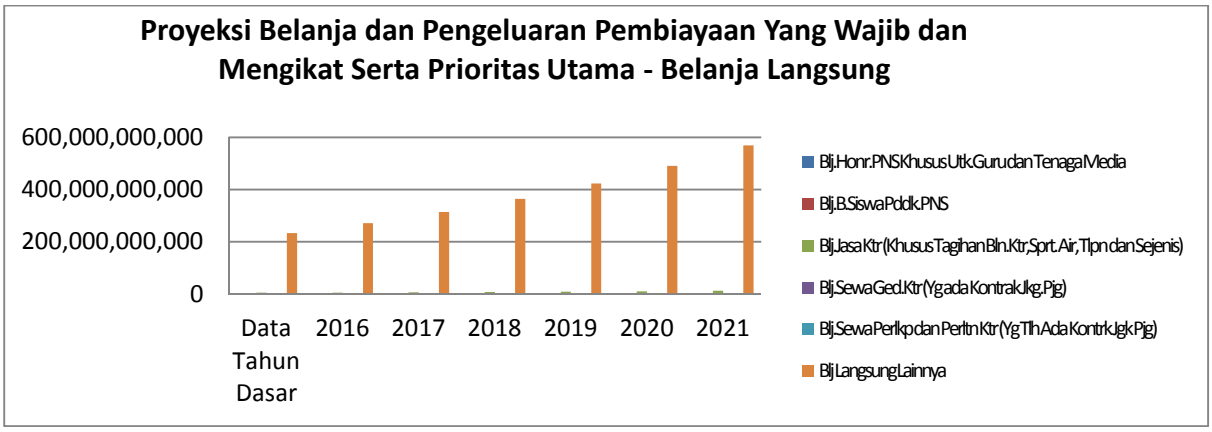

GRAFIK 3.20.3

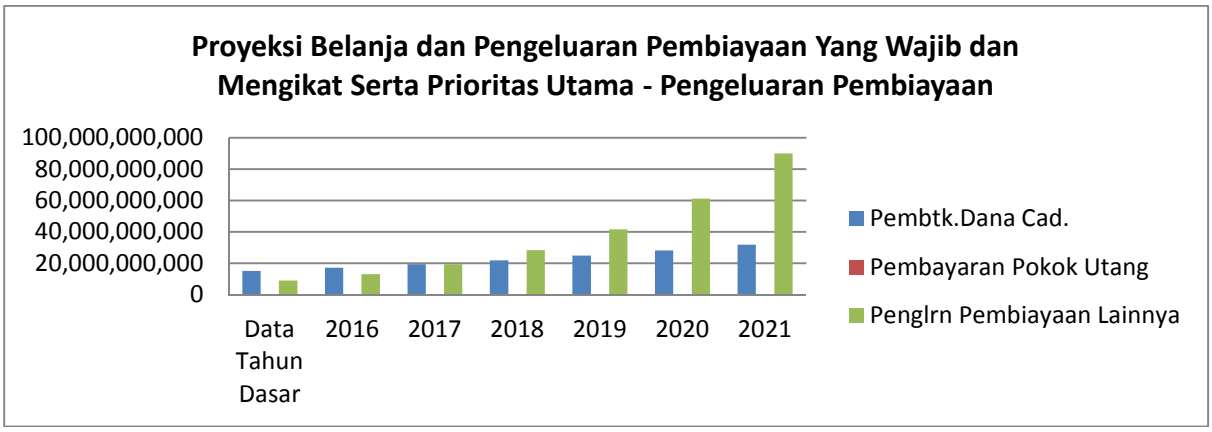

GRAFIK 3.20.4

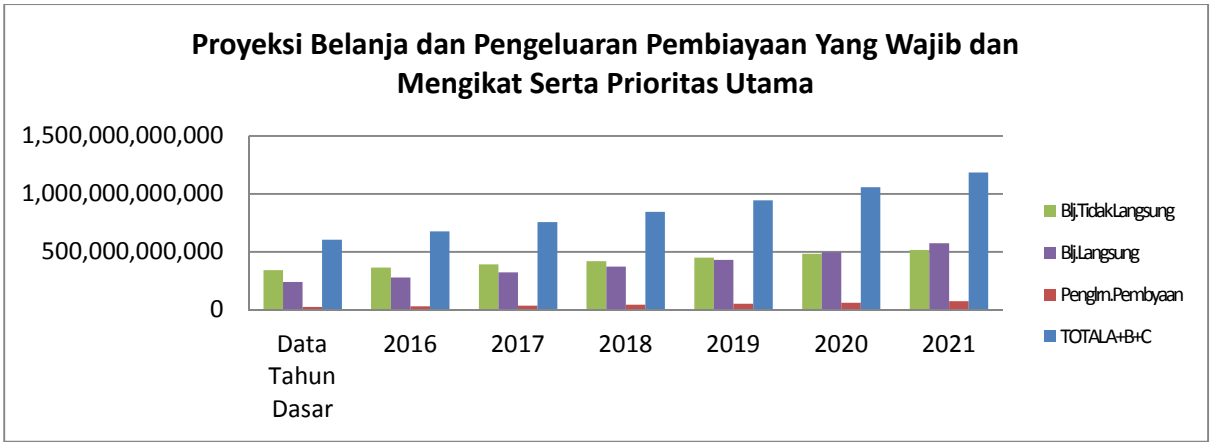

GRAFIK 3.20.5

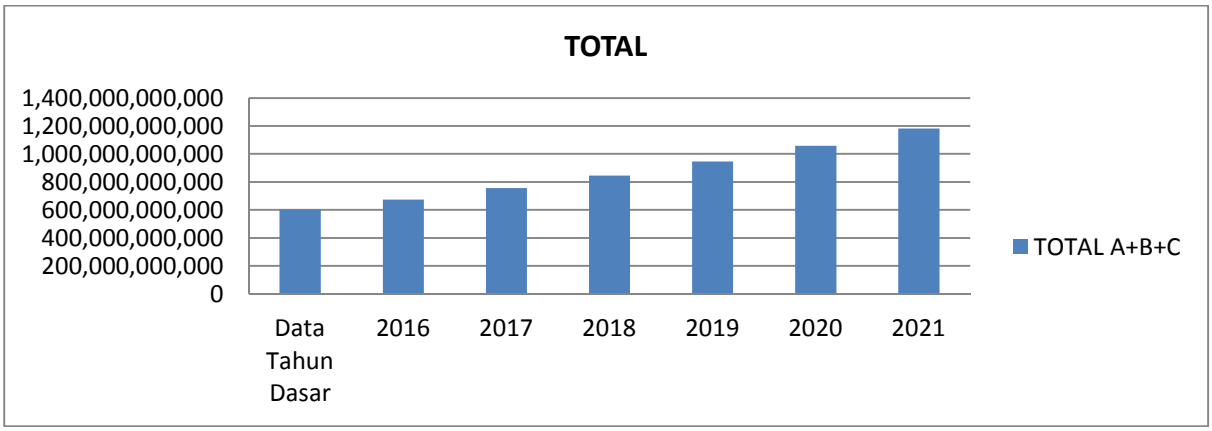

Adapun asumsi dasar yang digunakan dalam rangka melakukan proyeksi terhadap Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, adalah sebagai berikut;

1. Memperhatikan tingkat pertumbuhan rata-rata dari setiap komponen belanja dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2010 – 2015.
2. Tidak adanya perubahan yang mendasar terhadap regulasi yang mengatur tentang belanja dan pengeluaran pembiayaan.
3. Tidak adanya perubahan terhadap komponen- komponen belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah.

3) Proyeksi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proyeksi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk tahun anggaran 2016 – 2021 diproyeksikan cendrung meningkat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel.3.21
Proyeksi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kota Bukittinggi

No	Uraian	Data Tahun Dasar	Tingkat Pertumbuhan (%)	PROYEKSI					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
A	**Blj.Tidak Langsung**	324.221.452.977	6,97	**346.819.688.249**	**370.993.020.519**	**396.851.234.049**	**424.511.765.062**	**454.100.235.086**	**485.751.021.471**
1	Blj.Gaji dan Tunjangan	214.692.593.464	6,39	228.411.450.188	243.006.941.854	258.535.085.438	275.055.477.397	292.631.522.402	311.330.676.683
2	Blj.Tambahan Penghasilan	104.580.877.282	8,20	113.156.509.219	122.435.342.974	132.475.041.097	143.337.994.467	155.091.710.013	167.809.230.234
3	Blj.Pen.Ang dan Pimp.DPRD serta Op.Kdh/Wkdh	3.689.180.780.	1,77	3.754.479.279	3.820.933.562	3.888.564.086	3.957.391.670	4.027.437.502	4.098.723.145
4	Blj.Pemungutan Pjk Daerah	1.258.801.451	16,35	1.464.615.488	1.704.080.120	1.982.697.219	2.306.868.214	2.684.041.167	3.122.881.897
B	**Blj.Langsung**	68.384.490.073	14,85	78.539.586.848	90.202.715.495	103.597.818.746	118.982.094.829	136.650.935.911	156.943.599.893
1	Blj.Honr.PNS	20.229.771.900	6,94	21.633.718.069	23.135.098.103	24.740.673.911	26.457.676.680	28.293.839.441	30.257.431.898
2	Blj.Uang Lembur	4.165.511.700	17,29	4.885.728.672	5.730.471.159	6.721.269.622	7.883.377.139	9.246.413.046	10.845.117.861
3	Blj.Bea Siswa Pendidikan	234.608.000	2,04	239.394.003	244.277.640	249.260.903	254.345.825	259.534.479	264.828.982
4	Blj.Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimtek	642.728.505	2,28	657.382.714	672.371.039	687.701.098	703.380.683	719.417.762	735.820.486
5	Blj.Premi Asuransi Kesehatan	4.909.855.265	13,12	5.554.028.275	6.282.716.784	7.107.009.226	8.039.448.836	9.094.224.523	10.287.386.780
6	**Blj Makan dan Minum Pegawai**	**10.140.300.301**	**24,11**	**12.585.126.703**	**15.619.400.751**	**19.385.238.272**	**24.059.019.219**	**29.859.648.752**	**37.058.810.066**
7	**Blj.Pakaian Dinas Atribut**	**1.345.893.373**	**17,79**	**1.585.327.804.**	**1.867.357.620**	**2.199.560.540**	**2.590.862.360**	**3.051.776.773**	**3.594.687.861**
8	Blj.Pakaian Khusus dan Hari Tertentu	102.030.500	18,81	**121.222.437**	**144.024.377**	**171.115.362**	**203.302.161**	**241.543.297**	**286.977.591**
9	Blj.Perjln.Dinas	26.613.790.529	19,24	31.734.283.826	37.839.960.034	45.120.368.344	53.801.527.213	64.152.941.048	76.495.966.905
10	**Blj.Perjln.Pindah Tugas**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11	**Blj.Pemulangan Pegawai**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12	**Blj.Modal (Ktr,Mobil Dinas,Meubiler,Peralatan dan Perlengkapan**	**69.174.912.576**	**5,94**	**73.283.902.383**	**77.636.966.184**	**82.248.601.975**	**87.134.168.932**	**92.309.938.566**	**97.793.148.916**
	TOTAL	**461.780.855.626**	**8,14**	**499.369.817.273**	**540.018.520.399**	**583.976.027.959**	**631.511.676.634**	**682.916.727.112**	**738.506.148.698**

GRAFIK 3.21.1

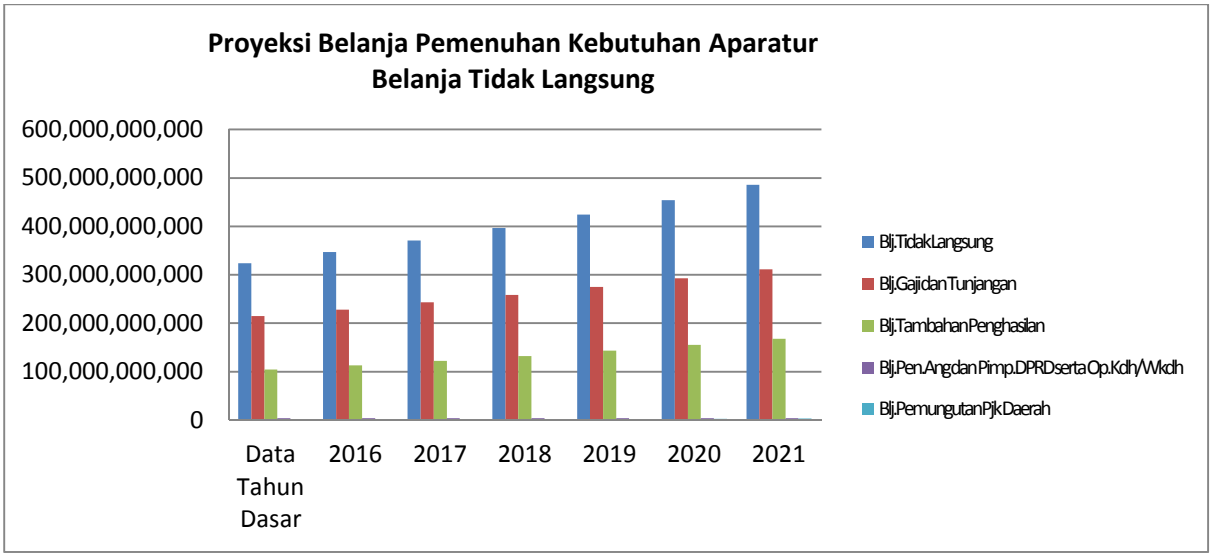

GRAFIK 3.21.2

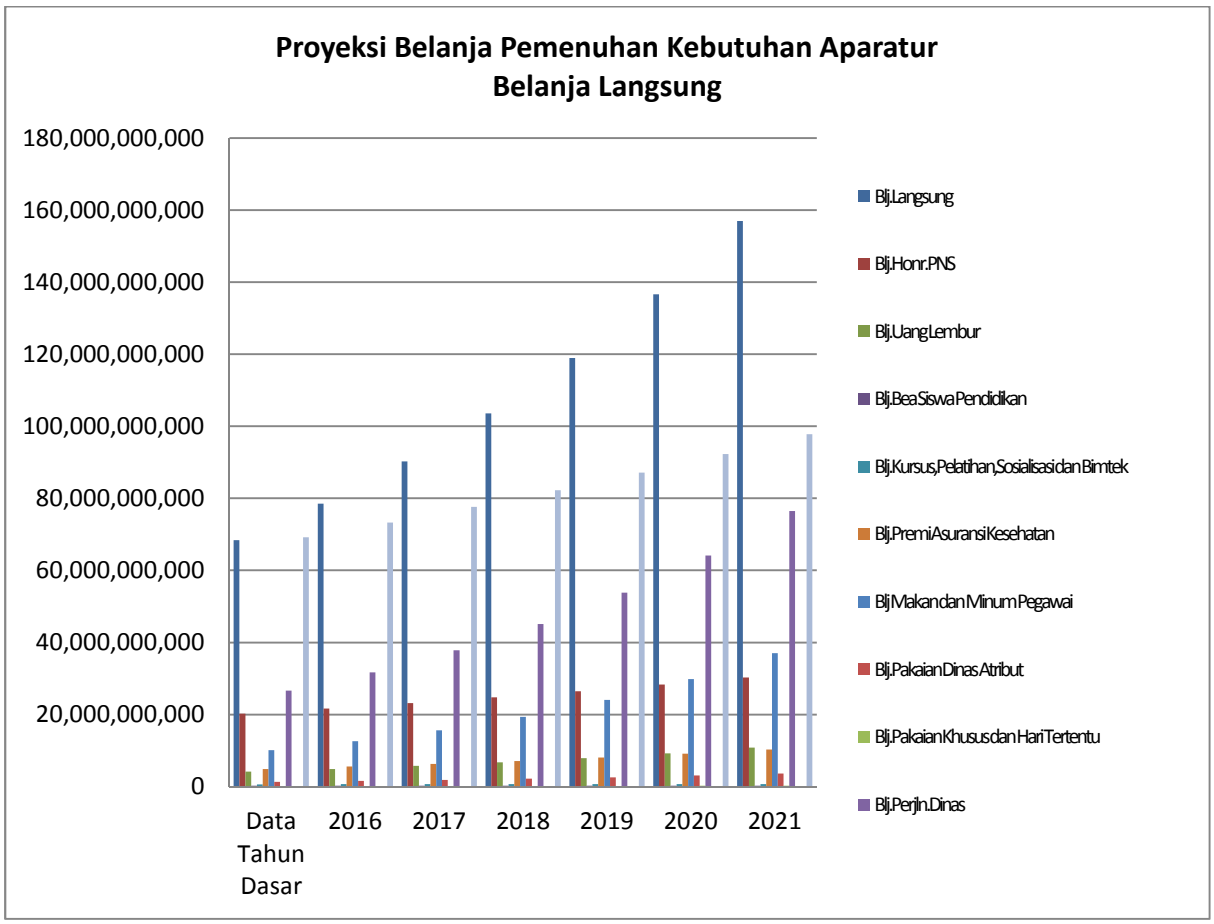

GRAFIK 3.21.3

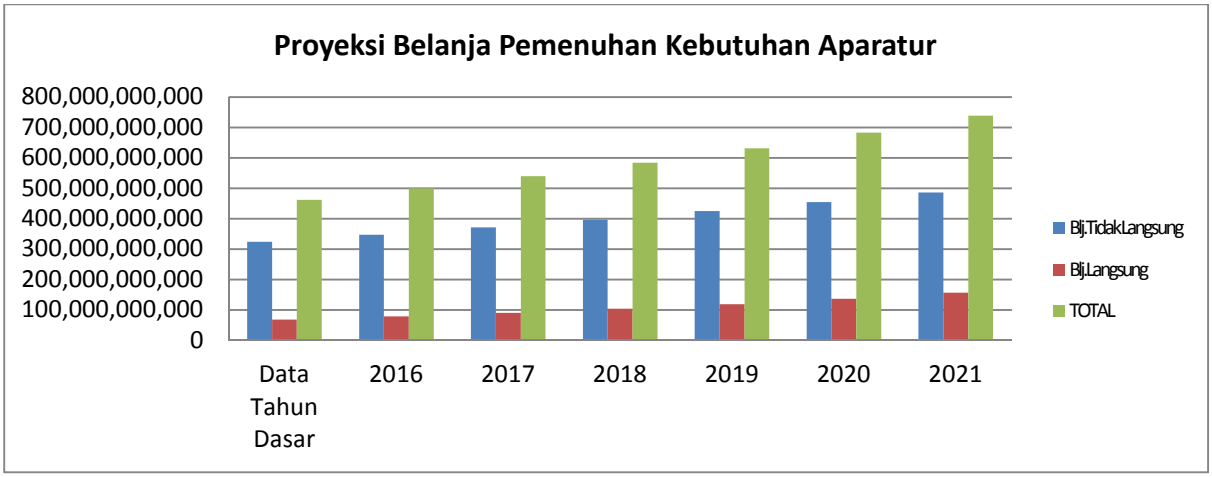

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang (2016-2021), kapasitas kemampuan keuangan daerah Kota Bukittinggi diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah.

Berdasarkan data dalam kurun waktu 5 tahun 2010-20115 daya serap anggaran, pada belanja langsung rata-rata hanya mampu menyerap 76,05% anggaran, Hal ini tidak dapat dikatakan seutuhnya dari efisiensi, yaitu sebesar 23,95%. Beberapa data diantaranya adalah sebagai berikut daya serap rata-rata dari jenis belanja langsung;

- pada jenis belanja pegawai daya serap 85,71%
- pada jenis belanja barang dan jasa 73,05%
- pada belanja modal 72,13%

Berdasarkan data tersebut diatas SILPA akan terjadi, diskenariokan sebesar **6%** pada setiap tahunnya. Akan tetapi, apabila SILPA pada akhir tahun terealisasikan diatas 6%, selisih tersebut akan diprioritaskan pada dana cadangan, penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja peningkatan jaminan sosial.
Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel.3.22
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kota Bukittinggi

No	Uraian	Proyeksi					
		TH.2016 (Rp)	TH.2017 (Rp)	TH.2018 (Rp)	TH.2019 (Rp)	TH.2020 (Rp)	TH. 2021 (Rp)
1	**Pendapatan**	**655.325.580.447**	**723.807.103.603**	**799.444.945.929**	**882.986.942.778**	**975.259.078.298**	**1.077.173.651.980**
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	-	**95.809.822.878**	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	**39.319.534.826**	**43.428.426.216**	**47.966.696.755**	**52.979.216.566**	**58.515.544.697**	**64.630.419.118**
	Total Penerimaan	**694.645.115.273**	**863.045.352.697**	**847.411.642.684**	**935.966.159.344**	**1.033.774.622.995**	**1.141.804.071.098**
	Dikurangi:						
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	**257.296.041.214**	**276.525.899.638**	**297.290.638.957**	**319.725.034.557**	**343.977.144.759**	**370.209.776.142**
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**437.349.074.059**	**586.519.453.059**	**550.121.003.727**	**616.241.124.787**	**689.797.478.236**	**771.594.294.956**

GRAFIK 3.22

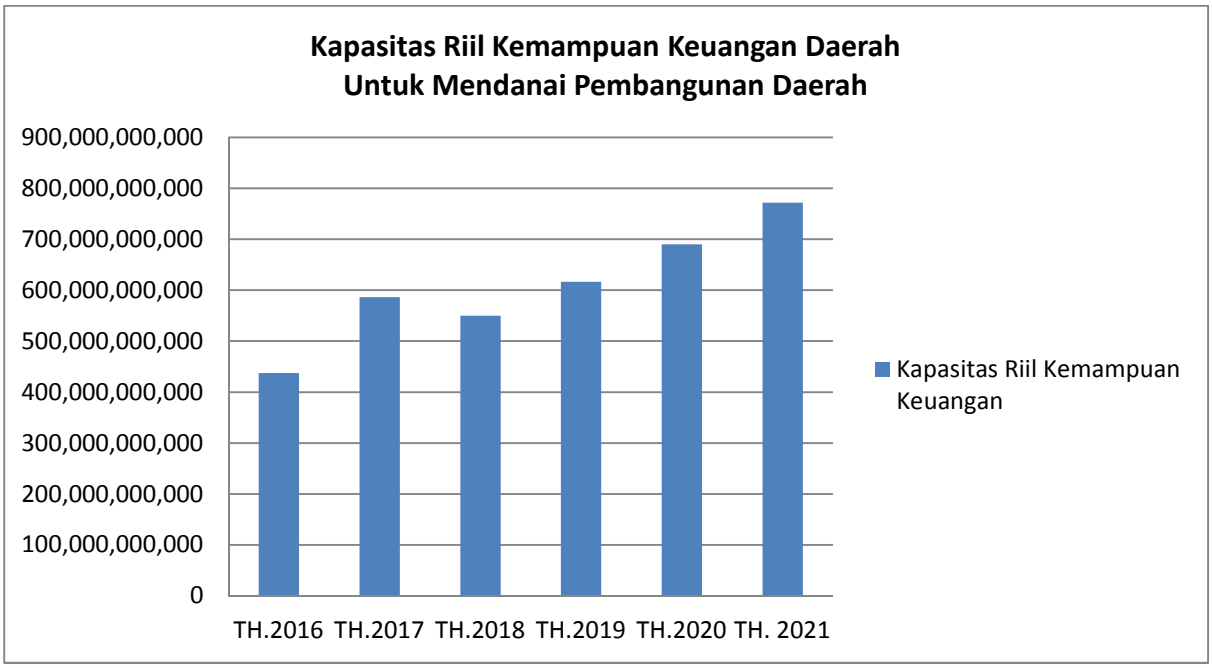

Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan dari **Rp 257,296** milyar di tahun 2016 menjadi sebesar **Rp 370,209** milyar di tahun 2021. Belanja tidak langsung dalam hal ini merupakan bagian yang sangat dominan dalam total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama.

Adapun asumsi dasar yang digunakan dalam rangka melakukan proyeksi terhadap Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah dalam rangka mendanai pembangunan daerah, adalah sebagai berikut;

1. Proyeksi pendapatan daerah harus sesuai dengan Tabel 3.19
2. Sisa lebih perhitungan anggaran diskenariokan 6% setiap tahunnya.
3. Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan hasil dari penjumlahan yang terdapat pada Tabel.3.20

3.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.
Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/ kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya serap yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja

hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Berkaitan dengan hal tesebut Alokasi kerangka pendanaan berdasarkan Prioritas tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.3.23
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi

No	Uraian	Proyeksi					
		Th.2016 (Rp)	Th.2017 (Rp)	Th.2018 (Rp)	Th.2019 (Rp)	Th.2020 (Rp)	Th.2021 (Rp)
I	**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**	437.349.074.059	586.519.453.059	550.121.003.727	616.241.124.787	689.797.478.236	771.594.294.956
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I						
II.a	**Belanja Langsung**	**277.187.318.803**	**320.650.290.391**	**370.928.255.924**	**429.089.806.452**	**496.371.088.103**	**574.202.074.717**
II.b	Pembentukan Dana Cadangan	16.999.500.000	19.265.533.350	21.833.628.945	24.744.051.683	28.042.433.772	31.780.490.193
	Dikurangi:						
II.c	Belanja Langsung Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	6.930.160.088	7.881.013.376	8.965.732.695.	10.203.394.650	11.615.812.515	13.227.930.449
II.d	Pengeluaran Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	16.999.500.000	19.265.533.350	21.833.628.945	24.744.051.683	28.042.433.772	31.780.490.193
II	**Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)**	**270.257.158.719**	**312.769.277.019**	**361.962.523.229**	**418.886.411.802**	**484.755.275.588**	**560.974.144.268**
	Sisa Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	**167.091.915.344**	**273.750.176.040**	**188.158.480.498**	**197.354.712.989**	**205.042.202.648**	**210.620.150.688**
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II						
III.a	**Belanja Tidak Langsung**	**364.406.457.066**	**390.680.162.620**	**418.848.202.344**	**449.047.157.733**	**481.423.457.805**	**516.134.089.112**
	Dikurangi:						
III.b	Belanja Tidak Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	233.366.381.126	249.379.352.912	266.491.277.317	284.777.588.224	304.318.898.472	325.201.355.500
III	**Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)**	**131.040.075.940**	**141.300.809.708**	**152.356.925.027**	**164.269.569.509**	**177.104.559.333**	**190.932.733.612**
	Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III)	**36.051.839.400**	**132.449.366.332**	**35.801.555.471**	**33.085.143.476**	**27.937.643.315**	**19.687.417.078**

GRAFIK 3.23

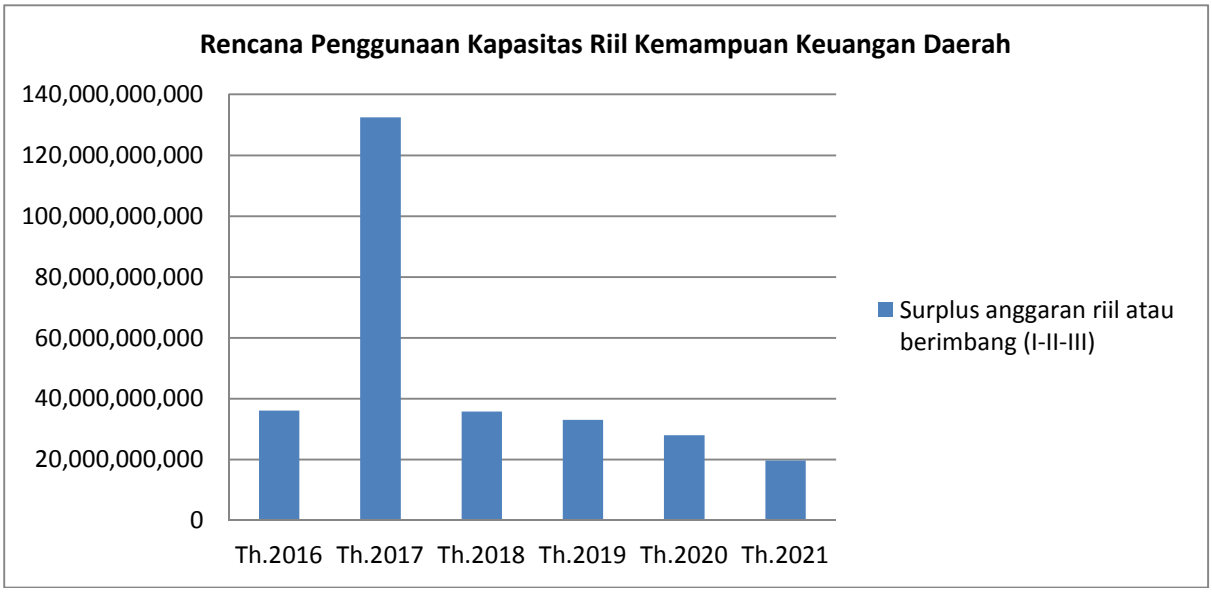

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang diproyeksikan dari tahun 2016 s.d 2021 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel diatas, setelah dikurangi dengan total rencana pengeluaran prioritas I ditambah dengan total rencana pengeluaran prioritas II masih terdapat surplus anggaran riil sebesar Rp.36.051 milyar untuk Ta.2016, Rp.132,449 milyar untuk Ta.2017, Rp.35,801 milyar untuk Ta.2018, Rp.33,085 milyar untuk Ta.2019, Rp.27,937 milyar untuk Ta.2020, dan Rp.19.687 milyar untuk Ta.2021, hal ini menunjukan secara proyeksi untuk lima tahun kedepan Pemerintah Kota Bukittinggi setiap tahunnya mempunyai kemampuan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama.

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Penyusunan sebuah perencanaan tidak dapat dilepaskan dari Analisis isu-isu strategis. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dalam perencanaan pembangunan akan meningkatkan kualitas perencanaan. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah ataupun bagi masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Selain identifikasi akan isu-isu strategis dalam pembangunan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga harus dikedepankan guna mencari alternatif solusi yang tepat yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan adalah karena ditemuinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut terjadi ketimpangan dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Mengatasi ketimpangan yang terjadi tersebutlah disusun perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan pembangunan.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari PERANGKAT DAERAH.

Permasalahan pokok pembangunan daerah Kota Bukittinggi dapat digambarkan sebagai berikut:

4.1.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah;

1. Cakupan masalah yang luas;
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif;
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bukittinggi setiap 5 (lima) tahunan. Untuk dapat melaksanakan amanat RPJPD Kota Bukittinggi dan melihat tingkat capaian pembangunan, khususnya Tahap II periode 2010-2015, maka dalam bagian ini akan diuraikan kinerja pembangunan berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan RPJPD Kota Bukittinggi. Disebutkan dalam RPJPD Kota Bukittinggi bahwa Visi Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2006- 2025 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Adil, Sejahtera dan Terdidik berlandaskan Agama dan Budaya dalam Kota yang Maju dan Berwawasan Lingkungan”. Untuk mencapai Visi jangka panjang tersebut, maka disusun Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradat berdasarkan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(Good Governance);*
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan;
4. Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan

menyenangkan, serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan sumatera;

5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan menyenangkan.

Ukuran keberhasilan pencapaian RPJPD tersebut, dilihat berdasarkan capaian indikator kinerja lima tahun kedua yang telah diimplementasikan dalam RPJMD tahun 2010 – 2015. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Status Capaian Indikator RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025
Tahap II Tahun 2010 – 2015

No	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET TAHUN 2010-2015		
		TARGET	REALISASI 2014	KET
1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Harga Konstan (%)	7,17	6,19%	Belum tercapai
2.	PDRB Harga Konstan (Rp. Milyar)	1.476	4.592	Telah tercapai
3.	Tingkat Inflasi (%)	6,00	9,24	Belum tercapai
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,12	1,82	Belum tercapai
5.	Pendapatan Perkapita Harga Berlaku (Rp. Juta/ $)	39,6 $ 3.960	46,83 $ 3.131	Telah tercapai Belum tercapai
6.	Angka Kematian Bayi (000 kelahiran)	16	4	Telah tercapai
7.	Angka Kurang Gizi (%)	8	0	Telah tercapai
8.	Peringkat HDI/ IPM Nasional	9	11	Belum tercapai
9.	APM usia 19 – 24	40	100	Telah tercapai
10.	Kualitas Pendidikan (berbasis aqidah)	10 nasional		Belum ada data
11.	Pendidikan Internasional (jenjang SLTA)	akreditasi		Perubahan Program Nasional
12.	Rumah Sakit Traumatic Centre	Internasional	Belum ada	Belum tercapai
13.	Pengangguran (%)	9	3,93	Telah tercapai
14.	Kemiskinan (%)	3	4,56	Belum tercapai

Pada RPJPD Kota Bukittinggi yang diturunkan dalam RPJMD Tahun 2010 – 2015 terdapat 14 indikator pembangunan dengan target yang telah ditetapkan. Capaian indikator tersebut berdasarkan data tahun 2014 terdapat 6 (enam) indikator yang sudah tercapai dan 6 (enam) indikator yang belum tercapai serta 2 (dua) indikator yang tidak tersedia data dan perubahan program secara nasional. Indikator yang sudah tercapai merupakan kinerja ekonomi terkait nilai PDRB, PDRB perkapita, serta kinerja pendidikan, kesehatan dan tingkat pengangguran. Capaian tersebut menunjukkan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJP untuk periode

2010 – 2015 telah tercapai dengan baik, bahkan jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Namun untuk PDRB perkapita ketika dikonversikan ke nilai dolar Amerika dengan kurs Rp. 14.000 perdolar, target ini belum tercapai, karena nilai dolar yang mengalami kenaikan cukup tinggi.

Terdapat beberapa target kinerja yang belum tercapai antara lain:

1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 6,19% dari target 7,17% karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional
2. Akibat kenaikan BBM dan pelemahan pertumbuhan sektor rill, sehingga ekonomi Bukittinggi yang didominasi perdagangan dan jasa juga mengalami perlambatan. Namun secara umum pertumbuhan ekonomi Bukittinggi masih di atas rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat.
3. Tingkat Inflasi yang ditargetkan 6% terealisasi 9,24% akibat penyesuaian harga secara nasional akibat kenaikan BBM yang berimbas terhadap kenaikan harga.
4. Pertumbuhan penduduk ditargetkan 1,12% dan terealisasi 1,82% yang lebih didominasi urban ke Bukittinggi dan masih belum maksimalnya program KB, sementara dari komposisi penduduk juga masih relatif banyak usia pasangan subur.
5. Peringkat IPM yang ditargetkan 9 besar nasional belum bisa dicapai karena perubahan formulasi penghitungan IPM secara nasional yang lebih menguntungkan kota-kota besar dan ibukota provinsi, sehingga menggeser posisi Bukittinggi ke nomor 2 di Sumatera Barat, sementara pada tahun 2013 posisi Bukititinggi sudah pernah mencapai 10 besar nasional.
6. Tingkat kemiskinan yang ditargetkan 3% terealisir 4,56% akibat belum maksimalnya program penanggulangan kemiskinan, dan jangkauan intervensi penduduk miskin juga belum menyentuh urban yang belum termuat dalam database kemiskinan Bukittinggi.
7. Rumah Sakit Traumatic di tahun 2015 ditargetkan sudah tersedia di Bukittinggi, namun ini belum dapat diwujudkan secara penuh karena Bukittinggi belum memiliki rumah sakit daerah yang dapat difungsikan untuk hal tersebut, sementara upaya yang telah dilakukan melalui pendekatan kepada rumah sakit yang ada. Pada saat ini rumah sakit yang sudah mengarah kepada hal tersebut adalah Rumah Sakit Sentra Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi yang dimiliki oleh pemerintah.

Disamping target yang telah tercapai tersebut, terdapat 2 (dua) indikator yang tidak tersedia data pendukungnya, yaitu kualitas pendidikan berbasis aqidah 10 besar nasional karena tidak ada penilaian secara nasional, walaupun dalam hal

ini Bukittinggi telah melaksanakannya pada seluruh jenjang pendidikan. Kemudian juga terjadi perubahan kebijakan nasional dengan uji material ketentuan sekolah internasional yang dibatalkan pemerintah pada tahun 2012. Hal ini menyebabkan sekolah internsional yang sudah dijalankan sebelumnya tidak dilaksanakan lagi, dan Bukittinggi mengalihkannya menjadi sekolah unggul pada seluruh jenjang pendidikan.

4.1.2. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok (RPJPD) dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

4.1.2.1. Aspek Pemerintahan

Proses pembangunan akan berjalan dengan baik tentunya dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang ini yang masih dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya adalah belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip di atas. Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, diantaranya adalah:

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kelembagaan Pemerintah Daerah merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah, selain elemen urusan pemerintahan dan kapasitas aparatur pemerintah daerah itu sendiri. Pengaturan terhadap kelembagaan atau sering disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi sekarang ini adalah belum maksimalnya Struktur Organisasi Tata Kerja dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangan pemerintah daerah. Pembentukan SOTK Kota Bukittinggi belum efektif dan efisien karena belum mampu menyentuh seluruh aspek pelayanan masyarakat. Selain itu, berkaitan dengan kelembagaan pemerintah daerah penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum optimal.

Ditetapkannya UU NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menuntut perubahan regulasi turunannya berupa peraturan perundang-undangan. Hal ini membawa konsekwensi perubahan struktur kelembagaan, perubahan urusan yang diselenggarakan dan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan Standar Pelayanan Minimal yang hanya difokuskan untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di Bukittinggi juga akan mengikuti ditetapkannya regulasi tersebut.

b. Sumber Daya Aparatur

Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terlaksana optimal dikarenakan masih terbatasnya kompetensi aparatur dalam memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu manajemen kepegawaian dalam hal penempatan aparatur belum merujuk sepenuhnya kepada kompetensi yang dimiliki oleh aparatur itu sendiri. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang membawa implikasi perubahan paradigma kepegawaian. Namun Peraturan Pemerintah sebagai regulasi turunannya belum ditetapkan sesuai tuntutan UU tersebut untuk dapat menyempurnakan sistem kepegawaian secara nasional dan di Bukittinggi.

c. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh dukungan sarana dan parasarana pemerintahan. .Kondisi terakhir pusat pemerintahan berupa gedung Balaikota, dan sekretariat daerah berada di Bukit Gulai Bancah Kelurahan Gulai Bancah.

Permasalahan pemenuhan gedung kantor untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi pemerintahan daerah Kota Bukittinggi antara lain; gedung kantor yang masih bergabung dengan kantor lain, menumpang atau memanfaatkan gedung lain yang masih menjadi aset ataupun bukan aset pemerintah kota, luasan gedung yang belum maksimal menampung personil kantor, gedung satu kantor yang terpisah relatif jauh, dan lain sebagainya. Misalnya Kantor DPRD yang memanfaatkan gedung nasional, posisinya yang tidak mendukung ketika terjadi rapat pleno atau paripurna yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, serta keterbatasan ruang sidang, dan alat kelengkapan DPRD. Kondisi ini sangat mendesak untuk dilakukan pembangunan gedung baru yang representatif sehingga perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis dan mendukung tugas-tugas DPRD selaku penyelenggara pemerintahan. Beberapa PERANGKAT DAERAH juga masih menggunakan gedung bersama dan

menggunakan gedung lain seperti BKD, PMPKN, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor PP dan KB, Kantor Ketahanan pangan dan beberapa Kantor Lurah

Dukungan sarana dan prasarana lainnya berupa mobiler, peralatan gedung kantor dan peralatan kerja juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektifitas kerja, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik. Sejalan dengan itu, mewujudkan e-government merupakan komitment yang terus ditingkatkan untuk mendukung kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemenuhannya diupayakan dengan peningkatan sarana dan prasarana berupa hardware dan software serta peningkatan sumber daya manusia berupa brain ware.

Mewujudkan Bukittinggi smart city seiring dengan pembangunan kota dan potensi Bukittinggi sebagai kota kunjungan, pariwisata dan jasa juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk layanan publik. Kondisi saat ini Bukittinggi belum memiliki dukungan yang memadai untuk pengembangan jaringan, aplikasi dan sumber daya manusia untuk memenuhinya. Sementara itu kondisi dan potensi Bukittinggi sangat mendukung. Karena itu permasalahan ini akan menjadi prioritas tersendiri untuk diwujudkan lima tahun kedepan.

d. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah akan secara penuh menggunakan Sistem Akuntasi Pemerintah, yang telah dimulai pada tahun 2014. Pada tahun 2015 pelaporan keuangan daerah sudah secara penuh menggunakan acrual base yang menuntut kesiapan personil, sistem dan penyajian laporan sesuai ketentuan tersebut. Pada tahun 2014 dan 2015 Pemerintah Kota Bukittinggi berturut-turut telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 dan 2014. Dengan acrual base sebagai wujud implementasi penuh SAP, maka menjadi tantangan besar tidak saja bagi PERANGKAT DAERAH PPKD, tetapi juga seluruh PERANGKAT DAERAH.

Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara bertahap telah mulai diurai dan diselesaikan sampai tahun 2015. Namun permasalahan ini karena bersifat mendasar belum bisa dituntaskan, karena tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi saja, tetapi terkait dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.

4.1.2.2. Bidang Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu Negara ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dihasilkan antara lain juga melewati pendidikan yang berkualitas. Kinerja pendidikan Kota Bukittinggi pada masa lalu relatif sudah baik, namun tantangan kedepan juga tidak ringan. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa kewenangan kabupaten dan kota yang diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk urusan pendidikan pemerintah kabupaten kota tidak lagi berwenang dalam mengelola Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, karena harus diserahkan ke pemerintah provinsi, efektif tahun 2017. Selama ini penyelenggaraan pendidikan SLTA termasuk unggulan Bukittinggi yang telah mengukir berbagai prestasi dan memperoleh berbagai penghargaan.

Selain itu, persoalan pendidikan juga akan berdampak terhadap penyelesaian aset dan sumber daya kependidikan yang perlu ditata sedemikian rupa. Beberapa program unggulan Kota Bukittinggi seperti pendidikan berbasis aqidah juga belum maksimal sehingga belum mampu menjadi icon kota sebagaimana yang diharapkan. Terwujudnya masyarakat cerdas yang dibarengi dengan kematangan emosi yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat minangkabau juga belum dapat diukur pencapaiannya karena belum tersedia indikatornya. Permasalahan ini timbul karena belum meratanya akses dan kualitas pendidikan tersebut bagi seluruh masyarakat. Selain itu tingkat kompetensi tenaga pendidik juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan saat ini. Berikut yang tidak kalah pentingnya mempengaruhi kualitas pendidikan adalah manajemen pengelolaan lembaga pendidikan yang belum terkelola dengan baik.

4.1.2.3. Bidang Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Pemerataan akses pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yaitu Indonesia Sehat. Semenjak tahun 2014 Pemerintah telah meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi Program BPJS kesehatan. Kehadiran program ini mewajibkan seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan baik yang dibiayai pemerintah ataupun secara mandiri. Sampai saat ini lingkup kepesertaan di Bukittinggi relatif sudah baik mencapai 81 % dari target nasional 100% pada tahun 2019.

Terkait itu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah persyaratan layanan kesehatan yang berjenjang utuk tingkat rujukan, sehingga dibutuhkan rumah sakit daerah. Semenjak tahun 2013 sudah dialokasikan dana cadangan untuk pembangunan rumah sakit yang hingga akhir tahun 2015 akan tersedia sebesar Rp. 72 Milyar. Pembangunan Rumah sakit ini akan dilaksanakan tahun 2016 konstruksinya, namun Pemerintah Kota Bukittinggi juga membutuhkan bea operasional dan pengembangan berikutnya sehingga menjadi rumah sakit rujukan yang berkualitas.

Kondisi Bukittinggi yang berada di persimpangan dan sebagai kota tujuan wisata juga menyebabkan Bukittinggi rentan tertular penyakit, begitu juga dengan daerah sekitar Bukittinggi. Karena itu Bukittinggi membutuhkan penanganan penyakit yang relatif ekstra dan diakses secara cepat. Unit layanan kesehatan yang ada di Bukittinggi relatif dekat, bahkan mudah diakses tidak hanya oleh masyarakat Bukittinggi, tetapi juga luar kota. Namun ini juga merupakan tantangan tersendiri, sehingga kebijakan Bukittinggi terutama untuk layanan kesehatan juga perlu mempertimbangkan penduduk kota dan bukan penduduk kota, sehingga alokasi anggaran kesehatan dapat dimaksimalkan untuk warga kota. Walaupun pada prinsipnya persoalan bukan hanya masalah daerah dalam batas administratif saja, karena akan mencakup wilayah yang berdekatan.

Permasalahan lain yang harus disikapi belum terwujudnya masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat berdasarkan indikator indonesia sehat, peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta ketersediaan seluruh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selain itu fokus terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang layak kepada masyarakat penciptaan lingkungan hidup yang sehat juga menjadi perhatian untuk ditingkatkan.

4.1.2.4. Bidang Lingkungan Hidup

Proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini mendorong gagasan pembangunan yang berbasiskan lingkungan dan menjadi perhatian hingga internasional. Karena itu pembangunan berwawasan lingkungan menjadi sangat penting agar daya dukung alam dapat dipertahankan dalam tajuk pembangunan ramah lingkungan.

Secara umum kondisi lingkungan masih tergolong baik, terutama kualitas udara. Namun kualitas air dan tanah menjadi perhatian serius, terutama dengan

konversi lahan pertanian menjadi bangunan dan gedung, serta pemanfaatan irigasi sebagai drainase. Sementara itu fungsi-fungsi drainase juga tidak berjalan baik, sehingga menimbulkan genangan air disamping luapan air dari luar kota. Permasalahan lingkungan hidup juga terkait kualitas sanitasi. Target pemerintah tahun 2019, kualitas sanitasi sudah 100% baik, dimana kualitas sanitasi sudah memenuhi standar nasional. Persoalan ini terkait erat dengan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup dengan berprilaku hidup bersih dan sehat.

Beberapa persoalan yang perlu diuraikan lebih mendalam atara lain adalah seperti berikut ini:

a. Persampahan

Tingginya tingkat aktifitas masyarakat di Kota Bukittinggi berimplikasi juga pada tingginya volume sampah yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah Kota. Hal ini juga ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah ataupun dalam pengelolaan pemanfaatan sampah hingga berdaya guna. Prilaku membuang sampah sembarangan tidak hanya bagi penduduk kota, tetapi juga para pengunjung, masyarakat yang tinggal diperbatasan serta dari aktifitas perdagangan.

Beroperasinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Payakumbuh cukup membantu penyelesaian masalah persampahan untuk sementara, namun tidak dalam jangka panjang, hal ini disebabkan karena keterbatasan daya tampung dan daya dukungnya dari TPA tersebut. Untuk itu pemerintah kota perlu memikirkan TPA regional baru karena pembangunan TPA di dalam Kota Bukittinggi tidak memungkinkan yang disebabkan oleh keterbatasan lahan yang ada. Disamping itu, program 3 R (reduce, reuse and recycle) belum berjalan efektif, sehingga perlu lebih ditingkatkan dengan cara pengelolaan sampah berbasis masyarakPermasalahan sampah juga erat hubungannya dengan permasalahan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Seiring dengan perkembangan dan pembangunan yang sangat pesat di Kota Bukittinggi, maka permasalahan limbah pun menjadi sorotan yang perlu mendapat penanganan yang serius oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Untuk mengatasi permasalahan sampah dan limbah ini perlu adanya kerjasama dengan daerah tetangga, yaitu Kabupaten Agam. Dengan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan

b. Air bersih

Ketersediaan air bersih guna melayani kebutuhan masyarakat merupakan salah satu penunjang dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

Kondisi eksisting prasarana air minum di Kota Bukittinggi saat ini dilayani oleh PDAM Tirta Jam Gadang. Sumber Air baku PDAM berasal dari Mata Air Sungai Tanang, Mata Air Cingkaring, Sumur Bor Tabek Gadang, Sumur Bor Birugo, Sumur Bor Palolok, Sumur Dangkal Kubang Putih.

Secara umum, distribusi air minum di Kota Bukittinggi menggunakan sistem gravitasi, namun setiap sumber air memiliki cara pendistribusian masing-masing hingga sampai ke daerah pelayanan. Hingga saat ini wilayah pelayanan air minum hampir memenuhi keseluruhan wilayah perencanaan walaupun terdapat beberapa kelurahan yang berlum terlayani pelayanan air minum oleh PDAM. Guna mendukung pendistribusian air, saat ini telah dibangun beberapa reservoar dengan total kapasitas sebesar 3.180 m^3. Namun karena keterbatasan produksi maka tidak semua reservoar tersebut berfungsi. Permasalahan penting lain juga terkait jaringan perpipaan di Bukittinggi yang sudah tua, sehingga efisiensinya masih rendah, dan tingkat kebocoran cukup tinggi.

Selain mencari sumber air baku baru dari luar kota, Bukittinggi juga sudah harus melakukan rahabilitasi jaringan perpipaan, terutama transmisi induk dari sumber air baku di Sungai Tanang hingga batas kota. Sementara jaringan dalam kota sudah dilakukan rehabilitasinya semenjak tahun 2011 pada beberapa titik. Dengan demikian peta jaringan menjadi hal penting untuk melihat kondisi perpipaan PDAM di Bukittinggi.

c. Sanitasi Kota

Kondisi sanitasi Kota Bukittinggi belum didukung sarana dan prasarana yang memadai. Penanganan sanitasi perkotaan mestinya sudah mengarah untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang komunal dan terpusat. Permasalahan yang dihadapi oleh Bukittinggi adalah keterbatasan lahan untuk pembangunannya. Sampai saat ini di Bukittinggi belum ada IPAL komunal ataupun IPLT. Persoalan ini tentu akan sangat mengurangi daya dukung lingkungan kota. Pada tahap berikutnya ini akan menjadi persoalan lingkungan, munculnya kawasan kumuh dan persoalan lingkungan lainnya.

Sementara itu penanganan persoalan sanitasi telah menjadi target nasional untuk dituntaskan maksimal di tahun 2019. Dengan demikian penyelesaian masalah drainase di Bukittinggi perlu menjadi prioritas untuk ditangani untuk pencapaian unerversal acsess.

d. Genangan Air

Permasalahan genangan air sewaktu hari hujan menjadi sangat krusial dialami Bukittinggi. Permasalahan ini disebabkan oleh kondisi drainase kota yang belum mampu menampung luapan air sewaktu hujan karena endapan sedimen, dimensi dan jaringan yang tidak memadai. Persoalan lain juga diakibatkan oleh volume air hujan akibat luapan dari wilayah luar kota.

Penyelesaian persoalan ini perlu dukungan manajemen drainase terkait dengan penataan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier beserta dukungan dimensinya. Yang paling mendesak dilakukan dalam waktu dekat adalah pengerukan sedimen untuk mendukung kelancaran aliran air. Sementara penyelesaian luapan air pada musim hujan dari luar kota perlu dilakuakan pembenahan drainase luar kota dan pengalihan aliran drainase hingga ke drainase primer. Persoalan terkait lainnya yang perlu diseriuskan adalah pengawasan dan edukasi pada masyarakat kota, luar kota dan pengunjung untuk tidak membuang sampah ke dalam drainase.

4.1.2.5. Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)

Kota Bukittinggi sudah lama dikenal sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang memberikan kontribusi yang positif dalam pertumbuhan ekonomi Kota. Hanya saja pertumbuhan ekonomi tersebut masih menyisakan permasalahan mengenai belum terwujudnya ketangguhan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan potensi unggulan daerah.

Aktivitas ekonomi Bukittinggi didukung oleh KUKM dan peranannya terlihat dari struktur PDRB Kota Bukittinggi. KUMKM di Bukittinggi terus berkembang dan terbuka, sehingga menjadi magnitude untuk berusaha bagi urban. Implikasinya pengangguran kota terus berkembang sehingga mampu menyerap angkatan kerja. Selain itu KUKM juga dinilai tahan dalam menghadapi goncangan perekonomian, karena dianggap tidak berhubungan langsung dengan bank dan lebih banyak menggunakan input lokal.

Permasalahan yang dihadapi KUKM di Kota Bukittinggi pada dasarnya sama dengan permasalahan umum yang dihadapi, yakni permasalahan peningkatan kualitas produk, packaging, manajemen usaha pelaku UMKM dan pola pemasaran. Penggunaan teknologi produksi masih terbatas karena spesifik masing-masing

produk dan bahkan pelaku usaha. Pengembangannya membutuhkan intervensi pemerintah, berikut fasilitasi dan motivasi untuk memanfaatkannya.

Permasalahan modal usaha dalam kaitannya dengan kredit perbankan juga masih menjadi permasalahan yang dihadapi. Selain itu masalah yang masih mendasar dari KUKM ini adalah manajemen dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan itu semua akhirnya bermuara pada kurang kompetitifnya produk lokal baik skala nasional maupun internasional.

4.1.2.6. Sarana Pendukung Perekonomian

Sarana pendukung pengembangan perekonomian tentunya tidak bisa dilepaskan dari sistem transportasi meliputi jalan raya, alat transportasi terminal dan manajemen lalulintas. Kota Bukittinggi belum memiliki terminal angkutan barang, sementara kondisi terminal angkutan orang juga semakin berkurang karena peluasan pertokoan. Kondisi ketiadaan terminal angkutan barang dan berkurangnya fungsi terminal angkutan penumpang berdampak kepada aktivitas perekonomian kota. Karena itu keberadaan terminal angkutan barang dan terminal angkutan penumpang yang representatif sangat mendesak. Lahirnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kewenangan terminal type A dan B dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi efektif semenjak tahun 2017. Hal ini perlu disikapi dengan baik, sehingga betul-betul mampu mendorong perekonomian kota dengan dukungan sarana dan prasarana yang representatif.

Sejalan dengan persoalan terminal, kebutuhan akan sarana perparkiran juga sangat mendesak untuk mendukung fungsi kota. Keberadaan gedung parkir yang ada sekarang belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah perparkiran. Operasional gedung parkir yang ada juga belum maksimal, sementara perparkiran liar yang menggunakan badan jalan juga menjadi persoalan yang masih sulita diatasi, terutama pada puncak keramaian kunjungan ke Bukittinggi. Prasarana penting mendukung perekonomian kota juga terkait dengan pengembangan pasar yang ada. Kebutuhan pasar yang representatif menjadi sangat penting sehingga mampu mendukung pertumbuhan pedagang, meningkatkan layanan terhadap konsumen dengan ketersediaan areal perparkiran, baik untuk pedagang ataupun pembeli.

Pada saat ini perkembangan pedagang belum terkendali, sehingga menggunakan badan jalan, areal perparkiran, sementara pertokoan Banto Trade Centre belum dapat difungsikan. Kondisi ini semakin membuat wajah kota

menjadi semraut dan berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi perkotaan. Rencana revitalisasi ketiga pasar menjadi mendesak untuk direalisir dengan pembangunan secara vertikal, dan menyediakan areal perparkiran, serta penyediaan pertokoan dan areal perdagangan sesuai kebutuhan dan prilaku pedangan ataupun pembeli.

Mendukung keberadaan Bukittinggi sebagai kota wisata juga dibutuhkan outlet dan shoping centre kerajinan produk UMKM. Hal ini perlu diintegrasikan dengan pengembangan objek wisata, sehingga perdagangan souvenir dan berbagai produk industri lainnya lebih terkendali dan memberikan kesan nyaman dan aman bagi pengunjung. Begitu juga dengan pusat kuliner yang membutuhkan pengelolaan profesional sehingga memberikan kenangan yang baik bagi setiap pengunjung. Pengembangan kawasan pedestrian di sekitar Jam Gadang juga merupakan salah satu solusi penting yang sudah pernah diwacanakan. Bahkan keberadaan pedestrian saat ini juga perlu ditingkatkan lagi, sehingga tidak memberi image negatif bagi penduduk dan pengunjung. Karena itu konsep pedestrian perlu dilakukan secara terpadu dan perencanaan yang matang, melibatkan seluruh stakeholders sehingga didukung secara bersama. Berbagai keterbatasan yang ada di pusat kota ini juga perlu dicarikan solusinya, sehingga tidak menimbulkan masalah baru yang menjadi penghambat mewujudkan Bukittinggi sebagai pedestrian city.

4.2 Isu Strategis

Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi Kota Bukittinggi;

2. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi Kota Bukittinggi;
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri atas:
   a. RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
   b. Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana, dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang;
   c. Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

Isu strategis yang patut diangkat dalam RPJMD ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini:

Kriteria-1: Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;

Kriteria-2: Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;

Kriteria-3: Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;

Kriteria-4: Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah

Kriteria-5: Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan

Kriteria-6: Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1 Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Bidang Pemerintahan

Tatanan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance* mensyaratkan budaya organisasi yang memiliki kemampuan adaptasi dan penyesuaian terhadap berbagai perubahan paradigma maupun regulasi. Pemerintah daerah sebagai regulator, harus mampu menciptakan iklim sosial yang aman, nyaman dan tertib serta iklim ekonomi yang kondusif. Dalam fungsi sebagai fasilitator, pemerintah daerah di masa depan harus mampu menyusun kerangka regulasi yang dapat mewadahi tumbuh berkembangnya budaya partisipasi baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri.

Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik juga dihadapkan pada permasalahan mengenai kualitas SDM aparatur. Oleh sebab itu tantangan strategis di masa depan adalah bagaimana pembangunan aparatur pemerintah mampu menghasilkan ketersediaan SDM aparatur yang secara kuantitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan secara kualitas memiliki kompetensi dan moralitas. Tantangan pemerintahan juga dihadapkan pada tuntutan pelayanan prima yang cepat, tanggap dan murah.

Beberapa tahun terakhir pemerintah telah menerapkan kebijakan moratorium pegawai, sehingga terjadi pengurangan jumlah pegawai dari

sebelumnya. Semenara itu tuntutan pelayanan dan kinerja pegawai semakin meningkat, seiring diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana pemerintah sebagai fasilitator, motivator dan inovator semakin dituntut perannya. Begitu juga dengan perkembangan regulasi yang menjadi kerangka daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur yang kapabel, inovatif, berkinerja dan profesional. Oleh sebab itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer dengan berbagi aplikasi online yang terus berkembang mutlak dibutuhkan.

Kelembagaan daerah sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 06 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menisyaratkan struktur ramping dan kaya fungsi. Jabatan struktural semakin berkurang, sementara jabatan fungsional semakin dikembangkan untuk mendorong tersedianya aparatur yang terampil, inovatif dan produktif. Daerah juga perlu mempersiapakan diri dengan pemetaan potensi aparatur yang ada saat ini dan menempatkannya sesuai potensi, bakat dan minat serta kharakternya. Sementara kelembagaan akan diatur secara nasional melalui peraturan pemerintah yang akan ditetapkan sebagai turunan dari kedua UU tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan azas-azas pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan Sistem Akuntasi Pemerintah secara penuh mulai tahun 2015 dengan penerapan pengelolaan keuangan berbasis acrual juga memaksa daerah untuk menyiapkan seluruh prasayarat yang telah dimulai regulasi tingkat daerahnya pada tahun 2014. Karena itu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diterima Kota Bukittinggi secara berturrut-turut terhadap LKPD Tahun 2013, 2014 dan 2015 harus ditingkatkan kualitasnya, apalagi pada tahun 2015 LKPD yang diaudit sudah berbasis acrual. Permasalahan aset adalah fokus yang terus diseriuskan, sehingga tidak menjadi ganjalan dalam menyusun neraca pada sistem akuntansi pemerintah.

b. Bidang Pendidikan

Upaya pembangunan pendidikan di Kota Bukittinggi tidak terlepas dari 3 (tiga) Pilar pendidikan yang terdiri dari aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta aspek tata kelola, dan akuntabilitas.

Pada aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, yang menjadi isu utama adalah peningkatan kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang masih menjadi kewenangan kota, dengan penuntasan pencapaian target

Standar Nasional Pendidikan terhadap 8 standar. Sementara pendidikan tingkat SLTA yang dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi juga menjadi isu tersenidiri terkait kualitas yang telah dicapai selama ini dan menjadi daya tarik mendapatkan layanan pendidikan di Bukittinggi.

Isu tersebut akan berimplikasi pada tantangan pemenuhan target SNP secara merata pada seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Sementara untuk menjamin kualitas dan mutu pendidikan tingkat SLTA selama ini perlu disikapi model pengembangan pendidikan tingkat provinsi yang akan diarahkan dengan pendidikan pola boarding school, sementara Bukittinggi memiliki keterbatasan lahan untuk membangun unit sekolah baru, dan lahan sekolah yang ada sekarang juga akan terbatas pengembangannya.

Adapun dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, yang menjadi isu utama adalah pengembangan dan pengelolaan sekolah serta peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Peningkatan kualifikasi guru menjadi prasyarat bagi proses sertifikasi guru dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Untuk aspek tata kelola dan akuntabilitas, difokuskan pada upaya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi pendidikan.

Penerapan MBS dan PBM merupakan media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan proses pendidikan. Adapun standarisasi pelayanan pendidikan melalui pemenuhan target SNP merupakan syarat bagi terlaksananya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Sedangkan penyediaan data dan informasi pendidikan yang akuntabel dan bersifat kekinian menjadi kebutuhan dasar bagi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan pendidikan.

Kualitas pendidikan di Bukittinggi selama ini juga sejalan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi yang hingga tahun 2013 selalu yang tertinggi di Sumatera Barat bahkan termasuk 10 besar nasional. Namun semenjak tahun 2014, pemerintah melalui BPS melakukan perubahan formulasi penghitungan IPM, sehingga Bukittinggi berada di posisi kedua setelah Kota Padang. Ini merupakan isu strategis yang perlu disikapi, dimana variable yang selama ini terkait dengan pendidikan berupa usia harapan sekolah cenderung lebih menguntung kota-kota besar dan ibukota provinsi, yang lebih banyak memiliki perguruan tinggi.

Tantangan pendidikan juga semakin sulit seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Begitu juga dengan pemberlakuan pasar bebas ASEAN yang menghadapkan SDM antar negara ASEAN dalam persaingan terbuka. Disamping tuntutan kualitas kinerja dan profesionalitasnya, karakter juga menjadi tantangan yang perlu diseriuskan, akibat dampak negatif budaya

asing. Kecenderungan yang ditunjukkan dalam praktek kehidupan masyarakat, dampak negatif lebih berpengaruh ketimbang dampak positifnya. Dampak negatif tersebut berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan, diantaranya penerapan nilai-nilai agama dan adat yang cenderung menurun dan terdegradasi akibat pengaruh asing. Disamping itu upaya preventif dengan memperkuat budaya Minangkabau dengan filosofi Adat Basyandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah belum maksimal dilakukan, baik melalui dunia pendidikan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan karakter berbasis aqidah yang telah diprogramkan semenjak awal RPJPD Kota Bukittinggi juga masih perlu ditingkatkan dan diperjelas konsep penerapannya. Begitu juga dengan penguatan kecerdasan secara berimbang antara kekuatan intelegensi, emosional dan spiritual yang sudah mulai diterapkan.

c. Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi angka kematian bayi dan ibu melahirkan melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Isu utama bidang kesehatan sekarang ini adalah meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan baik dari keberadaan sarana pelayanan kesehatan maupun dari aspek biaya. Kemudian peningkatan kualitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan adalah hal mutlak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekarang ini.

Posisi Bukittinggi yang berada di persimpangan dan menjadi kota tujuan sangat rentan terhadap penyakit menular dan peredaran Narkoba yang secara bersamaan berakibat pada peningkatan penderita HIV/AIDS. Pendekatan penanggulangan HIV/AIDS yang selama ini lebih berorientasi medis perlu diperkuat dengan pendekatan agama, adat dan budaya. Pendekatan medis semata ternyata mengakibatkan permasalahan baru yang semakin memperparah persoalan kesehatan sebagai akibat perluasan dan turunannya.

Isu kesehatan juga terkait erat dengan lingkungan hidup, dan target nasional yang telah diluncurkan pemerintah, yaitu 100% pemenuhan air bersih, 0 kawasan kumuh dan 100% sanitasi yang layak. Pemenuhan air bersih yang menjadi isu adalah tingginya tingkat kebocoran perpipaan karena sudah berusia tua, terutama transmisi induk dari sumber air baku di Sungai Tanang. Terbatasnya sumber air baku juga menjadi isu penting, sementara kebutuhan air bersih terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan kunjungan ke Bukittinggi.

Kawasan kumuh Bukittinggi saat ini tercatat seluas 1 (satu) hektar yang terdapat di Kelurahan Aua Tajungkang Tangah Sawah dan Kelurahan Pakan Kurai. Tahun 2019 kawasan ini diharapkan sudah dituntaskan dan juga diantisipasi munculnya kawasan baru. Penanganan masalah ini harus berangkat dari persoalannya karena keterbatasan daya dukung lahan, peningkatan jumlah penduduk dan perilaku masyarakat yang belum mendukung.

Peningkatan sanitasi yang menjadi isu penting adalah masalah persampahan dan limbah. Penanganan persampahan harus dimulai dari sumbernya dan masyarakat yang berorientasi pada 3 R. Pembuangan sampah yang selama ini dilakukan ke TPA Regional Payakumbuh akan memiliki batas dan jangka waktu, karena pengelolaan di TPA tersebut juga belum dilaksanakan. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang sudah dibangun di 2 (dua) lokasi, yaitu Kelurahan Aua Kuniang dan Kelurahan Campago Ipuah belum dioperasionalkan sebagaimana mestinya, sehingga belum berdampak terhadap pengelolaan persampahan. Sementara air limbah di Bukittinggi belum terkelola karena belum ada IPLT dan IPAL, baik yang terpusat maupun komunal. IPAL Belakang Balok juga belum dapat dioperasikan karena belum dapat dituntaskan infrastruktur pendukungnya berupa perpipaan induk yang penempatannya perlu dikaji mendalam pada jalan yang ada. Setelah itu baru dapat dilakukan penyambungan rumah yang membutuhkan sosialisasi intensif kepada masyarakat. Hal penting lainnya juga berupa kelembagaan dan operasionalisasinya karena berbasis masyarakat, sehingga juga harus didukung oleh regulasi.

d. Bidang Ekonomi

Terbukanya pintu perdagangan bebas dunia menyebabkan lancarnya keluar masuk produk antar negara. Pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya pada produk industri barang, tetapi juga jasa, tenaga kerja dan modal. Setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk memasarkan produknya ke sesama negara ASEAN. Apabila kondisi ini tidak dipersiapkan dengan baik, maka produk asing akan membajiri pasar dalam negeri. Sebaliknya produk kita akan masuk ke berbagai negara ASEAN, siap untuk bersaing baik dari sisi kualitas maupun harga, karena tidak dikenakan lagi tarif bea masuk antar negara. Dampaknya, industri akan bertumbuh, termasuk UMKM, terbukanya lapangan kerja, dan akhirnya meningkatkan kemampuan dan daya beli masyarakat sebagai wujud kesejahteraan.

Terkait ini, isu strategis yang dihadapi UMKM kita untuk merebut peluang pasar terkait dengan standardisasi produk. Sebagian besar produk UMKM kita

belum dilakukan standardisasi nasional ataupun internasional. Dengan demikian berbagai produk yang dihasilkan belum semuanya dapat dikatakan memenuhi standar. Walaupun pemerintah kota Bukittinggi telah memulai memfasilitasi beberapa produk untuk memperoleh sertifikat halal, namun belum diikuti produk lainnya, karena pembiyaan yang masih dianggap relatif mahal. Begitu juga perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) dari berbagai produk asli daerah sehingga tidak diklaim sebagai produk asing.

Dari sisi tenaga kerja, sebagian besar SDM kita belum menguasai bahasa asing, apalagi bahasa negara-negara ASEAN. Kondisi ini belum mendukung tenaga kerja kita masuk ke pasar asing, disamping penguasaan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan. Begitu pula dengan lembaga pendidikan kita yang belum sepenuhnya berorientasi kesana.

Sebelum berorientasi luar negeri, sebenarnya kita memiliki pasar dalam negeri yang sangat besar. Namun ada kecendrungan pasar lokal kita mulai dirambah berbagai produk asing, khususnya China, sehingga hampir seluruh produk yang beredar di pasar dalam negeri adalah *made in China*. Realita ini sudah berlangsung jauh sebelum berlakunya MEA. Pemberlakuan MEA secara efektif tahun 2016, tentu akan meningkatkan masuknya produk China sehingga semakin membanjiri pasar dalam negeri yang mungkin saja masuk melalui salah satu negara ASEAN. Karena itu meningkatkan daya saing produk industri lokal menjadi prioritas untuk dituntaskan.

Terkait peningkatan penguasaan pasar lokal dan dalam negeri, maka ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor pendukung industri. Beberapa isu strategis terkait ini antara lain belum efektifnya kelembagaan yang mampu mengayomi pelaku industri untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produknya dari sisi teknologi produksi, pasca produksi, permodalan dan pemasaran. Pembentukan kelompok dan kluster relatif sulit karena lokasi yang menyebar sehingga pelaku usaha cenderung bergerak sendiri dan terkesan bersaing dengan pelaku lainnya yang memiliki produk sama. Pemasaran produk juga belum didukung ketersediaan outlet dan shoping centre yang dikelola secara profesional, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Berbagai praktek individual para pelaku menyebabkan produk lokal tidak bersaing, sehingga produk dalam negeri dari luar kota juga membanjiri pasar kota. Kondisi ini juga menimbulkan image negatif akibat kemacetan dalam kota, pasar yang belum representatif, permasalahan terminal, kesulitan parkir dan perilaku pedagang.

Kepariwisataan Bukittinggi juga relatif masih terkonsentrasi di sekitar Jam Gadang. Hal ini menyebabkan tingkat kemacetan di wilayah tersebut, sementara dukungan perparkiran belum memadai. Pengembangan objek wisata di luar konsentrasi Jam Gadang merupakan solusi yang perlu

disegerakan. Kebijakan ini akan membantu mengurai kemacetan, dan menggeliatkan ekonomi di wilayah pengembangan.

Keberhasilan pembangunan salah satunya juga diukur melalui tingkat kemiskinan. Pengentasan kemiskinan masih menjadi isu strategis, dimana capaian terhadap target kemiskinan sesuai RPJPD yang sudah dituangkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2015 belum tercapai. Dari 3% yang ditargetkan, pada tahun 2015 berdasarkan data eksisting tahun 2014, tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi baru mencapai 4,56%. Dengan demikian, isu kemiskinan masih perlu dimunculkan melalui intervensi program yang lebih tepat sesuai profil kemisikinan kota.

e. Pencapaian Sasaran Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015

Penelaahan tujuan pembangunan Millenium Goals (MDGs) juga merupakan salah satu instrument guna melihat sasaran-sasaran penting yang harus dicapai dan ditunjang oleh pemerintah daerah. Sasaran-sasaran yang tertuang dalam MDGs perlu diidentifikasi untuk melihat kemungkinan peluang, tantangan ataupun ancaman yang akan dihadapi Pemerintah Daerah dalam waktu lima tahun ke depan. Berikut telaahan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Millenium Goals (MDGs).

Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Oleh karena itu, MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yaitu:

MDG 1 : Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
MDG 2 : Mencapai pendidikan dasar untuk semua
MDG 3 : Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
MDG 4 : Menurunkan angka kematian anak
MDG 5 : Meningkatkan kesehatan ibu
MDG 6 : Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
MDG 7 : Memastikan kelsetarian lingkungan hidup
MDG 8 : Membangunn kemitraan global untuk pembangunan.

Sampai dengan tahun 2015 ini, Indonesia telah mencapai berbagai sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu: (1) sasaran yang telah dicapai; (2) sasaran yang menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun

2015 (on-track); dan (3) sasaran yang masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya.

Sasaran pembangunan MDGs secara nasional yang ditargetkan untuk direalisir hingga akhir tahun 2015 oleh Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut

1. **MDG 1** - Proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan per kapita kurang dari USD 1 per hari relatif sudah semakin kecil, hal ini terlihat dari rata-rata PDRB perkapita Kota Bukittinggi data eksisting tahun 2014 sudah mencapai Rp. 46,83 juta atau setara dengan pendapatan US$ 9 perhari. Sementara indeks gini juga relatif kecil, sehingga tidak terlalu jauh ketimpangan pendapatan antar penduduk. Namun hal ini perlu diimbangi dengan tingkat inflasi yang masih relatif tinggi sehingga akan menekan kemampuan dan daya beli masyarakat.

2. **MDG 3** - Kesetaraan Gender dalam semua jenis dan jenjang pendidikan telah hampir tercapai yang ditunjukkan dengan rasio angka partisipasi murni perempuan terhadap laki-laki di seluruh jenjang pendidikan yang sudah hampir sama, bahkan perempuan lebih tinggi, sehingga angka melek huruf Bukittinggi juga masih tetap yang tertinggi di Provinsi Sumatera Barat mencapai 99,89%, dimana untuk penduduk laki-laki sebesar 99,86%, sementara penduduk perempuan 99,89%.

3. **MDG 6** - Prevelensi tuberculosis mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2010, sehingga data tahun 2014 sehingga angka morbiditas secara umum sudah rendah.

Sasaran dari tujuan pembangunan MDGs secara nasional telah menunjukkan kemajuan signifikan dan untuk Kota Bukittinggi juga akan tercapai sampai akhir tahun 2015 (on track) berupa :

1. **MDG 1** - Prevalensi balita kekurangan gizi telah berkurang dengan penemuan kasus yang sangat sedikit;
2. **MDG 2** - Angka partisipasi murni untuk pendidikan dasar sudah melebihi 100;
3. **MDG 3** - Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SM/MA/Paket C dan pendidikan tinggi sudah hampir sama, bahkan untuk beberapa jenjang pendidikan, perempuan lebih unggul;
4. **MDG 4** - Angka kematian balita telah menurun dari 5 per 1.000 kelahiran pada tahun 2010 hingga pernah mencapai 0 pada tahun 2013, dan berfluktuasi hingga 1 sampai maksimal 2 kasus pertahun hingga tahun 2014 eksisting. Kondisi ini telah jauh melebihi target nasional tahun 2015 yang menargetkan 44 kasus;

5. **MDG 5** - Angka kematian ibu menurun dari 4 kasus pada tahun 2010 menjadi hingga 0 kasus dan berfluktuasi dari 1 sampai 2 kasus. Secara menyeluruh ini sudah melebihi target nasional tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup;
6. **MDG 6** - Jumlah penderita HIV/AIDS meningkat, khususnya diantara kelompok resiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Peningkatan jumlah ini juga sebagai dampak pengungkapan kasus yang sebelumnya cenderung tertutup dan pendekatan yang masih berorientasi medis;
7. **MDG 7** - Indonesia memiliki tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi, namun tetap berkomitmen untuk meningkatkan tutupan hutan, memberantas pembalakan liar dan mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dioksida paling sedikit 26% selama 20 tahun kedepan. Bagi Bukittinggi upaya ini dilakukan dengan meningkatkan penanaman pohon, pemeriksaan keayakan gas buangan kendaraan bermotor dan mesin industri serta peralatan lainnya. Walaupun kualitas udara ambien Bukittinggi masih yang terbaik, namun upaya perlindungan dan peningkatannya masih terus dibutuhkan.

4.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang dikenal dengan Trisakti dan Nawacita.

A. Nawacita

Nawacita merupakan 9 agenda Prioritas Pembangunan nasional, yaitu:

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara;
2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera;
6. Akan Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional;
7. Akan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik;

8. Akan Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Akan Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial.

B. Trisakti

Trisakti merupakan 3 (tiga) target nasional yang terdiri dari program aksi sebagai berikut:

1. Berdaulat Dalam Bidang Politik

   Pencapaian target ini terdiri dari 12 program aksi dan 115 prioritas utama, sebagai berikut:

   a. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global, terdiri dari 4 prioritas utama;
   b. Menguatkan sistem pertahanan negara , terdiri dari 4 prioritas utama;
   c. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat, terdiri dari 8 prioritas utama;
   d. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara, terdiri dari 7 prioritas utama;
   e. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik, terdiri dari 7 prioritas utama;
   f. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokras, terdiri dari 6 prioritas utama;
   g. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah, terdiri dari 11 prioritas utama;
   h. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa, terdiri dari 8 prioritas utama;
   i. Melindungi dan memajukan hakhak masyarakat adat, terdiri dari 6 prioritas utama;
   j. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan, terdiri dari 7 prioritas utama;
   k. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan, terdiri dari 42 prioritas utama;
   l. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, terdiri dari 5 prioritas utama.

2. Berdaulat Dalam Bidang Ekonomi

   Pencapaian target ini dicapai melalui 16 program aksi sebagai berikut:

   a. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM;
   b. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan;
   c. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional;

d. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah dan membangun regulasi mewajibkan CSR dan/atau saham untuk masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm pengelolaan tambang berkelanjutan;
e. Membangun pemberdayaan buruh;
f. Membangun sektor keuangan berbasis nasional;
g. Penguatan investasi domestik;
h. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara;
i. Membangun infrastruktur;
j. Membangun ekonomi maritim;
k. Penguatan sektor kehutanan;
l. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan;
m. Membangun perimbangan pembangunan kawasan;
n. Membangun karakter dan potensi wisata;
o. Mengembangk an kapasitas perdagangan nasional;
p. Pengembangan industri manufaktur.

3. Berkepribadian Dalam Bidang Kebudayaan
   Pencapaian target ini dicapai melalui 3 (tiga) program aksi sebagai berikut:
   a. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa;
   b. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial;
   c. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga.

C. Sasaran Pembangunan Nasional

Sasaran makro pembangunan yang akan dicapai secara nasional adalah seperti tabel berikut:

Tabel 4.2
Sasaran dan Target Makro RPJMN 2014 – 2019

Indikator	2014* (Baseline)	2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat		
▪ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83	76,3
▪ Indeks Pembangunan Masyarakat[1]	0,55	Meningkat
▪ Indeks Gini	0,41	0,36
▪ Meningkatnya presentase penduduk yang	51,8%	Min. 95%

menjadi peserta jaminan kesehatan melalui ▪ SJSN Bidang Kesehatan	(Oktober 2014)	
▪ Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal Pekerja informal	 29,5 juta 1,3 juta	 62,4 juta 3,5 juta
Ekonomi Makro		
▪ Pertumbuhan ekonomi	5,1%	8,0 %
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010 ▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000	43.403 41.163	72.217
▪ Inflasi	8,4%	3,5%
▪ Tingkat Kemiskinan	10,96 % *)	7,0-8,0%
▪ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94%	4,0-5,0%

4.2.3. *Sustainable Development Goals* (SDG'S)

Dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG'S) terdapat 17 tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2030 yaitu:

1. Pemberantasan kemiskinan
2. Nol kelaparan
3. Kesehatan yang baik
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Air Bersih dan Sanitasi
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Kerja layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industry, inovasi dan infrastruktur
10. Pengurangan kesenjangan
11. Kota dan masyarakat berkelanjutan
12. Konsumsi yang bertanggung jawab
13. Aksi perubahan iklim
14. Perubahan bawah laut
15. Kehidupan didarat
16. Perdamaian dan keadilan
17. Kemitraan demi mencapai tujuan

4.2.4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi 2006 – 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 telah merumuskan Visi "Terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya

dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan", dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradat berdasarkan Iman dan Taqwa;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan;
4. Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan; serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan Sumatera;
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan menyenangkan.

Untuk mewujudkan visi dan misi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 dimuat Arah pembangunan jangka panjang sebagai berikut :

a. Mewujudkan kehidupan beragama yang baik dan berkualitas
b. Mewujudkan pengembangan dan penerapan kebudayaan daerah
c. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
d. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
e. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang maju dan mampu bersaing
f. Mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Wisata
g. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan
h. Peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
i. Penataan kota dan pengaturan tata ruang wilayah
j. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan kota

Beberapa target pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD Kota Bukittinggi 2006 – 2025 pada periode RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 adalah seperti berikut:

Tabel 4.3
Target Kinerja RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025
pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Capaian 2014 (baseline)	Target 2020
1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Harga Konstan (%)	6,19	7,65
2.	PDRB Harga Konstan (Rp. Milyar)	4.592	2.134
3.	Tingkat Inflasi (%)	9,24	5,00

No	Indikator	Capaian 2014 (baseline)	Target 2020
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,82	1,23
5.	Pendapatan Perkapita Harga Berlaku (Rp. Juta/ $)	46,83 $3.131	68,0 $6.800
6.	Angka Kematian Bayi (000 kelahiran)	4	12
7.	Angka Kurang Gizi (%)	0	6
8.	Peringkat HDI/ IPM Nasional	11	7
9.	APM usia 19 – 24	100	50
10.	Kualitas Pendidikan (berbasis aqidah)	Belum ada data	7 nasional
11.	Pendidikan Internasional (jenjang SLTA)	Belum ada	Akreditasi
12.	Rumah Sakit Traumatic Centre	Belum ada	Belum ada
13.	Pengangguran (%)	3,93	8
14.	Kemiskinan (%)	4,56	2,5

4.2.5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi

Dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030, dirumuskan beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bukittinggi, yaitu :

a. Pembangunan Kota Bukittinggi berbasis kebencanaan;
b. Pembangunan pusat-pusat pelayanan Kota Bukittinggi secara merata didasarkan pada kesesuaian fungsi pusat-pusat pelayanan, sebaran permukiman dan dukungan sistem transportasi;
c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta sarana dan prasarana Kota Bukittinggi yang merata dan terpadu secara regional dan nasional;
d. Peningkatan keterpaduan antarkegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
e. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pembangunan Kota Bukittinggi melalui kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat;

f. Pengembangan sektor pariwisata alam dan pariwisata budaya Kota Bukittinggi agar memiliki peran yang strategis ditingkat regional, nasional dan internasional; dan
g. Peningkatan fungsi dan kualitas perlindungan setempat dan cagar budaya di Kota Bukittinggi;
h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

4.2.6. Kebijakan Pembangunan Daerah tetangga

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Sumatera Barat, maka perencanaan pembangunan Kota Bukittingi meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD. Adapun penyelarasan pembangunan antar daerah di Kota Buktinggi hanya dengan RPJMD Kabupaten Agam. Karena Kota Bukitinggi dikelilingi hanya oleh Kabupaten Agam.

Tabel 4.4
Hubungan Pembangunan Kota Bukittinggi dengan Daerah Tetangga

NO	KABUPATEN AGAM	KETERKAITAN
1	Kabupaten Agam yang memliki peluang kerja yang jauh sedikit dari Kota Bukttinggi, sehingga akan mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran dengan daerah tujuan terdekat adalah Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi dapat menjadi tujuan bagi para pencari kerja dan penduduk miskin yang bekerja tanpa keahlian
2	Kabupaten Agam sedang membenahi objek objek Wisata	Kota Bukittinggi akan menerima manfaat dari pembangunan objek wisata di Kabupaten Agam , terutama dibidang jasa hotel dan perdagangan dan jasa
3	Minimnya fasilitas kesehatan dan jauhnya jangkauan masyarakat ke Rumah Sakit di Kabupaten Agam di Lubukbasung, mengakibatkan penduduk memilih alternatif memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi akan menjadi sasaran utama bagi masyarakat di wilayah Agam dalam peningkatan kualitas kesehatan, meskipun Kota Bukittinggi belum mempunyai RSUD, namun Kota Bukitinggi mempunyai beberapa Rumah sakit milik Pemerintah Pusat, Propinsi, dan swasta

4	Masih rendahnya IPM Kabupaten Agam dibanding Kota Bukittinggi	IPM Kota Bukittinggi jauh lebih tinggi dari Kabupaten Agam menyebabkan Kota Bukittinggi menjadi sasaran pendidikan bagi penduduk di wilayah sekitar Bukitinggi.
5	Kabupaten Agam belum mempunyai pusat perdagangan yang merupakan tujuan propinsi tetangga.	Kota Bukittinggi mempunyai Pusat grosir dan eceran yang merupakan pusat grosir di wilayah Sumatera Tengah,yang identik dengan Pusat Grosir Tanah Abang, menguntungkan Kota Bukittinggi untuk peningkatan ekonomi masyarakat, karena propinsi tetangga memnfaatkan pusat gosir tersebut dalam perdagangan khususnya konveksi
6	Kabupaten Agam memiliki sumber air baku yang sangat dibutuhkan oleh Kota Bukittinggi untuk kebutuhan air bersih	Kota Bukittinggi membutuhkan kerjasama lanjutan dengan Kabupaten Agam dalam mencari sumber air baku yang baru untuk disalurkan di Daerah Kota Bukittinggi.

4.2.7. Kerjasama Antar Daerah

Bukittinggi memiliki magnitude yang kuat untuk menarik pengunjung untuk berusaha, mendapatkan layanan ataupun berkunjung. Konsekwensinya Bukittinggi harus dapat memenuhi kebutuhan setiapa pengunjung dengan baik untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi Bukittinggi sebagai kota kunjungan. Pada sisi yang lain, Bukittinggi memiliki keterbatasan karenan keterbatasan lahan dan sumberdaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan infrastruktur kota.

Bukittinggi mengandalkan sumber air yang berasal dari Kabupaten Agam untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Pengelolaan sampah Bukittinggi juga sangat tergantung TPA Regional payakumbuh untuk menghadirkan TPA minimal Sanitary landfill. Begitu juga untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pokok yang tidak dapat dipenuhi oleh Bukittinggi secara mandiri. Karena itu kerja sama antar daerah adalah salah satu peluang yang dapat diambil dan dikembangkan. Melalui kerjasama antar daerah beberapa persoalan kota juga akan dapat diselesaikan.

4.3. Penetapan Isu Strategis

Setelah melihat pengelompok isu dan permasalah di tingkat kota Bukittinggi maka didapatkan beberapa isu strategis yang harus segera di tanggapi. Isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi dasar kebijakan pembangunan jangka menengah. Isu-isu strategis pada dasarnya menyangkut dengan kondisi dan aspek yang sangat penting dan

strategis serta menentukan arah pembangunan Kota Bukittingi 5 (lima) tahun kedepan. Karena isu-isu tersebut merupakan kondisi yang mendasar dan menentukan pencapaian tujuan pembangunan, oleh karena itu penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir masalah pokok pembangunan dan isu-isu strategis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis dimaksud harus segera ditanggapi dan ditindka lanjuti . Penetapan isu tersebut harus memperhatikan beberapa kriteria yakni (1) Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, propvinsi dan daerah Kota Bukittinggi ; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pembangunan daerah; (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; (6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan oleh Walikota terpilih.

Berdasarkan uraian diatas, maka Isu-isu yang bersifat strategis Kota Bukittinggi dikelompokkan antara lain:

1. Penerapan ABS-SBK dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pemerintahan
3. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Teknologi Informasi
4. Lingkungan Hidup;
5. Pelaksanaan MEA
6. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan
7. Pembangunan Kependudukan
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9. Penggulangan kemiskinan

Berikut analisis terkait rumusan isu strategis dimaksud.

4.3.1. Penerapan ABS-SBK dan Pemberdayaan Masyarakat;

Pemahaman agama dan budaya untuk meningkatkan akhlak dan moral masyarakat kota menjadi isu strategis yang sangat penting dimasa mendatang.

Sebab, meskipun selama ini kegiatan agama dan budaya tumbuh dan berkembang dengan baik, namun dalam implementasinya terlihat belum mampu untuk meningkatkan akhlak dan moral semua masyarakat.

Aspek ini perlu diberikan penekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamais sebagaimana diharapkan masyarakat dalam jangka panjang.

Memberikan pemahaman yang seimbang dan sejalan dengan kultur budaya yang berkembang di masyarakat merupakan gerakan yang mesti dilakukan bersama dan terintegrasi. Bahwasanya segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sangat penting dari sisi agama dan pembangunan untuk memajukan daerahnya tanpa merusak tatanan budaya adat yang hidup di masyarakat. Kekuatan ini menjadi modal besar dan positif bagi kemajuan masyarakat dalam rangka mengimbangi berbagai dampak negative yang akan merusak karakter dan mental sebagai bangsa yang bermartabat.

Disamping itu pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Bukittinggi memerlukan penguatan agar potensi masyarakat yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kota.

Modal besar yang perlu dibudayakan tersebut adalah falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, Adaik Mamakai*. Falsafah ini telah mampu mengangkat derjat dan martabat masyarakat Minagkabau termasuk Bukittinggi. Persoalannya untuk tatanan perkotaan, nilai-nilai tersebut rentan terdegradasi. Karena itu dibutuhkan upaya maksimal dan dilakukan melalui pemberdayaan seluruh elemen masyarakat.

4.3.2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. *Pertama,* reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. *Kedua,* reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan

keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. *Ketiga,* reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan standar layanan yang diinginkan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance* dan *clean gevernment.* Membangun *good governance* bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun persoalan etika, sikap dan perilaku.

Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu diperkuat dalam periode 5 tahun mendatang.

Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari sumber daya manusianya. Sebagus apapun sistem yang di buat, kalau SDM tidak memadai tetap akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada *output* dan *outcomes*. Pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda sebuah pemerintahan yang tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap pembangunan. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, demokratis dan tepercaya, yaitu :

a. Transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi
c. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik
d. Peningkatan semangat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)
e. Perlunya semua *stakeholder* untuk dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
f. Penyediaan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah wajib diumumkan

kepada masyarakat. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari *hardware* dan *software*. Hardware berupa perangkat komputer dan jaringannya, sementara sofware adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Dan yang penting juga disiapkan dalam pengelolaannya adalah brainware berupa sumber daya manusia aparatur yang professional dan berintegrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dituntut transparansi dan akuntabel yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan. Kemudian secara bersamaan pemerintah juga dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public. Disinilah pentingnya reinventing government dimiliki oleh seluruh apatarur penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga menjadi focus untuk dioptimalkan.

4.3.3. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain. Pembangunan sarana dan prasarana daerah merupakan isu penting bagi peningkatan peranan Kota Bukittingi sebagai Kota Pariwisata, perdagangan dan jasa, kota pendidikan dan Kota Kesehatan. Terbatasnya daya dukung kota membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan kota.

Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghidupkan kembali jalur Kereta Api dari Padang ke Payakumbuh juga perlu didukung karena berdampak positif untuk meningkatkan kunjungan ke Bukittinggi dan pemenuhan kebutuhan transportasi masal yang murah dan representative.

Menyambut kebijakan tersebut, Bukittinggi juga perlu meningkatkan infrastruktur kota menjadi kota yang indah, bersih, rapi dan menyenangkan. Di samping itu, juga dibutuhkan sarana prasarana berupa pusat perbelanjaan, perhotelan, gedung konvensi dan peningkatan daya tarik wisata. .

Sebagai kota jasa, dukungan teknologi informasi menjadi amat penting dalam konsep smart city. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik. Karena itu, gubernur dan bupati/walikota diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional.

4.3.4. Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti dan malah akan menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (*Brundtland Report* dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan.

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Upaya pemenuhan kebutuhan RTH

sampai saat ini dilakukan dengan membangun dan meningkatkan taman kota, pelestarian dan peningkatan terhadap hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, dan mendorong peningkatan RTH privat. Konsep green city juga menjadi bagian penting untuk terus dikembangkan, dengan dukungan pemerintah melalui lembaga dan kementerian terkait.

4.3.5. Pelaksanaan MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai biberlakukan pada akhir Desember 2015, dimana ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antar negara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Kota Bukittinggi secara cermat dan terintegrasi. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di daerah akan menjadi aset berharga bagi Daerah untuk meraih keberhasilan dalam memperoleh manfaat dari MEA bagi kepentingan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi implementasi MEA 2015 dan meningkatkan peran aktif kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi MEA. Terkait dengan pelaksanaan MEA tersebut, perlu adanya peningkatan efektivitas sosialisasi, komunikasi, serta layanan edukasi terhadap masyarakat dan para pelaku bisnis mengenai pemahaman dan pemanfaatan Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi kepentingan pembangunan di daerah.

Beberapa upaya yang mesti dilakukan daerah untuk mengambil manfaat dalam pelaksanaan MEA tersebut adalah: peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, peningkatan infrastruktur, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas UMKM di daerah. Peningkatan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi implementasi MEA melalui: peningkatan peran aktif berbagai pemangku kepentingan di daerah, maupun kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Peningkatan daya saing perekonomian daerah perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa keluar masuk Kota Bukittinggi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja di daerah agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi perizinan yang menghambat investasi sehingga terjadi peningkatan investasi masuk ke Daeraantara lain dengan pengembangan siatem inovasi daerah dan penerapan inovasi pelayanan publik.

4.3.6. Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Bukittinggi telah memenuhi target pencapaian. Akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/kepala sekolah secara berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat. Di samping itu, dengan adanya rotasi dan mutasi secara berkala diharapkan akan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pendidikan sekolah .

Disamping pendidikan, faktor kesehatan masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting, karena tindakan preventif dalam bidang kesehatan perlu dikembangkan disamping upaya kuratif berupa pengobatan. ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit. Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya

pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

4.3.7. Pembangunan Kependudukan

Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tantangan bagi pembangunan kesejahteraan di Kota Bukittinggi. Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 101.024 Jiwa , terdiri dari 50.630 jiwa laki laki atau 50,12% dan 50.394 jiwa perempuan atau setara dengan 49,88%. Sedangkan jumlah anak sebesar 18.168 jiwa terdiri dari 9.311 anak laki – laki atau 5,25% dan 8.857 anak perempuan atau 48,75% . Apabila kita tambahkan jumlah penduduk perempuan dan jumlah anak di Kota Bukittinggi mencapai 68.562 jiwa atau 67,88%. Artinya struktur penduduk Bukittinggi telah dengan jelas mereferensi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memfokuskan manfaat pembangunan kesemua penduduk terutama perempuan dan anak, Karena baiknya sebuah Kota bahkan Negara memang lebih banyak ditentukan oleh kwalitas perempuannya dan pola asuh keluarga terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Apalagi dikaitkan dengan puncak bonus demografi tahun 2028, dimana struktur penduduk Kota Bukittinggi jumlah penduduk produktif (18 s/d 65 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk non produktif (≤ 17 s/d ≥ 66 tahun). Artinya kebijakan pembangunan yang tidak memastikan penduduk produktif memiliki kompetensi dan berkwalitas, justru akan mendatangkan permasalahan yang sangat komplek. Pemerintah harus memastikan, penduduk produktif harus memiliki pekerjaan dan tabungan, harus berpendidikan, harus sehat, harus memiliki fondasi agama dan budaya yang kuat. Sehingga dengan kondisi tersebut, struktur penduduk tahun 2028 tersebut dipastikan memberikan bonus. Apabila kondisi tersebut tidak terjadi maka yang di tahun 2028 kondisi yang ada justru bencana demografi, karena jumlah penduduk yang besar tersebut tidak berkwalitas. Apabila ditarik ketahun 2017, maka penduduk yang berumur mulai 7 tahun sampai dengan penduduk berumur 54 tahun harus dipastikan mendapat porsi pembinaan dan pembangunan yang

terintegrasi dan memastikan mereka memiliki kwalitas dan kompetensi yang baik .

Grand Desain Kependudukan yang telah dilegalisasi dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Grand Desain Kependudukan tahun 2010 s/d 2035 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan di Kota Bukittinggi, sehingga pembangunan Kota Bukittinggi belum kuat berwawasan kependudukan. Grand Design kependudukan telah merinci 5 (lima) aspek pembangunan kependudukan yaitu Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan Kuantitas penduduk, Pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pembangunan data Base Kependudukan. Laju Pertumbuhan Penduduk masih di strata 1,77, yang disebabkan faktor urbanisasi sebagai akibat atau ekses dari Bukittinggi sebagai kota wisata, Kota Perdagangan, Kota Pendidikan dan Kota Kesehatan. Urbanisasi berasal dari masyarakat hinterland atau masyarakat di sekitar kota Bukittinggi seperti Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman bahkan dari Sumatera Utara dan Riau semakin hari semakin besar, dan nyaris tidak terkendali. Akibat tidak adanya strategi pengembangan ekonomi yang mampu memprotek atau mengurangi pendatang. Rata-rata Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi telah mencapai 4.774 jiwa/km2. Dan untuk Kecamatan Guguk panjang kepadatan penduduk telah mencapai 6.601 Jiwa / Km2. Meningkatnya indeks harapan hidup tidak dibarengi dengan program dan kegiatan yang membuat seorang lansia tangguh dan memiliki nilai manfaat. Apabila ini tidak menjadi konsentrasi Pemko Bukittinggi, ini justru akan menjadi beban baru. Bonus Demografi tahun 2028, mengharuskan ketepatan kebijakan dan program, agar bonus demografi benar – benar dapat dicapai. Tinggi pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan kepada penanggulangan kemiskinan karena pertumbuhan penduduk tidak menjadi prioritas program. Garapan program KB terhadap Pasangan Usia Subur sebenarnya sudah baik yaitu 69,16%, namun karena laju pertumbuhan penduduk dari faktor urbanisasi strata PUS sangat tinggi ke Bukittinggi, membuat kinerja garapan program KB ke PUS terkesan stagnasi, sehingga benar benar diperlukan strategi arus masuk penduduk ke Kota Bukittinggi yang lebih berpihak kepada program kependudukan, Karena tanpa adanya regulasi yang jelas, maka LPP Kota Bukittinggi sulit diturunkan. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur 15-49 tahun, atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid (datang bulan), juga termasuk istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.

4.3.8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Fungsi kodrati hak perempuan dan anak melalui program pengarustamaan Gender, perlindungan hak-hak perempuan, serta menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan, telah ditegaskan dalam UUD 1945. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan setiap warga Negara Indonesia dan berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila

Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bekeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara , wajib melaksanakan PUG kedalam seluruh proses pembangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan , pelaksanaan ,monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan. Isu-isu yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah mulai dari Pusat sampai ke daerah yang meliputi Pengarusutamaan gender, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan anak, Kota Bukittinggi telah melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik berupa pelatihan, sosialisasi, pembinaan yang ditujukan bagi kaum perempuan dan anak, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan dan penanggulangan masalah KDRT. Walaupun semua pengaduan dapat ditanggulangi dengan baik namun tidak semua kasus yang ada di masyarakat terpantau dengan baik, karena tidak dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini menunjukan pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penanganan kasus KDRT dan perlindungan anak, masih perlu ditingkatkan. Masih tingginya tindakan KDRT, menunjukan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan belum kuat.

Partisipasi perempuan di Kota Bukittinggi dapat dilihat di segala bidang kehidupan, baik politik dan lembaga legislatif, pemerintah dan lembaga eksekutif, yudikatif maupun organisasi kemasyarakatan lainnya bahkan menjadi pelaku ekonomi. Namun demikian, partisipasi perempuan dalam kehidupan publik tidak cukup diimbangi dengan meningkatnya jumlah

perempuan sebagai pengambil keputusan. Keterlibatan perempuan pada sektor publik di Kota Bukittinggi, khususnya Pegawai Negeri Sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi berjumlah 2.227 orang atau 60,40% dari jumlah seluruh ASN yang ada, yaitu sebesar 3.683 orang pegawai. Dilihat dari perbandingan perempuan bekerja di lembaga pemerintah dengan pegawai yang ada, sudah memperlihatkan angka yang sangat baik, bahkan melampaui batas amanah UU yaitu 30%. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja (umur 20 sampai 60 tahun) yang berjumlah sebesar 29.341 jiwa, persentase perempuan yang bekerja pada pemerintah hanya mencapai 7,6%, disatu pihak amanat Undang – Undang , mengamanatkan kuota perempuan sebesar 30 %, kondisi ini harus di akui sebagai belum tuntasnya program pengarustamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, tentu hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, bahwa pada kenyataannya, kesetaraan dan keadilan gender masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, artinya program pengarustamaan gender, Pemberdayaan Perempuan masih perlu menjadi kosentrasi Pemerintah Kota Bukittinggi dan bersifat terintegrasi dan melibatkan semua pihak.

Selanjutnya dalam pemenuhan hak anak yakni 5 klaster hak anak (KHA) dengan 31 indikator telah dibuat gugus tugas Kota Layak anak (KLA). Untuk perlindungan dari kekerasan juga telah dibuat gugus tugas GN-AKSA dan P2TP2A. Bahkan saat ini Bukittinggi telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan anak. Hal ini tentu sebagai komitmen nyata Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk urusan Perempuan dan Anak.

4.3.9. Penanggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan ekonomi makro yang berpengaruh terhadap mutu hidup manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Percepatan pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDGs) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) akan berakhir pada tahun 2015 , terdapat fenomena pada beberapa negara yang targetnya dikhawatirkan tidak tercapai. Namun dengan ditetapkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai

kelanjutan agenda global pasca MDGs, kekhawatiran ini tidak terjadi. Agenda SDGs ini relevan dengan garis kebijakan empat pilar pemerintah yang telah mencanangkan tercapainya pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan perbaikan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi setelah tahun 2015, sudah barang tentu akan menindaklanjuti agenda SDGs ini. Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran diarahkan untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kemudahan permodalan, yang pada gilirannya nanti akan dapat mewujudkan 1) penurunan tingkat pengangguran; 2) ketersediaan tenaga kerja terampil; 3) peningkatan pendapatan masyarakat, 4) meningkatnya produktivitas usaha; 5) pemberdayaan perempuan warga lansia untuk usaha-usaha produktif.

Disamping isu strategis diatas, maka tak kalah pentingnya yang harus menjadi pekerjaan yang berat adalah Pengalihan Kewenangan Urusan Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, terdapat beberapa urusan yang dialihkan kewenangannya dari kewenangan daerah menjadi kewenangan Provinsi/Pusat (urusan konkuren). Adapun urusan pemerintah konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan :

a. Pengelolaan pendidikan menengah;
b. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
c. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
d. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
f. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi;
g. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
h. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
i. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
j. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
k. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Tabel 4.5

Sandingan Isu Strategis Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Bukittinggi

NO	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROVINSI SUMATERA BARAT	ISU STRATEGIS KOTA BUKITTINGGI
1		Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Adat dan Agama.	Penerapan ABS-SBK dan Pemberdayaan Masyarakat
2	Pembangunan Birokrasi & Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
3		Peningkatan Infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Teknologi Informasi
4		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
5	Penataan Sistem Ekonomi yang berkeadilan dan berdaya saing	Globalisasi dan Peningkatan Daya Saing Daerah	Pelaksanaan MEA
6		Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan
7	Penguatan Kelembagaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB		Pembangunan Kependudukan
8			Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9	Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Terutama Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Rentan	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah	Penanggulangan Kemiskinan

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 secara terukur diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro *(outcome)*. Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi : Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi : Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator kinerja daerah disajikan dalam tabel 9.1 sebagai berikut.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bukittinggi

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2017	2020	2021 2021
(1)	(	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.	Laju inflasi	2,84	3-5	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2.	PDRB per kapita (riil)/juta	39.763	41.490	43.302	45.203	47.200	49.296	51.496
3.	Tingkat Kemiskinan	4,58	4,23	3,91	3,61	3,33	3,08	2,84
5.	Laju Perumbuhan Ekonomi (LPE)	6.1	6,38	6,8	6.8	6,9	7	7
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.04	5,84	5,65	5,46	5,28	5,10	4,93
5.	Harapan Lama Sekolah	14,92	14,70	14,75	14,80	14,85	14,90	15
6.	Tingkat pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribu/Kapita/Bulan)	12.330	12.482	12.636	12.792	12.950	13.110	13.271
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,84	70,84	71.84	72,84	73,84	74,84	75,84
	Urusan Pendidikan							
8.	Angka melek huruf	99.94	99.94	99.94	99.95	99.95	99.95	99.95
9.	Angka rata-rata lama sekolah	10,79	10,85	10,95	11,05	11,10	11,15	11,20
10.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	136,75	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%
11.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B	140,02	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%
12.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	165,41	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%
13.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	121,93	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%
14.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B	110,30	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%
15.	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/ Paket C	123,48	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2017	2020	2021 2021
(1)	(	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KESEHATAN							
16.	Angka harapan hidup	73,52	73,60	73,95	74	74,25	74,52	74,70
17.	Persentase balita gizi buruk	<0.15	<0.1	<0.15	<0.15	.	<0.15	<0.15
	KETENAGAKERJAAN							
18	Rasio penduduk yang bekerja	0,94	0,96	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98
	Pemuda dan Olahraga							
19	Jumlah gedung olahraga	6	6	7	7	7	7	7
A	***ASPEK PELAYANAN UMUM***							
I	***URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR***							
a.	***URUSAN PENDIDIKAN***							
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	85,57%	86%	86,50%	87%	87,50	88%	88,50%
	Pendidikan Dasar							
	Angka partisipasi sekolah	127,36	127,	127,60	127,70	128	128,50	129
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:243	1:24	1:243	1:243	1:243	1:243	1:243
	Rasio guru/murid	1:28	1:29	1:29	1:30	1:30	1:30	1:30
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	120,95	123,	124,58	127,07	128,3	130,88	132,17
	Pendidikan menengah:							
	Angka partisipasi sekolah	144,96	144,	145	145,10	145,1	145,20	145,30
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1:273	1:27	1:277	1:278	1:280	1:281	1:282
	Rasio guru terhadap murid	1:11	1:13	1:13	1:14	1:15	1:15	1:16
	Fasilitas Pendidikan:							
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	107,38 %	>100	>100%	>100%	>100	>100%	>100%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket	121,05	>100	>100%	>100%	>100	>100%	>100%
	Angka Putus Sekolah:							
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,10%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,30%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2017	2020	2021 2021
(1)	(	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Angka kelulusan							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	124%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke	178%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92%	93%	93%	95%	95%	100%	100%
b.	**URUSAN KESEHATAN**							
	Rasio posyandu per satuan penduduk	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	4.9	4.9	4.9	5.7	5.7	5.7	5.7
	Rasio dokter per satuan penduduk	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk Perawat &	12.95	12.95	12.95	12.95	12.95	12.95	12.95
	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
	Pelayanan Kesehatan Dasar							
	- Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	91	91	92	92	93	94	95
	- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	96.7	97	97	98	98	99	10089.2
	- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	89.2	90	90.2	90.4	90.6	90.8	91
	- Cakupan pelayanan nifas	83.6	84	85	86	88	90	90
	- Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	70.6	74	75	76	78	80	80
	- Cakupan kunjungan bayi	83.8	85	86	87	88	90	90
	- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child							
	- Cakupan pelayanan anak balita	54.8	85	86	87	88	90	90
	- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI	96.97	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan balita gizi buruk mendapat	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan peserta KB aktif	53.4	70	70	70	70	70	70
	- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular:	100	100	100	100	100	100	100

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2017	2020	2021 2021
(1)	(	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Cakupan *Acute Flacid Paralysis* (AFP)	0.0025	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	- Cakupan Penemuan Penderita pneumonia	57.57	60	70	80	90	100	100
	- Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	80	81	84	87	90	90	90
	- Cakupan penderita DBD yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan Penemuan Penderita Diare	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100
	- Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar	1	1	1	1	1	1	1
	- Persentase balita ditimbang berat badan D/S	59.72	70	70	75	80	80	80
	- Peersentase fasilitas pelayanan kesehatan yang membeerikan pelayanan KB sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Rujukan							
	- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100
	- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100
	cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase orang yang berumur 15 Th atau lebih yang menerima konseling dan testing	10	10	10	10	10	10	10
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Penderita penyakit menular lainnya yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2017	2020	2021 2021
(1)	(	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
c.	**URUSAN PEKERJAAN UMUM**							
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	85.20%	86%	88%	90%	92%	94%	95%
	Panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 20 Km/Jam)	167,16	166,51	170,38	174,25	178,12	181,99	183,93
	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	53.478 km	54.478 km	59.478 km	64.478 km	69.478 km	74.478 km	79.478 km
	Sempah dan sungai yang dipakai bangunan liar							
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	47670.35 m	47670.35 m	52437,39 m	57204.42 m	61971,43m	66738.49 m	71505.53
	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	0 titik	0 titik	1 titik	1 titik	1 titik	1 titik	4 titik
d.	**URUSAN PERUMAHAN**							
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	65%	65%	73%	83%	93%	100%	100%
	Kawasan Kumuh	2	2	0	0	0	0	0
	Luas kawasan permukiman kumuh	30.60 Ha	30.60 Ha	20.40 Ha	10.20 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	7,7%	7,7%	8%	9%	11%	13%	14%
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
e.	**URUSAN PERHUBUNGAN**							
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	325.000.000	330.000.000	330.000.000	340.000.000	355.000.000	360.000.000	365.000.000
	Jumlah uji kir angkutan umum	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis							
	Kepemilikan KIR angkutan umum	2676	2700	2800	2900	3000	3100	3200
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	25 menit/1 unit	25 menit/1 unit	25 menit/1 unit	25 menit/1 unit	25 menit/1	25 menit/1 unit	25 menit/1 unit
	Pemasangan Rambu-rambu	489	14	10	0	10	0	0
f.	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**							
	Prosentase Penanganan sampah	90%	90%	90%	95%	100%	100%	100%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2017	2020	2021 2021
(1)	(	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol.B (Dari tercemar berat menjadi tercemar	20%	20%	40%	50%	60%	70%	80%
g.	**URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL**							
	Kepemilikan KTP	52.135	56.502	61.235	66.364	71.923	77.947	84.476
	Kepemilikan akta kelah	61.349	62.803	64.292	65.817	67.378	68.975	62.803
h.	**URUSAN SOSIAL**							
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	80%	80%	81%	83%	84%	86%	88%
i.	**URUSAN TENAGA KERJA**							
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,59	68,60	70,25	71,15	73,45	76,33	77
	Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	64	52	68	90	94	94	94
	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrialBesaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjia Bersama (PB)	24	27	30	32	34	36	38
	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program	7536	7750	7900	8000	8200	8500	8500
	Pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan							
	- Besaran Pemeriksaan perusahaan	180	160	Keprovinsi	Keprovinsi	Keprovinsi	Keprovinsi	Keprovinsi
	- Besaran Pengujian peralatan di perusahaan	360	375	Keprovinsi	Keprovinsi	Keprovinsi	Keprovinsi	Keprovinsi
j.	**URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**							
	Persentase Koperasi aktif	82	83	84	85	85	87	88
	Usaha Mikro dan Kecil	9.527	9.623	9.719	9.816	9.914	10.013	10.113
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	9.478	9.574	9.670	9.767	9.865	9.964	10.064
	Jumlah BPR/LKM	49	49	49	49	49	49	49
k.	**URUSAN KEBUDAYAAN**							
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	52	57	59	61	63	65
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	5%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
l.	**URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**							
	Gelanggang/balai remaja/lapangan olahraga (selain	6	7	7	7	7	7	7

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2017	2020	2021 2021
(1)	(	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
m.	**URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
	Jumlah organisasi pemuda	27	27	27	27	27	27	27
	Jumlah organisasi olahraga	33	33	33	33	33	33	33
	Jumlah kegiatan kepemudaan	10	10	10	10	10	10	10
	Jumlah kegiatan olahraga	10	10	10	10	10	10	10
	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	3	3	3	3	3	3	3
	Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas & OKP	3	3	3	3	3	3	3
	Jumlah kasus pelanggaran ganguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang	722	650	600	500	450	250	250
	PKK aktif	28	28	28	28	28	28	28
	Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	LPM Berprestasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
n.	**URUSAN KETAHANAN PANGAN**							
	Score Pola Pangan Harapan	90	90	91	91	92	92	93
	Regulasi ketahanan pangan							
o.	**URUSAN KEARSIPAN**							
	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	3 SKPD	6 SKPD	9 SKPD	12 SKPD	15 SKPD	18 SKPD	24 SKPD
	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1keg	2 keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg
p.	**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
	Web site milik pemerintah daerah	12 bh	15 buah	17 Buah	19 Buah	21 buah	23 Buah	27 Buah
	Jumlah jaringan komunikasi	21 green field, 40 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop
	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365
	Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk	27	30	30	31	31	31	31
q.	**URUSAN PERPUSTAKAAN**							
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	9.536	11.536	13.536	15.536	17.536	19.536	21.536
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	3.750	3.750	3.750	3.800	3.800	3.850	3.850
	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1	1	1
II.	**URUSAN PILIHAN**							

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2017	2020	2021 2021
(1)	(	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
a.	**URUSAN PERTANIAN**							
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	66,7	65	65,1	65,2	65,3	65,4	65,5
	Produksi perikanan	355 ton	350.68 Ton	351,68 ton	352,68 ton	353,68 ton	354,68 ton	355 ton
b.	**URUSAN INDUSTRI**							
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6.9	7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
	Pertumbuhan Industri		5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Kontribusi industri rumah tangga thd PDRB sektor							
	Cakupan bina kelompok pengrajin	20 KUB	20 KUB	20 KUB	25 KUB	25 KUB	30 KUB	30 KUB
III.	FUNGSI PENUNJANG							
a.	**PERENCANAAN**							
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada0	Ada	Ada
b.	KEUANGAN							
	Peningkatan PAD (%)	66.027.359.716	74.161.930.433	83.298.680.262	93.561.077.670	105.087.802.438	118.034.619.698	1.077.173.651.980

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Dengan telah dilantiknya Walikota Bukittinggi dan Wakil Walikota Bukittinggi periode 2016-2021, pada tanggal 17 Februari 2016, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-616 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, Tentang Pengangkatan Walikota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat maka Visi Misi kepala Daerah terpilih tersebut selanjutnya dijabarkan dalam dokumen perencanaan lima tahun daerah dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025. Adapun visi dan Misi tersebut adalah :

"TERWUJUDNYA BUKITTINGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA, BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA".

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bukittinggi kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata di wilayah Indonesia bagian barat yang disemangati dengan budaya yang bermartabat, masyarakat yang religius, kegiatan perdagangan yang maju, alam yang indah, kuliner yang berkelas, tertata, bersih dan sehat.
2. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi.
3. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota Bukittinggi mempunyai lingkungan yang sehat dengan derajat kesehatan yang tinggi dan sentra pelayanan kesehatan daerah sekitarnya
4. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi
5. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama mengandung makna bahwa masyarakat Bukittinggi menjadikan agama sebagai landasan dalam tatatanan kehidupan bermasyarakat dan berusaha.
6. Bukittinggi sebagai kota yang beradat dan berbudaya mengandung makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Secara umum , maka untuk mencapaikan Visi dimaksud ditetapkan beberapa langkah dan strategi yaitu :

a. Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya yang telah hidup dan berkembang selama ini sebagai modal dasar guna mendorong peningkatan kegiatan pembangunan dengan segala aspeknya
b. Mengembangkan pola partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
c. Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepedulian para pelaku pembangunan

(pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya termasuk perantau) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi serta memelihara pembangunan Kota Bukittinggi pada masa-masa selanjutnya.

d. Memperkuat dan memberdayakan masing-masing sektor pendukung dan sumber daya pembangunan sehingga lebih bisa menyatu dalam satu tujuan pembangunan Kota Bukittinggi ke depan.
e. Membangun sinergitas kuat antar sektor, pelaku pembangunan.
f. Membangun karakter sumber daya manusia aparat pengelola pembangunan yang lebih terintegrasi kedalam sistem birokrasi yang tertata rapi sesuai dengan azas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih *(good governance and clean goverment)*
g. Membangun regulasi dan sistem informasi pendukung pelaksanaan dan penataan pembangunan Kota Bukittinggi.
h. Membangun kemitraan antar pelaku pembangunan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam berbagai aspek pembangunan

5.2. MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 ditetapkan sejalan dengan RPJPD Kota Bukittinggi . Ada 5 Misi yang telah ditetapkan sebagaiperwujudan dan penjabaran dari Visi. Adapun Misi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan system ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

Tabel 5.1
VISI DAN MISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021

NO	VISI	MISI
1.	Terwujudnya Bukittingi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan jasa, berlandaskan Nilai Agama dan Budaya".	1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat). 2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan. 3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan. 4. Mengembangkan system ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna 5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

Dari uraian di atas, maka kita akan melihat keselarasan/keterkaitan antar RPJPD Tahun 2006-2025 dengan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.2
KESELARASAN RPJPD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006-2025 DENGAN VISI MISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021

No	MISI RPJPD 2006-2025	MISI RPJMD 2016-2021
1	Mewujudkan masyarakat yang terdidik berbudaya dan beradat berdasarkan iman dan taqwa	Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2	Kualitas sumberdaya manusia yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.

No	MISI RPJPD 2006-2025	MISI RPJMD 2016-2021
3	1. Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan serta menjadikan kota Bukittinggi yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan Sumatera, 2. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan menyenangkan.	Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat
4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan,	Mengembangkan system ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna

Jika kita simak keterkaitan antara Misi RPJPD Kota Bukittinggi 2006-2025 , dan Visi Misi Kota Bukittinggi 2016-2021, telah mempunyai keterkaitan dan keberlanjutan dalam pencapaian target sasaran .

Setelah dilakukan analisa dan keterkaitan antara RPJPD Kota Bukittinggi tahun 2006-2025 dengan Visi dan Misi maka yang menjadi prioritas utama pembangunan daerah Kota Bukittinggi tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Pengembangan Pariwisata
6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
9. Pelestarian lingkungan hidup

Selanjutnya kita sandingkan antara Nawacita, Prioritas Pembangunan Propinsi Sumbar serta Prioritas Pembangunan Kota Bukittimggi. Hal ini beguna untuk melihat keselarasan antara Pusat , Propinsi dan daerah juga harus saling singkron dalam pelaksanaan pembangunan.

TABEL. 5.3

KESELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL,PRIORITAS PEMBANGUNAN PROPINSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BUKITTINGGI 2016-2021

PRIORITAS NASIONAL(NAWACITA)	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROPINSI SUMBAR 2016-2021	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KOTA BUKITITNGGI 2006-2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BUKITTINGGI	KESELARSAN
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi	1. Pembangunan mental dan pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam kehidupan Masyarakat 2. Pelaksanaan reformasi Birokrasi Dalam pemerintahan 3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas pendidiakn 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis 6. Pengembangan Pariwisata, Industri, perdagangan, Koperasi dan Investasi 7. Pengembangan Kemaritiman, dan kelautan 8. Penurunan Tingkat Kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal 9. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur 10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencanan alam	1. Mewujudkan kehidupan beragama yang baik dan berkualitas 2. Mewujudkan pengembangan dan penerapan kebudayaan daerah 3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih 4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas 5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang maju dan mampu bersaing 6. Mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Wisata 7. Mewujudkan Prasana dan sarana Perkotaan 8. Peningkatkan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni 9. Penataan Kota dan Pengaturan Tata Ruang Wilayah 10. Pemeliharaan dan peningkatan Kualitas	1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya	• Nas = 1,8,9 • Prop = 1 • RPJP = 1, 2
			2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	• Nas = 2. 4 • Prop 2 • RPJP = 3
			3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	• Nas = 5 • Prop = 3 • RPJP = 4
			4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	• Nas = 5 • Prop. = 4 • RPJP = 4, 8
			5. Pengembangan Pariwisata	• Nas = – • Prop = 6 • RPJP = 6
			6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	• Nas = 6, 7 • Prop = 5,6 • RPJP = 5

PRIORITAS NASIONAL(NAWACITA)	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROPINSI SUMBAR 2016-2021	ARAH KEBIJAKAN RPJPD KOTA BUKITITNGGI 2006-2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BUKITTINGGI	KESELARSAN
karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.		Lingkungan Kota		
			7. Penanggulangan Kemiskinan	• Nas = 5 • Prop. = 5 • RPJP= 4
			8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	• Prop = 9 • RPJP = 9, 10
			9. Pelestarian lingkungan hidup	• Prop. = 10 • RPJPN= 10

Selanjutnya kita lihat keterkaitan isu strategis dengan Misi Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.4.

Keselarasan Isu Strategis dengan Misi

NO	ISU STRATEGIS	KESELARASAN DENGAN MISI
1	Penerapan ABS-SBK dan Pemberdayaan Masyarakat	Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pemerintahan	Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3	• Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Teknologi Informasi	Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara

NO	ISU STRATEGIS	KESELARASAN DENGAN MISI
	• Lingkungan Hidup	terpadu dan berwawasan lingkungan.
4	Pelaksanaan MEA	Mengembangkan system ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna
5	• Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan • Pembangunan Kependudukan • Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Penggulangan kemiskinan	Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

5.3 .Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah penyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur , spesifik, mudah dicapai, rasional, bersifat makro, dan dapat diwujudkan 5 tahun ke depan. Untuk mencapai Tujuan dibutuhkan sasaran yang nmerupkan alat untuk pencapaian tujuan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Peran dari penjelasan visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran RPJPD.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalisasikannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak *(impact)* keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapain berbagai program prioritas terkait.

5.3.1 Tujuan Dan Sasaran Misi 1

Pada Misi 1 ini hal pokok yang ingin diwujudkan adalah bagaimana seluruh potensi yang ada antara lain komponen masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, dapat bergerak dan berpartisipasi, saling bersinergi, bahu membahu dalam membangun bersama untuk Kota Bukittinggi. Kepada dunia usaha diminta untuk meningkatkan perannnya untuk membangun kota, sedangkan masyarakat khususnya generasi muda diharapkan dapat menggali potensi diri melalui bakat yang dimiliki dan di fasiltasi oleh

pemerintah. Disamping itu juga diharapkan peran pemangku agama, pemangku adat untuk saling mengisi sehingga diharapkan betul betul terwujud rasa memliki terhadap Kota Bukittinggi ini. Pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan optimal, efisien dan efektif dengan dukungan partisipasi dari pelaku pembangunan. Pada misi ini diemban tugas untuk merubah sikap, perilaku dan cara pandang dari pelaku pembangunan yaitu aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kota Bukittinggi. Selain itu juga ingin mewujudkan peningkatan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi vertikal, lembaga sosial kemasyarakatan, kepemudaan, organisasi profesi dan komponen masyarakat lainnya. Meningkatkan fungsi Mesjid, Mushala dan Surau sebagai basis untuk meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa melalui pengetahuan, penghayatan dan pengamalan agama Islam di tengah-tengah masyarakat kota.

Meningkatnya sinergitas dan peran serta antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari adanya program rutin yang dilakukan yakni kegiatan " Manunggal Sakato" . Pada program ini, seluruh elemen kota termasuk generasi muda dan dunia usaha jelas terihat saling bahu membahu untuk mewujudkan kebutuhan masing-masing kelurahan, yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat . Pemerintah Daerah hanya memberikan dana stimulan setiap tahunnya, dan untuk mewujudkan keinginan masyarakat , maka dilakukan partisipasi dalam bentuk bantuan swadaya, baik dari masyarakat maupun dunia usaha.

Untuk peran dunia usaha, maka akan diwujudkan dengan melibatakan dunai usaha, baik perbankan, non perbankan, perhotelan,asuransi, perusahaan pembiayaan, rumah makan restoran dll, untuk nyata ikut terlibat dalam membangun kota, dengan memanfaatkan dana tanggujawab sosial lingkungan(CSR). Kita tahu keterbatasan dana bagi pemerintah daerah, maka harus dilakukan usaha lain untuk pencapaian tujuan pembangunan. Dana Tanggungjawab Sosial Lingkungan ini merupakan kewajiban bagi dunia usaha untuk membaginya kepada lingkungan, sesuai dengan peratuan perundangan. Pemerintah Daerah mempunyai kekuatan untuk ikut terlibat dalam penggunaan dana TJSL ini untuk membiayai program Pemerintah.

Selanjutnya untuk menggerakkan peran generasi muda, maka perlu dilakukan event event baik dalam penggalian potensi bidang keagamaan, bidang seni, budaya, olah raga. Untuk itu perlu dilengkapi sarana dan prasarana untuk tempat generasi muda berkreasi dan menggali potensi diri. Dalam tujuan ini juga dilakukan sasaran untuk meramaikan kota disaat hari libur dengan pertunjuan generasi muda di areal wisata, seperti jam gadang, panorama, dll, untuk menghibur wisatawan sambil mengembangkan bakat kepada pengunjung, baik atraksi seni dan budaya, agama maupun olah raga, seperti pencak silat.

5.3.2. Tujuan Dan Sasaran Misi 2

Pada misi 2 ini hal yang akan diwujudkan adalah bagaimana bisa mewujudkan adanya peningkatan kinerja pemerintah secara profesional, transparan dan akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan, mewujudkan reformasi birokrasi. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah bagaimana bisa meningkatkan kapabilitas lembaga pemerintahan, dengan membuat indikator antar lain mewujudkan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan, agar *"the rightman and the rightplace"* betul- betul dapat diaplikasikan. Kita juga tahu, jika salah dalam penempatan orang/pejabat akan mempengaruhi kinerja dan otomatis target sasaran tidak akan tercapai.

Selain itu dalam meningkatkan kapabilitas lembaga pemerintah ini dengan cara meningkatkan nilai SAKIP atau Sistim Akuntanlbilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sakip ini adalah sistim yang terintegrasi dari sistim perencanaan , sistim penaggangaran, dan sistim pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistim akuntabilitas keuangan, dengan selalu mengupayakan nilai dan rangking yang meningkat dari tahun ke tahun terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tujuan lain yang akan dicapai dalam Misi 2 ini adalah mewujudkan reformasi birokrasi, dengan sasaran adalah mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Sebagai alat ukur sasaran ini adalah dengan mengharapkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan daerah. Selanjutnya keberhasilan tujuan ini diukur dari meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indek Kepuasan Layanan Publik.

5.3.3. Tujuan dan Sasaran Misi 3

Pada misi 3 ini terdapat 5 tujuan dan 8 sasaran. Adapun substansi dari Misi 3 ini adalah bagaimana bisa mewujudkan kota yang tertata rapi lengkap dengan sarana dan prasarana secara terpadu dengan berwawasan lingkungan, mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Pusaka Nasional dan dunia, serta meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga lainnya terhadap bencana bencana.

Dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan , maka hal yang akan di capai adalah ruang terbuka hijau baik untuk publik maupun untuk privat sesuai yang diamanatkan undang undang. Kemudian juga diukur keberhasilannya dengan fasilitas sosial yang representatif dan memenuhi standar lingkungan. Pemenuhan target universal acsess akan dicapai dengan pengukuran air minum layak, dan menurunnya rumah tangga kumuh serta pemenuhan sanitasi layak sesuai dengan target nasional tentang kawasan kumuh , yakni 100.0.100.

Peningkatan penataan ruang kota akan terwujud jika meningktanya kesesuaian pemanfaat ruang, dan berhasilnya dalam penuntasan terhadap,pelanggaran pemanfaatan tata ruang secara tertib. Bukittinggi sebagai kota pusaka nasional dan dunia akan terwujud jika adanya peningkatan cagar budaya yang dilestarikan, serta banyaknya bangunan yang bernilai sejarah adat, agama dan budaya.

Disamping itu sarana transportasi juga sangat mendukung pencapaian misi ini, dengan mengukur cakupan daerah yang terlayanan angkutan umum, faslitas keselamatan jalan yang selalu meningkat, serta kondisi jalan yang selalu membaik dari tahun ke tahun. Dalam menghadapi bencana maka kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana perlu ditingkatkan dengan mengkukur fasilitas sarana dan prasarana bencana dapat dilengkapi

5.3.4. Tujuan dan Sasaran Misi 4

Pada misi 4 ini, terdapat 4 tujuan yang diarahkan untuk mencapai sasaran. Meningkatkan peran koperasi dan UMKN dalam penunjang perekonomian kota, akan terwujud dengan berkembangnya koperasi, dengan menargetkan bertambahnya koperasi yang sehat. Perkembangan usaha mikro dengan meningkatkan jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil juga menjadi sasaran dalam perwujudan misi ke 4 ini.

Sistim perekonomian kota akan lebih berdaya guna dengan mewujudkan ekonomi kota yang sehat yang ditinjau dari berkembangnya jumlah investasi, dan berkembangnya industri kecil menengah dengan mempertimbangkan perkembangnan tenaga kerja, modal dan produksi. Meningatnya kesempatan kerja bagi masyarakat akan terwujud dengan menekan angka pengangguran terbuka serta meningkatanya jumlah pengusaha baru juga akan dapat mempercepat perwujudan misi ini.

5.3.5. Tujuan dan sasaran Misi 5

Pada hakikatnya misi 5 ini merupakan misi yang konsentrasinya pada kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, serta kesejahteraan sosial masyarakat. Bukittinggi kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata di wilayah Indonesia bagian barat yang disemangati dengan budaya yang bermartabat, masyarakat yang religius, kegiatan perdagangan yang maju, alam yang indah, kuliner yang berkelas, tertata, bersih dan sehat. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota Bukittinggi mempunyai derajat kesehatan yang tinggi dan sentra pelayanan kesehatan daerah sekitarnya. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi.

Misi ini terdapat 7 tujuan untuk mewujudkan makna dari misi tersebut, yakni dengan mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, yang diukur dari jumlah kunjungan wisata yang selalu meningkat, mewujudkan pendidikan yang berdaya unggul dan bermutu, dengan sasaran meningkatnya mutu pendidikan,meningkatnya nilai adat agama dan budaya, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang diukur dari meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, yang diukur dari meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, mewujudkan Bukittinggi sebagi pusat perdagangan yang berdaya saing, dengan sasaran meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan, meningkatnya konsumsi pangan serta mewujudkan masyarakat Kota Bukittinggi yang aman, tentram, dan tertib.

Selanjutnya target dan indikator RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5.5

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2016	2021	SKPD Penanggung Jawab
Misi 1:	Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat)					
Meningkatkan sinergitas pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya pembangunan fisik yang merupakan hasil keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	1. Peningkatan jumlah bantuan swadaya masyarakat, dunia usaha dalam pembangunan	Jumlah	72	72	Kantor PMPKN, Kecamatan
		2. Persentase Perusahanan /dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan	%	70	90	Bappeda
Meningkatkan aktifitas generasi muda dalam penggalian potensi diri (seni, budaya dan olahraga)	1. Meningkatnya event generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya	1. Event kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda	Jumlah	52	65	Dinas Budpar
		2. Sangar seni yang aktif	Jumlah	7	25	Dinas Budpar
	2. Meningkatnya event olahraga generasi muda/ kepemudaan	1. Jumah event keolahragaan bagi generasi muda/kepemudaan	Jenis	6	18	Dinas Dikpora
Meningkatkan	1. Meningaktnya fungsi	1. Kelompok/organisasi Remaja	Jumlah	5	24	Setda/Kesra/Kecam

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2016	2021	SKPD Penanggung Jawab
fungsi rumah ibadah	rumah ibadah	Mesjid yang aktif dalam bidang keagamaan 2. Jumlah Event keagamaan	 Jenis	 3	 15	atan
Misi 2: Meningkatkan Kinerja Pemerintah Secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan						
Mewujudkan pemerintahan yang professional transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	1. % pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan	%	50	90	BKD
		2. Capaian kinerja daerah (LPPD, SAKIP)	-	LPPD Rangking 65,LKIP C	LPPD Rangking 30, LKIP A	
		3. Jumlah inovasi pelayanan publik	Jumlah	1	6	Setda / Bappeda/Dishubkominfo/DPKAD/Organisasi
		4. % capaian program pembentukan peraturan daerah	%	19	10	DPRD/ Setda/hukum
Mewujudkan reformasi birokrasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	Inspektorat/ DPKAD
	Meningaktnya Kualitas pelayanan publik	1. Indeks kepuasan publik	%	30	80	BKD/Inspektorat
Misi 3: Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kota Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan						
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	Terpenuhinya RTH Kota	1. % RTH public 2. % RTH Privat	% %	8 5,50	17 10	DKP, Dinas PU, KLH Setda/ Bagian Pemerintahan/Bagian Hukum/KLH, Dinas PU
	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkunga	1. % fasilitas social yang representative dan memehuni standar linfkungan 2. % fasilitas umum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	% %	75 55	90 85	KLH KLH
	Pemenuhan target universal acsess (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh	1. Penyediaan air minum layak 2. Kawasan Kumuh 3. % Sanitasi Layak	% % %	93 - 95	100 0 100	Dinas PU Dinas PU Dinas PU
Peningkatan penataan ruang	Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang kota 2. Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan.	% %	55 50	70 80	Dinas PU Dinas PU
Menjadikan Bukittinggi sebagai Pusaka Nasional dan Dunia	Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya (BCB)	1. Jumlah penambahan pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama	Unit	1	6	Dinas Budpar, Kantor Perpustakaan dan Arsip
	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan bangunan					

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2016	2021	SKPD Penanggung Jawab
	bersejarah, adat dan agama					
Terwujudnya pelayanan lalin dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu	Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	1. Cakupan daeran yang terlayani angkutan umum 2. Fasilitas keselamatan jalan 3. Jalan berkondisi baik	% % %	81 71 86	86 76 95	Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas PU
Meningkatkan kesiap siagaan lembaga pemerintahan dan masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya kesiap siagaan lembaga pemerintahan dan masyarakat terhadap bencana	Fasilitas Kebencanaan	%	60	90	BPBD
Misi 4: Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna						
Meningkatkan peran koperasi dan UMK dalam menunjang perekonomian kota	Berkembangnya koperasi	1. Jumlah Koperasi sehat	Jml	12	17	Dinas Koperindag
	Berkembangnya usaha mikro	1. Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	Jml	5	105	Dinas Koperindag
Mewujudkan Perekonomian yang sehat	Berkembangnya investasi	1. Jumlah Investasi	Rp (Triliun)	1.884	3.035	BP2TPM
	Berkembangnya industry kecil menengah	1. Jumlah industry kecil menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan produksi)	Unit	5	40	Dinas Koperindag
Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyararakat	Meningkatnya lapangan kerja	1. Tingkat pengangguran terbuka	%	5,84	4,93	Dinas Sosnaker
Meningkatnya penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Pennerimaan Pajak daerah	Rp	34.758.804.463	54.402.227.101	DPKAD
Misi 5: Meningkatkan Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat						
Mewujudkan pariwisata yang berdaya saing	Meningkatkan kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Jml	483.950	617.657	Dinas Budpar
mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu	Meningkatkan mutu pendidikan	1.Harapan lama sekolah	Tahun	14,7	15	Disdikpora
		2.Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,85	11,20	Disdikpora
		3.APK Paud (3-6 Tahun)	%	86	88,50	Disdikpora
		4.Angka Putus sekolah jenjang SD, SMP	%	0,22	0,04	Disdikpora
		5.% Sekolah yang berakreditasi A SD	%	72,88	81,35	Disdikpora
		6. % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	%	54,50	90,90	Disdikpora
		7. % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMA	%	63,60	90,90	Disdikpora
		8. % Kompetensi keahlian yang berkareditasi A tingkat SMK	%	37,20	48,83	Disdikpora
	Terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan	1. Jumlah mata pelajaran muatan local pendidikan karakter berbasis adat dan budaya minangkabau	Jml	0	1	Disdikpora
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Angka harapan hidup	Tahun	72,36	73,14	DKK
		2. Puskesmas yang terakreditasi	Jml	2	4	DKK
		3. Cakupan jaminan layanan Kesehatan Masyarakat	%	81	95	DKK
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	1. Laju pertumbuhan penduduk 2. Tingkat Kemiskinan 3. Indeks pemberdayaan gender 4. Capaian PMKs yang mendapat bantuan perlindungan social	% % % %	1,71 4,23 70,84 80	1,38 2,84 75,84 88	Bappeda/PPKB Kantor PPKB Kantor PPKB Kantor PPKB

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2016	2021	SKPD Penanggung Jawab
		dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk				
Mewujudkan pusat perdagangan dan jasa yang berdaya saing	Meningkatnya nilai tambah sector perdagangan	1. Pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran	Rp Triliun	2.338	4.229	Dinas Pengelolaan Pasar/Dinas Koperindag
Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragama, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	84,1	85,2	Kantor Ketahanan Pangan
Meningkatkan Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan Kota	Terkendalinya stabilitas keamanan ketentranan dan ketertiban umum	1. Jumlah kasus pelanggaran gangguan ketertiban, ketentraman dan kemanan masyarakat yang tertangani	Kasus	650	250	Satpol PP

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, analitik, realistis, dan komprehensif. Strategi yang akan diwujudkan dalam kebijakan dan program merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan pada dasarnya adalah merupakan rincian cara atau upaya yang diperlukan untuk dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan kota sebagaimana telah diungkapkan pada Bab sebelumnya. Untuk menjaga konsistensi, maka perumusan strategi dikaitkan langsung dengan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana telah ditetapkan pada bab terdahulu.

Strategi biasanya dikaitkan dengan arah kebijakan pembangunan daerah bersangkutan. Hal ini dilakukan karena arah kebijakan pada dasarnya adalah merupakan keputusan dan intervensi pemerintah untuk dapat melaksanakan strategi pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan mengaitkan antara strategi dan arah kebijakan maka pencapaian sasaran pembangunan akan menjadi lebih terjamin. Selanjutnya, agar pembahasan menjadi lebih terarah, maka penyusunan strategi dan arah kebijakan ini dikaitkan langsung dengan misi pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan terdahulu dalam Bab VI RPJMD ini.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1

Misi 1: Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat)

Misi 1 terdiri dari 3 tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan sinergitas pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan
2. Meningkatkan aktifitas generasi muda dalam penggalian potensi diri (seni, budaya dan olahraga)
3. Meningkatkan fungsi rumah ibadah untuk penguatan iman dan taqwa bagi generasi muda

Untuk mewujudkan hal diatas maka strategi yang dilakukan adalah :

1. Menumbuh kembangkan sinergi dan kepedulian pelaku pembangunan
2. Meningkatkan pemanfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk penunjang Program pembangunan
3. Meningkatkan apresiasi terhadap lembaga seni, adat dan budaya
4. Meningkatkan aktifitas kesenian, adat dan budaya
5. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan budaya lokal untuk pemberdayaan masyarakat

6. Meningkatkan apresiasi terhadap event olahraga
7. Membudayakan gerakan kembali ke mesjid
8. Menggali potensi generasi muda di bidang agama

Arah kebijakan yang dilakukan adalah untuk pencapaian misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya adalah :

1. Melaksanakan program terpadu yang melibatkan dunia usaha, masyarakat/kelompok masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan bulan bakti gotong royong bersama masyarakat/kelompok masyarakat dan dunia usaha.
3. Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan dunia usaha
4. Menyusun regulasi tentang pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan lembaga kemasyarakatan di bidang seni, adat dan budaya
6. Melaksanakan event kesenian, adat dan budaya
7. Mengadakan pembinaan kepada sanggar seni, adat dan budaya
8. Meningkatkan event olahraga bagi generasi muda/Kepemudaan
9. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga
10. Mengadakan pembinaan kepada remaja mesjid
11. Membudayakan gerakan magrib mengaji.
12. Meningkatkan aktifitas anak dan remaja di rumah ibadah untuk penguatan iman dan taqwa.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 1

Misi 1 : Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat)

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Meningkatkan sinergitas pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan				
1	Meningkatnya pembangunan fisik yang merupakan hasil keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	1. Menumbuhkembangkan sinergi dan kepedulian pelaku pembangunan	1. Melaksanakan program terpadu yang melibatkan dunia usaha dan masyarakat.	1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
			2. Melaksanakan kegiatan bulan bakti gotong	2. Program Peningkatan Keberdayaan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
			royong bersama masyarakat dan dunia usaha	Masyarakat Pedesaan/Kelurahan
		3. Meningkatkan pemanfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk penunjang Program pembangunan	4. Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan dunia usaha 5. Menyusun regulasi tentang pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	3. Program Kerjasama Pembangunan
Tujuan 2 : Meningkatkan aktifitas generasi muda dalam penggalian potensi diri (seni, budaya dan olahraga)				
1	Meningkatnya event generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya	1. Meningkatkan apresiasi terhadap lembaga seni, adat dan budaya 2. Meningkatkan aktifitas kesenian, adat dan budaya	1. Meningkatkan koordinasi dan fasiltasi dengan lembaga kemasyarakatan di bidang seni, adat dan budaya 2. Melaksanakan event kesenian, adat dan budaya	1. Program pengelolaan Keragaman Budaya
		3. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan budaya lokal untuk pemberdayaan masyarakat	4. Mengadakan pembinaan kepada sanggar seni, adat dan budaya	2. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan Budaya
2	Meningkatnya event olahraga generasi muda	4. Meningkatkan apresiasi terhadap event olahraga	5. Meningkatkan event olahraga bagi generasi muda/kepemudaan 6. Meningkatkan sarana dan prasara olahraga	3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga 4. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Tujuan 3 : Meningkatkan fungsi rumah ibadah untuk penguatan iman dan taqwa bagi generasi muda				
1 2	Meningkatnya fungsi rumah ibadah Meningkatnya event keagamaan bagi generasi muda.	1. Membudayakan gerakan kembali ke mesjid 2. Menggali potensi generasi muda di bidang agama	1. Mengadakan pembinaan kepada remaja mesjid 2. Membudayakan gerakan magrib mengaji. 3. Meningkatkan aktfitas anak remaja di rumah ibadah untuk penguatan iman dan taqwa.	1. Program Peningkatan Pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2

Misi 2: Meningkatkan Kinerja Pemerintah Secara Profesional, Transparan, Akuntabel Dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan

Misi 2 terdiri dari 2 tujuan, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan
2. Mewujudkan reformasi birokrasi

Untuk mewujudkan hal diatas maka strategi yang dilakukan adalah :

1. Penguatan kebijakan dan implementasi sistim pengembangan karir ASN secara transparansi dan berbasis kompetensi
2. Peningkatan pelaksanaan manajemen ASN
3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang komprehensif dan aplikatif
4. Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
5. Meningkatkan intensitas koordinasi dan kemitraan dengan lembaga legislatif
6. Meningkatkan karakter SDM aparatur pengelola pembangunan yang terintegrasi dalam sistim birokrasi yang tertata rapi sesuai dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
7. Meningkatkan sinergitas antara pengawasan internal, ekstrenal dan penegak hukum.
8. Meningkatkan kulitas pelayanan publik
9. Pelimpahan sebahagian kewenangan ke Kecamatan dan kelurahan
10. Meningkatkan inovasi pelayanan publik
11. Menyiapkan dokumen perencanan yang konsisten, komperensif terukur dan aplikatif berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Arah kebijakan yang dilakukan adalah untuk pencapaian misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya adalah :

1. Meningkatkan kapasitas kompetensi aparatur
2. Mengevaluasi dan menganalisa jabatan dan beban kerja
3. Menerapkan sistim reward dan Punishment yang adil
4. Menyusun standar Operasinal prosedur dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
5. Sinkronisasi dan sinergitas dokumen perencanaan

6. Menyiapkan data dan informasi pembangunan yang valid dan akurat
7. Menyusun Regulasi tentang standar kelembagaan perangkat daerah
8. Meningkatkan intensitas kajian inovasi pelayanan publik
9. Menyusun regulasi tentang inovasi pelayanan publik
10. Meningkatakan kompetensi aparatur untuk menciptakan inovasi pelayanan publik
11. Menetapkan program pembuatan peraturan daerah (Propemperda)
12. Meningkatkan sistim pengawasan internal
13. Meningkatkan zona integritas wilayah bebas korupsi
14. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
15. Memenuhi sarana dan prasarana pendukung
16. Pemanfaatan Tekonologi Informasi

Tabel 6.2
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
MISI 2
MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MEMPUNYAI JIWA KEWIRAUSAHAAN

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan				
1	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	1. Penguatan kebijakan dan implementasi sistim pengembangan karir ASN secara transparansi dan berbasis kompetensi	1. Meningkatkan kapasitas komptensi aparatur	1. Program pendidikan kedinasan 2. Program peningkatan profesionalisme SDM aparatur
		2. Peningkatan pelaksanaan manajemen ASN	2. Mengevaluasi dan menganalisa jabatan dan beban kerja 3. Menerapan sistim reward dan Punishment yang adil	3. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
		3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang kompreshensif dan aplikatif	4. Menyusun standar Operasional prosedur dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 5. Sinkronisasi dan sinergitas dokumen perencanaan 6. Menyiapkan data dan informasi pembangunan yang valid dan akurat 7. Menyusun Regulasi tentang standar kelembagaan perangkat daerah	4. Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 6. Program perencanaan pembangunan daerah 7. Program pengembangan data /informasi 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		4. Menumbuh kembang kan jiwa kewirausahaan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	8. Meningkatkan intensitas kajian inovasi pelayanan publik 9. Menyusun regulasi tentang inovasi pelayanan publik 10. Meningkatakan kompetensi aparatur untuk menciptakan inovasi pelayanan publik	9. Program Peningkatan Pelayanan Publik
		5. Meningkatkan intensitas koordinasi dan kemitraan dengan lembaga legislatif	11. Menetapkan program pembuatan peraturan daerah (Propemperda)	10. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD 11. Program penataan peraturan perundang undangan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Tujuan 2 : Mewujudkan reformasi birokrasi				
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1. Meningkatkan karakter SDM aparatur pengelola pembangunan yang terintegrasi dalam sistim birokrasi yang tertata rapi sesuai dengan azaz tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 2. Meningkatkan sinergitas antara pengawasan internal, eksternal dan penegak hukum.	1. Meningkatkan sistim pengawasan internal 2. Meningkatkan zona intergritas wilayah bebas korupsi 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH) 2. Program peningkatan pengembangan dan pengelolaan aset daerah
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Pelimpahan sebahagian kewenangan ke Kecamatan dan kelurahan 5. Meningkatkan inovasi pelayanan publik 6. Menyiapkan dokumen perencanan yang konsisten, komperensif terukur dan aplikatif berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	4. Memenuhi sarana dan prasarana pendukung 5. Pemanfaatan Tekonologi Informasi	3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3

MISI 3: Meningkatkan Pembangunan, Penataan, Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Kota Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan

Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan 5 tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan

2. Peningkatan Penataan Ruang Kota
3. Menjadikan Bukittinggi sebagai kota Pusaka Nasional dan Dunia
4. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu
5. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana

Selanjutnya ditetapkan beberapa strategi untuk mencapai tujuan dimaksud, antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan taman kota (taman tematik dan hutan kota) yang dapat dijadikan taman rekreasi
2. Optimalisasi Penataan Ruang Kota
3. Penegakan regulasi penyediaan RTH Privat
4. Melengkapi sarana dan prasarana fasilitas publik yang lebih representatif memenuhi standar lingkungan
5. Pengembangan sistem air minum perpipaan
6. Penataan kawasan permukiman kumuh
7. Pengembangan rumah susun sewa
8. Ketersediaan sarana prasarana sanitasi dasar
9. Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
10. Penurunan beban pencemaran Batang Agam
11. Pengembangan sistem informasi dan data spasial
12. Optimalisasi penegakan Perda Tata Ruang
13. Revitalisasi kawasan yang memiliki BCB
14. Membangkitkan rasa kebanggaan terhadap kedaerahan melalui pembangunan rumah khas daerah minangkabau
15. Bukittinggi sebagai Ibu Kota PDRI
16. Pengawasan BCB
17. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi
18. Penataan Angkutan Umum Reguler
19. Penataan sistem transportasi
20. Penataan sistem perparkiran
21. pengembangan prasarana jalan dan pendukungnya
22. Pembatasan tonase kendaraan sesuai dengan kelas jalan sehingga fungsi jalan dapat maksimal sesuai dengan umur rencana

23. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana
24. Penguatan kelembagaan pemerintah dalam menangani bencana
25. Pengembangan aturan pemanfaatan air tanah dan pembangunan permukiman serta pemanfaatan kawasan budidaya

Arah kebijakan yang dilakukan adalah untuk pencapaian misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya adalah

1. Penyediaan dan pembelian lahan/tanah untuk penyediaan RTH publik .
2. Pembebasan lahan privat yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai ruang terbuka hijau
3. Mendorong penyediaan RTH yang mencukupi dan memadai (jalur hijau pada jaringan jalan, sempadan sungai, gedung perkantoran dan fasilitas publik lainnya).
4. Mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam peningkatan RTH Privat
5. Penyempurnaan dan Penerapan regulasi untuk penyediaan RTH privat
6. Penyempurnaan dan penerapan regulasi tentang RTRW beserta turunannya.
7. Menyiapkan regulasi yang mendukung pemenuhan sarana parasarana fasilitas publik yang berwawasan lingkungan
8. Pengawasan dan pengendalian pembangunan fasiliitas public
9. Membangun sarana prasarana kota pendukung smart city.
10. Penegakan hukum
11. Meningkatkan kualitas jaringan pipa air bersih
12. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum.
13. Meningkatkan sarana dan prasarana air minum yang aman dan sehat
14. Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas/sarana penunjang (PSU) kawasan
15. Penataan rumah yang layak huni
16. Penyelenggaraan penataan lingkungan perumahan pemukiman berbasis masyarakat
17. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
18. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase/intercity connection

19. Memperkuat kelembagaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)/ Pokja Sanitasi
20. Normalisasi Batang Agam
21. Mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna
22. Meningkatkan cakupan layanan air limbah melalui pembangunan perpipaan dan IPAL terpusat
23. Mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui pembangunan IPAL Komunal dan IPLT standar lingkungan hidup
24. Mengembangkan gerakan sungai bersih
25. Penegakan perda sampah
26. Menerapkan sistem informasi dan data spasial berbasis web
27. Optiomalisasi peran dan fungsi PPNS
28. Penyempurnaan regulasi rencana tata ruang beserta turunannya.
29. Memberikan bantuan pemugaran BCB
30. Memberikan insentif terhadap pembangunan rumah adat
31. Meningkatkan kerjasama dengan balai pelestarian cagar budaya
32. Pemugaran dan pembangunan kembali bangunan cagar budaya, adat dan agama yang memiliki nilai sejarah
33. Mengusahakan pengakuan pemerintah, Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan
34. Membangun monumen sejarah bukti Bukittinggi sebagi Ibukota PDRI
35. Dokumentasi sejarah PDRI di Bukitinggi
36. Meningkatkan sarana prasarana sistem transportasi
37. Pengembangan kawasan pendestrian
38. Melaksanakan rekayasa lalu lintas
39. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan transportasi/intercity connection
40. Pengendalian dan keselamatan transportasi
41. Penyusunan dan penegakan Regulasi yang terkait dengan perhubungan dan lalu lintas
42. Menyediakan data base perhubungan
43. Pengembangan dan pemeliharaan Area Trafic Control System
44. Menata kawasan perparkiran
45. Menghapuskan terminal bayangan untuk angkot dan angdes

46. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan
47. Aktualisasi data jalan dan leger jalan
48. Menjalin kerjasama dengan instansi vertikal teknis yang ada di daerah untuk pemeliharaan jalan dan pendukungnya
49. Menyiapkan tenaga terlatih berbasis masyarakat
50. Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Tabel 6.3
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
MISI 3
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan				
1	Terpenuhinya RTH Kota	1. Membangun dan mengembangkan taman kota (taman tematik dan hutan kota) yang dapat dijadikan taman rekreasi 2. Optimalisasi Penataan Ruang Kota.	1. Penyediaan dan pembelian lahan/tanah untuk penyediaan RTH publik. 2. Pembebasan lahan privat yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai ruang terbuka hijau 3. Mendorong penyediaan RTH yang mencukupi dan memadai (jalur hijau pada jaringan jalan, sempadan sungai, gedung perkantoran dan fasilitas publik lainnya).	1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2. Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 3. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
		3. Penegakan regulasi penyediaan RTH Privat	4. Mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam peningkatan RTH Privat 5. Penyempurnaan dan Penerapan regulasi untuk penyediaan RTH privat	4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
2	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	4. Melengkapi sarana dan prasarana fasilitas publik yang lebih representatif memenuhi standar lingkungan	6. Menyiapkan regulasi yang mendukung pemenuhan sarana parasarana fasilitas publik yang berwawasan lingkungan 7. Pengawasan dan pengendalian pembangunan fasiliitas publik 8. Membangun sarana prasarana kota pendukung smart city 9. Penegakan hukum	5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	5. Pengembangan sistem air minum perpipaan	10. Meningkatkan kualitas jaringan pipa air bersih 11. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum. 12. Meningkatkan sarana dan prasarana air minum yang aman dan sehat	6. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		6. Penataan kawasan permukiman kumuh 7. Pengembangan rumah susun sewa	13. Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas/sarana penunjang (PSU) kawasan 14. Penataan rumah yang layak huni 15. Penyelenggaraan penataan lingkungan perumahan pemukiman berbasis masyarakat 16. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya	7. Program Pengembangan Perumahan 8. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 9. Program Lingkungan Sehat Perumahan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
		8. Ketersediaan sarana prasarana sanitasi dasar 9. Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 10. Penurunan beban pencemaran Batang Agam	17. mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase/intercity connection 18. Memperkuat kelembagaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)/ Pokja Sanitasi 19. Normalisasi Batang Agam 20. Mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna 21. Meningkatkan cakupan layanan air limbah melalui pembangunan perpipaan dan IPAL terpusat 22. Mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui pembangunan IPAL Komunal dan IPLT standar lingkungan hidup 23. Mengembangkan gerakan sungai bersih 24. Penegakan perda sampah	10. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
				11. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
				12. Program Peningkatan pengendalian polusi
				13. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
				14. Program pengendalian banjir
Tujuan 2 : Peningkatan Penataan Ruang Kota				
1	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	1. Pengembangan sistem informasi dan data spasial 2. Optimalisasi penegakan Perda Tata Ruang	1. Menerapkan sistem informasi dan data spasial berbasis web 2. Optiomalisasi peran dan fungsi PPNS 3. Penyempurnaan regulasi rencana tata ruang beserta turunannya.	1. Program Perencanaan Tata Ruang
				2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Tujuan 3 : Menjadikan Bukittinggi sebagai kota Pusaka Nasional dan Dunia				
1	Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya (BCB)	1. Revitalisasi kawasan yang memiliki BCB	1. Memberikan bantuan pemugaran BCB	1. Program Pengembangan nilai budaya
2	Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama	2. Membangkitkan rasa kebanggaan terhadap kedaerahan melalui pembangunan rumah khas daerah minangkabau 3. Bukittinggi sebagai Ibu Kota PDRI 4. Pengawasan BCB	2. Memberikan insentif terhadap pembangunan rumah adat 3. Meningkatkan kerjasama dengan balai pelestarian cagar budaya 4. Pemugaran dan pembangunan kembali bangunan cagar budaya, adat dan agama yang memiliki nilai sejarah 5. Mengusahakan pengakuan pemerintah, Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan 6. Membangun monumen sejarah bukti Bukittinggi sebagi Ibukota PDRI 7. Dokumentasi sejarah PDRI di Bukitinggi	2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Pengelolaan keragaman budaya 4. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 5. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Tujuan 4 Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu				
1	Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	1. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi 2. Penataan Angkutan Umum Reguler 3. Penataan sistem transportasi 4. Penataan sistem perparkiran	1. Meningkatkan sarana prasarana sistem transportasi 2. Pengembangan kawasan pendestrian 3. Melaksanakan rekayasa lalu lintas 4. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan transportasi/ intercity connection 5. Pengendalian dan keselamatan transportasi 6. Penyusunan dan penegakan Regulasi yang terkait dengan perhubungan dan lalu lintas 7. Menyediakan data base perhubungan 8. Pengembangan dan	1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 2. Program Peningkatan pelayanan angkutan 3. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 4. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 5. Program peningkatan kelaikan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
			pemeliharaan Area Trafic Control System 9. Menata kawasan perparkiran 10. Menghapuskan terminal bayangan untuk angkot dan angdes	pengoperasian kendaraan bermotor
		5. Pengembangan prasarana jalan dan pendukungnya	11. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan 12. Aktualisasi data jalan dan leger jalan	6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		6. pembatasan tonase kendaraan sesuai dengan kelas jalan sehingga fungsi jalan dapat maksimal sesuai dengan umur rencana	13. Menjalin kerjasama dengan instansi vertikal teknis yang ada di daerah untuk pemeliharaan jalan dan pendukungnya	7. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
				8. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Tujuan 5 : Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana				
1	Meningkatnya kesiapsiagaan lembaga pemerintah dan masyarakat terhadap bencana	1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana	1. Menyiapkan tenaga terlatih berbasis masyarakat 2. Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan bencana	1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
		2. penguatan kelembagaan pemerintah dalam menangani bencana		2. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4

Pada misi 4 ini terdapat 4 tujuan yaitu Meningkatkan peran koperasi dan UMK dalam menunjang perekonomian kota dengan sasaran Berkembangnya koperasi, Berkembangnya usaha mikro, Tujuan ke dua adalah Mewujudkan perekonomian kota yang sehat, dnegan sasaran Berkembangnya investasi dan Berkembangnya Industri Kecil Menengah. Sedangkan tujuan ke tiga adalah Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan sasaran Meningkatnya lapangan kerja dan Meningkatnya wirausaha baru. Terkahir tujuan ke empat dalah Meningkatnya penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan dengan sasaran Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

MISI 4 : MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI PERKOTAAN SECARA LEBIH BERDAYA GUNA

Misi 4 akan diwujudkan melalui beberapa tujuan yaitu :

1. Meningkatkan peran koperasi dan UMK dalam menunjang perekonomian kota
2. Mewujudkan perekonomian kota yang sehat
3. Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat
4. Meningkatnya penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan

Strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan ini adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM pengurus dan karyawan koperasi
2. Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap aturan perundang-undangan tentang perkoperasian
3. Meningkatkan kontribusi dan berkembangnya koperasi dan UMKM
4. Mendorong peningkatan peran dan fungsi dekopin dalam membina koperasi
5. Peningkatan skala usaha mikro
6. Mendorong berkembangnya penanaman modal di berbagai sektor
7. Meningkatkan iklim investasi melalui harmonisasi dan penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal (kemudahan dalam berinvestasi)
8. Memperluas akses berusaha bagi masyarakat dan meningkatkan nilai tambah produk industri berbasis keunikan budaya dan lingkungan
9. Meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk industri kecil dan menegah
10. Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal
11. Mengembangkan produk unggulan kota

12. Pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial melalui pengenalan produk dan promosi offline dan online
13. Peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan
14. Peningkatan daya saing (keterampilan dan kualitas) tenaga kerja sesuai dengan kompetensi
15. Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja
16. Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
17. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah

Sedangkan arah kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan manajemen usaha dan keuangan koperasi
2. Meningkatkan pengawasan terhadap koperasi
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan, perlindungan, dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM
4. Meningkatkan koordinasi dengan Dekopin
5. Meningkatkan kapasitas SDM, pengelolaan usaha dan keuangan usaha mikro
6. Membentuk dan memberdayakan Pusat layanan Usaha Tertpadu (PLUT) UMKM
7. Menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan penanaman modal
8. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal
9. Memberikan insentif dalam penanaman modal
10. Memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk bermitra dengan pengusaha PMA/PMDN;
11. Memfasilitasi kemudahan akses perizinan permodalan bagi Industri Kecil Menengah
12. Peningkatan pelatihan SDM yang komprehensif dan berkualitas guna mewujudkan industri yang kompetitif
13. Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi.

14. Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif
15. Mengembangkan inovasi di bidang industri
16. Mengembangkan teknologi tepat guna (TTG) untuk mendukung produktivitas IKM
17. Menyusun regulasi tentang penanaman modal
18. Memberikan kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja melaui pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan kreativitas bagi para pencari kerja
19. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.
20. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan memfasilitasi wirausaha pemula.
21. Mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru
22. Membangun Sistem Pengawasan Pajak dan retribusi Sebagai Sistem Pengendalian Internal Yang Handal
23. Menerapkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah berbasis TIK
24. Meningkatkan pendapatan daerah melalui riset potensi daerah

TABEL 6.4
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DI MISI 4
MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI PERKOTAAN SECARA LEBIH BERDAYA GUNA

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Meningkatkan peran koperasi dan UMK dalam menunjang perekonomian kota				
1	Berkembangnya koperasi	1. Peningkatan kapasitas SDM pengurus dan karyawan koperasi 2. Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap aturan perundang-undangan tentang perkoperasian 3. Meningkatkan kontribusi dan berkembangnya koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan manajemen usaha dan manajemen keuangan koperasi 2. Meningkatkan pengawasan terhadap koperasi 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan, perlindungan, dukungan usaha bagi koperasi dan	1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
			UMKM 4. Meningkatkan Koordinasi dengan Dekopin	
2	Berkembangnya usaha mikro	4. Peningkatan skala usaha mikro	5. Meningkatkan kapasitas SDM, pengelolaan usaha dan keuangan usaha mikro 6. Membentuk dan memberdayakan Pusat layanan Usaha Tertpadu (PLUT) UMKM	1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
Tujuan 2 : Mewujudkan perekonomian yang sehat				
1	Berkembangnya investasi	1. Mendorong berkembangnya penanaman modal di berbagai sektor 2. Meningkatkan iklim investasi melalui harmonisasi dan penyederhanaan regulasi yang mengatur tentang Penanam Modal (Kemudahan dalam berinvestasi)	1. menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan penanaman modal 2. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal 3. Memberikan insentif dalam penanaman modal	1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
			4. Memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk bermitra dengan pengusaha PMA/PMDN;	1. Program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah
2	Berkembangnya Industri Kecil Menengah	1. Memperluas akses berusaha bagi masyarakat dan meningkatkan nilai tambah produk industri berbasis keunikan budaya dan lingkungan. 2. Meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk industri kecil dan menegah 3. Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal	5. Memfasilitasi kemudahan akses perizinan permodalan bagi Industri Kecil Menengah 6. Peningkatan pelatihan SDM yang komprehensif dan berkualitas guna mewujudkan industri yang kompetitif 7. Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan	2. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat 3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
		yang menyerap tenaga kerja lokal 4. Mengembangkan produk unggulan kota 5. Pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial melalui pengenalan produk dan promosi offline dan online 6. Peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan	standarisasi internasional dalam produksi. 8. Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif.	
			9. Mengembangkan inovasi di bidang industri 10. Mengembangkan teknologi tepat guna (TTG) untuk mendukung produktivitas IKM 11. Menyusun regulasi tentang penanaman modal	4. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Tujuan 3 : Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat				
1	Meningkatnya lapangan kerja	1. Peningkatan daya saing (keterampilan dan kualitas) tenaga kerja sesuai dengan kompetensi 2. Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja	1. Memberikan kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja melaui pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan kreativitas bagi para pencari kerja 2. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		3. Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.	3. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan memfasilitasi wirausaha pemula. 4. Mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru	2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Tujuan 4 : Meningkatnya penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan				
1	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	1. Membangun Sistem Pengawasan Pajak dan retribusi Sebagai Sistem Pengendalian Internal Yang Handal	1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
			2. Menerapkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah berbasis TIK. 3. Meningkatkan pendapatan daerah melalui riset potensi daerah	

6.5. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 5

MISI 5: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASAYARAKAT,

Misi tersebut akn terwujud dengan terlebih dahulu menetapkan beberapa tujuan, yaitu

1. Mewujudkan pariwisata yang berdaya saing
2. Mewujudkan pendidikan yang berdaya saing
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
5. Mewujudkan pusat perdagangan dan jasa yang berdaya saing
6. Meningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi
7. Meningkatkan Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan Kota

Adapun strategi yang ditetapkan dalam mencapaian tujuan adalah :

1. Optimalisasi pemasaran pariwisata yang kreatif, efektif dan terpadu
2. Mengembangkan pariwisata MICE (Meetings, Incentives, Converence, Exhibitions) dan ekowisata berbasis kearifan budaya minang.
3. Penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata hospitality dan sapta pesona serta standarisasi usaha pariwisata
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata
5. Meningkatkan pendidikan anak di usia dini
6. Meninjau Ulang regulasi pendidikan

7. Mewujudkan rintisan Wajar 12 tahun
8. Mengorientasikan pendidikan terhadap MEA
9. Memfasilitasi pendirian perguruan Tinggi
10. Memenuhi 8 standar pendidikan bagi semua tingkat pendidikan
11. Mendorong masyarakat Kota Bukittinggi untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi
12. Melengkapi mata pelajaran Muatan Lokal dengan agama, adat dan lingkungan hidup berbasis budaya lokal
13. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan Ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas
14. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
15. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
16. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
17. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
18. Mengefektifkan program keluarga berencana
19. Meningkatkan kualitas perempuan dan anak
20. Tertib administrasi kependudukan.
21. Intervensi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan basis data terpadu (BDT)
22. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan dan pemberdayaan PMKS
23. Pengembangan pasar tradisional dengan memfasilitasi lokasi untuk PKL
24. Menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok
25. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen
26. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri untuk membatasi penggunaan produk impor.
27. Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui upaya pengolahan pangan berbahan baku tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya;
28. Mengintensifkan operasional Keamanan, ketentraman dan Ketertiban umum
29. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan.

Arah Kebijakan dalam mencapai Misi tersebut adalah :

1. Pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak dan elektronik serta website dan melaksanaan event kepariwisataan (berskala lokal, nasional dan internasional)
2. Menyediakan dan memfasilitasi pengembangan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan pariwisata MICE

3. Menciptakan objek wisata baru
4. Mengembangkan desa/kampung wisata dan daya tarik wisata yang hospitality dan sapta pesona serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata
5. Merevitalisasi daya tarik wisata dan mengembangkan agro wisata dan wisata minat khusus
6. Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA)
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PAUD
8. Memberikan beasiswa kepada siswa miskin
9. Meningkatkan peran serta msayarakat (dewan pendidikan)
10. Memberikan pembekalan kepada peserta didik dalam menghadapai MEA.
11. Melakukan pemerataan sebaran siswa ke seluruh sekolah sesuai rayon/sistem online
12. Meningkatkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di semua tingkat pendidikan
13. Menyiapkan pola ruang untuk pendirian perguruan tinggi
14. Membudayakan dan memfasilitasi gerakan satu sarjana satu keluarga
15. Menyusun Silabus Mata pelajaran Muatan Lokal dengan agama, adat dan budaya yang berkesinambungan
16. Memperkuat upaya promotif dan preventif
17. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (continuum of care)
18. Intervensi berbasis resiko kesehatan
19. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah
20. Meningkatkan intensitas dan kuantitas program KB
21. Melibatkan elemen masyarakat dalam menyukseskan program KB
22. Meningkatkan intensitas pengawasan terhadap administrasi kependudukan
23. Meningkatkan program bantuan sosial yang tepat sasaran
24. Meningkatkan peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PMKS) dalam mengurangan dan pemberdayaan PMKS
25. Revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi dengan penataan PKL dan perpakiran untuk menciptakan kawasan perdagangan yang kondusif, tertib dan teratur
26. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang
27. Pengembangan UPT kemetrologian daerah

28. Melaksanakan pengawasan terhadap barang beredar
29. Meningkatkan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen dan menyelesaikan permasalahan pengaduan konsumen
30. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya
31. Meningkatkan konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga melalui sosialisasi dan peningkatan citra produk dalam negeri.
32. Penerapan menu beragam bergizi, sehat, aman dan halal.
33. Meningkatkan koordinasi dan pelibatan instansi terkait.
34. Meningkatkan sosialisasi perda
35. Penguatan kelembagaan masyarakat

Tabel 6.5
Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 5

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASAYARAKAT

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Mewujudkan pariwisata yang berdaya saing				
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Optimalisasi pemasaran pariwisata yang kreatif, efektif dan terpadu	1. Pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak dan elektronik serta website dan melaksanaan event kepariwisataan (berskala lokal, nasional dan internasional)	1. Program pengembangan pemasaran pariwisata
		2. Mengembangkan pariwisata MICE (Meetings, Incentives, Converence, Exhibitions) dan ekowisata berbasis kearifan budaya minang.	2. Menyediakan dan memfasilitasi pengembangan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan pariwisata MICE . 3. Menciptakan objek wisata baru	2. Program pengembangan kemitraan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
		3. Penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata hospitality dan sapta pesona serta standarisasi usaha pariwisata 4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata	4. Mengembangkan desa/kampung wisata dan daya tarik wisata yang hospitality dan sapta pesona serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata 5. Merevitalisasi daya tarik wisata dan mengembangkan agro wisata dan wisata minat khusus 6. Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA)	3. Program pengembangan destinasi wisata
Tujuan 2 : Mewujudkan pendidikan yang berdaya saing				
1	Meningkatnya mutu pendidikan	1. Meningkatkan pendiidikan anak di usia dini 2. Meninjau Ulang regulasi pendidikan 3. Mewujudkan rintisan Wajar 12 tahun 4. Mengorientasikan pendidikan terhadap MEA 5. Memfasilitasi pendirian perguruan Tinggi 6. Memenuhi 8 standar pendidikan bagi semua tingkat pendidikan 7. Mendorong masyarakat Kota Bukittinggi untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PAUD 2. Memberikan beasiswa kepada siswa miskin 3. Meningkatkan peran serta masayarakat (dewan pendidikan) 4. Memberikan pembekalan kepada peserta didik dalam menghadapai MEA. 5. Melakukan pemerataan sebaran siswa ke seluruh sekolah sesuai rayon/sistim online 6. Meningkatkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di semua tingkat pendidikan 7. Menyiapkan pola ruang untuk pendirian perguruan tinggi 8. Membudayakan dan memfasilitasi gerakan satu sarjanan satu keluarga.	1. Program Pendidikan bagi anak usia dini 2. Program Wajib belajar 9 tahun 3. Program pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Luar Biasa 5. Program pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan 6. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 7. Program pendidikan Non Formal

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
2	Terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama,adat dan budaya dalam pendidikan	8. Melengkapi mata pelajaran Muatan Lokal dengan agama, adat dan lingkungan hidup berbasis budaya lokal	9. Menyusun Silabus Mata pelajaran Muatan Lokal dengan agama, adat dan budaya dan berkesinambungan	8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Tujuan 3 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan Ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas 2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat 3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 4. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 5. Meningkatkan ketersediaan, keterjangakauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan 6. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan berkualitas	1. Memperkuat upaya promotif dan preventif 2. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (continuum of care) 3. Intervensi berbasis resiko kesehatan 4. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah	1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 2. Program perbaikan Gizi Masyarakat 3. Program Pencegahan Pananggulangan penyakit menular 4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5. Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masayarakat 6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 7. Program Pengadaan peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya 8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
				9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
				10. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat				
1	Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindunngan anak	1. Mengefektifkan program keluarga berencana 2. Meningkatan kualitas perempuan dan anak	1. Meningkatkan intensitas dan kuantitas program KB	1. Program Keluarga Berencana
			2. Melibatkan elemen masyarakat dalam menyukseskan program KB	2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
				3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
				4. Program penigkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
		3. Tertib administrasi kependudukan.	3. Meningkatkan intensitas pengawasan terhadap administrasi kependudukan	5. Program penataan Adminstrasi kependidukan
		4. Intervensi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan basis	4. Meningkatkan program bantuan sosial yang tepat sasaran 5. Meningkatkan peran serta	6. Program pemberdayaan fakir miskin, KOmunitas

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
		data terpadu (BDT) 5. Miningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan dan pemberdayaan PMKS	potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PMKS) dalam mengurangan dan pemberdayaan PMKS	Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Tujuan 5 : Mewujudkan pusat perdagangan dan jasa yang berdaya saing				
1	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	1. Pengembangan pasar tradisional dengan memfasilitasi lokasi untuk PKL	1. Revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi dengan penataan PKL dan perpakiran untuk menciptakan kawasan perdagangan yang kondusif, tertib dan teratur	1. Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar 2. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
		2. Menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok 3. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen 4. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri untuk membatasi penggunaan produk impor	2. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang 3. Pengembangan UPT kemetrologian daerah 4. Melaksanakan pengawasan terhadap barang beredar 5. Meningkatkan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen dan menyelesaikan permasalahan pengaduan konsumen 6. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya 7. Meningkatkan konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga melalui sosialisasi dan peningkatan citra produk dalam negeri	3. Program peningakatan efisiensi perdagangan dalam negeri

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Tujuan 6 : Meningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi				
1	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman berbasis sumberdaya lokal	1. Pengembangan dan percepatan diversifkasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal	1. Penerapan menu beragam bergizi, sehat,aman dan halal	1. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan
Tujuan 7 : Meningkatkan Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan Kota				
1	Terkendalinya Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum	1. Mengintensifkan operasional Keamanan, ketentraman dan Ketertiban umum 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan,ketentraman dan ketertiban lingkungan.	1. Meningkatkan koordinasi dan pelibatan instansi terkait. 2. Meningkatkan sosialisasi perda 3. Penguatan kelembagaan masyarakat	1. Program Pemeliharaan Keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak krimanal 2. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah I ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam periode 5 tahun mendatang. Program-program tersebut, merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan Walikota dan Wakil Walikota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam implementasinya secara operasional, program-program yang telah dirumuskan harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sekaligus ditentukan Perangkat Daerah yang menjadi penanggung jawab dari setiap program tersebut, sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah disusun dengan tujuan untuk menggambarkan keterkaitan bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut:

1. Kebijakan pada **perspektif masyarakat/layanan** adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada **perspektif proses internal** adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses

penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.

3. Kebijakan pada **perspektif kelembagaan** yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada **perspektif keuangan** yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun. Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

7.1.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 1 :

Tabel 7.1
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
UNTUK MISI 1 (MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI BERBAGAI POTENSI PEMANGKU KEPENTINGAN (PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT).

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Meningkatkan sinergitas pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan									
1	Meningkatnya pembangunan fisik yang merupakan hasil keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	1. Menumbuh kembangkan sinergi dan kepedulian pelaku pembangunan	1. Melaksanakan program terpadu yang melibatkan dunia usaha,masyarakat 2. Melaksanakan kegiatan bulan bakti gotong royong bersama masyarakat dan dunia usaha	Peningkatan Jumlah Bantuan swadaya masyarakat, dunia usaha dalam pembangunan	72	72	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dan desa Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Kantor PMPKN, Kecamatan Kantor PMPKN, Kecamatan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		2. Meningkatkan pemanfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk penunjang Program pembangunan	3. Melakukan Koordinasi dana kerjasama dengan dunia usaha 4. Menyusun regulasi tentang pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Persentase Perusahanan /dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.	70	90	Program Kerjasama Pembangunan	Fungsi Penunjang urusan	Bappeda
Tujuan 2 : Meningkatkan aktifitas generasi muda dalam penggalian potensi diri (seni, budaya dan olahraga)									
2	Meningkatnya event generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya	1. Meningkatkan apresiasi terhadap lembaga seni, adat dan budaya 2. Meningkatkan aktifitas kesenian, adat dan budaya	1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan lembaga kemasyarakatan di bidang seni, adat dan budaya. 2. Melaksanakan event kesenian, adat dan budaya	Event kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda	52	65	Program pengelolaan Keragaman Budaya	Urusan Kebudayaan	Dinas Budpar

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		3. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan budaya lokal untuk pemberdayaan masyarakat	3. Mengadakan pembinaan kepada sanggar seni, adat dan budaya	Sanggar seni yang aktif	7	25	Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan Budaya	Urusan Kebudayaan	Dinas Budpar
3	Meningkatnya event olahraga generasi muda/kepemudaan	1. Meningkatkan apresiasi terhadap event olahraga	1. Meningkatkan event olahraga bagi generasi muda/kepemudaan 2. Meningkatkan sarana dan prasara olahraga	Jumlah Event keolahragaan bagi generasi muda	6	18	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Urusan kepemudaan dan olah raga Urusan kepemudaan dan olah raga	Dinas Dikdispora Dinas Dikdispora
Tujuan 3 : Meningkatkan fungsi rumah ibadah untuk penguatan iman dan taqwa bagi generasi muda									
4	Meningkatnya fungsi rumah ibadah	1. Membudayakan gerakan kembali ke mesjid 2. Menggali potensi generasi	1. Mengadakan pembinaan kepada, anak-anak dan remaja mesjid 2. Membudayakan	Kelompok/organisasi Remaja yang aktif dalam bidang keagamaan Jumlah Event	5	24	Program Peningkatan Kulaitas Pemahaman dan pengamalan	Fungsi penunjang Urusan	Setda/Kesra /Kecamatan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		muda di bidang agama	gerakan magrib mengaji 3. Meningkatkan aktfitas remaja di rumah ibadah untuk penguatan iman dan taqwa.	keagamaan	3	15	agama dan pembinaan kerukunan beragama		

7.1.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 2

Tabel 7.2.

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SERTA INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA PAGU PENDANAAN MISI 2 (MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MEMPUNYAI JIWA KEWIRAUSAHAAN)

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan									
1	Meningkatnya kapabilitas lembaga pemerintahan	1. Penguatan kebijakan dan implementasi sistim pengembangan karir ASN secara transparansi dan berbasis kompetensi 2. Peningkatan pelaksanaan manajemen ASN 3. Meningkatkan kualitas	1. Meningkatkan kapasitas komptensi aparatur 2. Mengevaluasi dan menganalisa jabatan dan beban kerja 3. Menerapan sistim reward dan Punishment yang adil	% pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan Capaian kinerja daerah (LPPD, SAKIP)	50% LPPD RANKING 65, LKIP C	90% LPPD RANKING 30, LKIP A	Program pendidikan kedinasan Program peningkatan profesionalisme SDM aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Fungsi penunjang Urusan Fungsi penunjang Urusan Fungsi penunjang Urusan	BKD BKD BKD Setda/Organisasi /BKD

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		perencanaan yang kompreshensif dan aplikatif	4. Menyusun standar Operasinal prosedur dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 5. Sinkronisasi dan sinergitas dokumen perencanaan 6. Menyiapkan data dan informasi pembangunan yang valid dan akurat				Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program perencanaan pembangunan daerah	Fungsi penunjang Urusan Fungsi penunjang Urusan Fungsi penunjang Urusan	Setda Bappeda Dishubkominfo Setda Bappeda Dishubkominfo Bappeda
		4. Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	7. Menyusun regulasi tentang inovasi pelayanan publik 8. Meningkatkan intensitas kajian inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik	1	6	Program pengembangan data /informasi/statistik daerah Program Peningkatan dan	Fungsi penunjang Urusan Fungsi penunjang	Setda/Bappeda Dishubkominfo

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			9. Menyusun regulasi tentang inovasi pelayanan publik 10. Meningkatkan kompetensi aparatur untuk menciptakan inovasi pelayanan publik				Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pelayanan Publik	Urusan Fungsi penunjang Urusan	DPKAD Setda/Organisasi
		5. Meningkatkan intensitas koordinasi dan kemitraan dengan lembaga legislatif	11. Menetapkan program pembuatan peraturan daerah (Properda)	% capaian program pembentukan peraturan daerah	19	10	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD Program penataan peraturan perundang undangan	Fungsi penunjang Urusan Fungsi penunjang Urusan	DPRD Setda/Hukum
Tujuan 2 : Mewujudkan reformasi birokrasi									

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1. Meningkatkan karakter SDM aparatur pengelola pembangunan yang terintegrasi dalam sistim birokrasi yang tertata rapi sesuai dengan azaz tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 2. Meningkatkan sinergitas antara pengawasan internal, ekstrenal dan penegak hukum.	1. Meningkatkan sistim pengawasan internal 2. Meningkatkan zona intergritas wilayah bebas korupsi 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH) Program peningkatan pengembangan dan pengelolaan aset daerah	Fungsi penunjang Urusan Fungsi penunjang Urusan	Inspektorat DPKAD
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan kulitas pelayanan publik 2. Pelimpahan sebahagian kewenangan ke	1. Memenuhi sarana dan prasarana pendukung 2. Pemanfaatan Tekonologi Informasi	Indeks kepuasan layanan publik	30%	80%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan	Fungsi penunjang Urusan Fungsi penunjang	BKD Inspektorat

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		Kecamatan dan kelurahan 3. Meningkatkan inovasi pelayanan publik 4. Menyiapkan dokumen perencanan yang konsisten, komperensif terukur dan aplikatif berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan					Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Urusan	

7.1.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 3

Tabel 7.3

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SERTA INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA PAGU PENDANAAN MISI 3 (MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN, DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN)

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan									
1	Terpenuhinya RTH Kota	1. Membangun dan mengembangkan taman kota (taman tematik dan hutan kota) yang dapat dijadikan taman rekreasi 2. Optimalisasi Penataan Ruang Kota	1. Penyediaan dan pembelian lahan/tanah untuk penyediaan RTH 2. Pembebasan lahan privat yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai ruang terbuka hijau 3. Mendorong penyediaan RTH yang mencukupi dan memadai (jalur hijau pada jaringan jalan,	% RTH Publik % RTH Private	8% 5,50%	17% 10%	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Peningkatan kualitas dan	Lingkungan Hidup Fungsi penunjang Urusan Lingkungan Hidup	DKP DINAS PU Kantor LH Setda/Bagian Pemerintahan/ Bagian Hukum Kantor Lingkungan Hidup

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			sempadan sungai, gedung perkantoran dan fasilitas publik lainnya).				akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup		
		3. Penegakan regulasi penyediaan RTH Privat	4. Mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam peningkatan RTH Privat 5. Penyempurnaan dan Penerapan regulasi untuk penyediaan RTH privat				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas PU
2	Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	4. Melengkapi sarana dan prasarana fasilitas publik yang lebih representatif memenuhi standar lingkungan	1. Menyiapkan regulasi yang mendukung pemenuhan sarana parasarana fasilitas publik yang berwawasan lingkungan 2. Pengawasan dan pengendalian	% fasilitas sosial yang representative dan memenuhi standar lingkungan % Fasum yang representative dan memenuhi standar lingkungan	75% 55%	90% 85%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup,

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			pembangunan fasiliitas public 3. Membangun sarana prasarana kota pendukung smart city 4. Penegakan hukum						
3	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	1. Pengembangan sistem air minum perpipaan	1. Meningkatkan kualitas jaringan pipa air bersih 2. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana air minum yang aman dan sehat	Penyediaan air minum layak	93	100	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum
		2. Penataan kawasan permukiman kumuh	4. Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas/sarana penunjang (PSU)	Kawasan Kumuh	-	0	Program Pengembangan Perumahan	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Pengembangan rumah susun sewa	kawasan 5. Penataan rumah yang layak huni 6. penyelenggaraan penataan lingkungan perumahan pemukiman berbasis masyarakat 7. perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya)	% sanitasi layak	95	100	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	pekerjaan umum dan penataan ruang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Kebersihnan dan Pertamanan/ PDAM KLH

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4. Ketersediaan sarana prasarana sanitasi dasar 5. Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 6. Penurunan beban pencemaran Batang Agam	8. mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase/intercity connection 9. Memperkuat kelembagaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)/ Pokja Sanitasi 10. Normalisasi Batang Agam 11. Mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat 12. Meningkatkan cakupan layanan air				Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Peningkatan pengendalian polusi Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program pengendalian banjir	Pekerjaan umum dan penataan ruang pekerjaan umum dan penataan ruang pekerjaan umum dan penataan ruang pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			limb 13. ah melalui pembangunan perpipaan dan IPAL terpusat 14. mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui pembangunan IPAL Komunal dan IPLT standar lingkungan hidup 15. mengembangkan gerakan sungai bersih 16. Penegakan perda sampah				Program pengendalian banjir	pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum
Tujuan 2 : Peningkatan Penataan Ruang Kota									
1	Pengendalian dan Pemanfaatan	1. Pengembangan sistem	1. Menerapkan sistem informasi dan data	Kesesuaian pemanfaatan ruang	55%	70%	Program Pengendalian	Pekerjaan Umum dan	Dinas Pekerjaan Umum

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ruang Kota	informasi dan data spasial 2. Optimalisasi penegakan Perda Tata Ruang	spasial berbasis web 2. Optimalisasi peran dan fungsi PPNS 3. Penyempurnaan regulasi rencana tata ruang beserta turunannya.	kota			Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	
				Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	50%	80%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum
Tujuan 3 : Menjadikan Bukittinggi sebagai kota Pusaka Nasional dan Dunia									
1	Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya (BCB)	1. Revitalisasi kawasan yang memiliki BCB	1. Memberikan bantuan pemugaran BCB	jumlah pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama	1	6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas kebudayaan dan pariwisata
2	Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama	2. Membangkitkan rasa kebanggaan terhadap kedaerahan melalui pembangunan rumah khas daerah minangkabau 3. Bukittinggi	2. Memberikan insentif terhadap pembangunan rumah adat 3. Meningkatkan kerjasama dengan balai pelestarian cagar budaya 4. Pemugaran dan pembangunan kembali bangunan				Pengelolaan keragaman budaya Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program Penyelamatan	Kebudayaan Kebudayaan Kearsipan	Dinas kebudayaan dan pariwisata Dinas kebudayaan dan pariwisata Kantor Perpustakaan,

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sebagai Ibu Kota PDRI 4. Pengawasan BCB	cagar budaya, adat dan agama yang memiliki nilai sejarah 5. Mengusahakan pengakuan pemerintah, Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan 6. Membangun monumen sejarah bukti Bukittinggi sebagi Ibukota PDRI 7. Dokumentasi sejarah PDRI di Bukitinggi				dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		arsip dan dokumentasi daerah
							Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Kearsipan	Kantor Perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah
Tujuan 4 Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu									
1	Terciptanya keamanan, keselamatan,	1. pengembangan sarana dan prasarana	1. Meningkatkan sarana prasarana sistem transportasi	Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum	81%	86%	Program Peningkatan pelayanan	Perhubungan	Dishubkominfo

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	pendukung sistem transportasi 2. Penataan Angkutan Umum Reguler 3. Penataan sistem transportasi 4. Penataan sistem perparkiran	2. Pengembangan kawasan pendestrian 3. Melaksanakan rekayasa lalu lintas 4. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan transportasi/intercity connection 5. Pengendalian dan keselamatan transportasi 6. Penyusunan dan penegakan Regulasi yang terkait dengan perhubungan dan lalu lintas 7. Pengembangan pedestrian 8. Menyediakan data base perhubungan 9. Pengembangan dan pemeliharaan Area	Fasilitas Keselamatan Jalan Jalan berkondisi baik	71% 86%	76% 95%	angkutan Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Perhubungan Perhubungan Perhubungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Dinas Pekerjaan Umum

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Trafic Control System 10. Menata kawasan perparkiran 11. Menghapuskan terminal bayangan untuk angkot dan angdes						
		5. pengembangan prasarana jalan dan pendukungnya	12. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan 13. Aktualisasi data jalan dan leger jalan				Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum
		6. pembatasan tonase kendaraan sesuai dengan kelas jalan sehingga fungsi jalan dapat maksimal sesuai dengan umur rencana	14. Menjalin kerjasama dengan instansi vertikal teknis yang ada di daerah untuk pemeliharaan jalan dan pendukungnya				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum
							Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 5 : Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana									
1	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana	1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana 2. penguatan kelembagaan pemerintah dalam menangani bencana	1. Menyiapkan tenaga terlatih berbasis masyarakat 2. Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Fasilitas Kebencanaan	60%	90%	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	fungsi penunjang Urusan	BPBD

7.1.4 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 4

Tabel 7.4

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SERTA INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA PAGU PENDANAAN MISI 4 (MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI PERKOTAAN SECARA LEBIH BERDAYA GUNA)

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Meningkatkan peran koperasi dan UMK dalam menunjang perekonomian kota									
1	Berkembangnya koperasi	1. Peningkatan kapasitas SDM pengurus dan karyawan koperasi 2. Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap aturan perundang-undangan tentang perkoperasian 3. Meningkatkan kontribusi dan berkembangnya koperasi dan	1. Meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan manajemen keuangan koperasi 2. Meningkatkan pengawasan terhadap koperasi 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan, perlindungan, dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM 4. Meningkatkan koordinasi dengan Dekopin	Jumlah Koperasi sehat	12	17	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi dan UKM	Dinas Koperindag

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		UMKM 4. Mendorong peningkatan peran dan fungsi Dekopin dalam membina Koperasi							
2	Berkembangnya usaha mikro	5. Peningkatan skala usaha mikro	5. Meningkatkan kapasitas SDM, pengelolaan usaha dan keuangan usaha mikro 6. Membentuk dan memberdayakan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha Kecil	**5**	105	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Koperasi dan UKM	Dinas Koperindag
Tujuan 2 : Mewujudkan perekonomian yang sehat									
3	Berkembangnya investasi	1. Mendorong berkembangnya penanaman modal di berbagai sektor	1. menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan penanaman modal 2. Melaksanakan	Jumlah Investasi	1.884	3.035	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	BP2TPM

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		2. Meningkatkan iklim investasi melalui harmonisasi dan penyederhanaan regulasi yang mengatur tentang Penanam Modal (Kemudahan dalam berinvestasi)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal 3. Memberikan insentif dalam penanaman modal 4. Memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk bermitra dengan pengusaha PMA/PMDN;				Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah	Penanaman Modal Penanaman Modal	BP2TPM BP2TPM
							Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Penanaman Modal	BP2TPM
4	Berkembangnya Industri Kecil Menengah	3. Memperluas akses berusaha bagi masyarakat dan meningkatkan	5. Memfasilitasi kemudahan akses dan perizinan permodalan bagi Industri Kecil	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan	5	40	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Industri	Dinas Koperindag

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		nilai tambah produk industry berbasis keunikan budaya dan lingkungan 4. Meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk industri kecil dan menegah 5. Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal 6. Mengembangkan produk unggulan kota 7. Pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial melalui pengenalan	Menengah 6. Peningkatan pelatihan SDM yang komprehensif dan berkualitas guna mewujudkan industri yang kompetitif 7. Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi. 8. Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif. 9. Mengembangkan inovasi di bidang industri 10. Mengembangkan teknologi tepat guna (TTG) untuk	Produksi)			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Industri Industri	Dinas Koperindag Dinas Koperindag

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		produk dan promosi offline dan online 8. Peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan	mendukung produktivitas IKM 11. Menyusun regulasi tentang penanaman modal						
Tujuan 3 : Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat									
5	Meningkatnya lapangan kerja	1. Peningkatan daya saing (keterampilan dan kualitas) tenaga kerja sesuai dengan kompetensi 2. Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan	1. Memberikan kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja melaui pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pelatihan kreativitas bagi para pencari kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,84	4.93	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerja an	Dinas Sosnaker

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja	2. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.						
		3. Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.	3. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan memfasilitasi wirausaha pemula. 4. Mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru..				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerja an	Dinas Sosnaker
Tujuan 4 : Meningkatnya penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan									
6	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	1. Membangun Sistem Pengawasan Pajak dan retribusi Sebagai Sistem Pengendalian Internal Yang Handal	Jumlah penerimaan pajak daerah	34.758. 804.463	54.400. 227.101	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Fungsi Penunjang Uusan	DPKAD

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			2. Menerapkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah berbasis TIK. 3. Melakukan riset/kajian potensi penerimaan PAD						

7.1.5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan untuk Misi 5

Tabel 7.5

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SERTA INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA PAGU PENDANAAN MISI 5 (MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASAYARAKAT).

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1 : Mewujudkan pariwisata yang berdaya saing									
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Optimalisasi pemasaran pariwisata yang kreatif, efektif dan terpadu	1. Pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak dan elektronik serta website dan melaksanaan event kepariwisataan (berskala lokal, nasional dan internasional)	Jumlah kunjungan wisatawan	483.950	617.657	Program engembangan pemasaran pariwisata	Pariwisata	Budpar
		2. Mengembang kan pariwisata MICE (Meetings,	2. Menyediakan dan memfasilitasi pengembangan sarana prasarana				Program Pengembangan kemitraan	Pariwisata	Budpar

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		Incentives, Converence, Exhibitions) dan ekowisata berbasis kearifan budaya minang.	utama dan pendukung bagi pengembangan pariwisata MICE 3. Menciptakan objek wisata baru						
		3. Penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata hospitality dan sapta pesona serta standarisasi usaha pariwisata 4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata	4. Mengembangkan desa/kampung wisata dan daya tarik wisata yang hospitality dan sapta pesona serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata 5. Merevitalisasi daya tarik wisata dan mengembangkan agro wisata dan wisata minat khusus 6. Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah				Program pengembangan destinasi wisata	Pariwisata	Dinas Budpar

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			(RIPPDA)						
Tujuan 2 : Mewujudkan pendidikan yang berdaya saing									
2	Meningkatnya mutu pendidikan	1. Meningkatkan pendiidikan anak di usia dini 2. Meninjau Ulang regulasi pendidikan 3. Mewujudkan rintisan Wajar 12 tahun 4. Mengorientasi kan pendidikan terhadap MEA 5. Memfasilitasi pendirian perguruan Tinggi 6. Memenuhi 8	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PAUD 2. Memberikan beasiswa kepada siswa miskin 3. Meningkatkan peran serta msayarakat (dewan pendidikan) 4. Memberikan pembekalan kepada peserta didik dalam menghadapai MEA. 5. Melakukan pemerataan	Harapan lama sekolah Angka Rata Rata Lama Sekolah APK PAUD (3 - 6 TH)	14,7 10,85 86%	15 11,20 88,50%	Program Pendidikan bagi anak usia dini Program Wajib belajar 9 tahun Program pendidikan Menengah Program Pendidikan Luar Biasa Program pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Perpustakaan	Disdikpora Disdikpora Disdikpora Disdikpora KPAD

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		standar pendidikan bagi semua tingkat pendidikan 7. Mendorong masyarakat Kota Bukittinggi untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi	sebaran siswa ke seluruh sekolah sesuai rayon/sistim online 6. Meningkatkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di semua tingkat pendidikan 7. Menyiapkan pola ruang untuk pendirian perguruan tinggi 8. Membudayakan dan memfasilitasi gerakan satu sarjanan satu keluarga.				Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Disdikpora
				Angka Putus sekolah Jenjang SD, SMP	0,22%	0,04%	Program pendidikan Non Formal	Pendidikan	Disdikpora
				% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	72,88%	81,35%			
				% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	54,50%	90,90%			

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
				% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMA % Kompetensi keahian yang berakreditasi A tingkat SMK	63,60% 37,20%	90,90% 48,83%			
3	Terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama,adat dan budaya dalam pendidikan	8. Melengkapi mata pelajaran Muatan Lokal dengan agama, adat dan lingkungan hidup berbasis budaya lokal	9. Menyusun Silabus Mata pelajaran Muatan Lokal dengan agama, adat dan budaya yang berkesinambungan	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal pendidikan karakter berbasis adat dan budaya minangkabau	0	1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pendidikan	Disdikpora
Tujuan 3 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									
4	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan Ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas	1. Memperkuat upaya promotif dan preventif 2. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (continuum of care) 3. Intervensi berbasis resiko kesehatan	Angka Harapan Hidup	72,36	73,14	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	DKK
				Puskesmas yang terakreditasi	2	4	Program perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	DKK
				Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan	81%	95%	Program Pencegahan dan	Kesehatan	DKK

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat	4. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah	Masyarakat			penanggulangan penyakit menular		
		3. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan serta produk pertanian					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	DKK
		4. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan					Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masayarakat	Kesehatan	DKK
		5. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	DKK
		6. Meningkatka					Program Pengadaan peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya	Kesehatan	DKK

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		n ketersediaan, keterjangakauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan 7. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan berkualitas					Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit Mata	Kesehatan Kesehatan Kesehatan	DKK DKK DKK
Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat									
5	Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarusutamaan	1. Mengefektifkan program keluarga berencana	1. Meningkatkan intensitas dan kuantitas program KB 2. Melibatkan elemen	Laju Pertumbuhan Penduduk Tingkat Kemiskinan	1,71 4,23	1,38 2,84	Program Keluarga Berencana Program	Pengendalaian Penduduk/KB Pengendalaian	Bappeda/ PPKB Kantor PPKB

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	gender dan perlindunngan anak	2. Meningkatan kualitas perempuan dan anak	masyarakat dalam menyukseskan program KB				penguatan kelembagaan pengarusutamaa n gender	Penduduk/KB	
				Indek Pemberdayaan gender	70,84	75,84	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Pengendalaian Penduduk/KB	Kantor PPKB
				Capaian PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk.	80%	88%	Program penigkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengendalaian Penduduk/KB	Kantor PPKB
		3. Tertib administrasi kependuduka n.	3. Meningkatkan intensitas pengawasan terhadap administrasi kependudukan				Program penataan Adminstrasi kependidukan	Kependuduka n	Dinas Dukcapil
		4. Intervensi dan	4. Meningkatkan				Program	Sosial	Dinas Sosnaker

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		sinergi program penanggulangan kemiskinan basis data terpadu (BDT) 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan dan pemberdayaan PMKS	program bantuan sosial yang tepat sasaran 5. Meningkatkan peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PMKS) dalam mengurangan dan pemberdayaan PMKS				pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya		DKK Bappeda
Tujuan 5 : Mewujudkan pusat perdagangan dan jasa yang berdaya saing									
6	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	1. Pengembangan pasar tradisional dengan memfasilitasi lokasi untuk PKL	1. Revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi dengan penataan PKL dan perpakiran untuk menciptakan kawasan	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.338	4.229	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Program Pembinaan	Perdagangan Perdagangan	Dinas Pengelolaan Pasar Dinas Koperindag

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			perdagangan yang kondusif, tertib dan teratur				pedagang kaki lima dan asongan		
		2. Menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok 3. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen 4. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri untuk membatasi penggunaan produk impor	2. menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang 3. Pengembangan UPT kemetrologian daerah 4. Melaksanakan pengawasan terhadap barang beredar 5. Meningkatkan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen dan menyelesaikan permasalahan pengaduan konsumen 6. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya 7. Meningkatkan konsumsi produk				Program peningakatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan	Dinas Koperindag

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga melalui sosialisasi dan peningkatan citra produk dalam negeri						
Tujuan 6 : Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi									
1	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, seimbang dan aman berbasis sumberdaya local	Pengembangan dan percepatan diversifkasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal	Penerapan menu beragam, bergizi, sehat, aman dan halal	Skor pola pangan harapan (PPH)	84,1	85,2	Program peningkatan diversifikasi pangan	Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
Tujuan 7 : Meningkatkan Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan Kota									
7	Terkendalinya Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum	1. Mengintensifkan operasional Keamanan, ketentraman dan	1. Meningkatkan koordinasi dan pelibatan instansi terkait. 2. Meningkatkan sosialisasi perda	Jumlah kasus pelanggaran ganguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang	650	250	Program Pemeliharaan Keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan	ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat	Satpol PP

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
		Ketertiban umum 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan,ketentraman dan ketertiban lingkungan.	3. Penguatan kelembagaan masyarakat	tertangani			pencegahan tindak krimanal Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum	ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat	Satpol PP

7.2 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bukittinggi nomor 6 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi , telah ditetapkan rencana struktur ruang wilayah, yang diwujudkan berdasarkan arahan rencana pusat-pusat pelayanan kota, dan rencana sistem prasarana wilayah kota. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota terdiri atas Pusat Pelayanan Kota Fungsi Primer dan Pusat Pelayanan Kota Fungsi Sekunder. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Fungsi Primer, merupakan pusat pelayanan yang jangkauan pelayanannya meliputi seluruh wilayah kota dan/atau regional. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Fungsi Sekunder, merupakan pusat pelayanan yang jangkauan pelayanannya meliputi seluruh wilayah Kota Bukittinggi.

Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Fungsi Primer meliputi kawasan Pasar Atas, kawasan Simpang Aur. Kawasan Pasar Atas adalah kawasan yang telah tumbuh dan menjadi ciri khas tersendiri di Kota Bukittinggi. Pengembangan Kawasan Pasar Atas dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi pelayanan dalam skala kota hingga regional, kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional, kawasan perumahan kepadatan tinggi dan ruang terbuka hijau skala perkotaan dalam bentuk taman kota dan jalur hijau jalan.

Kawasan Simpang Aur adalah kawasan yang akan ditumbuh kembangkan di Kota Bukittinggi sebagai counter magnet terhadap perkembangan kegiatan yang saat ini masih terkonsentrasi di Kawasan Pasar Atas. Pengembangan Kawasan Simpang Aur dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi pelayanan dalam skala kota hingga regional.

Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Fungsi Sekunder diarahkan pada kawasan Gulai Bancah dan kawasan Belakang Balok. Kawasan Gulai Bancah merupakan kawasan pusat pemerintahan baru yang dilalui oleh dua jalan arteri primer dan arteri sekunder serta memiliki keterhubungan langsung dengan kawasan pusat kota Benteng Pasar Atas. Pengembangan Kawasan Gulai Bancah dilakukan berdasarkan pada fungsi-fungsi yang telah berkembang di kawasan ini, meliputi kawasan pusat pemerintahan kota, kawasan sosial budaya dengan keberadaan gedung perpustakaan Bung Hatt, ruang terbuka hijau berbentuk pemakaman untuk skala kota dan kawasan permukiman kepadatan sedang beserta fasilitas pendukungnya.

Kawasan Belakang Balok merupakan kawasan yang berada pada pintu gerbang Kota Bukittinggi dari arah selatan serta terhubung langsung dengan Kawasan Pusat Kota Benteng Pasar Atas oleh jaringan jalan arteri sekunder, sehingga memiliki hubungan kuat dengan pusat kota. Pengembangan Kawasan Belakang Balok dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi pada kawasan yaitu kawasan perkantoran pemerintahan skala kota, kawasan pusat pelayanan pendidikan menengah dan tinggi serta pusat pelayanan

kesehatan skala kota, kawasan perumahan berikut fasilitas pendukungnya, kawasan perdagangan dan Jasa skala kota dan pengembangan ruang terbuka hijau skala kota.

Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan sub pusat pelayanan yang diarahkan dengan fungsi pelayanan skala kota. Kawasan yang diarahkan sebagai sub pusat pelayanan kota, meliputi: a. kawasan Campago Ipuh; b. kawasan Garegeh; dan c. kawasan Ladang Cakiah.

Kawasan Campago Ipuh merupakan kawasan pengembangan baru yang berfungsi untuk menarik perkembangan kota ke arah utara sehingga mengurangi beban pelayanan Kawasan Pusat Kota. Pengembangan Kawasan Campago Ipuh dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi kawasan, meliputi pusat pelayanan umum dan sosial, meliputi pendidikan menengah, rekreasi skala sub wilayah kota, perdagangan dan jasa koridor skala sub wilayah kota kawasan olahraga skala sub wilayah kota;

Kawasan Garegeh merupakan kawasan yang berada di Jalan Sukarno Hatta serta terletak pada perbatasan kota dengan Kabupaten Agam yang merupakan pusat kegiatan perumahan perkotaan. Pengembangan kawasan Garegeh dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi yang diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa skala sub wilayah kota, RTH rekreasi skala sub wilayah kota, kawasan olahraga skala sub wilayah Kota, pendidikan tingkat menengah dan kesehatan skala puskesmas pembantu, perumahan berkepadatan sedang dan fasilitas pendukungnya.

Kawasan Ladang Cakiah merupakan kawasan yang berada di Jalan Tigo Baleh serta terletak pada perbatasan kota dengan Kabupaten Agam merupakan kegiatan permukiman perkotaan. Pengembangan kawasan Ladang Cakiah dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi yang diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa skala sub wilayah kota RTH rekreasi skala sub wilayah kota, pendidikan tingkat menengah dan kesehatan skala puskesmas pembantu, perumahan berkepadatan sedang dan fasilitas pendukungnya. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan unit lingkungan untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan yang berorientasi pada kegiatan sosial budaya di kawasan perumahan

Selanjutnya kondisi saat ini rencana struktur ruang wilayah dimaksud yang dijabarkan dalam Perda Nomot 6 tahun 2011 tersebut, sedang dalam revisi. Jika telah ditetapkan perubahan Perda nomor 6 Tahun 2011, maka tentunya rencana struktur ruang wilayah akan mengalami perubahan dan harus disesuaikan kembali.

7.3. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH TETANGGA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 13 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam 2011-2031, Struktur Ruang Kabupaten Agam didasarkan pada pertimbangan penggunaan lahan eksisting, perbedaan fisiografi wilayah dan aksesibilitas serta onentasi pergerakan wilayah maka ditetapkan struktur wilayah pembangunan Kabupaten Agam yaitu Rencana Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Rencana Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) dan Rencana Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan. Untuk daerah yang berbatasan dengan Kota Bukittinggi masuk dalam Rencana Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan yaitu :

Kebijakan Kegiatan Perkotaan di Kecamatan Ampek Nagari dipusatkan di Bawan sebagai ibukota kecamatan, sekaligus berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan kegiatan sosial skala kecamatan, pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa dari wilayah hinterlandnya,Wilayah Kecamatan palembayan bagian barat, pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pengembangan kota diarahkan memiliki keterkaitan dengan pengembangan Kota Lubuk Basung.

Kegiatan perkotaan di Banuhampu lebih berkembang pada kawasan perbatasan dengan Kota Bukittinggi dan koridor utama menuju pusat Kota Bukittinggi diantaranya Nagari Taluak IV Suku, Padang Luar dan Ladang Laweh, disamping ibukota kecamatan di Sungai Buluh. Lebih jauh peran Banuhampu sebagai Pusat Pelayanan Kawasan, adalah sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan sosial skala kecamatan, sebagai pusat koleksi dan distribusi barang skala wilayah (mencakup Kecamatan Sungai Pua dan IV Koto, sebagian Kecamatan Canduang), pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura skala regional di Pasar Padang Luar, sebagai salah satu kawasan penyangga kegiatan pertanian (agropolitan), dan sebagai salah satu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Pemusatan kegiatan perkotaan di Kecamatan Sungai Pua adalah di Nagari Sariak yang merupakan ibukota kecamatan Sungai Pua, dengan fungsi perkotaan diarahkan sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan sosial skala kecamatan, pusat koleksi distribusi hasil produksi barang wilayah hinterlandnya, Pengembangan kota diarahkan memiliki keterkaitan dengan pengembangan Kecamatan Banuhampu, sebagai salah satu kawasan penyangga kegiatan pertanian (agropolitan) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Kegiatan perkotaan di Canduang dipusatkan di Nagari Lasi yang merupakan ibukota kecamatan, fungsi Lasi adalah sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan sosial skala kecamatan, pusat koleksi distribusi hasil produksi barang

wilayah hinterlandnya (gula merah tebu), sebagai salah satu pusat pengembangan industri konveksi, Pengembangan kota diarahkan memiliki keterkaitan dengan pengembangan Baso, salah satu pusat pengembangan kegiatan pertanian (agropolitan), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pemusatan kegiatan perkotaan di Kecamatan Ampek Angkek adalah di Biaro sebagai ibukota Kecamatan Ampek Angkek, dengan fungsi perkotaan sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan sosial skala kecamatan, pusat koleksi distribusi hasil produksi barang skala regional (beberapa kecamatan), salah satu alternatif pengembangan simpul pelayanan transportasi regional, pusat pengembangan industri rumah tangga (konveksi, bordir dan sulaman), salah satu pusat pengembangan kegiatan pertanian (agropolitan), pengembangan kota diarahkan memiliki keterkaitan dengan pengembangan Baso, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pemusatan kegiatan perkotaan di Kecamatan Tilatang Kamang adalah di Pakan Kamis sebagai ibukota Kecamatan Tilatang Kamang, dengan fungsi perkotaan sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan sosial skala kecamatan, pusat koleksi dan distribusi hasil produksi barang skala kecamatan, salah satu pusat pengembangan industri makanan kecil, salah satu kawasan penyangga kegiatan pertanian (agropolitan), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pemusatan kegiatan perkotaan di Kecamatan Kamang Magek adalah di Kamang Hilir sebagai ibukota Kecamatan Kamang Magek, dengan fungsi perkotaan sebagai sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan sosial skala kecamatan, pusat koleksi dan distribusi hasil produksi barang skala kecamatan, salah satu pusat pengembangan industri makanan kecil, salah satu kawasan penyangga kegiatan pertanian (agropolitan), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pemusatan kegiatan perkotaan di Kecamatan Baso adalah di Baso sebagai ibukota kecamatan, dengan fungsi perkotaan sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat pelayanan sosial skala kecamatan, simpul pelayanan transportasi yang dapat melayani beberapa kecamatan dan nagari di bawahnya, pusat koleksi dan distribusi hasil produksi komoditi pertanian skala wilayah (terutama Kamang Magek, Ampek Angkek dan Canduang, termasuk kecamatan diluar Kabupaten Agam yang berbatasan langsung dengan Baso seperti Kecamatan Aka Biluru (Kabupaten 50 Kota) dan Kecamatan Tanjung Baru (Kabupaten Tanah Datar), salah satu kawasan penyangga kegiatan pertanian (agropolitan), pusat pengembangan pendidikan, dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp).

Pemusatan kegiatan perkotaan di Kecamatan Palupuh adalah di Palupuh sebagai ibukota kecamatan dengan fungsi perkotaan sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala

kecamatan, pusat pelayanan sosial skala kecamatan, pusat koleksi dan distribusi hasil produksi barang skala kecamatan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada bab-bab sebelumnya, telah dijabarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota secara hirarkhis memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sehingga menghasilkan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Program-program tersebut dikelompokkan ke dalam 9 prioritas pembangunan, program-progran tersebut adalah upaya-upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada bab ini program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama Perangkat Daerah dan kemudian disepakati dengan DPRD Provinsi. Pada target kinerja diperkirakan output dan outcome yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Penulisan output selain outcome pada indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam merumuskan kegiatan-kegiatan pada setiap program prioritas pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta Perangkat Daerah penanggungjawab. Namun demikian pendanaan program dan kegiatan setiap tahunnya mengacu kepada pagu indikatif yang ditetapkan pada tahun berjalan. Rincian program berdasarkan urusan dengan indikator dan target kinerja secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.1

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 PEDOMAN TRANSISI

Berhubung RPJMD ini disusun sampai dengan Tahun 2021, sementara pemiilihan Kepala Daerah yang baru dilaksanakan tahun 2020, maka tidak ada pedoman transisi untuk mengisi kekosongan pedoman penyusunan dokumen perencanaan. Penyusunan RKPD tahun 2021 yang disusun tahun 2020 telah di akomodir dalam RPJMD ini.

10.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan merupakan pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Sehubungan dengan itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
2. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD kedalam renstra SKPD.
3. RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Bukittinggi 5 (lima) tahun kedepan.
4. Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, setiap SKPD perlu mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJMD tersebut dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bukittingg , instansi terkait maupun masyarakat luas;
5. RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, merupakan dasar untuk mengevaluasi laporan hasil kinerja kepala daerah terpilih untuk masa lima tahun dan tahunan, yang mana visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai selaras dengan strategi, tujuan,

sasaran, kebijakan dan program prioritas Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

10.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagai berikut :

1. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
2. Kepala Bappeda Kota Bukittinggi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
3. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
4. Kepala Bappeda Kota Bukittinggi menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 ;

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-							**485,846,994,622**		**460,327,519,658**		**518,119,714,711**		**583,604,303,752**		**657,834,486,413**	
							216,506,240,005		**175,912,885,333**		**126,135,190,833**		**101,867,193,375**		**4,302,500,000**	
							269,340,754,617		**284,414,634,325**		**391,984,523,878**		**481,737,110,377**		**653,531,986,413**	
					261,531,630,666		**283,802,701,325**		**344,634,453,162**		**419,685,533,563**		**503,861,933,374**		**653,423,829,558**	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	465,300,000			100	300,000,000	100	60,000,000	100	75,000,000	100	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam menggunakan atribut kepegawaian	'%	100	100	18,000,000	100	18,536,400	100	19,579,999	100	27,020,399	100	33,202,666	100	45,046,057	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	656,988,500	100	676,566,757	100	714,657,466	100	986,227,303	100	1,211,876,110	100	1,644,152,318	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	11,550,000	100	11,894,190	100	12,563,833	100	17,338,089	100	21,305,044	100	28,904,554	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	865,000,000	100	890,777,000	100	940,927,745	100	1,298,480,288	100	1,595,572,578	100	2,164,713,317	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	22,150,000	100	22,810,070	100	24,094,277	100	33,250,102	100	40,857,726	100	55,431,676	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	683,530,700	100	703,899,915	100	743,529,480	100	1,026,070,682	100	1,260,835,655	100	1,710,575,733	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,760,000	100	4,901,848	100	5,177,822	100	7,145,394	100	8,780,261	100	11,912,180	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,987,400	100	11,314,825	100	11,951,849	100	16,493,552	100	20,267,276	100	27,496,614	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	257,387,100	100	265,057,236	100	279,979,958	100	386,372,342	100	474,774,334	100	644,126,339	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	12,150,000	100	12,512,070	100	13,216,500	100	18,238,769	100	22,411,800	100	30,406,089	Kantor Lingkungan Hidup

149,580,053,039
0.296867144

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	309,798,600	100	319,030,598	100	336,992,021	100	465,048,989	100	571,452,198	100	775,289,196	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	2,300,000	100	2,368,540	100	2,501,889	100	3,452,607	100	4,242,563	100	5,755,885	Kantor Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	21,300,000	100	21,934,740	100	23,169,666	100	31,974,139	100	39,289,822	100	53,304,501	Kantor Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	6,300,000	100	6,487,740	100	6,853,000	100	9,457,140	100	11,620,933	100	15,766,120	Kantor Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	230,200,600	100	237,060,578	100	250,407,088	100	345,561,782	100	424,626,318	100	576,090,525	Kantor Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	'%	100	100	353,159,200	100	363,683,344	100	384,158,716	100	530,139,029	100	651,434,838	100	883,801,645	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	1,910,300	100	1,967,227	100	2,077,982	100	2,867,615	100	3,523,725	100	4,780,638	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja	'%	100	100	17,950,000	100	18,484,910	100	19,525,610	100	26,945,342	100	33,110,437	100	44,920,930	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang berpakaian sesuai aturan	'%	100	100	18,600,000	100	19,154,280	100	20,232,666	100	27,921,079	100	34,309,422	100	46,547,593	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perentasee laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	2,020,000	100	2,080,196	100	2,197,311	100	3,032,289	100	3,726,077	100	5,055,169	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	65,000,000	100	66,937,000	100	70,705,553	100	97,573,663	100	119,898,517	100	162,666,319	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	19,000,000	100	19,566,200	100	20,667,777	100	28,521,532	100	35,047,259	100	47,548,616	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	343,857,700	100	354,104,659	100	374,040,752	100	516,176,237	100	634,277,361	100	860,524,095	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	132,000,000	100	135,933,600	100	143,586,662	100	198,149,593	100	243,486,220	100	330,337,755	Sekretariat Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,513,220,400	100	6,707,314,368	100	7,084,936,167	100	9,777,211,910	100	12,014,237,995	100	16,299,716,688	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	90	90	111,000,000	90	114,307,800	90	120,743,329	90	166,625,794	95	204,749,776	95	277,784,021	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	3,237,400,000	100	3,333,874,520	100	3,521,571,655	100	4,859,768,885	100	5,971,684,005	100	8,101,783,690	Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersedian Layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	5,111,604,400	100	5,263,930,211	100	5,560,289,482	100	7,673,199,485	100	9,428,827,527	100	12,792,090,306	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaiakan kinerja dan keuangann yang tersesusun tepat waktu	'%	100	100	78,666,400	100	81,010,659	100	85,571,559	100	118,088,751	100	145,107,457	100	196,867,287	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran & Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	169,750,000	100	174,808,550	100	184,650,271	100	254,817,374	100	313,119,590	100	424,809,347	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	46,800,000	100	48,194,640	100	50,907,998	100	70,253,038	100	86,326,933	100	117,119,749	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kesediaan layanan administrasi perkantoran		100	100	7,893,622,000	100	8,128,851,936	100	8,586,506,300	100	11,849,378,693	100	14,560,516,538	100	19,754,252,788	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persentase	100	100	9,377,500	100	9,656,950	100	10,200,636	100	14,076,877	100	17,297,667	100	23,467,745	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persentase	100	100	1,910,080,000	100	1,967,000,384	100	2,077,742,506	100	2,867,284,658	100	3,523,319,387	100	4,780,087,413	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	635,835,000	100	654,782,883	100	691,647,159	100	954,473,080	100	1,172,856,521	100	1,591,214,441	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	60	60	1,342,932,360	70	1,382,951,744	80	1,460,811,928	90	2,015,920,460	95	2,477,163,061	95	3,360,767,125	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	122,654,500	100	126,309,604	100	133,420,835	100	184,120,752	100	226,247,580	100	306,950,092	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	482,769,475	100	497,156,005	100	525,145,888	100	724,701,326	100	890,512,989	100	1,208,158,973	Badan Kepegawaian Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	16,450,000	100	16,940,210	100	17,893,944	100	24,693,642	100	30,343,548	100	41,167,091	Badan Kepegawaian Daerah
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	'%	100	100	878,892,100	100	905,083,085	100	956,039,262	100	1,319,334,182	100	1,621,197,843	100	2,199,479,113	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	100	214,300,000	100	220,686,140	100	233,110,770	100	321,692,862	100	395,296,189	100	536,298,340	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persentase	100	100	19,350,000	100	19,926,630	100	21,048,499	100	29,046,929	100	35,692,866	100	48,424,512	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	438,888,200	100	451,967,068	100	477,412,814	100	658,829,684	100	809,569,915	100	1,098,343,504	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase	100	100	16,165,900	100	16,647,644	100	17,584,906	100	24,267,171	100	29,819,499	100	40,456,114	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,698,700,000	100	2,779,121,260	100	2,935,585,787	100	4,051,108,386	100	4,978,001,985	100	6,753,655,293	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedispilanan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pagawai	'%	100	100	150,000,000	100	154,470,000	100	163,166,661	100	225,169,992	100	276,688,886	100	375,383,812	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesedian Layan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,153,130,000	100	2,217,293,274	100	2,342,126,885	100	3,232,135,102	100	3,971,647,613	100	5,388,334,317	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,900,000	100	11,224,820	100	11,856,777	100	16,362,353	100	20,106,059	100	27,277,890	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	1,446,300,000	100	1,489,399,740	100	1,573,252,945	100	2,171,089,065	100	2,667,834,243	100	3,619,450,717	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persen	100	100	225,225,000	100	231,936,705	100	244,994,741	100	338,092,743	100	415,448,363	100	563,638,794	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	5,562,692,900	100	5,728,461,148	100	6,050,973,511	100	8,350,343,445	100	10,260,902,026	100	13,920,965,778	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persetase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	100	11,358,000	100	11,696,468	100	12,354,980	100	17,049,872	100	20,950,882	100	28,424,062	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan Administrasi	'%	100	100	1,480,784,350	100	1,524,911,724	100	1,610,764,254	100	2,222,854,670	100	2,731,443,819	100	3,705,749,829	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capain kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	5,051,400	100	5,201,932	100	5,494,800	100	7,582,825	100	9,317,775	100	12,641,425	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	86,000,000	100	88,562,800	100	93,548,886	100	129,097,462	100	158,634,962	100	215,220,052	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	59,400,000	100	61,170,120	100	64,613,998	100	89,167,317	100	109,568,799	100	148,651,990	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	474,236,200	100	488,368,439	100	515,863,582	100	711,891,743	100	874,772,574	100	1,186,803,951	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,900,000	100	5,046,020	100	5,330,111	100	7,355,553	100	9,038,504	100	12,262,538	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	102,983,800	100	106,052,717	100	112,023,485	100	154,592,410	100	189,963,153	100	257,723,010	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	23,000,000	100	23,685,400	100	25,018,888	100	34,526,065	100	42,425,629	100	57,558,851	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	418,985,000	100	431,470,753	100	455,762,556	100	628,952,328	100	772,856,620	100	1,048,534,577	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	107,580,000	100	110,785,884	100	117,023,129	100	161,491,918	100	198,441,269	100	269,225,270	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,367,447,130	100	2,437,997,054	100	2,575,256,289	100	3,553,853,678	100	4,366,975,400	100	5,924,675,525	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu	'%	100	100	14,575,800	100	15,010,159	100	15,855,231	100	21,880,218	100	26,886,412	100	36,476,796	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	65,100,000	100	67,039,980	100	70,814,331	100	97,723,777	100	120,082,977	100	162,916,574	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam Kehadiran dan pemakaian atribut	'%	100	100	33,300,000	100	34,292,340	100	36,222,999	100	49,987,738	100	61,424,933	100	83,335,206	Dinas Pertanian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	907,064,550	100	934,095,074	100	986,684,626	100	1,361,624,784	100	1,673,164,535	100	2,269,982,324	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun waktu	'%	100	100	1,706,000	100	1,756,839	100	1,855,749	100	2,560,933	100	3,146,875	100	4,269,365	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	182,815,000	100	188,262,887	100	198,862,088	100	274,429,681	100	337,219,192	100	457,505,277	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,426,417,200	100	1,468,924,433	100	1,551,624,878	100	2,141,242,332	100	2,631,158,577	100	3,569,692,842	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuanagan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	3,878,500	100	3,994,079	100	4,218,946	100	5,822,145	100	7,154,252	100	9,706,174	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	173,300,000	100	178,464,340	100	188,511,882	100	260,146,398	100	319,667,893	100	433,693,431	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	unit	4	4	43,620,000	4	44,919,876	4	47,448,865	4	65,479,434	4	80,461,128	4	109,161,613	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	stel	40	40	40,500,000	40	41,706,900	40	44,054,998	40	60,795,898	40	74,705,999	40	101,353,629	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	bln	12	12	337,561,200	12	347,620,524	12	367,191,559	12	506,724,352	12	622,662,883	12	844,766,734	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen yang tersusun dengan tepat waktu	dokumen	3	3	5,980,000	3	6,158,204	3	6,504,911	3	8,976,777	3	11,030,664	3	14,965,301	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	874,400,000	100	900,457,120	100	951,152,856	100	1,312,590,941	100	1,612,911,748	100	2,188,237,369	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	40,500,000	100	41,706,900	100	44,054,998	100	60,795,898	100	74,705,999	100	101,353,629	GUGUAK PANJANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	339,733,200	100	349,857,249	100	369,554,212	100	509,984,813	100	626,669,339	100	850,202,292	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan YangTersusun Tepat Waktu	'%	100	100	7,989,000	100	8,227,072	100	8,690,256	100	11,992,554	100	14,736,450	100	19,992,942	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	48,600,000	100	50,048,280	100	52,865,998	100	72,955,077	100	89,647,199	100	121,624,355	MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	394,870,450	100	406,637,589	100	429,531,286	100	592,753,174	100	728,375,101	100	988,186,499	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	22,114,000	100	22,772,997	100	24,055,117	100	33,196,061	100	40,791,320	100	55,341,584	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	0	100	378,400,000	100	389,676,320	100	411,615,097	100	568,028,834	100	697,993,831	100	946,968,230	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	108,000,000	100	111,218,400	100	117,479,996	100	162,122,394	100	199,215,998	100	270,276,345	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,070,114,000	100	1,102,003,397	100	1,164,046,188	100	1,606,383,740	100	1,973,924,340	100	2,678,023,152	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	55,500,000	100	57,153,900	100	60,371,665	100	83,312,897	100	102,374,888	100	138,892,011	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	410,500,000	100	422,732,900	100	446,532,762	100	616,215,212	100	757,205,252	100	1,027,300,366	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,668,453,440	100	1,718,173,353	100	1,814,906,512	100	2,504,570,987	100	3,077,616,829	100	4,175,402,752	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu	'%	100	100	9,342,400	100	9,620,804	100	10,162,455	100	14,024,188	100	17,232,922	100	23,379,905	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	740,875,000	100	762,953,075	100	805,907,333	100	1,112,152,120	100	1,366,612,525	100	1,854,083,212	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	153,000,000	100	157,559,400	100	166,429,994	100	229,673,392	100	282,222,664	100	382,891,488	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	65,250,000	100	67,194,450	100	70,977,498	100	97,948,947	100	120,359,666	100	163,291,958	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,425,988,650	100	6,617,483,112	100	6,990,047,411	100	9,646,265,427	100	11,853,330,957	100	16,081,414,109	Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	39,792,100	100	40,977,905	100	43,284,961	100	59,733,246	100	73,400,212	100	99,582,068	Dinas Pekerjaan Umum

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	4,770,756,100	80	4,912,924,632	85	5,189,522,289	90	7,161,540,758	95	8,800,101,284	95	11,939,097,412	Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan dalam atribut pegawai	'%	80	85	40,000,000	90	41,192,000	95	43,511,110	100	60,045,331	100	73,783,703	100	100,102,350	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan adm perkantoran	'%	75	75	514,552,000	75	529,885,650	80	559,718,212	85	772,411,132	90	949,138,799	90	1,287,696,609	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	85	90	13,250,000	95	13,644,850	100	14,413,055	100	19,890,016	100	24,440,852	100	33,158,903	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	26,300,000	80	27,083,740	85	28,608,555	90	39,479,805	95	48,512,785	95	65,817,295	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen	90	91	153,000,000	92	157,559,400	93	166,429,994	94	229,673,392	95	282,222,664	95	382,891,488	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	90	91	1,268,502,000	92	1,306,303,360	93	1,379,848,239	94	1,904,190,569	95	2,339,869,372	95	3,174,500,777	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	Persen	90	91	13,271,000	92	13,666,476	93	14,435,898	94	19,921,540	95	24,479,588	95	33,211,457	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90	91	331,300,000	92	341,172,740	93	360,380,765	94	497,325,456	95	611,113,520	95	829,097,713	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.	'%	100	100	19,300,000	100	19,875,140	100	20,994,110	100	28,971,872	100	35,600,637	100	48,299,384	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	6,750,000	100	6,951,150	100	7,342,500	100	10,132,650	100	12,451,000	100	16,892,272	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,086,100	100	10,386,666	100	10,971,435	100	15,140,580	100	18,604,745	100	25,241,058	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	390,950,000	100	402,600,310	100	425,266,707	100	586,868,056	100	721,143,468	100	978,375,342	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	19,800,000	100	20,390,040	100	21,537,999	100	29,722,439	100	36,522,933	100	49,550,663	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layananan administrasi perkantoran	'%	100	100	407,394,800	100	419,535,165	100	443,154,995	100	611,553,893	100	751,477,424	100	1,019,529,421	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	dokumen	0	100	5,100,000	100	5,251,980	100	5,547,666	100	7,655,780	100	9,407,422	100	12,763,050	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	'%	100	100	2,150,000	100	2,214,070	100	2,338,722	100	3,227,437	100	3,965,874	100	5,380,501	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	11,300,000	100	11,636,740	100	12,291,888	100	16,962,806	100	20,843,896	100	28,278,914	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	14,850,000	100	15,292,530	100	16,153,499	100	22,291,829	100	27,392,200	100	37,162,997	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan layanan adminidtrasi perkantoran	'%	100	100	328,776,550	100	338,574,091	100	357,635,813	100	493,537,421	100	606,458,783	100	822,782,631	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	20	30	70,000,000	40	72,086,000	50	76,144,442	60	105,079,330	70	129,121,480	70	175,179,112	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	100	100	82,950,000	100	85,421,910	100	90,231,164	100	124,519,006	100	153,008,954	100	207,587,248	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tercapaianya pentaan jabatan dan informasi dibidang sumber daya aparatur	'%	90	90	120,000,000	91	123,576,000	92	130,533,329	93	180,135,994	94	221,351,109	94	300,307,050	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	persen	15	0	0	20	50,000,000	25	80,000,000	30	100,000,000	35	120,000,000	35		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	198,880,150	100	204,806,778	100	216,337,400	100	298,545,612	100	366,852,848	100	497,709,259	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	100	230,000,000	100	236,854,000	100	250,188,880	100	345,260,655	100	424,256,292	100	575,588,512	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	0	0	70	83,994,005	70	250,000,000	70	252,500,000	70	280,000,000	70		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Ketersediaan SDM sesuai Bidang Keahlian	'%	70	0	0	70	100,000,000	75	110,000,000	80	121,000,000	85	133,100,000	85		Dinas Pekerjaan Umum

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha	persen	50	50	0	60	70,000,000	65	120,000,000	70	120,000,000	75	125,000,000	75		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal	
Pendidikan							0		0		0		0		0		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	'% kegiatan	0	100	7,796,131,800	100	8,028,456,528	100	8,480,458,630	100	11,703,032,910	100	14,380,686,839	100	19,510,277,835	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya kegiatan untuk Pendidikan Anak Usia Dini	'%	0	100	505,396,950	100	520,457,779	100	549,759,552	100	758,668,182	100	932,251,462	100	1,264,785,558	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga	
Program Pendidikan Menengah	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SMP	nilai	0	0	4,914,299,720	0	5,060,745,852	0	5,345,665,843	0	7,377,018,863	0	9,064,880,779	0	12,298,323,753	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga	
Program Pendidikan Luar Biasa	Angka putus sekolah	'%	0.25	0	60,680,000	0	62,488,264	0	66,006,353	0	91,088,768	0	111,929,878	0	151,855,265	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SD	nilai	70	70	6,976,936,083	75	7,184,848,778	80	7,589,355,764	85	10,473,310,955	90	12,869,604,501	90	17,460,192,427	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga	
Program Pendidikan Non Formal	Optimalisasi pelayanan non formal	'%	0	100	291,362,100	100	300,044,691	100	316,937,207	100	437,373,345	100	537,444,367	100	729,150,772	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya manjemen pelayanan pendidikan	'%	100	100	500,000,000	100	514,900,000	100	543,888,870	100	750,566,641	100	922,296,288	100	1,251,279,374	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga	
Kesehatan							0		0		0		0		0		
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	'%	85	85	0	86	120,000,000	87	150,000,000	88	160,000,000	90	180,000,000	90		Dinas Kesehatan	
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Ratio tenaga paramedis per satuan penduduk (Bidan dan perawat)	tenaga paramedis/satuan penduduk	12.95	13	0	13	145,000,000	13	152,000,000	13	159,000,000	13	166,000,000	13		Dinas Kesehatan	
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	'%	100	100	6,459,177,000	100	6,651,660,475	100	7,026,148,959	100	9,696,085,564	100	11,914,549,941	100	16,164,469,905	Dinas Kesehatan	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	'%	5972	65	504,635,400	65	519,673,535	70	548,931,155	70	757,524,994	75	930,846,712	75	1,262,879,735	Dinas Kesehatan	
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada rumah sakit	'%	25	25	0	25	0	25	0	25	8,000,000,000	25	12,000,000,000	25		Dinas Kesehatan	
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pengawasan dan pengendalian makanan yang memenuhi syarat	'%	90	90	38,000,000	100	39,132,400	100	41,335,554	100	57,043,065	100	70,094,518	100	95,097,232	Dinas Kesehatan	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tingkat Pemenuhan Kualitas lingkungan	'%	40	40	208,000,000	41	214,198,400	42	226,257,770	43	312,235,722	44	383,675,256	44	520,532,220	Dinas Kesehatan	

Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	'%	100	100	2,617,063,925	100	2,695,052,430	100	2,846,783,882	100	3,928,561,757	100	4,827,416,687	100	6,549,356,219	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD	'%	0	60	134,639,000	100	138,651,242	100	146,457,307	100	202,111,084	100	248,354,100	100	336,942,007	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ()	puskes mas	0	2	734,639,000	5	756,531,242	7	799,123,951	7	1,102,791,053	7	1,355,109,645	7	1,838,477,256	Dinas Kesehatan
Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan	'%	20	80	410,000,000	85	422,218,000	90	445,988,873	95	615,464,645	95	756,282,956	95	1,026,049,087	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	puskes mas	0	0	20,000,000	1	20,596,000	1	21,755,555	2	30,022,666	3	36,891,852	3	50,051,175	Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi lebih	'%	0	15	373,000,000	13	384,115,400	13	405,741,097	12	559,922,714	10	688,033,031	10	933,454,413	Dinas Kesehatan
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan	'%	90	90	2,574,920,000	91	2,651,652,616	92	2,800,940,658	93	3,865,298,108	95	4,749,678,316	95	6,443,888,571	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	'%	83.8	85	193,564,000	86	199,332,207	87	210,554,610	88	290,565,362	90	357,046,717	90	484,405,281	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita	'%	57.57	60	744,750,000	70	766,943,550	80	810,122,472	90	1,117,969,011	90	1,373,760,321	90	1,863,780,627	Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	100	100	368,671,800	100	379,658,220	100	401,032,977	100	553,425,509	100	680,049,265	100	922,622,838	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pelaksanaan lingkungan sehat dikecamatan dan kelurahan	bln	0	0	25,000,000	0	25,745,000	0	27,194,444	0	37,528,332	0	46,114,814	0	62,563,969	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							0		0		0		0		0	
Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	'%	12.5	13	680,250,000	20	700,521,450	30	739,960,808	40	1,021,145,915	50	1,254,784,100	50	1,702,365,588	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	'%	10	10	228,000,000	20	234,794,400	40	248,013,325	60	342,258,388	75	420,567,107	75	570,583,394	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap	'%	98	98	4,050,000,000	99	4,170,690,000	100	4,405,499,847	100	6,079,589,789	100	7,470,599,933	100	10,135,362,928	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Pembangunan gedung	Persentase Gedung Negara dan Swasta yang Laik Fugsi	'%	0	2	150,000,000	5	154,470,000	20	163,166,661	30	225,169,992	40	276,688,886	40	375,383,812	Dinas Pekerjaan Umum
Program pengendalian banjir	Pengurangan titik genangan	titik	8	8	257,522,800	6	265,196,979	4	280,127,569	2	386,576,046	0	475,024,645	0	644,465,936	Dinas Pekerjaan Umum

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	'%	45	45	2,500,000,000	50	2,574,500,000	60	2,719,444,350	70	3,752,833,203	80	4,611,481,440	80	6,256,396,869	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	'%	72	72	4,819,443,900	80	4,963,063,328	85	5,242,483,794	90	7,234,627,635	95	8,889,910,438	95	12,060,941,491	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	'%	40	50	197,000,000	60	202,870,600	65	214,292,215	70	295,723,256	75	363,384,737	75	493,004,073	Dinas Pekerjaan Umum
Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota	'%	60	60	464,726,200	65	478,575,041	70	505,518,816	75	697,615,965	80	857,230,498	80	1,163,004,617	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	'%	40	50	862,629,700	70	888,336,065	75	938,349,386	80	1,294,922,152	85	1,591,200,340	85	2,158,781,502	Dinas Pekerjaan Umum
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik	'%	85	85	1,009,556,000	88	1,039,640,769	90	1,098,172,544	93	1,515,478,111	95	1,862,219,503	95	2,526,473,199	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik	'%	85	85	4,723,190,700	88	4,863,941,783	90	5,137,781,705	93	7,090,138,753	95	8,712,362,500	95	11,820,062,204	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan informasi / data base jalan	'%	20	0	0	40	1,200,000,000	0	0	80	300,000,000	100	330,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							0		0		0		0		0	
Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana areal pemakaman yang memadai	'%	80	80	139,484,600	80	143,641,241	85	151,728,243	85	209,384,975	90	257,292,258	90	349,068,406	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Lingkungan Sehat Perumahan	% Jalan dengan riol yang baik	'%	40	40	3,804,507,000	55	3,917,881,309	70	4,138,458,026	90	5,711,072,076	100	7,017,765,367	100	9,521,002,274	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	'%	50	60	79,649,400	80	82,022,952	100	86,640,844	100	119,564,365	100	146,920,692	100	199,327,303	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	% Kesiap siangaan dan Tanggap terhadap Pencegahan Kebakatan Meningkat	'%	50	60	1,950,000,000	70	2,008,110,000	75	2,121,166,593	80	2,927,209,898	90	3,596,955,523	90	4,879,989,558	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Perencanaan Pembangunan							0		0		0		0		0	
Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	'%	100	100	2,214,373,100	100	2,280,361,418	100	2,408,745,766	100	3,324,069,157	100	4,084,616,181	100	5,541,598,772	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	'%	100	100	84,875,500	100	87,404,790	100	92,325,680	100	127,409,438	100	156,560,717	100	212,405,925	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan sosial budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	'%	100	100	164,296,900	100	169,192,948	100	178,718,511	100	246,631,545	100	303,060,842	100	411,162,644	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	'%	100	100	574,865,000	100	591,995,977	100	625,325,351	100	862,948,984	100	1,060,391,711	100	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum	'%	60	100	125,647,500	100	129,391,796	100	136,676,554	100	188,613,644	100	231,768,446	100	314,440,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Pemenuhan Pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota	'%	60	65	316,265,200	70	325,689,903	75	344,026,244	80	474,756,217	85	583,380,440	85	791,472,243	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Peningkatan kualitas perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana	'%	50	50	0	60	75,000,000	65	85,000,000	70	100,000,000	75	110,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perhubungan							0		0		0		0		0	
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berwawasan lingkungan	Persen	70	0	0	72	7,800,000,000	73	1,625,000,000	74	4,300,000,000	75	1,250,000,000	75		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Optimalisasi Peningkatan Pengoperasian Kendaraan	Persen	80	81	180,000,000	82	185,364,000	83	195,799,993	84	270,203,991	85	332,026,664	85	450,460,575	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas lalu ,intas yang memadai dan berwawasan lingkungan	Persen	70	71	5,351,566,000	72	5,511,042,667	73	5,821,314,369	74	8,033,413,829	75	9,871,458,913	75	13,392,608,308	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program peningkatan pelayanan angkutan	Terwujudnya Angkutan Yang Selamat, Aman, Nyaman, Terjangkau dan Terpadu	Persen	80	81	51,379,000	82	52,910,094	83	55,888,933	84	77,126,727	85	94,773,322	85	128,578,966	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terciptanya Lalu Lintas Yang Aman, Tertib dan Lancar	Persen	70	71	763,000,000	72	785,737,400	73	829,974,416	74	1,145,364,694	75	1,407,424,135	75	1,909,452,325	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Persen	70	71	260,000,000	72	267,748,000	73	282,822,212	74	390,294,653	75	479,594,070	75	650,665,274	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Lingkungan Hidup							0		0		0		0		0	
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	Persentase	8	10	1,233,986,000	12	1,270,758,783	13	1,342,302,502	14	1,852,377,453	15	2,276,201,414	15	3,088,122,459	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase kelompok masyarakat yang memahami pengelolaan RTH	'%	10	20	0	30	0	40	110,000,000	50	115,000,000	60	120,000,000	60		Kantor Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemenuhan RTH	'%	20	20	0	22	100,000,000	25	120,000,000	28	140,000,000	30	0	30		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan/pengelolaan persampahan	Persen	90	90	5,799,341,500	90	5,972,161,877	100	6,308,394,590	100	8,705,584,535	100	10,697,422,276	100	14,513,192,802	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup	'%	50	60	451,509,800	70	464,964,792	80	491,142,310	90	677,776,388	95	832,851,625	95	1,129,929,800	Kantor Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	'%	80	70	424,576,950	60	437,229,343	50	461,845,355	40	637,346,590	30	783,171,490	30	1,062,528,760	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan pengendalian polusi	'%	50	55	0	60	380,000,000	65	1,055,000,000	70	1,055,000,000	75	1,055,000,000	75		Kantor Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	'%	0	0	0	50	0	55	270,000,000	60	175,000,000	65	180,000,000	65		Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Informasi Lingkungan Hidup	'%	0	0	0	60	100,000,000	65	120,000,000	70	140,000,000	75	160,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pertanahan							0		0		0		0		0	
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunan tanah	'%	80	80	591,580,000	81	609,209,084	82	643,507,555	83	888,040,426	84	1,091,224,076	84	1,480,463,704	Sekretariat Daerah
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							0		0		0		0		0	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat capaian pelayanan administrasi kependudukan	'%	67	70	662,010,550	75	681,738,464	80	720,120,340	85	993,766,069	90	1,221,139,746	90	1,656,720,293	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi dan kelengkapan data kependudukan	'%	0	0	0	85	257,100,000	90	139,760,000	95	127,366,000	100	114,171,000	100		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							0		0		0		0		0	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang	'%	70	70	345,140,000	70	355,425,172	70	375,435,609	70	518,101,141	70	636,642,682	70	863,733,126	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penurunan Kasus KDRT dan TPPO	'%	50	50	0	50	0	50	200,000,000	50	205,000,000	50	210,000,000	50		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kesejahteraan perempuan	'%	0	35	0	30	200,000,000	25	310,000,000	20	320,000,000	15	320,000,000	15		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tingkat kemiskinan menurun menjadi 2.84 %	'%	4.58	4	352,400,000	4	362,901,520	3	383,332,876	3	528,999,368	3	650,034,424	3	881,901,703	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							0		0		0		0		0	
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	100 % data akurat	'%	80	85	115,152,000	88	118,583,530	90	125,259,782	93	172,858,500	95	212,408,524	95	288,174,645	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program pelayanan kontrasepsi	Tercapainya program KB	'%	75	75	0	75	21,000,000	80	160,000,000	80	170,000,000	80	25,000,000	80		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 % Kelompok Kerja paham fungsi keluarga	'%	100	100	0	100	0	100	45,000,000	100	50,000,000	100	0	100		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75 % sekolah dan perguruan tinggi memiliki PIK R/M	'%	25	35	209,025,650	45	215,254,614	55	227,373,449	65	313,775,360	75	385,567,162	75	523,098,969	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana	Jumlah PUS ber KB 80 %	'%	1.77	2	1,463,946,000	2	1,507,571,591	2	1,592,447,871	1	2,197,578,062	1	2,700,383,923	1	3,663,610,869	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Peningkatan Tingkat Tahapan Kelompok Kegiatan	tingkat	0	0	71,247,000	0	73,370,161	0	77,500,901	0	106,951,243	0	131,421,687	0	178,299,803	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase Kelurahan yang memiliki WPA (Warga Peduli AIDS)	'%	8	24	465,000,000	24	478,857,000	30	505,816,649	40	698,026,976	50	857,735,548	50	1,163,689,818	Dinas Kesehatan
Sosial							0		0		0		0		0	
Program pembinaan anak terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	'%	32	35	0	37	100,000,000	40	100,000,000	42	100,000,000	45	100,000,000	45		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	'%	60	65	1,696,650,000	68	1,747,210,170	70	1,845,578,103	73	2,546,897,782	75	3,129,627,994	75	4,245,966,299	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	'%	75	80	436,581,000	85	449,591,114	87	474,903,094	90	655,366,269	92	805,314,071	92	1,092,569,601	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	3	12	101,442,000	15	104,464,972	20	110,346,350	25	152,277,962	30	187,119,160	30	253,864,564	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial	'%	25	25	3,000,000	50	3,089,400	75	3,263,333	75	4,503,400	100	5,533,778	100	7,507,676	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang meningkat kesejahteraannya	'%	1.5	2	4,096,295,100	2	4,218,364,694	2	4,455,858,626	3	6,149,084,904	3	7,555,995,530	3	10,251,219,136	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial	'%	75	75	347,600,000	80	357,958,480	80	378,111,542	85	521,793,929	90	641,180,379	90	869,889,421	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin	'%	60	60	57,151,250	61	58,854,357	62	62,167,858	63	85,791,643	64	105,420,771	64	143,024,361	Sekretariat Daerah
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Penurunan Angka Kemiskinan	'%	54	5	137,853,000	5	141,961,019	4	149,953,425	3	206,935,726	2	254,282,620	2	344,985,231	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	2	2	0	3	300,000,000	4	430,000,000	5	630,000,000	6	630,000,000	6		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Tenaga Kerja							0		0		0		0		0	
Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas	'%	66	77	34,000,000	88	35,013,200	90	36,984,443	95	51,038,532	100	62,716,148	100	85,086,997	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat tenaga kerja yang memiliki keahlian	'%	52	55	657,579,500	57	677,175,369	60	715,300,342	65	987,114,472	65	1,212,966,264	65	1,645,631,330	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap UU ketenagakerjaan	'%	5	5	581,070,001	6	598,385,887	7	632,075,012	8	872,263,517	9	1,071,837,410	9	1,454,161,814	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja	'%	8	15	55,000,000	17	56,639,000	19	59,827,776	21	82,562,330	23	101,452,592	23	137,640,731	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							0		0		0		0		0	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	82.52	83	217,000,000	84	223,466,600	85	236,047,770	86	325,745,922	87	400,276,589	87	543,055,248	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang tersentuh pembiayaan	'%	30	33	45,000,000	36	46,341,000	39	48,949,998	42	67,550,998	45	83,006,666	45	112,615,144	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	unit	3	20	460,000,000	20	473,708,000	20	500,377,760	20	690,521,309	20	848,512,585	20	1,151,177,024	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Jumlah UMKM	unit	9236	9,236		9,246	0	9,256	0	9,266	0	9,276	0	9,276	0	
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi sehat	unit	11	12	290,000,000	13	298,642,000	14	315,455,545	15	435,328,652	16	534,931,847	16	725,742,037	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Penanaman Modal							0		0		0		0		0	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor	Perusahaan	70	80	32,806,100	90	33,783,722	100	35,685,745	110	49,246,329	120	60,513,889	120	82,099,193	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	persen	2500000000	10	114,286,000	10	117,691,723	10	124,317,767	10	171,558,518	10	210,811,107	10	286,007,429	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi	dokumen	0	0	0	1	100,000,000	1	130,000,000	1	125,000,000	1	0	1		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Lancarnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase	100	100	377,525,700	100	388,775,966	100	410,664,053	100	566,716,393	100	696,381,103	100	944,780,243	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	nilai mutu	7.2	7	293,324,000	7	302,065,055	8	319,071,318	8	440,318,419	8	541,063,273	8	734,060,542	GUGUAK PANJANG
Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	'%	80	85	586,361,100	90	603,834,661	90	637,830,552	90	880,206,162	90	1,081,597,332	90	1,467,403,100	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Kebudayaan							0		0		0		0		0	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang dilaksanakan masyarakat	kali	4	52	363,480,000	57	374,311,704	59	395,385,453	61	545,631,925	63	670,472,510	63	909,630,054	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	sanggar	6	6	892,148,000	7	918,734,010	13	970,458,735	16	1,339,233,055	19	1,645,649,577	19	2,232,652,782	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	kali	0	1	301,845,000	1	310,839,981	1	328,340,272	1	453,109,575	1	556,781,046	1	755,384,845	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan Program Pengembangan nilai budaya	bln	0	12	75,000,000	12	77,235,000	12	81,583,331	12	112,584,996	12	138,344,443	12	187,691,906	AUR BIRUGO TIGO BALEH

Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya aktifitas pengembangan nilai adat dan budaya di masyarakat	kegiatan	8	8	6,352,000	9	6,541,290	10	6,909,564	11	9,535,199	12	11,716,852	12	15,896,253	GUGUAK PANJANG
Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya	kegiatan	0	0	0	3	374,500,000	4	426,200,000	4	426,660,000	4	448,872,000	4		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	'%	0	5	0	10	997,000,000	15	51,189,000,000	20	7,330,000,000	25	1,105,000,000	25		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Pengelolaan Kekayaan Budaya	'%	0	25	464,941,500	30	478,796,757	35	505,753,014	40	697,939,159	45	857,627,639	45	1,163,543,418	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Kepemudaan dan Olahraga							0		0		0		0		0	
Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah capaian program pembinaan kepemudaan	'%	0	100	931,257,100	100	959,008,562	100	1,013,000,744	100	1,397,941,026	100	1,717,789,933	100	2,330,525,602	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	'%	0	100	368,905,750	100	379,899,141	100	401,287,463	100	553,776,699	100	680,480,808	100	923,208,312	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai	unit	3	3	3,385,741,500	3	3,486,636,597	4	3,682,934,237	5	5,082,449,247	6	6,245,313,635	6	8,473,017,009	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	'%	100	100	824,261,000	100	848,823,978	100	896,612,768	100	1,237,325,619	100	1,520,425,721	100	2,062,761,576	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan	'%	100	0	0	20	0	40	145,000,000	60	155,000,000	80	165,000,000	80		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	persentase sekolah yang bebas narkoba	'%	0	0	0	0	0	20	80,000,000	40	85,000,000	60	90,000,000	60		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							0		0		0		0		0	
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Terjaganya kerukunan antar dan intern umat bergama	'%	0	100	78,847,500	100	81,197,156	100	85,768,555	10	118,360,606	100	145,441,513	100	197,320,501	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan program kualitas pemahaman dan pengamalan dan pembinaan kerukunan beragama	'%	0	100	128,000,000	100	131,814,400	100	139,235,551	100	192,145,060	100	236,107,850	100	320,327,520	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Meningkatnya aktifitas keagamaan dilingkungan masyarakat	kegiatan	3	5	194,215,000	6	200,002,607	7	211,262,754	8	291,542,600	9	358,247,547	9	486,034,447	GUGUAK PANJANG

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Kelompok masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan	Kelompok masyarakat/kelurahan	9	2	469,687,000	2	483,683,673	3	510,915,063	4	705,062,787	4	866,381,153	4	1,175,419,311	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Jumlah event keagamaan ditengah masyarakat	'%	3	3	6,497,174,600	6	6,690,790,403	9	7,067,481,903	12	9,753,125,026	15	11,984,640,032	15	16,259,561,131	Sekretariat Daerah
Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, damai dan berkualitas	'%	0	0	12,636,000	0	13,012,553	0	13,745,160	85	18,968,320	85	23,308,272	85	31,622,332	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terpantaunya kegiatan orang asing, lembaga asing, dan non govenment organization serta deteksi dini dan penanggulangan konflik sosial	'%	100	100	237,889,000	100	244,978,092	100	258,770,359	100	357,103,095	100	438,808,283	100	595,331,198	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat keamananan dan kenyamanan lingkungan	'%	40	50	300,022,600	60	308,963,273	70	326,357,906	75	450,373,910	85	553,419,461	85	750,824,182	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Sistem kebencanaan	% Jumlah Data dan Informasi tentang Kebencanan terpenuhi	'%	25	100	74,970,000	100	77,204,106	100	81,550,697	100	112,539,962	100	138,289,105	100	187,616,829	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Pelaku Konstruksi bangunan yang terlatih dalam Konstruksi bangunan layak tersedia	'%	50	0	0	70	0	75	0	80	0	90	0	90	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana	Kapasitas dan Kwalitas Petugas BPBD Meningkat dalam Penanggulanga Kebencanaan	'%	50	70	399,840,000	70	411,755,232	70	434,937,052	70	600,213,131	70	737,541,896	70	1,000,623,090	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	%Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meningkat	'%	50	60	2,155,520,000	70	2,219,754,496	75	2,344,726,674	80	3,235,722,810	90	3,976,056,189	90	5,394,315,432	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Peningkatan Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	bln	0	100	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat	Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan	kegiatan	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Efektivitas kegiatan pemberantasan narkoba	Kegiatan	3	3	196,137,000	3	201,981,883	3	213,353,463	3	294,427,778	3	361,792,854	3	490,844,365	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Terdeteksinya potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah	'%	100	100	427,527,500	100	440,267,820	100	465,054,898	100	641,775,759	100	788,614,053	100	1,069,912,685	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	'%	20	20	124,280,900	30	127,984,471	40	135,189,997	50	186,562,195	60	229,247,625	60	311,020,253	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	kasus	722	650	3,239,993,800	600	3,336,545,615	500	3,524,393,133	400	4,863,662,524	250	5,976,468,510	250	8,108,274,827	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat	'%	100	100	76,668,300	100	78,953,015	100	83,398,070	100	115,089,337	100	141,421,777	100	191,866,925	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Tingkat pelaksanaan peringatan hari-hari besar kenegaraan	'%	100	100	208,464,500	100	214,676,742	100	226,763,043	100	312,932,999	100	384,532,069	100	521,694,658	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Peningkatan program pemberrantasan penyakit masyarakat	bln	0	0	42,000,000	0	43,251,600	0	45,686,665	0	63,047,598	0	77,472,888	0	105,107,467	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Mneingkatnya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	bln	0	0	41,000,000	0	42,221,800	0	44,598,887	0	61,546,465	0	75,628,296	0	102,604,909	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas per tahun	persen	0	10	18,377,500	10	18,925,150	10	19,990,635	10	27,587,077	10	33,899,000	10	45,990,773	GUGUAK PANJANG
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Temuan Peristiwa Gangguan Ketertiban dan Keamanan disertai laporan tertulis	Laporan /Tahun	22	15	48,328,500	12	49,768,689	10	52,570,667	7	72,547,520	5	89,146,392	5	120,944,910	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Bidang Pemerintahan Umum							0		0		0		0		0	
Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah Usulan Bantuan Kemasyarakatan yang direalisasikan	Proposal /Tahun	42	60	15,000,000	60	15,447,000	60	16,316,666	60	22,516,999	60	27,668,889	60	37,538,381	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	'%	80	80	71,440,000	82	73,568,912	85	77,710,842	88	107,240,962	90	131,777,694	90	178,782,797	Sekretariat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	'%	80	80	909,099,450	81	936,190,614	82	988,898,145	83	1,364,679,440	84	1,676,918,096	84	2,275,074,781	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH	'%	80	80	7,627,000,000	85	7,854,284,600	90	8,296,480,823	95	11,449,143,536	100	14,068,707,577	100	19,087,015,569	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	'%	80	80	245,162,000	81	252,467,828	82	266,681,766	83	368,020,837	84	452,224,005	84	613,532,308	Sekretariat Daerah

Program Penataan Kelembagaan Daerah	Peningkatan capaian kinerja daerah	peringkat nasional	74	62	721,357,000	55	742,853,439	50	784,676,087	40	1,082,853,000	35	1,330,609,767	35	1,805,238,271	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur	Jumlah penyelenggaraan diklat peningkatan profesionalisme aparatur	kegiatan	0	0	0	8	800,000,000	8	812,000,000	8	834,000,000	8	836,000,000	8		Badan Kepegawaian Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	'%	100	100	559,000,000	100	575,658,200	100	608,067,757	100	839,133,504	100	1,031,127,250	100	1,398,930,340	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Meningkatnya Program peningkatan pelayanan kelurahan	'%	100	100	380,000,000	100	391,324,000	100	413,355,541	100	570,430,647	100	700,945,179	100	950,972,324	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	persen	80	82	734,210,800	84	756,090,282	86	798,658,165	88	1,102,148,267	90	1,354,319,791	90	1,837,405,660	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	orang	80	0	30,740,000	80	31,656,052	80	33,438,288	80	46,144,837	80	56,702,776	80	76,928,656	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan	'%	0	0	0	80	11,000,000	85	11,850,000	90	12,650,000	95	13,275,000	95		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kerjasama Tugas Sekretariat DPRD se Indonesia	'%	100	100	109,500,000	100	112,763,100	100	119,111,663	100	164,374,094	100	201,982,887	100	274,030,183	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terstandarisasinya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	'%	100	100	50,000,000	100	51,490,000	100	54,388,887	100	75,056,664	100	92,229,629	100	125,127,937	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemerintahan	'%	100	100	12,522,580,525	100	12,895,753,425	100	13,621,784,342	100	18,798,062,393	100	23,099,059,068	100	31,338,493,438	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	'%	100	100	36,000,000	100	37,072,800	100	39,159,999	100	54,040,798	100	66,405,333	100	90,092,115	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Perizinan	dokumen	2	2	12,666,000	1	13,043,447	1	13,777,793	1	19,013,354	1	23,363,610	1	31,697,409	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase capaian realisasi penyelenggaraan pemerintahan	'%	81	75	762,195,900	80	784,909,338	80	829,099,734	85	1,144,157,632	90	1,405,940,899	90	1,907,440,017	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kegiatan yang dikelola dengan sistem otomisasi	kegiatan	1	1	502,385,200	3	517,356,279	5	546,483,437	7	754,147,144	7	926,696,010	7	1,257,248,477	Badan Kepegawaian Daerah

Peningkatan Kemitraan Legislatif dengan Eksekutif	Terjalinnya kemitraan yang sinergis antara legislatif dan eksekutif	'%	100	0	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukittinggi	persen	10	15	2,092,983,550	20	2,155,354,460	30	2,276,700,916	50	3,141,847,264	75	3,860,701,918	75	5,237,814,292	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ditindaklanjutinya Pengaduan Masyarakat Secara Komprehensif	'%	100	100	0	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
Program Penyelenggaraan Adipura	Tingkat penilaian adipura	'%	71	75	0	77	0	80	325,000,000	85	325,000,000	87	325,000,000	87		Kantor Lingkungan Hidup	
Program Penegasan Batas Wilayah	Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan	'%	80	80	671,985,500	81	692,010,668	82	730,970,869	83	1,008,739,799	84	1,239,539,464	84	1,681,683,191	Sekretariat Daerah	
Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	'%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Sekretariat Daerah	
Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat inflasi daerah	'%	2.84	9	575,800,100	6	592,958,943	5	626,342,531	5	864,352,693	4	1,062,116,590	4	1,440,973,577	Sekretariat Daerah	
Program Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rupiah (Milyar)	28892	31,758	3,021,888,000	34,927	3,111,940,262	38,432	3,287,142,499	42,311	4,536,256,649	46,605	5,574,152,170	46,605	7,562,452,249	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
Program Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD`	'%	100	100	111,720,000	100	115,049,256	100	121,526,529	100	167,706,610	100	206,077,883	100	279,585,863	Dinas Pengelolaan Pasar	
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Peningkatan program peningkatan kinerja LPMK dan RT	bln	12	12	63,000,000	12	64,877,400	12	68,529,998	12	94,571,397	12	116,209,332	12	157,661,201	AUR BIRUGO TIGO BALEH	
Program Pembinaan PKK	Peningkatan program pembinaan PKK	bln	12	12	92,500,000	12	95,256,500	12	100,619,441	12	138,854,829	12	170,624,813	12	231,486,684	AUR BIRUGO TIGO BALEH	
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan RT	'%	90	80	67,748,400	85	69,767,302	90	73,695,201	95	101,699,378	100	124,968,196	100	169,544,351	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	
Pangan							0		0		0		0		0		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	2400	2,400	387,248,000	2,400	398,787,990	2,400	421,239,754	2,400	581,310,861	2,400	714,314,786	2,400	969,110,870	Kantor Ketahanan Pangan	
	Ketersediaan protein perkapita	gr/kap/hr	63	63		63	0	63	0	63	0	63	0	63	0		
Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	84.1	84	293,333,800	84	302,075,147	85	319,081,978	85	440,333,130	85	541,081,350	85	734,085,067	Kantor Ketahanan Pangan	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							0		0		0		0		0		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tiingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	'%	15	20	497,375,200	25	512,196,981	30	541,033,671	34	746,626,466	40	917,454,601	40	1,244,710,658	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	'%	15	20	1,898,758,100	25	1,955,341,091	30	2,065,426,795	34	2,850,288,977	40	3,502,435,095	40	4,751,753,693	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari	

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya peren perempuan dipedesaan	'%	100	100	184,000,000	100	189,483,200	100	200,151,104	100	276,208,524	100	339,405,034	100	460,470,810	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan program keberdayaan masyarakat pedesaan	bln	12	12	151,000,000	12	155,499,800	12	164,254,439	12	226,671,125	12	278,533,479	12	377,886,371	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	'%	100	100	640,000,000	100	659,072,000	100	696,177,754	100	960,725,300	100	1,180,539,249	100	1,601,637,599	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertahunnya	persen	802661	3	581,898,000	3	599,238,560	3	632,975,691	3	873,506,454	3	1,073,364,731	3	1,456,233,930	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun	'%	5	7	180,868,900	9	186,258,793	12	196,745,163	15	271,508,325	17	333,629,430	17	452,635,048	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Tingkat partisipasi perempuan dalam pencapaian tujuan program pemerintah	'%	100	80	341,078,000	85	351,242,124	90	371,017,056	95	512,003,537	100	629,149,947	100	853,567,733	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatkanya persentase aktifitas guna peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakn oleh pemerintah maupun masyarakat	Persen	10	10	543,400,500	10	559,593,835	10	591,098,968	10	815,716,576	10	1,002,352,528	10	1,359,891,675	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	'%	80	80	615,303,000	85	633,639,029	85	669,312,907	90	923,651,811	90	1,134,983,346	90	1,539,831,905	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	'%	15	15	2,180,510,600	20	2,245,489,816	25	2,371,910,893	30	3,273,237,032	34	4,022,153,665	34	5,456,855,877	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	'%	20	25	193,442,900	30	199,207,498	35	210,422,881	40	290,383,575	45	356,823,337	45	484,102,222	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya program peningkatan usaha ekonomi masyarakat	bln	0	0	195,538,000	0	201,365,032	0	212,701,884	0	293,528,600	0	360,687,943	0	489,345,332	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat	pelaku	0	0	141,194,000	90	145,401,581	120	153,587,690	90	211,951,013	120	260,445,404	120	353,346,280	GUGUAK PANJANG

Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	'%	3	3	77,821,500	5	80,140,581	6	84,652,495	8	116,820,444	10	143,548,961	10	194,752,876	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Statistik							0		0		0		0		0	
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pemenuhan Data pembangunan Daerah	'%	66	70	244,655,500	80	251,946,234	85	266,130,807	90	367,260,513	100	451,289,719	100	612,264,762	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD	Persen	10	0	0	20	50,000,000	30	57,500,000	40	60,000,000	50	65,000,000	50		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi statistik daerah	persen	100	100	29,249,800	100	30,121,444	100	31,817,281	100	43,907,848	100	53,953,964	100	73,199,343	Dinas Pertanian
Kearsipan							0		0		0		0		0	
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan	'%	100	100	0	100	510,000,000	100	535,000,000	100	560,000,000	100	585,000,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi	'%	100	100	97,268,600	100	100,167,204	100	105,806,618	100	146,013,133	100	179,420,937	100	243,420,386	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan	'%	100	100	0	100	60,000,000	100	52,000,000	100	15,000,000	100	17,500,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	'%	100	100	47,500,000	100	48,915,500	100	51,669,443	100	71,303,831	100	87,618,147	100	118,871,541	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Komunikasi dan Informatika							0		0		0		0		0	
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Persen	80	80	142,000,000	82	146,231,600	85	154,464,439	87	213,160,926	90	261,932,146	90	355,363,342	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Persentase tingkat ketercapaian penyebaran informasi Pemda Bukittinggi kepada masyarakat	'%	80	80	2,485,337,800	83	2,559,400,866	85	2,703,495,135	88	3,730,823,287	90	4,584,435,655	90	6,219,703,853	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tingkat pencapaian pelayanan informasi kepada publik	'%	80	80	419,853,220	81	432,364,846	82	456,706,987	83	630,255,642	84	774,458,133	84	1,050,707,348	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya sarana dan prasarana TIK menuju smart city	Persen	80	80	1,034,736,000	82	1,065,571,133	85	1,125,562,788	87	1,553,276,647	90	1,908,666,344	90	2,589,487,628	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat	publikasi	0	12	16,675,000	12	17,171,915	12	18,138,694	12	25,031,397	12	30,758,581	12	41,730,167	GUGUAK PANJANG

Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat Melalu Media Cetak Dan Elektronik	Publikasi/Tahun	24	24	11,450,000	24	11,791,210	27	12,455,055	27	17,187,976	29	21,120,585	29	28,654,298	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan program komunikasi, informasi dan media massa	'%	100	100	0	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi di masyarakat	bulan	12	12	52,678,000	12	54,247,804	12	57,301,956	12	79,076,699	12	97,169,448	12	131,829,790	GUGUAK PANJANG
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan Telekomunikasi	Persen	80	80	257,000,000	82	264,658,600	85	279,558,879	87	385,791,253	90	474,060,292	90	643,157,598	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Perpustakaan							0		0		0		0		0	
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan	'%	100	100	248,249,470	100	255,647,304	100	270,040,247	100	372,655,541	100	457,919,129	100	621,258,883	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Pertanian							0		0		0		0		0	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi	kelompok	10	11	23,763,600	12	24,471,755	13	25,849,515	14	35,672,331	15	43,834,160	15	59,469,805	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	persen	0	5	64,257,200	5	66,172,065	5	69,897,552	5	96,458,621	5	118,528,354	5	160,807,418	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	2	2	370,088,300	2	381,116,931	2	402,573,815	2	555,551,864	2	682,662,131	2	926,167,713	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian	persen	2	2	155,835,200	2	160,479,089	2	169,514,062	2	233,929,405	2	287,452,453	2	389,986,743	Dinas Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)	persen	70	73	306,133,100	78	315,255,866	80	333,004,772	82	459,546,585	85	564,690,844	85	766,116,067	Dinas Pertanian
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persen	100	100	139,098,800	100	143,243,944	100	151,308,578	100	208,805,838	100	256,580,614	100	348,102,919	Dinas Pertanian

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	1	2	43,233,800	2	44,522,167	2	47,028,765	2	64,899,696	2	79,748,747	2	108,195,124	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	kwintal/ Ha	66.7	67	87,987,400	67	90,609,425	67	95,710,735	67	132,080,814	67	162,300,905	67	220,193,638	Dinas Pertanian
Kehutanan							0		0		0		0		0	
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan luas lahan yang dihijaukan	persen	2	2	61,740,800	2	63,580,676	2	67,160,268	2	92,681,170	2	113,886,621	2	154,509,979	Dinas Pertanian
Pariwisata							0		0		0		0		0	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	meningkatnya jumlah wisatawan	orang	460905	483,950	2,042,367,950	508,148	2,103,230,515	533,555	2,221,642,393	560,233	3,065,866,502	588,245	3,767,336,758	588,245	5,111,145,779	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Kelautan dan Perikanan							0		0		0		0		0	
Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	persen	2	2	77,740,500	2	80,057,167	2	84,564,385	2	116,698,852	2	143,399,549	2	194,550,168	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Perikanan budidaya	Jumlah Produksi ikan	ton	355	351	220,693,700	352	227,270,372	353	240,065,694	354	331,290,658	355	407,089,961	355	552,298,950	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan	Meningkatnya kualitas SDM Perikanan		0	0	15,650,500	0	16,116,885	0	17,024,266	0	23,493,486	0	28,868,796	0	39,166,296	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Daya Saing Produk Perikanan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	persen	40	10	0	10	70,000,000	10	75,000,000	10	80,000,000	10	85,000,000	10		Dinas Pertanian
Perdagangan							0		0		0		0		0	
Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat Pengawasan dan Ketertiban Pasar	'%	100	100	374,907,000	100	386,079,229	100	407,815,489	100	562,785,375	100	691,550,669	100	938,226,792	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Tingkat Sarana dan Prasarana yang dikembangkan	$	100	100	2,393,450,000	100	2,464,774,810	100	2,603,541,632	100	3,592,887,452	100	4,414,940,101	100	5,989,749,235	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha	perusahaan	2553	300	554,000,000	350	570,509,200	400	602,628,868	450	831,627,838	500	1,021,904,287	500	1,386,417,546	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri	IKM	0	2	250,000,000	2	257,450,000	2	271,944,435	2	375,283,320	2	461,148,144	2	625,639,687	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL	lokasi	0	0	120,000,000	1	123,576,000	1	130,533,329	1	180,135,994	1	221,351,109	1	300,307,050	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah komoditas peredaran barang yang di awasi	jenis	20	20	705,000,000	20	726,009,000	20	766,883,307	22	1,058,298,963	22	1,300,437,766	22	1,764,303,917	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Jumlah UTTP yang di awasi	unit	300	30		30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	
Industri							0		0		0		0		0	
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM	'%	1	2	616,750,000	2	635,129,150	2	670,886,921	2	925,823,951	2	1,137,652,471	2	1,543,453,108	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang	unit usaha	0	5	886,125,000	10	912,531,525	15	963,907,050	20	1,330,191,729	30	1,634,539,596	30	2,217,579,870	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya nilai produksi IKM	'%	4.1113E+11	2	47,527,000	2	48,943,305	2	51,698,813	2	71,344,361	2	87,667,951	2	118,939,110	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan

Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal	&	476	7	30,000,000	7	30,894,000	7	32,633,332	7	45,033,998	7	55,337,777	7	75,076,762	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB	Persen	0.07	0	185,000,000	0	190,513,000	0	201,238,882	0	277,709,657	0	341,249,627	0	462,973,368	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Pertumbuhan industri	unit	1638	15		15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	
Persandian							0		0		0		0		0	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	'%	80	80	574,865,000	82	591,995,977	85	625,325,351	88	862,948,984	90	1,060,391,711	90	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
Keuangan							0		0		0		0		0	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi	opini	3	3	4,841,271,107	3	4,985,540,986	3	5,266,226,943	3	7,267,393,182	3	8,930,172,742	3	12,115,565,359	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							0		0		0		0		0	
Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang difasilitasi mengikuti pendidikan kedinasan	orang	1500	550	2,545,102,500	550	2,620,946,555	530	2,768,505,846	535	3,820,538,067	550	4,694,677,177	550	6,369,268,525	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai sesuai standar kompetensi	'%	60	60	325,945,100	70	335,658,264	80	354,555,824	90	489,287,037	95	601,235,912	95	815,696,761	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	'%	80	80	0	82	0	85	0	88	0	90	0	90	0	Sekretariat Daerah
Bidang Pengawasan							0		0		0		0		0	
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	'%	100	100	319,019,650	100	328,526,436	100	347,022,474	100	478,891,014	100	588,461,278	100	798,365,416	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	'%	100	100	1,147,785,210	100	1,181,989,209	100	1,248,535,202	100	1,722,978,578	100	2,117,196,077	100	2,872,399,918	Inspektorat Daerah
Bidang Penunjang Lainnya							0		0		0		0		0	
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan oleh masyarakat	kegiatan	5	5	416,710,000	5	429,127,958	5	453,287,862	5	625,537,250	5	768,660,172	5	1,042,841,256	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pendidikan politik masyarakat	Efektivitas kegiatan pendidikan politik masyarakat	kegiatan	7	3	1,088,151,500	3	1,120,578,415	3	1,183,666,979	3	1,633,460,432	3	2,007,196,178	3	2,723,163,055	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda	'% kegiatan	0	100	173,906,100	100	179,088,502	100	189,171,184	100	261,056,235	100	320,785,901	100	435,210,232	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
							201,549,646,000		############		98,405,014,833		79,641,275,375		4,302,500,000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana & Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,260,897,000	100	32,280,646,000	100	1,601,292,000	100	2,436,344,000	100	2,867,171,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	unit	0	0	68,000,000	1	70,085,000,000	0	40,085,000,000	0	0	0	0	0		Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas. Pustu dan Jaringannya yang dapat melaksanakan pelayanan kesehatan	'%	100	100	4,270,840,000	100	2,900,000,000	100	13,400,000,000	100	3,030,000,000	100	4,391,000,000	100		Dinas Kesehatan
Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	'%	65	65	2,300,000,000	70	360,000,000	75	7,700,000,000	80	23,365,000,000	85	23,046,500,000	85		Dinas Pekerjaan Umum
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	'%	48	48	943,071,400	55	2,940,000,000	70	12,104,083,333	90	23,785,170,833	100	23,937,604,375	100		Dinas Pekerjaan Umum
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	'%	98	0	0	98	488,000,000	99	561,200,000	100	3,420,000,000	100	3,762,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang terpelihara / normalisasi	'%	47	0	0	55	1,000,000,000	65	1,100,000,000	70	1,210,000,000	75	1,331,000,000	75		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota	'%	60	60	0	65	250,000,000	70	0	0	0	0	0	0		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat - alat berat ke PU an / Kebinamargaan	'%	30	0	0	50	4,000,000,000	65	4,050,000,000	80	4,105,000,000	90	1,665,500,000	90		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Pembangunan Rusunawa yang layak huni	unit	0	0	0	0	0	1	15,000,000,000	1	15,000,000,000	0	0	0		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH/ Non Hijau	'%	7.78	8	600,000,000	8	2,000,000,000	8	5,700,000,000	9	6,420,000,000	9	4,662,000,000	9		Dinas Pekerjaan Umum
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah	'%	90	90	151,928,000	91	2,152,000,000	92	154,000,000	93	2,156,500,000	94	158,500,000	94	2,156,500,000	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)	Kemudahan mendapatkan informasi melalui media elektronik menuju smart city	Persen	80	80	81,000,000	82	1,135,000,000	85	1,090,000,000	87	95,000,000	90	100,000,000	90	1,090,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	meningkatnya jumlah PAD yang dikelola Dinas Pariwisata	rupiah (Milyar)	8041	10,086	8,491,764,000	10,091	81,424,000,000	10,097	11,960,000,000	10,112	12,326,000,000	10,127	13,153,000,000	10,127		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan TIK OLeh SKPD dan Layanan Kepada Publik dalam mewujudkan smart city	Persen	80	81	531,000,000	82	535,000,000	83	1,055,000,000	84	1,056,000,000	85	567,000,000	85	1,056,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika	

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-							**485,846,994,622**		**460,327,519,658**		**518,119,714,711**		**583,604,303,752**		**657,834,486,413**	
							216,506,240,005		**175,912,885,333**		**126,135,190,833**		**101,867,193,375**		**4,302,500,000**	
							269,340,754,617		**284,414,634,325**		**391,984,523,878**		**481,737,110,377**		**653,531,986,413**	
					281,230,131,066		**485,352,347,325**		**460,195,028,495**		**518,090,548,396**		**583,503,208,749**		**657,726,329,558**	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	465,300,000			100	300,000,000	100	60,000,000	100	75,000,000	100	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam menggunakan atribut kepegawaian	'%	100	100	18,000,000	100	18,536,400	100	19,579,999	100	27,020,399	100	33,202,666	100	45,046,057	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	656,988,500	100	676,566,757	100	714,657,466	100	986,227,303	100	1,211,876,110	100	1,644,152,318	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	11,550,000	100	11,894,190	100	12,563,833	100	17,338,089	100	21,305,044	100	28,904,554	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	865,000,000	100	890,777,000	100	940,927,745	100	1,298,480,288	100	1,595,572,578	100	2,164,713,317	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	22,150,000	100	22,810,070	100	24,094,277	100	33,250,102	100	40,857,726	100	55,431,676	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	683,530,700	100	703,899,915	100	743,529,480	100	1,026,070,682	100	1,260,835,655	100	1,710,575,733	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,760,000	100	4,901,848	100	5,177,822	100	7,145,394	100	8,780,261	100	11,912,180	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,987,400	100	11,314,825	100	11,951,849	100	16,493,552	100	20,267,276	100	27,496,614	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	257,387,100	100	265,057,236	100	279,979,958	100	386,372,342	100	474,774,334	100	644,126,339	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	12,150,000	100	12,512,070	100	13,216,500	100	18,238,769	100	22,411,800	100	30,406,089	Kantor Lingkungan Hidup

69,938,777,664
0.119860142

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	309,798,600	100	319,030,598	100	336,992,021	100	465,048,989	100	571,452,198	100	775,289,196	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	2,300,000	100	2,368,540	100	2,501,889	100	3,452,607	100	4,242,563	100	5,755,885	Kantor Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	21,300,000	100	21,934,740	100	23,169,666	100	31,974,139	100	39,289,822	100	53,304,501	Kantor Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	6,300,000	100	6,487,740	100	6,853,000	100	9,457,140	100	11,620,933	100	15,766,120	Kantor Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	230,200,600	100	237,060,578	100	250,407,088	100	345,561,782	100	424,626,318	100	576,090,525	Kantor Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	'%	100	100	353,159,200	100	363,683,344	100	384,158,716	100	530,139,029	100	651,434,838	100	883,801,645	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	1,910,300	100	1,967,227	100	2,077,982	100	2,867,615	100	3,523,725	100	4,780,638	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja	'%	100	100	17,950,000	100	18,484,910	100	19,525,610	100	26,945,342	100	33,110,437	100	44,920,930	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang berpakaian sesuai aturan	'%	100	100	18,600,000	100	19,154,280	100	20,232,666	100	27,921,079	100	34,309,422	100	46,547,593	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perentasee laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	2,020,000	100	2,080,196	100	2,197,311	100	3,032,289	100	3,726,077	100	5,055,169	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	65,000,000	100	66,937,000	100	70,705,553	100	97,573,663	100	119,898,517	100	162,666,319	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	19,000,000	100	19,566,200	100	20,667,777	100	28,521,532	100	35,047,259	100	47,548,616	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	343,857,700	100	354,104,659	100	374,040,752	100	516,176,237	100	634,277,361	100	860,524,095	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	132,000,000	100	135,933,600	100	143,586,662	100	198,149,593	100	243,486,220	100	330,337,755	Sekretariat Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,513,220,400	100	6,707,314,368	100	7,084,936,167	100	9,777,211,910	100	12,014,237,995	100	16,299,716,688	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	90	90	111,000,000	90	114,307,800	90	120,743,329	90	166,625,794	95	204,749,776	95	277,784,021	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	3,237,400,000	100	3,333,874,520	100	3,521,571,655	100	4,859,768,885	100	5,971,684,005	100	8,101,783,690	Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersedian Layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	5,111,604,400	100	5,263,930,211	100	5,560,289,482	100	7,673,199,485	100	9,428,827,527	100	12,792,090,306	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaiakan kinerja dan keuangann yang tersesusun tepat waktu	'%	100	100	78,666,400	100	81,010,659	100	85,571,559	100	118,088,751	100	145,107,457	100	196,867,287	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana & Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,260,897,000	100	32,280,646,000	100	1,601,292,000	100	2,436,344,000	100	2,867,171,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran & Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	169,750,000	100	174,808,550	100	184,650,271	100	254,817,374	100	313,119,590	100	424,809,347	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	46,800,000	100	48,194,640	100	50,907,998	100	70,253,038	100	86,326,933	100	117,119,749	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kesediaan layanan administrasi perkantoran		100	100	7,893,622,000	100	8,128,851,936	100	8,586,506,300	100	11,849,378,693	100	14,560,516,538	100	19,754,252,788	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persentase	100	100	9,377,500	100	9,656,950	100	10,200,636	100	14,076,877	100	17,297,667	100	23,467,745	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persentase	100	100	1,910,080,000	100	1,967,000,384	100	2,077,742,506	100	2,867,284,658	100	3,523,319,387	100	4,780,087,413	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	635,835,000	100	654,782,883	100	691,647,159	100	954,473,080	100	1,172,856,521	100	1,591,214,441	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	60	60	1,342,932,360	70	1,382,951,744	80	1,460,811,928	90	2,015,920,460	95	2,477,163,061	95	3,360,767,125	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	122,654,500	100	126,309,604	100	133,420,835	100	184,120,752	100	226,247,580	100	306,950,092	Badan Kepegawaian Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	482,769,475	100	497,156,005	100	525,145,888	100	724,701,326	100	890,512,989	100	1,208,158,973	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	16,450,000	100	16,940,210	100	17,893,944	100	24,693,642	100	30,343,548	100	41,167,091	Badan Kepegawaian Daerah
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	'%	100	100	878,892,100	100	905,083,085	100	956,039,262	100	1,319,334,182	100	1,621,197,843	100	2,199,479,113	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	100	214,300,000	100	220,686,140	100	233,110,770	100	321,692,862	100	395,296,189	100	536,298,340	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persentase	100	100	19,350,000	100	19,926,630	100	21,048,499	100	29,046,929	100	35,692,866	100	48,424,512	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	438,888,200	100	451,967,068	100	477,412,814	100	658,829,684	100	809,569,915	100	1,098,343,504	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase	100	100	16,165,900	100	16,647,644	100	17,584,906	100	24,267,171	100	29,819,499	100	40,456,114	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,698,700,000	100	2,779,121,260	100	2,935,585,787	100	4,051,108,386	100	4,978,001,985	100	6,753,655,293	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedispilanan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pagawai	'%	100	100	150,000,000	100	154,470,000	100	163,166,661	100	225,169,992	100	276,688,886	100	375,383,812	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesedian Layan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,153,130,000	100	2,217,293,274	100	2,342,126,885	100	3,232,135,102	100	3,971,647,613	100	5,388,334,317	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,900,000	100	11,224,820	100	11,856,777	100	16,362,353	100	20,106,059	100	27,277,890	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	1,446,300,000	100	1,489,399,740	100	1,573,252,945	100	2,171,089,065	100	2,667,834,243	100	3,619,450,717	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persen	100	100	225,225,000	100	231,936,705	100	244,994,741	100	338,092,743	100	415,448,363	100	563,638,794	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	5,562,692,900	100	5,728,461,148	100	6,050,973,511	100	8,350,343,445	100	10,260,902,026	100	13,920,965,778	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persetase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	100	11,358,000	100	11,696,468	100	12,354,980	100	17,049,872	100	20,950,882	100	28,424,062	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan Administrasi	'%	100	100	1,480,784,350	100	1,524,911,724	100	1,610,764,254	100	2,222,854,670	100	2,731,443,819	100	3,705,749,829	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capain kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	5,051,400	100	5,201,932	100	5,494,800	100	7,582,825	100	9,317,775	100	12,641,425	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	86,000,000	100	88,562,800	100	93,548,886	100	129,097,462	100	158,634,962	100	215,220,052	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	59,400,000	100	61,170,120	100	64,613,998	100	89,167,317	100	109,568,799	100	148,651,990	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	474,236,200	100	488,368,439	100	515,863,582	100	711,891,743	100	874,772,574	100	1,186,803,951	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,900,000	100	5,046,020	100	5,330,111	100	7,355,553	100	9,038,504	100	12,262,538	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	102,983,800	100	106,052,717	100	112,023,485	100	154,592,410	100	189,963,153	100	257,723,010	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	23,000,000	100	23,685,400	100	25,018,888	100	34,526,065	100	42,425,629	100	57,558,851	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	418,985,000	100	431,470,753	100	455,762,556	100	628,952,328	100	772,856,620	100	1,048,534,577	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	107,580,000	100	110,785,884	100	117,023,129	100	161,491,918	100	198,441,269	100	269,225,270	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,367,447,130	100	2,437,997,054	100	2,575,256,289	100	3,553,853,678	100	4,366,975,400	100	5,924,675,525	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu	'%	100	100	14,575,800	100	15,010,159	100	15,855,231	100	21,880,218	100	26,886,412	100	36,476,796	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	65,100,000	100	67,039,980	100	70,814,331	100	97,723,777	100	120,082,977	100	162,916,574	Dinas Pertanian

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam Kehadiran dan pemakaian atribut	'%	100	100	33,300,000	100	34,292,340	100	36,222,999	100	49,987,738	100	61,424,933	100	83,335,206	Dinas Pertanian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	907,064,550	100	934,095,074	100	986,684,626	100	1,361,624,784	100	1,673,164,535	100	2,269,982,324	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun waktu	'%	100	100	1,706,000	100	1,756,839	100	1,855,749	100	2,560,933	100	3,146,875	100	4,269,365	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	182,815,000	100	188,262,887	100	198,862,088	100	274,429,681	100	337,219,192	100	457,505,277	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,426,417,200	100	1,468,924,433	100	1,551,624,878	100	2,141,242,332	100	2,631,158,577	100	3,569,692,842	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuanagan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	3,878,500	100	3,994,079	100	4,218,946	100	5,822,145	100	7,154,252	100	9,706,174	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	173,300,000	100	178,464,340	100	188,511,882	100	260,146,398	100	319,667,893	100	433,693,431	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	unit	4	4	43,620,000	4	44,919,876	4	47,448,865	4	65,479,434	4	80,461,128	4	109,161,613	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	stel	40	40	40,500,000	40	41,706,900	40	44,054,998	40	60,795,898	40	74,705,999	40	101,353,629	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	bln	12	12	337,561,200	12	347,620,524	12	367,191,559	12	506,724,352	12	622,662,883	12	844,766,734	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen yang tersusun dengan tepat waktu	dokumen	3	3	5,980,000	3	6,158,204	3	6,504,911	3	8,976,777	3	11,030,664	3	14,965,301	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	874,400,000	100	900,457,120	100	951,152,856	100	1,312,590,941	100	1,612,911,748	100	2,188,237,369	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	40,500,000	100	41,706,900	100	44,054,998	100	60,795,898	100	74,705,999	100	101,353,629	GUGUAK PANJANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	339,733,200	100	349,857,249	100	369,554,212	100	509,984,813	100	626,669,339	100	850,202,292	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan YangTersusun Tepat Waktu	'%	100	100	7,989,000	100	8,227,072	100	8,690,256	100	11,992,554	100	14,736,450	100	19,992,942	GUGUAK PANJANG

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	48,600,000	100	50,048,280	100	52,865,998	100	72,955,077	100	89,647,199	100	121,624,355	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	394,870,450	100	406,637,589	100	429,531,286	100	592,753,174	100	728,375,101	100	988,186,499	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	22,114,000	100	22,772,997	100	24,055,117	100	33,196,061	100	40,791,320	100	55,341,584	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	0	100	378,400,000	100	389,676,320	100	411,615,097	100	568,028,834	100	697,993,831	100	946,968,230	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	108,000,000	100	111,218,400	100	117,479,996	100	162,122,394	100	199,215,998	100	270,276,345	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,070,114,000	100	1,102,003,397	100	1,164,046,188	100	1,606,383,740	100	1,973,924,340	100	2,678,023,152	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	55,500,000	100	57,153,900	100	60,371,665	100	83,312,897	100	102,374,888	100	138,892,011	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	410,500,000	100	422,732,900	100	446,532,762	100	616,215,212	100	757,205,252	100	1,027,300,366	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,668,453,440	100	1,718,173,353	100	1,814,906,512	100	2,504,570,987	100	3,077,616,829	100	4,175,402,752	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu	'%	100	100	9,342,400	100	9,620,804	100	10,162,455	100	14,024,188	100	17,232,922	100	23,379,905	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	740,875,000	100	762,953,075	100	805,907,333	100	1,112,152,120	100	1,366,612,525	100	1,854,083,212	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	153,000,000	100	157,559,400	100	166,429,994	100	229,673,392	100	282,222,664	100	382,891,488	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	65,250,000	100	67,194,450	100	70,977,498	100	97,948,947	100	120,359,666	100	163,291,958	Dinas Pekerjaan Umum

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,425,988,650	100	6,617,483,112	100	6,990,047,411	100	9,646,265,427	100	11,853,330,957	100	16,081,414,109	Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	39,792,100	100	40,977,905	100	43,284,961	100	59,733,246	100	73,400,212	100	99,582,068	Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	4,770,756,100	80	4,912,924,632	85	5,189,522,289	90	7,161,540,758	95	8,800,101,284	95	11,939,097,412	Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan dalam atribut pegawai	'%	80	85	40,000,000	90	41,192,000	95	43,511,110	100	60,045,331	100	73,783,703	100	100,102,350	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan adm perkantoran	'%	75	75	514,552,000	75	529,885,650	80	559,718,212	85	772,411,132	90	949,138,799	90	1,287,696,609	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	85	90	13,250,000	95	13,644,850	100	14,413,055	100	19,890,016	100	24,440,852	100	33,158,903	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	26,300,000	80	27,083,740	85	28,608,555	90	39,479,805	95	48,512,785	95	65,817,295	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen	90	91	153,000,000	92	157,559,400	93	166,429,994	94	229,673,392	95	282,222,664	95	382,891,488	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	90	91	1,268,502,000	92	1,306,303,360	93	1,379,848,239	94	1,904,190,569	95	2,339,869,372	95	3,174,500,777	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	Persen	90	91	13,271,000	92	13,666,476	93	14,435,898	94	19,921,540	95	24,479,588	95	33,211,457	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90	91	331,300,000	92	341,172,740	93	360,380,765	94	497,325,456	95	611,113,520	95	829,097,713	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.	'%	100	100	19,300,000	100	19,875,140	100	20,994,110	100	28,971,872	100	35,600,637	100	48,299,384	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	6,750,000	100	6,951,150	100	7,342,500	100	10,132,650	100	12,451,000	100	16,892,272	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,086,100	100	10,386,666	100	10,971,435	100	15,140,580	100	18,604,745	100	25,241,058	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparaur	'%	100	100	390,950,000	100	402,600,310	100	425,266,707	100	586,868,056	100	721,143,468	100	978,375,342	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	19,800,000	100	20,390,040	100	21,537,999	100	29,722,439	100	36,522,933	100	49,550,663	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layananan administrasi perkantoran	'%	100	100	407,394,800	100	419,535,165	100	443,154,995	100	611,553,893	100	751,477,424	100	1,019,529,421	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	dokumen	0	100	5,100,000	100	5,251,980	100	5,547,666	100	7,655,780	100	9,407,422	100	12,763,050	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	'%	100	100	2,150,000	100	2,214,070	100	2,338,722	100	3,227,437	100	3,965,874	100	5,380,501	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	11,300,000	100	11,636,740	100	12,291,888	100	16,962,806	100	20,843,896	100	28,278,914	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	14,850,000	100	15,292,530	100	16,153,499	100	22,291,829	100	27,392,200	100	37,162,997	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan layanan adminidtrasi perkantoran	'%	100	100	328,776,550	100	338,574,091	100	357,635,813	100	493,537,421	100	606,458,783	100	822,782,631	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	20	30	70,000,000	40	72,086,000	50	76,144,442	60	105,079,330	70	129,121,480	70	175,179,112	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	100	100	82,950,000	100	85,421,910	100	90,231,164	100	124,519,006	100	153,008,954	100	207,587,248	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tercapaianya pentaan jabatan dan informasi dibidang sumber daya aparatur	'%	90	90	120,000,000	91	123,576,000	92	130,533,329	93	180,135,994	94	221,351,109	94	300,307,050	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	persen	15	0	0	20	50,000,000	25	80,000,000	30	100,000,000	35	120,000,000	35		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	198,880,150	100	204,806,778	100	216,337,400	100	298,545,612	100	366,852,848	100	497,709,259	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	100	230,000,000	100	236,854,000	100	250,188,880	100	345,260,655	100	424,256,292	100	575,588,512	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	0	0	70	83,994,005	70	250,000,000	70	252,500,000	70	280,000,000	70		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Ketersediaan SDM sesuai Bidang Keahlian	'%	70	0	0	70	100,000,000	75	110,000,000	80	121,000,000	85	133,100,000	85		Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha	persen	50	50	0	60	70,000,000	65	120,000,000	70	120,000,000	75	125,000,000	75		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Pendidikan																
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	'% kegiatan	0	100	7,796,131,800	100	8,028,456,528	100	8,480,458,630	100	11,703,032,910	100	14,380,686,839	100	19,510,277,835	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya kegiatan untuk Pendidikan Anak Usia Dini	'%	0	100	505,396,950	100	520,457,779	100	549,759,552	100	758,668,182	100	932,251,462	100	1,264,785,558	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pendidikan Menengah	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SMP	nilai	0	0	4,914,299,720	0	5,060,745,852	0	5,345,665,843	0	7,377,018,863	0	9,064,880,779	0	12,298,323,753	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pendidikan Luar Biasa	Angka putus sekolah	'%	0.25	0	60,680,000	0	62,488,264	0	66,006,353	0	91,088,768	0	111,929,878	0	151,855,265	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SD	nilai	70	70	6,976,936,083	75	7,184,848,778	80	7,589,355,764	85	10,473,310,955	90	12,869,604,501	90	17,460,192,427	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pendidikan Non Formal	Optimalisasi pelayanan non formal	'%	0	100	291,362,100	100	300,044,691	100	316,937,207	100	437,373,345	100	537,444,367	100	729,150,772	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya manjemen pelayanan pendidikan	'%	100	100	500,000,000	100	514,900,000	100	543,888,870	100	750,566,641	100	922,296,288	100	1,251,279,374	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Kesehatan																
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	'%	85	85	0	86	120,000,000	87	150,000,000	88	160,000,000	90	180,000,000	90		Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Ratio tenaga paramedis per satuan penduduk (Bidan dan perawat)	tenaga paramedis/satuan penduduk	12.95	13	0	13	145,000,000	13	152,000,000	13	159,000,000	13	166,000,000	13		Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	'%	100	100	6,459,177,000	100	6,651,660,475	100	7,026,148,959	100	9,696,085,564	100	11,914,549,941	100	16,164,469,905	Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	'%	5972	65	504,635,400	65	519,673,535	70	548,931,155	70	757,524,994	75	930,846,712	75	1,262,879,735	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada rumah sakit	'%	25	25	0	25	0	25	0	25	8,000,000,000	25	12,000,000,000	25		Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	unit	0	0	68,000,000	1	70,085,000,000	0	40,085,000,000	0	0	0	0	0		Dinas Kesehatan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pengawasan dan pengendalian makanan yang memenuhi syarat	'%	90	90	38,000,000	100	39,132,400	100	41,335,554	100	57,043,065	100	70,094,518	100	95,097,232	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tingkat Pemenuhan Kualitas lingkungan	'%	40	40	208,000,000	41	214,198,400	42	226,257,770	43	312,235,722	44	383,675,256	44	520,532,220	Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	'%	100	100	2,617,063,925	100	2,695,052,430	100	2,846,783,882	100	3,928,561,757	100	4,827,416,687	100	6,549,356,219	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD	'%	0	60	134,639,000	100	138,651,242	100	146,457,307	100	202,111,084	100	248,354,100	100	336,942,007	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ()	puskes mas	0	2	734,639,000	5	756,531,242	7	799,123,951	7	1,102,791,053	7	1,355,109,645	7	1,838,477,256	Dinas Kesehatan
Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan	'%	20	80	410,000,000	85	422,218,000	90	445,988,873	95	615,464,645	95	756,282,956	95	1,026,049,087	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	puskes mas	0	0	20,000,000	1	20,596,000	1	21,755,555	2	30,022,666	3	36,891,852	3	50,051,175	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas. Pustu dan Jaringannya yang dapat melaksanakan pelayanan kesehatan	'%	100	100	4,270,840,000	100	2,900,000,000	100	13,400,000,000	100	3,030,000,000	100	4,391,000,000	100		Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi lebih	'%	0	15	373,000,000	13	384,115,400	13	405,741,097	12	559,922,714	10	688,033,031	10	933,454,413	Dinas Kesehatan
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan	'%	90	90	2,574,920,000	91	2,651,652,616	92	2,800,940,658	93	3,865,298,108	95	4,749,678,316	95	6,443,888,571	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	'%	83.8	85	193,564,000	86	199,332,207	87	210,554,610	88	290,565,362	90	357,046,717	90	484,405,281	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita	'%	57.57	60	744,750,000	70	766,943,550	80	810,122,472	90	1,117,969,011	90	1,373,760,321	90	1,863,780,627	Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	100	100	368,671,800	100	379,658,220	100	401,032,977	100	553,425,509	100	680,049,265	100	922,622,838	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pelaksanaan lingkungan sehat dikecamatan dan kelurahan	bln	0	0	25,000,000	0	25,745,000	0	27,194,444	0	37,528,332	0	46,114,814	0	62,563,969	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	'%	12.5	13	680,250,000	20	700,521,450	30	739,960,808	40	1,021,145,915	50	1,254,784,100	50	1,702,365,588	Dinas Pekerjaan Umum

Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	'%	65	65	2,300,000,000	70	360,000,000	75	7,700,000,000	80	23,365,000,000	85	23,046,500,000	85		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	'%	10	10	228,000,000	20	234,794,400	40	248,013,325	60	342,258,388	75	420,567,107	75	570,583,394	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap	'%	98	98	4,050,000,000	99	4,170,690,000	100	4,405,499,847	100	6,079,589,789	100	7,470,599,933	100	10,135,362,928	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Pembangunan gedung	Persentase Gedung Negara dan Swasta yang Laik Fugsi	'%	0	2	150,000,000	5	154,470,000	20	163,166,661	30	225,169,992	40	276,688,886	40	375,383,812	Dinas Pekerjaan Umum
Program pengendalian banjir	Pengurangan titik genangan	titik	8	8	257,522,800	6	265,196,979	4	280,127,569	2	386,576,046	0	475,024,645	0	644,465,936	Dinas Pekerjaan Umum
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	'%	48	48	943,071,400	55	2,940,000,000	70	12,104,083,333	90	23,785,170,833	100	23,937,604,375	100		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	'%	45	45	2,500,000,000	50	2,574,500,000	60	2,719,444,350	70	3,752,833,203	80	4,611,481,440	80	6,256,396,869	Dinas Pekerjaan Umum
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	'%	98	0	0	98	488,000,000	99	561,200,000	100	3,420,000,000	100	3,762,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang terpelihara / normalisasi	'%	47	0	0	55	1,000,000,000	65	1,100,000,000	70	1,210,000,000	75	1,331,000,000	75		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	'%	72	72	4,819,443,900	80	4,963,063,328	85	5,242,483,794	90	7,234,627,635	95	8,889,910,438	95	12,060,941,491	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	'%	40	50	197,000,000	60	202,870,600	65	214,292,215	70	295,723,256	75	363,384,737	75	493,004,073	Dinas Pekerjaan Umum
Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota	'%	60	60	464,726,200	65	478,575,041	70	505,518,816	75	697,615,965	80	857,230,498	80	1,163,004,617	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	'%	40	50	862,629,700	70	888,336,065	75	938,349,386	80	1,294,922,152	85	1,591,200,340	85	2,158,781,502	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota	'%	60	60	0	65	250,000,000	70	0	0	0	0	0	0		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat - alat berat ke PU an / Kebinamargaan	'%	30	0	0	50	4,000,000,000	65	4,050,000,000	80	4,105,000,000	90	1,665,500,000	90		Dinas Pekerjaan Umum
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik	'%	85	85	1,009,556,000	88	1,039,640,769	90	1,098,172,544	93	1,515,478,111	95	1,862,219,503	95	2,526,473,199	Dinas Pekerjaan Umum

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik	'%	85	85	4,723,190,700	88	4,863,941,783	90	5,137,781,705	93	7,090,138,753	95	8,712,362,500	95	11,820,062,204	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan informasi / data base jalan	'%	20	0	0	40	1,200,000,000	0	0	80	300,000,000	100	330,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana areal pemakaman yang memadai	'%	80	80	139,484,600	80	143,641,241	85	151,728,243	85	209,384,975	90	257,292,258	90	349,068,406	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Lingkungan Sehat Perumahan	% Jalan dengan riol yang baik	'%	40	40	3,804,507,000	55	3,917,881,309	70	4,138,458,026	90	5,711,072,076	100	7,017,765,367	100	9,521,002,274	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Pembangunan Rusunawa yang layak huni	unit	0	0	0	0	0	1	15,000,000,000	1	15,000,000,000	0	0	0		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	'%	50	60	79,649,400	80	82,022,952	100	86,640,844	100	119,564,365	100	146,920,692	100	199,327,303	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	% Kesiap siangaan dan Tanggap terhadap Pencegahan Kebakatan Meningkat	'%	50	60	1,950,000,000	70	2,008,110,000	75	2,121,166,593	80	2,927,209,898	90	3,596,955,523	90	4,879,989,558	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Perencanaan Pembangunan																
Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	'%	100	100	2,214,373,100	100	2,280,361,418	100	2,408,745,766	100	3,324,069,157	100	4,084,616,181	100	5,541,598,772	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	'%	100	100	84,875,500	100	87,404,790	100	92,325,680	100	127,409,438	100	156,560,717	100	212,405,925	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan sosial budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	'%	100	100	164,296,900	100	169,192,948	100	178,718,511	100	246,631,545	100	303,060,842	100	411,162,644	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	'%	100	100	574,865,000	100	591,995,977	100	625,325,351	100	862,948,984	100	1,060,391,711	100	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum	'%	60	100	125,647,500	100	129,391,796	100	136,676,554	100	188,613,644	100	231,768,446	100	314,440,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Pemenuhan Pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota	'%	60	65	316,265,200	70	325,689,903	75	344,026,244	80	474,756,217	85	583,380,440	85	791,472,243	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Peningkatan kualitas perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana	'%	50	50	0	60	75,000,000	65	85,000,000	70	100,000,000	75	110,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perhubungan																

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berwawasan lingkungan	Persen	70	0	0	72	7,800,000,000	73	1,625,000,000	74	4,300,000,000	75	1,250,000,000	75		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Optimalisasi Peningkatan Pengoperasian Kendaraan	Persen	80	81	180,000,000	82	185,364,000	83	195,799,993	84	270,203,991	85	332,026,664	85	450,460,575	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas lalu ,intas yang memadai dan berwawasan lingkungan	Persen	70	71	5,351,566,000	72	5,511,042,667	73	5,821,314,369	74	8,033,413,829	75	9,871,458,913	75	13,392,608,308	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program peningkatan pelayanan angkutan	Terwujudnya Angkutan Yang Selamat, Aman, Nyaman, Terjangkau dan Terpadu	Persen	80	81	51,379,000	82	52,910,094	83	55,888,933	84	77,126,727	85	94,773,322	85	128,578,966	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terciptanya Lalu Lintas Yang Aman, Tertib dan Lancar	Persen	70	71	763,000,000	72	785,737,400	73	829,974,416	74	1,145,364,694	75	1,407,424,135	75	1,909,452,325	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Persen	70	71	260,000,000	72	267,748,000	73	282,822,212	74	390,294,653	75	479,594,070	75	650,665,274	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Lingkungan Hidup																
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	Persentase	8	10	1,233,986,000	12	1,270,758,783	13	1,342,302,502	14	1,852,377,453	15	2,276,201,414	15	3,088,122,459	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH/ Non Hijau	'%	7.78	8	600,000,000	8	2,000,000,000	8	5,700,000,000	9	6,420,000,000	9	4,662,000,000	9		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase kelompok masyarakat yang memahami pengelolaan RTH	'%	10	20	0	30	0	40	110,000,000	50	115,000,000	60	120,000,000	60		Kantor Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemenuhan RTH	'%	20	20	0	22	100,000,000	25	120,000,000	28	140,000,000	30	0	30		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan/pengelolaan persampahan	Persen	90	90	5,799,341,500	90	5,972,161,877	100	6,308,394,590	100	8,705,584,535	100	10,697,422,276	100	14,513,192,802	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup	'%	50	60	451,509,800	70	464,964,792	80	491,142,310	90	677,776,388	95	832,851,625	95	1,129,929,800	Kantor Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	'%	80	70	424,576,950	60	437,229,343	50	461,845,355	40	637,346,590	30	783,171,490	30	1,062,528,760	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan pengendalian	'%	50	55	0	60	380,000,000	65	1,055,000,000	70	1,055,000,000	75	1,055,000,000	75		Kantor Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	'%	0	0	0	50	0	55	270,000,000	60	175,000,000	65	180,000,000	65		Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Informasi Lingkungan Hidup	'%	0	0	0	60	100,000,000	65	120,000,000	70	140,000,000	75	160,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pertanahan																

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunan tanah	'%	80	80	591,580,000	81	609,209,084	82	643,507,555	83	888,040,426	84	1,091,224,076	84	1,480,463,704	Sekretariat Daerah
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah	'%	90	90	151,928,000	91	2,152,000,000	92	154,000,000	93	2,156,500,000	94	158,500,000	94	2,156,500,000	Sekretariat Daerah
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat capaian pelayanan administrasi kependudukan	'%	67	70	662,010,550	75	681,738,464	80	720,120,340	85	993,766,069	90	1,221,139,746	90	1,656,720,293	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi dan kelengkapan data kependudukan	'%	0	0	0	85	257,100,000	90	139,760,000	95	127,366,000	100	114,171,000	100		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang	'%	70	70	345,140,000	70	355,425,172	70	375,435,609	70	518,101,141	70	636,642,682	70	863,733,126	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penurunan Kasus KDRT dan TPPO	'%	50	50	0	50	0	50	200,000,000	50	205,000,000	50	210,000,000	50		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kesejahteraan perempuan	'%	0	35	0	30	200,000,000	25	310,000,000	20	320,000,000	15	320,000,000	15		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tingkat kemiskinan menurun menjadi 2.84 %	'%	4.58	4	352,400,000	4	362,901,520	3	383,332,876	3	528,999,368	3	650,034,424	3	881,901,703	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	100 % data akurat	'%	80	85	115,152,000	88	118,583,530	90	125,259,782	93	172,858,500	95	212,408,524	95	288,174,645	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program pelayanan kontrasepsi	Tercapainya program KB	'%	75	75	0	75	21,000,000	80	160,000,000	80	170,000,000	80	25,000,000	80		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 % Kelompok Kerja paham fungsi keluarga	'%	100	100	0	100	0	100	45,000,000	100	50,000,000	100	0	100		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75 % sekolah dan perguruan tinggi memiliki PIK R/M	'%	25	35	209,025,650	45	215,254,614	55	227,373,449	65	313,775,360	75	385,567,162	75	523,098,969	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana	Jumlah PUS ber KB 80 %	'%	1.77	2	1,463,946,000	2	1,507,571,591	2	1,592,447,871	1	2,197,578,062	1	2,700,383,923	1	3,663,610,869	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Peningkatan Tingkat Tahapan Kelompok Kegiatan	tingkat	0	0	71,247,000	0	73,370,161	0	77,500,901	0	106,951,243	0	131,421,687	0	178,299,803	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase Kelurahan yang memiliki WPA (Warga Peduli AIDS)	'%	8	24	465,000,000	24	478,857,000	30	505,816,649	40	698,026,976	50	857,735,548	50	1,163,689,818	Dinas Kesehatan
Sosial																
Program pembinaan anak terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	'%	32	35	0	37	100,000,000	40	100,000,000	42	100,000,000	45	100,000,000	45		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	'%	60	65	1,696,650,000	68	1,747,210,170	70	1,845,578,103	73	2,546,897,782	75	3,129,627,994	75	4,245,966,299	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	'%	75	80	436,581,000	85	449,591,114	87	474,903,094	90	655,366,269	92	805,314,071	92	1,092,569,601	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	3	12	101,442,000	15	104,464,972	20	110,346,350	25	152,277,962	30	187,119,160	30	253,864,564	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial	'%	25	25	3,000,000	50	3,089,400	75	3,263,333	75	4,503,400	100	5,533,778	100	7,507,676	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang meningkat kesejahteraannya	'%	1.5	2	4,096,295,100	2	4,218,364,694	2	4,455,858,626	3	6,149,084,904	3	7,555,995,530	3	10,251,219,136	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial	'%	75	75	347,600,000	80	357,958,480	80	378,111,542	85	521,793,929	90	641,180,379	90	869,889,421	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin	'%	60	60	57,151,250	61	58,854,357	62	62,167,858	63	85,791,643	64	105,420,771	64	143,024,361	Sekretariat Daerah
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Penurunan Angka Kemiskinan	'%	54	5	137,853,000	5	141,961,019	4	149,953,425	3	206,935,726	2	254,282,620	2	344,985,231	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	2	2	0	3	300,000,000	4	430,000,000	5	630,000,000	6	630,000,000	6		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Tenaga Kerja																
Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas	'%	66	77	34,000,000	88	35,013,200	90	36,984,443	95	51,038,532	100	62,716,148	100	85,086,997	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat tenaga kerja yang memiliki keahlian	'%	52	55	657,579,500	57	677,175,369	60	715,300,342	65	987,114,472	65	1,212,966,264	65	1,645,631,330	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap UU ketenagakerjaan	'%	5	5	581,070,001	6	598,385,887	7	632,075,012	8	872,263,517	9	1,071,837,410	9	1,454,161,814	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja	'%	8	15	55,000,000	17	56,639,000	19	59,827,776	21	82,562,330	23	101,452,592	23	137,640,731	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	82.52	83	217,000,000	84	223,466,600	85	236,047,770	86	325,745,922	87	400,276,589	87	543,055,248	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang tersentuh pembiayaan	'%	30	33	45,000,000	36	46,341,000	39	48,949,998	42	67,550,998	45	83,006,666	45	112,615,144	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	unit	3	20	460,000,000	20	473,708,000	20	500,377,760	20	690,521,309	20	848,512,585	20	1,151,177,024	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Jumlah UMKM	unit	9236	9,236		9,246	0	9,256	0	9,266	0	9,276	0	9,276	0	
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi sehat	unit	11	12	290,000,000	13	298,642,000	14	315,455,545	15	435,328,652	16	534,931,847	16	725,742,037	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Penanaman Modal																
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor	Perusahaan	70	80	32,806,100	90	33,783,722	100	35,685,745	110	49,246,329	120	60,513,889	120	82,099,193	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	persen	2500000000	10	114,286,000	10	117,691,723	10	124,317,767	10	171,558,518	10	210,811,107	10	286,007,429	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi	dokumen	0	0	0	1	100,000,000	1	130,000,000	1	125,000,000	1	0	1		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Lancarnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase	100	100	377,525,700	100	388,775,966	100	410,664,053	100	566,716,393	100	696,381,103	100	944,780,243	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	nilai mutu	7.2	7	293,324,000	7	302,065,055	8	319,071,318	8	440,318,419	8	541,063,273	8	734,060,542	GUGUAK PANJANG
Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	'%	80	85	586,361,100	90	603,834,661	90	637,830,552	90	880,206,162	90	1,081,597,332	90	1,467,403,100	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Kebudayaan																
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang dilaksanakan masyarakat	kali	4	52	363,480,000	57	374,311,704	59	395,385,453	61	545,631,925	63	670,472,510	63	909,630,054	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	sanggar	6	6	892,148,000	7	918,734,010	13	970,458,735	16	1,339,233,055	19	1,645,649,577	19	2,232,652,782	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	kali	0	1	301,845,000	1	310,839,981	1	328,340,272	1	453,109,575	1	556,781,046	1	755,384,845	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan Program Pengembangan nilai budaya	bln	0	12	75,000,000	12	77,235,000	12	81,583,331	12	112,584,996	12	138,344,443	12	187,691,906	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya aktifitas pengembangan nilai adat dan budaya di masyarakat	kegiatan	8	8	6,352,000	9	6,541,290	10	6,909,564	11	9,535,199	12	11,716,852	12	15,896,253	GUGUAK PANJANG
Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya	kegiatan	0	0	0	3	374,500,000	4	426,200,000	4	426,660,000	4	448,872,000	4		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	'%	0	5	0	10	997,000,000	15	51,189,000,000	20	7,330,000,000	25	1,105,000,000	25		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Pengelolaan Kekayaan Budaya	'%	0	25	464,941,500	30	478,796,757	35	505,753,014	40	697,939,159	45	857,627,639	45	1,163,543,418	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Kepemudaan dan Olahraga																
Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah capaian program pembinaan kepemudaan	'%	0	100	931,257,100	100	959,008,562	100	1,013,000,744	100	1,397,941,026	100	1,717,789,933	100	2,330,525,602	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	'%	0	100	368,905,750	100	379,899,141	100	401,287,463	100	553,776,699	100	680,480,808	100	923,208,312	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai	unit	3	3	3,385,741,500	3	3,486,636,597	4	3,682,934,237	5	5,082,449,247	6	6,245,313,635	6	8,473,017,009	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	'%	100	100	824,261,000	100	848,823,978	100	896,612,768	100	1,237,325,619	100	1,520,425,721	100	2,062,761,576	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan	'%	100	0	0	20	0	40	145,000,000	60	155,000,000	80	165,000,000	80		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	persentase sekolah yang bebas narkoba	'%	0	0	0	0	0	20	80,000,000	40	85,000,000	60	90,000,000	60		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Terjaganya kerukunan antar dan intern umat bergama	'%	0	100	78,847,500	100	81,197,156	100	85,768,555	10	118,360,606	100	145,441,513	100	197,320,501	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan program kualitas pemahaman dan pengamalan dan pembinaan kerukunan beragama	'%	0	100	128,000,000	100	131,814,400	100	139,235,551	100	192,145,060	100	236,107,850	100	320,327,520	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Meningkatnya aktifitas keagamaan dilingkungan masyarakat	kegiatan	3	5	194,215,000	6	200,002,607	7	211,262,754	8	291,542,600	9	358,247,547	9	486,034,447	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Kelompok masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan	Kelompok masyarakat/keluarahan	9	2	469,687,000	2	483,683,673	3	510,915,063	4	705,062,787	4	866,381,153	4	1,175,419,311	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Jumlah event keagamaan ditengah masyarakat	'%	3	3	6,497,174,600	6	6,690,790,403	9	7,067,481,903	12	9,753,125,026	15	11,984,640,032	15	16,259,561,131	Sekretariat Daerah
Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, damai dan berkualitas	'%	0	0	12,636,000	0	13,012,553	0	13,745,160	85	18,968,320	85	23,308,272	85	31,622,332	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terpantaunya kegiatan orang asing, lembaga asing, dan non govenment organization serta deteksi dini dan penanggulangan konflik sosial	'%	100	100	237,889,000	100	244,978,092	100	258,770,359	100	357,103,095	100	438,808,283	100	595,331,198	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat keamananan dan kenyamanan lingkungan	'%	40	50	300,022,600	60	308,963,273	70	326,357,906	75	450,373,910	85	553,419,461	85	750,824,182	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Sistem kebencanaan	% Jumlah Data dan Informasi tentang Kebencanan terpenuhi	'%	25	100	74,970,000	100	77,204,106	100	81,550,697	100	112,539,962	100	138,289,105	100	187,616,829	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Pelaku Konstruksi bangunan yang terlatih dalam Konstruksi bangunan layak tersedia	'%	50	0	0	70	0	75	0	80	0	90	0	90	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana	Kapasitas dan Kwalitas Petugas BPBD Meningkat dalam Penanggulanga Kebencanaan	'%	50	70	399,840,000	70	411,755,232	70	434,937,052	70	600,213,131	70	737,541,896	70	1,000,623,090	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	%Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meningkat	'%	50	60	2,155,520,000	70	2,219,754,496	75	2,344,726,674	80	3,235,722,810	90	3,976,056,189	90	5,394,315,432	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Peningkatan Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	bln	0	100	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat	Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan	kegiatan	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Efektivitas kegiatan pemberantasan narkoba	Kegiatan	3	3	196,137,000	3	201,981,883	3	213,353,463	3	294,427,778	3	361,792,854	3	490,844,365	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Terdeteksinya potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah	'%	100	100	427,527,500	100	440,267,820	100	465,054,898	100	641,775,759	100	788,614,053	100	1,069,912,685	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	'%	20	20	124,280,900	30	127,984,471	40	135,189,997	50	186,562,195	60	229,247,625	60	311,020,253	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	kasus	722	650	3,239,993,800	600	3,336,545,615	500	3,524,393,133	400	4,863,662,524	250	5,976,468,510	250	8,108,274,827	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat	'%	100	100	76,668,300	100	78,953,015	100	83,398,070	100	115,089,337	100	141,421,777	100	191,866,925	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Tingkat pelaksanaan peringatan hari-hari besar kenegaraan	'%	100	100	208,464,500	100	214,676,742	100	226,763,043	100	312,932,999	100	384,532,069	100	521,694,658	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Peningkatan program pemberrantasan penyakit masyarakat	bln	0	0	42,000,000	0	43,251,600	0	45,686,665	0	63,047,598	0	77,472,888	0	105,107,467	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Mneingkatnya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	bln	0	0	41,000,000	0	42,221,800	0	44,598,887	0	61,546,465	0	75,628,296	0	102,604,909	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas per tahun	persen	0	10	18,377,500	10	18,925,150	10	19,990,635	10	27,587,077	10	33,899,000	10	45,990,773	GUGUAK PANJANG
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Temuan Peristiwa Gangguan Ketertiban dan Keamanan disertai laporan tertulis	Laporan /Tahun	22	15	48,328,500	12	49,768,689	10	52,570,667	7	72,547,520	5	89,146,392	5	120,944,910	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Bidang Pemerintahan Umum																
Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah Usulan Bantuan Kemasyarakatan yang direalisasikan	Proposal /Tahun	42	60	15,000,000	60	15,447,000	60	16,316,666	60	22,516,999	60	27,668,889	60	37,538,381	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	'%	80	80	71,440,000	82	73,568,912	85	77,710,842	88	107,240,962	90	131,777,694	90	178,782,797	Sekretariat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	'%	80	80	909,099,450	81	936,190,614	82	988,898,145	83	1,364,679,440	84	1,676,918,096	84	2,275,074,781	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH	'%	80	80	7,627,000,000	85	7,854,284,600	90	8,296,480,823	95	11,449,143,536	100	14,068,707,577	100	19,087,015,569	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	'%	80	80	245,162,000	81	252,467,828	82	266,681,766	83	368,020,837	84	452,224,005	84	613,532,308	Sekretariat Daerah
Program Penataan Kelembagaan Daerah	Peningkatan capaian kinerja daerah	peringkat nasional	74	62	721,357,000	55	742,853,439	50	784,676,087	40	1,082,853,000	35	1,330,609,767	35	1,805,238,271	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur	Jumlah penyelenggaraan diklat peningkatan profesionalisme aparatur	kegiatan	0	0	0	8	800,000,000	8	812,000,000	8	834,000,000	8	836,000,000	8		Badan Kepegawaian Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	'%	100	100	559,000,000	100	575,658,200	100	608,067,757	100	839,133,504	100	1,031,127,250	100	1,398,930,340	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Meningkatnya Program peningkatan pelayanan kelurahan	'%	100	100	380,000,000	100	391,324,000	100	413,355,541	100	570,430,647	100	700,945,179	100	950,972,324	AUR BIRUGO TIGO BALEH

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	persen	80	82	734,210,800	84	756,090,282	86	798,658,165	88	1,102,148,267	90	1,354,319,791	90	1,837,405,660	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	orang	80	0	30,740,000	80	31,656,052	80	33,438,288	80	46,144,837	80	56,702,776	80	76,928,656	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan	'%	0	0	0	80	11,000,000	85	11,850,000	90	12,650,000	95	13,275,000	95		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kerjasama Tugas Sekretariat DPRD se Indonesia	'%	100	100	109,500,000	100	112,763,100	100	119,111,663	100	164,374,094	100	201,982,887	100	274,030,183	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terstandarisasinya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	'%	100	100	50,000,000	100	51,490,000	100	54,388,887	100	75,056,664	100	92,229,629	100	125,127,937	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemerintahan	'%	100	100	12,522,580,525	100	12,895,753,425	100	13,621,784,342	100	18,798,062,393	100	23,099,059,068	100	31,338,493,438	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	'%	100	100	36,000,000	100	37,072,800	100	39,159,999	100	54,040,798	100	66,405,333	100	90,092,115	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Perizinan	dokumen	2	2	12,666,000	1	13,043,447	1	13,777,793	1	19,013,354	1	23,363,610	1	31,697,409	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase capaian realisasi penyelenggaraan pemerintahan	'%	81	75	762,195,900	80	784,909,338	80	829,099,734	85	1,144,157,632	90	1,405,940,899	90	1,907,440,017	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kegiatan yang dikelola dengan sistem otomisasi	kegiatan	1	1	502,385,200	3	517,356,279	5	546,483,437	7	754,147,144	7	926,696,010	7	1,257,248,477	Badan Kepegawaian Daerah
Peningkatan Kemitraan Legislatif dengan Eksekutif	Terjalinnya kemitraan yang sinergis antara legislatif dan eksekutif	'%	100	0	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukittinggi	persen	10	15	2,092,983,550	20	2,155,354,460	30	2,276,700,916	50	3,141,847,264	75	3,860,701,918	75	5,237,814,292	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ditindaklanjutinya Pengaduan Masyarakat Secara Komprehensif	'%	100	100	0	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Penyelenggaraan Adipura	Tingkat penilaian adipura	'%	71	75	0	77	0	80	325,000,000	85	325,000,000	87	325,000,000	87		Kantor Lingkungan Hidup
Program Penegasan Batas Wilayah	Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan	'%	80	80	671,985,500	81	692,010,668	82	730,970,869	83	1,008,739,799	84	1,239,539,464	84	1,681,683,191	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	'%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Sekretariat Daerah
Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat inflasi daerah	'%	2.84	9	575,800,100	6	592,958,943	5	626,342,531	5	864,352,693	4	1,062,116,590	4	1,440,973,577	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rupiah (Milyar)	28892	31,758	3,021,888,000	34,927	3,111,940,262	38,432	3,287,142,499	42,311	4,536,256,649	46,605	5,574,152,170	46,605	7,562,452,249	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD`	'%	100	100	111,720,000	100	115,049,256	100	121,526,529	100	167,706,610	100	206,077,883	100	279,585,863	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Peningkatan program peningkatan kinerja LPMK dan RT	bln	12	12	63,000,000	12	64,877,400	12	68,529,998	12	94,571,397	12	116,209,332	12	157,661,201	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pembinaan PKK	Peningkatan program pembinaan PKK	bln	12	12	92,500,000	12	95,256,500	12	100,619,441	12	138,854,829	12	170,624,813	12	231,486,684	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan RT	'%	90	80	67,748,400	85	69,767,302	90	73,695,201	95	101,699,378	100	124,968,196	100	169,544,351	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Pangan																
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	2400	2,400	387,248,000	2,400	398,787,990	2,400	421,239,754	2,400	581,310,861	2,400	714,314,786	2,400	969,110,870	Kantor Ketahanan Pangan
	Ketersediaan protein perkapita	gr/kap/hr	63	63		63	0	63	0	63	0	63	0	63	0	
Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	84.1	84	293,333,800	84	302,075,147	85	319,081,978	85	440,333,130	85	541,081,350	85	734,085,067	Kantor Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tiingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	'%	15	20	497,375,200	25	512,196,981	30	541,033,671	34	746,626,466	40	917,454,601	40	1,244,710,658	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	'%	15	20	1,898,758,100	25	1,955,341,091	30	2,065,426,795	34	2,850,288,977	40	3,502,435,095	40	4,751,753,693	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya peren perempuan dipedesaan	'%	100	100	184,000,000	100	189,483,200	100	200,151,104	100	276,208,524	100	339,405,034	100	460,470,810	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan program keberdayaan masyarakat pedesaan	bln	12	12	151,000,000	12	155,499,800	12	164,254,439	12	226,671,125	12	278,533,479	12	377,886,371	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	'%	100	100	640,000,000	100	659,072,000	100	696,177,754	100	960,725,300	100	1,180,539,249	100	1,601,637,599	AUR BIRUGO TIGO BALEH

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertahunnya	persen	802661	3	581,898,000	3	599,238,560	3	632,975,691	3	873,506,454	3	1,073,364,731	3	1,456,233,930	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun	'%	5	7	180,868,900	9	186,258,793	12	196,745,163	15	271,508,325	17	333,629,430	17	452,635,048	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Tingkat partisipasi perempuan dalam pencapaian tujuan program pemerintah	'%	100	80	341,078,000	85	351,242,124	90	371,017,056	95	512,003,537	100	629,149,947	100	853,567,733	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatkanya persentase aktifitas guna peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakn oleh pemerintah maupun masyarakat	Persen	10	10	543,400,500	10	559,593,835	10	591,098,968	10	815,716,576	10	1,002,352,528	10	1,359,891,675	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	'%	80	80	615,303,000	85	633,639,029	85	669,312,907	90	923,651,811	90	1,134,983,346	90	1,539,831,905	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	'%	15	15	2,180,510,600	20	2,245,489,816	25	2,371,910,893	30	3,273,237,032	34	4,022,153,665	34	5,456,855,877	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	'%	20	25	193,442,900	30	199,207,498	35	210,422,881	40	290,383,575	45	356,823,337	45	484,102,222	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya program peningkatan usaha ekonomi masyarakat	bln	0	0	195,538,000	0	201,365,032	0	212,701,884	0	293,528,600	0	360,687,943	0	489,345,332	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat	pelaku	0	0	141,194,000	90	145,401,581	120	153,587,690	90	211,951,013	120	260,445,404	120	353,346,280	GUGUAK PANJANG
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	'%	3	3	77,821,500	5	80,140,581	6	84,652,495	8	116,820,444	10	143,548,961	10	194,752,876	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Statistik																
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pemenuhan Data pembangunan Daerah	'%	66	70	244,655,500	80	251,946,234	85	266,130,807	90	367,260,513	100	451,289,719	100	612,264,762	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD	Persen	10	0	0	20	50,000,000	30	57,500,000	40	60,000,000	50	65,000,000	50		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi statistik daerah	persen	100	100	29,249,800	100	30,121,444	100	31,817,281	100	43,907,848	100	53,953,964	100	73,199,343	Dinas Pertanian
Kearsipan																
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan	'%	100	100	0	100	510,000,000	100	535,000,000	100	560,000,000	100	585,000,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi	'%	100	100	97,268,600	100	100,167,204	100	105,806,618	100	146,013,133	100	179,420,937	100	243,420,386	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan	'%	100	100	0	100	60,000,000	100	52,000,000	100	15,000,000	100	17,500,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	'%	100	100	47,500,000	100	48,915,500	100	51,669,443	100	71,303,831	100	87,618,147	100	118,871,541	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Komunikasi dan Informatika																
Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)	Kemudahan mendapatkan informasi melalui media elektronik menuju smart city	Persen	80	80	81,000,000	82	1,135,000,000	85	1,090,000,000	87	95,000,000	90	100,000,000	90	1,090,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Persen	80	80	142,000,000	82	146,231,600	85	154,464,439	87	213,160,926	90	261,932,146	90	355,363,342	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Persentase tingkat ketercapaian penyebaran informasi Pemda Bukittinggi kepada masyarakat	'%	80	80	2,485,337,800	83	2,559,400,866	85	2,703,495,135	88	3,730,823,287	90	4,584,435,655	90	6,219,703,853	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tingkat pencapaian pelayanan informasi kepada publik	'%	80	80	419,853,220	81	432,364,846	82	456,706,987	83	630,255,642	84	774,458,133	84	1,050,707,348	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya sarana dan prasarana TIK menuju smart city	Persen	80	80	1,034,736,000	82	1,065,571,133	85	1,125,562,788	87	1,553,276,647	90	1,908,666,344	90	2,589,487,628	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat	publikasi	0	12	16,675,000	12	17,171,915	12	18,138,694	12	25,031,397	12	30,758,581	12	41,730,167	GUGUAK PANJANG

Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat Melalu Media Cetak Dan Elektronik	Publikasi/Tahun	24	24	11,450,000	24	11,791,210	27	12,455,055	27	17,187,976	29	21,120,585	29	28,654,298	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan program komunikasi, informasi dan media massa	'%	100	100	0	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi di masyarakat	bulan	12	12	52,678,000	12	54,247,804	12	57,301,956	12	79,076,699	12	97,169,448	12	131,829,790	GUGUAK PANJANG
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan Telekomunikasi	Persen	80	80	257,000,000	82	264,658,600	85	279,558,879	87	385,791,253	90	474,060,292	90	643,157,598	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Perpustakaan																
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan	'%	100	100	248,249,470	100	255,647,304	100	270,040,247	100	372,655,541	100	457,919,129	100	621,258,883	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Pertanian																
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi	kelompok	10	11	23,763,600	12	24,471,755	13	25,849,515	14	35,672,331	15	43,834,160	15	59,469,805	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	persen	0	5	64,257,200	5	66,172,065	5	69,897,552	5	96,458,621	5	118,528,354	5	160,807,418	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	2	2	370,088,300	2	381,116,931	2	402,573,815	2	555,551,864	2	682,662,131	2	926,167,713	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian	persen	2	2	155,835,200	2	160,479,089	2	169,514,062	2	233,929,405	2	287,452,453	2	389,986,743	Dinas Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)	persen	70	73	306,133,100	78	315,255,866	80	333,004,772	82	459,546,585	85	564,690,844	85	766,116,067	Dinas Pertanian
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persen	100	100	139,098,800	100	143,243,944	100	151,308,578	100	208,805,838	100	256,580,614	100	348,102,919	Dinas Pertanian

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	1	2	43,233,800	2	44,522,167	2	47,028,765	2	64,899,696	2	79,748,747	2	108,195,124	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	kwintal/ Ha	66.7	67	87,987,400	67	90,609,425	67	95,710,735	67	132,080,814	67	162,300,905	67	220,193,638	Dinas Pertanian
Kehutanan																
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan luas lahan yang dihijaukan	persen	2	2	61,740,800	2	63,580,676	2	67,160,268	2	92,681,170	2	113,886,621	2	154,509,979	Dinas Pertanian
Pariwisata																
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	meningkatnya jumlah PAD yang dikelola Dinas Pariwisata	rupiah (Milyar)	8041	10,086	8,491,764,000	10,091	81,424,000,000	10,097	11,960,000,000	10,112	12,326,000,000	10,127	13,153,000,000	10,127		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	meningkatnya jumlah wisatawan	orang	460905	483,950	2,042,367,950	508,148	2,103,230,515	533,555	2,221,642,393	560,233	3,065,866,502	588,245	3,767,336,758	588,245	5,111,145,779	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Kelautan dan Perikanan																
Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	persen	2	2	77,740,500	2	80,057,167	2	84,564,385	2	116,698,852	2	143,399,549	2	194,550,168	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Perikanan budidaya	Jumlah Produksi ikan	ton	355	351	220,693,700	352	227,270,372	353	240,065,694	354	331,290,658	355	407,089,961	355	552,298,950	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan	Meningkatnya kualitas SDM Perikanan		0	0	15,650,500	0	16,116,885	0	17,024,266	0	23,493,486	0	28,868,796	0	39,166,296	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Daya Saing Produk Perikanan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	persen	40	10	0	10	70,000,000	10	75,000,000	10	80,000,000	10	85,000,000	10		Dinas Pertanian
Perdagangan																
Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat Pengawasan dan Ketertiban Pasar	'%	100	100	374,907,000	100	386,079,229	100	407,815,489	100	562,785,375	100	691,550,669	100	938,226,792	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Tingkat Sarana dan Prasarana yang dikembangkan	$	100	100	2,393,450,000	100	2,464,774,810	100	2,603,541,632	100	3,592,887,452	100	4,414,940,101	100	5,989,749,235	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha	perusahaan	2553	300	554,000,000	350	570,509,200	400	602,628,868	450	831,627,838	500	1,021,904,287	500	1,386,417,546	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri	IKM	0	2	250,000,000	2	257,450,000	2	271,944,435	2	375,283,320	2	461,148,144	2	625,639,687	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL	lokasi	0	0	120,000,000	1	123,576,000	1	130,533,329	1	180,135,994	1	221,351,109	1	300,307,050	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah komoditas peredaran barang yang di awasi	jenis	20	20	705,000,000	20	726,009,000	20	766,883,307	22	1,058,298,963	22	1,300,437,766	22	1,764,303,917	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Jumlah UTTP yang di awasi	unit	300	30		30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	
Industri																
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM	'%	1	2	616,750,000	2	635,129,150	2	670,886,921	2	925,823,951	2	1,137,652,471	2	1,543,453,108	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang	unit usaha	0	5	886,125,000	10	912,531,525	15	963,907,050	20	1,330,191,729	30	1,634,539,596	30	2,217,579,870	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya nilai produksi IKM	'%	4.1113E+11	2	47,527,000	2	48,943,305	2	51,698,813	2	71,344,361	2	87,667,951	2	118,939,110	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal	&	476	7	30,000,000	7	30,894,000	7	32,633,332	7	45,033,998	7	55,337,777	7	75,076,762	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB	Persen	0.07	0	185,000,000	0	190,513,000	0	201,238,882	0	277,709,657	0	341,249,627	0	462,973,368	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Pertumbuhan industri	unit	1638	15		15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	
Persandian																
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan TIK OLeh SKPD dan Layanan Kepada Publik dalam mewujudkan smart city	Persen	80	81	531,000,000	82	535,000,000	83	1,055,000,000	84	1,056,000,000	85	567,000,000	85	1,056,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	'%	80	80	574,865,000	82	591,995,977	85	625,325,351	88	862,948,984	90	1,060,391,711	90	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
Keuangan																
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi	opini	3	3	4,841,271,107	3	4,985,540,986	3	5,266,226,943	3	7,267,393,182	3	8,930,172,742	3	12,115,565,359	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																
Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang difasilitasi mengikuti pendidikan kedinasan	orang	1500	550	2,545,102,500	550	2,620,946,555	530	2,768,505,846	535	3,820,538,067	550	4,694,677,177	550	6,369,268,525	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai sesuai standar kompetensi	'%	60	60	325,945,100	70	335,658,264	80	354,555,824	90	489,287,037	95	601,235,912	95	815,696,761	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	'%	80	80	0	82	0	85	0	88	0	90	0	90	0	Sekretariat Daerah
Bidang Pengawasan																
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	'%	100	100	319,019,650	100	328,526,436	100	347,022,474	100	478,891,014	100	588,461,278	100	798,365,416	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	'%	100	100	1,147,785,210	100	1,181,989,209	100	1,248,535,202	100	1,722,978,578	100	2,117,196,077	100	2,872,399,918	Inspektorat Daerah
Bidang Penunjang Lainnya																
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan oleh masyarakat	kegiatan	5	5	416,710,000	5	429,127,958	5	453,287,862	5	625,537,250	5	768,660,172	5	1,042,841,256	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pendidikan politik masyarakat	Efektivitas kegiatan pendidikan politik masyarakat	kegiatan	7	3	1,088,151,500	3	1,120,578,415	3	1,183,666,979	3	1,633,460,432	3	2,007,196,178	3	2,723,163,055	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda	'% kegiatan	0	100	173,906,100	100	179,088,502	100	189,171,184	100	261,056,235	100	320,785,901	100	435,210,232	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
							201,549,646,000		############		98,405,014,833		79,641,275,375		4,302,500,000	

Tabel 8.1
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2016-2021

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
					281,230,131,066		**485,352,347,325**		**460,195,028,495**		**518,090,548,396**		**583,503,208,749**		**657,726,329,558**	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	465,300,000			100	300,000,000	100	60,000,000	100	75,000,000	100	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam menggunakan atribut kepegawaian	'%	100	100	18,000,000	100	18,536,400	100	19,579,999	100	27,020,399	100	33,202,666	100	45,046,057	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	656,988,500	100	676,566,757	100	714,657,466	100	986,227,303	100	1,211,876,110	100	1,644,152,318	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	11,550,000	100	11,894,190	100	12,563,833	100	17,338,089	100	21,305,044	100	28,904,554	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	865,000,000	100	890,777,000	100	940,927,745	100	1,298,480,288	100	1,595,572,578	100	2,164,713,317	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	22,150,000	100	22,810,070	100	24,094,277	100	33,250,102	100	40,857,726	100	55,431,676	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	683,530,700	100	703,899,915	100	743,529,480	100	1,026,070,682	100	1,260,835,655	100	1,710,575,733	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,760,000	100	4,901,848	100	5,177,822	100	7,145,394	100	8,780,261	100	11,912,180	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,987,400	100	11,314,825	100	11,951,849	100	16,493,552	100	20,267,276	100	27,496,614	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	257,387,100	100	265,057,236	100	279,979,958	100	386,372,342	100	474,774,334	100	644,126,339	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	12,150,000	100	12,512,070	100	13,216,500	100	18,238,769	100	22,411,800	100	30,406,089	Kantor Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	309,798,600	100	319,030,598	100	336,992,021	100	465,048,989	100	571,452,198	100	775,289,196	Kantor Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	2,300,000	100	2,368,540	100	2,501,889	100	3,452,607	100	4,242,563	100	5,755,885	Kantor Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	21,300,000	100	21,934,740	100	23,169,666	100	31,974,139	100	39,289,822	100	53,304,501	Kantor Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	6,300,000	100	6,487,740	100	6,853,000	100	9,457,140	100	11,620,933	100	15,766,120	Kantor Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	230,200,600	100	237,060,578	100	250,407,088	100	345,561,782	100	424,626,318	100	576,090,525	Kantor Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	'%	100	100	353,159,200	100	363,683,344	100	384,158,716	100	530,139,029	100	651,434,838	100	883,801,645	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	1,910,300	100	1,967,227	100	2,077,982	100	2,867,615	100	3,523,725	100	4,780,638	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja	'%	100	100	17,950,000	100	18,484,910	100	19,525,610	100	26,945,342	100	33,110,437	100	44,920,930	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang berpakaian sesuai aturan	'%	100	100	18,600,000	100	19,154,280	100	20,232,666	100	27,921,079	100	34,309,422	100	46,547,593	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perentasee laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	2,020,000	100	2,080,196	100	2,197,311	100	3,032,289	100	3,726,077	100	5,055,169	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	65,000,000	100	66,937,000	100	70,705,553	100	97,573,663	100	119,898,517	100	162,666,319	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	19,000,000	100	19,566,200	100	20,667,777	100	28,521,532	100	35,047,259	100	47,548,616	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	343,857,700	100	354,104,659	100	374,040,752	100	516,176,237	100	634,277,361	100	860,524,095	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	132,000,000	100	135,933,600	100	143,586,662	100	198,149,593	100	243,486,220	100	330,337,755	Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,513,220,400	100	6,707,314,368	100	7,084,936,167	100	9,777,211,910	100	12,014,237,995	100	16,299,716,688	Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	90	90	111,000,000	90	114,307,800	90	120,743,329	90	166,625,794	95	204,749,776	95	277,784,021	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	3,237,400,000	100	3,333,874,520	100	3,521,571,655	100	4,859,768,885	100	5,971,684,005	100	8,101,783,690	Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersedian Layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	5,111,604,400	100	5,263,930,211	100	5,560,289,482	100	7,673,199,485	100	9,428,827,527	100	12,792,090,306	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaiakan kinerja dan keuangann yang tersesusun tepat waktu	'%	100	100	78,666,400	100	81,010,659	100	85,571,559	100	118,088,751	100	145,107,457	100	196,867,287	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana & Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,260,897,000	100	32,280,646,000	100	1,601,292,000	100	2,436,344,000	100	2,867,171,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran & Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	169,750,000	100	174,808,550	100	184,650,271	100	254,817,374	100	313,119,590	100	424,809,347	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	46,800,000	100	48,194,640	100	50,907,998	100	70,253,038	100	86,326,933	100	117,119,749	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kesediaan layanan administrasi perkantoran		100	100	7,893,622,000	100	8,128,851,936	100	8,586,506,300	100	11,849,378,693	100	14,560,516,538	100	19,754,252,788	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persentase	100	100	9,377,500	100	9,656,950	100	10,200,636	100	14,076,877	100	17,297,667	100	23,467,745	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persentase	100	100	1,910,080,000	100	1,967,000,384	100	2,077,742,506	100	2,867,284,658	100	3,523,319,387	100	4,780,087,413	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	635,835,000	100	654,782,883	100	691,647,159	100	954,473,080	100	1,172,856,521	100	1,591,214,441	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	60	60	1,342,932,360	70	1,382,951,744	80	1,460,811,928	90	2,015,920,460	95	2,477,163,061	95	3,360,767,125	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	122,654,500	100	126,309,604	100	133,420,835	100	184,120,752	100	226,247,580	100	306,950,092	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	482,769,475	100	497,156,005	100	525,145,888	100	724,701,326	100	890,512,989	100	1,208,158,973	Badan Kepegawaian Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	16,450,000	100	16,940,210	100	17,893,944	100	24,693,642	100	30,343,548	100	41,167,091	Badan Kepegawaian Daerah
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	'%	100	100	878,892,100	100	905,083,085	100	956,039,262	100	1,319,334,182	100	1,621,197,843	100	2,199,479,113	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	100	214,300,000	100	220,686,140	100	233,110,770	100	321,692,862	100	395,296,189	100	536,298,340	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persentase	100	100	19,350,000	100	19,926,630	100	21,048,499	100	29,046,929	100	35,692,866	100	48,424,512	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	438,888,200	100	451,967,068	100	477,412,814	100	658,829,684	100	809,569,915	100	1,098,343,504	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase	100	100	16,165,900	100	16,647,644	100	17,584,906	100	24,267,171	100	29,819,499	100	40,456,114	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,698,700,000	100	2,779,121,260	100	2,935,585,787	100	4,051,108,386	100	4,978,001,985	100	6,753,655,293	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedispilanan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pagawai	'%	100	100	150,000,000	100	154,470,000	100	163,166,661	100	225,169,992	100	276,688,886	100	375,383,812	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesedian Layan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,153,130,000	100	2,217,293,274	100	2,342,126,885	100	3,232,135,102	100	3,971,647,613	100	5,388,334,317	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,900,000	100	11,224,820	100	11,856,777	100	16,362,353	100	20,106,059	100	27,277,890	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	1,446,300,000	100	1,489,399,740	100	1,573,252,945	100	2,171,089,065	100	2,667,834,243	100	3,619,450,717	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persen	100	100	225,225,000	100	231,936,705	100	244,994,741	100	338,092,743	100	415,448,363	100	563,638,794	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	5,562,692,900	100	5,728,461,148	100	6,050,973,511	100	8,350,343,445	100	10,260,902,026	100	13,920,965,778	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persetase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	100	11,358,000	100	11,696,468	100	12,354,980	100	17,049,872	100	20,950,882	100	28,424,062	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan Administrasi	'%	100	100	1,480,784,350	100	1,524,911,724	100	1,610,764,254	100	2,222,854,670	100	2,731,443,819	100	3,705,749,829	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capain kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	5,051,400	100	5,201,932	100	5,494,800	100	7,582,825	100	9,317,775	100	12,641,425	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	86,000,000	100	88,562,800	100	93,548,886	100	129,097,462	100	158,634,962	100	215,220,052	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	59,400,000	100	61,170,120	100	64,613,998	100	89,167,317	100	109,568,799	100	148,651,990	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	474,236,200	100	488,368,439	100	515,863,582	100	711,891,743	100	874,772,574	100	1,186,803,951	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,900,000	100	5,046,020	100	5,330,111	100	7,355,553	100	9,038,504	100	12,262,538	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	102,983,800	100	106,052,717	100	112,023,485	100	154,592,410	100	189,963,153	100	257,723,010	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	23,000,000	100	23,685,400	100	25,018,888	100	34,526,065	100	42,425,629	100	57,558,851	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	418,985,000	100	431,470,753	100	455,762,556	100	628,952,328	100	772,856,620	100	1,048,534,577	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	107,580,000	100	110,785,884	100	117,023,129	100	161,491,918	100	198,441,269	100	269,225,270	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,367,447,130	100	2,437,997,054	100	2,575,256,289	100	3,553,853,678	100	4,366,975,400	100	5,924,675,525	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu	'%	100	100	14,575,800	100	15,010,159	100	15,855,231	100	21,880,218	100	26,886,412	100	36,476,796	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	65,100,000	100	67,039,980	100	70,814,331	100	97,723,777	100	120,082,977	100	162,916,574	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam Kehadiran dan pemakaian atribut	'%	100	100	33,300,000	100	34,292,340	100	36,222,999	100	49,987,738	100	61,424,933	100	83,335,206	Dinas Pertanian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	907,064,550	100	934,095,074	100	986,684,626	100	1,361,624,784	100	1,673,164,535	100	2,269,982,324	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun waktu	'%	100	100	1,706,000	100	1,756,839	100	1,855,749	100	2,560,933	100	3,146,875	100	4,269,365	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	182,815,000	100	188,262,887	100	198,862,088	100	274,429,681	100	337,219,192	100	457,505,277	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,426,417,200	100	1,468,924,433	100	1,551,624,878	100	2,141,242,332	100	2,631,158,577	100	3,569,692,842	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuanagan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	3,878,500	100	3,994,079	100	4,218,946	100	5,822,145	100	7,154,252	100	9,706,174	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	173,300,000	100	178,464,340	100	188,511,882	100	260,146,398	100	319,667,893	100	433,693,431	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	unit	4	4	43,620,000	4	44,919,876	4	47,448,865	4	65,479,434	4	80,461,128	4	109,161,613	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	stel	40	40	40,500,000	40	41,706,900	40	44,054,998	40	60,795,898	40	74,705,999	40	101,353,629	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	bln	12	12	337,561,200	12	347,620,524	12	367,191,559	12	506,724,352	12	622,662,883	12	844,766,734	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen yang tersusun dengan tepat waktu	dokumen	3	3	5,980,000	3	6,158,204	3	6,504,911	3	8,976,777	3	11,030,664	3	14,965,301	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	874,400,000	100	900,457,120	100	951,152,856	100	1,312,590,941	100	1,612,911,748	100	2,188,237,369	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	40,500,000	100	41,706,900	100	44,054,998	100	60,795,898	100	74,705,999	100	101,353,629	GUGUAK PANJANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	339,733,200	100	349,857,249	100	369,554,212	100	509,984,813	100	626,669,339	100	850,202,292	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan YangTersusun Tepat Waktu	'%	100	100	7,989,000	100	8,227,072	100	8,690,256	100	11,992,554	100	14,736,450	100	19,992,942	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	48,600,000	100	50,048,280	100	52,865,998	100	72,955,077	100	89,647,199	100	121,624,355	MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	394,870,450	100	406,637,589	100	429,531,286	100	592,753,174	100	728,375,101	100	988,186,499	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	22,114,000	100	22,772,997	100	24,055,117	100	33,196,061	100	40,791,320	100	55,341,584	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	0	100	378,400,000	100	389,676,320	100	411,615,097	100	568,028,834	100	697,993,831	100	946,968,230	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	108,000,000	100	111,218,400	100	117,479,996	100	162,122,394	100	199,215,998	100	270,276,345	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,070,114,000	100	1,102,003,397	100	1,164,046,188	100	1,606,383,740	100	1,973,924,340	100	2,678,023,152	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	55,500,000	100	57,153,900	100	60,371,665	100	83,312,897	100	102,374,888	100	138,892,011	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	410,500,000	100	422,732,900	100	446,532,762	100	616,215,212	100	757,205,252	100	1,027,300,366	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,668,453,440	100	1,718,173,353	100	1,814,906,512	100	2,504,570,987	100	3,077,616,829	100	4,175,402,752	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu	'%	100	100	9,342,400	100	9,620,804	100	10,162,455	100	14,024,188	100	17,232,922	100	23,379,905	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	740,875,000	100	762,953,075	100	805,907,333	100	1,112,152,120	100	1,366,612,525	100	1,854,083,212	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	153,000,000	100	157,559,400	100	166,429,994	100	229,673,392	100	282,222,664	100	382,891,488	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	65,250,000	100	67,194,450	100	70,977,498	100	97,948,947	100	120,359,666	100	163,291,958	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,425,988,650	100	6,617,483,112	100	6,990,047,411	100	9,646,265,427	100	11,853,330,957	100	16,081,414,109	Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	39,792,100	100	40,977,905	100	43,284,961	100	59,733,246	100	73,400,212	100	99,582,068	Dinas Pekerjaan Umum

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	4,770,756,100	80	4,912,924,632	85	5,189,522,289	90	7,161,540,758	95	8,800,101,284	95	11,939,097,412	Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan dalam atribut pegawai	'%	80	85	40,000,000	90	41,192,000	95	43,511,110	100	60,045,331	100	73,783,703	100	100,102,350	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan adm perkantoran	'%	75	75	514,552,000	75	529,885,650	80	559,718,212	85	772,411,132	90	949,138,799	90	1,287,696,609	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	85	90	13,250,000	95	13,644,850	100	14,413,055	100	19,890,016	100	24,440,852	100	33,158,903	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	26,300,000	80	27,083,740	85	28,608,555	90	39,479,805	95	48,512,785	95	65,817,295	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen	90	91	153,000,000	92	157,559,400	93	166,429,994	94	229,673,392	95	282,222,664	95	382,891,488	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	90	91	1,268,502,000	92	1,306,303,360	93	1,379,848,239	94	1,904,190,569	95	2,339,869,372	95	3,174,500,777	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	Persen	90	91	13,271,000	92	13,666,476	93	14,435,898	94	19,921,540	95	24,479,588	95	33,211,457	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90	91	331,300,000	92	341,172,740	93	360,380,765	94	497,325,456	95	611,113,520	95	829,097,713	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.	'%	100	100	19,300,000	100	19,875,140	100	20,994,110	100	28,971,872	100	35,600,637	100	48,299,384	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	6,750,000	100	6,951,150	100	7,342,500	100	10,132,650	100	12,451,000	100	16,892,272	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,086,100	100	10,386,666	100	10,971,435	100	15,140,580	100	18,604,745	100	25,241,058	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	390,950,000	100	402,600,310	100	425,266,707	100	586,868,056	100	721,143,468	100	978,375,342	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	19,800,000	100	20,390,040	100	21,537,999	100	29,722,439	100	36,522,933	100	49,550,663	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layananan administrasi perkantoran	'%	100	100	407,394,800	100	419,535,165	100	443,154,995	100	611,553,893	100	751,477,424	100	1,019,529,421	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	dokumen	0	100	5,100,000	100	5,251,980	100	5,547,666	100	7,655,780	100	9,407,422	100	12,763,050	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	'%	100	100	2,150,000	100	2,214,070	100	2,338,722	100	3,227,437	100	3,965,874	100	5,380,501	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	11,300,000	100	11,636,740	100	12,291,888	100	16,962,806	100	20,843,896	100	28,278,914	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	14,850,000	100	15,292,530	100	16,153,499	100	22,291,829	100	27,392,200	100	37,162,997	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan layanan adminidtrasi perkantoran	'%	100	100	328,776,550	100	338,574,091	100	357,635,813	100	493,537,421	100	606,458,783	100	822,782,631	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	20	30	70,000,000	40	72,086,000	50	76,144,442	60	105,079,330	70	129,121,480	70	175,179,112	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	100	100	82,950,000	100	85,421,910	100	90,231,164	100	124,519,006	100	153,008,954	100	207,587,248	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tercapaianya pentaan jabatan dan informasi dibidang sumber daya aparatur	'%	90	90	120,000,000	91	123,576,000	92	130,533,329	93	180,135,994	94	221,351,109	94	300,307,050	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	persen	15	0	0	20	50,000,000	25	80,000,000	30	100,000,000	35	120,000,000	35		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	198,880,150	100	204,806,778	100	216,337,400	100	298,545,612	100	366,852,848	100	497,709,259	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	100	230,000,000	100	236,854,000	100	250,188,880	100	345,260,655	100	424,256,292	100	575,588,512	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	0	0	70	83,994,005	70	250,000,000	70	252,500,000	70	280,000,000	70		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Ketersediaan SDM sesuai Bidang Keahlian	'%	70	0	0	70	100,000,000	75	110,000,000	80	121,000,000	85	133,100,000	85		Dinas Pekerjaan Umum

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha	persen	50	50	0	60	70,000,000	65	120,000,000	70	120,000,000	75	125,000,000	75		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Pendidikan																
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	'% kegiatan	0	100	7,796,131,800	100	8,028,456,528	100	8,480,458,630	100	11,703,032,910	100	14,380,686,839	100	19,510,277,835	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya kegiatan untuk Pendidikan Anak Usia Dini	'%	0	100	505,396,950	100	520,457,779	100	549,759,552	100	758,668,182	100	932,251,462	100	1,264,785,558	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pendidikan Menengah	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SMP	nilai	0	0	4,914,299,720	0	5,060,745,852	0	5,345,665,843	0	7,377,018,863	0	9,064,880,779	0	12,298,323,753	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pendidikan Luar Biasa	Angka putus sekolah	'%	0.25	0	60,680,000	0	62,488,264	0	66,006,353	0	91,088,768	0	111,929,878	0	151,855,265	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SD	nilai	70	70	6,976,936,083	75	7,184,848,778	80	7,589,355,764	85	10,473,310,955	90	12,869,604,501	90	17,460,192,427	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pendidikan Non Formal	Optimalisasi pelayanan non formal	'%	0	100	291,362,100	100	300,044,691	100	316,937,207	100	437,373,345	100	537,444,367	100	729,150,772	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya manjemen pelayanan pendidikan	'%	100	100	500,000,000	100	514,900,000	100	543,888,870	100	750,566,641	100	922,296,288	100	1,251,279,374	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Kesehatan																
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	'%	85	85	0	86	120,000,000	87	150,000,000	88	160,000,000	90	180,000,000	90		Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Ratio tenaga paramedis per satuan penduduk (Bidan dan perawat)	tenaga paramedis/satuan penduduk	12.95	13	0	13	145,000,000	13	152,000,000	13	159,000,000	13	166,000,000	13		Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	'%	100	100	6,459,177,000	100	6,651,660,475	100	7,026,148,959	100	9,696,085,564	100	11,914,549,941	100	16,164,469,905	Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	'%	5972	65	504,635,400	65	519,673,535	70	548,931,155	70	757,524,994	75	930,846,712	75	1,262,879,735	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada rumah sakit	'%	25	25	0	25	0	25	0	25	8,000,000,000	25	12,000,000,000	25		Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	unit	0	0	68,000,000	1	70,085,000,000	0	40,085,000,000	0	0	0	0	0		Dinas Kesehatan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pengawasan dan pengendalian makanan yang memenuhi syarat	'%	90	90	38,000,000	100	39,132,400	100	41,335,554	100	57,043,065	100	70,094,518	100	95,097,232	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tingkat Pemenuhan Kualitas lingkungan	'%	40	40	208,000,000	41	214,198,400	42	226,257,770	43	312,235,722	44	383,675,256	44	520,532,220	Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	'%	100	100	2,617,063,925	100	2,695,052,430	100	2,846,783,882	100	3,928,561,757	100	4,827,416,687	100	6,549,356,219	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD	'%	0	60	134,639,000	100	138,651,242	100	146,457,307	100	202,111,084	100	248,354,100	100	336,942,007	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ()	puskes mas	0	2	734,639,000	5	756,531,242	7	799,123,951	7	1,102,791,053	7	1,355,109,645	7	1,838,477,256	Dinas Kesehatan
Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan	'%	20	80	410,000,000	85	422,218,000	90	445,988,873	95	615,464,645	95	756,282,956	95	1,026,049,087	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	puskes mas	0	0	20,000,000	1	20,596,000	1	21,755,555	2	30,022,666	3	36,891,852	3	50,051,175	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas. Pustu dan Jaringannya yang dapat melaksanakan pelayanan kesehatan	'%	100	100	4,270,840,000	100	2,900,000,000	100	13,400,000,000	100	3,030,000,000	100	4,391,000,000	100		Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi lebih	'%	0	15	373,000,000	13	384,115,400	13	405,741,097	12	559,922,714	10	688,033,031	10	933,454,413	Dinas Kesehatan
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan	'%	90	90	2,574,920,000	91	2,651,652,616	92	2,800,940,658	93	3,865,298,108	95	4,749,678,316	95	6,443,888,571	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	'%	83.8	85	193,564,000	86	199,332,207	87	210,554,610	88	290,565,362	90	357,046,717	90	484,405,281	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita	'%	57.57	60	744,750,000	70	766,943,550	80	810,122,472	90	1,117,969,011	90	1,373,760,321	90	1,863,780,627	Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	100	100	368,671,800	100	379,658,220	100	401,032,977	100	553,425,509	100	680,049,265	100	922,622,838	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pelaksanaan lingkungan sehat dikecamatan dan kelurahan	bln	0	0	25,000,000	0	25,745,000	0	27,194,444	0	37,528,332	0	46,114,814	0	62,563,969	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	'%	12.5	13	680,250,000	20	700,521,450	30	739,960,808	40	1,021,145,915	50	1,254,784,100	50	1,702,365,588	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	'%	65	65	2,300,000,000	70	360,000,000	75	7,700,000,000	80	23,365,000,000	85	23,046,500,000	85		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	'%	10	10	228,000,000	20	234,794,400	40	248,013,325	60	342,258,388	75	420,567,107	75	570,583,394	Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap	'%	98	98	4,050,000,000	99	4,170,690,000	100	4,405,499,847	100	6,079,589,789	100	7,470,599,933	100	10,135,362,928	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Pembangunan gedung	Persentase Gedung Negara dan Swasta yang Laik Fugsi	'%	0	2	150,000,000	5	154,470,000	20	163,166,661	30	225,169,992	40	276,688,886	40	375,383,812	Dinas Pekerjaan Umum
Program pengendalian banjir	Pengurangan titik genangan	titik	8	8	257,522,800	6	265,196,979	4	280,127,569	2	386,576,046	0	475,024,645	0	644,465,936	Dinas Pekerjaan Umum
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	'%	48	48	943,071,400	55	2,940,000,000	70	12,104,083,333	90	23,785,170,833	100	23,937,604,375	100		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	'%	45	45	2,500,000,000	50	2,574,500,000	60	2,719,444,350	70	3,752,833,203	80	4,611,481,440	80	6,256,396,869	Dinas Pekerjaan Umum
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	'%	98	0	0	98	488,000,000	99	561,200,000	100	3,420,000,000	100	3,762,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang terpelihara / normalisasi	'%	47	0	0	55	1,000,000,000	65	1,100,000,000	70	1,210,000,000	75	1,331,000,000	75		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	'%	72	72	4,819,443,900	80	4,963,063,328	85	5,242,483,794	90	7,234,627,635	95	8,889,910,438	95	12,060,941,491	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	'%	40	50	197,000,000	60	202,870,600	65	214,292,215	70	295,723,256	75	363,384,737	75	493,004,073	Dinas Pekerjaan Umum
Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota	'%	60	60	464,726,200	65	478,575,041	70	505,518,816	75	697,615,965	80	857,230,498	80	1,163,004,617	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	'%	40	50	862,629,700	70	888,336,065	75	938,349,386	80	1,294,922,152	85	1,591,200,340	85	2,158,781,502	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota	'%	60	60	0	65	250,000,000	70	0	0	0	0	0	0		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat - alat berat ke PU an / Kebinamargaan	'%	30	0	0	50	4,000,000,000	65	4,050,000,000	80	4,105,000,000	90	1,665,500,000	90		Dinas Pekerjaan Umum
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik	'%	85	85	1,009,556,000	88	1,039,640,769	90	1,098,172,544	93	1,515,478,111	95	1,862,219,503	95	2,526,473,199	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik	'%	85	85	4,723,190,700	88	4,863,941,783	90	5,137,781,705	93	7,090,138,753	95	8,712,362,500	95	11,820,062,204	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan informasi / data base jalan	'%	20	0	0	40	1,200,000,000	0	0	80	300,000,000	100	330,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																

Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana areal pemakaman yang memadai	'%	80	80	139,484,600	80	143,641,241	85	151,728,243	85	209,384,975	90	257,292,258	90	349,068,406	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Lingkungan Sehat Perumahan	% Jalan dengan riol yang baik	'%	40	40	3,804,507,000	55	3,917,881,309	70	4,138,458,026	90	5,711,072,076	100	7,017,765,367	100	9,521,002,274	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Pembangunan Rusunawa yang layak huni	unit	0	0	0	0	0	1	15,000,000,000	1	15,000,000,000	0	0	0		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	'%	50	60	79,649,400	80	82,022,952	100	86,640,844	100	119,564,365	100	146,920,692	100	199,327,303	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	% Kesiap siangaan dan Tanggap terhadap Pencegahan Kebakatan Meningkat	'%	50	60	1,950,000,000	70	2,008,110,000	75	2,121,166,593	80	2,927,209,898	90	3,596,955,523	90	4,879,989,558	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Perencanaan Pembangunan																
Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	'%	100	100	2,214,373,100	100	2,280,361,418	100	2,408,745,766	100	3,324,069,157	100	4,084,616,181	100	5,541,598,772	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	'%	100	100	84,875,500	100	87,404,790	100	92,325,680	100	127,409,438	100	156,560,717	100	212,405,925	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan sosial budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	'%	100	100	164,296,900	100	169,192,948	100	178,718,511	100	246,631,545	100	303,060,842	100	411,162,644	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	'%	100	100	574,865,000	100	591,995,977	100	625,325,351	100	862,948,984	100	1,060,391,711	100	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum	'%	60	100	125,647,500	100	129,391,796	100	136,676,554	100	188,613,644	100	231,768,446	100	314,440,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Pemenuhan Pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota	'%	60	65	316,265,200	70	325,689,903	75	344,026,244	80	474,756,217	85	583,380,440	85	791,472,243	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Peningkatan kualitas perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana	'%	50	50	0	60	75,000,000	65	85,000,000	70	100,000,000	75	110,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perhubungan																
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berwawasan lingkungan	Persen	70	0	0	72	7,800,000,000	73	1,625,000,000	74	4,300,000,000	75	1,250,000,000	75		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Optimalisasi Peningkatan Pengoperasian Kendaraan	Persen	80	81	180,000,000	82	185,364,000	83	195,799,993	84	270,203,991	85	332,026,664	85	450,460,575	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas lalu ,intas yang memadai dan berwawasan lingkungan	Persen	70	71	5,351,566,000	72	5,511,042,667	73	5,821,314,369	74	8,033,413,829	75	9,871,458,913	75	13,392,608,308	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

Program peningkatan pelayanan angkutan	Terwujudnya Angkutan Yang Selamat, Aman, Nyaman, Terjangkau dan Terpadu	Persen	80	81	51,379,000	82	52,910,094	83	55,888,933	84	77,126,727	85	94,773,322	85	128,578,966	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terciptanya Lalu Lintas Yang Aman, Tertib dan Lancar	Persen	70	71	763,000,000	72	785,737,400	73	829,974,416	74	1,145,364,694	75	1,407,424,135	75	1,909,452,325	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Persen	70	71	260,000,000	72	267,748,000	73	282,822,212	74	390,294,653	75	479,594,070	75	650,665,274	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Lingkungan Hidup																
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	Persentase	8	10	1,233,986,000	12	1,270,758,783	13	1,342,302,502	14	1,852,377,453	15	2,276,201,414	15	3,088,122,459	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH/ Non Hijau	'%	7.78	8	600,000,000	8	2,000,000,000	8	5,700,000,000	9	6,420,000,000	9	4,662,000,000	9		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase kelompok masyarakat yang memahami pengelolaan RTH	'%	10	20	0	30	0	40	110,000,000	50	115,000,000	60	120,000,000	60		Kantor Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemenuhan RTH	'%	20	20	0	22	100,000,000	25	120,000,000	28	140,000,000	30	0	30		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan/pengelolaan persampahan	Persen	90	90	5,799,341,500	90	5,972,161,877	100	6,308,394,590	100	8,705,584,535	100	10,697,422,276	100	14,513,192,802	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup	'%	50	60	451,509,800	70	464,964,792	80	491,142,310	90	677,776,388	95	832,851,625	95	1,129,929,800	Kantor Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	'%	80	70	424,576,950	60	437,229,343	50	461,845,355	40	637,346,590	30	783,171,490	30	1,062,528,760	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan pengendalian	'%	50	55	0	60	380,000,000	65	1,055,000,000	70	1,055,000,000	75	1,055,000,000	75		Kantor Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	'%	0	0	0	50	0	55	270,000,000	60	175,000,000	65	180,000,000	65		Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Informasi Lingkungan Hidup	'%	0	0	0	60	100,000,000	65	120,000,000	70	140,000,000	75	160,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pertanahan																
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunan tanah	'%	80	80	591,580,000	81	609,209,084	82	643,507,555	83	888,040,426	84	1,091,224,076	84	1,480,463,704	Sekretariat Daerah
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah	'%	90	90	151,928,000	91	2,152,000,000	92	154,000,000	93	2,156,500,000	94	158,500,000	94	2,156,500,000	Sekretariat Daerah
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat capaian pelayanan administrasi kependudukan	'%	67	70	662,010,550	75	681,738,464	80	720,120,340	85	993,766,069	90	1,221,139,746	90	1,656,720,293	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi dan kelengkapan data kependudukan	'%	0	0	0	85	257,100,000	90	139,760,000	95	127,366,000	100	114,171,000	100		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang	'%	70	70	345,140,000	70	355,425,172	70	375,435,609	70	518,101,141	70	636,642,682	70	863,733,126	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penurunan Kasus KDRT dan TPPO	'%	50	50	0	50	0	50	200,000,000	50	205,000,000	50	210,000,000	50		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kesejahteraan perempuan	'%	0	35	0	30	200,000,000	25	310,000,000	20	320,000,000	15	320,000,000	15		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tingkat kemiskinan menurun menjadi 2.84 %	'%	4.58	4	352,400,000	4	362,901,520	3	383,332,876	3	528,999,368	3	650,034,424	3	881,901,703	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	100 % data akurat	'%	80	85	115,152,000	88	118,583,530	90	125,259,782	93	172,858,500	95	212,408,524	95	288,174,645	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program pelayanan kontrasepsi	Tercapainya program KB	'%	75	75	0	75	21,000,000	80	160,000,000	80	170,000,000	80	25,000,000	80		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 % Kelompok Kerja paham fungsi keluarga	'%	100	100	0	100	0	100	45,000,000	100	50,000,000	100	0	100		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75 % sekolah dan perguruan tinggi memiliki PIK R/M	'%	25	35	209,025,650	45	215,254,614	55	227,373,449	65	313,775,360	75	385,567,162	75	523,098,969	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana	Jumlah PUS ber KB 80 %	'%	1.77	2	1,463,946,000	2	1,507,571,591	2	1,592,447,871	1	2,197,578,062	1	2,700,383,923	1	3,663,610,869	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Peningkatan Tingkat Tahapan Kelompok Kegiatan	tingkat	0	0	71,247,000	0	73,370,161	0	77,500,901	0	106,951,243	0	131,421,687	0	178,299,803	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase Kelurahan yang memiliki WPA (Warga Peduli AIDS)	'%	8	24	465,000,000	24	478,857,000	30	505,816,649	40	698,026,976	50	857,735,548	50	1,163,689,818	Dinas Kesehatan
Sosial																
Program pembinaan anak terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	'%	32	35	0	37	100,000,000	40	100,000,000	42	100,000,000	45	100,000,000	45		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	'%	60	65	1,696,650,000	68	1,747,210,170	70	1,845,578,103	73	2,546,897,782	75	3,129,627,994	75	4,245,966,299	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	'%	75	80	436,581,000	85	449,591,114	87	474,903,094	90	655,366,269	92	805,314,071	92	1,092,569,601	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	3	12	101,442,000	15	104,464,972	20	110,346,350	25	152,277,962	30	187,119,160	30	253,864,564	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial	'%	25	25	3,000,000	50	3,089,400	75	3,263,333	75	4,503,400	100	5,533,778	100	7,507,676	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang meningkat kesejahteraannya	'%	1.5	2	4,096,295,100	2	4,218,364,694	2	4,455,858,626	3	6,149,084,904	3	7,555,995,530	3	10,251,219,136	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial	'%	75	75	347,600,000	80	357,958,480	80	378,111,542	85	521,793,929	90	641,180,379	90	869,889,421	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin	'%	60	60	57,151,250	61	58,854,357	62	62,167,858	63	85,791,643	64	105,420,771	64	143,024,361	Sekretariat Daerah
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Penurunan Angka Kemiskinan	'%	54	5	137,853,000	5	141,961,019	4	149,953,425	3	206,935,726	2	254,282,620	2	344,985,231	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	2	2	0	3	300,000,000	4	430,000,000	5	630,000,000	6	630,000,000	6		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Tenaga Kerja																
Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas	'%	66	77	34,000,000	88	35,013,200	90	36,984,443	95	51,038,532	100	62,716,148	100	85,086,997	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat tenaga kerja yang memiliki keahlian	'%	52	55	657,579,500	57	677,175,369	60	715,300,342	65	987,114,472	65	1,212,966,264	65	1,645,631,330	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap UU ketenagakerjaan	'%	5	5	581,070,001	6	598,385,887	7	632,075,012	8	872,263,517	9	1,071,837,410	9	1,454,161,814	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja	'%	8	15	55,000,000	17	56,639,000	19	59,827,776	21	82,562,330	23	101,452,592	23	137,640,731	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	82.52	83	217,000,000	84	223,466,600	85	236,047,770	86	325,745,922	87	400,276,589	87	543,055,248	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang tersentuh pembiayaan	'%	30	33	45,000,000	36	46,341,000	39	48,949,998	42	67,550,998	45	83,006,666	45	112,615,144	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	unit	3	20	460,000,000	20	473,708,000	20	500,377,760	20	690,521,309	20	848,512,585	20	1,151,177,024	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Jumlah UMKM	unit	9236	9,236		9,246	0	9,256	0	9,266	0	9,276	0	9,276	0	

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi sehat	unit	11	12	290,000,000	13	298,642,000	14	315,455,545	15	435,328,652	16	534,931,847	16	725,742,037	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Penanaman Modal																
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor	Perusahaan	70	80	32,806,100	90	33,783,722	100	35,685,745	110	49,246,329	120	60,513,889	120	82,099,193	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	persen	2500000000	10	114,286,000	10	117,691,723	10	124,317,767	10	171,558,518	10	210,811,107	10	286,007,429	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi	dokumen	0	0	0	1	100,000,000	1	130,000,000	1	125,000,000	1	0	1		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Lancarnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase	100	100	377,525,700	100	388,775,966	100	410,664,053	100	566,716,393	100	696,381,103	100	944,780,243	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	nilai mutu	7.2	7	293,324,000	7	302,065,055	8	319,071,318	8	440,318,419	8	541,063,273	8	734,060,542	GUGUAK PANJANG
Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	'%	80	85	586,361,100	90	603,834,661	90	637,830,552	90	880,206,162	90	1,081,597,332	90	1,467,403,100	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Kebudayaan																
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang dilaksanakan masyarakat	kali	4	52	363,480,000	57	374,311,704	59	395,385,453	61	545,631,925	63	670,472,510	63	909,630,054	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	sanggar	6	6	892,148,000	7	918,734,010	13	970,458,735	16	1,339,233,055	19	1,645,649,577	19	2,232,652,782	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	kali	0	1	301,845,000	1	310,839,981	1	328,340,272	1	453,109,575	1	556,781,046	1	755,384,845	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan Program Pengembangan nilai budaya	bln	0	12	75,000,000	12	77,235,000	12	81,583,331	12	112,584,996	12	138,344,443	12	187,691,906	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya aktifitas pengembangan nilai adat dan budaya di masyarakat	kegiatan	8	8	6,352,000	9	6,541,290	10	6,909,564	11	9,535,199	12	11,716,852	12	15,896,253	GUGUAK PANJANG
Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya	kegiatan	0	0	0	3	374,500,000	4	426,200,000	4	426,660,000	4	448,872,000	4		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	'%	0	5	0	10	997,000,000	15	51,189,000,000	20	7,330,000,000	25	1,105,000,000	25		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Pengelolaan Kekayaan Budaya	'%	0	25	464,941,500	30	478,796,757	35	505,753,014	40	697,939,159	45	857,627,639	45	1,163,543,418	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Kepemudaan dan Olahraga																
Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah capaian program pembinaan kepemudaan	'%	0	100	931,257,100	100	959,008,562	100	1,013,000,744	100	1,397,941,026	100	1,717,789,933	100	2,330,525,602	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	'%	0	100	368,905,750	100	379,899,141	100	401,287,463	100	553,776,699	100	680,480,808	100	923,208,312	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai	unit	3	3	3,385,741,500	3	3,486,636,597	4	3,682,934,237	5	5,082,449,247	6	6,245,313,635	6	8,473,017,009	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	'%	100	100	824,261,000	100	848,823,978	100	896,612,768	100	1,237,325,619	100	1,520,425,721	100	2,062,761,576	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan	'%	100	0	0	20	0	40	145,000,000	60	155,000,000	80	165,000,000	80		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	persentase sekolah yang bebas narkoba	'%	0	0	0	0	0	20	80,000,000	40	85,000,000	60	90,000,000	60		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Terjaganya kerukunan antar dan intern umat bergama	'%	0	100	78,847,500	100	81,197,156	100	85,768,555	10	118,360,606	100	145,441,513	100	197,320,501	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan program kualitas pemahaman dan pengamalan dan pembinaan kerukunan beragama	'%	0	100	128,000,000	100	131,814,400	100	139,235,551	100	192,145,060	100	236,107,850	100	320,327,520	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Meningkatnya aktifitas keagamaan dilingkungan masyarakat	kegiatan	3	5	194,215,000	6	200,002,607	7	211,262,754	8	291,542,600	9	358,247,547	9	486,034,447	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Kelompok masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan	Kelompok masyarakat/keluarahan	9	2	469,687,000	2	483,683,673	3	510,915,063	4	705,062,787	4	866,381,153	4	1,175,419,311	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Jumlah event keagamaan ditengah masyarakat	'%	3	3	6,497,174,600	6	6,690,790,403	9	7,067,481,903	12	9,753,125,026	15	11,984,640,032	15	16,259,561,131	Sekretariat Daerah
Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, damai dan berkualitas	'%	0	0	12,636,000	0	13,012,553	0	13,745,160	85	18,968,320	85	23,308,272	85	31,622,332	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terpantaunya kegiatan orang asing, lembaga asing, dan non govenment organization serta deteksi dini dan penanggulangan konflik sosial	'%	100	100	237,889,000	100	244,978,092	100	258,770,359	100	357,103,095	100	438,808,283	100	595,331,198	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat keamananan dan kenyamanan lingkungan	'%	40	50	300,022,600	60	308,963,273	70	326,357,906	75	450,373,910	85	553,419,461	85	750,824,182	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Program Sistem kebencanaan	% Jumlah Data dan Informasi tentang Kebencanan terpenuhi	'%	25	100	74,970,000	100	77,204,106	100	81,550,697	100	112,539,962	100	138,289,105	100	187,616,829	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Pelaku Konstruksi bangunan yang terlatih dalam Konstruksi bangunan layak tersedia	'%	50	0	0	70	0	75	0	80	0	90	0	90	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana	Kapasitas dan Kwalitas Petugas BPBD Meningkat dalam Penanggulanga Kebencanaan	'%	50	70	399,840,000	70	411,755,232	70	434,937,052	70	600,213,131	70	737,541,896	70	1,000,623,090	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	%Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meningkat	'%	50	60	2,155,520,000	70	2,219,754,496	75	2,344,726,674	80	3,235,722,810	90	3,976,056,189	90	5,394,315,432	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Peningkatan Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	bln	0	100	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat	Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan	kegiatan	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Efektivitas kegiatan pemberantasan narkoba	Kegiatan	3	3	196,137,000	3	201,981,883	3	213,353,463	3	294,427,778	3	361,792,854	3	490,844,365	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Terdeteksinya potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah	'%	100	100	427,527,500	100	440,267,820	100	465,054,898	100	641,775,759	100	788,614,053	100	1,069,912,685	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	'%	20	20	124,280,900	30	127,984,471	40	135,189,997	50	186,562,195	60	229,247,625	60	311,020,253	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	kasus	722	650	3,239,993,800	600	3,336,545,615	500	3,524,393,133	400	4,863,662,524	250	5,976,468,510	250	8,108,274,827	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat	'%	100	100	76,668,300	100	78,953,015	100	83,398,070	100	115,089,337	100	141,421,777	100	191,866,925	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Tingkat pelaksanaan peringatan hari-hari besar kenegaraan	'%	100	100	208,464,500	100	214,676,742	100	226,763,043	100	312,932,999	100	384,532,069	100	521,694,658	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Peningkatan program pemberrantasan penyakit masyarakat	bln	0	0	42,000,000	0	43,251,600	0	45,686,665	0	63,047,598	0	77,472,888	0	105,107,467	AUR BIRUGO TIGO BALEH

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Mneingkatnya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	bln	0	0	41,000,000	0	42,221,800	0	44,598,887	0	61,546,465	0	75,628,296	0	102,604,909	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas per tahun	persen	0	10	18,377,500	10	18,925,150	10	19,990,635	10	27,587,077	10	33,899,000	10	45,990,773	GUGUAK PANJANG
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Temuan Peristiwa Gangguan Ketertiban dan Keamanan disertai laporan tertulis	Laporan /Tahun	22	15	48,328,500	12	49,768,689	10	52,570,667	7	72,547,520	5	89,146,392	5	120,944,910	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Bidang Pemerintahan Umum																
Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah Usulan Bantuan Kemasyarakatan yang direalisasikan	Proposal /Tahun	42	60	15,000,000	60	15,447,000	60	16,316,666	60	22,516,999	60	27,668,889	60	37,538,381	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	'%	80	80	71,440,000	82	73,568,912	85	77,710,842	88	107,240,962	90	131,777,694	90	178,782,797	Sekretariat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	'%	80	80	909,099,450	81	936,190,614	82	988,898,145	83	1,364,679,440	84	1,676,918,096	84	2,275,074,781	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH	'%	80	80	7,627,000,000	85	7,854,284,600	90	8,296,480,823	95	11,449,143,536	100	14,068,707,577	100	19,087,015,569	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	'%	80	80	245,162,000	81	252,467,828	82	266,681,766	83	368,020,837	84	452,224,005	84	613,532,308	Sekretariat Daerah
Program Penataan Kelembagaan Daerah	Peningkatan capaian kinerja daerah	peringkat nasional	74	62	721,357,000	55	742,853,439	50	784,676,087	40	1,082,853,000	35	1,330,609,767	35	1,805,238,271	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur	Jumlah penyelenggaraan diklat peningkatan profesionalisme aparatur	kegiatan	0	0	0	8	800,000,000	8	812,000,000	8	834,000,000	8	836,000,000	8		Badan Kepegawaian Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	'%	100	100	559,000,000	100	575,658,200	100	608,067,757	100	839,133,504	100	1,031,127,250	100	1,398,930,340	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Meningkatnya Program peningkatan pelayanan kelurahan	'%	100	100	380,000,000	100	391,324,000	100	413,355,541	100	570,430,647	100	700,945,179	100	950,972,324	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	persen	80	82	734,210,800	84	756,090,282	86	798,658,165	88	1,102,148,267	90	1,354,319,791	90	1,837,405,660	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	orang	80	0	30,740,000	80	31,656,052	80	33,438,288	80	46,144,837	80	56,702,776	80	76,928,656	GUGUAK PANJANG

Program Peningkatan Peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan	'%	0	0	0	80	11,000,000	85	11,850,000	90	12,650,000	95	13,275,000	95		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kerjasama Tugas Sekretariat DPRD se Indonesia	'%	100	100	109,500,000	100	112,763,100	100	119,111,663	100	164,374,094	100	201,982,887	100	274,030,183	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terstandarisasinya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	'%	100	100	50,000,000	100	51,490,000	100	54,388,887	100	75,056,664	100	92,229,629	100	125,127,937	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemerintahan	'%	100	100	12,522,580,525	100	12,895,753,425	100	13,621,784,342	100	18,798,062,393	100	23,099,059,068	100	31,338,493,438	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	'%	100	100	36,000,000	100	37,072,800	100	39,159,999	100	54,040,798	100	66,405,333	100	90,092,115	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Perizinan	dokumen	2	2	12,666,000	1	13,043,447	1	13,777,793	1	19,013,354	1	23,363,610	1	31,697,409	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase capaian realisasi penyelenggaraan pemerintahan	'%	81	75	762,195,900	80	784,909,338	80	829,099,734	85	1,144,157,632	90	1,405,940,899	90	1,907,440,017	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kegiatan yang dikelola dengan sistem otomisasi	kegiatan	1	1	502,385,200	3	517,356,279	5	546,483,437	7	754,147,144	7	926,696,010	7	1,257,248,477	Badan Kepegawaian Daerah
Peningkatan Kemitraan Legislatif dengan Eksekutif	Terjalinnya kemitraan yang sinergis antara legislatif dan eksekutif	'%	100	0	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukittinggi	persen	10	15	2,092,983,550	20	2,155,354,460	30	2,276,700,916	50	3,141,847,264	75	3,860,701,918	75	5,237,814,292	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ditindaklanjutinya Pengaduan Masyarakat Secara Komprehensif	'%	100	100	0	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Penyelenggaraan Adipura	Tingkat penilaian adipura	'%	71	75	0	77	0	80	325,000,000	85	325,000,000	87	325,000,000	87		Kantor Lingkungan Hidup
Program Penegasan Batas Wilayah	Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan	'%	80	80	671,985,500	81	692,010,668	82	730,970,869	83	1,008,739,799	84	1,239,539,464	84	1,681,683,191	Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	'%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Sekretariat Daerah
Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat inflasi daerah	'%	2.84	9	575,800,100	6	592,958,943	5	626,342,531	5	864,352,693	4	1,062,116,590	4	1,440,973,577	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rupiah (Milyar)	28892	31,758	3,021,888,000	34,927	3,111,940,262	38,432	3,287,142,499	42,311	4,536,256,649	46,605	5,574,152,170	46,605	7,562,452,249	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD`	'%	100	100	111,720,000	100	115,049,256	100	121,526,529	100	167,706,610	100	206,077,883	100	279,585,863	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Peningkatan program peningkatan kinerja LPMK dan RT	bln	12	12	63,000,000	12	64,877,400	12	68,529,998	12	94,571,397	12	116,209,332	12	157,661,201	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pembinaan PKK	Peningkatan program pembinaan PKK	bln	12	12	92,500,000	12	95,256,500	12	100,619,441	12	138,854,829	12	170,624,813	12	231,486,684	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan RT	'%	90	80	67,748,400	85	69,767,302	90	73,695,201	95	101,699,378	100	124,968,196	100	169,544,351	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Pangan																
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	2400	2,400	387,248,000	2,400	398,787,990	2,400	421,239,754	2,400	581,310,861	2,400	714,314,786	2,400	969,110,870	Kantor Ketahanan Pangan
	Ketersediaan protein perkapita	gr/kap/hr	63	63		63	0	63	0	63	0	63	0	63	0	
Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	84.1	84	293,333,800	84	302,075,147	85	319,081,978	85	440,333,130	85	541,081,350	85	734,085,067	Kantor Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tiingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	'%	15	20	497,375,200	25	512,196,981	30	541,033,671	34	746,626,466	40	917,454,601	40	1,244,710,658	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	'%	15	20	1,898,758,100	25	1,955,341,091	30	2,065,426,795	34	2,850,288,977	40	3,502,435,095	40	4,751,753,693	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya peren perempuan dipedesaan	'%	100	100	184,000,000	100	189,483,200	100	200,151,104	100	276,208,524	100	339,405,034	100	460,470,810	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan program keberdayaan masyarakat pedesaan	bln	12	12	151,000,000	12	155,499,800	12	164,254,439	12	226,671,125	12	278,533,479	12	377,886,371	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	'%	100	100	640,000,000	100	659,072,000	100	696,177,754	100	960,725,300	100	1,180,539,249	100	1,601,637,599	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertahunnya	persen	802661	3	581,898,000	3	599,238,560	3	632,975,691	3	873,506,454	3	1,073,364,731	3	1,456,233,930	GUGUAK PANJANG

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun	'%	5	7	180,868,900	9	186,258,793	12	196,745,163	15	271,508,325	17	333,629,430	17	452,635,048	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Tingkat partisipasi perempuan dalam pencapaian tujuan program pemerintah	'%	100	80	341,078,000	85	351,242,124	90	371,017,056	95	512,003,537	100	629,149,947	100	853,567,733	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatkanya persentase aktifitas guna peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakn oleh pemerintah maupun masyarakat	Persen	10	10	543,400,500	10	559,593,835	10	591,098,968	10	815,716,576	10	1,002,352,528	10	1,359,891,675	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	'%	80	80	615,303,000	85	633,639,029	85	669,312,907	90	923,651,811	90	1,134,983,346	90	1,539,831,905	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	'%	15	15	2,180,510,600	20	2,245,489,816	25	2,371,910,893	30	3,273,237,032	34	4,022,153,665	34	5,456,855,877	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	'%	20	25	193,442,900	30	199,207,498	35	210,422,881	40	290,383,575	45	356,823,337	45	484,102,222	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya program peningkatan usaha ekonomi masyarakat	bln	0	0	195,538,000	0	201,365,032	0	212,701,884	0	293,528,600	0	360,687,943	0	489,345,332	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat	pelaku	0	0	141,194,000	90	145,401,581	120	153,587,690	90	211,951,013	120	260,445,404	120	353,346,280	GUGUAK PANJANG
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	'%	3	3	77,821,500	5	80,140,581	6	84,652,495	8	116,820,444	10	143,548,961	10	194,752,876	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Statistik																
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pemenuhan Data pembangunan Daerah	'%	66	70	244,655,500	80	251,946,234	85	266,130,807	90	367,260,513	100	451,289,719	100	612,264,762	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD	Persen	10	0	0	20	50,000,000	30	57,500,000	40	60,000,000	50	65,000,000	50		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi statistik daerah	persen	100	100	29,249,800	100	30,121,444	100	31,817,281	100	43,907,848	100	53,953,964	100	73,199,343	Dinas Pertanian
Kearsipan																

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan	'%	100	100	0	100	510,000,000	100	535,000,000	100	560,000,000	100	585,000,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi	'%	100	100	97,268,600	100	100,167,204	100	105,806,618	100	146,013,133	100	179,420,937	100	243,420,386	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan	'%	100	100	0	100	60,000,000	100	52,000,000	100	15,000,000	100	17,500,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	'%	100	100	47,500,000	100	48,915,500	100	51,669,443	100	71,303,831	100	87,618,147	100	118,871,541	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Komunikasi dan Informatika																
Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)	Kemudahan mendapatkan informasi melalui media elektronik menuju smart city	Persen	80	80	81,000,000	82	1,135,000,000	85	1,090,000,000	87	95,000,000	90	100,000,000	90	1,090,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Persen	80	80	142,000,000	82	146,231,600	85	154,464,439	87	213,160,926	90	261,932,146	90	355,363,342	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Persentase tingkat ketercapaian penyebaran informasi Pemda Bukittinggi kepada masyarakat	'%	80	80	2,485,337,800	83	2,559,400,866	85	2,703,495,135	88	3,730,823,287	90	4,584,435,655	90	6,219,703,853	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tingkat pencapaian pelayanan informasi kepada publik	'%	80	80	419,853,220	81	432,364,846	82	456,706,987	83	630,255,642	84	774,458,133	84	1,050,707,348	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya sarana dan prasarana TIK menuju smart city	Persen	80	80	1,034,736,000	82	1,065,571,133	85	1,125,562,788	87	1,553,276,647	90	1,908,666,344	90	2,589,487,628	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat	publikasi	0	12	16,675,000	12	17,171,915	12	18,138,694	12	25,031,397	12	30,758,581	12	41,730,167	GUGUAK PANJANG
Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat Melalu Media Cetak Dan Elektronik	Publikasi/Tahun	24	24	11,450,000	24	11,791,210	27	12,455,055	27	17,187,976	29	21,120,585	29	28,654,298	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan program komunikasi, informasi dan media massa	'%	100	100	0	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi di masyarakat	bulan	12	12	52,678,000	12	54,247,804	12	57,301,956	12	79,076,699	12	97,169,448	12	131,829,790	GUGUAK PANJANG

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan Telekomunikasi	Persen	80	80	257,000,000	82	264,658,600	85	279,558,879	87	385,791,253	90	474,060,292	90	643,157,598	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Perpustakaan																
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan	'%	100	100	248,249,470	100	255,647,304	100	270,040,247	100	372,655,541	100	457,919,129	100	621,258,883	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Pertanian																
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi	kelompok	10	11	23,763,600	12	24,471,755	13	25,849,515	14	35,672,331	15	43,834,160	15	59,469,805	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	persen	0	5	64,257,200	5	66,172,065	5	69,897,552	5	96,458,621	5	118,528,354	5	160,807,418	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	2	2	370,088,300	2	381,116,931	2	402,573,815	2	555,551,864	2	682,662,131	2	926,167,713	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian	persen	2	2	155,835,200	2	160,479,089	2	169,514,062	2	233,929,405	2	287,452,453	2	389,986,743	Dinas Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)	persen	70	73	306,133,100	78	315,255,866	80	333,004,772	82	459,546,585	85	564,690,844	85	766,116,067	Dinas Pertanian
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persen	100	100	139,098,800	100	143,243,944	100	151,308,578	100	208,805,838	100	256,580,614	100	348,102,919	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	1	2	43,233,800	2	44,522,167	2	47,028,765	2	64,899,696	2	79,748,747	2	108,195,124	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	kwintal/Ha	66.7	67	87,987,400	67	90,609,425	67	95,710,735	67	132,080,814	67	162,300,905	67	220,193,638	Dinas Pertanian
Kehutanan																
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan luas lahan yang dihijaukan	persen	2	2	61,740,800	2	63,580,676	2	67,160,268	2	92,681,170	2	113,886,621	2	154,509,979	Dinas Pertanian
Pariwisata																
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	meningkatnya jumlah PAD yang dikelola Dinas Pariwisata	rupiah (Milyar)	8041	10,086	8,491,764,000	10,091	81,424,000,000	10,097	11,960,000,000	10,112	12,326,000,000	10,127	13,153,000,000	10,127		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	meningkatnya jumlah wisatawan	orang	460905	483,950	2,042,367,950	508,148	2,103,230,515	533,555	2,221,642,393	560,233	3,065,866,502	588,245	3,767,336,758	588,245	5,111,145,779	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Kelautan dan Perikanan																
Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	persen	2	2	77,740,500	2	80,057,167	2	84,564,385	2	116,698,852	2	143,399,549	2	194,550,168	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Perikanan budidaya	Jumlah Produksi ikan	ton	355	351	220,693,700	352	227,270,372	353	240,065,694	354	331,290,658	355	407,089,961	355	552,298,950	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan	Meningkatnya kualitas SDM Perikanan		0	0	15,650,500	0	16,116,885	0	17,024,266	0	23,493,486	0	28,868,796	0	39,166,296	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Daya Saing Produk Perikanan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	persen	40	10	0	10	70,000,000	10	75,000,000	10	80,000,000	10	85,000,000	10		Dinas Pertanian
Perdagangan																
Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat Pengawasan dan Ketertiban Pasar	'%	100	100	374,907,000	100	386,079,229	100	407,815,489	100	562,785,375	100	691,550,669	100	938,226,792	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Tingkat Sarana dan Prasarana yang dikembangkan	$	100	100	2,393,450,000	100	2,464,774,810	100	2,603,541,632	100	3,592,887,452	100	4,414,940,101	100	5,989,749,235	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha	perusahaan	2553	300	554,000,000	350	570,509,200	400	602,628,868	450	831,627,838	500	1,021,904,287	500	1,386,417,546	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri	IKM	0	2	250,000,000	2	257,450,000	2	271,944,435	2	375,283,320	2	461,148,144	2	625,639,687	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL	lokasi	0	0	120,000,000	1	123,576,000	1	130,533,329	1	180,135,994	1	221,351,109	1	300,307,050	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah komoditas peredaran barang yang di awasi	jenis	20	20	705,000,000	20	726,009,000	20	766,883,307	22	1,058,298,963	22	1,300,437,766	22	1,764,303,917	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Jumlah UTTP yang di awasi	unit	300	30		30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	
Industri																
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM	'%	1	2	616,750,000	2	635,129,150	2	670,886,921	2	925,823,951	2	1,137,652,471	2	1,543,453,108	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang	unit usaha	0	5	886,125,000	10	912,531,525	15	963,907,050	20	1,330,191,729	30	1,634,539,596	30	2,217,579,870	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya nilai produksi IKM	'%	4.1113E+11	2	47,527,000	2	48,943,305	2	51,698,813	2	71,344,361	2	87,667,951	2	118,939,110	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal	&	476	7	30,000,000	7	30,894,000	7	32,633,332	7	45,033,998	7	55,337,777	7	75,076,762	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB	Persen	0.07	0	185,000,000	0	190,513,000	0	201,238,882	0	277,709,657	0	341,249,627	0	462,973,368	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Pertumbuhan industri	unit	1638	15		15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	
Persandian																
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan TIK OLeh SKPD dan Layanan Kepada Publik dalam mewujudkan smart city	Persen	80	81	531,000,000	82	535,000,000	83	1,055,000,000	84	1,056,000,000	85	567,000,000	85	1,056,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	'%	80	80	574,865,000	82	591,995,977	85	625,325,351	88	862,948,984	90	1,060,391,711	90	1,438,633,435	Sekretariat Daerah

Keuangan																
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi	opini	3	3	4,841,271,107	3	4,985,540,986	3	5,266,226,943	3	7,267,393,182	3	8,930,172,742	3	12,115,565,359	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																
Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang difasilitasi mengikuti pendidikan kedinasan	orang	1500	550	2,545,102,500	550	2,620,946,555	530	2,768,505,846	535	3,820,538,067	550	4,694,677,177	550	6,369,268,525	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai sesuai standar kompetensi	'%	60	60	325,945,100	70	335,658,264	80	354,555,824	90	489,287,037	95	601,235,912	95	815,696,761	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	'%	80	80	0	82	0	85	0	88	0	90	0	90	0	Sekretariat Daerah
Bidang Pengawasan																
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	'%	100	100	319,019,650	100	328,526,436	100	347,022,474	100	478,891,014	100	588,461,278	100	798,365,416	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	'%	100	100	1,147,785,210	100	1,181,989,209	100	1,248,535,202	100	1,722,978,578	100	2,117,196,077	100	2,872,399,918	Inspektorat Daerah
Bidang Penunjang Lainnya																
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan oleh masyarakat	kegiatan	5	5	416,710,000	5	429,127,958	5	453,287,862	5	625,537,250	5	768,660,172	5	1,042,841,256	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pendidikan politik masyarakat	Efektivitas kegiatan pendidikan politik masyarakat	kegiatan	7	3	1,088,151,500	3	1,120,578,415	3	1,183,666,979	3	1,633,460,432	3	2,007,196,178	3	2,723,163,055	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda	'% kegiatan	0	100	173,906,100	100	179,088,502	100	189,171,184	100	261,056,235	100	320,785,901	100	435,210,232	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

Tabel 8.1
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2016-2021

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
					281,230,131,066		**485,352,347,325**		**460,195,028,495**		**518,090,548,396**		**583,503,208,749**		**657,726,329,558**	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	465,300,000			100	300,000,000	100	60,000,000	100	75,000,000	100	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam menggunakan atribut kepegawaian	'%	100	100	18,000,000	100	18,536,400	100	19,579,999	100	27,020,399	100	33,202,666	100	45,046,057	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	656,988,500	100	676,566,757	100	714,657,466	100	986,227,303	100	1,211,876,110	100	1,644,152,318	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	11,550,000	100	11,894,190	100	12,563,833	100	17,338,089	100	21,305,044	100	28,904,554	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	865,000,000	100	890,777,000	100	940,927,745	100	1,298,480,288	100	1,595,572,578	100	2,164,713,317	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	22,150,000	100	22,810,070	100	24,094,277	100	33,250,102	100	40,857,726	100	55,431,676	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	683,530,700	100	703,899,915	100	743,529,480	100	1,026,070,682	100	1,260,835,655	100	1,710,575,733	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,760,000	100	4,901,848	100	5,177,822	100	7,145,394	100	8,780,261	100	11,912,180	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,987,400	100	11,314,825	100	11,951,849	100	16,493,552	100	20,267,276	100	27,496,614	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	257,387,100	100	265,057,236	100	279,979,958	100	386,372,342	100	474,774,334	100	644,126,339	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	12,150,000	100	12,512,070	100	13,216,500	100	18,238,769	100	22,411,800	100	30,406,089	Kantor Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	309,798,600	100	319,030,598	100	336,992,021	100	465,048,989	100	571,452,198	100	775,289,196	Kantor Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	2,300,000	100	2,368,540	100	2,501,889	100	3,452,607	100	4,242,563	100	5,755,885	Kantor Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	21,300,000	100	21,934,740	100	23,169,666	100	31,974,139	100	39,289,822	100	53,304,501	Kantor Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	6,300,000	100	6,487,740	100	6,853,000	100	9,457,140	100	11,620,933	100	15,766,120	Kantor Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	230,200,600	100	237,060,578	100	250,407,088	100	345,561,782	100	424,626,318	100	576,090,525	Kantor Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	'%	100	100	353,159,200	100	363,683,344	100	384,158,716	100	530,139,029	100	651,434,838	100	883,801,645	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	1,910,300	100	1,967,227	100	2,077,982	100	2,867,615	100	3,523,725	100	4,780,638	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja	'%	100	100	17,950,000	100	18,484,910	100	19,525,610	100	26,945,342	100	33,110,437	100	44,920,930	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang berpakaian sesuai aturan	'%	100	100	18,600,000	100	19,154,280	100	20,232,666	100	27,921,079	100	34,309,422	100	46,547,593	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perentasee laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	2,020,000	100	2,080,196	100	2,197,311	100	3,032,289	100	3,726,077	100	5,055,169	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	65,000,000	100	66,937,000	100	70,705,553	100	97,573,663	100	119,898,517	100	162,666,319	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	19,000,000	100	19,566,200	100	20,667,777	100	28,521,532	100	35,047,259	100	47,548,616	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	343,857,700	100	354,104,659	100	374,040,752	100	516,176,237	100	634,277,361	100	860,524,095	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	132,000,000	100	135,933,600	100	143,586,662	100	198,149,593	100	243,486,220	100	330,337,755	Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,513,220,400	100	6,707,314,368	100	7,084,936,167	100	9,777,211,910	100	12,014,237,995	100	16,299,716,688	Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	90	90	111,000,000	90	114,307,800	90	120,743,329	90	166,625,794	95	204,749,776	95	277,784,021	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	3,237,400,000	100	3,333,874,520	100	3,521,571,655	100	4,859,768,885	100	5,971,684,005	100	8,101,783,690	Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersedian Layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	5,111,604,400	100	5,263,930,211	100	5,560,289,482	100	7,673,199,485	100	9,428,827,527	100	12,792,090,306	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaiakan kinerja dan keuangann yang tersesusun tepat waktu	'%	100	100	78,666,400	100	81,010,659	100	85,571,559	100	118,088,751	100	145,107,457	100	196,867,287	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana & Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,260,897,000	100	32,280,646,000	100	1,601,292,000	100	2,436,344,000	100	2,867,171,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran & Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	169,750,000	100	174,808,550	100	184,650,271	100	254,817,374	100	313,119,590	100	424,809,347	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	46,800,000	100	48,194,640	100	50,907,998	100	70,253,038	100	86,326,933	100	117,119,749	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kesediaan layanan administrasi perkantoran		100	100	7,893,622,000	100	8,128,851,936	100	8,586,506,300	100	11,849,378,693	100	14,560,516,538	100	19,754,252,788	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persentase	100	100	9,377,500	100	9,656,950	100	10,200,636	100	14,076,877	100	17,297,667	100	23,467,745	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persentase	100	100	1,910,080,000	100	1,967,000,384	100	2,077,742,506	100	2,867,284,658	100	3,523,319,387	100	4,780,087,413	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	635,835,000	100	654,782,883	100	691,647,159	100	954,473,080	100	1,172,856,521	100	1,591,214,441	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	60	60	1,342,932,360	70	1,382,951,744	80	1,460,811,928	90	2,015,920,460	95	2,477,163,061	95	3,360,767,125	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	122,654,500	100	126,309,604	100	133,420,835	100	184,120,752	100	226,247,580	100	306,950,092	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	482,769,475	100	497,156,005	100	525,145,888	100	724,701,326	100	890,512,989	100	1,208,158,973	Badan Kepegawaian Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	16,450,000	100	16,940,210	100	17,893,944	100	24,693,642	100	30,343,548	100	41,167,091	Badan Kepegawaian Daerah
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	'%	100	100	878,892,100	100	905,083,085	100	956,039,262	100	1,319,334,182	100	1,621,197,843	100	2,199,479,113	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	100	214,300,000	100	220,686,140	100	233,110,770	100	321,692,862	100	395,296,189	100	536,298,340	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persentase	100	100	19,350,000	100	19,926,630	100	21,048,499	100	29,046,929	100	35,692,866	100	48,424,512	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	438,888,200	100	451,967,068	100	477,412,814	100	658,829,684	100	809,569,915	100	1,098,343,504	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase	100	100	16,165,900	100	16,647,644	100	17,584,906	100	24,267,171	100	29,819,499	100	40,456,114	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,698,700,000	100	2,779,121,260	100	2,935,585,787	100	4,051,108,386	100	4,978,001,985	100	6,753,655,293	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedispilanan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pagawai	'%	100	100	150,000,000	100	154,470,000	100	163,166,661	100	225,169,992	100	276,688,886	100	375,383,812	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesedian Layan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,153,130,000	100	2,217,293,274	100	2,342,126,885	100	3,232,135,102	100	3,971,647,613	100	5,388,334,317	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,900,000	100	11,224,820	100	11,856,777	100	16,362,353	100	20,106,059	100	27,277,890	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	1,446,300,000	100	1,489,399,740	100	1,573,252,945	100	2,171,089,065	100	2,667,834,243	100	3,619,450,717	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persen	100	100	225,225,000	100	231,936,705	100	244,994,741	100	338,092,743	100	415,448,363	100	563,638,794	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	5,562,692,900	100	5,728,461,148	100	6,050,973,511	100	8,350,343,445	100	10,260,902,026	100	13,920,965,778	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persetase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	100	11,358,000	100	11,696,468	100	12,354,980	100	17,049,872	100	20,950,882	100	28,424,062	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan Administrasi	'%	100	100	1,480,784,350	100	1,524,911,724	100	1,610,764,254	100	2,222,854,670	100	2,731,443,819	100	3,705,749,829	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capain kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	5,051,400	100	5,201,932	100	5,494,800	100	7,582,825	100	9,317,775	100	12,641,425	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	86,000,000	100	88,562,800	100	93,548,886	100	129,097,462	100	158,634,962	100	215,220,052	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	59,400,000	100	61,170,120	100	64,613,998	100	89,167,317	100	109,568,799	100	148,651,990	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	474,236,200	100	488,368,439	100	515,863,582	100	711,891,743	100	874,772,574	100	1,186,803,951	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,900,000	100	5,046,020	100	5,330,111	100	7,355,553	100	9,038,504	100	12,262,538	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	102,983,800	100	106,052,717	100	112,023,485	100	154,592,410	100	189,963,153	100	257,723,010	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	23,000,000	100	23,685,400	100	25,018,888	100	34,526,065	100	42,425,629	100	57,558,851	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	418,985,000	100	431,470,753	100	455,762,556	100	628,952,328	100	772,856,620	100	1,048,534,577	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	107,580,000	100	110,785,884	100	117,023,129	100	161,491,918	100	198,441,269	100	269,225,270	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,367,447,130	100	2,437,997,054	100	2,575,256,289	100	3,553,853,678	100	4,366,975,400	100	5,924,675,525	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu	'%	100	100	14,575,800	100	15,010,159	100	15,855,231	100	21,880,218	100	26,886,412	100	36,476,796	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	65,100,000	100	67,039,980	100	70,814,331	100	97,723,777	100	120,082,977	100	162,916,574	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam Kehadiran dan pemakaian atribut	'%	100	100	33,300,000	100	34,292,340	100	36,222,999	100	49,987,738	100	61,424,933	100	83,335,206	Dinas Pertanian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	907,064,550	100	934,095,074	100	986,684,626	100	1,361,624,784	100	1,673,164,535	100	2,269,982,324	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun waktu	'%	100	100	1,706,000	100	1,756,839	100	1,855,749	100	2,560,933	100	3,146,875	100	4,269,365	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	182,815,000	100	188,262,887	100	198,862,088	100	274,429,681	100	337,219,192	100	457,505,277	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,426,417,200	100	1,468,924,433	100	1,551,624,878	100	2,141,242,332	100	2,631,158,577	100	3,569,692,842	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuanagan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	3,878,500	100	3,994,079	100	4,218,946	100	5,822,145	100	7,154,252	100	9,706,174	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	173,300,000	100	178,464,340	100	188,511,882	100	260,146,398	100	319,667,893	100	433,693,431	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	unit	4	4	43,620,000	4	44,919,876	4	47,448,865	4	65,479,434	4	80,461,128	4	109,161,613	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	stel	40	40	40,500,000	40	41,706,900	40	44,054,998	40	60,795,898	40	74,705,999	40	101,353,629	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	bln	12	12	337,561,200	12	347,620,524	12	367,191,559	12	506,724,352	12	622,662,883	12	844,766,734	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen yang tersusun dengan tepat waktu	dokumen	3	3	5,980,000	3	6,158,204	3	6,504,911	3	8,976,777	3	11,030,664	3	14,965,301	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	874,400,000	100	900,457,120	100	951,152,856	100	1,312,590,941	100	1,612,911,748	100	2,188,237,369	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	40,500,000	100	41,706,900	100	44,054,998	100	60,795,898	100	74,705,999	100	101,353,629	GUGUAK PANJANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	339,733,200	100	349,857,249	100	369,554,212	100	509,984,813	100	626,669,339	100	850,202,292	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan YangTersusun Tepat Waktu	'%	100	100	7,989,000	100	8,227,072	100	8,690,256	100	11,992,554	100	14,736,450	100	19,992,942	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	48,600,000	100	50,048,280	100	52,865,998	100	72,955,077	100	89,647,199	100	121,624,355	MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	394,870,450	100	406,637,589	100	429,531,286	100	592,753,174	100	728,375,101	100	988,186,499	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	22,114,000	100	22,772,997	100	24,055,117	100	33,196,061	100	40,791,320	100	55,341,584	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	0	100	378,400,000	100	389,676,320	100	411,615,097	100	568,028,834	100	697,993,831	100	946,968,230	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	108,000,000	100	111,218,400	100	117,479,996	100	162,122,394	100	199,215,998	100	270,276,345	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,070,114,000	100	1,102,003,397	100	1,164,046,188	100	1,606,383,740	100	1,973,924,340	100	2,678,023,152	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	55,500,000	100	57,153,900	100	60,371,665	100	83,312,897	100	102,374,888	100	138,892,011	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	410,500,000	100	422,732,900	100	446,532,762	100	616,215,212	100	757,205,252	100	1,027,300,366	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,668,453,440	100	1,718,173,353	100	1,814,906,512	100	2,504,570,987	100	3,077,616,829	100	4,175,402,752	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu	'%	100	100	9,342,400	100	9,620,804	100	10,162,455	100	14,024,188	100	17,232,922	100	23,379,905	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	740,875,000	100	762,953,075	100	805,907,333	100	1,112,152,120	100	1,366,612,525	100	1,854,083,212	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	153,000,000	100	157,559,400	100	166,429,994	100	229,673,392	100	282,222,664	100	382,891,488	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	65,250,000	100	67,194,450	100	70,977,498	100	97,948,947	100	120,359,666	100	163,291,958	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,425,988,650	100	6,617,483,112	100	6,990,047,411	100	9,646,265,427	100	11,853,330,957	100	16,081,414,109	Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	39,792,100	100	40,977,905	100	43,284,961	100	59,733,246	100	73,400,212	100	99,582,068	Dinas Pekerjaan Umum

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	4,770,756,100	80	4,912,924,632	85	5,189,522,289	90	7,161,540,758	95	8,800,101,284	95	11,939,097,412	Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan dalam atribut pegawai	'%	80	85	40,000,000	90	41,192,000	95	43,511,110	100	60,045,331	100	73,783,703	100	100,102,350	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan adm perkantoran	'%	75	75	514,552,000	75	529,885,650	80	559,718,212	85	772,411,132	90	949,138,799	90	1,287,696,609	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	85	90	13,250,000	95	13,644,850	100	14,413,055	100	19,890,016	100	24,440,852	100	33,158,903	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	26,300,000	80	27,083,740	85	28,608,555	90	39,479,805	95	48,512,785	95	65,817,295	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen	90	91	153,000,000	92	157,559,400	93	166,429,994	94	229,673,392	95	282,222,664	95	382,891,488	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	90	91	1,268,502,000	92	1,306,303,360	93	1,379,848,239	94	1,904,190,569	95	2,339,869,372	95	3,174,500,777	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	Persen	90	91	13,271,000	92	13,666,476	93	14,435,898	94	19,921,540	95	24,479,588	95	33,211,457	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90	91	331,300,000	92	341,172,740	93	360,380,765	94	497,325,456	95	611,113,520	95	829,097,713	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.	'%	100	100	19,300,000	100	19,875,140	100	20,994,110	100	28,971,872	100	35,600,637	100	48,299,384	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	6,750,000	100	6,951,150	100	7,342,500	100	10,132,650	100	12,451,000	100	16,892,272	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,086,100	100	10,386,666	100	10,971,435	100	15,140,580	100	18,604,745	100	25,241,058	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	390,950,000	100	402,600,310	100	425,266,707	100	586,868,056	100	721,143,468	100	978,375,342	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	19,800,000	100	20,390,040	100	21,537,999	100	29,722,439	100	36,522,933	100	49,550,663	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layananan administrasi perkantoran	'%	100	100	407,394,800	100	419,535,165	100	443,154,995	100	611,553,893	100	751,477,424	100	1,019,529,421	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	dokumen	0	100	5,100,000	100	5,251,980	100	5,547,666	100	7,655,780	100	9,407,422	100	12,763,050	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	'%	100	100	2,150,000	100	2,214,070	100	2,338,722	100	3,227,437	100	3,965,874	100	5,380,501	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	11,300,000	100	11,636,740	100	12,291,888	100	16,962,806	100	20,843,896	100	28,278,914	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	14,850,000	100	15,292,530	100	16,153,499	100	22,291,829	100	27,392,200	100	37,162,997	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan layanan adminidtrasi perkantoran	'%	100	100	328,776,550	100	338,574,091	100	357,635,813	100	493,537,421	100	606,458,783	100	822,782,631	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	20	30	70,000,000	40	72,086,000	50	76,144,442	60	105,079,330	70	129,121,480	70	175,179,112	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	100	100	82,950,000	100	85,421,910	100	90,231,164	100	124,519,006	100	153,008,954	100	207,587,248	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tercapaianya pentaan jabatan dan informasi dibidang sumber daya aparatur	'%	90	90	120,000,000	91	123,576,000	92	130,533,329	93	180,135,994	94	221,351,109	94	300,307,050	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	persen	15	0	0	20	50,000,000	25	80,000,000	30	100,000,000	35	120,000,000	35		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	198,880,150	100	204,806,778	100	216,337,400	100	298,545,612	100	366,852,848	100	497,709,259	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	100	230,000,000	100	236,854,000	100	250,188,880	100	345,260,655	100	424,256,292	100	575,588,512	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	0	0	70	83,994,005	70	250,000,000	70	252,500,000	70	280,000,000	70		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Ketersediaan SDM sesuai Bidang Keahlian	'%	70	0	0	70	100,000,000	75	110,000,000	80	121,000,000	85	133,100,000	85		Dinas Pekerjaan Umum

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha	persen	50	50	0	60	70,000,000	65	120,000,000	70	120,000,000	75	125,000,000	75		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Pendidikan																
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	'% kegiatan	0	100	7,796,131,800	100	8,028,456,528	100	8,480,458,630	100	11,703,032,910	100	14,380,686,839	100	19,510,277,835	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya kegiatan untuk Pendidikan Anak Usia Dini	'%	0	100	505,396,950	100	520,457,779	100	549,759,552	100	758,668,182	100	932,251,462	100	1,264,785,558	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pendidikan Menengah	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SMP	nilai	0	0	4,914,299,720	0	5,060,745,852	0	5,345,665,843	0	7,377,018,863	0	9,064,880,779	0	12,298,323,753	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pendidikan Luar Biasa	Angka putus sekolah	'%	0.25	0	60,680,000	0	62,488,264	0	66,006,353	0	91,088,768	0	111,929,878	0	151,855,265	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SD	nilai	70	70	6,976,936,083	75	7,184,848,778	80	7,589,355,764	85	10,473,310,955	90	12,869,604,501	90	17,460,192,427	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pendidikan Non Formal	Optimalisasi pelayanan non formal	'%	0	100	291,362,100	100	300,044,691	100	316,937,207	100	437,373,345	100	537,444,367	100	729,150,772	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya manjemen pelayanan pendidikan	'%	100	100	500,000,000	100	514,900,000	100	543,888,870	100	750,566,641	100	922,296,288	100	1,251,279,374	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Kesehatan																
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	'%	85	85	0	86	120,000,000	87	150,000,000	88	160,000,000	90	180,000,000	90		Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Ratio tenaga paramedis per satuan penduduk (Bidan dan perawat)	tenaga paramedis/satuan penduduk	12.95	13	0	13	145,000,000	13	152,000,000	13	159,000,000	13	166,000,000	13		Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	'%	100	100	6,459,177,000	100	6,651,660,475	100	7,026,148,959	100	9,696,085,564	100	11,914,549,941	100	16,164,469,905	Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	'%	5972	65	504,635,400	65	519,673,535	70	548,931,155	70	757,524,994	75	930,846,712	75	1,262,879,735	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada rumah sakit	'%	25	25	0	25	0	25	0	25	8,000,000,000	25	12,000,000,000	25		Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	unit	0	0	68,000,000	1	70,085,000,000	0	40,085,000,000	0	0	0	0	0		Dinas Kesehatan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pengawasan dan pengendalian makanan yang memenuhi syarat	'%	90	90	38,000,000	100	39,132,400	100	41,335,554	100	57,043,065	100	70,094,518	100	95,097,232	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tingkat Pemenuhan Kualitas lingkungan	'%	40	40	208,000,000	41	214,198,400	42	226,257,770	43	312,235,722	44	383,675,256	44	520,532,220	Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	'%	100	100	2,617,063,925	100	2,695,052,430	100	2,846,783,882	100	3,928,561,757	100	4,827,416,687	100	6,549,356,219	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD	'%	0	60	134,639,000	100	138,651,242	100	146,457,307	100	202,111,084	100	248,354,100	100	336,942,007	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ()	puskes mas	0	2	734,639,000	5	756,531,242	7	799,123,951	7	1,102,791,053	7	1,355,109,645	7	1,838,477,256	Dinas Kesehatan
Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan	'%	20	80	410,000,000	85	422,218,000	90	445,988,873	95	615,464,645	95	756,282,956	95	1,026,049,087	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	puskes mas	0	0	20,000,000	1	20,596,000	1	21,755,555	2	30,022,666	3	36,891,852	3	50,051,175	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas. Pustu dan Jaringannya yang dapat melaksanakan pelayanan kesehatan	'%	100	100	4,270,840,000	100	2,900,000,000	100	13,400,000,000	100	3,030,000,000	100	4,391,000,000	100		Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi lebih	'%	0	15	373,000,000	13	384,115,400	13	405,741,097	12	559,922,714	10	688,033,031	10	933,454,413	Dinas Kesehatan
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan	'%	90	90	2,574,920,000	91	2,651,652,616	92	2,800,940,658	93	3,865,298,108	95	4,749,678,316	95	6,443,888,571	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	'%	83.8	85	193,564,000	86	199,332,207	87	210,554,610	88	290,565,362	90	357,046,717	90	484,405,281	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita	'%	57.57	60	744,750,000	70	766,943,550	80	810,122,472	90	1,117,969,011	90	1,373,760,321	90	1,863,780,627	Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	100	100	368,671,800	100	379,658,220	100	401,032,977	100	553,425,509	100	680,049,265	100	922,622,838	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pelaksanaan lingkungan sehat dikecamatan dan kelurahan	bln	0	0	25,000,000	0	25,745,000	0	27,194,444	0	37,528,332	0	46,114,814	0	62,563,969	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	'%	12.5	13	680,250,000	20	700,521,450	30	739,960,808	40	1,021,145,915	50	1,254,784,100	50	1,702,365,588	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	'%	65	65	2,300,000,000	70	360,000,000	75	7,700,000,000	80	23,365,000,000	85	23,046,500,000	85		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	'%	10	10	228,000,000	20	234,794,400	40	248,013,325	60	342,258,388	75	420,567,107	75	570,583,394	Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap	'%	98	98	4,050,000,000	99	4,170,690,000	100	4,405,499,847	100	6,079,589,789	100	7,470,599,933	100	10,135,362,928	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Pembangunan gedung	Persentase Gedung Negara dan Swasta yang Laik Fugsi	'%	0	2	150,000,000	5	154,470,000	20	163,166,661	30	225,169,992	40	276,688,886	40	375,383,812	Dinas Pekerjaan Umum
Program pengendalian banjir	Pengurangan titik genangan	titik	8	8	257,522,800	6	265,196,979	4	280,127,569	2	386,576,046	0	475,024,645	0	644,465,936	Dinas Pekerjaan Umum
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	'%	48	48	943,071,400	55	2,940,000,000	70	12,104,083,333	90	23,785,170,833	100	23,937,604,375	100		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	'%	45	45	2,500,000,000	50	2,574,500,000	60	2,719,444,350	70	3,752,833,203	80	4,611,481,440	80	6,256,396,869	Dinas Pekerjaan Umum
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	'%	98	0	0	98	488,000,000	99	561,200,000	100	3,420,000,000	100	3,762,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang terpelihara / normalisasi	'%	47	0	0	55	1,000,000,000	65	1,100,000,000	70	1,210,000,000	75	1,331,000,000	75		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	'%	72	72	4,819,443,900	80	4,963,063,328	85	5,242,483,794	90	7,234,627,635	95	8,889,910,438	95	12,060,941,491	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	'%	40	50	197,000,000	60	202,870,600	65	214,292,215	70	295,723,256	75	363,384,737	75	493,004,073	Dinas Pekerjaan Umum
Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota	'%	60	60	464,726,200	65	478,575,041	70	505,518,816	75	697,615,965	80	857,230,498	80	1,163,004,617	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	'%	40	50	862,629,700	70	888,336,065	75	938,349,386	80	1,294,922,152	85	1,591,200,340	85	2,158,781,502	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota	'%	60	60	0	65	250,000,000	70	0	0	0	0	0	0		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat - alat berat ke PU an / Kebinamargaan	'%	30	0	0	50	4,000,000,000	65	4,050,000,000	80	4,105,000,000	90	1,665,500,000	90		Dinas Pekerjaan Umum
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik	'%	85	85	1,009,556,000	88	1,039,640,769	90	1,098,172,544	93	1,515,478,111	95	1,862,219,503	95	2,526,473,199	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik	'%	85	85	4,723,190,700	88	4,863,941,783	90	5,137,781,705	93	7,090,138,753	95	8,712,362,500	95	11,820,062,204	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan informasi / data base jalan	'%	20	0	0	40	1,200,000,000	0	0	80	300,000,000	100	330,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																

Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana areal pemakaman yang memadai	'%	80	80	139,484,600	80	143,641,241	85	151,728,243	85	209,384,975	90	257,292,258	90	349,068,406	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Lingkungan Sehat Perumahan	% Jalan dengan riol yang baik	'%	40	40	3,804,507,000	55	3,917,881,309	70	4,138,458,026	90	5,711,072,076	100	7,017,765,367	100	9,521,002,274	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Pembangunan Rusunawa yang layak huni	unit	0	0	0	0	0	1	15,000,000,000	1	15,000,000,000	0	0	0		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	'%	50	60	79,649,400	80	82,022,952	100	86,640,844	100	119,564,365	100	146,920,692	100	199,327,303	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	% Kesiap siangaan dan Tanggap terhadap Pencegahan Kebakatan Meningkat	'%	50	60	1,950,000,000	70	2,008,110,000	75	2,121,166,593	80	2,927,209,898	90	3,596,955,523	90	4,879,989,558	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Perencanaan Pembangunan																
Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	'%	100	100	2,214,373,100	100	2,280,361,418	100	2,408,745,766	100	3,324,069,157	100	4,084,616,181	100	5,541,598,772	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	'%	100	100	84,875,500	100	87,404,790	100	92,325,680	100	127,409,438	100	156,560,717	100	212,405,925	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan sosial budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	'%	100	100	164,296,900	100	169,192,948	100	178,718,511	100	246,631,545	100	303,060,842	100	411,162,644	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	'%	100	100	574,865,000	100	591,995,977	100	625,325,351	100	862,948,984	100	1,060,391,711	100	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum	'%	60	100	125,647,500	100	129,391,796	100	136,676,554	100	188,613,644	100	231,768,446	100	314,440,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Pemenuhan Pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota	'%	60	65	316,265,200	70	325,689,903	75	344,026,244	80	474,756,217	85	583,380,440	85	791,472,243	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Peningkatan kualitas perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana	'%	50	50	0	60	75,000,000	65	85,000,000	70	100,000,000	75	110,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perhubungan																
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berwawasan lingkungan	Persen	70	0	0	72	7,800,000,000	73	1,625,000,000	74	4,300,000,000	75	1,250,000,000	75		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Optimalisasi Peningkatan Pengoperasian Kendaraan	Persen	80	81	180,000,000	82	185,364,000	83	195,799,993	84	270,203,991	85	332,026,664	85	450,460,575	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas lalu ,intas yang memadai dan berwawasan lingkungan	Persen	70	71	5,351,566,000	72	5,511,042,667	73	5,821,314,369	74	8,033,413,829	75	9,871,458,913	75	13,392,608,308	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

Program peningkatan pelayanan angkutan	Terwujudnya Angkutan Yang Selamat, Aman, Nyaman, Terjangkau dan Terpadu	Persen	80	81	51,379,000	82	52,910,094	83	55,888,933	84	77,126,727	85	94,773,322	85	128,578,966	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terciptanya Lalu Lintas Yang Aman, Tertib dan Lancar	Persen	70	71	763,000,000	72	785,737,400	73	829,974,416	74	1,145,364,694	75	1,407,424,135	75	1,909,452,325	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Persen	70	71	260,000,000	72	267,748,000	73	282,822,212	74	390,294,653	75	479,594,070	75	650,665,274	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Lingkungan Hidup																
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	Persentase	8	10	1,233,986,000	12	1,270,758,783	13	1,342,302,502	14	1,852,377,453	15	2,276,201,414	15	3,088,122,459	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH/ Non Hijau	'%	7.78	8	600,000,000	8	2,000,000,000	8	5,700,000,000	9	6,420,000,000	9	4,662,000,000	9		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase kelompok masyarakat yang memahami pengelolaan RTH	'%	10	20	0	30	0	40	110,000,000	50	115,000,000	60	120,000,000	60		Kantor Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemenuhan RTH	'%	20	20	0	22	100,000,000	25	120,000,000	28	140,000,000	30	0	30		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan/pengelolaan persampahan	Persen	90	90	5,799,341,500	90	5,972,161,877	100	6,308,394,590	100	8,705,584,535	100	10,697,422,276	100	14,513,192,802	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup	'%	50	60	451,509,800	70	464,964,792	80	491,142,310	90	677,776,388	95	832,851,625	95	1,129,929,800	Kantor Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	'%	80	70	424,576,950	60	437,229,343	50	461,845,355	40	637,346,590	30	783,171,490	30	1,062,528,760	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan pengendalian	'%	50	55	0	60	380,000,000	65	1,055,000,000	70	1,055,000,000	75	1,055,000,000	75		Kantor Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	'%	0	0	0	50	0	55	270,000,000	60	175,000,000	65	180,000,000	65		Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Informasi Lingkungan Hidup	'%	0	0	0	60	100,000,000	65	120,000,000	70	140,000,000	75	160,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pertanahan																
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunan tanah	'%	80	80	591,580,000	81	609,209,084	82	643,507,555	83	888,040,426	84	1,091,224,076	84	1,480,463,704	Sekretariat Daerah
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah	'%	90	90	151,928,000	91	2,152,000,000	92	154,000,000	93	2,156,500,000	94	158,500,000	94	2,156,500,000	Sekretariat Daerah
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat capaian pelayanan administrasi kependudukan	'%	67	70	662,010,550	75	681,738,464	80	720,120,340	85	993,766,069	90	1,221,139,746	90	1,656,720,293	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi dan kelengkapan data kependudukan	'%	0	0	0	85	257,100,000	90	139,760,000	95	127,366,000	100	114,171,000	100		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang	'%	70	70	345,140,000	70	355,425,172	70	375,435,609	70	518,101,141	70	636,642,682	70	863,733,126	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penurunan Kasus KDRT dan TPPO	'%	50	50	0	50	0	50	200,000,000	50	205,000,000	50	210,000,000	50		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kesejahteraan perempuan	'%	0	35	0	30	200,000,000	25	310,000,000	20	320,000,000	15	320,000,000	15		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tingkat kemiskinan menurun menjadi 2.84 %	'%	4.58	4	352,400,000	4	362,901,520	3	383,332,876	3	528,999,368	3	650,034,424	3	881,901,703	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	100 % data akurat	'%	80	85	115,152,000	88	118,583,530	90	125,259,782	93	172,858,500	95	212,408,524	95	288,174,645	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program pelayanan kontrasepsi	Tercapainya program KB	'%	75	75	0	75	21,000,000	80	160,000,000	80	170,000,000	80	25,000,000	80		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 % Kelompok Kerja paham fungsi keluarga	'%	100	100	0	100	0	100	45,000,000	100	50,000,000	100	0	100		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75 % sekolah dan perguruan tinggi memiliki PIK R/M	'%	25	35	209,025,650	45	215,254,614	55	227,373,449	65	313,775,360	75	385,567,162	75	523,098,969	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana	Jumlah PUS ber KB 80 %	'%	1.77	2	1,463,946,000	2	1,507,571,591	2	1,592,447,871	1	2,197,578,062	1	2,700,383,923	1	3,663,610,869	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Peningkatan Tingkat Tahapan Kelompok Kegiatan	tingkat	0	0	71,247,000	0	73,370,161	0	77,500,901	0	106,951,243	0	131,421,687	0	178,299,803	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase Kelurahan yang memiliki WPA (Warga Peduli AIDS)	'%	8	24	465,000,000	24	478,857,000	30	505,816,649	40	698,026,976	50	857,735,548	50	1,163,689,818	Dinas Kesehatan
Sosial																
Program pembinaan anak terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	'%	32	35	0	37	100,000,000	40	100,000,000	42	100,000,000	45	100,000,000	45		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	'%	60	65	1,696,650,000	68	1,747,210,170	70	1,845,578,103	73	2,546,897,782	75	3,129,627,994	75	4,245,966,299	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	'%	75	80	436,581,000	85	449,591,114	87	474,903,094	90	655,366,269	92	805,314,071	92	1,092,569,601	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	3	12	101,442,000	15	104,464,972	20	110,346,350	25	152,277,962	30	187,119,160	30	253,864,564	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial	'%	25	25	3,000,000	50	3,089,400	75	3,263,333	75	4,503,400	100	5,533,778	100	7,507,676	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang meningkat kesejahteraannya	'%	1.5	2	4,096,295,100	2	4,218,364,694	2	4,455,858,626	3	6,149,084,904	3	7,555,995,530	3	10,251,219,136	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial	'%	75	75	347,600,000	80	357,958,480	80	378,111,542	85	521,793,929	90	641,180,379	90	869,889,421	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin	'%	60	60	57,151,250	61	58,854,357	62	62,167,858	63	85,791,643	64	105,420,771	64	143,024,361	Sekretariat Daerah
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Penurunan Angka Kemiskinan	'%	54	5	137,853,000	5	141,961,019	4	149,953,425	3	206,935,726	2	254,282,620	2	344,985,231	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	2	2	0	3	300,000,000	4	430,000,000	5	630,000,000	6	630,000,000	6		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Tenaga Kerja																
Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas	'%	66	77	34,000,000	88	35,013,200	90	36,984,443	95	51,038,532	100	62,716,148	100	85,086,997	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat tenaga kerja yang memiliki keahlian	'%	52	55	657,579,500	57	677,175,369	60	715,300,342	65	987,114,472	65	1,212,966,264	65	1,645,631,330	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap UU ketenagakerjaan	'%	5	5	581,070,001	6	598,385,887	7	632,075,012	8	872,263,517	9	1,071,837,410	9	1,454,161,814	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja	'%	8	15	55,000,000	17	56,639,000	19	59,827,776	21	82,562,330	23	101,452,592	23	137,640,731	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	82.52	83	217,000,000	84	223,466,600	85	236,047,770	86	325,745,922	87	400,276,589	87	543,055,248	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang tersentuh pembiayaan	'%	30	33	45,000,000	36	46,341,000	39	48,949,998	42	67,550,998	45	83,006,666	45	112,615,144	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	unit	3	20	460,000,000	20	473,708,000	20	500,377,760	20	690,521,309	20	848,512,585	20	1,151,177,024	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Jumlah UMKM	unit	9236	9,236		9,246	0	9,256	0	9,266	0	9,276	0	9,276	0	

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi sehat	unit	11	12	290,000,000	13	298,642,000	14	315,455,545	15	435,328,652	16	534,931,847	16	725,742,037	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Penanaman Modal																
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor	Perusahaan	70	80	32,806,100	90	33,783,722	100	35,685,745	110	49,246,329	120	60,513,889	120	82,099,193	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	persen	2500000000	10	114,286,000	10	117,691,723	10	124,317,767	10	171,558,518	10	210,811,107	10	286,007,429	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi	dokumen	0	0	0	1	100,000,000	1	130,000,000	1	125,000,000	1	0	1		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Lancarnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase	100	100	377,525,700	100	388,775,966	100	410,664,053	100	566,716,393	100	696,381,103	100	944,780,243	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	nilai mutu	7.2	7	293,324,000	7	302,065,055	8	319,071,318	8	440,318,419	8	541,063,273	8	734,060,542	GUGUAK PANJANG
Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	'%	80	85	586,361,100	90	603,834,661	90	637,830,552	90	880,206,162	90	1,081,597,332	90	1,467,403,100	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Kebudayaan																
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang dilaksanakan masyarakat	kali	4	52	363,480,000	57	374,311,704	59	395,385,453	61	545,631,925	63	670,472,510	63	909,630,054	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	sanggar	6	6	892,148,000	7	918,734,010	13	970,458,735	16	1,339,233,055	19	1,645,649,577	19	2,232,652,782	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	kali	0	1	301,845,000	1	310,839,981	1	328,340,272	1	453,109,575	1	556,781,046	1	755,384,845	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan Program Pengembangan nilai budaya	bln	0	12	75,000,000	12	77,235,000	12	81,583,331	12	112,584,996	12	138,344,443	12	187,691,906	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya aktifitas pengembangan nilai adat dan budaya di masyarakat	kegiatan	8	8	6,352,000	9	6,541,290	10	6,909,564	11	9,535,199	12	11,716,852	12	15,896,253	GUGUAK PANJANG
Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya	kegiatan	0	0	0	3	374,500,000	4	426,200,000	4	426,660,000	4	448,872,000	4		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	'%	0	5	0	10	997,000,000	15	51,189,000,000	20	7,330,000,000	25	1,105,000,000	25		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Pengelolaan Kekayaan Budaya	'%	0	25	464,941,500	30	478,796,757	35	505,753,014	40	697,939,159	45	857,627,639	45	1,163,543,418	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Kepemudaan dan Olahraga																
Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah capaian program pembinaan kepemudaan	'%	0	100	931,257,100	100	959,008,562	100	1,013,000,744	100	1,397,941,026	100	1,717,789,933	100	2,330,525,602	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	'%	0	100	368,905,750	100	379,899,141	100	401,287,463	100	553,776,699	100	680,480,808	100	923,208,312	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai	unit	3	3	3,385,741,500	3	3,486,636,597	4	3,682,934,237	5	5,082,449,247	6	6,245,313,635	6	8,473,017,009	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	'%	100	100	824,261,000	100	848,823,978	100	896,612,768	100	1,237,325,619	100	1,520,425,721	100	2,062,761,576	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan	'%	100	0	0	20	0	40	145,000,000	60	155,000,000	80	165,000,000	80		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	persentase sekolah yang bebas narkoba	'%	0	0	0	0	0	20	80,000,000	40	85,000,000	60	90,000,000	60		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Terjaganya kerukunan antar dan intern umat bergama	'%	0	100	78,847,500	100	81,197,156	100	85,768,555	10	118,360,606	100	145,441,513	100	197,320,501	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan program kualitas pemahaman dan pengamalan dan pembinaan kerukunan beragama	'%	0	100	128,000,000	100	131,814,400	100	139,235,551	100	192,145,060	100	236,107,850	100	320,327,520	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Meningkatnya aktifitas keagamaan dilingkungan masyarakat	kegiatan	3	5	194,215,000	6	200,002,607	7	211,262,754	8	291,542,600	9	358,247,547	9	486,034,447	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Kelompok masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan	Kelompok masyarakat/keluarahan	9	2	469,687,000	2	483,683,673	3	510,915,063	4	705,062,787	4	866,381,153	4	1,175,419,311	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Jumlah event keagamaan ditengah masyarakat	'%	3	3	6,497,174,600	6	6,690,790,403	9	7,067,481,903	12	9,753,125,026	15	11,984,640,032	15	16,259,561,131	Sekretariat Daerah
Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, damai dan berkualitas	'%	0	0	12,636,000	0	13,012,553	0	13,745,160	85	18,968,320	85	23,308,272	85	31,622,332	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terpantaunya kegiatan orang asing, lembaga asing, dan non govenment organization serta deteksi dini dan penanggulangan konflik sosial	'%	100	100	237,889,000	100	244,978,092	100	258,770,359	100	357,103,095	100	438,808,283	100	595,331,198	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat keamananan dan kenyamanan lingkungan	'%	40	50	300,022,600	60	308,963,273	70	326,357,906	75	450,373,910	85	553,419,461	85	750,824,182	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Program Sistem kebencanaan	% Jumlah Data dan Informasi tentang Kebencanan terpenuhi	'%	25	100	74,970,000	100	77,204,106	100	81,550,697	100	112,539,962	100	138,289,105	100	187,616,829	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana	Kapasitas dan Kwalitas Petugas BPBD Meningkat dalam Penanggulanga Kebencanaan	'%	50	70	399,840,000	70	411,755,232	70	434,937,052	70	600,213,131	70	737,541,896	70	1,000,623,090	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	%Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meningkat	'%	50	60	2,155,520,000	70	2,219,754,496	75	2,344,726,674	80	3,235,722,810	90	3,976,056,189	90	5,394,315,432	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Peningkatan Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	bln	0	100	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Efektivitas kegiatan pemberantasan narkoba	Kegiatan	3	3	196,137,000	3	201,981,883	3	213,353,463	3	294,427,778	3	361,792,854	3	490,844,365	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Terdeteksinya potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah	'%	100	100	427,527,500	100	440,267,820	100	465,054,898	100	641,775,759	100	788,614,053	100	1,069,912,685	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	'%	20	20	124,280,900	30	127,984,471	40	135,189,997	50	186,562,195	60	229,247,625	60	311,020,253	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	kasus	722	650	3,239,993,800	600	3,336,545,615	500	3,524,393,133	400	4,863,662,524	250	5,976,468,510	250	8,108,274,827	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat	'%	100	100	76,668,300	100	78,953,015	100	83,398,070	100	115,089,337	100	141,421,777	100	191,866,925	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Tingkat pelaksanaan peringatan hari-hari besar kenegaraan	'%	100	100	208,464,500	100	214,676,742	100	226,763,043	100	312,932,999	100	384,532,069	100	521,694,658	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Peningkatan program pemberrantasan penyakit masyarakat	bln	0	0	42,000,000	0	43,251,600	0	45,686,665	0	63,047,598	0	77,472,888	0	105,107,467	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Mneingkatnya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	bln	0	0	41,000,000	0	42,221,800	0	44,598,887	0	61,546,465	0	75,628,296	0	102,604,909	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas per tahun	persen	0	10	18,377,500	10	18,925,150	10	19,990,635	10	27,587,077	10	33,899,000	10	45,990,773	GUGUAK PANJANG

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Temuan Peristiwa Gangguan Ketertiban dan Keamanan disertai laporan tertulis	Laporan /Tahun	22	15	48,328,500	12	49,768,689	10	52,570,667	7	72,547,520	5	89,146,392	5	120,944,910	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Bidang Pemerintahan Umum																
Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah Usulan Bantuan Kemasyarakatan yang direalisasikan	Proposal /Tahun	42	60	15,000,000	60	15,447,000	60	16,316,666	60	22,516,999	60	27,668,889	60	37,538,381	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	'%	80	80	71,440,000	82	73,568,912	85	77,710,842	88	107,240,962	90	131,777,694	90	178,782,797	Sekretariat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	'%	80	80	909,099,450	81	936,190,614	82	988,898,145	83	1,364,679,440	84	1,676,918,096	84	2,275,074,781	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH	'%	80	80	7,627,000,000	85	7,854,284,600	90	8,296,480,823	95	11,449,143,536	100	14,068,707,577	100	19,087,015,569	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	'%	80	80	245,162,000	81	252,467,828	82	266,681,766	83	368,020,837	84	452,224,005	84	613,532,308	Sekretariat Daerah
Program Penataan Kelembagaan Daerah	Peningkatan capaian kinerja daerah	peringkat nasional	74	62	721,357,000	55	742,853,439	50	784,676,087	40	1,082,853,000	35	1,330,609,767	35	1,805,238,271	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur	Jumlah penyelenggaraan diklat peningkatan profesionalisme aparatur	kegiatan	0	0	0	8	800,000,000	8	812,000,000	8	834,000,000	8	836,000,000	8		Badan Kepegawaian Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	'%	100	100	559,000,000	100	575,658,200	100	608,067,757	100	839,133,504	100	1,031,127,250	100	1,398,930,340	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Meningkatnya Program peningkatan pelayanan kelurahan	'%	100	100	380,000,000	100	391,324,000	100	413,355,541	100	570,430,647	100	700,945,179	100	950,972,324	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	persen	80	82	734,210,800	84	756,090,282	86	798,658,165	88	1,102,148,267	90	1,354,319,791	90	1,837,405,660	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	orang	80	0	30,740,000	80	31,656,052	80	33,438,288	80	46,144,837	80	56,702,776	80	76,928,656	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan	'%	0	0	0	80	11,000,000	85	11,850,000	90	12,650,000	95	13,275,000	95		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kerjasama Tugas Sekretariat DPRD se Indonesia	'%	100	100	109,500,000	100	112,763,100	100	119,111,663	100	164,374,094	100	201,982,887	100	274,030,183	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terstandarisasinya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	'%	100	100	50,000,000	100	51,490,000	100	54,388,887	100	75,056,664	100	92,229,629	100	125,127,937	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemerintahan	'%	100	100	12,522,580,525	100	12,895,753,425	100	13,621,784,342	100	18,798,062,393	100	23,099,059,068	100	31,338,493,438	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	'%	100	100	36,000,000	100	37,072,800	100	39,159,999	100	54,040,798	100	66,405,333	100	90,092,115	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Perizinan	dokumen	2	2	12,666,000	1	13,043,447	1	13,777,793	1	19,013,354	1	23,363,610	1	31,697,409	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase capaian realisasi penyelenggaraan pemerintahan	'%	81	75	762,195,900	80	784,909,338	80	829,099,734	85	1,144,157,632	90	1,405,940,899	90	1,907,440,017	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kegiatan yang dikelola dengan sistem otomisasi	kegiatan	1	1	502,385,200	3	517,356,279	5	546,483,437	7	754,147,144	7	926,696,010	7	1,257,248,477	Badan Kepegawaian Daerah
Peningkatan Kemitraan Legislatif dengan Eksekutif	Terjalinnya kemitraan yang sinergis antara legislatif dan eksekutif	'%	100	0	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukittinggi	persen	10	15	2,092,983,550	20	2,155,354,460	30	2,276,700,916	50	3,141,847,264	75	3,860,701,918	75	5,237,814,292	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ditindaklanjutinya Pengaduan Masyarakat Secara Komprehensif	'%	100	100	0	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Penyelenggaraan Adipura	Tingkat penilaian adipura	'%	71	75	0	77	0	80	325,000,000	85	325,000,000	87	325,000,000	87		Kantor Lingkungan Hidup
Program Penegasan Batas Wilayah	Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan	'%	80	80	671,985,500	81	692,010,668	82	730,970,869	83	1,008,739,799	84	1,239,539,464	84	1,681,683,191	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	'%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Sekretariat Daerah
Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat inflasi daerah	'%	2.84	9	575,800,100	6	592,958,943	5	626,342,531	5	864,352,693	4	1,062,116,590	4	1,440,973,577	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rupiah (Milyar)	28892	31,758	3,021,888,000	34,927	3,111,940,262	38,432	3,287,142,499	42,311	4,536,256,649	46,605	5,574,152,170	46,605	7,562,452,249	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD`	'%	100	100	111,720,000	100	115,049,256	100	121,526,529	100	167,706,610	100	206,077,883	100	279,585,863	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Peningkatan program peningkatan kinerja LPMK dan RT	bln	12	12	63,000,000	12	64,877,400	12	68,529,998	12	94,571,397	12	116,209,332	12	157,661,201	AUR BIRUGO TIGO BALEH

Program Pembinaan PKK	Peningkatan program pembinaan PKK	bln	12	12	92,500,000	12	95,256,500	12	100,619,441	12	138,854,829	12	170,624,813	12	231,486,684	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan RT	%	90	80	67,748,400	85	69,767,302	90	73,695,201	95	101,699,378	100	124,968,196	100	169,544,351	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Pangan																
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	2400	2,400	387,248,000	2,400	398,787,990	2,400	421,239,754	2,400	581,310,861	2,400	714,314,786	2,400	969,110,870	Kantor Ketahanan Pangan
	Ketersediaan protein perkapita	gr/kap/hr	63	63		63	0	63	0	63	0	63	0	63	0	
Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	84.1	84	293,333,800	84	302,075,147	85	319,081,978	85	440,333,130	85	541,081,350	85	734,085,067	Kantor Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tiingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	%	15	20	497,375,200	25	512,196,981	30	541,033,671	34	746,626,466	40	917,454,601	40	1,244,710,658	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	%	15	20	1,898,758,100	25	1,955,341,091	30	2,065,426,795	34	2,850,288,977	40	3,502,435,095	40	4,751,753,693	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya peren perempuan dipedesaan	%	100	100	184,000,000	100	189,483,200	100	200,151,104	100	276,208,524	100	339,405,034	100	460,470,810	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan program keberdayaan masyarakat pedesaan	bln	12	12	151,000,000	12	155,499,800	12	164,254,439	12	226,671,125	12	278,533,479	12	377,886,371	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	640,000,000	100	659,072,000	100	696,177,754	100	960,725,300	100	1,180,539,249	100	1,601,637,599	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertahunnya	persen	802661	3	581,898,000	3	599,238,560	3	632,975,691	3	873,506,454	3	1,073,364,731	3	1,456,233,930	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun	%	5	7	180,868,900	9	186,258,793	12	196,745,163	15	271,508,325	17	333,629,430	17	452,635,048	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Tingkat partisipasi perempuan dalam pencapaian tujuan program pemerintah	%	100	80	341,078,000	85	351,242,124	90	371,017,056	95	512,003,537	100	629,149,947	100	853,567,733	MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatkanya persentase aktifitas guna peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakn oleh pemerintah maupun masyarakat	Persen	10	10	543,400,500	10	559,593,835	10	591,098,968	10	815,716,576	10	1,002,352,528	10	1,359,891,675	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	'%	80	80	615,303,000	85	633,639,029	85	669,312,907	90	923,651,811	90	1,134,983,346	90	1,539,831,905	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	'%	15	15	2,180,510,600	20	2,245,489,816	25	2,371,910,893	30	3,273,237,032	34	4,022,153,665	34	5,456,855,877	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	'%	20	25	193,442,900	30	199,207,498	35	210,422,881	40	290,383,575	45	356,823,337	45	484,102,222	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya program peningkatan usaha ekonomi masyarakat	bln	0	0	195,538,000	0	201,365,032	0	212,701,884	0	293,528,600	0	360,687,943	0	489,345,332	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat	pelaku	0	0	141,194,000	90	145,401,581	120	153,587,690	90	211,951,013	120	260,445,404	120	353,346,280	GUGUAK PANJANG
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	'%	3	3	77,821,500	5	80,140,581	6	84,652,495	8	116,820,444	10	143,548,961	10	194,752,876	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Statistik																
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pemenuhan Data pembangunan Daerah	'%	66	70	244,655,500	80	251,946,234	85	266,130,807	90	367,260,513	100	451,289,719	100	612,264,762	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD	Persen	10	0	0	20	50,000,000	30	57,500,000	40	60,000,000	50	65,000,000	50		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi statistik daerah	persen	100	100	29,249,800	100	30,121,444	100	31,817,281	100	43,907,848	100	53,953,964	100	73,199,343	Dinas Pertanian
Kearsipan																
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan	'%	100	100	0	100	510,000,000	100	535,000,000	100	560,000,000	100	585,000,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi	'%	100	100	97,268,600	100	100,167,204	100	105,806,618	100	146,013,133	100	179,420,937	100	243,420,386	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan	'%	100	100	0	100	60,000,000	100	52,000,000	100	15,000,000	100	17,500,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	'%	100	100	47,500,000	100	48,915,500	100	51,669,443	100	71,303,831	100	87,618,147	100	118,871,541	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Komunikasi dan Informatika																
Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)	Kemudahan mendapatkan informasi melalui media elektronik menuju smart city	Persen	80	80	81,000,000	82	1,135,000,000	85	1,090,000,000	87	95,000,000	90	100,000,000	90	1,090,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Persen	80	80	142,000,000	82	146,231,600	85	154,464,439	87	213,160,926	90	261,932,146	90	355,363,342	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Persentase tingkat ketercapaian penyebaran informasi Pemda Bukittinggi kepada masyarakat	'%	80	80	2,485,337,800	83	2,559,400,866	85	2,703,495,135	88	3,730,823,287	90	4,584,435,655	90	6,219,703,853	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tingkat pencapaian pelayanan informasi kepada publik	'%	80	80	419,853,220	81	432,364,846	82	456,706,987	83	630,255,642	84	774,458,133	84	1,050,707,348	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya sarana dan prasarana TIK menuju smart city	Persen	80	80	1,034,736,000	82	1,065,571,133	85	1,125,562,788	87	1,553,276,647	90	1,908,666,344	90	2,589,487,628	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat	publikasi	0	12	16,675,000	12	17,171,915	12	18,138,694	12	25,031,397	12	30,758,581	12	41,730,167	GUGUAK PANJANG
Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat Melalu Media Cetak Dan Elektronik	Publikasi/Tahun	24	24	11,450,000	24	11,791,210	27	12,455,055	27	17,187,976	29	21,120,585	29	28,654,298	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan program komunikasi, informasi dan media massa	'%	100	100	0	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi di masyarakat	bulan	12	12	52,678,000	12	54,247,804	12	57,301,956	12	79,076,699	12	97,169,448	12	131,829,790	GUGUAK PANJANG
Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan Telekomunikasi	Persen	80	80	257,000,000	82	264,658,600	85	279,558,879	87	385,791,253	90	474,060,292	90	643,157,598	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Perpustakaan																
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan	'%	100	100	248,249,470	100	255,647,304	100	270,040,247	100	372,655,541	100	457,919,129	100	621,258,883	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Pertanian																

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi	kelompok	10	11	23,763,600	12	24,471,755	13	25,849,515	14	35,672,331	15	43,834,160	15	59,469,805	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	persen	0	5	64,257,200	5	66,172,065	5	69,897,552	5	96,458,621	5	118,528,354	5	160,807,418	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	2	2	370,088,300	2	381,116,931	2	402,573,815	2	555,551,864	2	682,662,131	2	926,167,713	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian	persen	2	2	155,835,200	2	160,479,089	2	169,514,062	2	233,929,405	2	287,452,453	2	389,986,743	Dinas Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)	persen	70	73	306,133,100	78	315,255,866	80	333,004,772	82	459,546,585	85	564,690,844	85	766,116,067	Dinas Pertanian
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persen	100	100	139,098,800	100	143,243,944	100	151,308,578	100	208,805,838	100	256,580,614	100	348,102,919	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	1	2	43,233,800	2	44,522,167	2	47,028,765	2	64,899,696	2	79,748,747	2	108,195,124	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	kwintal/Ha	66.7	67	87,987,400	67	90,609,425	67	95,710,735	67	132,080,814	67	162,300,905	67	220,193,638	Dinas Pertanian
Kehutanan																
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan luas lahan yang dihijaukan	persen	2	2	61,740,800	2	63,580,676	2	67,160,268	2	92,681,170	2	113,886,621	2	154,509,979	Dinas Pertanian
Pariwisata																
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	meningkatnya jumlah PAD yang dikelola Dinas Pariwisata	rupiah (Milyar)	8041	10,086	8,491,764,000	10,091	81,424,000,000	10,097	11,960,000,000	10,112	12,326,000,000	10,127	13,153,000,000	10,127		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	meningkatnya jumlah wisatawan	orang	460905	483,950	2,042,367,950	508,148	2,103,230,515	533,555	2,221,642,393	560,233	3,065,866,502	588,245	3,767,336,758	588,245	5,111,145,779	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Kelautan dan Perikanan																
Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	persen	2	2	77,740,500	2	80,057,167	2	84,564,385	2	116,698,852	2	143,399,549	2	194,550,168	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Perikanan budidaya	Jumlah Produksi ikan	ton	355	351	220,693,700	352	227,270,372	353	240,065,694	354	331,290,658	355	407,089,961	355	552,298,950	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan	Meningkatnya kualitas SDM Perikanan		0	0	15,650,500	0	16,116,885	0	17,024,266	0	23,493,486	0	28,868,796	0	39,166,296	Dinas Pertanian

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Daya Saing Produk Perikanan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	persen	40	10	0	10	70,000,000	10	75,000,000	10	80,000,000	10	85,000,000	10		Dinas Pertanian
Perdagangan																
Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat Pengawasan dan Ketertiban Pasar	'%	100	100	374,907,000	100	386,079,229	100	407,815,489	100	562,785,375	100	691,550,669	100	938,226,792	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Tingkat Sarana dan Prasarana yang dikembangkan	$	100	100	2,393,450,000	100	2,464,774,810	100	2,603,541,632	100	3,592,887,452	100	4,414,940,101	100	5,989,749,235	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha	perusahaan	2553	300	554,000,000	350	570,509,200	400	602,628,868	450	831,627,838	500	1,021,904,287	500	1,386,417,546	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri	IKM	0	2	250,000,000	2	257,450,000	2	271,944,435	2	375,283,320	2	461,148,144	2	625,639,687	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL	lokasi	0	0	120,000,000	1	123,576,000	1	130,533,329	1	180,135,994	1	221,351,109	1	300,307,050	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah komoditas peredaran barang yang di awasi	jenis	20	20	705,000,000	20	726,009,000	20	766,883,307	22	1,058,298,963	22	1,300,437,766	22	1,764,303,917	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Industri																
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM	'%	1	2	616,750,000	2	635,129,150	2	670,886,921	2	925,823,951	2	1,137,652,471	2	1,543,453,108	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang	unit usaha	0	5	886,125,000	10	912,531,525	15	963,907,050	20	1,330,191,729	30	1,634,539,596	30	2,217,579,870	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya nilai produksi IKM	'%	4.1113E+11	2	47,527,000	2	48,943,305	2	51,698,813	2	71,344,361	2	87,667,951	2	118,939,110	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal	&	476	7	30,000,000	7	30,894,000	7	32,633,332	7	45,033,998	7	55,337,777	7	75,076,762	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB	Persen	0.07	0	185,000,000	0	190,513,000	0	201,238,882	0	277,709,657	0	341,249,627	0	462,973,368	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Persandian																
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan TIK OLeh SKPD dan Layanan Kepada Publik dalam mewujudkan smart city	Persen	80	81	531,000,000	82	535,000,000	83	1,055,000,000	84	1,056,000,000	85	567,000,000	85	1,056,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	'%	80	80	574,865,000	82	591,995,977	85	625,325,351	88	862,948,984	90	1,060,391,711	90	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
Keuangan																
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi	opini	3	3	4,841,271,107	3	4,985,540,986	3	5,266,226,943	3	7,267,393,182	3	8,930,172,742	3	12,115,565,359	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																
Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang difasilitasi mengikuti pendidikan kedinasan	orang	1500	550	2,545,102,500	550	2,620,946,555	530	2,768,505,846	535	3,820,538,067	550	4,694,677,177	550	6,369,268,525	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai sesuai standar kompetensi	'%	60	60	325,945,100	70	335,658,264	80	354,555,824	90	489,287,037	95	601,235,912	95	815,696,761	Badan Kepegawaian Daerah

Bidang Pengawasan																
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	'%	100	100	319,019,650	100	328,526,436	100	347,022,474	100	478,891,014	100	588,461,278	100	798,365,416	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	'%	100	100	1,147,785,210	100	1,181,989,209	100	1,248,535,202	100	1,722,978,578	100	2,117,196,077	100	2,872,399,918	Inspektorat Daerah
Bidang Penunjang Lainnya																
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan oleh masyarakat	kegiatan	5	5	416,710,000	5	429,127,958	5	453,287,862	5	625,537,250	5	768,660,172	5	1,042,841,256	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pendidikan politik masyarakat	Efektivitas kegiatan pendidikan politik masyarakat	kegiatan	7	3	1,088,151,500	3	1,120,578,415	3	1,183,666,979	3	1,633,460,432	3	2,007,196,178	3	2,723,163,055	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda	'% kegiatan	0	100	173,906,100	100	179,088,502	100	189,171,184	100	261,056,235	100	320,785,901	100	435,210,232	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

Tabel 8.1
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2016-2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
									281,230,131,066		**485,352,347,325**		**460,195,028,495**		**518,090,548,396**		**583,503,208,749**		**657,726,329,558**	
	Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	465,300,000			100	300,000,000	100	60,000,000	100	75,000,000	100	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam menggunakan atribut kepegawaian	'%	100	100	18,000,000	100	18,536,400	100	19,579,999	100	27,020,399	100	33,202,666	100	45,046,057	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	656,988,500	100	676,566,757	100	714,657,466	100	986,227,303	100	1,211,876,110	100	1,644,152,318	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	11,550,000	100	11,894,190	100	12,563,833	100	17,338,089	100	21,305,044	100	28,904,554	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	865,000,000	100	890,777,000	100	940,927,745	100	1,298,480,288	100	1,595,572,578	100	2,164,713,317	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	22,150,000	100	22,810,070	100	24,094,277	100	33,250,102	100	40,857,726	100	55,431,676	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	683,530,700	100	703,899,915	100	743,529,480	100	1,026,070,682	100	1,260,835,655	100	1,710,575,733	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,760,000	100	4,901,848	100	5,177,822	100	7,145,394	100	8,780,261	100	11,912,180	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,987,400	100	11,314,825	100	11,951,849	100	16,493,552	100	20,267,276	100	27,496,614	Kantor Lingkungan Hidup

				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	257,387,100	100	265,057,236	100	279,979,958	100	386,372,342	100	474,774,334	100	644,126,339	Kantor Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	12,150,000	100	12,512,070	100	13,216,500	100	18,238,769	100	22,411,800	100	30,406,089	Kantor Lingkungan Hidup
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	309,798,600	100	319,030,598	100	336,992,021	100	465,048,989	100	571,452,198	100	775,289,196	Kantor Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	2,300,000	100	2,368,540	100	2,501,889	100	3,452,607	100	4,242,563	100	5,755,885	Kantor Ketahanan Pangan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	21,300,000	100	21,934,740	100	23,169,666	100	31,974,139	100	39,289,822	100	53,304,501	Kantor Ketahanan Pangan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	6,300,000	100	6,487,740	100	6,853,000	100	9,457,140	100	11,620,933	100	15,766,120	Kantor Ketahanan Pangan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	230,200,600	100	237,060,578	100	250,407,088	100	345,561,782	100	424,626,318	100	576,090,525	Kantor Ketahanan Pangan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	'%	100	100	353,159,200	100	363,683,344	100	384,158,716	100	530,139,029	100	651,434,838	100	883,801,645	Inspektorat Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	1,910,300	100	1,967,227	100	2,077,982	100	2,867,615	100	3,523,725	100	4,780,638	Inspektorat Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja	'%	100	100	17,950,000	100	18,484,910	100	19,525,610	100	26,945,342	100	33,110,437	100	44,920,930	Inspektorat Daerah
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang berpakaian sesuai aturan	'%	100	100	18,600,000	100	19,154,280	100	20,232,666	100	27,921,079	100	34,309,422	100	46,547,593	Inspektorat Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perentasee laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	2,020,000	100	2,080,196	100	2,197,311	100	3,032,289	100	3,726,077	100	5,055,169	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	65,000,000	100	66,937,000	100	70,705,553	100	97,573,663	100	119,898,517	100	162,666,319	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	19,000,000	100	19,566,200	100	20,667,777	100	28,521,532	100	35,047,259	100	47,548,616	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	343,857,700	100	354,104,659	100	374,040,752	100	516,176,237	100	634,277,361	100	860,524,095	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	132,000,000	100	135,933,600	100	143,586,662	100	198,149,593	100	243,486,220	100	330,337,755	Sekretariat Daerah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,513,220,400	100	6,707,314,368	100	7,084,936,167	100	9,777,211,910	100	12,014,237,995	100	16,299,716,688	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	90	90	111,000,000	90	114,307,800	90	120,743,329	90	166,625,794	95	204,749,776	95	277,784,021	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	3,237,400,000	100	3,333,874,520	100	3,521,571,655	100	4,859,768,885	100	5,971,684,005	100	8,101,783,690	Sekretariat Daerah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersedian Layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	5,111,604,400	100	5,263,930,211	100	5,560,289,482	100	7,673,199,485	100	9,428,827,527	100	12,792,090,306	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaiakan kinerja dan keuangann yang tersesusun tepat waktu	'%	100	100	78,666,400	100	81,010,659	100	85,571,559	100	118,088,751	100	145,107,457	100	196,867,287	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana & Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,260,897,000	100	32,280,646,000	100	1,601,292,000	100	2,436,344,000	100	2,867,171,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran & Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	169,750,000	100	174,808,550	100	184,650,271	100	254,817,374	100	313,119,590	100	424,809,347	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	46,800,000	100	48,194,640	100	50,907,998	100	70,253,038	100	86,326,933	100	117,119,749	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kesediaan layanan administrasi perkantoran		100	100	7,893,622,000	100	8,128,851,936	100	8,586,506,300	100	11,849,378,693	100	14,560,516,538	100	19,754,252,788	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persentase	100	100	9,377,500	100	9,656,950	100	10,200,636	100	14,076,877	100	17,297,667	100	23,467,745	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persentase	100	100	1,910,080,000	100	1,967,000,384	100	2,077,742,506	100	2,867,284,658	100	3,523,319,387	100	4,780,087,413	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	635,835,000	100	654,782,883	100	691,647,159	100	954,473,080	100	1,172,856,521	100	1,591,214,441	Badan Kepegawaian Daerah

				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% aparatur yang memenuhi standar kompetensi	%	60	60	1,342,932,360	70	1,382,951,744	80	1,460,811,928	90	2,015,920,460	95	2,477,163,061	95	3,360,767,125	Badan Kepegawaian Daerah
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	122,654,500	100	126,309,604	100	133,420,835	100	184,120,752	100	226,247,580	100	306,950,092	Badan Kepegawaian Daerah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	482,769,475	100	497,156,005	100	525,145,888	100	724,701,326	100	890,512,989	100	1,208,158,973	Badan Kepegawaian Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	16,450,000	100	16,940,210	100	17,893,944	100	24,693,642	100	30,343,548	100	41,167,091	Badan Kepegawaian Daerah
				Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	%	100	100	878,892,100	100	905,083,085	100	956,039,262	100	1,319,334,182	100	1,621,197,843	100	2,199,479,113	Badan Kepegawaian Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	100	214,300,000	100	220,686,140	100	233,110,770	100	321,692,862	100	395,296,189	100	536,298,340	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persentase	100	100	19,350,000	100	19,926,630	100	21,048,499	100	29,046,929	100	35,692,866	100	48,424,512	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	438,888,200	100	451,967,068	100	477,412,814	100	658,829,684	100	809,569,915	100	1,098,343,504	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase	100	100	16,165,900	100	16,647,644	100	17,584,906	100	24,267,171	100	29,819,499	100	40,456,114	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	2,698,700,000	100	2,779,121,260	100	2,935,585,787	100	4,051,108,386	100	4,978,001,985	100	6,753,655,293	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedispilanan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pagawai	%	100	100	150,000,000	100	154,470,000	100	163,166,661	100	225,169,992	100	276,688,886	100	375,383,812	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesedian Layan Administrasi Perkantoran	%	100	100	2,153,130,000	100	2,217,293,274	100	2,342,126,885	100	3,232,135,102	100	3,971,647,613	100	5,388,334,317	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	10,900,000	100	11,224,820	100	11,856,777	100	16,362,353	100	20,106,059	100	27,277,890	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	1,446,300,000	100	1,489,399,740	100	1,573,252,945	100	2,171,089,065	100	2,667,834,243	100	3,619,450,717	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persen	100	100	225,225,000	100	231,936,705	100	244,994,741	100	338,092,743	100	415,448,363	100	563,638,794	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	5,562,692,900	100	5,728,461,148	100	6,050,973,511	100	8,350,343,445	100	10,260,902,026	100	13,920,965,778	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persetase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	100	11,358,000	100	11,696,468	100	12,354,980	100	17,049,872	100	20,950,882	100	28,424,062	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan Administrasi	'%	100	100	1,480,784,350	100	1,524,911,724	100	1,610,764,254	100	2,222,854,670	100	2,731,443,819	100	3,705,749,829	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capain kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	5,051,400	100	5,201,932	100	5,494,800	100	7,582,825	100	9,317,775	100	12,641,425	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	86,000,000	100	88,562,800	100	93,548,886	100	129,097,462	100	158,634,962	100	215,220,052	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	59,400,000	100	61,170,120	100	64,613,998	100	89,167,317	100	109,568,799	100	148,651,990	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	474,236,200	100	488,368,439	100	515,863,582	100	711,891,743	100	874,772,574	100	1,186,803,951	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,900,000	100	5,046,020	100	5,330,111	100	7,355,553	100	9,038,504	100	12,262,538	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	102,983,800	100	106,052,717	100	112,023,485	100	154,592,410	100	189,963,153	100	257,723,010	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	23,000,000	100	23,685,400	100	25,018,888	100	34,526,065	100	42,425,629	100	57,558,851	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	418,985,000	100	431,470,753	100	455,762,556	100	628,952,328	100	772,856,620	100	1,048,534,577	Dinas Pengelolaan Pasar
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	107,580,000	100	110,785,884	100	117,023,129	100	161,491,918	100	198,441,269	100	269,225,270	Dinas Pengelolaan Pasar
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,367,447,130	100	2,437,997,054	100	2,575,256,289	100	3,553,853,678	100	4,366,975,400	100	5,924,675,525	Dinas Pengelolaan Pasar

				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu	%	100	100	14,575,800	100	15,010,159	100	15,855,231	100	21,880,218	100	26,886,412	100	36,476,796	Dinas Pengelolaan Pasar
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	65,100,000	100	67,039,980	100	70,814,331	100	97,723,777	100	120,082,977	100	162,916,574	Dinas Pertanian
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam Kehadiran dan pemakaian atribut	%	100	100	33,300,000	100	34,292,340	100	36,222,999	100	49,987,738	100	61,424,933	100	83,335,206	Dinas Pertanian
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	907,064,550	100	934,095,074	100	986,684,626	100	1,361,624,784	100	1,673,164,535	100	2,269,982,324	Dinas Pertanian
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun waktu	%	100	100	1,706,000	100	1,756,839	100	1,855,749	100	2,560,933	100	3,146,875	100	4,269,365	Dinas Pertanian
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	182,815,000	100	188,262,887	100	198,862,088	100	274,429,681	100	337,219,192	100	457,505,277	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,426,417,200	100	1,468,924,433	100	1,551,624,878	100	2,141,242,332	100	2,631,158,577	100	3,569,692,842	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuanagan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	3,878,500	100	3,994,079	100	4,218,946	100	5,822,145	100	7,154,252	100	9,706,174	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	173,300,000	100	178,464,340	100	188,511,882	100	260,146,398	100	319,667,893	100	433,693,431	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	unit	4	4	43,620,000	4	44,919,876	4	47,448,865	4	65,479,434	4	80,461,128	4	109,161,613	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	stel	40	40	40,500,000	40	41,706,900	40	44,054,998	40	60,795,898	40	74,705,999	40	101,353,629	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	bln	12	12	337,561,200	12	347,620,524	12	367,191,559	12	506,724,352	12	622,662,883	12	844,766,734	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen yang tersusun dengan tepat waktu	dokumen	3	3	5,980,000	3	6,158,204	3	6,504,911	3	8,976,777	3	11,030,664	3	14,965,301	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	874,400,000	100	900,457,120	100	951,152,856	100	1,312,590,941	100	1,612,911,748	100	2,188,237,369	GUGUAK PANJANG
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	40,500,000	100	41,706,900	100	44,054,998	100	60,795,898	100	74,705,999	100	101,353,629	GUGUAK PANJANG

				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	339,733,200	100	349,857,249	100	369,554,212	100	509,984,813	100	626,669,339	100	850,202,292	GUGUAK PANJANG
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan YangTersusun Tepat Waktu	'%	100	100	7,989,000	100	8,227,072	100	8,690,256	100	11,992,554	100	14,736,450	100	19,992,942	GUGUAK PANJANG
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	48,600,000	100	50,048,280	100	52,865,998	100	72,955,077	100	89,647,199	100	121,624,355	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	394,870,450	100	406,637,589	100	429,531,286	100	592,753,174	100	728,375,101	100	988,186,499	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	22,114,000	100	22,772,997	100	24,055,117	100	33,196,061	100	40,791,320	100	55,341,584	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	0	100	378,400,000	100	389,676,320	100	411,615,097	100	568,028,834	100	697,993,831	100	946,968,230	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	108,000,000	100	111,218,400	100	117,479,996	100	162,122,394	100	199,215,998	100	270,276,345	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,070,114,000	100	1,102,003,397	100	1,164,046,188	100	1,606,383,740	100	1,973,924,340	100	2,678,023,152	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	55,500,000	100	57,153,900	100	60,371,665	100	83,312,897	100	102,374,888	100	138,892,011	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	410,500,000	100	422,732,900	100	446,532,762	100	616,215,212	100	757,205,252	100	1,027,300,366	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,668,453,440	100	1,718,173,353	100	1,814,906,512	100	2,504,570,987	100	3,077,616,829	100	4,175,402,752	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu	'%	100	100	9,342,400	100	9,620,804	100	10,162,455	100	14,024,188	100	17,232,922	100	23,379,905	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	740,875,000	100	762,953,075	100	805,907,333	100	1,112,152,120	100	1,366,612,525	100	1,854,083,212	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	153,000,000	100	157,559,400	100	166,429,994	100	229,673,392	100	282,222,664	100	382,891,488	Dinas Kesehatan

				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	65,250,000	100	67,194,450	100	70,977,498	100	97,948,947	100	120,359,666	100	163,291,958	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,425,988,650	100	6,617,483,112	100	6,990,047,411	100	9,646,265,427	100	11,853,330,957	100	16,081,414,109	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	39,792,100	100	40,977,905	100	43,284,961	100	59,733,246	100	73,400,212	100	99,582,068	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	4,770,756,100	80	4,912,924,632	85	5,189,522,289	90	7,161,540,758	95	8,800,101,284	95	11,939,097,412	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan dalam atribut pegawai	'%	80	85	40,000,000	90	41,192,000	95	43,511,110	100	60,045,331	100	73,783,703	100	100,102,350	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan adm perkantoran	'%	75	75	514,552,000	75	529,885,650	80	559,718,212	85	772,411,132	90	949,138,799	90	1,287,696,609	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	85	90	13,250,000	95	13,644,850	100	14,413,055	100	19,890,016	100	24,440,852	100	33,158,903	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	26,300,000	80	27,083,740	85	28,608,555	90	39,479,805	95	48,512,785	95	65,817,295	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen	90	91	153,000,000	92	157,559,400	93	166,429,994	94	229,673,392	95	282,222,664	95	382,891,488	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	90	91	1,268,502,000	92	1,306,303,360	93	1,379,848,239	94	1,904,190,569	95	2,339,869,372	95	3,174,500,777	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	Persen	90	91	13,271,000	92	13,666,476	93	14,435,898	94	19,921,540	95	24,479,588	95	33,211,457	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90	91	331,300,000	92	341,172,740	93	360,380,765	94	497,325,456	95	611,113,520	95	829,097,713	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.	'%	100	100	19,300,000	100	19,875,140	100	20,994,110	100	28,971,872	100	35,600,637	100	48,299,384	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	6,750,000	100	6,951,150	100	7,342,500	100	10,132,650	100	12,451,000	100	16,892,272	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari

				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,086,100	100	10,386,666	100	10,971,435	100	15,140,580	100	18,604,745	100	25,241,058	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparaur	'%	100	100	390,950,000	100	402,600,310	100	425,266,707	100	586,868,056	100	721,143,468	100	978,375,342	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	19,800,000	100	20,390,040	100	21,537,999	100	29,722,439	100	36,522,933	100	49,550,663	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layananan administrasi perkantoran	'%	100	100	407,394,800	100	419,535,165	100	443,154,995	100	611,553,893	100	751,477,424	100	1,019,529,421	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	dokume n	0	100	5,100,000	100	5,251,980	100	5,547,666	100	7,655,780	100	9,407,422	100	12,763,050	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	'%	100	100	2,150,000	100	2,214,070	100	2,338,722	100	3,227,437	100	3,965,874	100	5,380,501	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	11,300,000	100	11,636,740	100	12,291,888	100	16,962,806	100	20,843,896	100	28,278,914	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	14,850,000	100	15,292,530	100	16,153,499	100	22,291,829	100	27,392,200	100	37,162,997	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan layanan adminidtrasi perkantoran	'%	100	100	328,776,550	100	338,574,091	100	357,635,813	100	493,537,421	100	606,458,783	100	822,782,631	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	20	30	70,000,000	40	72,086,000	50	76,144,442	60	105,079,330	70	129,121,480	70	175,179,112	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	100	100	82,950,000	100	85,421,910	100	90,231,164	100	124,519,006	100	153,008,954	100	207,587,248	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tercapaianya pentaan jabatan dan informasi dibidang sumber daya aparatur	'%	90	90	120,000,000	91	123,576,000	92	130,533,329	93	180,135,994	94	221,351,109	94	300,307,050	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	persen	15	0	0	20	50,000,000	25	80,000,000	30	100,000,000	35	120,000,000	35		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	198,880,150	100	204,806,778	100	216,337,400	100	298,545,612	100	366,852,848	100	497,709,259	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari

				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	100	230,000,000	100	236,854,000	100	250,188,880	100	345,260,655	100	424,256,292	100	575,588,512	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	0	0	70	83,994,005	70	250,000,000	70	252,500,000	70	280,000,000	70		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Ketersediaan SDM sesuai Bidang Keahlian	'%	70	0	0	70	100,000,000	75	110,000,000	80	121,000,000	85	133,100,000	85		Dinas Pekerjaan Umum
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha	persen	50	50	0	60	70,000,000	65	120,000,000	70	120,000,000	75	125,000,000	75		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
				Pendidikan																
	Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan masyarakat	Mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu	Meningkatkan mutu pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	'% kegiatan	0	100	7,796,131,800	100	8,028,456,528	100	8,480,458,630	100	11,703,032,910	100	14,380,686,839	100	19,510,277,835	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
				Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya kegiatan untuk Pendidikan Anak Usia Dini	'%	0	100	505,396,950	100	520,457,779	100	549,759,552	100	758,668,182	100	932,251,462	100	1,264,785,558	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
				Program Pendidikan Menengah	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SMP	nilai	0	0	4,914,299,720	0	5,060,745,852	0	5,345,665,843	0	7,377,018,863	0	9,064,880,779	0	12,298,323,753	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
				Program Pendidikan Luar Biasa	Angka putus sekolah	'%	0.25	0	60,680,000	0	62,488,264	0	66,006,353	0	91,088,768	0	111,929,878	0	151,855,265	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SD	nilai	70	70	6,976,936,083	75	7,184,848,778	80	7,589,355,764	85	10,473,310,955	90	12,869,604,501	90	17,460,192,427	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
				Program Pendidikan Non Formal	Optimalisasi pelayanan non formal	'%	0	100	291,362,100	100	300,044,691	100	316,937,207	100	437,373,345	100	537,444,367	100	729,150,772	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
			Terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya manjemen pelayanan pendidikan	'%	100	100	500,000,000	100	514,900,000	100	543,888,870	100	750,566,641	100	922,296,288	100	1,251,279,374	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
				Kesehatan																
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	'%	85	85	0	86	120,000,000	87	150,000,000	88	160,000,000	90	180,000,000	90		Dinas Kesehatan

				Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Ratio tenaga paramedis per satuan penduduk (Bidan dan perawat)	tenaga paramedis/satuan penduduk	12.95	13	0	13	145,000,000	13	152,000,000	13	159,000,000	13	166,000,000	13		Dinas Kesehatan
				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	6,459,177,000	100	6,651,660,475	100	7,026,148,959	100	9,696,085,564	100	11,914,549,941	100	16,164,469,905	Dinas Kesehatan
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	5972	65	504,635,400	65	519,673,535	70	548,931,155	70	757,524,994	75	930,846,712	75	1,262,879,735	Dinas Kesehatan
				Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada rumah sakit	%	25	25	0	25	0	25	0	25	8,000,000,000	25	12,000,000,000	25		Dinas Kesehatan
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	unit	0	0	68,000,000	1	70,085,000,000	0	40,085,000,000	0	0	0	0	0		Dinas Kesehatan
				Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pengawasan dan pengendalian makanan yang memenuhi syarat	%	90	90	38,000,000	100	39,132,400	100	41,335,554	100	57,043,065	100	70,094,518	100	95,097,232	Dinas Kesehatan
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tingkat Pemenuhan Kualitas lingkungan	%	40	40	208,000,000	41	214,198,400	42	226,257,770	43	312,235,722	44	383,675,256	44	520,532,220	Dinas Kesehatan
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	%	100	100	2,617,063,925	100	2,695,052,430	100	2,846,783,882	100	3,928,561,757	100	4,827,416,687	100	6,549,356,219	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD	%	0	60	134,639,000	100	138,651,242	100	146,457,307	100	202,111,084	100	248,354,100	100	336,942,007	Dinas Kesehatan
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ()	puskesmas	0	2	734,639,000	5	756,531,242	7	799,123,951	7	1,102,791,053	7	1,355,109,645	7	1,838,477,256	Dinas Kesehatan
				Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan	%	20	80	410,000,000	85	422,218,000	90	445,988,873	95	615,464,645	95	756,282,956	95	1,026,049,087	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	puskesmas	0	0	20,000,000	1	20,596,000	1	21,755,555	2	30,022,666	3	36,891,852	3	50,051,175	Dinas Kesehatan
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas. Pustu dan Jaringannya yang dapat melaksanakan pelayanan kesehatan	%	100	100	4,270,840,000	100	2,900,000,000	100	13,400,000,000	100	3,030,000,000	100	4,391,000,000	100		Dinas Kesehatan
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi lebih	%	0	15	373,000,000	13	384,115,400	13	405,741,097	12	559,922,714	10	688,033,031	10	933,454,413	Dinas Kesehatan

				Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan	'%	90	90	2,574,920,000	91	2,651,652,616	92	2,800,940,658	93	3,865,298,108	95	4,749,678,316	95	6,443,888,571	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	'%	83.8	85	193,564,000	86	199,332,207	87	210,554,610	88	290,565,362	90	357,046,717	90	484,405,281	Dinas Kesehatan
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita	'%	57.57	60	744,750,000	70	766,943,550	80	810,122,472	90	1,117,969,011	90	1,373,760,321	90	1,863,780,627	Dinas Kesehatan
				Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	100	100	368,671,800	100	379,658,220	100	401,032,977	100	553,425,509	100	680,049,265	100	922,622,838	Dinas Kesehatan
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pelaksanaan lingkungan sehat dikecamatan dan kelurahan	bln	0	0	25,000,000	0	25,745,000	0	27,194,444	0	37,528,332	0	46,114,814	0	62,563,969	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
	Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	Fasilitas publik yang memenuhi standar lingkungan	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	'%	12.5	13	680,250,000	20	700,521,450	30	739,960,808	40	1,021,145,915	50	1,254,784,100	50	1,702,365,588	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	'%	65	65	2,300,000,000	70	360,000,000	75	7,700,000,000	80	23,365,000,000	85	23,046,500,000	85		Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	'%	10	10	228,000,000	20	234,794,400	40	248,013,325	60	342,258,388	75	420,567,107	75	570,583,394	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap	'%	98	98	4,050,000,000	99	4,170,690,000	100	4,405,499,847	100	6,079,589,789	100	7,470,599,933	100	10,135,362,928	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengelolaan Pembangunan gedung	Persentase Gedung Negara dan Swasta yang Laik Fugsi	'%	0	2	150,000,000	5	154,470,000	20	163,166,661	30	225,169,992	40	276,688,886	40	375,383,812	Dinas Pekerjaan Umum
			Pemenuhan target universal acsess (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	Program pengendalian banjir	Pengurangan titik genangan	titik	8	8	257,522,800	6	265,196,979	4	280,127,569	2	386,576,046	0	475,024,645	0	644,465,936	Dinas Pekerjaan Umum
				Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	'%	48	48	943,071,400	55	2,940,000,000	70	12,104,083,333	90	23,785,170,833	100	23,937,604,375	100		Dinas Pekerjaan Umum

				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	'%	45	45	2,500,000,000	50	2,574,500,000	60	2,719,444,350	70	3,752,833,203	80	4,611,481,440	80	6,256,396,869	Dinas Pekerjaan Umum
				Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	'%	98	0	0	98	488,000,000	99	561,200,000	100	3,420,000,000	100	3,762,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
				Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang terpelihara / normalisasi	'%	47	0	0	55	1,000,000,000	65	1,100,000,000	70	1,210,000,000	75	1,331,000,000	75		Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	'%	72	72	4,819,443,900	80	4,963,063,328	85	5,242,483,794	90	7,234,627,635	95	8,889,910,438	95	12,060,941,491	Dinas Pekerjaan Umum
		Peningkatan penataan ruang kota	Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	'%	40	50	197,000,000	60	202,870,600	65	214,292,215	70	295,723,256	75	363,384,737	75	493,004,073	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota	'%	60	60	464,726,200	65	478,575,041	70	505,518,816	75	697,615,965	80	857,230,498	80	1,163,004,617	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	'%	40	50	862,629,700	70	888,336,065	75	938,349,386	80	1,294,922,152	85	1,591,200,340	85	2,158,781,502	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota	'%	60	60	0	65	250,000,000	70	0	0	0	0	0	0		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib lancar dan terpadu	Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat - alat berat ke PU an / Kebinamargaan	'%	30	0	0	50	4,000,000,000	65	4,050,000,000	80	4,105,000,000	90	1,665,500,000	90		Dinas Pekerjaan Umum
				Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik	'%	85	85	1,009,556,000	88	1,039,640,769	90	1,098,172,544	93	1,515,478,111	95	1,862,219,503	95	2,526,473,199	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik	'%	85	85	4,723,190,700	88	4,863,941,783	90	5,137,781,705	93	7,090,138,753	95	8,712,362,500	95	11,820,062,204	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan informasi / data base jalan	'%	20	0	0	40	1,200,000,000	0	0	80	300,000,000	100	330,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
				Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																

		Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	Fasilitas publik yang memenuhi standar lingkungan	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana areal pemakaman yang memadai	'%	80	80	139,484,600	80	143,641,241	85	151,728,243	85	209,384,975	90	257,292,258	90	349,068,406	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
			Pemenuhan target universal acsess (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	Program Lingkungan Sehat Perumahan	% Jalan dengan riol yang baik	'%	40	40	3,804,507,000	55	3,917,881,309	70	4,138,458,026	90	5,711,072,076	100	7,017,765,367	100	9,521,002,274	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Pembangunan Rusunawa yang layak huni	unit	0	0	0	0	0	1	15,000,000,000	1	15,000,000,000	0	0	0		Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	'%	50	60	79,649,400	80	82,022,952	100	86,640,844	100	119,564,365	100	146,920,692	100	199,327,303	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan lembaga pemerintahan dan masyarakat terhadap bencana	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	% Kesiap siangaan dan Tanggap terhadap Pencegahan Kebakatan Meningkat	'%	50	60	1,950,000,000	70	2,008,110,000	75	2,121,166,593	80	2,927,209,898	90	3,596,955,523	90	4,879,989,558	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Perencanaan Pembangunan																
	Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	'%	100	100	2,214,373,100	100	2,280,361,418	100	2,408,745,766	100	3,324,069,157	100	4,084,616,181	100	5,541,598,772	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	'%	100	100	84,875,500	100	87,404,790	100	92,325,680	100	127,409,438	100	156,560,717	100	212,405,925	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program perencanaan sosial budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	'%	100	100	164,296,900	100	169,192,948	100	178,718,511	100	246,631,545	100	303,060,842	100	411,162,644	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	'%	100	100	574,865,000	100	591,995,977	100	625,325,351	100	862,948,984	100	1,060,391,711	100	1,438,633,435	Sekretariat Daerah

	Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.	Peningkatan penataan ruang kota	Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum	'%	60	100	125,647,500	100	129,391,796	100	136,676,554	100	188,613,644	100	231,768,446	100	314,440,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Pemenuhan Pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota	'%	60	65	316,265,200	70	325,689,903	75	344,026,244	80	474,756,217	85	583,380,440	85	791,472,243	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan lembaga pemerintahan dan masyarakat terhadap bencana	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Peningkatan kualitas perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana	'%	50	50	0	60	75,000,000	65	85,000,000	70	100,000,000	75	110,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Perhubungan																
		Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib lancar dan terpadu	Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berwawasan lingkungan	Persen	70	0	0	72	7,800,000,000	73	1,625,000,000	74	4,300,000,000	75	1,250,000,000	75		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Optimalisasi Peningkatan Pengoperasian Kendaraan	Persen	80	81	180,000,000	82	185,364,000	83	195,799,993	84	270,203,991	85	332,026,664	85	450,460,575	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas lalu ,intas yang memadai dan berwawasan lingkungan	Persen	70	71	5,351,566,000	72	5,511,042,667	73	5,821,314,369	74	8,033,413,829	75	9,871,458,913	75	13,392,608,308	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Program peningkatan pelayanan angkutan	Terwujudnya Angkutan Yang Selamat, Aman, Nyaman, Terjangkau dan Terpadu	Persen	80	81	51,379,000	82	52,910,094	83	55,888,933	84	77,126,727	85	94,773,322	85	128,578,966	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terciptanya Lalu Lintas Yang Aman, Tertib dan Lancar	Persen	70	71	763,000,000	72	785,737,400	73	829,974,416	74	1,145,364,694	75	1,407,424,135	75	1,909,452,325	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Persen	70	71	260,000,000	72	267,748,000	73	282,822,212	74	390,294,653	75	479,594,070	75	650,665,274	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Lingkungan Hidup																

		Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	Terpenuhiny a RTH	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	Persentase	8	10	1,233,986,000	12	1,270,758,783	13	1,342,302,502	14	1,852,377,453	15	2,276,201,414	15	3,088,122,459	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
				Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH/ Non Hijau	%	7.78	8	600,000,000	8	2,000,000,000	8	5,700,000,000	9	6,420,000,000	9	4,662,000,000	9		Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase kelompok masyarakat yang memahami pengelolaan RTH	%	10	20	0	30	0	40	110,000,000	50	115,000,000	60	120,000,000	60		Kantor Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemenuhan RTH	%	20	20	0	22	100,000,000	25	120,000,000	28	140,000,000	30	0	30		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pemenuhan target universal acsess (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan/pengelolaan persampahan	Persen	90	90	5,799,341,500	90	5,972,161,877	100	6,308,394,590	100	8,705,584,535	100	10,697,422,276	100	14,513,192,802	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup	%	50	60	451,509,800	70	464,964,792	80	491,142,310	90	677,776,388	95	832,851,625	95	1,129,929,800	Kantor Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	%	80	70	424,576,950	60	437,229,343	50	461,845,355	40	637,346,590	30	783,171,490	30	1,062,528,760	Kantor Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan pengendalian	%	50	55	0	60	380,000,000	65	1,055,000,000	70	1,055,000,000	75	1,055,000,000	75		Kantor Lingkungan Hidup
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	%	0	0	0	50	0	55	270,000,000	60	175,000,000	65	180,000,000	65		Kantor Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Informasi Lingkungan Hidup	%	0	0	0	60	100,000,000	65	120,000,000	70	140,000,000	75	160,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pertanahan																
	Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.	Mewujudkan reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunan tanah	%	80	80	591,580,000	81	609,209,084	82	643,507,555	83	888,040,426	84	1,091,224,076	84	1,480,463,704	Sekretariat Daerah

	Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.	Peningkatan penataan ruang kota	Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah	%	90	90	151,928,000	91	2,152,000,000	92	154,000,000	93	2,156,500,000	94	158,500,000	94	2,156,500,000	Sekretariat Daerah
				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
	Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarasutamaan gender dan perlindungan anak	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat capaian pelayanan administrasi kependudukan	%	67	70	662,010,550	75	681,738,464	80	720,120,340	85	993,766,069	90	1,221,139,746	90	1,656,720,293	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi dan kelengkapan data kependudukan	%	0	0	0	85	257,100,000	90	139,760,000	95	127,366,000	100	114,171,000	100		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang	%	70	70	345,140,000	70	355,425,172	70	375,435,609	70	518,101,141	70	636,642,682	70	863,733,126	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
				Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penurunan Kasus KDRT dan TPPO	%	50	50	0	50	0	50	200,000,000	50	205,000,000	50	210,000,000	50		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kesejahteraan perempuan	%	0	35	0	30	200,000,000	25	310,000,000	20	320,000,000	15	320,000,000	15		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
				Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tingkat kemiskinan menurun menjadi 2.84 %	%	4.58	4	352,400,000	4	362,901,520	3	383,332,876	3	528,999,368	3	650,034,424	3	881,901,703	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	100 % data akurat	%	80	85	115,152,000	88	118,583,530	90	125,259,782	93	172,858,500	95	212,408,524	95	288,174,645	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

		Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarasutamaan gender dan perlindungan anak	Program pelayanan kontrasepsi	Tercapainya program KB	'%	75	75	0	75	21,000,000	80	160,000,000	80	170,000,000	80	25,000,000	80		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
				Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 % Kelompok Kerja paham fungsi keluarga	'%	100	100	0	100	0	100	45,000,000	100	50,000,000	100	0	100		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
				Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75 % sekolah dan perguruan tinggi memiliki PIK R/M	'%	25	35	209,025,650	45	215,254,614	55	227,373,449	65	313,775,360	75	385,567,162	75	523,098,969	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
				Program Keluarga Berencana	Jumlah PUS ber KB 80 %	'%	1.77	2	1,463,946,000	2	1,507,571,591	2	1,592,447,871	1	2,197,578,062	1	2,700,383,923	1	3,663,610,869	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
				Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Peningkatan Tingkat Tahapan Kelompok Kegiatan	tingkat	0	0	71,247,000	0	73,370,161	0	77,500,901	0	106,951,243	0	131,421,687	0	178,299,803	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Meningkatkan ketertiban, ketentraman dan keamanan kota	Meningkatnya jumlah penanganan gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase Kelurahan yang memiliki WPA (Warga Peduli AIDS)	'%	8	24	465,000,000	24	478,857,000	30	505,816,649	40	698,026,976	50	857,735,548	50	1,163,689,818	Dinas Kesehatan
				Sosial																
		Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarasutamaan gender dan perlindungan anak	Program pembinaan anak terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	'%	32	35	0	37	100,000,000	40	100,000,000	42	100,000,000	45	100,000,000	45		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	'%	60	65	1,696,650,000	68	1,747,210,170	70	1,845,578,103	73	2,546,897,782	75	3,129,627,994	75	4,245,966,299	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	'%	75	80	436,581,000	85	449,591,114	87	474,903,094	90	655,366,269	92	805,314,071	92	1,092,569,601	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	3	12	101,442,000	15	104,464,972	20	110,346,350	25	152,277,962	30	187,119,160	30	253,864,564	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

				Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial	'%	25	25	3,000,000	50	3,089,400	75	3,263,333	75	4,503,400	100	5,533,778	100	7,507,676	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang meningkat kesejahteraannya	'%	1.5	2	4,096,295,100	2	4,218,364,694	2	4,455,858,626	3	6,149,084,904	3	7,555,995,530	3	10,251,219,136	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial	'%	75	75	347,600,000	80	357,958,480	80	378,111,542	85	521,793,929	90	641,180,379	90	869,889,421	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin	'%	60	60	57,151,250	61	58,854,357	62	62,167,858	63	85,791,643	64	105,420,771	64	143,024,361	Sekretariat Daerah
				Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Penurunan Angka Kemiskinan	'%	54	5	137,853,000	5	141,961,019	4	149,953,425	3	206,935,726	2	254,282,620	2	344,985,231	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan ketertiban, ketentraman dan keamanan kota	Meningkatnya jumlah penanganan gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	2	2	0	3	300,000,000	4	430,000,000	5	630,000,000	6	630,000,000	6		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				Tenaga Kerja																
	Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas	'%	66	77	34,000,000	88	35,013,200	90	36,984,443	95	51,038,532	100	62,716,148	100	85,086,997	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.	Meningkatnya kesempatan Kerja bagi masyarakat	Meningkatnya lapangan kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat tenaga kerja yang memiliki keahlian	'%	52	55	657,579,500	57	677,175,369	60	715,300,342	65	987,114,472	65	1,212,966,264	65	1,645,631,330	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap UU ketenagakerjaan	'%	5	5	581,070,001	6	598,385,887	7	632,075,012	8	872,263,517	9	1,071,837,410	9	1,454,161,814	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja	'%	8	15	55,000,000	17	56,639,000	19	59,827,776	21	82,562,330	23	101,452,592	23	137,640,731	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																

		Meningkatkan peran koperasi dan UMK dalam menunjang perekonomian kota	Berkembangnya koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	82.52	83	217,000,000	84	223,466,600	85	236,047,770	86	325,745,922	87	400,276,589	87	543,055,248	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
			Berkembangnya usaha mikro	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang tersentuh pembiayaan	'%	30	33	45,000,000	36	46,341,000	39	48,949,998	42	67,550,998	45	83,006,666	45	112,615,144	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	unit	3	20	460,000,000	20	473,708,000	20	500,377,760	20	690,521,309	20	848,512,585	20	1,151,177,024	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
					Jumlah UMKM	unit	9236	9,236		9,246	0	9,256	0	9,266	0	9,276	0	9,276	0	
				Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi sehat	unit	11	12	290,000,000	13	298,642,000	14	315,455,545	15	435,328,652	16	534,931,847	16	725,742,037	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
				Penanaman Modal																
		Mewujudkan perekonomian kota yang sehat	Berkembangnya investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor	Perusahaan	70	80	32,806,100	90	33,783,722	100	35,685,745	110	49,246,329	120	60,513,889	120	82,099,193	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	persen	2500000000	10	114,286,000	10	117,691,723	10	124,317,767	10	171,558,518	10	210,811,107	10	286,007,429	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
				Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi	dokumen	0	0	0	1	100,000,000	1	130,000,000	1	125,000,000	1	0	1		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
				Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Lancarnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase	100	100	377,525,700	100	388,775,966	100	410,664,053	100	566,716,393	100	696,381,103	100	944,780,243	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
				Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	nilai mutu	7.2	7	293,324,000	7	302,065,055	8	319,071,318	8	440,318,419	8	541,063,273	8	734,060,542	GUGUAK PANJANG
				Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	'%	80	85	586,361,100	90	603,834,661	90	637,830,552	90	880,206,162	90	1,081,597,332	90	1,467,403,100	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
				Kebudayaan																
	Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat)	Meningkatkan aktifitas generasi muda dalam penggalian potensi diri (seni, budaya, dan olahraga)	Meningkatnya event generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang dilaksanakan masyarakat	kali	4	52	363,480,000	57	374,311,704	59	395,385,453	61	545,631,925	63	670,472,510	63	909,630,054	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
				Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	sanggar	6	6	892,148,000	7	918,734,010	13	970,458,735	16	1,339,233,055	19	1,645,649,577	19	2,232,652,782	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
				Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	kali	0	1	301,845,000	1	310,839,981	1	328,340,272	1	453,109,575	1	556,781,046	1	755,384,845	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

				Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan Program Pengembangan nilai budaya	bln	0	12	75,000,000	12	77,235,000	12	81,583,331	12	112,584,996	12	138,344,443	12	187,691,906	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya aktifitas pengembangan nilai adat dan budaya di masyarakat	kegiatan	8	8	6,352,000	9	6,541,290	10	6,909,564	11	9,535,199	12	11,716,852	12	15,896,253	GUGUAK PANJANG
				Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya	kegiatan	0	0	0	3	374,500,000	4	426,200,000	4	426,660,000	4	448,872,000	4		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.	Menjadikan Bukittinggi sebagai kota pusaka nasional dan dunia	Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya (BCB)	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	'%	0	5	0	10	997,000,000	15	51,189,000,000	20	7,330,000,000	25	1,105,000,000	25		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Pengelolaan Kekayaan Budaya	'%	0	25	464,941,500	30	478,796,757	35	505,753,014	40	697,939,159	45	857,627,639	45	1,163,543,418	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
				Kepemudaan dan Olahraga																
	Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat)	Meningkatkan aktifitas generasi muda dalam penggalian potensi diri (seni, budaya, dan olahraga)	Meningkatnya event olahraga generasi muda	Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah capaian program pembinaan kepemudaan	'%	0	100	931,257,100	100	959,008,562	100	1,013,000,744	100	1,397,941,026	100	1,717,789,933	100	2,330,525,602	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
				Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	'%	0	100	368,905,750	100	379,899,141	100	401,287,463	100	553,776,699	100	680,480,808	100	923,208,312	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai	unit	3	3	3,385,741,500	3	3,486,636,597	4	3,682,934,237	5	5,082,449,247	6	6,245,313,635	6	8,473,017,009	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
				Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	'%	100	100	824,261,000	100	848,823,978	100	896,612,768	100	1,237,325,619	100	1,520,425,721	100	2,062,761,576	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.	Meningkatnya kesempatan Kerja bagi masyarakat	Meningkatnya lapangan kerja	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan	'%	100	0	0	20	0	40	145,000,000	60	155,000,000	80	165,000,000	80		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

	Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan ketertiban, ketentraman dan keamanan kota	Meningkatnya jumlah penanganan gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	persentase sekolah yang bebas narkoba	'%	0	0	0	0	0	20	80,000,000	40	85,000,000	60	90,000,000	60		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
				Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
	Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat)	Menigkatkan fungsi rumah ibadah untuk penguatan iman dan taqwa dan generasi muda	Meningkatnya fungsi rumah ibadah	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Terjaganya kerukunan antar dan intern umat bergama	'%	0	100	78,847,500	100	81,197,156	100	85,768,555	10	118,360,606	100	145,441,513	100	197,320,501	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan program kualitas pemahaman dan pengamalan dan pembinaan kerukunan beragama	'%	0	100	128,000,000	100	131,814,400	100	139,235,551	100	192,145,060	100	236,107,850	100	320,327,520	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Meningkatnya aktifitas keagamaan dilingkungan masyarakat	kegiatan	3	5	194,215,000	6	200,002,607	7	211,262,754	8	291,542,600	9	358,247,547	9	486,034,447	GUGUAK PANJANG
				Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Kelompok masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan	Kelompok masyarakat/kelurahan	9	2	469,687,000	2	483,683,673	3	510,915,063	4	705,062,787	4	866,381,153	4	1,175,419,311	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
				Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Jumlah event keagamaan ditengah masyarakat	'%	3	3	6,497,174,600	6	6,690,790,403	9	7,067,481,903	12	9,753,125,026	15	11,984,640,032	15	16,259,561,131	Sekretariat Daerah
	Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, damai dan berkualitas	'%	0	0	12,636,000	0	13,012,553	0	13,745,160	85	18,968,320	85	23,308,272	85	31,622,332	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

	Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	Fasilitas publik yang memenuhi standar lingkungan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terpantaunya kegiatan orang asing, lembaga asing, dan non govenment organization serta deteksi dini dan penanggulangan konflik sosial	'%	100	100	237,889,000	100	244,978,092	100	258,770,359	100	357,103,095	100	438,808,283	100	595,331,198	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat keamananan dan kenyamanan lingkungan	'%	40	50	300,022,600	60	308,963,273	70	326,357,906	75	450,373,910	85	553,419,461	85	750,824,182	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan lembaga pemerintahan dan masyarakat terhadap bencana	Program Sistem kebencanaan	% Jumlah Data dan Informasi tentang Kebencanan terpenuhi	'%	25	100	74,970,000	100	77,204,106	100	81,550,697	100	112,539,962	100	138,289,105	100	187,616,829	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana	Kapasitas dan Kwalitas Petugas BPBD Meningkat dalam Penanggulanga Kebencanaan	'%	50	70	399,840,000	70	411,755,232	70	434,937,052	70	600,213,131	70	737,541,896	70	1,000,623,090	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	%Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meningkat	'%	50	60	2,155,520,000	70	2,219,754,496	75	2,344,726,674	80	3,235,722,810	90	3,976,056,189	90	5,394,315,432	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Peningkatan Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	bln	0	100	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarasutamaan gender dan perlindungan anak	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Efektivitas kegiatan pemberantasan narkoba	Kegiatan	3	3	196,137,000	3	201,981,883	3	213,353,463	3	294,427,778	3	361,792,854	3	490,844,365	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatkan ketertiban, ketentraman dan keamanan kota	Meningkatnya jumlah penanganan gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Terdeteksinya potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah	'%	100	100	427,527,500	100	440,267,820	100	465,054,898	100	641,775,759	100	788,614,053	100	1,069,912,685	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	%	20	20	124,280,900	30	127,984,471	40	135,189,997	50	186,562,195	60	229,247,625	60	311,020,253	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	kasus	722	650	3,239,993,800	600	3,336,545,615	500	3,524,393,133	400	4,863,662,524	250	5,976,468,510	250	8,108,274,827	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat	%	100	100	76,668,300	100	78,953,015	100	83,398,070	100	115,089,337	100	141,421,777	100	191,866,925	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Tingkat pelaksanaan peringatan hari-hari besar kenegaraan	%	100	100	208,464,500	100	214,676,742	100	226,763,043	100	312,932,999	100	384,532,069	100	521,694,658	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
				Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Peningkatan program pemberrantasan penyakit masyarakat	bln	0	0	42,000,000	0	43,251,600	0	45,686,665	0	63,047,598	0	77,472,888	0	105,107,467	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Mneingkatnya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	bln	0	0	41,000,000	0	42,221,800	0	44,598,887	0	61,546,465	0	75,628,296	0	102,604,909	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas per tahun	persen	0	10	18,377,500	10	18,925,150	10	19,990,635	10	27,587,077	10	33,899,000	10	45,990,773	GUGUAK PANJANG
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Temuan Peristiwa Gangguan Ketertiban dan Keamanan disertai laporan tertulis	Laporan /Tahun	22	15	48,328,500	12	49,768,689	10	52,570,667	7	72,547,520	5	89,146,392	5	120,944,910	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
				Bidang Pemerintahan Umum																
	Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat)	Menigkatkan fungsi rumah ibadah untuk penguatan iman dan taqwa dan generasi muda	Meningkatnya event keagamaan bagi generasi muda	Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah Usulan Bantuan Kemasyarakatan yang direalisasikan	Proposal /Tahun	42	60	15,000,000	60	15,447,000	60	16,316,666	60	22,516,999	60	27,668,889	60	37,538,381	MANDIANGIN KOTO SELAYAN

	Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	'%	80	80	71,440,000	82	73,568,912	85	77,710,842	88	107,240,962	90	131,777,694	90	178,782,797	Sekretariat Daerah
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	'%	80	80	909,099,450	81	936,190,614	82	988,898,145	83	1,364,679,440	84	1,676,918,096	84	2,275,074,781	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH	'%	80	80	7,627,000,000	85	7,854,284,600	90	8,296,480,823	95	11,449,143,536	100	14,068,707,577	100	19,087,015,569	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	'%	80	80	245,162,000	81	252,467,828	82	266,681,766	83	368,020,837	84	452,224,005	84	613,532,308	Sekretariat Daerah
				Program Penataan Kelembagaan Daerah	Peningkatan capaian kinerja daerah	peringkat nasional	74	62	721,357,000	55	742,853,439	50	784,676,087	40	1,082,853,000	35	1,330,609,767	35	1,805,238,271	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur	Jumlah penyelenggaraan diklat peningkatan profesionalisme aparatur	kegiatan	0	0	0	8	800,000,000	8	812,000,000	8	834,000,000	8	836,000,000	8		Badan Kepegawaian Daerah
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	'%	100	100	559,000,000	100	575,658,200	100	608,067,757	100	839,133,504	100	1,031,127,250	100	1,398,930,340	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Meningkatnya Program peningkatan pelayanan kelurahan	'%	100	100	380,000,000	100	391,324,000	100	413,355,541	100	570,430,647	100	700,945,179	100	950,972,324	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	persen	80	82	734,210,800	84	756,090,282	86	798,658,165	88	1,102,148,267	90	1,354,319,791	90	1,837,405,660	GUGUAK PANJANG
				Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	orang	80	0	30,740,000	80	31,656,052	80	33,438,288	80	46,144,837	80	56,702,776	80	76,928,656	GUGUAK PANJANG
				Program Peningkatan Peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan	'%	0	0	0	80	11,000,000	85	11,850,000	90	12,650,000	95	13,275,000	95		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
				Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kerjasama Tugas Sekretariat DPRD se Indonesia	'%	100	100	109,500,000	100	112,763,100	100	119,111,663	100	164,374,094	100	201,982,887	100	274,030,183	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

				Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terstandarisasinya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	'%	100	100	50,000,000	100	51,490,000	100	54,388,887	100	75,056,664	100	92,229,629	100	125,127,937	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemerintahan	'%	100	100	12,522,580,525	100	12,895,753,425	100	13,621,784,342	100	18,798,062,393	100	23,099,059,068	100	31,338,493,438	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	'%	100	100	36,000,000	100	37,072,800	100	39,159,999	100	54,040,798	100	66,405,333	100	90,092,115	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Perizinan	dokumen	2	2	12,666,000	1	13,043,447	1	13,777,793	1	19,013,354	1	23,363,610	1	31,697,409	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase capaian realisasi penyelenggaraan pemerintahan	'%	81	75	762,195,900	80	784,909,338	80	829,099,734	85	1,144,157,632	90	1,405,940,899	90	1,907,440,017	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
				Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kegiatan yang dikelola dengan sistem otomisasi	kegiatan	1	1	502,385,200	3	517,356,279	5	546,483,437	7	754,147,144	7	926,696,010	7	1,257,248,477	Badan Kepegawaian Daerah
				Peningkatan Kemitraan Legislatif dengan Eksekutif	Terjalinnya kemitraan yang sinergis antara legislatif dan eksekutif	'%	100	0	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Mewujudkan reformasi birokrasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukittinggi	persen	10	15	2,092,983,550	20	2,155,354,460	30	2,276,700,916	50	3,141,847,264	75	3,860,701,918	75	5,237,814,292	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ditindaklanjutinya Pengaduan Masyarakat Secara Komprehensif	'%	100	100	0	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	Pemenuhan target universal acsess (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	Program Penyelenggaraan Adipura	Tingkat penilaian adipura	'%	71	75	0	77	0	80	325,000,000	85	325,000,000	87	325,000,000	87		Kantor Lingkungan Hidup
		Peningkatan penataan ruang kota	Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota	Program Penegasan Batas Wilayah	Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan	'%	80	80	671,985,500	81	692,010,668	82	730,970,869	83	1,008,739,799	84	1,239,539,464	84	1,681,683,191	Sekretariat Daerah

	Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.	Meningkatkan peran koperasi dan UMK dalam menunjang perekonomian kota	Berkembangnya usaha mikro	Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	'%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Sekretariat Daerah
				Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat inflasi daerah	'%	2.84	9	575,800,100	6	592,958,943	5	626,342,531	5	864,352,693	4	1,062,116,590	4	1,440,973,577	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rupiah (Milyar)	28892	31,758	3,021,888,000	34,927	3,111,940,262	38,432	3,287,142,499	42,311	4,536,256,649	46,605	5,574,152,170	46,605	7,562,452,249	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
				Program Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD`	'%	100	100	111,720,000	100	115,049,256	100	121,526,529	100	167,706,610	100	206,077,883	100	279,585,863	Dinas Pengelolaan Pasar
	Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarasutamaan gender dan perlindungan anak	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Peningkatan program peningkatan kinerja LPMK dan RT	bln	12	12	63,000,000	12	64,877,400	12	68,529,998	12	94,571,397	12	116,209,332	12	157,661,201	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program Pembinaan PKK	Peningkatan program pembinaan PKK	bln	12	12	92,500,000	12	95,256,500	12	100,619,441	12	138,854,829	12	170,624,813	12	231,486,684	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan RT	'%	90	80	67,748,400	85	69,767,302	90	73,695,201	95	101,699,378	100	124,968,196	100	169,544,351	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
				Pangan																
		Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	2400	2,400	387,248,000	2,400	398,787,990	2,400	421,239,754	2,400	581,310,861	2,400	714,314,786	2,400	969,110,870	Kantor Ketahanan Pangan
					Ketersediaan protein perkapita	gr/kap/hr	63	63		63	0	63	0	63	0	63	0	63	0	
				Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	84.1	84	293,333,800	84	302,075,147	85	319,081,978	85	440,333,130	85	541,081,350	85	734,085,067	Kantor Ketahanan Pangan
				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																

	Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat)	Meningkatkan sinergitas pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya pembangunan fisik yang merupakan hasil keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tiingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	'%	15	20	497,375,200	25	512,196,981	30	541,033,671	34	746,626,466	40	917,454,601	40	1,244,710,658	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	'%	15	20	1,898,758,100	25	1,955,341,091	30	2,065,426,795	34	2,850,288,977	40	3,502,435,095	40	4,751,753,693	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya peren perempuan dipedesaan	'%	100	100	184,000,000	100	189,483,200	100	200,151,104	100	276,208,524	100	339,405,034	100	460,470,810	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan program keberdayaan masyarakat pedesaan	bln	12	12	151,000,000	12	155,499,800	12	164,254,439	12	226,671,125	12	278,533,479	12	377,886,371	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	'%	100	100	640,000,000	100	659,072,000	100	696,177,754	100	960,725,300	100	1,180,539,249	100	1,601,637,599	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertahunnya	persen	802661	3	581,898,000	3	599,238,560	3	632,975,691	3	873,506,454	3	1,073,364,731	3	1,456,233,930	GUGUAK PANJANG
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun	'%	5	7	180,868,900	9	186,258,793	12	196,745,163	15	271,508,325	17	333,629,430	17	452,635,048	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Tingkat partisipasi perempuan dalam pencapaian tujuan program pemerintah	'%	100	80	341,078,000	85	351,242,124	90	371,017,056	95	512,003,537	100	629,149,947	100	853,567,733	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatkanya persentase aktifitas guna peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakn oleh pemerintah maupun masyarakat	Persen	10	10	543,400,500	10	559,593,835	10	591,098,968	10	815,716,576	10	1,002,352,528	10	1,359,891,675	GUGUAK PANJANG
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	'%	80	80	615,303,000	85	633,639,029	85	669,312,907	90	923,651,811	90	1,134,983,346	90	1,539,831,905	MANDIANGIN KOTO SELAYAN

	Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	'%	15	15	2,180,510,600	20	2,245,489,816	25	2,371,910,893	30	3,273,237,032	34	4,022,153,665	34	5,456,855,877	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.	Meningkatkan peran koperasi dan UMK dalam menunjang perekonomian kota	Berkembangnya usaha mikro	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	'%	20	25	193,442,900	30	199,207,498	35	210,422,881	40	290,383,575	45	356,823,337	45	484,102,222	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
				Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya program peningkatan usaha ekonomi masyarakat	bln	0	0	195,538,000	0	201,365,032	0	212,701,884	0	293,528,600	0	360,687,943	0	489,345,332	AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat	pelaku	0	0	141,194,000	90	145,401,581	120	153,587,690	90	211,951,013	120	260,445,404	120	353,346,280	GUGUAK PANJANG
				Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	'%	3	3	77,821,500	5	80,140,581	6	84,652,495	8	116,820,444	10	143,548,961	10	194,752,876	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
				Statistik																
	Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pemenuhan Data pembangunan Daerah	'%	66	70	244,655,500	80	251,946,234	85	266,130,807	90	367,260,513	100	451,289,719	100	612,264,762	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD	Persen	10	0	0	20	50,000,000	30	57,500,000	40	60,000,000	50	65,000,000	50		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi statistik daerah	persen	100	100	29,249,800	100	30,121,444	100	31,817,281	100	43,907,848	100	53,953,964	100	73,199,343	Dinas Pertanian
				Kearsipan																
				Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan	'%	100	100	0	100	510,000,000	100	535,000,000	100	560,000,000	100	585,000,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi

				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi	%	100	100	97,268,600	100	100,167,204	100	105,806,618	100	146,013,133	100	179,420,937	100	243,420,386	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
				Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan	%	100	100	0	100	60,000,000	100	52,000,000	100	15,000,000	100	17,500,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.	Menjadikan Bukittinggi sebagai kota pusaka nasional dan dunia	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	%	100	100	47,500,000	100	48,915,500	100	51,669,443	100	71,303,831	100	87,618,147	100	118,871,541	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
				Komunikasi dan Informatika																
	Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)	Kemudahan mendapatkan informasi melalui media elektronik menuju smart city	Persen	80	80	81,000,000	82	1,135,000,000	85	1,090,000,000	87	95,000,000	90	100,000,000	90	1,090,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Persen	80	80	142,000,000	82	146,231,600	85	154,464,439	87	213,160,926	90	261,932,146	90	355,363,342	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Persentase tingkat ketercapaian penyebaran informasi Pemda Bukittinggi kepada masyarakat	%	80	80	2,485,337,800	83	2,559,400,866	85	2,703,495,135	88	3,730,823,287	90	4,584,435,655	90	6,219,703,853	Sekretariat Daerah
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tingkat pencapaian pelayanan informasi kepada publik	%	80	80	419,853,220	81	432,364,846	82	456,706,987	83	630,255,642	84	774,458,133	84	1,050,707,348	Sekretariat Daerah
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya sarana dan prasarana TIK menuju smart city	Persen	80	80	1,034,736,000	82	1,065,571,133	85	1,125,562,788	87	1,553,276,647	90	1,908,666,344	90	2,589,487,628	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat	publikasi	0	12	16,675,000	12	17,171,915	12	18,138,694	12	25,031,397	12	30,758,581	12	41,730,167	GUGUAK PANJANG

				Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat Melalu Media Cetak Dan Elektronik	Publikasi/Tahun	24	24	11,450,000	24	11,791,210	27	12,455,055	27	17,187,976	29	21,120,585	29	28,654,298	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan program komunikasi, informasi dan media massa	'%	100	100	0	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi di masyarakat	bulan	12	12	52,678,000	12	54,247,804	12	57,301,956	12	79,076,699	12	97,169,448	12	131,829,790	GUGUAK PANJANG
		Mewujudkan reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan Telekomunikasi	Persen	80	80	257,000,000	82	264,658,600	85	279,558,879	87	385,791,253	90	474,060,292	90	643,157,598	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Perpustakaan																
	Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan masyarakat	Mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu	Meningkatkan mutu pendidikan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan	'%	100	100	248,249,470	100	255,647,304	100	270,040,247	100	372,655,541	100	457,919,129	100	621,258,883	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
				Pertanian																
	Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.	Meningkatkan peran koperasi dan UMK dalam menunjang perekonomian kota	Berkembangnya usaha mikro	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi	kelompok	10	11	23,763,600	12	24,471,755	13	25,849,515	14	35,672,331	15	43,834,160	15	59,469,805	Dinas Pertanian
	Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarasutamaan gender dan perlindungan anak	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	persen	0	5	64,257,200	5	66,172,065	5	69,897,552	5	96,458,621	5	118,528,354	5	160,807,418	Dinas Pertanian
		Mewujudkan pusat perdagangan dan jasa yang berdaya saing	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	2	2	370,088,300	2	381,116,931	2	402,573,815	2	555,551,864	2	682,662,131	2	926,167,713	Dinas Pertanian

				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian	persen	2	2	155,835,200	2	160,479,089	2	169,514,062	2	233,929,405	2	287,452,453	2	389,986,743	Dinas Pertanian
		Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)	persen	70	73	306,133,100	78	315,255,866	80	333,004,772	82	459,546,585	85	564,690,844	85	766,116,067	Dinas Pertanian
				Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persen	100	100	139,098,800	100	143,243,944	100	151,308,578	100	208,805,838	100	256,580,614	100	348,102,919	Dinas Pertanian
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	1	2	43,233,800	2	44,522,167	2	47,028,765	2	64,899,696	2	79,748,747	2	108,195,124	Dinas Pertanian
				Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	kwintal/Ha	66.7	67	87,987,400	67	90,609,425	67	95,710,735	67	132,080,814	67	162,300,905	67	220,193,638	Dinas Pertanian
				Kehutanan																
	Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	Terpenuhiny a RTH	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan luas lahan yang dihijaukan	persen	2	2	61,740,800	2	63,580,676	2	67,160,268	2	92,681,170	2	113,886,621	2	154,509,979	Dinas Pertanian
				Pariwisata																
	Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan masyarakat	Mewujudkan pariwisata yang berdaya saing	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	meningkatnya jumlah PAD yang dikelola Dinas Pariwisata	rupiah (Milyar)	8041	10,086	8,491,764,000	10,091	81,424,000,000	10,097	11,960,000,000	10,112	12,326,000,000	10,127	13,153,000,000	10,127		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	meningkatnya jumlah wisatawan	orang	460905	483,950	2,042,367,950	508,148	2,103,230,515	533,555	2,221,642,393	560,233	3,065,866,502	588,245	3,767,336,758	588,245	5,111,145,779	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
				Kelautan dan Perikanan																

		Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	persen	2	2	77,740,500	2	80,057,167	2	84,564,385	2	116,698,852	2	143,399,549	2	194,550,168	Dinas Pertanian
				Program Pengembangan Perikanan budidaya	Jumlah Produksi ikan	ton	355	351	220,693,700	352	227,270,372	353	240,065,694	354	331,290,658	355	407,089,961	355	552,298,950	Dinas Pertanian
				Program Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan	Meningkatnya kualitas SDM Perikanan		0	0	15,650,500	0	16,116,885	0	17,024,266	0	23,493,486	0	28,868,796	0	39,166,296	Dinas Pertanian
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Daya Saing Produk Perikanan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	persen	40	10	0	10	70,000,000	10	75,000,000	10	80,000,000	10	85,000,000	10		Dinas Pertanian
				Perdagangan																
		Mewujudkan pusat perdagangan dan jasa yang berdaya saing	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat Pengawasan dan Ketertiban Pasar	%	100	100	374,907,000	100	386,079,229	100	407,815,489	100	562,785,375	100	691,550,669	100	938,226,792	Dinas Pengelolaan Pasar
				Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Tingkat Sarana dan Prasarana yang dikembangkan	$	100	100	2,393,450,000	100	2,464,774,810	100	2,603,541,632	100	3,592,887,452	100	4,414,940,101	100	5,989,749,235	Dinas Pengelolaan Pasar
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha	perusahaan	2553	300	554,000,000	350	570,509,200	400	602,628,868	450	831,627,838	500	1,021,904,287	500	1,386,417,546	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
				Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri	IKM	0	2	250,000,000	2	257,450,000	2	271,944,435	2	375,283,320	2	461,148,144	2	625,639,687	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
				Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL	lokasi	0	0	120,000,000	1	123,576,000	1	130,533,329	1	180,135,994	1	221,351,109	1	300,307,050	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah komoditas peredaran barang yang di awasi	jenis	20	20	705,000,000	20	726,009,000	20	766,883,307	22	1,058,298,963	22	1,300,437,766	22	1,764,303,917	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
				Industri																
	Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.	Mewujudkan perekonomian kota yang sehat	Berkembangnya industri kecil menengah	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM	%	1	2	616,750,000	2	635,129,150	2	670,886,921	2	925,823,951	2	1,137,652,471	2	1,543,453,108	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang	unit usaha	0	5	886,125,000	10	912,531,525	15	963,907,050	20	1,330,191,729	30	1,634,539,596	30	2,217,579,870	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
				Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya nilai produksi IKM	%	4.1113E+11	2	47,527,000	2	48,943,305	2	51,698,813	2	71,344,361	2	87,667,951	2	118,939,110	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
				Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal	&	476	7	30,000,000	7	30,894,000	7	32,633,332	7	45,033,998	7	55,337,777	7	75,076,762	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan

	Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan masyarakat	Mewujudkan pusat perdagangan dan jasa yang berdaya saing	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB	Persen	0.07	0	185,000,000	0	190,513,000	0	201,238,882	0	277,709,657	0	341,249,627	0	462,973,368	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
				Persandian																
	Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan TIK OLeh SKPD dan Layanan Kepada Publik dalam mewujudkan smart city	Persen	80	81	531,000,000	82	535,000,000	83	1,055,000,000	84	1,056,000,000	85	567,000,000	85	1,056,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	%	80	80	574,865,000	82	591,995,977	85	625,325,351	88	862,948,984	90	1,060,391,711	90	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
				Keuangan																
	Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.	Meningkatnya penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi	opini	3	3	4,841,271,107	3	4,985,540,986	3	5,266,226,943	3	7,267,393,182	3	8,930,172,742	3	12,115,565,359	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
				Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																
	Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang difasilitasi mengikuti pendidikan kedinasan	orang	1500	550	2,545,102,500	550	2,620,946,555	530	2,768,505,846	535	3,820,538,067	550	4,694,677,177	550	6,369,268,525	Badan Kepegawaian Daerah
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai sesuai standar kompetensi	%	60	60	325,945,100	70	335,658,264	80	354,555,824	90	489,287,037	95	601,235,912	95	815,696,761	Badan Kepegawaian Daerah
				Bidang Pengawasan																

				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	%	100	100	319,019,650	100	328,526,436	100	347,022,474	100	478,891,014	100	588,461,278	100	798,365,416	Inspektorat Daerah
		Mewujudkan reformasi birokrasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	%	100	100	1,147,785,210	100	1,181,989,209	100	1,248,535,202	100	1,722,978,578	100	2,117,196,077	100	2,872,399,918	Inspektorat Daerah
				Bidang Penunjang Lainnya																
	Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan ketertiban, ketentraman dan keamanan kota	Meningkatnya jumlah penanganan gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan oleh masyarakat	kegiatan	5	5	416,710,000	5	429,127,958	5	453,287,862	5	625,537,250	5	768,660,172	5	1,042,841,256	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program pendidikan politik masyarakat	Efektivitas kegiatan pendidikan politik masyarakat	kegiatan	7	3	1,088,151,500	3	1,120,578,415	3	1,183,666,979	3	1,633,460,432	3	2,007,196,178	3	2,723,163,055	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda	% kegiatan	0	100	173,906,100	100	179,088,502	100	189,171,184	100	261,056,235	100	320,785,901	100	435,210,232	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

Tabel 8.1
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2016-2021

No	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
						281,230,131,066		**485,352,347,325**		**460,195,028,495**		**518,090,548,396**		**583,503,208,749**		**657,726,329,558**	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	465,300,000			100	300,000,000	100	60,000,000	100	75,000,000	100	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam menggunakan atribut kepegawaian	'%	100	100	18,000,000	100	18,536,400	100	19,579,999	100	27,020,399	100	33,202,666	100	45,046,057	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	656,988,500	100	676,566,757	100	714,657,466	100	986,227,303	100	1,211,876,110	100	1,644,152,318	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	11,550,000	100	11,894,190	100	12,563,833	100	17,338,089	100	21,305,044	100	28,904,554	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	865,000,000	100	890,777,000	100	940,927,745	100	1,298,480,288	100	1,595,572,578	100	2,164,713,317	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	22,150,000	100	22,810,070	100	24,094,277	100	33,250,102	100	40,857,726	100	55,431,676	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	683,530,700	100	703,899,915	100	743,529,480	100	1,026,070,682	100	1,260,835,655	100	1,710,575,733	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,760,000	100	4,901,848	100	5,177,822	100	7,145,394	100	8,780,261	100	11,912,180	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,987,400	100	11,314,825	100	11,951,849	100	16,493,552	100	20,267,276	100	27,496,614	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	257,387,100	100	265,057,236	100	279,979,958	100	386,372,342	100	474,774,334	100	644,126,339	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	12,150,000	100	12,512,070	100	13,216,500	100	18,238,769	100	22,411,800	100	30,406,089	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	309,798,600	100	319,030,598	100	336,992,021	100	465,048,989	100	571,452,198	100	775,289,196	Kantor Lingkungan Hidup

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	2,300,000	100	2,368,540	100	2,501,889	100	3,452,607	100	4,242,563	100	5,755,885	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	21,300,000	100	21,934,740	100	23,169,666	100	31,974,139	100	39,289,822	100	53,304,501	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	6,300,000	100	6,487,740	100	6,853,000	100	9,457,140	100	11,620,933	100	15,766,120	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	230,200,600	100	237,060,578	100	250,407,088	100	345,561,782	100	424,626,318	100	576,090,525	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	'%	100	100	353,159,200	100	363,683,344	100	384,158,716	100	530,139,029	100	651,434,838	100	883,801,645	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	1,910,300	100	1,967,227	100	2,077,982	100	2,867,615	100	3,523,725	100	4,780,638	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja	'%	100	100	17,950,000	100	18,484,910	100	19,525,610	100	26,945,342	100	33,110,437	100	44,920,930	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang berpakaian sesuai aturan	'%	100	100	18,600,000	100	19,154,280	100	20,232,666	100	27,921,079	100	34,309,422	100	46,547,593	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perentasee laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	2,020,000	100	2,080,196	100	2,197,311	100	3,032,289	100	3,726,077	100	5,055,169	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	65,000,000	100	66,937,000	100	70,705,553	100	97,573,663	100	119,898,517	100	162,666,319	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	19,000,000	100	19,566,200	100	20,667,777	100	28,521,532	100	35,047,259	100	47,548,616	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	343,857,700	100	354,104,659	100	374,040,752	100	516,176,237	100	634,277,361	100	860,524,095	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	132,000,000	100	135,933,600	100	143,586,662	100	198,149,593	100	243,486,220	100	330,337,755	Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,513,220,400	100	6,707,314,368	100	7,084,936,167	100	9,777,211,910	100	12,014,237,995	100	16,299,716,688	Sekretariat Daerah

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	90	90	111,000,000	90	114,307,800	90	120,743,329	90	166,625,794	95	204,749,776	95	277,784,021	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	3,237,400,000	100	3,333,874,520	100	3,521,571,655	100	4,859,768,885	100	5,971,684,005	100	8,101,783,690	Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersedian Layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	5,111,604,400	100	5,263,930,211	100	5,560,289,482	100	7,673,199,485	100	9,428,827,527	100	12,792,090,306	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaiakan kinerja dan keuangann yang tersesusun tepat waktu	'%	100	100	78,666,400	100	81,010,659	100	85,571,559	100	118,088,751	100	145,107,457	100	196,867,287	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana & Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,260,897,000	100	32,280,646,000	100	1,601,292,000	100	2,436,344,000	100	2,867,171,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran & Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	169,750,000	100	174,808,550	100	184,650,271	100	254,817,374	100	313,119,590	100	424,809,347	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	46,800,000	100	48,194,640	100	50,907,998	100	70,253,038	100	86,326,933	100	117,119,749	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kesediaan layanan administrasi perkantoran		100	100	7,893,622,000	100	8,128,851,936	100	8,586,506,300	100	11,849,378,693	100	14,560,516,538	100	19,754,252,788	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persentase	100	100	9,377,500	100	9,656,950	100	10,200,636	100	14,076,877	100	17,297,667	100	23,467,745	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persentase	100	100	1,910,080,000	100	1,967,000,384	100	2,077,742,506	100	2,867,284,658	100	3,523,319,387	100	4,780,087,413	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	635,835,000	100	654,782,883	100	691,647,159	100	954,473,080	100	1,172,856,521	100	1,591,214,441	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	60	60	1,342,932,360	70	1,382,951,744	80	1,460,811,928	90	2,015,920,460	95	2,477,163,061	95	3,360,767,125	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	122,654,500	100	126,309,604	100	133,420,835	100	184,120,752	100	226,247,580	100	306,950,092	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	482,769,475	100	497,156,005	100	525,145,888	100	724,701,326	100	890,512,989	100	1,208,158,973	Badan Kepegawaian Daerah

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	16,450,000	100	16,940,210	100	17,893,944	100	24,693,642	100	30,343,548	100	41,167,091	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	'%	100	100	878,892,100	100	905,083,085	100	956,039,262	100	1,319,334,182	100	1,621,197,843	100	2,199,479,113	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	100	214,300,000	100	220,686,140	100	233,110,770	100	321,692,862	100	395,296,189	100	536,298,340	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persentase	100	100	19,350,000	100	19,926,630	100	21,048,499	100	29,046,929	100	35,692,866	100	48,424,512	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	438,888,200	100	451,967,068	100	477,412,814	100	658,829,684	100	809,569,915	100	1,098,343,504	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase	100	100	16,165,900	100	16,647,644	100	17,584,906	100	24,267,171	100	29,819,499	100	40,456,114	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,698,700,000	100	2,779,121,260	100	2,935,585,787	100	4,051,108,386	100	4,978,001,985	100	6,753,655,293	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedispilanan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pagawai	'%	100	100	150,000,000	100	154,470,000	100	163,166,661	100	225,169,992	100	276,688,886	100	375,383,812	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesedian Layan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,153,130,000	100	2,217,293,274	100	2,342,126,885	100	3,232,135,102	100	3,971,647,613	100	5,388,334,317	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,900,000	100	11,224,820	100	11,856,777	100	16,362,353	100	20,106,059	100	27,277,890	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	1,446,300,000	100	1,489,399,740	100	1,573,252,945	100	2,171,089,065	100	2,667,834,243	100	3,619,450,717	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persen	100	100	225,225,000	100	231,936,705	100	244,994,741	100	338,092,743	100	415,448,363	100	563,638,794	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	5,562,692,900	100	5,728,461,148	100	6,050,973,511	100	8,350,343,445	100	10,260,902,026	100	13,920,965,778	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persetase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	100	11,358,000	100	11,696,468	100	12,354,980	100	17,049,872	100	20,950,882	100	28,424,062	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan Administrasi	'%	100	100	1,480,784,350	100	1,524,911,724	100	1,610,764,254	100	2,222,854,670	100	2,731,443,819	100	3,705,749,829	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capain kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	5,051,400	100	5,201,932	100	5,494,800	100	7,582,825	100	9,317,775	100	12,641,425	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	86,000,000	100	88,562,800	100	93,548,886	100	129,097,462	100	158,634,962	100	215,220,052	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	59,400,000	100	61,170,120	100	64,613,998	100	89,167,317	100	109,568,799	100	148,651,990	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	474,236,200	100	488,368,439	100	515,863,582	100	711,891,743	100	874,772,574	100	1,186,803,951	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,900,000	100	5,046,020	100	5,330,111	100	7,355,553	100	9,038,504	100	12,262,538	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	102,983,800	100	106,052,717	100	112,023,485	100	154,592,410	100	189,963,153	100	257,723,010	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	23,000,000	100	23,685,400	100	25,018,888	100	34,526,065	100	42,425,629	100	57,558,851	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	418,985,000	100	431,470,753	100	455,762,556	100	628,952,328	100	772,856,620	100	1,048,534,577	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	107,580,000	100	110,785,884	100	117,023,129	100	161,491,918	100	198,441,269	100	269,225,270	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,367,447,130	100	2,437,997,054	100	2,575,256,289	100	3,553,853,678	100	4,366,975,400	100	5,924,675,525	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu	'%	100	100	14,575,800	100	15,010,159	100	15,855,231	100	21,880,218	100	26,886,412	100	36,476,796	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	65,100,000	100	67,039,980	100	70,814,331	100	97,723,777	100	120,082,977	100	162,916,574	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam Kehadiran dan pemakaian atribut	'%	100	100	33,300,000	100	34,292,340	100	36,222,999	100	49,987,738	100	61,424,933	100	83,335,206	Dinas Pertanian

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	907,064,550	100	934,095,074	100	986,684,626	100	1,361,624,784	100	1,673,164,535	100	2,269,982,324	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun waktu	'%	100	100	1,706,000	100	1,756,839	100	1,855,749	100	2,560,933	100	3,146,875	100	4,269,365	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	182,815,000	100	188,262,887	100	198,862,088	100	274,429,681	100	337,219,192	100	457,505,277	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,426,417,200	100	1,468,924,433	100	1,551,624,878	100	2,141,242,332	100	2,631,158,577	100	3,569,692,842	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuanagan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	3,878,500	100	3,994,079	100	4,218,946	100	5,822,145	100	7,154,252	100	9,706,174	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	173,300,000	100	178,464,340	100	188,511,882	100	260,146,398	100	319,667,893	100	433,693,431	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	unit	4	4	43,620,000	4	44,919,876	4	47,448,865	4	65,479,434	4	80,461,128	4	109,161,613	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	stel	40	40	40,500,000	40	41,706,900	40	44,054,998	40	60,795,898	40	74,705,999	40	101,353,629	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	bln	12	12	337,561,200	12	347,620,524	12	367,191,559	12	506,724,352	12	622,662,883	12	844,766,734	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen yang tersusun dengan tepat waktu	dokumen	3	3	5,980,000	3	6,158,204	3	6,504,911	3	8,976,777	3	11,030,664	3	14,965,301	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	874,400,000	100	900,457,120	100	951,152,856	100	1,312,590,941	100	1,612,911,748	100	2,188,237,369	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	40,500,000	100	41,706,900	100	44,054,998	100	60,795,898	100	74,705,999	100	101,353,629	GUGUAK PANJANG
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	339,733,200	100	349,857,249	100	369,554,212	100	509,984,813	100	626,669,339	100	850,202,292	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan YangTersusun Tepat Waktu	'%	100	100	7,989,000	100	8,227,072	100	8,690,256	100	11,992,554	100	14,736,450	100	19,992,942	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	48,600,000	100	50,048,280	100	52,865,998	100	72,955,077	100	89,647,199	100	121,624,355	MANDIANGIN KOTO SELAYAN

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	394,870,450	100	406,637,589	100	429,531,286	100	592,753,174	100	728,375,101	100	988,186,499	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	22,114,000	100	22,772,997	100	24,055,117	100	33,196,061	100	40,791,320	100	55,341,584	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	0	100	378,400,000	100	389,676,320	100	411,615,097	100	568,028,834	100	697,993,831	100	946,968,230	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	108,000,000	100	111,218,400	100	117,479,996	100	162,122,394	100	199,215,998	100	270,276,345	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,070,114,000	100	1,102,003,397	100	1,164,046,188	100	1,606,383,740	100	1,973,924,340	100	2,678,023,152	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	55,500,000	100	57,153,900	100	60,371,665	100	83,312,897	100	102,374,888	100	138,892,011	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	410,500,000	100	422,732,900	100	446,532,762	100	616,215,212	100	757,205,252	100	1,027,300,366	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,668,453,440	100	1,718,173,353	100	1,814,906,512	100	2,504,570,987	100	3,077,616,829	100	4,175,402,752	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu	'%	100	100	9,342,400	100	9,620,804	100	10,162,455	100	14,024,188	100	17,232,922	100	23,379,905	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	740,875,000	100	762,953,075	100	805,907,333	100	1,112,152,120	100	1,366,612,525	100	1,854,083,212	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	153,000,000	100	157,559,400	100	166,429,994	100	229,673,392	100	282,222,664	100	382,891,488	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	65,250,000	100	67,194,450	100	70,977,498	100	97,948,947	100	120,359,666	100	163,291,958	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,425,988,650	100	6,617,483,112	100	6,990,047,411	100	9,646,265,427	100	11,853,330,957	100	16,081,414,109	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	39,792,100	100	40,977,905	100	43,284,961	100	59,733,246	100	73,400,212	100	99,582,068	Dinas Pekerjaan Umum

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	4,770,756,100	80	4,912,924,632	85	5,189,522,289	90	7,161,540,758	95	8,800,101,284	95	11,939,097,412	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan dalam atribut pegawai	'%	80	85	40,000,000	90	41,192,000	95	43,511,110	100	60,045,331	100	73,783,703	100	100,102,350	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan adm perkantoran	'%	75	75	514,552,000	75	529,885,650	80	559,718,212	85	772,411,132	90	949,138,799	90	1,287,696,609	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	85	90	13,250,000	95	13,644,850	100	14,413,055	100	19,890,016	100	24,440,852	100	33,158,903	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	26,300,000	80	27,083,740	85	28,608,555	90	39,479,805	95	48,512,785	95	65,817,295	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen	90	91	153,000,000	92	157,559,400	93	166,429,994	94	229,673,392	95	282,222,664	95	382,891,488	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	90	91	1,268,502,000	92	1,306,303,360	93	1,379,848,239	94	1,904,190,569	95	2,339,869,372	95	3,174,500,777	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	Persen	90	91	13,271,000	92	13,666,476	93	14,435,898	94	19,921,540	95	24,479,588	95	33,211,457	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90	91	331,300,000	92	341,172,740	93	360,380,765	94	497,325,456	95	611,113,520	95	829,097,713	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.	'%	100	100	19,300,000	100	19,875,140	100	20,994,110	100	28,971,872	100	35,600,637	100	48,299,384	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	6,750,000	100	6,951,150	100	7,342,500	100	10,132,650	100	12,451,000	100	16,892,272	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,086,100	100	10,386,666	100	10,971,435	100	15,140,580	100	18,604,745	100	25,241,058	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	390,950,000	100	402,600,310	100	425,266,707	100	586,868,056	100	721,143,468	100	978,375,342	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	19,800,000	100	20,390,040	100	21,537,999	100	29,722,439	100	36,522,933	100	49,550,663	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layananan administrasi perkantoran	'%	100	100	407,394,800	100	419,535,165	100	443,154,995	100	611,553,893	100	751,477,424	100	1,019,529,421	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	dokumen	0	100	5,100,000	100	5,251,980	100	5,547,666	100	7,655,780	100	9,407,422	100	12,763,050	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	'%	100	100	2,150,000	100	2,214,070	100	2,338,722	100	3,227,437	100	3,965,874	100	5,380,501	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	11,300,000	100	11,636,740	100	12,291,888	100	16,962,806	100	20,843,896	100	28,278,914	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	14,850,000	100	15,292,530	100	16,153,499	100	22,291,829	100	27,392,200	100	37,162,997	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan layanan adminidtrasi perkantoran	'%	100	100	328,776,550	100	338,574,091	100	357,635,813	100	493,537,421	100	606,458,783	100	822,782,631	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	20	30	70,000,000	40	72,086,000	50	76,144,442	60	105,079,330	70	129,121,480	70	175,179,112	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	100	100	82,950,000	100	85,421,910	100	90,231,164	100	124,519,006	100	153,008,954	100	207,587,248	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tercapaianya pentaan jabatan dan informasi dibidang sumber daya aparatur	'%	90	90	120,000,000	91	123,576,000	92	130,533,329	93	180,135,994	94	221,351,109	94	300,307,050	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	persen	15	0	0	20	50,000,000	25	80,000,000	30	100,000,000	35	120,000,000	35		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	198,880,150	100	204,806,778	100	216,337,400	100	298,545,612	100	366,852,848	100	497,709,259	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	100	230,000,000	100	236,854,000	100	250,188,880	100	345,260,655	100	424,256,292	100	575,588,512	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	0	0	70	83,994,005	70	250,000,000	70	252,500,000	70	280,000,000	70		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Ketersediaan SDM sesuai Bidang Keahlian	'%	70	0	0	70	100,000,000	75	110,000,000	80	121,000,000	85	133,100,000	85		Dinas Pekerjaan Umum

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha	persen	50	50	0	60	70,000,000	65	120,000,000	70	120,000,000	75	125,000,000	75		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Pendidikan																
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	'% kegiatan	0	100	7,796,131,800	100	8,028,456,528	100	8,480,458,630	100	11,703,032,910	100	14,380,686,839	100	19,510,277,835	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya kegiatan untuk Pendidikan Anak Usia Dini	'%	0	100	505,396,950	100	520,457,779	100	549,759,552	100	758,668,182	100	932,251,462	100	1,264,785,558	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Menengah	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SMP	nilai	0	0	4,914,299,720	0	5,060,745,852	0	5,345,665,843	0	7,377,018,863	0	9,064,880,779	0	12,298,323,753	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Luar Biasa	Angka putus sekolah	'%	0.25	0	60,680,000	0	62,488,264	0	66,006,353	0	91,088,768	0	111,929,878	0	151,855,265	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SD	nilai	70	70	6,976,936,083	75	7,184,848,778	80	7,589,355,764	85	10,473,310,955	90	12,869,604,501	90	17,460,192,427	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Non Formal	Optimalisasi pelayanan non formal	'%	0	100	291,362,100	100	300,044,691	100	316,937,207	100	437,373,345	100	537,444,367	100	729,150,772	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya manjemen pelayanan pendidikan	'%	100	100	500,000,000	100	514,900,000	100	543,888,870	100	750,566,641	100	922,296,288	100	1,251,279,374	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Kesehatan																
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	'%	85	85	0	86	120,000,000	87	150,000,000	88	160,000,000	90	180,000,000	90		Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Ratio tenaga paramedis per satuan penduduk (Bidan dan perawat)	tenaga paramedis/satuan penduduk	12.95	13	0	13	145,000,000	13	152,000,000	13	159,000,000	13	166,000,000	13		Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	'%	100	100	6,459,177,000	100	6,651,660,475	100	7,026,148,959	100	9,696,085,564	100	11,914,549,941	100	16,164,469,905	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	'%	5972	65	504,635,400	65	519,673,535	70	548,931,155	70	757,524,994	75	930,846,712	75	1,262,879,735	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada rumah sakit	'%	25	25	0	25	0	25	0	25	8,000,000,000	25	12,000,000,000	25		Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	unit	0	0	68,000,000	1	70,085,000,000	0	40,085,000,000	0	0	0	0	0		Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pengawasan dan pengendalian makanan yang memenuhi syarat	'%	90	90	38,000,000	100	39,132,400	100	41,335,554	100	57,043,065	100	70,094,518	100	95,097,232	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tingkat Pemenuhan Kualitas lingkungan	'%	40	40	208,000,000	41	214,198,400	42	226,257,770	43	312,235,722	44	383,675,256	44	520,532,220	Dinas Kesehatan

	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	'%	100	100	2,617,063,925	100	2,695,052,430	100	2,846,783,882	100	3,928,561,757	100	4,827,416,687	100	6,549,356,219	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD	'%	0	60	134,639,000	100	138,651,242	100	146,457,307	100	202,111,084	100	248,354,100	100	336,942,007	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ()	puskes mas	0	2	734,639,000	5	756,531,242	7	799,123,951	7	1,102,791,053	7	1,355,109,645	7	1,838,477,256	Dinas Kesehatan
	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan	'%	20	80	410,000,000	85	422,218,000	90	445,988,873	95	615,464,645	95	756,282,956	95	1,026,049,087	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	puskes mas	0	0	20,000,000	1	20,596,000	1	21,755,555	2	30,022,666	3	36,891,852	3	50,051,175	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas. Pustu dan Jaringannya yang dapat melaksanakan pelayanan kesehatan	'%	100	100	4,270,840,000	100	2,900,000,000	100	13,400,000,000	100	3,030,000,000	100	4,391,000,000	100		Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi lebih	'%	0	15	373,000,000	13	384,115,400	13	405,741,097	12	559,922,714	10	688,033,031	10	933,454,413	Dinas Kesehatan
	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan	'%	90	90	2,574,920,000	91	2,651,652,616	92	2,800,940,658	93	3,865,298,108	95	4,749,678,316	95	6,443,888,571	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	'%	83.8	85	193,564,000	86	199,332,207	87	210,554,610	88	290,565,362	90	357,046,717	90	484,405,281	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita	'%	57.57	60	744,750,000	70	766,943,550	80	810,122,472	90	1,117,969,011	90	1,373,760,321	90	1,863,780,627	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	100	100	368,671,800	100	379,658,220	100	401,032,977	100	553,425,509	100	680,049,265	100	922,622,838	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pelaksanaan lingkungan sehat dikecamatan dan kelurahan	bln	0	0	25,000,000	0	25,745,000	0	27,194,444	0	37,528,332	0	46,114,814	0	62,563,969	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	'%	12.5	13	680,250,000	20	700,521,450	30	739,960,808	40	1,021,145,915	50	1,254,784,100	50	1,702,365,588	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	'%	65	65	2,300,000,000	70	360,000,000	75	7,700,000,000	80	23,365,000,000	85	23,046,500,000	85		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	'%	10	10	228,000,000	20	234,794,400	40	248,013,325	60	342,258,388	75	420,567,107	75	570,583,394	Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap	'%	98	98	4,050,000,000	99	4,170,690,000	100	4,405,499,847	100	6,079,589,789	100	7,470,599,933	100	10,135,362,928	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Pembangunan gedung	Persentase Gedung Negara dan Swasta yang Laik Fugsi	'%	0	2	150,000,000	5	154,470,000	20	163,166,661	30	225,169,992	40	276,688,886	40	375,383,812	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengendalian banjir	Pengurangan titik genangan	titik	8	8	257,522,800	6	265,196,979	4	280,127,569	2	386,576,046	0	475,024,645	0	644,465,936	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	'%	48	48	943,071,400	55	2,940,000,000	70	12,104,083,333	90	23,785,170,833	100	23,937,604,375	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	'%	45	45	2,500,000,000	50	2,574,500,000	60	2,719,444,350	70	3,752,833,203	80	4,611,481,440	80	6,256,396,869	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	'%	98	0	0	98	488,000,000	99	561,200,000	100	3,420,000,000	100	3,762,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang terpelihara / normalisasi	'%	47	0	0	55	1,000,000,000	65	1,100,000,000	70	1,210,000,000	75	1,331,000,000	75		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	'%	72	72	4,819,443,900	80	4,963,063,328	85	5,242,483,794	90	7,234,627,635	95	8,889,910,438	95	12,060,941,491	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	'%	40	50	197,000,000	60	202,870,600	65	214,292,215	70	295,723,256	75	363,384,737	75	493,004,073	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota	'%	60	60	464,726,200	65	478,575,041	70	505,518,816	75	697,615,965	80	857,230,498	80	1,163,004,617	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	'%	40	50	862,629,700	70	888,336,065	75	938,349,386	80	1,294,922,152	85	1,591,200,340	85	2,158,781,502	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota	'%	60	60	0	65	250,000,000	70	0	0	0	0	0	0		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat - alat berat ke PU an / Kebinamargaan	'%	30	0	0	50	4,000,000,000	65	4,050,000,000	80	4,105,000,000	90	1,665,500,000	90		Dinas Pekerjaan Umum
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik	'%	85	85	1,009,556,000	88	1,039,640,769	90	1,098,172,544	93	1,515,478,111	95	1,862,219,503	95	2,526,473,199	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik	'%	85	85	4,723,190,700	88	4,863,941,783	90	5,137,781,705	93	7,090,138,753	95	8,712,362,500	95	11,820,062,204	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan informasi / data base jalan	'%	20	0	0	40	1,200,000,000	0	0	80	300,000,000	100	330,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																

	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana areal pemakaman yang memadai	'%	80	80	139,484,600	80	143,641,241	85	151,728,243	85	209,384,975	90	257,292,258	90	349,068,406	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	% Jalan dengan riol yang baik	'%	40	40	3,804,507,000	55	3,917,881,309	70	4,138,458,026	90	5,711,072,076	100	7,017,765,367	100	9,521,002,274	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Pembangunan Rusunawa yang layak huni	unit	0	0	0	0	0	1	15,000,000,000	1	15,000,000,000	0	0	0		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	'%	50	60	79,649,400	80	82,022,952	100	86,640,844	100	119,564,365	100	146,920,692	100	199,327,303	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	% Kesiap siangaan dan Tanggap terhadap Pencegahan Kebakatan Meningkat	'%	50	60	1,950,000,000	70	2,008,110,000	75	2,121,166,593	80	2,927,209,898	90	3,596,955,523	90	4,879,989,558	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Perencanaan Pembangunan																
	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	'%	100	100	2,214,373,100	100	2,280,361,418	100	2,408,745,766	100	3,324,069,157	100	4,084,616,181	100	5,541,598,772	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	'%	100	100	84,875,500	100	87,404,790	100	92,325,680	100	127,409,438	100	156,560,717	100	212,405,925	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan sosial budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	'%	100	100	164,296,900	100	169,192,948	100	178,718,511	100	246,631,545	100	303,060,842	100	411,162,644	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	'%	100	100	574,865,000	100	591,995,977	100	625,325,351	100	862,948,984	100	1,060,391,711	100	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum	'%	60	100	125,647,500	100	129,391,796	100	136,676,554	100	188,613,644	100	231,768,446	100	314,440,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Pemenuhan Pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota	'%	60	65	316,265,200	70	325,689,903	75	344,026,244	80	474,756,217	85	583,380,440	85	791,472,243	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Peningkatan kualitas perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana	'%	50	50	0	60	75,000,000	65	85,000,000	70	100,000,000	75	110,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Perhubungan																
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berwawasan lingkungan	Persen	70	0	0	72	7,800,000,000	73	1,625,000,000	74	4,300,000,000	75	1,250,000,000	75		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Optimalisasi Peningkatan Pengoperasian Kendaraan	Persen	80	81	180,000,000	82	185,364,000	83	195,799,993	84	270,203,991	85	332,026,664	85	450,460,575	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas lalu ,intas yang memadai dan berwawasan lingkungan	Persen	70	71	5,351,566,000	72	5,511,042,667	73	5,821,314,369	74	8,033,413,829	75	9,871,458,913	75	13,392,608,308	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

	Program peningkatan pelayanan angkutan	Terwujudnya Angkutan Yang Selamat, Aman, Nyaman, Terjangkau dan Terpadu	Persen	80	81	51,379,000	82	52,910,094	83	55,888,933	84	77,126,727	85	94,773,322	85	128,578,966	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terciptanya Lalu Lintas Yang Aman, Tertib dan Lancar	Persen	70	71	763,000,000	72	785,737,400	73	829,974,416	74	1,145,364,694	75	1,407,424,135	75	1,909,452,325	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Persen	70	71	260,000,000	72	267,748,000	73	282,822,212	74	390,294,653	75	479,594,070	75	650,665,274	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Lingkungan Hidup																
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	Persentase	8	10	1,233,986,000	12	1,270,758,783	13	1,342,302,502	14	1,852,377,453	15	2,276,201,414	15	3,088,122,459	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH/ Non Hijau	'%	7.78	8	600,000,000	8	2,000,000,000	8	5,700,000,000	9	6,420,000,000	9	4,662,000,000	9		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase kelompok masyarakat yang memahami pengelolaan RTH	'%	10	20	0	30	0	40	110,000,000	50	115,000,000	60	120,000,000	60		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemenuhan RTH	'%	20	20	0	22	100,000,000	25	120,000,000	28	140,000,000	30	0	30		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan/pengelolaan persampahan	Persen	90	90	5,799,341,500	90	5,972,161,877	100	6,308,394,590	100	8,705,584,535	100	10,697,422,276	100	14,513,192,802	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup	'%	50	60	451,509,800	70	464,964,792	80	491,142,310	90	677,776,388	95	832,851,625	95	1,129,929,800	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	'%	80	70	424,576,950	60	437,229,343	50	461,845,355	40	637,346,590	30	783,171,490	30	1,062,528,760	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan pengendalian	'%	50	55	0	60	380,000,000	65	1,055,000,000	70	1,055,000,000	75	1,055,000,000	75		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	'%	0	0	0	50	0	55	270,000,000	60	175,000,000	65	180,000,000	65		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Informasi Lingkungan Hidup	'%	0	0	0	60	100,000,000	65	120,000,000	70	140,000,000	75	160,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pertanahan																
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunan tanah	'%	80	80	591,580,000	81	609,209,084	82	643,507,555	83	888,040,426	84	1,091,224,076	84	1,480,463,704	Sekretariat Daerah
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah	'%	90	90	151,928,000	91	2,152,000,000	92	154,000,000	93	2,156,500,000	94	158,500,000	94	2,156,500,000	Sekretariat Daerah
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat capaian pelayanan administrasi kependudukan	'%	67	70	662,010,550	75	681,738,464	80	720,120,340	85	993,766,069	90	1,221,139,746	90	1,656,720,293	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi dan kelengkapan data kependudukan	'%	0	0	0	85	257,100,000	90	139,760,000	95	127,366,000	100	114,171,000	100		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang	'%	70	70	345,140,000	70	355,425,172	70	375,435,609	70	518,101,141	70	636,642,682	70	863,733,126	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penurunan Kasus KDRT dan TPPO	'%	50	50	0	50	0	50	200,000,000	50	205,000,000	50	210,000,000	50		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kesejahteraan perempuan	'%	0	35	0	30	200,000,000	25	310,000,000	20	320,000,000	15	320,000,000	15		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tingkat kemiskinan menurun menjadi 2.84 %	'%	4.58	4	352,400,000	4	362,901,520	3	383,332,876	3	528,999,368	3	650,034,424	3	881,901,703	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	100 % data akurat	'%	80	85	115,152,000	88	118,583,530	90	125,259,782	93	172,858,500	95	212,408,524	95	288,174,645	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program pelayanan kontrasepsi	Tercapainya program KB	'%	75	75	0	75	21,000,000	80	160,000,000	80	170,000,000	80	25,000,000	80		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 % Kelompok Kerja paham fungsi keluarga	'%	100	100	0	100	0	100	45,000,000	100	50,000,000	100	0	100		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75 % sekolah dan perguruan tinggi memiliki PIK R/M	'%	25	35	209,025,650	45	215,254,614	55	227,373,449	65	313,775,360	75	385,567,162	75	523,098,969	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Keluarga Berencana	Jumlah PUS ber KB 80 %	'%	1.77	2	1,463,946,000	2	1,507,571,591	2	1,592,447,871	1	2,197,578,062	1	2,700,383,923	1	3,663,610,869	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Peningkatan Tingkat Tahapan Kelompok Kegiatan	tingkat	0	0	71,247,000	0	73,370,161	0	77,500,901	0	106,951,243	0	131,421,687	0	178,299,803	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase Kelurahan yang memiliki WPA (Warga Peduli AIDS)	'%	8	24	465,000,000	24	478,857,000	30	505,816,649	40	698,026,976	50	857,735,548	50	1,163,689,818	Dinas Kesehatan
	Sosial																
	Program pembinaan anak terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	'%	32	35	0	37	100,000,000	40	100,000,000	42	100,000,000	45	100,000,000	45		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	'%	60	65	1,696,650,000	68	1,747,210,170	70	1,845,578,103	73	2,546,897,782	75	3,129,627,994	75	4,245,966,299	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	'%	75	80	436,581,000	85	449,591,114	87	474,903,094	90	655,366,269	92	805,314,071	92	1,092,569,601	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	3	12	101,442,000	15	104,464,972	20	110,346,350	25	152,277,962	30	187,119,160	30	253,864,564	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial	'%	25	25	3,000,000	50	3,089,400	75	3,263,333	75	4,503,400	100	5,533,778	100	7,507,676	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang meningkat kesejahteraannya	'%	1.5	2	4,096,295,100	2	4,218,364,694	2	4,455,858,626	3	6,149,084,904	3	7,555,995,530	3	10,251,219,136	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial	'%	75	75	347,600,000	80	357,958,480	80	378,111,542	85	521,793,929	90	641,180,379	90	869,889,421	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin	'%	60	60	57,151,250	61	58,854,357	62	62,167,858	63	85,791,643	64	105,420,771	64	143,024,361	Sekretariat Daerah
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Penurunan Angka Kemiskinan	'%	54	5	137,853,000	5	141,961,019	4	149,953,425	3	206,935,726	2	254,282,620	2	344,985,231	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	2	2	0	3	300,000,000	4	430,000,000	5	630,000,000	6	630,000,000	6		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Tenaga Kerja																
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas	'%	66	77	34,000,000	88	35,013,200	90	36,984,443	95	51,038,532	100	62,716,148	100	85,086,997	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat tenaga kerja yang memiliki keahlian	'%	52	55	657,579,500	57	677,175,369	60	715,300,342	65	987,114,472	65	1,212,966,264	65	1,645,631,330	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap UU ketenagakerjaan	'%	5	5	581,070,001	6	598,385,887	7	632,075,012	8	872,263,517	9	1,071,837,410	9	1,454,161,814	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja	'%	8	15	55,000,000	17	56,639,000	19	59,827,776	21	82,562,330	23	101,452,592	23	137,640,731	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	82.52	83	217,000,000	84	223,466,600	85	236,047,770	86	325,745,922	87	400,276,589	87	543,055,248	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang tersentuh pembiayaan	'%	30	33	45,000,000	36	46,341,000	39	48,949,998	42	67,550,998	45	83,006,666	45	112,615,144	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	unit	3	20	460,000,000	20	473,708,000	20	500,377,760	20	690,521,309	20	848,512,585	20	1,151,177,024	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
		Jumlah UMKM	unit	9236	9,236		9,246	0	9,256	0	9,266	0	9,276	0	9,276	0	

	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi sehat	unit	11	12	290,000,000	13	298,642,000	14	315,455,545	15	435,328,652	16	534,931,847	16	725,742,037	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Penanaman Modal																
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor	Perusahaan	70	80	32,806,100	90	33,783,722	100	35,685,745	110	49,246,329	120	60,513,889	120	82,099,193	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	persen	2500000000	10	114,286,000	10	117,691,723	10	124,317,767	10	171,558,518	10	210,811,107	10	286,007,429	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi	dokumen	0	0	0	1	100,000,000	1	130,000,000	1	125,000,000	1	0	1		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Lancarnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase	100	100	377,525,700	100	388,775,966	100	410,664,053	100	566,716,393	100	696,381,103	100	944,780,243	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	nilai mutu	7.2	7	293,324,000	7	302,065,055	8	319,071,318	8	440,318,419	8	541,063,273	8	734,060,542	GUGUAK PANJANG
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	'%	80	85	586,361,100	90	603,834,661	90	637,830,552	90	880,206,162	90	1,081,597,332	90	1,467,403,100	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Kebudayaan																
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang dilaksanakan masyarakat	kali	4	52	363,480,000	57	374,311,704	59	395,385,453	61	545,631,925	63	670,472,510	63	909,630,054	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	sanggar	6	6	892,148,000	7	918,734,010	13	970,458,735	16	1,339,233,055	19	1,645,649,577	19	2,232,652,782	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	kali	0	1	301,845,000	1	310,839,981	1	328,340,272	1	453,109,575	1	556,781,046	1	755,384,845	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan Program Pengembangan nilai budaya	bln	0	12	75,000,000	12	77,235,000	12	81,583,331	12	112,584,996	12	138,344,443	12	187,691,906	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya aktifitas pengembangan nilai adat dan budaya di masyarakat	kegiatan	8	8	6,352,000	9	6,541,290	10	6,909,564	11	9,535,199	12	11,716,852	12	15,896,253	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya	kegiatan	0	0	0	3	374,500,000	4	426,200,000	4	426,660,000	4	448,872,000	4		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	'%	0	5	0	10	997,000,000	15	51,189,000,000	20	7,330,000,000	25	1,105,000,000	25		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Pengelolaan Kekayaan Budaya	'%	0	25	464,941,500	30	478,796,757	35	505,753,014	40	697,939,159	45	857,627,639	45	1,163,543,418	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Kepemudaan dan Olahraga																
	Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah capaian program pembinaan kepemudaan	'%	0	100	931,257,100	100	959,008,562	100	1,013,000,744	100	1,397,941,026	100	1,717,789,933	100	2,330,525,602	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	'%	0	100	368,905,750	100	379,899,141	100	401,287,463	100	553,776,699	100	680,480,808	100	923,208,312	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai	unit	3	3	3,385,741,500	3	3,486,636,597	4	3,682,934,237	5	5,082,449,247	6	6,245,313,635	6	8,473,017,009	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	'%	100	100	824,261,000	100	848,823,978	100	896,612,768	100	1,237,325,619	100	1,520,425,721	100	2,062,761,576	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan	'%	100	0	0	20	0	40	145,000,000	60	155,000,000	80	165,000,000	80		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	persentase sekolah yang bebas narkoba	'%	0	0	0	0	0	20	80,000,000	40	85,000,000	60	90,000,000	60		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Terjaganya kerukunan antar dan intern umat bergama	'%	0	100	78,847,500	100	81,197,156	100	85,768,555	10	118,360,606	100	145,441,513	100	197,320,501	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan program kualitas pemahaman dan pengamalan dan pembinaan kerukunan beragama	'%	0	100	128,000,000	100	131,814,400	100	139,235,551	100	192,145,060	100	236,107,850	100	320,327,520	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Meningkatnya aktifitas keagamaan dilingkungan masyarakat	kegiatan	3	5	194,215,000	6	200,002,607	7	211,262,754	8	291,542,600	9	358,247,547	9	486,034,447	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Kelompok masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan	Kelompok masyarakat/keluarahan	9	2	469,687,000	2	483,683,673	3	510,915,063	4	705,062,787	4	866,381,153	4	1,175,419,311	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Jumlah event keagamaan ditengah masyarakat	'%	3	3	6,497,174,600	6	6,690,790,403	9	7,067,481,903	12	9,753,125,026	15	11,984,640,032	15	16,259,561,131	Sekretariat Daerah
	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, damai dan berkualitas	'%	0	0	12,636,000	0	13,012,553	0	13,745,160	85	18,968,320	85	23,308,272	85	31,622,332	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terpantaunya kegiatan orang asing, lembaga asing, dan non govenment organization serta deteksi dini dan penanggulangan konflik sosial	'%	100	100	237,889,000	100	244,978,092	100	258,770,359	100	357,103,095	100	438,808,283	100	595,331,198	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat keamananan dan kenyamanan lingkungan	'%	40	50	300,022,600	60	308,963,273	70	326,357,906	75	450,373,910	85	553,419,461	85	750,824,182	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

	Program Sistem kebencanaan	% Jumlah Data dan Informasi tentang Kebencanan tergenuhi	'%	25	100	74,970,000	100	77,204,106	100	81,550,697	100	112,539,962	100	138,289,105	100	187,616,829	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana	Kapasitas dan Kwalitas Petugas BPBD Meningkat dalam Penanggulanga Kebencanaan	'%	50	70	399,840,000	70	411,755,232	70	434,937,052	70	600,213,131	70	737,541,896	70	1,000,623,090	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	%Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meningkat	'%	50	60	2,155,520,000	70	2,219,754,496	75	2,344,726,674	80	3,235,722,810	90	3,976,056,189	90	5,394,315,432	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Peningkatan Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	bln	0	100	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Efektivitas kegiatan pemberantasan narkoba	Kegiatan	3	3	196,137,000	3	201,981,883	3	213,353,463	3	294,427,778	3	361,792,854	3	490,844,365	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Terdeteksinya potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah	'%	100	100	427,527,500	100	440,267,820	100	465,054,898	100	641,775,759	100	788,614,053	100	1,069,912,685	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	'%	20	20	124,280,900	30	127,984,471	40	135,189,997	50	186,562,195	60	229,247,625	60	311,020,253	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	kasus	722	650	3,239,993,800	600	3,336,545,615	500	3,524,393,133	400	4,863,662,524	250	5,976,468,510	250	8,108,274,827	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat	'%	100	100	76,668,300	100	78,953,015	100	83,398,070	100	115,089,337	100	141,421,777	100	191,866,925	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Tingkat pelaksanaan peringatan hari-hari besar kenegaraan	'%	100	100	208,464,500	100	214,676,742	100	226,763,043	100	312,932,999	100	384,532,069	100	521,694,658	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Peningkatan program pemberrantasan penyakit masyarakat	bln	0	0	42,000,000	0	43,251,600	0	45,686,665	0	63,047,598	0	77,472,888	0	105,107,467	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Mneingkatnya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	bln	0	0	41,000,000	0	42,221,800	0	44,598,887	0	61,546,465	0	75,628,296	0	102,604,909	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas per tahun	persen	0	10	18,377,500	10	18,925,150	10	19,990,635	10	27,587,077	10	33,899,000	10	45,990,773	GUGUAK PANJANG

	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Temuan Peristiwa Gangguan Ketertiban dan Keamanan disertai laporan tertulis	Laporan /Tahun	22	15	48,328,500	12	49,768,689	10	52,570,667	7	72,547,520	5	89,146,392	5	120,944,910	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Bidang Pemerintahan Umum																
	Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah Usulan Bantuan Kemasyarakatan yang direalisasikan	Proposal /Tahun	42	60	15,000,000	60	15,447,000	60	16,316,666	60	22,516,999	60	27,668,889	60	37,538,381	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	'%	80	80	71,440,000	82	73,568,912	85	77,710,842	88	107,240,962	90	131,777,694	90	178,782,797	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	'%	80	80	909,099,450	81	936,190,614	82	988,898,145	83	1,364,679,440	84	1,676,918,096	84	2,275,074,781	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH	'%	80	80	7,627,000,000	85	7,854,284,600	90	8,296,480,823	95	11,449,143,536	100	14,068,707,577	100	19,087,015,569	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	'%	80	80	245,162,000	81	252,467,828	82	266,681,766	83	368,020,837	84	452,224,005	84	613,532,308	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Kelembagaan Daerah	Peningkatan capaian kinerja daerah	peringkat nasional	74	62	721,357,000	55	742,853,439	50	784,676,087	40	1,082,853,000	35	1,330,609,767	35	1,805,238,271	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur	Jumlah penyelenggaraan diklat peningkatan profesionalisme aparatur	kegiatan	0	0	0	8	800,000,000	8	812,000,000	8	834,000,000	8	836,000,000	8		Badan Kepegawaian Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	'%	100	100	559,000,000	100	575,658,200	100	608,067,757	100	839,133,504	100	1,031,127,250	100	1,398,930,340	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Meningkatnya Program peningkatan pelayanan kelurahan	'%	100	100	380,000,000	100	391,324,000	100	413,355,541	100	570,430,647	100	700,945,179	100	950,972,324	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	persen	80	82	734,210,800	84	756,090,282	86	798,658,165	88	1,102,148,267	90	1,354,319,791	90	1,837,405,660	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	orang	80	0	30,740,000	80	31,656,052	80	33,438,288	80	46,144,837	80	56,702,776	80	76,928,656	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan	'%	0	0	0	80	11,000,000	85	11,850,000	90	12,650,000	95	13,275,000	95		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kerjasama Tugas Sekretariat DPRD se Indonesia	'%	100	100	109,500,000	100	112,763,100	100	119,111,663	100	164,374,094	100	201,982,887	100	274,030,183	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terstandarisasinya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	'%	100	100	50,000,000	100	51,490,000	100	54,388,887	100	75,056,664	100	92,229,629	100	125,127,937	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemerintahan	'%	100	100	12,522,580,525	100	12,895,753,425	100	13,621,784,342	100	18,798,062,393	100	23,099,059,068	100	31,338,493,438	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	'%	100	100	36,000,000	100	37,072,800	100	39,159,999	100	54,040,798	100	66,405,333	100	90,092,115	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Perizinan	dokumen	2	2	12,666,000	1	13,043,447	1	13,777,793	1	19,013,354	1	23,363,610	1	31,697,409	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase capaian realisasi penyelenggaraan pemerintahan	'%	81	75	762,195,900	80	784,909,338	80	829,099,734	85	1,144,157,632	90	1,405,940,899	90	1,907,440,017	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kegiatan yang dikelola dengan sistem otomisasi	kegiatan	1	1	502,385,200	3	517,356,279	5	546,483,437	7	754,147,144	7	926,696,010	7	1,257,248,477	Badan Kepegawaian Daerah
	Peningkatan Kemitraan Legislatif dengan Eksekutif	Terjalinnya kemitraan yang sinergis antara legislatif dan eksekutif	'%	100	0	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukittinggi	persen	10	15	2,092,983,550	20	2,155,354,460	30	2,276,700,916	50	3,141,847,264	75	3,860,701,918	75	5,237,814,292	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ditindaklanjutinya Pengaduan Masyarakat Secara Komprehensif	'%	100	100	0	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Penyelenggaraan Adipura	Tingkat penilaian adipura	'%	71	75	0	77	0	80	325,000,000	85	325,000,000	87	325,000,000	87		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Penegasan Batas Wilayah	Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan	'%	80	80	671,985,500	81	692,010,668	82	730,970,869	83	1,008,739,799	84	1,239,539,464	84	1,681,683,191	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	'%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat inflasi daerah	'%	2.84	9	575,800,100	6	592,958,943	5	626,342,531	5	864,352,693	4	1,062,116,590	4	1,440,973,577	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rupiah (Milyar)	28892	31,758	3,021,888,000	34,927	3,111,940,262	38,432	3,287,142,499	42,311	4,536,256,649	46,605	5,574,152,170	46,605	7,562,452,249	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD`	'%	100	100	111,720,000	100	115,049,256	100	121,526,529	100	167,706,610	100	206,077,883	100	279,585,863	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Peningkatan program peningkatan kinerja LPMK dan RT	bln	12	12	63,000,000	12	64,877,400	12	68,529,998	12	94,571,397	12	116,209,332	12	157,661,201	AUR BIRUGO TIGO BALEH

	Program Pembinaan PKK	Peningkatan program pembinaan PKK	bln	12	12	92,500,000	12	95,256,500	12	100,619,441	12	138,854,829	12	170,624,813	12	231,486,684	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan RT	'%	90	80	67,748,400	85	69,767,302	90	73,695,201	95	101,699,378	100	124,968,196	100	169,544,351	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Pangan																
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	2400	2,400	387,248,000	2,400	398,787,990	2,400	421,239,754	2,400	581,310,861	2,400	714,314,786	2,400	969,110,870	Kantor Ketahanan Pangan
		Ketersediaan protein perkapita	gr/kap/hr	63	63		63	0	63	0	63	0	63	0	63	0	
	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	84.1	84	293,333,800	84	302,075,147	85	319,081,978	85	440,333,130	85	541,081,350	85	734,085,067	Kantor Ketahanan Pangan
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tiingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	'%	15	20	497,375,200	25	512,196,981	30	541,033,671	34	746,626,466	40	917,454,601	40	1,244,710,658	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	'%	15	20	1,898,758,100	25	1,955,341,091	30	2,065,426,795	34	2,850,288,977	40	3,502,435,095	40	4,751,753,693	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya peren perempuan dipedesaan	'%	100	100	184,000,000	100	189,483,200	100	200,151,104	100	276,208,524	100	339,405,034	100	460,470,810	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan program keberdayaan masyarakat pedesaan	bln	12	12	151,000,000	12	155,499,800	12	164,254,439	12	226,671,125	12	278,533,479	12	377,886,371	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	'%	100	100	640,000,000	100	659,072,000	100	696,177,754	100	960,725,300	100	1,180,539,249	100	1,601,637,599	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertahunnya	persen	802661	3	581,898,000	3	599,238,560	3	632,975,691	3	873,506,454	3	1,073,364,731	3	1,456,233,930	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun	'%	5	7	180,868,900	9	186,258,793	12	196,745,163	15	271,508,325	17	333,629,430	17	452,635,048	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Tingkat partisipasi perempuan dalam pencapaian tujuan program pemerintah	'%	100	80	341,078,000	85	351,242,124	90	371,017,056	95	512,003,537	100	629,149,947	100	853,567,733	MANDIANGIN KOTO SELAYAN

	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatkanya persentase aktifitas guna peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakn oleh pemerintah maupun masyarakat	Persen	10	10	543,400,500	10	559,593,835	10	591,098,968	10	815,716,576	10	1,002,352,528	10	1,359,891,675	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	'%	80	80	615,303,000	85	633,639,029	85	669,312,907	90	923,651,811	90	1,134,983,346	90	1,539,831,905	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	'%	15	15	2,180,510,600	20	2,245,489,816	25	2,371,910,893	30	3,273,237,032	34	4,022,153,665	34	5,456,855,877	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	'%	20	25	193,442,900	30	199,207,498	35	210,422,881	40	290,383,575	45	356,823,337	45	484,102,222	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya program peningkatan usaha ekonomi masyarakat	bln	0	0	195,538,000	0	201,365,032	0	212,701,884	0	293,528,600	0	360,687,943	0	489,345,332	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat	pelaku	0	0	141,194,000	90	145,401,581	120	153,587,690	90	211,951,013	120	260,445,404	120	353,346,280	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	'%	3	3	77,821,500	5	80,140,581	6	84,652,495	8	116,820,444	10	143,548,961	10	194,752,876	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Statistik																
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pemenuhan Data pembangunan Daerah	'%	66	70	244,655,500	80	251,946,234	85	266,130,807	90	367,260,513	100	451,289,719	100	612,264,762	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD	Persen	10	0	0	20	50,000,000	30	57,500,000	40	60,000,000	50	65,000,000	50		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi statistik daerah	persen	100	100	29,249,800	100	30,121,444	100	31,817,281	100	43,907,848	100	53,953,964	100	73,199,343	Dinas Pertanian
	Kearsipan																
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan	'%	100	100	0	100	510,000,000	100	535,000,000	100	560,000,000	100	585,000,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi	'%	100	100	97,268,600	100	100,167,204	100	105,806,618	100	146,013,133	100	179,420,937	100	243,420,386	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan	'%	100	100	0	100	60,000,000	100	52,000,000	100	15,000,000	100	17,500,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi

	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	'%	100	100	47,500,000	100	48,915,500	100	51,669,443	100	71,303,831	100	87,618,147	100	118,871,541	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Komunikasi dan Informatika																
	Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)	Kemudahan mendapatkan informasi melalui media elektronik menuju smart city	Persen	80	80	81,000,000	82	1,135,000,000	85	1,090,000,000	87	95,000,000	90	100,000,000	90	1,090,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Persen	80	80	142,000,000	82	146,231,600	85	154,464,439	87	213,160,926	90	261,932,146	90	355,363,342	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Persentase tingkat ketercapaian penyebaran informasi Pemda Bukittinggi kepada masyarakat	'%	80	80	2,485,337,800	83	2,559,400,866	85	2,703,495,135	88	3,730,823,287	90	4,584,435,655	90	6,219,703,853	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tingkat pencapaian pelayanan informasi kepada publik	'%	80	80	419,853,220	81	432,364,846	82	456,706,987	83	630,255,642	84	774,458,133	84	1,050,707,348	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya sarana dan prasarana TIK menuju smart city	Persen	80	80	1,034,736,000	82	1,065,571,133	85	1,125,562,788	87	1,553,276,647	90	1,908,666,344	90	2,589,487,628	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat	publikasi	0	12	16,675,000	12	17,171,915	12	18,138,694	12	25,031,397	12	30,758,581	12	41,730,167	GUGUAK PANJANG
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat Melalu Media Cetak Dan Elektronik	Publikasi/Tahun	24	24	11,450,000	24	11,791,210	27	12,455,055	27	17,187,976	29	21,120,585	29	28,654,298	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan program komunikasi, informasi dan media massa	'%	100	100	0	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi di masyarakat	bulan	12	12	52,678,000	12	54,247,804	12	57,301,956	12	79,076,699	12	97,169,448	12	131,829,790	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan Telekomunikasi	Persen	80	80	257,000,000	82	264,658,600	85	279,558,879	87	385,791,253	90	474,060,292	90	643,157,598	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Perpustakaan																
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan	'%	100	100	248,249,470	100	255,647,304	100	270,040,247	100	372,655,541	100	457,919,129	100	621,258,883	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Pertanian																

	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi	kelompok	10	11	23,763,600	12	24,471,755	13	25,849,515	14	35,672,331	15	43,834,160	15	59,469,805	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	persen	0	5	64,257,200	5	66,172,065	5	69,897,552	5	96,458,621	5	118,528,354	5	160,807,418	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	2	2	370,088,300	2	381,116,931	2	402,573,815	2	555,551,864	2	682,662,131	2	926,167,713	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian	persen	2	2	155,835,200	2	160,479,089	2	169,514,062	2	233,929,405	2	287,452,453	2	389,986,743	Dinas Pertanian
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)	persen	70	73	306,133,100	78	315,255,866	80	333,004,772	82	459,546,585	85	564,690,844	85	766,116,067	Dinas Pertanian
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persen	100	100	139,098,800	100	143,243,944	100	151,308,578	100	208,805,838	100	256,580,614	100	348,102,919	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	1	2	43,233,800	2	44,522,167	2	47,028,765	2	64,899,696	2	79,748,747	2	108,195,124	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	kwintal/Ha	66.7	67	87,987,400	67	90,609,425	67	95,710,735	67	132,080,814	67	162,300,905	67	220,193,638	Dinas Pertanian
	Kehutanan																
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan luas lahan yang dihijaukan	persen	2	2	61,740,800	2	63,580,676	2	67,160,268	2	92,681,170	2	113,886,621	2	154,509,979	Dinas Pertanian
	Pariwisata																
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	meningkatnya jumlah PAD yang dikelola Dinas Pariwisata	rupiah (Milyar)	8041	10,086	8,491,764,000	10,091	81,424,000,000	10,097	11,960,000,000	10,112	12,326,000,000	10,127	13,153,000,000	10,127		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	meningkatnya jumlah wisatawan	orang	460905	483,950	2,042,367,950	508,148	2,103,230,515	533,555	2,221,642,393	560,233	3,065,866,502	588,245	3,767,336,758	588,245	5,111,145,779	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Kelautan dan Perikanan																
	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	persen	2	2	77,740,500	2	80,057,167	2	84,564,385	2	116,698,852	2	143,399,549	2	194,550,168	Dinas Pertanian
	Program Pengembangan Perikanan budidaya	Jumlah Produksi ikan	ton	355	351	220,693,700	352	227,270,372	353	240,065,694	354	331,290,658	355	407,089,961	355	552,298,950	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan	Meningkatnya kualitas SDM Perikanan		0	0	15,650,500	0	16,116,885	0	17,024,266	0	23,493,486	0	28,868,796	0	39,166,296	Dinas Pertanian

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Daya Saing Produk Perikanan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	persen	40	10	0	10	70,000,000	10	75,000,000	10	80,000,000	10	85,000,000	10		Dinas Pertanian
	Perdagangan																
	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat Pengawasan dan Ketertiban Pasar	'%	100	100	374,907,000	100	386,079,229	100	407,815,489	100	562,785,375	100	691,550,669	100	938,226,792	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Tingkat Sarana dan Prasarana yang dikembangkan	$	100	100	2,393,450,000	100	2,464,774,810	100	2,603,541,632	100	3,592,887,452	100	4,414,940,101	100	5,989,749,235	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha	perusahaan	2553	300	554,000,000	350	570,509,200	400	602,628,868	450	831,627,838	500	1,021,904,287	500	1,386,417,546	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri	IKM	0	2	250,000,000	2	257,450,000	2	271,944,435	2	375,283,320	2	461,148,144	2	625,639,687	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL	lokasi	0	0	120,000,000	1	123,576,000	1	130,533,329	1	180,135,994	1	221,351,109	1	300,307,050	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah komoditas peredaran barang yang di awasi	jenis	20	20	705,000,000	20	726,009,000	20	766,883,307	22	1,058,298,963	22	1,300,437,766	22	1,764,303,917	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Industri																
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM	'%	1	2	616,750,000	2	635,129,150	2	670,886,921	2	925,823,951	2	1,137,652,471	2	1,543,453,108	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang	unit usaha	0	5	886,125,000	10	912,531,525	15	963,907,050	20	1,330,191,729	30	1,634,539,596	30	2,217,579,870	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya nilai produksi IKM	'%	4.1113E+11	2	47,527,000	2	48,943,305	2	51,698,813	2	71,344,361	2	87,667,951	2	118,939,110	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal	&	476	7	30,000,000	7	30,894,000	7	32,633,332	7	45,033,998	7	55,337,777	7	75,076,762	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB	Persen	0.07	0	185,000,000	0	190,513,000	0	201,238,882	0	277,709,657	0	341,249,627	0	462,973,368	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Persandian																
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan TIK OLeh SKPD dan Layanan Kepada Publik dalam mewujudkan smart city	Persen	80	81	531,000,000	82	535,000,000	83	1,055,000,000	84	1,056,000,000	85	567,000,000	85	1,056,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	'%	80	80	574,865,000	82	591,995,977	85	625,325,351	88	862,948,984	90	1,060,391,711	90	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
	Keuangan																
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi	opini	3	3	4,841,271,107	3	4,985,540,986	3	5,266,226,943	3	7,267,393,182	3	8,930,172,742	3	12,115,565,359	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																
	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang difasilitasi mengikuti pendidikan kedinasan	orang	1500	550	2,545,102,500	550	2,620,946,555	530	2,768,505,846	535	3,820,538,067	550	4,694,677,177	550	6,369,268,525	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai sesuai standar kompetensi	'%	60	60	325,945,100	70	335,658,264	80	354,555,824	90	489,287,037	95	601,235,912	95	815,696,761	Badan Kepegawaian Daerah

	Bidang Pengawasan																
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	'%	100	100	319,019,650	100	328,526,436	100	347,022,474	100	478,891,014	100	588,461,278	100	798,365,416	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	'%	100	100	1,147,785,210	100	1,181,989,209	100	1,248,535,202	100	1,722,978,578	100	2,117,196,077	100	2,872,399,918	Inspektorat Daerah
	Bidang Penunjang Lainnya																
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan oleh masyarakat	kegiatan	5	5	416,710,000	5	429,127,958	5	453,287,862	5	625,537,250	5	768,660,172	5	1,042,841,256	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pendidikan politik masyarakat	Efektivitas kegiatan pendidikan politik masyarakat	kegiatan	7	3	1,088,151,500	3	1,120,578,415	3	1,183,666,979	3	1,633,460,432	3	2,007,196,178	3	2,723,163,055	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda	'% kegiatan	0	100	173,906,100	100	179,088,502	100	189,171,184	100	261,056,235	100	320,785,901	100	435,210,232	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

Tabel 8.1
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2016-2021

No	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
						202,661,142,761		**374,664,800,834**		**375,233,636,374**		**401,150,566,229**		**440,003,887,969**		**467,835,288,722**	
	Urusan Wajib																
	Pendidikan																
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	% kegiatan	0	100	7,796,131,800	100	8,028,456,528	100	8,480,458,630	100	11,703,032,910	100	14,380,686,839	100	19,510,277,835	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya kegiatan untuk Pendidikan Anak Usia Dini	%	0	100	505,396,950	100	520,457,779	100	549,759,552	100	758,668,182	100	932,251,462	100	1,264,785,558	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Menengah	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SMP	nilai	0	0	4,914,299,720	0	5,060,745,852	0	5,345,665,843	0	7,377,018,863	0	9,064,880,779	0	12,298,323,753	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Luar Biasa	Angka putus sekolah	%	0.25	0	60,680,000	0	62,488,264	0	66,006,353	0	91,088,768	0	111,929,878	0	151,855,265	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SD	nilai	70	70	6,976,936,083	75	7,184,848,778	80	7,589,355,764	85	10,473,310,955	90	12,869,604,501	90	17,460,192,427	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Non Formal	Optimalisasi pelayanan non formal	%	0	100	291,362,100	100	300,044,691	100	316,937,207	100	437,373,345	100	537,444,367	100	729,150,772	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya manjemen pelayanan pendidikan	%	100	100	500,000,000	100	514,900,000	100	543,888,870	100	750,566,641	100	922,296,288	100	1,251,279,374	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Kesehatan																
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	%	85	85	0	86	120,000,000	87	150,000,000	88	160,000,000	90	180,000,000	90		Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Ratio tenaga paramedis per satuan penduduk (Bidan dan perawat)	tenaga paramedis/satuan penduduk	12.95	13	0	13	145,000,000	13	152,000,000	13	159,000,000	13	166,000,000	13		Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	6,459,177,000	100	6,651,660,475	100	7,026,148,959	100	9,696,085,564	100	11,914,549,941	100	16,164,469,905	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	5972	65	504,635,400	65	519,673,535	70	548,931,155	70	757,524,994	75	930,846,712	75	1,262,879,735	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada rumah sakit	%	25	25	0	25	0	25	0	25	8,000,000,000	25	12,000,000,000	25		Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	unit	0	0	68,000,000	1	70,085,000,000	0	40,085,000,000	0	0	0	0	0		Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pengawasan dan pengendalian makanan yang memenuhi syarat	%	90	90	38,000,000	100	39,132,400	100	41,335,554	100	57,043,065	100	70,094,518	100	95,097,232	Dinas Kesehatan

	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tingkat Pemenuhan Kualitas lingkungan	'%	40	40	208,000,000	41	214,198,400	42	226,257,770	43	312,235,722	44	383,675,256	44	520,532,220	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	'%	100	100	2,617,063,925	100	2,695,052,430	100	2,846,783,882	100	3,928,561,757	100	4,827,416,687	100	6,549,356,219	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD	'%	0	60	134,639,000	100	138,651,242	100	146,457,307	100	202,111,084	100	248,354,100	100	336,942,007	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ()	puskes mas	0	2	734,639,000	5	756,531,242	7	799,123,951	7	1,102,791,053	7	1,355,109,645	7	1,838,477,256	Dinas Kesehatan
	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan	'%	20	80	410,000,000	85	422,218,000	90	445,988,873	95	615,464,645	95	756,282,956	95	1,026,049,087	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	puskes mas	0	0	20,000,000	1	20,596,000	1	21,755,555	2	30,022,666	3	36,891,852	3	50,051,175	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas. Pustu dan Jaringannya yang dapat melaksanakan pelayanan kesehatan	'%	100	100	4,270,840,000	100	2,900,000,000	100	13,400,000,000	100	3,030,000,000	100	4,391,000,000	100		Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi lebih	'%	0	15	373,000,000	13	384,115,400	13	405,741,097	12	559,922,714	10	688,033,031	10	933,454,413	Dinas Kesehatan
	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan	'%	90	90	2,574,920,000	91	2,651,652,616	92	2,800,940,658	93	3,865,298,108	95	4,749,678,316	95	6,443,888,571	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	'%	83.8	85	193,564,000	86	199,332,207	87	210,554,610	88	290,565,362	90	357,046,717	90	484,405,281	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita	'%	57.57	60	744,750,000	70	766,943,550	80	810,122,472	90	1,117,969,011	90	1,373,760,321	90	1,863,780,627	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	100	100	368,671,800	100	379,658,220	100	401,032,977	100	553,425,509	100	680,049,265	100	922,622,838	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pelaksanaan lingkungan sehat dikecamatan dan kelurahan	bln	0	0	25,000,000	0	25,745,000	0	27,194,444	0	37,528,332	0	46,114,814	0	62,563,969	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	'%	12.5	13	680,250,000	20	700,521,450	30	739,960,808	40	1,021,145,915	50	1,254,784,100	50	1,702,365,588	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	'%	65	65	2,300,000,000	70	360,000,000	75	7,700,000,000	80	23,365,000,000	85	23,046,500,000	85		Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	%	10	10	228,000,000	20	234,794,400	40	248,013,325	60	342,258,388	75	420,567,107	75	570,583,394	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap	%	98	98	4,050,000,000	99	4,170,690,000	100	4,405,499,847	100	6,079,589,789	100	7,470,599,933	100	10,135,362,928	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Pembangunan gedung	Persentase Gedung Negara dan Swasta yang Laik Fugsi	%	0	2	150,000,000	5	154,470,000	20	163,166,661	30	225,169,992	40	276,688,886	40	375,383,812	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengendalian banjir	Pengurangan titik genangan	titik	8	8	257,522,800	6	265,196,979	4	280,127,569	2	386,576,046	0	475,024,645	0	644,465,936	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	48	48	943,071,400	55	2,940,000,000	70	12,104,083,333	90	23,785,170,833	100	23,937,604,375	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	%	45	45	2,500,000,000	50	2,574,500,000	60	2,719,444,350	70	3,752,833,203	80	4,611,481,440	80	6,256,396,869	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	%	98	0	0	98	488,000,000	99	561,200,000	100	3,420,000,000	100	3,762,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang terpelihara / normalisasi	%	47	0	0	55	1,000,000,000	65	1,100,000,000	70	1,210,000,000	75	1,331,000,000	75		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	%	72	72	4,819,443,900	80	4,963,063,328	85	5,242,483,794	90	7,234,627,635	95	8,889,910,438	95	12,060,941,491	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	%	40	50	197,000,000	60	202,870,600	65	214,292,215	70	295,723,256	75	363,384,737	75	493,004,073	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota	%	60	60	464,726,200	65	478,575,041	70	505,518,816	75	697,615,965	80	857,230,498	80	1,163,004,617	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	%	40	50	862,629,700	70	888,336,065	75	938,349,386	80	1,294,922,152	85	1,591,200,340	85	2,158,781,502	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota	%	60	60	0	65	250,000,000	70	0	0	0	0	0	0		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat - alat berat ke PU an / Kebinamargaan	%	30	0	0	50	4,000,000,000	65	4,050,000,000	80	4,105,000,000	90	1,665,500,000	90		Dinas Pekerjaan Umum
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik	%	85	85	1,009,556,000	88	1,039,640,769	90	1,098,172,544	93	1,515,478,111	95	1,862,219,503	95	2,526,473,199	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik	%	85	85	4,723,190,700	88	4,863,941,783	90	5,137,781,705	93	7,090,138,753	95	8,712,362,500	95	11,820,062,204	Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan informasi / data base jalan	%	20	0	0	40	1,200,000,000	0	0	80	300,000,000	100	330,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Sosial																
	Program pembinaan anak terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	%	32	35	0	37	100,000,000	40	100,000,000	42	100,000,000	45	100,000,000	45		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	%	60	65	1,696,650,000	68	1,747,210,170	70	1,845,578,103	73	2,546,897,782	75	3,129,627,994	75	4,245,966,299	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	%	75	80	436,581,000	85	449,591,114	87	474,903,094	90	655,366,269	92	805,314,071	92	1,092,569,601	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	%	3	12	101,442,000	15	104,464,972	20	110,346,350	25	152,277,962	30	187,119,160	30	253,864,564	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial	%	25	25	3,000,000	50	3,089,400	75	3,263,333	75	4,503,400	100	5,533,778	100	7,507,676	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang meningkat kesejahteraannya	%	1.5	2	4,096,295,100	2	4,218,364,694	2	4,455,858,626	3	6,149,084,904	3	7,555,995,530	3	10,251,219,136	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial	%	75	75	347,600,000	80	357,958,480	80	378,111,542	85	521,793,929	90	641,180,379	90	869,889,421	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin	%	60	60	57,151,250	61	58,854,357	62	62,167,858	63	85,791,643	64	105,420,771	64	143,024,361	Sekretariat Daerah
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Penurunan Angka Kemiskinan	%	54	5	137,853,000	5	141,961,019	4	149,953,425	3	206,935,726	2	254,282,620	2	344,985,231	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya	%	2	2	0	3	300,000,000	4	430,000,000	5	630,000,000	6	630,000,000	6		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana areal pemakaman yang memadai	%	80	80	139,484,600	80	143,641,241	85	151,728,243	85	209,384,975	90	257,292,258	90	349,068,406	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	% Jalan dengan riol yang baik	%	40	40	3,804,507,000	55	3,917,881,309	70	4,138,458,026	90	5,711,072,076	100	7,017,765,367	100	9,521,002,274	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Pembangunan Rusunawa yang layak huni	unit	0	0	0	0	0	1	15,000,000,000	1	15,000,000,000	0	0	0		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	%	50	60	79,649,400	80	82,022,952	100	86,640,844	100	119,564,365	100	146,920,692	100	199,327,303	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	% Kesiap siangaan dan Tanggap terhadap Pencegahan Kebakatan Meningkat	'%	50	60	1,950,000,000	70	2,008,110,000	75	2,121,166,593	80	2,927,209,898	90	3,596,955,523	90	4,879,989,558	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Terjaganya kerukunan antar dan intern umat bergama	'%	0	100	78,847,500	100	81,197,156	100	85,768,555	10	118,360,606	100	145,441,513	100	197,320,501	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan program kualitas pemahaman dan pengamalan dan pembinaan kerukunan beragama	'%	0	100	128,000,000	100	131,814,400	100	139,235,551	100	192,145,060	100	236,107,850	100	320,327,520	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Meningkatnya aktifitas keagamaan dilingkungan masyarakat	kegiatan	3	5	194,215,000	6	200,002,607	7	211,262,754	8	291,542,600	9	358,247,547	9	486,034,447	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Kelompok masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan	Kelompok masyarakat/keluarahan	9	2	469,687,000	2	483,683,673	3	510,915,063	4	705,062,787	4	866,381,153	4	1,175,419,311	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Jumlah event keagamaan ditengah masyarakat	'%	3	3	6,497,174,600	6	6,690,790,403	9	7,067,481,903	12	9,753,125,026	15	11,984,640,032	15	16,259,561,131	Sekretariat Daerah
	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, damai dan berkualitas	'%	0	0	12,636,000	0	13,012,553	0	13,745,160	85	18,968,320	85	23,308,272	85	31,622,332	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terpantaunya kegiatan orang asing, lembaga asing, dan non govenment organization serta deteksi dini dan penanggulangan konflik sosial	'%	100	100	237,889,000	100	244,978,092	100	258,770,359	100	357,103,095	100	438,808,283	100	595,331,198	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat keamananan dan kenyamanan lingkungan	'%	40	50	300,022,600	60	308,963,273	70	326,357,906	75	450,373,910	85	553,419,461	85	750,824,182	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Sistem kebencanaan	% Jumlah Data dan Informasi tentang Kebencanan terpenuhi	'%	25	100	74,970,000	100	77,204,106	100	81,550,697	100	112,539,962	100	138,289,105	100	187,616,829	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana	Kapasitas dan Kwalitas Petugas BPBD Meningkat dalam Penanggulanga Kebencanaan	'%	50	70	399,840,000	70	411,755,232	70	434,937,052	70	600,213,131	70	737,541,896	70	1,000,623,090	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	%Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meningkat	'%	50	60	2,155,520,000	70	2,219,754,496	75	2,344,726,674	80	3,235,722,810	90	3,976,056,189	90	5,394,315,432	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Peningkatan Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	bln	0	100	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Efektivitas kegiatan pemberantasan narkoba	Kegiatan	3	3	196,137,000	3	201,981,883	3	213,353,463	3	294,427,778	3	361,792,854	3	490,844,365	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Terdeteksinya potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah	'%	100	100	427,527,500	100	440,267,820	100	465,054,898	100	641,775,759	100	788,614,053	100	1,069,912,685	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	'%	20	20	124,280,900	30	127,984,471	40	135,189,997	50	186,562,195	60	229,247,625	60	311,020,253	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	kasus	722	650	3,239,993,800	600	3,336,545,615	500	3,524,393,133	400	4,863,662,524	250	5,976,468,510	250	8,108,274,827	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat	'%	100	100	76,668,300	100	78,953,015	100	83,398,070	100	115,089,337	100	141,421,777	100	191,866,925	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Tingkat pelaksanaan peringatan hari-hari besar kenegaraan	'%	100	100	208,464,500	100	214,676,742	100	226,763,043	100	312,932,999	100	384,532,069	100	521,694,658	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Peningkatan program pemberrantasan penyakit masyarakat	bln	0	0	42,000,000	0	43,251,600	0	45,686,665	0	63,047,598	0	77,472,888	0	105,107,467	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Mneingkatnya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	bln	0	0	41,000,000	0	42,221,800	0	44,598,887	0	61,546,465	0	75,628,296	0	102,604,909	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas per tahun	persen	0	10	18,377,500	10	18,925,150	10	19,990,635	10	27,587,077	10	33,899,000	10	45,990,773	GUGUAK PANJANG
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Temuan Peristiwa Gangguan Ketertiban dan Keamanan disertai laporan tertulis	Laporan /Tahun	22	15	48,328,500	12	49,768,689	10	52,570,667	7	72,547,520	5	89,146,392	5	120,944,910	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Tenaga Kerja																
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas	'%	66	77	34,000,000	88	35,013,200	90	36,984,443	95	51,038,532	100	62,716,148	100	85,086,997	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat tenaga kerja yang memiliki keahlian	'%	52	55	657,579,500	57	677,175,369	60	715,300,342	65	987,114,472	65	1,212,966,264	65	1,645,631,330	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap UU ketenagakerjaan	%	5	5	581,070,001	6	598,385,887	7	632,075,012	8	872,263,517	9	1,071,837,410	9	1,454,161,814	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja	%	8	15	55,000,000	17	56,639,000	19	59,827,776	21	82,562,330	23	101,452,592	23	137,640,731	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang	%	70	70	345,140,000	70	355,425,172	70	375,435,609	70	518,101,141	70	636,642,682	70	863,733,126	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penurunan Kasus KDRT dan TPPO	%	50	50	0	50	0	50	200,000,000	50	205,000,000	50	210,000,000	50		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kesejahteraan perempuan	%	0	35	0	30	200,000,000	25	310,000,000	20	320,000,000	15	320,000,000	15		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tingkat kemiskinan menurun menjadi 2.84 %	%	4.58	4	352,400,000	4	362,901,520	3	383,332,876	3	528,999,368	3	650,034,424	3	881,901,703	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Pangan																
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	2400	2,400	387,248,000	2,400	398,787,990	2,400	421,239,754	2,400	581,310,861	2,400	714,314,786	2,400	969,110,870	Kantor Ketahanan Pangan
		Ketersediaan protein perkapita	gr/kap/hr	63	63		63	0	63	0	63	0	63	0	63	0	
	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	84.1	84	293,333,800	84	302,075,147	85	319,081,978	85	440,333,130	85	541,081,350	85	734,085,067	Kantor Ketahanan Pangan
	Pertanahan																
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunan tanah	%	80	80	591,580,000	81	609,209,084	82	643,507,555	83	888,040,426	84	1,091,224,076	84	1,480,463,704	Sekretariat Daerah
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah	%	90	90	151,928,000	91	2,152,000,000	92	154,000,000	93	2,156,500,000	94	158,500,000	94	2,156,500,000	Sekretariat Daerah
	Lingkungan Hidup																
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	Persentase	8	10	1,233,986,000	12	1,270,758,783	13	1,342,302,502	14	1,852,377,453	15	2,276,201,414	15	3,088,122,459	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH/ Non Hijau	%	7.78	8	600,000,000	8	2,000,000,000	8	5,700,000,000	9	6,420,000,000	9	4,662,000,000	9		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase kelompok masyarakat yang memahami pengelolaan RTH	%	10	20	0	30	0	40	110,000,000	50	115,000,000	60	120,000,000	60		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemenuhan RTH	%	20	20	0	22	100,000,000	25	120,000,000	28	140,000,000	30	0	30		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan/pengelolaan persampahan	Persen	90	90	5,799,341,500	90	5,972,161,877	100	6,308,394,590	100	8,705,584,535	100	10,697,422,276	100	14,513,192,802	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup	%	50	60	451,509,800	70	464,964,792	80	491,142,310	90	677,776,388	95	832,851,625	95	1,129,929,800	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	%	80	70	424,576,950	60	437,229,343	50	461,845,355	40	637,346,590	30	783,171,490	30	1,062,528,760	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan pengendalian	%	50	55	0	60	380,000,000	65	1,055,000,000	70	1,055,000,000	75	1,055,000,000	75		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	%	0	0	0	50	0	55	270,000,000	60	175,000,000	65	180,000,000	65		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Informasi Lingkungan Hidup	%	0	0	0	60	100,000,000	65	120,000,000	70	140,000,000	75	160,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat capaian pelayanan administrasi kependudukan	%	67	70	662,010,550	75	681,738,464	80	720,120,340	85	993,766,069	90	1,221,139,746	90	1,656,720,293	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi dan kelengkapan data kependudukan	%	0	0	0	85	257,100,000	90	139,760,000	95	127,366,000	100	114,171,000	100		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tiingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	%	15	20	497,375,200	25	512,196,981	30	541,033,671	34	746,626,466	40	917,454,601	40	1,244,710,658	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	%	15	20	1,898,758,100	25	1,955,341,091	30	2,065,426,795	34	2,850,288,977	40	3,502,435,095	40	4,751,753,693	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya peren perempuan dipedesaan	%	100	100	184,000,000	100	189,483,200	100	200,151,104	100	276,208,524	100	339,405,034	100	460,470,810	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan program keberdayaan masyarakat pedesaan	bln	12	12	151,000,000	12	155,499,800	12	164,254,439	12	226,671,125	12	278,533,479	12	377,886,371	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	640,000,000	100	659,072,000	100	696,177,754	100	960,725,300	100	1,180,539,249	100	1,601,637,599	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertahunnya	persen	802661	3	581,898,000	3	599,238,560	3	632,975,691	3	873,506,454	3	1,073,364,731	3	1,456,233,930	GUGUAK PANJANG

	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun	'%	5	7	180,868,900	9	186,258,793	12	196,745,163	15	271,508,325	17	333,629,430	17	452,635,048	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Tingkat partisipasi perempuan dalam pencapaian tujuan program pemerintah	'%	100	80	341,078,000	85	351,242,124	90	371,017,056	95	512,003,537	100	629,149,947	100	853,567,733	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatkanya persentase aktifitas guna peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakn oleh pemerintah maupun masyarakat	Persen	10	10	543,400,500	10	559,593,835	10	591,098,968	10	815,716,576	10	1,002,352,528	10	1,359,891,675	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	'%	80	80	615,303,000	85	633,639,029	85	669,312,907	90	923,651,811	90	1,134,983,346	90	1,539,831,905	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	'%	15	15	2,180,510,600	20	2,245,489,816	25	2,371,910,893	30	3,273,237,032	34	4,022,153,665	34	5,456,855,877	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	'%	20	25	193,442,900	30	199,207,498	35	210,422,881	40	290,383,575	45	356,823,337	45	484,102,222	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya program peningkatan usaha ekonomi masyarakat	bln	0	0	195,538,000	0	201,365,032	0	212,701,884	0	293,528,600	0	360,687,943	0	489,345,332	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat	pelaku	0	0	141,194,000	90	145,401,581	120	153,587,690	90	211,951,013	120	260,445,404	120	353,346,280	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	'%	3	3	77,821,500	5	80,140,581	6	84,652,495	8	116,820,444	10	143,548,961	10	194,752,876	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	100 % data akurat	'%	80	85	115,152,000	88	118,583,530	90	125,259,782	93	172,858,500	95	212,408,524	95	288,174,645	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program pelayanan kontrasepsi	Tercapainya program KB	'%	75	75	0	75	21,000,000	80	160,000,000	80	170,000,000	80	25,000,000	80		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 % Kelompok Kerja paham fungsi keluarga	'%	100	100	0	100	0	100	45,000,000	100	50,000,000	100	0	100		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75 % sekolah dan perguruan tinggi memiliki PIK R/M	'%	25	35	209,025,650	45	215,254,614	55	227,373,449	65	313,775,360	75	385,567,162	75	523,098,969	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Keluarga Berencana	Jumlah PUS ber KB 80 %	'%	1.77	2	1,463,946,000	2	1,507,571,591	2	1,592,447,871	1	2,197,578,062	1	2,700,383,923	1	3,663,610,869	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Peningkatan Tingkat Tahapan Kelompok Kegiatan	tingkat	0	0	71,247,000	0	73,370,161	0	77,500,901	0	106,951,243	0	131,421,687	0	178,299,803	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase Kelurahan yang memiliki WPA (Warga Peduli AIDS)	'%	8	24	465,000,000	24	478,857,000	30	505,816,649	40	698,026,976	50	857,735,548	50	1,163,689,818	Dinas Kesehatan
	Perhubungan																
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berwawasan lingkungan	Persen	70	0	0	72	7,800,000,000	73	1,625,000,000	74	4,300,000,000	75	1,250,000,000	75		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Optimalisasi Peningkatan Pengoperasian Kendaraan	Persen	80	81	180,000,000	82	185,364,000	83	195,799,993	84	270,203,991	85	332,026,664	85	450,460,575	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas lalu ,intas yang memadai dan berwawasan lingkungan	Persen	70	71	5,351,566,000	72	5,511,042,667	73	5,821,314,369	74	8,033,413,829	75	9,871,458,913	75	13,392,608,308	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Terwujudnya Angkutan Yang Selamat, Aman, Nyaman, Terjangkau dan Terpadu	Persen	80	81	51,379,000	82	52,910,094	83	55,888,933	84	77,126,727	85	94,773,322	85	128,578,966	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terciptanya Lalu Lintas Yang Aman, Tertib dan Lancar	Persen	70	71	763,000,000	72	785,737,400	73	829,974,416	74	1,145,364,694	75	1,407,424,135	75	1,909,452,325	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Persen	70	71	260,000,000	72	267,748,000	73	282,822,212	74	390,294,653	75	479,594,070	75	650,665,274	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Komunikasi dan Informatika																
	Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)	Kemudahan mendapatkan informasi melalui media elektronik menuju smart city	Persen	80	80	81,000,000	82	1,135,000,000	85	1,090,000,000	87	95,000,000	90	100,000,000	90	1,090,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Persen	80	80	142,000,000	82	146,231,600	85	154,464,439	87	213,160,926	90	261,932,146	90	355,363,342	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Persentase tingkat ketercapaian penyebaran informasi Pemda Bukittinggi kepada masyarakat	'%	80	80	2,485,337,800	83	2,559,400,866	85	2,703,495,135	88	3,730,823,287	90	4,584,435,655	90	6,219,703,853	Sekretariat Daerah

	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tingkat pencapaian pelayanan informasi kepada publik	%	80	80	419,853,220	81	432,364,846	82	456,706,987	83	630,255,642	84	774,458,133	84	1,050,707,348	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya sarana dan prasarana TIK menuju smart city	Persen	80	80	1,034,736,000	82	1,065,571,133	85	1,125,562,788	87	1,553,276,647	90	1,908,666,344	90	2,589,487,628	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat	publikasi	0	12	16,675,000	12	17,171,915	12	18,138,694	12	25,031,397	12	30,758,581	12	41,730,167	GUGUAK PANJANG
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat Melalu Media Cetak Dan Elektronik	Publikasi/Tahun	24	24	11,450,000	24	11,791,210	27	12,455,055	27	17,187,976	29	21,120,585	29	28,654,298	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan program komunikasi, informasi dan media massa	%	100	100	0	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi di masyarakat	bulan	12	12	52,678,000	12	54,247,804	12	57,301,956	12	79,076,699	12	97,169,448	12	131,829,790	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan Telekomunikasi	Persen	80	80	257,000,000	82	264,658,600	85	279,558,879	87	385,791,253	90	474,060,292	90	643,157,598	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	82.52	83	217,000,000	84	223,466,600	85	236,047,770	86	325,745,922	87	400,276,589	87	543,055,248	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang tersentuh pembiayaan	%	30	33	45,000,000	36	46,341,000	39	48,949,998	42	67,550,998	45	83,006,666	45	112,615,144	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	unit	3	20	460,000,000	20	473,708,000	20	500,377,760	20	690,521,309	20	848,512,585	20	1,151,177,024	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
		Jumlah UMKM	unit	9236	9,236		9,246	0	9,256	0	9,266	0	9,276	0	9,276	0	
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi sehat	unit	11	12	290,000,000	13	298,642,000	14	315,455,545	15	435,328,652	16	534,931,847	16	725,742,037	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Penanaman Modal																
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor	Perusahaan	70	80	32,806,100	90	33,783,722	100	35,685,745	110	49,246,329	120	60,513,889	120	82,099,193	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	persen	2500000000	10	114,286,000	10	117,691,723	10	124,317,767	10	171,558,518	10	210,811,107	10	286,007,429	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi	dokumen	0	0	0	1	100,000,000	1	130,000,000	1	125,000,000	1	0	1		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal

	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Lancarnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase	100	100	377,525,700	100	388,775,966	100	410,664,053	100	566,716,393	100	696,381,103	100	944,780,243	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	nilai mutu	7.2	7	293,324,000	7	302,065,055	8	319,071,318	8	440,318,419	8	541,063,273	8	734,060,542	GUGUAK PANJANG
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	%	80	85	586,361,100	90	603,834,661	90	637,830,552	90	880,206,162	90	1,081,597,332	90	1,467,403,100	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Kepemudaan dan Olahraga																
	Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah capaian program pembinaan kepemudaan	%	0	100	931,257,100	100	959,008,562	100	1,013,000,744	100	1,397,941,026	100	1,717,789,933	100	2,330,525,602	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	%	0	100	368,905,750	100	379,899,141	100	401,287,463	100	553,776,699	100	680,480,808	100	923,208,312	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai	unit	3	3	3,385,741,500	3	3,486,636,597	4	3,682,934,237	5	5,082,449,247	6	6,245,313,635	6	8,473,017,009	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	%	100	100	824,261,000	100	848,823,978	100	896,612,768	100	1,237,325,619	100	1,520,425,721	100	2,062,761,576	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan	%	100	0	0	20	0	40	145,000,000	60	155,000,000	80	165,000,000	80		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	persentase sekolah yang bebas narkoba	%	0	0	0	0	0	20	80,000,000	40	85,000,000	60	90,000,000	60		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Statistik																
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pemenuhan Data pembangunan Daerah	%	66	70	244,655,500	80	251,946,234	85	266,130,807	90	367,260,513	100	451,289,719	100	612,264,762	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD	Persen	10	0	0	20	50,000,000	30	57,500,000	40	60,000,000	50	65,000,000	50		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi statistik daerah	persen	100	100	29,249,800	100	30,121,444	100	31,817,281	100	43,907,848	100	53,953,964	100	73,199,343	Dinas Pertanian
	Persandian																
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan TIK OLeh SKPD dan Layanan Kepada Publik dalam mewujudkan smart city	Persen	80	81	531,000,000	82	535,000,000	83	1,055,000,000	84	1,056,000,000	85	567,000,000	85	1,056,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	%	80	80	574,865,000	82	591,995,977	85	625,325,351	88	862,948,984	90	1,060,391,711	90	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
	Kebudayaan																
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang dilaksanakan masyarakat	kali	4	52	363,480,000	57	374,311,704	59	395,385,453	61	545,631,925	63	670,472,510	63	909,630,054	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	sanggar	6	6	892,148,000	7	918,734,010	13	970,458,735	16	1,339,233,055	19	1,645,649,577	19	2,232,652,782	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	kali	0	1	301,845,000	1	310,839,981	1	328,340,272	1	453,109,575	1	556,781,046	1	755,384,845	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan Program Pengembangan nilai budaya	bln	0	12	75,000,000	12	77,235,000	12	81,583,331	12	112,584,996	12	138,344,443	12	187,691,906	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya aktifitas pengembangan nilai adat dan budaya di masyarakat	kegiatan	8	8	6,352,000	9	6,541,290	10	6,909,564	11	9,535,199	12	11,716,852	12	15,896,253	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya	kegiatan	0	0	0	3	374,500,000	4	426,200,000	4	426,660,000	4	448,872,000	4		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	%	0	5	0	10	997,000,000	15	51,189,000,000	20	7,330,000,000	25	1,105,000,000	25		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Pengelolaan Kekayaan Budaya	%	0	25	464,941,500	30	478,796,757	35	505,753,014	40	697,939,159	45	857,627,639	45	1,163,543,418	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Perpustakaan																
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan	%	100	100	248,249,470	100	255,647,304	100	270,040,247	100	372,655,541	100	457,919,129	100	621,258,883	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Kearsipan																
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan	%	100	100	0	100	510,000,000	100	535,000,000	100	560,000,000	100	585,000,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi	%	100	100	97,268,600	100	100,167,204	100	105,806,618	100	146,013,133	100	179,420,937	100	243,420,386	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan	%	100	100	0	100	60,000,000	100	52,000,000	100	15,000,000	100	17,500,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	%	100	100	47,500,000	100	48,915,500	100	51,669,443	100	71,303,831	100	87,618,147	100	118,871,541	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Urusan Pilihan																
	Kelautan dan Perikanan																
	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	persen	2	2	77,740,500	2	80,057,167	2	84,564,385	2	116,698,852	2	143,399,549	2	194,550,168	Dinas Pertanian
	Program Pengembangan Perikanan budidaya	Jumlah Produksi ikan	ton	355	351	220,693,700	352	227,270,372	353	240,065,694	354	331,290,658	355	407,089,961	355	552,298,950	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan	Meningkatnya kualitas SDM Perikanan		0	0	15,650,500	0	16,116,885	0	17,024,266	0	23,493,486	0	28,868,796	0	39,166,296	Dinas Pertanian

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Daya Saing Produk Perikanan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	persen	40	10	0	10	70,000,000	10	75,000,000	10	80,000,000	10	85,000,000	10		Dinas Pertanian
	Pariwisata																
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	meningkatnya jumlah PAD yang dikelola Dinas Pariwisata	rupiah (Milyar)	8041	10,086	8,491,764,000	10,091	81,424,000,000	10,097	11,960,000,000	10,112	12,326,000,000	10,127	13,153,000,000	10,127		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	meningkatnya jumlah wisatawan	orang	460905	483,950	2,042,367,950	508,148	2,103,230,515	533,555	2,221,642,393	560,233	3,065,866,502	588,245	3,767,336,758	588,245	5,111,145,779	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Pertanian																
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi	kelompok	10	11	23,763,600	12	24,471,755	13	25,849,515	14	35,672,331	15	43,834,160	15	59,469,805	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	persen	0	5	64,257,200	5	66,172,065	5	69,897,552	5	96,458,621	5	118,528,354	5	160,807,418	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	2	2	370,088,300	2	381,116,931	2	402,573,815	2	555,551,864	2	682,662,131	2	926,167,713	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian	persen	2	2	155,835,200	2	160,479,089	2	169,514,062	2	233,929,405	2	287,452,453	2	389,986,743	Dinas Pertanian
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)	persen	70	73	306,133,100	78	315,255,866	80	333,004,772	82	459,546,585	85	564,690,844	85	766,116,067	Dinas Pertanian
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persen	100	100	139,098,800	100	143,243,944	100	151,308,578	100	208,805,838	100	256,580,614	100	348,102,919	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	1	2	43,233,800	2	44,522,167	2	47,028,765	2	64,899,696	2	79,748,747	2	108,195,124	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	kwintal/Ha	66.7	67	87,987,400	67	90,609,425	67	95,710,735	67	132,080,814	67	162,300,905	67	220,193,638	Dinas Pertanian
	Kehutanan																
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan luas lahan yang dihijaukan	persen	2	2	61,740,800	2	63,580,676	2	67,160,268	2	92,681,170	2	113,886,621	2	154,509,979	Dinas Pertanian
	Perdagangan																
	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat Pengawasan dan Ketertiban Pasar	'%	100	100	374,907,000	100	386,079,229	100	407,815,489	100	562,785,375	100	691,550,669	100	938,226,792	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Tingkat Sarana dan Prasarana yang dikembangkan	$	100	100	2,393,450,000	100	2,464,774,810	100	2,603,541,632	100	3,592,887,452	100	4,414,940,101	100	5,989,749,235	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha	perusahaan	2553	300	554,000,000	350	570,509,200	400	602,628,868	450	831,627,838	500	1,021,904,287	500	1,386,417,546	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan

	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri	IKM	0	2	250,000,000	2	257,450,000	2	271,944,435	2	375,283,320	2	461,148,144	2	625,639,687	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL	lokasi	0	0	120,000,000	1	123,576,000	1	130,533,329	1	180,135,994	1	221,351,109	1	300,307,050	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah komoditas peredaran barang yang di awasi	jenis	20	20	705,000,000	20	726,009,000	20	766,883,307	22	1,058,298,963	22	1,300,437,766	22	1,764,303,917	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Industri																
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM	'%	1	2	616,750,000	2	635,129,150	2	670,886,921	2	925,823,951	2	1,137,652,471	2	1,543,453,108	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang	unit usaha	0	5	886,125,000	10	912,531,525	15	963,907,050	20	1,330,191,729	30	1,634,539,596	30	2,217,579,870	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya nilai produksi IKM	'%	4.1113E+11	2	47,527,000	2	48,943,305	2	51,698,813	2	71,344,361	2	87,667,951	2	118,939,110	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal	&	476	7	30,000,000	7	30,894,000	7	32,633,332	7	45,033,998	7	55,337,777	7	75,076,762	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB	Persen	0.07	0	185,000,000	0	190,513,000	0	201,238,882	0	277,709,657	0	341,249,627	0	462,973,368	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Perencanaan Pembangunan																
	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	'%	100	100	2,214,373,100	100	2,280,361,418	100	2,408,745,766	100	3,324,069,157	100	4,084,616,181	100	5,541,598,772	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	'%	100	100	84,875,500	100	87,404,790	100	92,325,680	100	127,409,438	100	156,560,717	100	212,405,925	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan sosial budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	'%	100	100	164,296,900	100	169,192,948	100	178,718,511	100	246,631,545	100	303,060,842	100	411,162,644	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	'%	100	100	574,865,000	100	591,995,977	100	625,325,351	100	862,948,984	100	1,060,391,711	100	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum	'%	60	100	125,647,500	100	129,391,796	100	136,676,554	100	188,613,644	100	231,768,446	100	314,440,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Pemenuhan Pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota	'%	60	65	316,265,200	70	325,689,903	75	344,026,244	80	474,756,217	85	583,380,440	85	791,472,243	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Peningkatan kualitas perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana	'%	50	50	0	60	75,000,000	65	85,000,000	70	100,000,000	75	110,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Bidang Pemerintahan Umum																
	Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah Usulan Bantuan Kemasyarakatan yang direalisasikan	Proposal /Tahun	42	60	15,000,000	60	15,447,000	60	16,316,666	60	22,516,999	60	27,668,889	60	37,538,381	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	'%	80	80	71,440,000	82	73,568,912	85	77,710,842	88	107,240,962	90	131,777,694	90	178,782,797	Sekretariat Daerah

	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	%	80	80	909,099,450	81	936,190,614	82	988,898,145	83	1,364,679,440	84	1,676,918,096	84	2,275,074,781	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH	%	80	80	7,627,000,000	85	7,854,284,600	90	8,296,480,823	95	11,449,143,536	100	14,068,707,577	100	19,087,015,569	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	%	80	80	245,162,000	81	252,467,828	82	266,681,766	83	368,020,837	84	452,224,005	84	613,532,308	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Kelembagaan Daerah	Peningkatan capaian kinerja daerah	peringkat nasional	74	62	721,357,000	55	742,853,439	50	784,676,087	40	1,082,853,000	35	1,330,609,767	35	1,805,238,271	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur	Jumlah penyelenggaraan diklat peningkatan profesionalisme aparatur	kegiatan	0	0	0	8	800,000,000	8	812,000,000	8	834,000,000	8	836,000,000	8		Badan Kepegawaian Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	%	100	100	559,000,000	100	575,658,200	100	608,067,757	100	839,133,504	100	1,031,127,250	100	1,398,930,340	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Meningkatnya Program peningkatan pelayanan kelurahan	%	100	100	380,000,000	100	391,324,000	100	413,355,541	100	570,430,647	100	700,945,179	100	950,972,324	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	persen	80	82	734,210,800	84	756,090,282	86	798,658,165	88	1,102,148,267	90	1,354,319,791	90	1,837,405,660	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	orang	80	0	30,740,000	80	31,656,052	80	33,438,288	80	46,144,837	80	56,702,776	80	76,928,656	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan	%	0	0	0	80	11,000,000	85	11,850,000	90	12,650,000	95	13,275,000	95		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kerjasama Tugas Sekretariat DPRD se Indonesia	%	100	100	109,500,000	100	112,763,100	100	119,111,663	100	164,374,094	100	201,982,887	100	274,030,183	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terstandarisasiny a Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	100	100	50,000,000	100	51,490,000	100	54,388,887	100	75,056,664	100	92,229,629	100	125,127,937	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemerintahan	%	100	100	12,522,580,525	100	12,895,753,425	100	13,621,784,342	100	18,798,062,393	100	23,099,059,068	100	31,338,493,438	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	%	100	100	36,000,000	100	37,072,800	100	39,159,999	100	54,040,798	100	66,405,333	100	90,092,115	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Perizinan	dokumen	2	2	12,666,000	1	13,043,447	1	13,777,793	1	19,013,354	1	23,363,610	1	31,697,409	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase capaian realisasi penyelenggaraan pemerintahan	'%	81	75	762,195,900	80	784,909,338	80	829,099,734	85	1,144,157,632	90	1,405,940,899	90	1,907,440,017	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kegiatan yang dikelola dengan sistem otomisasi	kegiatan	1	1	502,385,200	3	517,356,279	5	546,483,437	7	754,147,144	7	926,696,010	7	1,257,248,477	Badan Kepegawaian Daerah
	Peningkatan Kemitraan Legislatif dengan Eksekutif	Terjalinnya kemitraan yang sinergis antara legislatif dan eksekutif	'%	100	0	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukittinggi	persen	10	15	2,092,983,550	20	2,155,354,460	30	2,276,700,916	50	3,141,847,264	75	3,860,701,918	75	5,237,814,292	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ditindaklanjutinya Pengaduan Masyarakat Secara Komprehensif	'%	100	100	0	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Penyelenggaraan Adipura	Tingkat penilaian adipura	'%	71	75	0	77	0	80	325,000,000	85	325,000,000	87	325,000,000	87		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Penegasan Batas Wilayah	Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan	'%	80	80	671,985,500	81	692,010,668	82	730,970,869	83	1,008,739,799	84	1,239,539,464	84	1,681,683,191	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	'%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat inflasi daerah	'%	2.84	9	575,800,100	6	592,958,943	5	626,342,531	5	864,352,693	4	1,062,116,590	4	1,440,973,577	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rupiah (Milyar)	28892	31,758	3,021,888,000	34,927	3,111,940,262	38,432	3,287,142,499	42,311	4,536,256,649	46,605	5,574,152,170	46,605	7,562,452,249	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD'	'%	100	100	111,720,000	100	115,049,256	100	121,526,529	100	167,706,610	100	206,077,883	100	279,585,863	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Peningkatan program peningkatan kinerja LPMK dan RT	bln	12	12	63,000,000	12	64,877,400	12	68,529,998	12	94,571,397	12	116,209,332	12	157,661,201	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pembinaan PKK	Peningkatan program pembinaan PKK	bln	12	12	92,500,000	12	95,256,500	12	100,619,441	12	138,854,829	12	170,624,813	12	231,486,684	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan RT	'%	90	80	67,748,400	85	69,767,302	90	73,695,201	95	101,699,378	100	124,968,196	100	169,544,351	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Keuangan																
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi	opini	3	3	4,841,271,107	3	4,985,540,986	3	5,266,226,943	3	7,267,393,182	3	8,930,172,742	3	12,115,565,359	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																

	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang difasilitasi mengikuti pendidikan kedinasan	orang	1500	550	2,545,102,500	550	2,620,946,555	530	2,768,505,846	535	3,820,538,067	550	4,694,677,177	550	6,369,268,525	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai sesuai standar kompetensi	%	60	60	325,945,100	70	335,658,264	80	354,555,824	90	489,287,037	95	601,235,912	95	815,696,761	Badan Kepegawaian Daerah
	Bidang Pengawasan																
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	%	100	100	319,019,650	100	328,526,436	100	347,022,474	100	478,891,014	100	588,461,278	100	798,365,416	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	%	100	100	1,147,785,210	100	1,181,989,209	100	1,248,535,202	100	1,722,978,578	100	2,117,196,077	100	2,872,399,918	Inspektorat Daerah
	Bidang Penunjang Lainnya																
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan oleh masyarakat	kegiatan	5	5	416,710,000	5	429,127,958	5	453,287,862	5	625,537,250	5	768,660,172	5	1,042,841,256	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pendidikan politik masyarakat	Efektivitas kegiatan pendidikan politik masyarakat	kegiatan	7	3	1,088,151,500	3	1,120,578,415	3	1,183,666,979	3	1,633,460,432	3	2,007,196,178	3	2,723,163,055	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda	% kegiatan	0	100	173,906,100	100	179,088,502	100	189,171,184	100	261,056,235	100	320,785,901	100	435,210,232	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Penunjang Fungsi Pemerintahan																
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	465,300,000			100	300,000,000	100	60,000,000	100	75,000,000	100	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam menggunakan atribut kepegawaian	%	100	100	18,000,000	100	18,536,400	100	19,579,999	100	27,020,399	100	33,202,666	100	45,046,057	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	656,988,500	100	676,566,757	100	714,657,466	100	986,227,303	100	1,211,876,110	100	1,644,152,318	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	11,550,000	100	11,894,190	100	12,563,833	100	17,338,089	100	21,305,044	100	28,904,554	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	865,000,000	100	890,777,000	100	940,927,745	100	1,298,480,288	100	1,595,572,578	100	2,164,713,317	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	22,150,000	100	22,810,070	100	24,094,277	100	33,250,102	100	40,857,726	100	55,431,676	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	683,530,700	100	703,899,915	100	743,529,480	100	1,026,070,682	100	1,260,835,655	100	1,710,575,733	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	4,760,000	100	4,901,848	100	5,177,822	100	7,145,394	100	8,780,261	100	11,912,180	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	10,987,400	100	11,314,825	100	11,951,849	100	16,493,552	100	20,267,276	100	27,496,614	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	257,387,100	100	265,057,236	100	279,979,958	100	386,372,342	100	474,774,334	100	644,126,339	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	12,150,000	100	12,512,070	100	13,216,500	100	18,238,769	100	22,411,800	100	30,406,089	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	309,798,600	100	319,030,598	100	336,992,021	100	465,048,989	100	571,452,198	100	775,289,196	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	2,300,000	100	2,368,540	100	2,501,889	100	3,452,607	100	4,242,563	100	5,755,885	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	21,300,000	100	21,934,740	100	23,169,666	100	31,974,139	100	39,289,822	100	53,304,501	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	6,300,000	100	6,487,740	100	6,853,000	100	9,457,140	100	11,620,933	100	15,766,120	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	230,200,600	100	237,060,578	100	250,407,088	100	345,561,782	100	424,626,318	100	576,090,525	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	353,159,200	100	363,683,344	100	384,158,716	100	530,139,029	100	651,434,838	100	883,801,645	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	1,910,300	100	1,967,227	100	2,077,982	100	2,867,615	100	3,523,725	100	4,780,638	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja	%	100	100	17,950,000	100	18,484,910	100	19,525,610	100	26,945,342	100	33,110,437	100	44,920,930	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang berpakaian sesuai aturan	%	100	100	18,600,000	100	19,154,280	100	20,232,666	100	27,921,079	100	34,309,422	100	46,547,593	Inspektorat Daerah

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perentasee laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	2,020,000	100	2,080,196	100	2,197,311	100	3,032,289	100	3,726,077	100	5,055,169	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	65,000,000	100	66,937,000	100	70,705,553	100	97,573,663	100	119,898,517	100	162,666,319	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	19,000,000	100	19,566,200	100	20,667,777	100	28,521,532	100	35,047,259	100	47,548,616	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	343,857,700	100	354,104,659	100	374,040,752	100	516,176,237	100	634,277,361	100	860,524,095	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	132,000,000	100	135,933,600	100	143,586,662	100	198,149,593	100	243,486,220	100	330,337,755	Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,513,220,400	100	6,707,314,368	100	7,084,936,167	100	9,777,211,910	100	12,014,237,995	100	16,299,716,688	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	90	90	111,000,000	90	114,307,800	90	120,743,329	90	166,625,794	95	204,749,776	95	277,784,021	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	3,237,400,000	100	3,333,874,520	100	3,521,571,655	100	4,859,768,885	100	5,971,684,005	100	8,101,783,690	Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersedian Layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	5,111,604,400	100	5,263,930,211	100	5,560,289,482	100	7,673,199,485	100	9,428,827,527	100	12,792,090,306	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaiakan kinerja dan keuangann yang tersesusun tepat waktu	'%	100	100	78,666,400	100	81,010,659	100	85,571,559	100	118,088,751	100	145,107,457	100	196,867,287	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana & Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,260,897,000	100	32,280,646,000	100	1,601,292,000	100	2,436,344,000	100	2,867,171,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran & Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	169,750,000	100	174,808,550	100	184,650,271	100	254,817,374	100	313,119,590	100	424,809,347	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	46,800,000	100	48,194,640	100	50,907,998	100	70,253,038	100	86,326,933	100	117,119,749	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kesediaan layanan administrasi perkantoran		100	100	7,893,622,000	100	8,128,851,936	100	8,586,506,300	100	11,849,378,693	100	14,560,516,538	100	19,754,252,788	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persentase	100	100	9,377,500	100	9,656,950	100	10,200,636	100	14,076,877	100	17,297,667	100	23,467,745	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persentase	100	100	1,910,080,000	100	1,967,000,384	100	2,077,742,506	100	2,867,284,658	100	3,523,319,387	100	4,780,087,413	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	635,835,000	100	654,782,883	100	691,647,159	100	954,473,080	100	1,172,856,521	100	1,591,214,441	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% aparatur yang memenuhi standar kompetensi	%	60	60	1,342,932,360	70	1,382,951,744	80	1,460,811,928	90	2,015,920,460	95	2,477,163,061	95	3,360,767,125	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	122,654,500	100	126,309,604	100	133,420,835	100	184,120,752	100	226,247,580	100	306,950,092	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	482,769,475	100	497,156,005	100	525,145,888	100	724,701,326	100	890,512,989	100	1,208,158,973	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	16,450,000	100	16,940,210	100	17,893,944	100	24,693,642	100	30,343,548	100	41,167,091	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	%	100	100	878,892,100	100	905,083,085	100	956,039,262	100	1,319,334,182	100	1,621,197,843	100	2,199,479,113	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	100	214,300,000	100	220,686,140	100	233,110,770	100	321,692,862	100	395,296,189	100	536,298,340	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persentase	100	100	19,350,000	100	19,926,630	100	21,048,499	100	29,046,929	100	35,692,866	100	48,424,512	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	438,888,200	100	451,967,068	100	477,412,814	100	658,829,684	100	809,569,915	100	1,098,343,504	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase	100	100	16,165,900	100	16,647,644	100	17,584,906	100	24,267,171	100	29,819,499	100	40,456,114	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	2,698,700,000	100	2,779,121,260	100	2,935,585,787	100	4,051,108,386	100	4,978,001,985	100	6,753,655,293	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedispilanan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pagawai	%	100	100	150,000,000	100	154,470,000	100	163,166,661	100	225,169,992	100	276,688,886	100	375,383,812	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesedian Layan Administrasi Perkantoran	%	100	100	2,153,130,000	100	2,217,293,274	100	2,342,126,885	100	3,232,135,102	100	3,971,647,613	100	5,388,334,317	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	10,900,000	100	11,224,820	100	11,856,777	100	16,362,353	100	20,106,059	100	27,277,890	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	1,446,300,000	100	1,489,399,740	100	1,573,252,945	100	2,171,089,065	100	2,667,834,243	100	3,619,450,717	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persen	100	100	225,225,000	100	231,936,705	100	244,994,741	100	338,092,743	100	415,448,363	100	563,638,794	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	5,562,692,900	100	5,728,461,148	100	6,050,973,511	100	8,350,343,445	100	10,260,902,026	100	13,920,965,778	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persetase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	100	11,358,000	100	11,696,468	100	12,354,980	100	17,049,872	100	20,950,882	100	28,424,062	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan Administrasi	%	100	100	1,480,784,350	100	1,524,911,724	100	1,610,764,254	100	2,222,854,670	100	2,731,443,819	100	3,705,749,829	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capain kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	5,051,400	100	5,201,932	100	5,494,800	100	7,582,825	100	9,317,775	100	12,641,425	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	86,000,000	100	88,562,800	100	93,548,886	100	129,097,462	100	158,634,962	100	215,220,052	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	59,400,000	100	61,170,120	100	64,613,998	100	89,167,317	100	109,568,799	100	148,651,990	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	474,236,200	100	488,368,439	100	515,863,582	100	711,891,743	100	874,772,574	100	1,186,803,951	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	4,900,000	100	5,046,020	100	5,330,111	100	7,355,553	100	9,038,504	100	12,262,538	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	102,983,800	100	106,052,717	100	112,023,485	100	154,592,410	100	189,963,153	100	257,723,010	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	23,000,000	100	23,685,400	100	25,018,888	100	34,526,065	100	42,425,629	100	57,558,851	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	418,985,000	100	431,470,753	100	455,762,556	100	628,952,328	100	772,856,620	100	1,048,534,577	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	107,580,000	100	110,785,884	100	117,023,129	100	161,491,918	100	198,441,269	100	269,225,270	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	2,367,447,130	100	2,437,997,054	100	2,575,256,289	100	3,553,853,678	100	4,366,975,400	100	5,924,675,525	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu	%	100	100	14,575,800	100	15,010,159	100	15,855,231	100	21,880,218	100	26,886,412	100	36,476,796	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	65,100,000	100	67,039,980	100	70,814,331	100	97,723,777	100	120,082,977	100	162,916,574	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam Kehadiran dan pemakaian atribut	%	100	100	33,300,000	100	34,292,340	100	36,222,999	100	49,987,738	100	61,424,933	100	83,335,206	Dinas Pertanian
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	907,064,550	100	934,095,074	100	986,684,626	100	1,361,624,784	100	1,673,164,535	100	2,269,982,324	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun waktu	%	100	100	1,706,000	100	1,756,839	100	1,855,749	100	2,560,933	100	3,146,875	100	4,269,365	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	182,815,000	100	188,262,887	100	198,862,088	100	274,429,681	100	337,219,192	100	457,505,277	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,426,417,200	100	1,468,924,433	100	1,551,624,878	100	2,141,242,332	100	2,631,158,577	100	3,569,692,842	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuanagan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	3,878,500	100	3,994,079	100	4,218,946	100	5,822,145	100	7,154,252	100	9,706,174	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	173,300,000	100	178,464,340	100	188,511,882	100	260,146,398	100	319,667,893	100	433,693,431	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	unit	4	4	43,620,000	4	44,919,876	4	47,448,865	4	65,479,434	4	80,461,128	4	109,161,613	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	stel	40	40	40,500,000	40	41,706,900	40	44,054,998	40	60,795,898	40	74,705,999	40	101,353,629	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	bln	12	12	337,561,200	12	347,620,524	12	367,191,559	12	506,724,352	12	622,662,883	12	844,766,734	AUR BIRUGO TIGO BALEH

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen yang tersusun dengan tepat waktu	dokumen	3	3	5,980,000	3	6,158,204	3	6,504,911	3	8,976,777	3	11,030,664	3	14,965,301	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	874,400,000	100	900,457,120	100	951,152,856	100	1,312,590,941	100	1,612,911,748	100	2,188,237,369	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	40,500,000	100	41,706,900	100	44,054,998	100	60,795,898	100	74,705,999	100	101,353,629	GUGUAK PANJANG
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	339,733,200	100	349,857,249	100	369,554,212	100	509,984,813	100	626,669,339	100	850,202,292	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan YangTersusun Tepat Waktu	%	100	100	7,989,000	100	8,227,072	100	8,690,256	100	11,992,554	100	14,736,450	100	19,992,942	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	48,600,000	100	50,048,280	100	52,865,998	100	72,955,077	100	89,647,199	100	121,624,355	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	394,870,450	100	406,637,589	100	429,531,286	100	592,753,174	100	728,375,101	100	988,186,499	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	22,114,000	100	22,772,997	100	24,055,117	100	33,196,061	100	40,791,320	100	55,341,584	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	0	100	378,400,000	100	389,676,320	100	411,615,097	100	568,028,834	100	697,993,831	100	946,968,230	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	108,000,000	100	111,218,400	100	117,479,996	100	162,122,394	100	199,215,998	100	270,276,345	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,070,114,000	100	1,102,003,397	100	1,164,046,188	100	1,606,383,740	100	1,973,924,340	100	2,678,023,152	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	55,500,000	100	57,153,900	100	60,371,665	100	83,312,897	100	102,374,888	100	138,892,011	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	410,500,000	100	422,732,900	100	446,532,762	100	616,215,212	100	757,205,252	100	1,027,300,366	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,668,453,440	100	1,718,173,353	100	1,814,906,512	100	2,504,570,987	100	3,077,616,829	100	4,175,402,752	Dinas Kesehatan

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu	'%	100	100	9,342,400	100	9,620,804	100	10,162,455	100	14,024,188	100	17,232,922	100	23,379,905	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	740,875,000	100	762,953,075	100	805,907,333	100	1,112,152,120	100	1,366,612,525	100	1,854,083,212	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	153,000,000	100	157,559,400	100	166,429,994	100	229,673,392	100	282,222,664	100	382,891,488	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	65,250,000	100	67,194,450	100	70,977,498	100	97,948,947	100	120,359,666	100	163,291,958	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,425,988,650	100	6,617,483,112	100	6,990,047,411	100	9,646,265,427	100	11,853,330,957	100	16,081,414,109	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	39,792,100	100	40,977,905	100	43,284,961	100	59,733,246	100	73,400,212	100	99,582,068	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	4,770,756,100	80	4,912,924,632	85	5,189,522,289	90	7,161,540,758	95	8,800,101,284	95	11,939,097,412	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan dalam atribut pegawai	'%	80	85	40,000,000	90	41,192,000	95	43,511,110	100	60,045,331	100	73,783,703	100	100,102,350	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan adm perkantoran	'%	75	75	514,552,000	75	529,885,650	80	559,718,212	85	772,411,132	90	949,138,799	90	1,287,696,609	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	85	90	13,250,000	95	13,644,850	100	14,413,055	100	19,890,016	100	24,440,852	100	33,158,903	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	26,300,000	80	27,083,740	85	28,608,555	90	39,479,805	95	48,512,785	95	65,817,295	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen	90	91	153,000,000	92	157,559,400	93	166,429,994	94	229,673,392	95	282,222,664	95	382,891,488	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	90	91	1,268,502,000	92	1,306,303,360	93	1,379,848,239	94	1,904,190,569	95	2,339,869,372	95	3,174,500,777	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	Persen	90	91	13,271,000	92	13,666,476	93	14,435,898	94	19,921,540	95	24,479,588	95	33,211,457	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90	91	331,300,000	92	341,172,740	93	360,380,765	94	497,325,456	95	611,113,520	95	829,097,713	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.	%	100	100	19,300,000	100	19,875,140	100	20,994,110	100	28,971,872	100	35,600,637	100	48,299,384	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	6,750,000	100	6,951,150	100	7,342,500	100	10,132,650	100	12,451,000	100	16,892,272	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	10,086,100	100	10,386,666	100	10,971,435	100	15,140,580	100	18,604,745	100	25,241,058	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparaur	%	100	100	390,950,000	100	402,600,310	100	425,266,707	100	586,868,056	100	721,143,468	100	978,375,342	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	19,800,000	100	20,390,040	100	21,537,999	100	29,722,439	100	36,522,933	100	49,550,663	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layananan administrasi perkantoran	%	100	100	407,394,800	100	419,535,165	100	443,154,995	100	611,553,893	100	751,477,424	100	1,019,529,421	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	dokumen	0	100	5,100,000	100	5,251,980	100	5,547,666	100	7,655,780	100	9,407,422	100	12,763,050	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	%	100	100	2,150,000	100	2,214,070	100	2,338,722	100	3,227,437	100	3,965,874	100	5,380,501	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	11,300,000	100	11,636,740	100	12,291,888	100	16,962,806	100	20,843,896	100	28,278,914	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	14,850,000	100	15,292,530	100	16,153,499	100	22,291,829	100	27,392,200	100	37,162,997	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan layanan adminidtrasi perkantoran	%	100	100	328,776,550	100	338,574,091	100	357,635,813	100	493,537,421	100	606,458,783	100	822,782,631	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	20	30	70,000,000	40	72,086,000	50	76,144,442	60	105,079,330	70	129,121,480	70	175,179,112	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	100	100	82,950,000	100	85,421,910	100	90,231,164	100	124,519,006	100	153,008,954	100	207,587,248	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tercapaianya pentaan jabatan dan informasi dibidang sumber daya aparatur	'%	90	90	120,000,000	91	123,576,000	92	130,533,329	93	180,135,994	94	221,351,109	94	300,307,050	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	persen	15	0	0	20	50,000,000	25	80,000,000	30	100,000,000	35	120,000,000	35		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	198,880,150	100	204,806,778	100	216,337,400	100	298,545,612	100	366,852,848	100	497,709,259	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	100	230,000,000	100	236,854,000	100	250,188,880	100	345,260,655	100	424,256,292	100	575,588,512	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	0	0	70	83,994,005	70	250,000,000	70	252,500,000	70	280,000,000	70		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Ketersediaan SDM sesuai Bidang Keahlian	'%	70	0	0	70	100,000,000	75	110,000,000	80	121,000,000	85	133,100,000	85		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha	persen	50	50	0	60	70,000,000	65	120,000,000	70	120,000,000	75	125,000,000	75		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tabel 8.1
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2016-2021

No	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
						223,705,949,414		**396,336,742,725**		**398,125,708,594**		**432,741,625,893**		**478,822,982,084**		**520,501,153,707**	
	Urusan Wajib																
	Pendidikan					21,044,806,653		21,671,941,891		22,892,072,220		31,591,059,663		38,819,094,114		52,665,864,985	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	'% kegiatan	0	100	7,796,131,800	100	8,028,456,528	100	8,480,458,630	100	11,703,032,910	100	14,380,686,839	100	19,510,277,835	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya kegiatan untuk Pendidikan Anak Usia Dini	'%	0	100	505,396,950	100	520,457,779	100	549,759,552	100	758,668,182	100	932,251,462	100	1,264,785,558	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Menengah	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SMP	nilai	0	0	4,914,299,720	0	5,060,745,852	0	5,345,665,843	0	7,377,018,863	0	9,064,880,779	0	12,298,323,753	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Luar Biasa	Angka putus sekolah	'%	0.25	0	60,680,000	0	62,488,264	0	66,006,353	0	91,088,768	0	111,929,878	0	151,855,265	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SD	nilai	70	70	6,976,936,083	75	7,184,848,778	80	7,589,355,764	85	10,473,310,955	90	12,869,604,501	90	17,460,192,427	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Non Formal	Optimalisasi pelayanan non formal	'%	0	100	291,362,100	100	300,044,691	100	316,937,207	100	437,373,345	100	537,444,367	100	729,150,772	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya manjemen pelayanan pendidikan	'%	100	100	500,000,000	100	514,900,000	100	543,888,870	100	750,566,641	100	922,296,288	100	1,251,279,374	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Kesehatan																
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	'%	85	85	0	86	120,000,000	87	150,000,000	88	160,000,000	90	180,000,000	90		Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Ratio tenaga paramedis per satuan penduduk (Bidan dan perawat)	tenaga paramedis/satuan penduduk	12.95	13	0	13	145,000,000	13	152,000,000	13	159,000,000	13	166,000,000	13		Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	'%	100	100	6,459,177,000	100	6,651,660,475	100	7,026,148,959	100	9,696,085,564	100	11,914,549,941	100	16,164,469,905	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	'%	5972	65	504,635,400	65	519,673,535	70	548,931,155	70	757,524,994	75	930,846,712	75	1,262,879,735	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada rumah sakit	'%	25	25	0	25	0	25	0	25	8,000,000,000	25	12,000,000,000	25		Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	unit	0	0	68,000,000	1	70,085,000,000	0	40,085,000,000	0	0	0	0	0		Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pengawasan dan pengendalian makanan yang memenuhi syarat	'%	90	90	38,000,000	100	39,132,400	100	41,335,554	100	57,043,065	100	70,094,518	100	95,097,232	Dinas Kesehatan

	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tingkat Pemenuhan Kualitas lingkungan	'%	40	40	208,000,000	41	214,198,400	42	226,257,770	43	312,235,722	44	383,675,256	44	520,532,220	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	'%	100	100	2,617,063,925	100	2,695,052,430	100	2,846,783,882	100	3,928,561,757	100	4,827,416,687	100	6,549,356,219	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD	'%	0	60	134,639,000	100	138,651,242	100	146,457,307	100	202,111,084	100	248,354,100	100	336,942,007	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ()	puskes mas	0	2	734,639,000	5	756,531,242	7	799,123,951	7	1,102,791,053	7	1,355,109,645	7	1,838,477,256	Dinas Kesehatan
	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan	'%	20	80	410,000,000	85	422,218,000	90	445,988,873	95	615,464,645	95	756,282,956	95	1,026,049,087	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	puskes mas	0	0	20,000,000	1	20,596,000	1	21,755,555	2	30,022,666	3	36,891,852	3	50,051,175	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas. Pustu dan Jaringannya yang dapat melaksanakan pelayanan kesehatan	'%	100	100	4,270,840,000	100	2,900,000,000	100	13,400,000,000	100	3,030,000,000	100	4,391,000,000	100		Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi lebih	'%	0	15	373,000,000	13	384,115,400	13	405,741,097	12	559,922,714	10	688,033,031	10	933,454,413	Dinas Kesehatan
	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan	'%	90	90	2,574,920,000	91	2,651,652,616	92	2,800,940,658	93	3,865,298,108	95	4,749,678,316	95	6,443,888,571	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	'%	83.8	85	193,564,000	86	199,332,207	87	210,554,610	88	290,565,362	90	357,046,717	90	484,405,281	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita	'%	57.57	60	744,750,000	70	766,943,550	80	810,122,472	90	1,117,969,011	90	1,373,760,321	90	1,863,780,627	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	100	100	368,671,800	100	379,658,220	100	401,032,977	100	553,425,509	100	680,049,265	100	922,622,838	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pelaksanaan lingkungan sehat dikecamatan dan kelurahan	bln	0	0	25,000,000	0	25,745,000	0	27,194,444	0	37,528,332	0	46,114,814	0	62,563,969	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	'%	12.5	13	680,250,000	20	700,521,450	30	739,960,808	40	1,021,145,915	50	1,254,784,100	50	1,702,365,588	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	'%	65	65	2,300,000,000	70	360,000,000	75	7,700,000,000	80	23,365,000,000	85	23,046,500,000	85		Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	%	10	10	228,000,000	20	234,794,400	40	248,013,325	60	342,258,388	75	420,567,107	75	570,583,394	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap	%	98	98	4,050,000,000	99	4,170,690,000	100	4,405,499,847	100	6,079,589,789	100	7,470,599,933	100	10,135,362,928	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Pembangunan gedung	Persentase Gedung Negara dan Swasta yang Laik Fugsi	%	0	2	150,000,000	5	154,470,000	20	163,166,661	30	225,169,992	40	276,688,886	40	375,383,812	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengendalian banjir	Pengurangan titik genangan	titik	8	8	257,522,800	6	265,196,979	4	280,127,569	2	386,576,046	0	475,024,645	0	644,465,936	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	48	48	943,071,400	55	2,940,000,000	70	12,104,083,333	90	23,785,170,833	100	23,937,604,375	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	%	45	45	2,500,000,000	50	2,574,500,000	60	2,719,444,350	70	3,752,833,203	80	4,611,481,440	80	6,256,396,869	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	%	98	0	0	98	488,000,000	99	561,200,000	100	3,420,000,000	100	3,762,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang terpelihara / normalisasi	%	47	0	0	55	1,000,000,000	65	1,100,000,000	70	1,210,000,000	75	1,331,000,000	75		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	%	72	72	4,819,443,900	80	4,963,063,328	85	5,242,483,794	90	7,234,627,635	95	8,889,910,438	95	12,060,941,491	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	%	40	50	197,000,000	60	202,870,600	65	214,292,215	70	295,723,256	75	363,384,737	75	493,004,073	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota	%	60	60	464,726,200	65	478,575,041	70	505,518,816	75	697,615,965	80	857,230,498	80	1,163,004,617	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	%	40	50	862,629,700	70	888,336,065	75	938,349,386	80	1,294,922,152	85	1,591,200,340	85	2,158,781,502	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota	%	60	60	0	65	250,000,000	70	0	0	0	0	0	0		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat - alat berat ke PU an / Kebinamargaan	%	30	0	0	50	4,000,000,000	65	4,050,000,000	80	4,105,000,000	90	1,665,500,000	90		Dinas Pekerjaan Umum
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik	%	85	85	1,009,556,000	88	1,039,640,769	90	1,098,172,544	93	1,515,478,111	95	1,862,219,503	95	2,526,473,199	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik	%	85	85	4,723,190,700	88	4,863,941,783	90	5,137,781,705	93	7,090,138,753	95	8,712,362,500	95	11,820,062,204	Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan informasi / data base jalan	%	20	0	0	40	1,200,000,000	0	0	80	300,000,000	100	330,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Sosial																
	Program pembinaan anak terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	%	32	35	0	37	100,000,000	40	100,000,000	42	100,000,000	45	100,000,000	45		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	%	60	65	1,696,650,000	68	1,747,210,170	70	1,845,578,103	73	2,546,897,782	75	3,129,627,994	75	4,245,966,299	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	%	75	80	436,581,000	85	449,591,114	87	474,903,094	90	655,366,269	92	805,314,071	92	1,092,569,601	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	%	3	12	101,442,000	15	104,464,972	20	110,346,350	25	152,277,962	30	187,119,160	30	253,864,564	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial	%	25	25	3,000,000	50	3,089,400	75	3,263,333	75	4,503,400	100	5,533,778	100	7,507,676	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang meningkat kesejahteraannya	%	1.5	2	4,096,295,100	2	4,218,364,694	2	4,455,858,626	3	6,149,084,904	3	7,555,995,530	3	10,251,219,136	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial	%	75	75	347,600,000	80	357,958,480	80	378,111,542	85	521,793,929	90	641,180,379	90	869,889,421	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin	%	60	60	57,151,250	61	58,854,357	62	62,167,858	63	85,791,643	64	105,420,771	64	143,024,361	Sekretariat Daerah
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Penurunan Angka Kemiskinan	%	54	5	137,853,000	5	141,961,019	4	149,953,425	3	206,935,726	2	254,282,620	2	344,985,231	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya	%	2	2	0	3	300,000,000	4	430,000,000	5	630,000,000	6	630,000,000	6		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana areal pemakaman yang memadai	%	80	80	139,484,600	80	143,641,241	85	151,728,243	85	209,384,975	90	257,292,258	90	349,068,406	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	% Jalan dengan riol yang baik	%	40	40	3,804,507,000	55	3,917,881,309	70	4,138,458,026	90	5,711,072,076	100	7,017,765,367	100	9,521,002,274	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Pembangunan Rusunawa yang layak huni	unit	0	0	0	0	0	1	15,000,000,000	1	15,000,000,000	0	0	0		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	%	50	60	79,649,400	80	82,022,952	100	86,640,844	100	119,564,365	100	146,920,692	100	199,327,303	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	% Kesiap siangaan dan Tanggap terhadap Pencegahan Kebakatan Meningkat	'%	50	60	1,950,000,000	70	2,008,110,000	75	2,121,166,593	80	2,927,209,898	90	3,596,955,523	90	4,879,989,558	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Terjaganya kerukunan antar dan intern umat bergama	'%	0	100	78,847,500	100	81,197,156	100	85,768,555	10	118,360,606	100	145,441,513	100	197,320,501	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan program kualitas pemahaman dan pengamalan dan pembinaan kerukunan beragama	'%	0	100	128,000,000	100	131,814,400	100	139,235,551	100	192,145,060	100	236,107,850	100	320,327,520	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Meningkatnya aktifitas keagamaan dilingkungan masyarakat	kegiatan	3	5	194,215,000	6	200,002,607	7	211,262,754	8	291,542,600	9	358,247,547	9	486,034,447	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Kelompok masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan	Kelompok masyarakat/keluarahan	9	2	469,687,000	2	483,683,673	3	510,915,063	4	705,062,787	4	866,381,153	4	1,175,419,311	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Jumlah event keagamaan ditengah masyarakat	'%	3	3	6,497,174,600	6	6,690,790,403	9	7,067,481,903	12	9,753,125,026	15	11,984,640,032	15	16,259,561,131	Sekretariat Daerah
	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, damai dan berkualitas	'%	0	0	12,636,000	0	13,012,553	0	13,745,160	85	18,968,320	85	23,308,272	85	31,622,332	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terpantaunya kegiatan orang asing, lembaga asing, dan non govenment organization serta deteksi dini dan penanggulangan konflik sosial	'%	100	100	237,889,000	100	244,978,092	100	258,770,359	100	357,103,095	100	438,808,283	100	595,331,198	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat keamananan dan kenyamanan lingkungan	'%	40	50	300,022,600	60	308,963,273	70	326,357,906	75	450,373,910	85	553,419,461	85	750,824,182	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Sistem kebencanaan	% Jumlah Data dan Informasi tentang Kebencanan terpenuhi	'%	25	100	74,970,000	100	77,204,106	100	81,550,697	100	112,539,962	100	138,289,105	100	187,616,829	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana	Kapasitas dan Kwalitas Petugas BPBD Meningkat dalam Penanggulanga Kebencanaan	'%	50	70	399,840,000	70	411,755,232	70	434,937,052	70	600,213,131	70	737,541,896	70	1,000,623,090	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	%Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meningkat	'%	50	60	2,155,520,000	70	2,219,754,496	75	2,344,726,674	80	3,235,722,810	90	3,976,056,189	90	5,394,315,432	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Peningkatan Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	bln	0	100	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Efektivitas kegiatan pemberantasan narkoba	Kegiatan	3	3	196,137,000	3	201,981,883	3	213,353,463	3	294,427,778	3	361,792,854	3	490,844,365	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Terdeteksinya potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah	'%	100	100	427,527,500	100	440,267,820	100	465,054,898	100	641,775,759	100	788,614,053	100	1,069,912,685	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	'%	20	20	124,280,900	30	127,984,471	40	135,189,997	50	186,562,195	60	229,247,625	60	311,020,253	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	kasus	722	650	3,239,993,800	600	3,336,545,615	500	3,524,393,133	400	4,863,662,524	250	5,976,468,510	250	8,108,274,827	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat	'%	100	100	76,668,300	100	78,953,015	100	83,398,070	100	115,089,337	100	141,421,777	100	191,866,925	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Tingkat pelaksanaan peringatan hari-hari besar kenegaraan	'%	100	100	208,464,500	100	214,676,742	100	226,763,043	100	312,932,999	100	384,532,069	100	521,694,658	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Peningkatan program pemberrantasan penyakit masyarakat	bln	0	0	42,000,000	0	43,251,600	0	45,686,665	0	63,047,598	0	77,472,888	0	105,107,467	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Mneingkatnya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	bln	0	0	41,000,000	0	42,221,800	0	44,598,887	0	61,546,465	0	75,628,296	0	102,604,909	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas per tahun	persen	0	10	18,377,500	10	18,925,150	10	19,990,635	10	27,587,077	10	33,899,000	10	45,990,773	GUGUAK PANJANG
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Temuan Peristiwa Gangguan Ketertiban dan Keamanan disertai laporan tertulis	Laporan /Tahun	22	15	48,328,500	12	49,768,689	10	52,570,667	7	72,547,520	5	89,146,392	5	120,944,910	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Tenaga Kerja																
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas	'%	66	77	34,000,000	88	35,013,200	90	36,984,443	95	51,038,532	100	62,716,148	100	85,086,997	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat tenaga kerja yang memiliki keahlian	'%	52	55	657,579,500	57	677,175,369	60	715,300,342	65	987,114,472	65	1,212,966,264	65	1,645,631,330	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap UU ketenagakerjaan	%	5	5	581,070,001	6	598,385,887	7	632,075,012	8	872,263,517	9	1,071,837,410	9	1,454,161,814	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja	%	8	15	55,000,000	17	56,639,000	19	59,827,776	21	82,562,330	23	101,452,592	23	137,640,731	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang	%	70	70	345,140,000	70	355,425,172	70	375,435,609	70	518,101,141	70	636,642,682	70	863,733,126	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penurunan Kasus KDRT dan TPPO	%	50	50	0	50	0	50	200,000,000	50	205,000,000	50	210,000,000	50		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kesejahteraan perempuan	%	0	35	0	30	200,000,000	25	310,000,000	20	320,000,000	15	320,000,000	15		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tingkat kemiskinan menurun menjadi 2.84 %	%	4.58	4	352,400,000	4	362,901,520	3	383,332,876	3	528,999,368	3	650,034,424	3	881,901,703	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Pangan																
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	2400	2,400	387,248,000	2,400	398,787,990	2,400	421,239,754	2,400	581,310,861	2,400	714,314,786	2,400	969,110,870	Kantor Ketahanan Pangan
		Ketersediaan protein perkapita	gr/kap/hr	63	63		63	0	63	0	63	0	63	0	63	0	
	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	84.1	84	293,333,800	84	302,075,147	85	319,081,978	85	440,333,130	85	541,081,350	85	734,085,067	Kantor Ketahanan Pangan
	Pertanahan																
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunan tanah	%	80	80	591,580,000	81	609,209,084	82	643,507,555	83	888,040,426	84	1,091,224,076	84	1,480,463,704	Sekretariat Daerah
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah	%	90	90	151,928,000	91	2,152,000,000	92	154,000,000	93	2,156,500,000	94	158,500,000	94	2,156,500,000	Sekretariat Daerah
	Lingkungan Hidup																
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	Persentase	8	10	1,233,986,000	12	1,270,758,783	13	1,342,302,502	14	1,852,377,453	15	2,276,201,414	15	3,088,122,459	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH/ Non Hijau	%	7.78	8	600,000,000	8	2,000,000,000	8	5,700,000,000	9	6,420,000,000	9	4,662,000,000	9		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase kelompok masyarakat yang memahami pengelolaan RTH	%	10	20	0	30	0	40	110,000,000	50	115,000,000	60	120,000,000	60		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemenuhan RTH	%	20	20	0	22	100,000,000	25	120,000,000	28	140,000,000	30	0	30		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan/pengelolaan persampahan	Persen	90	90	5,799,341,500	90	5,972,161,877	100	6,308,394,590	100	8,705,584,535	100	10,697,422,276	100	14,513,192,802	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup	%	50	60	451,509,800	70	464,964,792	80	491,142,310	90	677,776,388	95	832,851,625	95	1,129,929,800	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	%	80	70	424,576,950	60	437,229,343	50	461,845,355	40	637,346,590	30	783,171,490	30	1,062,528,760	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan pengendalian	%	50	55	0	60	380,000,000	65	1,055,000,000	70	1,055,000,000	75	1,055,000,000	75		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	%	0	0	0	50	0	55	270,000,000	60	175,000,000	65	180,000,000	65		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Informasi Lingkungan Hidup	%	0	0	0	60	100,000,000	65	120,000,000	70	140,000,000	75	160,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat capaian pelayanan administrasi kependudukan	%	67	70	662,010,550	75	681,738,464	80	720,120,340	85	993,766,069	90	1,221,139,746	90	1,656,720,293	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi dan kelengkapan data kependudukan	%	0	0	0	85	257,100,000	90	139,760,000	95	127,366,000	100	114,171,000	100		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tiingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	%	15	20	497,375,200	25	512,196,981	30	541,033,671	34	746,626,466	40	917,454,601	40	1,244,710,658	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	%	15	20	1,898,758,100	25	1,955,341,091	30	2,065,426,795	34	2,850,288,977	40	3,502,435,095	40	4,751,753,693	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya peren perempuan dipedesaan	%	100	100	184,000,000	100	189,483,200	100	200,151,104	100	276,208,524	100	339,405,034	100	460,470,810	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan program keberdayaan masyarakat pedesaan	bln	12	12	151,000,000	12	155,499,800	12	164,254,439	12	226,671,125	12	278,533,479	12	377,886,371	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	640,000,000	100	659,072,000	100	696,177,754	100	960,725,300	100	1,180,539,249	100	1,601,637,599	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertahunnya	persen	802661	3	581,898,000	3	599,238,560	3	632,975,691	3	873,506,454	3	1,073,364,731	3	1,456,233,930	GUGUAK PANJANG

	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun	'%	5	7	180,868,900	9	186,258,793	12	196,745,163	15	271,508,325	17	333,629,430	17	452,635,048	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Tingkat partisipasi perempuan dalam pencapaian tujuan program pemerintah	'%	100	80	341,078,000	85	351,242,124	90	371,017,056	95	512,003,537	100	629,149,947	100	853,567,733	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatkanya persentase aktifitas guna peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakn oleh pemerintah maupun masyarakat	Persen	10	10	543,400,500	10	559,593,835	10	591,098,968	10	815,716,576	10	1,002,352,528	10	1,359,891,675	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	'%	80	80	615,303,000	85	633,639,029	85	669,312,907	90	923,651,811	90	1,134,983,346	90	1,539,831,905	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	'%	15	15	2,180,510,600	20	2,245,489,816	25	2,371,910,893	30	3,273,237,032	34	4,022,153,665	34	5,456,855,877	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	'%	20	25	193,442,900	30	199,207,498	35	210,422,881	40	290,383,575	45	356,823,337	45	484,102,222	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya program peningkatan usaha ekonomi masyarakat	bln	0	0	195,538,000	0	201,365,032	0	212,701,884	0	293,528,600	0	360,687,943	0	489,345,332	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat	pelaku	0	0	141,194,000	90	145,401,581	120	153,587,690	90	211,951,013	120	260,445,404	120	353,346,280	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	'%	3	3	77,821,500	5	80,140,581	6	84,652,495	8	116,820,444	10	143,548,961	10	194,752,876	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	100 % data akurat	'%	80	85	115,152,000	88	118,583,530	90	125,259,782	93	172,858,500	95	212,408,524	95	288,174,645	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program pelayanan kontrasepsi	Tercapainya program KB	'%	75	75	0	75	21,000,000	80	160,000,000	80	170,000,000	80	25,000,000	80		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 % Kelompok Kerja paham fungsi keluarga	'%	100	100	0	100	0	100	45,000,000	100	50,000,000	100	0	100		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75 % sekolah dan perguruan tinggi memiliki PIK R/M	'%	25	35	209,025,650	45	215,254,614	55	227,373,449	65	313,775,360	75	385,567,162	75	523,098,969	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Keluarga Berencana	Jumlah PUS ber KB 80 %	'%	1.77	2	1,463,946,000	2	1,507,571,591	2	1,592,447,871	1	2,197,578,062	1	2,700,383,923	1	3,663,610,869	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Peningkatan Tingkat Tahapan Kelompok Kegiatan	tingkat	0	0	71,247,000	0	73,370,161	0	77,500,901	0	106,951,243	0	131,421,687	0	178,299,803	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase Kelurahan yang memiliki WPA (Warga Peduli AIDS)	'%	8	24	465,000,000	24	478,857,000	30	505,816,649	40	698,026,976	50	857,735,548	50	1,163,689,818	Dinas Kesehatan
	Perhubungan																
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berwawasan lingkungan	Persen	70	0	0	72	7,800,000,000	73	1,625,000,000	74	4,300,000,000	75	1,250,000,000	75		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Optimalisasi Peningkatan Pengoperasian Kendaraan	Persen	80	81	180,000,000	82	185,364,000	83	195,799,993	84	270,203,991	85	332,026,664	85	450,460,575	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas lalu ,intas yang memadai dan berwawasan lingkungan	Persen	70	71	5,351,566,000	72	5,511,042,667	73	5,821,314,369	74	8,033,413,829	75	9,871,458,913	75	13,392,608,308	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Terwujudnya Angkutan Yang Selamat, Aman, Nyaman, Terjangkau dan Terpadu	Persen	80	81	51,379,000	82	52,910,094	83	55,888,933	84	77,126,727	85	94,773,322	85	128,578,966	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terciptanya Lalu Lintas Yang Aman, Tertib dan Lancar	Persen	70	71	763,000,000	72	785,737,400	73	829,974,416	74	1,145,364,694	75	1,407,424,135	75	1,909,452,325	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Persen	70	71	260,000,000	72	267,748,000	73	282,822,212	74	390,294,653	75	479,594,070	75	650,665,274	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Komunikasi dan Informatika																
	Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)	Kemudahan mendapatkan informasi melalui media elektronik menuju smart city	Persen	80	80	81,000,000	82	1,135,000,000	85	1,090,000,000	87	95,000,000	90	100,000,000	90	1,090,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Persen	80	80	142,000,000	82	146,231,600	85	154,464,439	87	213,160,926	90	261,932,146	90	355,363,342	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Persentase tingkat ketercapaian penyebaran informasi Pemda Bukittinggi kepada masyarakat	'%	80	80	2,485,337,800	83	2,559,400,866	85	2,703,495,135	88	3,730,823,287	90	4,584,435,655	90	6,219,703,853	Sekretariat Daerah

	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tingkat pencapaian pelayanan informasi kepada publik	%	80	80	419,853,220	81	432,364,846	82	456,706,987	83	630,255,642	84	774,458,133	84	1,050,707,348	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya sarana dan prasarana TIK menuju smart city	Persen	80	80	1,034,736,000	82	1,065,571,133	85	1,125,562,788	87	1,553,276,647	90	1,908,666,344	90	2,589,487,628	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat	publikasi	0	12	16,675,000	12	17,171,915	12	18,138,694	12	25,031,397	12	30,758,581	12	41,730,167	GUGUAK PANJANG
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat Melalu Media Cetak Dan Elektronik	Publikasi/Tahun	24	24	11,450,000	24	11,791,210	27	12,455,055	27	17,187,976	29	21,120,585	29	28,654,298	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan program komunikasi, informasi dan media massa	%	100	100	0	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi di masyarakat	bulan	12	12	52,678,000	12	54,247,804	12	57,301,956	12	79,076,699	12	97,169,448	12	131,829,790	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan Telekomunikasi	Persen	80	80	257,000,000	82	264,658,600	85	279,558,879	87	385,791,253	90	474,060,292	90	643,157,598	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	82.52	83	217,000,000	84	223,466,600	85	236,047,770	86	325,745,922	87	400,276,589	87	543,055,248	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang tersentuh pembiayaan	%	30	33	45,000,000	36	46,341,000	39	48,949,998	42	67,550,998	45	83,006,666	45	112,615,144	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	unit	3	20	460,000,000	20	473,708,000	20	500,377,760	20	690,521,309	20	848,512,585	20	1,151,177,024	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
		Jumlah UMKM	unit	9236	9,236		9,246	0	9,256	0	9,266	0	9,276	0	9,276	0	
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi sehat	unit	11	12	290,000,000	13	298,642,000	14	315,455,545	15	435,328,652	16	534,931,847	16	725,742,037	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Penanaman Modal																
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor	Perusahaan	70	80	32,806,100	90	33,783,722	100	35,685,745	110	49,246,329	120	60,513,889	120	82,099,193	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	persen	2500000000	10	114,286,000	10	117,691,723	10	124,317,767	10	171,558,518	10	210,811,107	10	286,007,429	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi	dokumen	0	0	0	1	100,000,000	1	130,000,000	1	125,000,000	1	0	1		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal

	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Lancarnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase	100	100	377,525,700	100	388,775,966	100	410,664,053	100	566,716,393	100	696,381,103	100	944,780,243	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	nilai mutu	7.2	7	293,324,000	7	302,065,055	8	319,071,318	8	440,318,419	8	541,063,273	8	734,060,542	GUGUAK PANJANG
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	%	80	85	586,361,100	90	603,834,661	90	637,830,552	90	880,206,162	90	1,081,597,332	90	1,467,403,100	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Kepemudaan dan Olahraga																
	Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah capaian program pembinaan kepemudaan	%	0	100	931,257,100	100	959,008,562	100	1,013,000,744	100	1,397,941,026	100	1,717,789,933	100	2,330,525,602	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	%	0	100	368,905,750	100	379,899,141	100	401,287,463	100	553,776,699	100	680,480,808	100	923,208,312	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai	unit	3	3	3,385,741,500	3	3,486,636,597	4	3,682,934,237	5	5,082,449,247	6	6,245,313,635	6	8,473,017,009	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	%	100	100	824,261,000	100	848,823,978	100	896,612,768	100	1,237,325,619	100	1,520,425,721	100	2,062,761,576	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan	%	100	0	0	20	0	40	145,000,000	60	155,000,000	80	165,000,000	80		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	persentase sekolah yang bebas narkoba	%	0	0	0	0	0	20	80,000,000	40	85,000,000	60	90,000,000	60		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Statistik																
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pemenuhan Data pembangunan Daerah	%	66	70	244,655,500	80	251,946,234	85	266,130,807	90	367,260,513	100	451,289,719	100	612,264,762	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD	Persen	10	0	0	20	50,000,000	30	57,500,000	40	60,000,000	50	65,000,000	50		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi statistik daerah	persen	100	100	29,249,800	100	30,121,444	100	31,817,281	100	43,907,848	100	53,953,964	100	73,199,343	Dinas Pertanian
	Persandian																
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan TIK OLeh SKPD dan Layanan Kepada Publik dalam mewujudkan smart city	Persen	80	81	531,000,000	82	535,000,000	83	1,055,000,000	84	1,056,000,000	85	567,000,000	85	1,056,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	%	80	80	574,865,000	82	591,995,977	85	625,325,351	88	862,948,984	90	1,060,391,711	90	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
	Kebudayaan																
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang dilaksanakan masyarakat	kali	4	52	363,480,000	57	374,311,704	59	395,385,453	61	545,631,925	63	670,472,510	63	909,630,054	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	sanggar	6	6	892,148,000	7	918,734,010	13	970,458,735	16	1,339,233,055	19	1,645,649,577	19	2,232,652,782	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	kali	0	1	301,845,000	1	310,839,981	1	328,340,272	1	453,109,575	1	556,781,046	1	755,384,845	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan Program Pengembangan nilai budaya	bln	0	12	75,000,000	12	77,235,000	12	81,583,331	12	112,584,996	12	138,344,443	12	187,691,906	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya aktifitas pengembangan nilai adat dan budaya di masyarakat	kegiatan	8	8	6,352,000	9	6,541,290	10	6,909,564	11	9,535,199	12	11,716,852	12	15,896,253	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya	kegiatan	0	0	0	3	374,500,000	4	426,200,000	4	426,660,000	4	448,872,000	4		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	%	0	5	0	10	997,000,000	15	51,189,000,000	20	7,330,000,000	25	1,105,000,000	25		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Pengelolaan Kekayaan Budaya	%	0	25	464,941,500	30	478,796,757	35	505,753,014	40	697,939,159	45	857,627,639	45	1,163,543,418	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Perpustakaan																
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan	%	100	100	248,249,470	100	255,647,304	100	270,040,247	100	372,655,541	100	457,919,129	100	621,258,883	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Kearsipan																
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan	%	100	100	0	100	510,000,000	100	535,000,000	100	560,000,000	100	585,000,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi	%	100	100	97,268,600	100	100,167,204	100	105,806,618	100	146,013,133	100	179,420,937	100	243,420,386	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan	%	100	100	0	100	60,000,000	100	52,000,000	100	15,000,000	100	17,500,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	%	100	100	47,500,000	100	48,915,500	100	51,669,443	100	71,303,831	100	87,618,147	100	118,871,541	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Urusan Pilihan																
	Kelautan dan Perikanan																
	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	persen	2	2	77,740,500	2	80,057,167	2	84,564,385	2	116,698,852	2	143,399,549	2	194,550,168	Dinas Pertanian
	Program Pengembangan Perikanan budidaya	Jumlah Produksi ikan	ton	355	351	220,693,700	352	227,270,372	353	240,065,694	354	331,290,658	355	407,089,961	355	552,298,950	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan	Meningkatnya kualitas SDM Perikanan		0	0	15,650,500	0	16,116,885	0	17,024,266	0	23,493,486	0	28,868,796	0	39,166,296	Dinas Pertanian

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Daya Saing Produk Perikanan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	persen	40	10	0	10	70,000,000	10	75,000,000	10	80,000,000	10	85,000,000	10		Dinas Pertanian
	Pariwisata																
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	meningkatnya jumlah PAD yang dikelola Dinas Pariwisata	rupiah (Milyar)	8041	10,086	8,491,764,000	10,091	81,424,000,000	10,097	11,960,000,000	10,112	12,326,000,000	10,127	13,153,000,000	10,127		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	meningkatnya jumlah wisatawan	orang	460905	483,950	2,042,367,950	508,148	2,103,230,515	533,555	2,221,642,393	560,233	3,065,866,502	588,245	3,767,336,758	588,245	5,111,145,779	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Pertanian																
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi	kelompok	10	11	23,763,600	12	24,471,755	13	25,849,515	14	35,672,331	15	43,834,160	15	59,469,805	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	persen	0	5	64,257,200	5	66,172,065	5	69,897,552	5	96,458,621	5	118,528,354	5	160,807,418	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	2	2	370,088,300	2	381,116,931	2	402,573,815	2	555,551,864	2	682,662,131	2	926,167,713	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian	persen	2	2	155,835,200	2	160,479,089	2	169,514,062	2	233,929,405	2	287,452,453	2	389,986,743	Dinas Pertanian
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)	persen	70	73	306,133,100	78	315,255,866	80	333,004,772	82	459,546,585	85	564,690,844	85	766,116,067	Dinas Pertanian
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persen	100	100	139,098,800	100	143,243,944	100	151,308,578	100	208,805,838	100	256,580,614	100	348,102,919	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	1	2	43,233,800	2	44,522,167	2	47,028,765	2	64,899,696	2	79,748,747	2	108,195,124	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	kwintal/Ha	66.7	67	87,987,400	67	90,609,425	67	95,710,735	67	132,080,814	67	162,300,905	67	220,193,638	Dinas Pertanian
	Kehutanan																
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan luas lahan yang dihijaukan	persen	2	2	61,740,800	2	63,580,676	2	67,160,268	2	92,681,170	2	113,886,621	2	154,509,979	Dinas Pertanian
	Perdagangan																
	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat Pengawasan dan Ketertiban Pasar	'%	100	100	374,907,000	100	386,079,229	100	407,815,489	100	562,785,375	100	691,550,669	100	938,226,792	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Tingkat Sarana dan Prasarana yang dikembangkan	$	100	100	2,393,450,000	100	2,464,774,810	100	2,603,541,632	100	3,592,887,452	100	4,414,940,101	100	5,989,749,235	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha	perusahaan	2553	300	554,000,000	350	570,509,200	400	602,628,868	450	831,627,838	500	1,021,904,287	500	1,386,417,546	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan

	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri	IKM	0	2	250,000,000	2	257,450,000	2	271,944,435	2	375,283,320	2	461,148,144	2	625,639,687	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL	lokasi	0	0	120,000,000	1	123,576,000	1	130,533,329	1	180,135,994	1	221,351,109	1	300,307,050	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah komoditas peredaran barang yang di awasi	jenis	20	20	705,000,000	20	726,009,000	20	766,883,307	22	1,058,298,963	22	1,300,437,766	22	1,764,303,917	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Industri																
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM	'%	1	2	616,750,000	2	635,129,150	2	670,886,921	2	925,823,951	2	1,137,652,471	2	1,543,453,108	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang	unit usaha	0	5	886,125,000	10	912,531,525	15	963,907,050	20	1,330,191,729	30	1,634,539,596	30	2,217,579,870	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya nilai produksi IKM	'%	4.1113E+11	2	47,527,000	2	48,943,305	2	51,698,813	2	71,344,361	2	87,667,951	2	118,939,110	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal	&	476	7	30,000,000	7	30,894,000	7	32,633,332	7	45,033,998	7	55,337,777	7	75,076,762	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB	Persen	0.07	0	185,000,000	0	190,513,000	0	201,238,882	0	277,709,657	0	341,249,627	0	462,973,368	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Bidang Pemerintahan Umum																
	Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah Usulan Bantuan Kemasyarakatan yang direalisasikan	Proposal /Tahun	42	60	15,000,000	60	15,447,000	60	16,316,666	60	22,516,999	60	27,668,889	60	37,538,381	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	'%	80	80	71,440,000	82	73,568,912	85	77,710,842	88	107,240,962	90	131,777,694	90	178,782,797	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	'%	80	80	909,099,450	81	936,190,614	82	988,898,145	83	1,364,679,440	84	1,676,918,096	84	2,275,074,781	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH	'%	80	80	7,627,000,000	85	7,854,284,600	90	8,296,480,823	95	11,449,143,536	100	14,068,707,577	100	19,087,015,569	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	'%	80	80	245,162,000	81	252,467,828	82	266,681,766	83	368,020,837	84	452,224,005	84	613,532,308	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Kelembagaan Daerah	Peningkatan capaian kinerja daerah	peringkat nasional	74	62	721,357,000	55	742,853,439	50	784,676,087	40	1,082,853,000	35	1,330,609,767	35	1,805,238,271	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur	Jumlah penyelenggaraan diklat peningkatan profesionalisme aparatur	kegiatan	0	0	0	8	800,000,000	8	812,000,000	8	834,000,000	8	836,000,000	8		Badan Kepegawaian Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	'%	100	100	559,000,000	100	575,658,200	100	608,067,757	100	839,133,504	100	1,031,127,250	100	1,398,930,340	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Meningkatnya Program peningkatan pelayanan kelurahan	'%	100	100	380,000,000	100	391,324,000	100	413,355,541	100	570,430,647	100	700,945,179	100	950,972,324	AUR BIRUGO TIGO BALEH

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	persen	80	82	734,210,800	84	756,090,282	86	798,658,165	88	1,102,148,267	90	1,354,319,791	90	1,837,405,660	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	orang	80	0	30,740,000	80	31,656,052	80	33,438,288	80	46,144,837	80	56,702,776	80	76,928,656	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan	%	0	0	0	80	11,000,000	85	11,850,000	90	12,650,000	95	13,275,000	95		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kerjasama Tugas Sekretariat DPRD se Indonesia	%	100	100	109,500,000	100	112,763,100	100	119,111,663	100	164,374,094	100	201,982,887	100	274,030,183	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terstandarisasinya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	100	100	50,000,000	100	51,490,000	100	54,388,887	100	75,056,664	100	92,229,629	100	125,127,937	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemerintahan	%	100	100	12,522,580,525	100	12,895,753,425	100	13,621,784,342	100	18,798,062,393	100	23,099,059,068	100	31,338,493,438	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	%	100	100	36,000,000	100	37,072,800	100	39,159,999	100	54,040,798	100	66,405,333	100	90,092,115	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Perizinan	dokumen	2	2	12,666,000	1	13,043,447	1	13,777,793	1	19,013,354	1	23,363,610	1	31,697,409	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase capaian realisasi penyelenggaraan pemerintahan	%	81	75	762,195,900	80	784,909,338	80	829,099,734	85	1,144,157,632	90	1,405,940,899	90	1,907,440,017	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kegiatan yang dikelola dengan sistem otomisasi	kegiatan	1	1	502,385,200	3	517,356,279	5	546,483,437	7	754,147,144	7	926,696,010	7	1,257,248,477	Badan Kepegawaian Daerah
	Peningkatan Kemitraan Legislatif dengan Eksekutif	Terjalinnya kemitraan yang sinergis antara legislatif dan eksekutif	%	100	0	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukittinggi	persen	10	15	2,092,983,550	20	2,155,354,460	30	2,276,700,916	50	3,141,847,264	75	3,860,701,918	75	5,237,814,292	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ditindaklanjutinya Pengaduan Masyarakat Secara Komprehensif	'%	100	100	0	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Penyelenggaraan Adipura	Tingkat penilaian adipura	'%	71	75	0	77	0	80	325,000,000	85	325,000,000	87	325,000,000	87		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Penegasan Batas Wilayah	Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan	'%	80	80	671,985,500	81	692,010,668	82	730,970,869	83	1,008,739,799	84	1,239,539,464	84	1,681,683,191	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	'%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat inflasi daerah	'%	2.84	9	575,800,100	6	592,958,943	5	626,342,531	5	864,352,693	4	1,062,116,590	4	1,440,973,577	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rupiah (Milyar)	28892	31,758	3,021,888,000	34,927	3,111,940,262	38,432	3,287,142,499	42,311	4,536,256,649	46,605	5,574,152,170	46,605	7,562,452,249	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD'	'%	100	100	111,720,000	100	115,049,256	100	121,526,529	100	167,706,610	100	206,077,883	100	279,585,863	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Peningkatan program peningkatan kinerja LPMK dan RT	bln	12	12	63,000,000	12	64,877,400	12	68,529,998	12	94,571,397	12	116,209,332	12	157,661,201	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pembinaan PKK	Peningkatan program pembinaan PKK	bln	12	12	92,500,000	12	95,256,500	12	100,619,441	12	138,854,829	12	170,624,813	12	231,486,684	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan RT	'%	90	80	67,748,400	85	69,767,302	90	73,695,201	95	101,699,378	100	124,968,196	100	169,544,351	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Keuangan																
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi	opini	3	3	4,841,271,107	3	4,985,540,986	3	5,266,226,943	3	7,267,393,182	3	8,930,172,742	3	12,115,565,359	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Bidang Pengawasan																
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	'%	100	100	319,019,650	100	328,526,436	100	347,022,474	100	478,891,014	100	588,461,278	100	798,365,416	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	'%	100	100	1,147,785,210	100	1,181,989,209	100	1,248,535,202	100	1,722,978,578	100	2,117,196,077	100	2,872,399,918	Inspektorat Daerah
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																
	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang difasilitasi mengikuti pendidikan kedinasan	orang	1500	550	2,545,102,500	550	2,620,946,555	530	2,768,505,846	535	3,820,538,067	550	4,694,677,177	550	6,369,268,525	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai sesuai standar kompetensi	'%	60	60	325,945,100	70	335,658,264	80	354,555,824	90	489,287,037	95	601,235,912	95	815,696,761	Badan Kepegawaian Daerah
	Perencanaan Pembangunan																

	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	2,214,373,100	100	2,280,361,418	100	2,408,745,766	100	3,324,069,157	100	4,084,616,181	100	5,541,598,772	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	%	100	100	84,875,500	100	87,404,790	100	92,325,680	100	127,409,438	100	156,560,717	100	212,405,925	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan sosial budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	%	100	100	164,296,900	100	169,192,948	100	178,718,511	100	246,631,545	100	303,060,842	100	411,162,644	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	%	100	100	574,865,000	100	591,995,977	100	625,325,351	100	862,948,984	100	1,060,391,711	100	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum	%	60	100	125,647,500	100	129,391,796	100	136,676,554	100	188,613,644	100	231,768,446	100	314,440,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Pemenuhan Pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota	%	60	65	316,265,200	70	325,689,903	75	344,026,244	80	474,756,217	85	583,380,440	85	791,472,243	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Peningkatan kualitas perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana	%	50	50	0	60	75,000,000	65	85,000,000	70	100,000,000	75	110,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Bidang Penunjang Lainnya																
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan oleh masyarakat	kegiatan	5	5	416,710,000	5	429,127,958	5	453,287,862	5	625,537,250	5	768,660,172	5	1,042,841,256	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pendidikan politik masyarakat	Efektivitas kegiatan pendidikan politik masyarakat	kegiatan	7	3	1,088,151,500	3	1,120,578,415	3	1,183,666,979	3	1,633,460,432	3	2,007,196,178	3	2,723,163,055	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda	% kegiatan	0	100	173,906,100	100	179,088,502	100	189,171,184	100	261,056,235	100	320,785,901	100	435,210,232	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Penunjang Fungsi Pemerintahan																
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	465,300,000			100	300,000,000	100	60,000,000	100	75,000,000	100	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam menggunakan atribut kepegawaian	%	100	100	18,000,000	100	18,536,400	100	19,579,999	100	27,020,399	100	33,202,666	100	45,046,057	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	656,988,500	100	676,566,757	100	714,657,466	100	986,227,303	100	1,211,876,110	100	1,644,152,318	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	11,550,000	100	11,894,190	100	12,563,833	100	17,338,089	100	21,305,044	100	28,904,554	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	865,000,000	100	890,777,000	100	940,927,745	100	1,298,480,288	100	1,595,572,578	100	2,164,713,317	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	22,150,000	100	22,810,070	100	24,094,277	100	33,250,102	100	40,857,726	100	55,431,676	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	683,530,700	100	703,899,915	100	743,529,480	100	1,026,070,682	100	1,260,835,655	100	1,710,575,733	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	4,760,000	100	4,901,848	100	5,177,822	100	7,145,394	100	8,780,261	100	11,912,180	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	10,987,400	100	11,314,825	100	11,951,849	100	16,493,552	100	20,267,276	100	27,496,614	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	257,387,100	100	265,057,236	100	279,979,958	100	386,372,342	100	474,774,334	100	644,126,339	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	12,150,000	100	12,512,070	100	13,216,500	100	18,238,769	100	22,411,800	100	30,406,089	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	309,798,600	100	319,030,598	100	336,992,021	100	465,048,989	100	571,452,198	100	775,289,196	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	2,300,000	100	2,368,540	100	2,501,889	100	3,452,607	100	4,242,563	100	5,755,885	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	21,300,000	100	21,934,740	100	23,169,666	100	31,974,139	100	39,289,822	100	53,304,501	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	6,300,000	100	6,487,740	100	6,853,000	100	9,457,140	100	11,620,933	100	15,766,120	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	230,200,600	100	237,060,578	100	250,407,088	100	345,561,782	100	424,626,318	100	576,090,525	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	353,159,200	100	363,683,344	100	384,158,716	100	530,139,029	100	651,434,838	100	883,801,645	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	1,910,300	100	1,967,227	100	2,077,982	100	2,867,615	100	3,523,725	100	4,780,638	Inspektorat Daerah

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja	%	100	100	17,950,000	100	18,484,910	100	19,525,610	100	26,945,342	100	33,110,437	100	44,920,930	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang berpakaian sesuai aturan	%	100	100	18,600,000	100	19,154,280	100	20,232,666	100	27,921,079	100	34,309,422	100	46,547,593	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perentasee laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	2,020,000	100	2,080,196	100	2,197,311	100	3,032,289	100	3,726,077	100	5,055,169	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	65,000,000	100	66,937,000	100	70,705,553	100	97,573,663	100	119,898,517	100	162,666,319	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	19,000,000	100	19,566,200	100	20,667,777	100	28,521,532	100	35,047,259	100	47,548,616	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	343,857,700	100	354,104,659	100	374,040,752	100	516,176,237	100	634,277,361	100	860,524,095	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	132,000,000	100	135,933,600	100	143,586,662	100	198,149,593	100	243,486,220	100	330,337,755	Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	6,513,220,400	100	6,707,314,368	100	7,084,936,167	100	9,777,211,910	100	12,014,237,995	100	16,299,716,688	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	90	90	111,000,000	90	114,307,800	90	120,743,329	90	166,625,794	95	204,749,776	95	277,784,021	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	3,237,400,000	100	3,333,874,520	100	3,521,571,655	100	4,859,768,885	100	5,971,684,005	100	8,101,783,690	Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersedian Layanan administrasi perkantoran	%	100	100	5,111,604,400	100	5,263,930,211	100	5,560,289,482	100	7,673,199,485	100	9,428,827,527	100	12,792,090,306	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaiakan kinerja dan keuangann yang tersesusun tepat waktu	%	100	100	78,666,400	100	81,010,659	100	85,571,559	100	118,088,751	100	145,107,457	100	196,867,287	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana & Prasarana Aparatur	%	100	100	2,260,897,000	100	32,280,646,000	100	1,601,292,000	100	2,436,344,000	100	2,867,171,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran & Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	169,750,000	100	174,808,550	100	184,650,271	100	254,817,374	100	313,119,590	100	424,809,347	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	46,800,000	100	48,194,640	100	50,907,998	100	70,253,038	100	86,326,933	100	117,119,749	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kesediaan layanan administrasi perkantoran		100	100	7,893,622,000	100	8,128,851,936	100	8,586,506,300	100	11,849,378,693	100	14,560,516,538	100	19,754,252,788	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persentase	100	100	9,377,500	100	9,656,950	100	10,200,636	100	14,076,877	100	17,297,667	100	23,467,745	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persentase	100	100	1,910,080,000	100	1,967,000,384	100	2,077,742,506	100	2,867,284,658	100	3,523,319,387	100	4,780,087,413	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	635,835,000	100	654,782,883	100	691,647,159	100	954,473,080	100	1,172,856,521	100	1,591,214,441	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% aparatur yang memenuhi standar kompetensi	%	60	60	1,342,932,360	70	1,382,951,744	80	1,460,811,928	90	2,015,920,460	95	2,477,163,061	95	3,360,767,125	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	122,654,500	100	126,309,604	100	133,420,835	100	184,120,752	100	226,247,580	100	306,950,092	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	482,769,475	100	497,156,005	100	525,145,888	100	724,701,326	100	890,512,989	100	1,208,158,973	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	16,450,000	100	16,940,210	100	17,893,944	100	24,693,642	100	30,343,548	100	41,167,091	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	%	100	100	878,892,100	100	905,083,085	100	956,039,262	100	1,319,334,182	100	1,621,197,843	100	2,199,479,113	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	100	214,300,000	100	220,686,140	100	233,110,770	100	321,692,862	100	395,296,189	100	536,298,340	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persentase	100	100	19,350,000	100	19,926,630	100	21,048,499	100	29,046,929	100	35,692,866	100	48,424,512	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	438,888,200	100	451,967,068	100	477,412,814	100	658,829,684	100	809,569,915	100	1,098,343,504	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase	100	100	16,165,900	100	16,647,644	100	17,584,906	100	24,267,171	100	29,819,499	100	40,456,114	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	2,698,700,000	100	2,779,121,260	100	2,935,585,787	100	4,051,108,386	100	4,978,001,985	100	6,753,655,293	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedispilanan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pagawai	%	100	100	150,000,000	100	154,470,000	100	163,166,661	100	225,169,992	100	276,688,886	100	375,383,812	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesedian Layan Administrasi Perkantoran	%	100	100	2,153,130,000	100	2,217,293,274	100	2,342,126,885	100	3,232,135,102	100	3,971,647,613	100	5,388,334,317	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	10,900,000	100	11,224,820	100	11,856,777	100	16,362,353	100	20,106,059	100	27,277,890	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	1,446,300,000	100	1,489,399,740	100	1,573,252,945	100	2,171,089,065	100	2,667,834,243	100	3,619,450,717	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persen	100	100	225,225,000	100	231,936,705	100	244,994,741	100	338,092,743	100	415,448,363	100	563,638,794	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	5,562,692,900	100	5,728,461,148	100	6,050,973,511	100	8,350,343,445	100	10,260,902,026	100	13,920,965,778	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persetase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	100	11,358,000	100	11,696,468	100	12,354,980	100	17,049,872	100	20,950,882	100	28,424,062	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan Administrasi	%	100	100	1,480,784,350	100	1,524,911,724	100	1,610,764,254	100	2,222,854,670	100	2,731,443,819	100	3,705,749,829	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capain kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	5,051,400	100	5,201,932	100	5,494,800	100	7,582,825	100	9,317,775	100	12,641,425	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	86,000,000	100	88,562,800	100	93,548,886	100	129,097,462	100	158,634,962	100	215,220,052	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	59,400,000	100	61,170,120	100	64,613,998	100	89,167,317	100	109,568,799	100	148,651,990	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	474,236,200	100	488,368,439	100	515,863,582	100	711,891,743	100	874,772,574	100	1,186,803,951	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	4,900,000	100	5,046,020	100	5,330,111	100	7,355,553	100	9,038,504	100	12,262,538	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	102,983,800	100	106,052,717	100	112,023,485	100	154,592,410	100	189,963,153	100	257,723,010	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	23,000,000	100	23,685,400	100	25,018,888	100	34,526,065	100	42,425,629	100	57,558,851	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	418,985,000	100	431,470,753	100	455,762,556	100	628,952,328	100	772,856,620	100	1,048,534,577	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	107,580,000	100	110,785,884	100	117,023,129	100	161,491,918	100	198,441,269	100	269,225,270	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	2,367,447,130	100	2,437,997,054	100	2,575,256,289	100	3,553,853,678	100	4,366,975,400	100	5,924,675,525	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu	%	100	100	14,575,800	100	15,010,159	100	15,855,231	100	21,880,218	100	26,886,412	100	36,476,796	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	65,100,000	100	67,039,980	100	70,814,331	100	97,723,777	100	120,082,977	100	162,916,574	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam Kehadiran dan pemakaian atribut	%	100	100	33,300,000	100	34,292,340	100	36,222,999	100	49,987,738	100	61,424,933	100	83,335,206	Dinas Pertanian
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	907,064,550	100	934,095,074	100	986,684,626	100	1,361,624,784	100	1,673,164,535	100	2,269,982,324	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun waktu	%	100	100	1,706,000	100	1,756,839	100	1,855,749	100	2,560,933	100	3,146,875	100	4,269,365	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	182,815,000	100	188,262,887	100	198,862,088	100	274,429,681	100	337,219,192	100	457,505,277	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,426,417,200	100	1,468,924,433	100	1,551,624,878	100	2,141,242,332	100	2,631,158,577	100	3,569,692,842	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuanagan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	3,878,500	100	3,994,079	100	4,218,946	100	5,822,145	100	7,154,252	100	9,706,174	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	173,300,000	100	178,464,340	100	188,511,882	100	260,146,398	100	319,667,893	100	433,693,431	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	unit	4	4	43,620,000	4	44,919,876	4	47,448,865	4	65,479,434	4	80,461,128	4	109,161,613	AUR BIRUGO TIGO BALEH

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	stel	40	40	40,500,000	40	41,706,900	40	44,054,998	40	60,795,898	40	74,705,999	40	101,353,629	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	bln	12	12	337,561,200	12	347,620,524	12	367,191,559	12	506,724,352	12	622,662,883	12	844,766,734	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen yang tersusun dengan tepat waktu	dokumen	3	3	5,980,000	3	6,158,204	3	6,504,911	3	8,976,777	3	11,030,664	3	14,965,301	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	874,400,000	100	900,457,120	100	951,152,856	100	1,312,590,941	100	1,612,911,748	100	2,188,237,369	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	40,500,000	100	41,706,900	100	44,054,998	100	60,795,898	100	74,705,999	100	101,353,629	GUGUAK PANJANG
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	339,733,200	100	349,857,249	100	369,554,212	100	509,984,813	100	626,669,339	100	850,202,292	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan YangTersusun Tepat Waktu	%	100	100	7,989,000	100	8,227,072	100	8,690,256	100	11,992,554	100	14,736,450	100	19,992,942	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	48,600,000	100	50,048,280	100	52,865,998	100	72,955,077	100	89,647,199	100	121,624,355	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	394,870,450	100	406,637,589	100	429,531,286	100	592,753,174	100	728,375,101	100	988,186,499	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	22,114,000	100	22,772,997	100	24,055,117	100	33,196,061	100	40,791,320	100	55,341,584	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	0	100	378,400,000	100	389,676,320	100	411,615,097	100	568,028,834	100	697,993,831	100	946,968,230	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	108,000,000	100	111,218,400	100	117,479,996	100	162,122,394	100	199,215,998	100	270,276,345	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,070,114,000	100	1,102,003,397	100	1,164,046,188	100	1,606,383,740	100	1,973,924,340	100	2,678,023,152	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	55,500,000	100	57,153,900	100	60,371,665	100	83,312,897	100	102,374,888	100	138,892,011	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	410,500,000	100	422,732,900	100	446,532,762	100	616,215,212	100	757,205,252	100	1,027,300,366	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,668,453,440	100	1,718,173,353	100	1,814,906,512	100	2,504,570,987	100	3,077,616,829	100	4,175,402,752	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu	%	100	100	9,342,400	100	9,620,804	100	10,162,455	100	14,024,188	100	17,232,922	100	23,379,905	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	740,875,000	100	762,953,075	100	805,907,333	100	1,112,152,120	100	1,366,612,525	100	1,854,083,212	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	153,000,000	100	157,559,400	100	166,429,994	100	229,673,392	100	282,222,664	100	382,891,488	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	65,250,000	100	67,194,450	100	70,977,498	100	97,948,947	100	120,359,666	100	163,291,958	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	6,425,988,650	100	6,617,483,112	100	6,990,047,411	100	9,646,265,427	100	11,853,330,957	100	16,081,414,109	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	39,792,100	100	40,977,905	100	43,284,961	100	59,733,246	100	73,400,212	100	99,582,068	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	70	75	4,770,756,100	80	4,912,924,632	85	5,189,522,289	90	7,161,540,758	95	8,800,101,284	95	11,939,097,412	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan dalam atribut pegawai	%	80	85	40,000,000	90	41,192,000	95	43,511,110	100	60,045,331	100	73,783,703	100	100,102,350	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan adm perkantoran	%	75	75	514,552,000	75	529,885,650	80	559,718,212	85	772,411,132	90	949,138,799	90	1,287,696,609	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	85	90	13,250,000	95	13,644,850	100	14,413,055	100	19,890,016	100	24,440,852	100	33,158,903	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	70	75	26,300,000	80	27,083,740	85	28,608,555	90	39,479,805	95	48,512,785	95	65,817,295	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen	90	91	153,000,000	92	157,559,400	93	166,429,994	94	229,673,392	95	282,222,664	95	382,891,488	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	90	91	1,268,502,000	92	1,306,303,360	93	1,379,848,239	94	1,904,190,569	95	2,339,869,372	95	3,174,500,777	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	Persen	90	91	13,271,000	92	13,666,476	93	14,435,898	94	19,921,540	95	24,479,588	95	33,211,457	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90	91	331,300,000	92	341,172,740	93	360,380,765	94	497,325,456	95	611,113,520	95	829,097,713	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.	%	100	100	19,300,000	100	19,875,140	100	20,994,110	100	28,971,872	100	35,600,637	100	48,299,384	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	6,750,000	100	6,951,150	100	7,342,500	100	10,132,650	100	12,451,000	100	16,892,272	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	%	100	100	10,086,100	100	10,386,666	100	10,971,435	100	15,140,580	100	18,604,745	100	25,241,058	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparaur	%	100	100	390,950,000	100	402,600,310	100	425,266,707	100	586,868,056	100	721,143,468	100	978,375,342	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	100	19,800,000	100	20,390,040	100	21,537,999	100	29,722,439	100	36,522,933	100	49,550,663	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layananan administrasi perkantoran	%	100	100	407,394,800	100	419,535,165	100	443,154,995	100	611,553,893	100	751,477,424	100	1,019,529,421	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	dokumen	0	100	5,100,000	100	5,251,980	100	5,547,666	100	7,655,780	100	9,407,422	100	12,763,050	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	%	100	100	2,150,000	100	2,214,070	100	2,338,722	100	3,227,437	100	3,965,874	100	5,380,501	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	11,300,000	100	11,636,740	100	12,291,888	100	16,962,806	100	20,843,896	100	28,278,914	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	%	100	100	14,850,000	100	15,292,530	100	16,153,499	100	22,291,829	100	27,392,200	100	37,162,997	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan layanan adminidtrasi perkantoran	%	100	100	328,776,550	100	338,574,091	100	357,635,813	100	493,537,421	100	606,458,783	100	822,782,631	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	20	30	70,000,000	40	72,086,000	50	76,144,442	60	105,079,330	70	129,121,480	70	175,179,112	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	100	100	82,950,000	100	85,421,910	100	90,231,164	100	124,519,006	100	153,008,954	100	207,587,248	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tercapaianya pentaan jabatan dan informasi dibidang sumber daya aparatur	'%	90	90	120,000,000	91	123,576,000	92	130,533,329	93	180,135,994	94	221,351,109	94	300,307,050	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	persen	15	0	0	20	50,000,000	25	80,000,000	30	100,000,000	35	120,000,000	35		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	198,880,150	100	204,806,778	100	216,337,400	100	298,545,612	100	366,852,848	100	497,709,259	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	100	230,000,000	100	236,854,000	100	250,188,880	100	345,260,655	100	424,256,292	100	575,588,512	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	0	0	70	83,994,005	70	250,000,000	70	252,500,000	70	280,000,000	70		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Ketersediaan SDM sesuai Bidang Keahlian	'%	70	0	0	70	100,000,000	75	110,000,000	80	121,000,000	85	133,100,000	85		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha	persen	50	50	0	60	70,000,000	65	120,000,000	70	120,000,000	75	125,000,000	75		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal

Tabel 8.1
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2016-2021

No	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
						422,395,001,972		**749,329,601,668**		**750,467,272,748**		**802,301,132,459**		**880,007,775,939**		**935,670,577,444**	
	Urusan Wajib					**138,073,852,119**		**233,672,627,498**		**300,100,321,179**		**302,421,054,261**		**321,163,220,982**		**327,452,937,813**	
	Pendidikan					**21,044,806,653**		**21,671,941,891**		**22,892,072,220**		**31,591,059,663**		**38,819,094,114**		**52,665,864,985**	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	'% kegiatan	0	100	7,796,131,800	100	8,028,456,528	100	8,480,458,630	100	11,703,032,910	100	14,380,686,839	100	19,510,277,835	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya kegiatan untuk Pendidikan Anak Usia Dini	'%	0	100	505,396,950	100	520,457,779	100	549,759,552	100	758,668,182	100	932,251,462	100	1,264,785,558	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Menengah	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SMP	nilai	0	0	4,914,299,720	0	5,060,745,852	0	5,345,665,843	0	7,377,018,863	0	9,064,880,779	0	12,298,323,753	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Luar Biasa	Angka putus sekolah	'%	0.25	0	60,680,000	0	62,488,264	0	66,006,353	0	91,088,768	0	111,929,878	0	151,855,265	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SD	nilai	70	70	6,976,936,083	75	7,184,848,778	80	7,589,355,764	85	10,473,310,955	90	12,869,604,501	90	17,460,192,427	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Non Formal	Optimalisasi pelayanan non formal	'%	0	100	291,362,100	100	300,044,691	100	316,937,207	100	437,373,345	100	537,444,367	100	729,150,772	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya manjemen pelayanan pendidikan	'%	100	100	500,000,000	100	514,900,000	100	543,888,870	100	750,566,641	100	922,296,288	100	1,251,279,374	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Kesehatan					**19,744,900,125**		**89,115,160,717**		**70,545,369,265**		**34,475,549,586**		**45,154,904,131**		**38,554,570,535**	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	'%	85	85	0	86	120,000,000	87	150,000,000	88	160,000,000	90	180,000,000	90		Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Ratio tenaga paramedis per satuan penduduk (Bidan dan perawat)	tenaga paramedis/satuan penduduk	12.95	13	0	13	145,000,000	13	152,000,000	13	159,000,000	13	166,000,000	13		Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	'%	100	100	6,459,177,000	100	6,651,660,475	100	7,026,148,959	100	9,696,085,564	100	11,914,549,941	100	16,164,469,905	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	'%	5972	65	504,635,400	65	519,673,535	70	548,931,155	70	757,524,994	75	930,846,712	75	1,262,879,735	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada rumah sakit	'%	25	25	0	25	0	25	0	25	8,000,000,000	25	12,000,000,000	25		Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	unit	0	0	68,000,000	1	70,085,000,000	0	40,085,000,000	0	0	0	0	0		Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pengawasan dan pengendalian makanan yang memenuhi syarat	'%	90	90	38,000,000	100	39,132,400	100	41,335,554	100	57,043,065	100	70,094,518	100	95,097,232	Dinas Kesehatan

	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tingkat Pemenuhan Kualitas lingkungan	'%	40	40	208,000,000	41	214,198,400	42	226,257,770	43	312,235,722	44	383,675,256	44	520,532,220	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	'%	100	100	2,617,063,925	100	2,695,052,430	100	2,846,783,882	100	3,928,561,757	100	4,827,416,687	100	6,549,356,219	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD	'%	0	60	134,639,000	100	138,651,242	100	146,457,307	100	202,111,084	100	248,354,100	100	336,942,007	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ()	puskes mas	0	2	734,639,000	5	756,531,242	7	799,123,951	7	1,102,791,053	7	1,355,109,645	7	1,838,477,256	Dinas Kesehatan
	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan	'%	20	80	410,000,000	85	422,218,000	90	445,988,873	95	615,464,645	95	756,282,956	95	1,026,049,087	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	puskes mas	0	0	20,000,000	1	20,596,000	1	21,755,555	2	30,022,666	3	36,891,852	3	50,051,175	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas. Pustu dan Jaringannya yang dapat melaksanakan pelayanan kesehatan	'%	100	100	4,270,840,000	100	2,900,000,000	100	13,400,000,000	100	3,030,000,000	100	4,391,000,000	100		Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi lebih	'%	0	15	373,000,000	13	384,115,400	13	405,741,097	12	559,922,714	10	688,033,031	10	933,454,413	Dinas Kesehatan
	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan	'%	90	90	2,574,920,000	91	2,651,652,616	92	2,800,940,658	93	3,865,298,108	95	4,749,678,316	95	6,443,888,571	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	'%	83.8	85	193,564,000	86	199,332,207	87	210,554,610	88	290,565,362	90	357,046,717	90	484,405,281	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita	'%	57.57	60	744,750,000	70	766,943,550	80	810,122,472	90	1,117,969,011	90	1,373,760,321	90	1,863,780,627	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	100	100	368,671,800	100	379,658,220	100	401,032,977	100	553,425,509	100	680,049,265	100	922,622,838	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pelaksanaan lingkungan sehat dikecamatan dan kelurahan	bln	0	0	25,000,000	0	25,745,000	0	27,194,444	0	37,528,332	0	46,114,814	0	62,563,969	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					**23,185,390,700**		**30,774,600,415**		**47,208,094,352**		**86,121,250,039**		**90,858,058,503**		**49,906,825,615**	
	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	'%	12.5	13	680,250,000	20	700,521,450	30	739,960,808	40	1,021,145,915	50	1,254,784,100	50	1,702,365,588	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	'%	65	65	2,300,000,000	70	360,000,000	75	7,700,000,000	80	23,365,000,000	85	23,046,500,000	85		Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	'%	10	10	228,000,000	20	234,794,400	40	248,013,325	60	342,258,388	75	420,567,107	75	570,583,394	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap	'%	98	98	4,050,000,000	99	4,170,690,000	100	4,405,499,847	100	6,079,589,789	100	7,470,599,933	100	10,135,362,928	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Pembangunan gedung	Persentase Gedung Negara dan Swasta yang Laik Fugsi	'%	0	2	150,000,000	5	154,470,000	20	163,166,661	30	225,169,992	40	276,688,886	40	375,383,812	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengendalian banjir	Pengurangan titik genangan	titik	8	8	257,522,800	6	265,196,979	4	280,127,569	2	386,576,046	0	475,024,645	0	644,465,936	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	'%	48	48	943,071,400	55	2,940,000,000	70	12,104,083,333	90	23,785,170,833	100	23,937,604,375	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	'%	45	45	2,500,000,000	50	2,574,500,000	60	2,719,444,350	70	3,752,833,203	80	4,611,481,440	80	6,256,396,869	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	'%	98	0	0	98	488,000,000	99	561,200,000	100	3,420,000,000	100	3,762,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang terpelihara / normalisasi	'%	47	0	0	55	1,000,000,000	65	1,100,000,000	70	1,210,000,000	75	1,331,000,000	75		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	'%	72	72	4,819,443,900	80	4,963,063,328	85	5,242,483,794	90	7,234,627,635	95	8,889,910,438	95	12,060,941,491	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	'%	40	50	197,000,000	60	202,870,600	65	214,292,215	70	295,723,256	75	363,384,737	75	493,004,073	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota	'%	60	60	464,726,200	65	478,575,041	70	505,518,816	75	697,615,965	80	857,230,498	80	1,163,004,617	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	'%	40	50	862,629,700	70	888,336,065	75	938,349,386	80	1,294,922,152	85	1,591,200,340	85	2,158,781,502	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota	'%	60	60	0	65	250,000,000	70	0	0	0	0	0	0		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat - alat berat ke PU an / Kebinamargaan	'%	30	0	0	50	4,000,000,000	65	4,050,000,000	80	4,105,000,000	90	1,665,500,000	90		Dinas Pekerjaan Umum
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik	'%	85	85	1,009,556,000	88	1,039,640,769	90	1,098,172,544	93	1,515,478,111	95	1,862,219,503	95	2,526,473,199	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik	'%	85	85	4,723,190,700	88	4,863,941,783	90	5,137,781,705	93	7,090,138,753	95	8,712,362,500	95	11,820,062,204	Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan informasi / data base jalan	'%	20	0	0	40	1,200,000,000	0	0	80	300,000,000	100	330,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Sosial					**6,876,572,350**		**7,481,494,206**		**8,010,182,330**		**11,052,651,615**		**13,414,474,305**		**17,209,026,289**	
	Program pembinaan anak terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	'%	32	35	0	37	100,000,000	40	100,000,000	42	100,000,000	45	100,000,000	45		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	'%	60	65	1,696,650,000	68	1,747,210,170	70	1,845,578,103	73	2,546,897,782	75	3,129,627,994	75	4,245,966,299	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	'%	75	80	436,581,000	85	449,591,114	87	474,903,094	90	655,366,269	92	805,314,071	92	1,092,569,601	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	3	12	101,442,000	15	104,464,972	20	110,346,350	25	152,277,962	30	187,119,160	30	253,864,564	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial	'%	25	25	3,000,000	50	3,089,400	75	3,263,333	75	4,503,400	100	5,533,778	100	7,507,676	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang meningkat kesejahteraannya	'%	1.5	2	4,096,295,100	2	4,218,364,694	2	4,455,858,626	3	6,149,084,904	3	7,555,995,530	3	10,251,219,136	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial	'%	75	75	347,600,000	80	357,958,480	80	378,111,542	85	521,793,929	90	641,180,379	90	869,889,421	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin	'%	60	60	57,151,250	61	58,854,357	62	62,167,858	63	85,791,643	64	105,420,771	64	143,024,361	Sekretariat Daerah
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Penurunan Angka Kemiskinan	'%	54	5	137,853,000	5	141,961,019	4	149,953,425	3	206,935,726	2	254,282,620	2	344,985,231	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	2	2	0	3	300,000,000	4	430,000,000	5	630,000,000	6	630,000,000	6		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					**5,973,641,000**		**6,151,655,502**		**21,497,993,707**		**23,967,231,315**		**11,018,933,840**		**14,949,387,541**	
	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana areal pemakaman yang memadai	'%	80	80	139,484,600	80	143,641,241	85	151,728,243	85	209,384,975	90	257,292,258	90	349,068,406	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	% Jalan dengan riol yang baik	'%	40	40	3,804,507,000	55	3,917,881,309	70	4,138,458,026	90	5,711,072,076	100	7,017,765,367	100	9,521,002,274	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Pembangunan Rusunawa yang layak huni	unit	0	0	0	0	0	1	15,000,000,000	1	15,000,000,000	0	0	0		Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	'%	50	60	79,649,400	80	82,022,952	100	86,640,844	100	119,564,365	100	146,920,692	100	199,327,303	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	% Kesiap siangaan dan Tanggap terhadap Pencegahan Kebakatan Meningkat	'%	50	60	1,950,000,000	70	2,008,110,000	75	2,121,166,593	80	2,927,209,898	90	3,596,955,523	90	4,879,989,558	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					**14,971,579,700**		**15,447,732,775**		**16,315,751,130**		**22,504,336,560**		**27,646,464,765**		**37,467,257,746**	
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Terjaganya kerukunan antar dan intern umat bergama	'%	0	100	78,847,500	100	81,197,156	100	85,768,555	10	118,360,606	100	145,441,513	100	197,320,501	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan program kualitas pemahaman dan pengamalan dan pembinaan kerukunan beragama	'%	0	100	128,000,000	100	131,814,400	100	139,235,551	100	192,145,060	100	236,107,850	100	320,327,520	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Meningkatnya aktifitas keagamaan dilingkungan masyarakat	kegiatan	3	5	194,215,000	6	200,002,607	7	211,262,754	8	291,542,600	9	358,247,547	9	486,034,447	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Kelompok masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan	Kelompok masyarakat/keluarahan	9	2	469,687,000	2	483,683,673	3	510,915,063	4	705,062,787	4	866,381,153	4	1,175,419,311	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Jumlah event keagamaan ditengah masyarakat	'%	3	3	6,497,174,600	6	6,690,790,403	9	7,067,481,903	12	9,753,125,026	15	11,984,640,032	15	16,259,561,131	Sekretariat Daerah
	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, damai dan berkualitas	'%	0	0	12,636,000	0	13,012,553	0	13,745,160	85	18,968,320	85	23,308,272	85	31,622,332	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terpantaunya kegiatan orang asing, lembaga asing, dan non govenment organization serta deteksi dini dan penanggulangan konflik sosial	'%	100	100	237,889,000	100	244,978,092	100	258,770,359	100	357,103,095	100	438,808,283	100	595,331,198	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat keamananan dan kenyamanan lingkungan	'%	40	50	300,022,600	60	308,963,273	70	326,357,906	75	450,373,910	85	553,419,461	85	750,824,182	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Sistem kebencanaan	% Jumlah Data dan Informasi tentang Kebencanan terpenuhi	'%	25	100	74,970,000	100	77,204,106	100	81,550,697	100	112,539,962	100	138,289,105	100	187,616,829	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana	Kapasitas dan Kwalitas Petugas BPBD Meningkat dalam Penanggulanga Kebencanaan	'%	50	70	399,840,000	70	411,755,232	70	434,937,052	70	600,213,131	70	737,541,896	70	1,000,623,090	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	%Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meningkat	'%	50	60	2,155,520,000	70	2,219,754,496	75	2,344,726,674	80	3,235,722,810	90	3,976,056,189	90	5,394,315,432	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Peningkatan Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	bln	0	100	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Efektivitas kegiatan pemberantasan narkoba	Kegiatan	3	3	196,137,000	3	201,981,883	3	213,353,463	3	294,427,778	3	361,792,854	3	490,844,365	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Terdeteksinya potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah	'%	100	100	427,527,500	100	440,267,820	100	465,054,898	100	641,775,759	100	788,614,053	100	1,069,912,685	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	'%	20	20	124,280,900	30	127,984,471	40	135,189,997	50	186,562,195	60	229,247,625	60	311,020,253	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	kasus	722	650	3,239,993,800	600	3,336,545,615	500	3,524,393,133	400	4,863,662,524	250	5,976,468,510	250	8,108,274,827	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat	'%	100	100	76,668,300	100	78,953,015	100	83,398,070	100	115,089,337	100	141,421,777	100	191,866,925	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Tingkat pelaksanaan peringatan hari-hari besar kenegaraan	'%	100	100	208,464,500	100	214,676,742	100	226,763,043	100	312,932,999	100	384,532,069	100	521,694,658	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Peningkatan program pemberrantasan penyakit masyarakat	bln	0	0	42,000,000	0	43,251,600	0	45,686,665	0	63,047,598	0	77,472,888	0	105,107,467	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Mneingkatnya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	bln	0	0	41,000,000	0	42,221,800	0	44,598,887	0	61,546,465	0	75,628,296	0	102,604,909	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas per tahun	persen	0	10	18,377,500	10	18,925,150	10	19,990,635	10	27,587,077	10	33,899,000	10	45,990,773	GUGUAK PANJANG
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Temuan Peristiwa Gangguan Ketertiban dan Keamanan disertai laporan tertulis	Laporan /Tahun	22	15	48,328,500	12	49,768,689	10	52,570,667	7	72,547,520	5	89,146,392	5	120,944,910	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Tenaga Kerja					**1,327,649,501**		**1,367,213,456**		**1,444,187,574**		**1,992,978,852**		**2,448,972,413**		**3,322,520,873**	
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas	'%	66	77	34,000,000	88	35,013,200	90	36,984,443	95	51,038,532	100	62,716,148	100	85,086,997	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat tenaga kerja yang memiliki keahlian	'%	52	55	657,579,500	57	677,175,369	60	715,300,342	65	987,114,472	65	1,212,966,264	65	1,645,631,330	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap UU ketenagakerjaan	'%	5	5	581,070,001	6	598,385,887	7	632,075,012	8	872,263,517	9	1,071,837,410	9	1,454,161,814	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja	'%	8	15	55,000,000	17	56,639,000	19	59,827,776	21	82,562,330	23	101,452,592	23	137,640,731	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					**697,540,000**		**918,326,692**		**1,268,768,485**		**1,572,100,509**		**1,816,677,105**		**1,745,634,829**	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang	'%	70	70	345,140,000	70	355,425,172	70	375,435,609	70	518,101,141	70	636,642,682	70	863,733,126	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penurunan Kasus KDRT dan TPPO	'%	50	50	0	50	0	50	200,000,000	50	205,000,000	50	210,000,000	50		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kesejahteraan perempuan	'%	0	35	0	30	200,000,000	25	310,000,000	20	320,000,000	15	320,000,000	15		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tingkat kemiskinan menurun menjadi 2.84 %	'%	4.58	4	352,400,000	4	362,901,520	3	383,332,876	3	528,999,368	3	650,034,424	3	881,901,703	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Pangan					**680,581,800**		**700,863,138**		**740,321,732**		**1,021,643,991**		**1,255,396,136**		**1,703,195,937**	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	2400	2,400	387,248,000	2,400	398,787,990	2,400	421,239,754	2,400	581,310,861	2,400	714,314,786	2,400	969,110,870	Kantor Ketahanan Pangan
		Ketersediaan protein perkapita	gr/kap/hr	63	63		63	0	63	0	63	0	63	0	63	0	
	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	84.1	84	293,333,800	84	302,075,147	85	319,081,978	85	440,333,130	85	541,081,350	85	734,085,067	Kantor Ketahanan Pangan
	Pertanahan					**743,508,000**		**2,761,209,084**		**797,507,555**		**3,044,540,426**		**1,249,724,076**		**3,636,963,704**	
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunan tanah	'%	80	80	591,580,000	81	609,209,084	82	643,507,555	83	888,040,426	84	1,091,224,076	84	1,480,463,704	Sekretariat Daerah
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah	'%	90	90	151,928,000	91	2,152,000,000	92	154,000,000	93	2,156,500,000	94	158,500,000	94	2,156,500,000	Sekretariat Daerah
	Lingkungan Hidup					**8,509,414,250**		**10,725,114,795**		**15,978,684,758**		**19,918,084,965**		**20,766,646,806**		**19,793,773,821**	
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	Persentase	8	10	1,233,986,000	12	1,270,758,783	13	1,342,302,502	14	1,852,377,453	15	2,276,201,414	15	3,088,122,459	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH/ Non Hijau	'%	7.78	8	600,000,000	8	2,000,000,000	8	5,700,000,000	9	6,420,000,000	9	4,662,000,000	9		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase kelompok masyarakat yang memahami pengelolaan RTH	'%	10	20	0	30	0	40	110,000,000	50	115,000,000	60	120,000,000	60		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemenuhan RTH	'%	20	20	0	22	100,000,000	25	120,000,000	28	140,000,000	30	0	30		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan/pengelolaan persampahan	Persen	90	90	5,799,341,500	90	5,972,161,877	100	6,308,394,590	100	8,705,584,535	100	10,697,422,276	100	14,513,192,802	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup	'%	50	60	451,509,800	70	464,964,792	80	491,142,310	90	677,776,388	95	832,851,625	95	1,129,929,800	Kantor Lingkungan Hidup

	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	'%	80	70	424,576,950	60	437,229,343	50	461,845,355	40	637,346,590	30	783,171,490	30	1,062,528,760	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan pengendalian	'%	50	55	0	60	380,000,000	65	1,055,000,000	70	1,055,000,000	75	1,055,000,000	75		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	'%	0	0	0	50	0	55	270,000,000	60	175,000,000	65	180,000,000	65		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Informasi Lingkungan Hidup	'%	0	0	0	60	100,000,000	65	120,000,000	70	140,000,000	75	160,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					**662,010,550**		**938,838,464**		**859,880,340**		**1,121,132,069**		**1,335,310,746**		**1,656,720,293**	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat capaian pelayanan administrasi kependudukan	'%	67	70	662,010,550	75	681,738,464	80	720,120,340	85	993,766,069	90	1,221,139,746	90	1,656,720,293	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi dan kelengkapan data kependudukan	'%	0	0	0	85	257,100,000	90	139,760,000	95	127,366,000	100	114,171,000	100		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					**8,422,188,700**		**8,673,169,923**		**9,161,469,390**		**12,642,827,758**		**15,535,506,749**		**21,077,022,007**	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tiingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	'%	15	20	497,375,200	25	512,196,981	30	541,033,671	34	746,626,466	40	917,454,601	40	1,244,710,658	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	'%	15	20	1,898,758,100	25	1,955,341,091	30	2,065,426,795	34	2,850,288,977	40	3,502,435,095	40	4,751,753,693	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya peren perempuan dipedesaan	'%	100	100	184,000,000	100	189,483,200	100	200,151,104	100	276,208,524	100	339,405,034	100	460,470,810	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan program keberdayaan masyarakat pedesaan	bln	12	12	151,000,000	12	155,499,800	12	164,254,439	12	226,671,125	12	278,533,479	12	377,886,371	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	'%	100	100	640,000,000	100	659,072,000	100	696,177,754	100	960,725,300	100	1,180,539,249	100	1,601,637,599	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertahunnya	persen	802661	3	581,898,000	3	599,238,560	3	632,975,691	3	873,506,454	3	1,073,364,731	3	1,456,233,930	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun	'%	5	7	180,868,900	9	186,258,793	12	196,745,163	15	271,508,325	17	333,629,430	17	452,635,048	MANDIANGIN KOTO SELAYAN

	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Tingkat partisipasi perempuan dalam pencapaian tujuan program pemerintah	'%	100	80	341,078,000	85	351,242,124	90	371,017,056	95	512,003,537	100	629,149,947	100	853,567,733	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatkanya persentase aktifitas guna peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakn oleh pemerintah maupun masyarakat	Persen	10	10	543,400,500	10	559,593,835	10	591,098,968	10	815,716,576	10	1,002,352,528	10	1,359,891,675	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	'%	80	80	615,303,000	85	633,639,029	85	669,312,907	90	923,651,811	90	1,134,983,346	90	1,539,831,905	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	'%	15	15	2,180,510,600	20	2,245,489,816	25	2,371,910,893	30	3,273,237,032	34	4,022,153,665	34	5,456,855,877	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	'%	20	25	193,442,900	30	199,207,498	35	210,422,881	40	290,383,575	45	356,823,337	45	484,102,222	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya program peningkatan usaha ekonomi masyarakat	bln	0	0	195,538,000	0	201,365,032	0	212,701,884	0	293,528,600	0	360,687,943	0	489,345,332	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat	pelaku	0	0	141,194,000	90	145,401,581	120	153,587,690	90	211,951,013	120	260,445,404	120	353,346,280	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	'%	3	3	77,821,500	5	80,140,581	6	84,652,495	8	116,820,444	10	143,548,961	10	194,752,876	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					**2,324,370,650**		**2,414,636,895**		**2,733,398,653**		**3,709,190,141**		**4,312,516,845**		**5,816,874,103**	
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	100 % data akurat	'%	80	85	115,152,000	88	118,583,530	90	125,259,782	93	172,858,500	95	212,408,524	95	288,174,645	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program pelayanan kontrasepsi	Tercapainya program KB	'%	75	75	0	75	21,000,000	80	160,000,000	80	170,000,000	80	25,000,000	80		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 % Kelompok Kerja paham fungsi keluarga	'%	100	100	0	100	0	100	45,000,000	100	50,000,000	100	0	100		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75 % sekolah dan perguruan tinggi memiliki PIK R/M	'%	25	35	209,025,650	45	215,254,614	55	227,373,449	65	313,775,360	75	385,567,162	75	523,098,969	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Keluarga Berencana	Jumlah PUS ber KB 80 %	'%	1.77	2	1,463,946,000	2	1,507,571,591	2	1,592,447,871	1	2,197,578,062	1	2,700,383,923	1	3,663,610,869	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Peningkatan Tingkat Tahapan Kelompok Kegiatan	tingkat	0	0	71,247,000	0	73,370,161	0	77,500,901	0	106,951,243	0	131,421,687	0	178,299,803	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase Kelurahan yang memiliki WPA (Warga Peduli AIDS)	'%	8	24	465,000,000	24	478,857,000	30	505,816,649	40	698,026,976	50	857,735,548	50	1,163,689,818	Dinas Kesehatan
	Perhubungan					**6,605,945,000**		**14,602,802,161**		**8,810,799,923**		**14,216,403,893**		**13,435,277,104**		**16,531,765,447**	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berwawasan lingkungan	Persen	70	0	0	72	7,800,000,000	73	1,625,000,000	74	4,300,000,000	75	1,250,000,000	75		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Optimalisasi Peningkatan Pengoperasian Kendaraan	Persen	80	81	180,000,000	82	185,364,000	83	195,799,993	84	270,203,991	85	332,026,664	85	450,460,575	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas lalu ,intas yang memadai dan berwawasan lingkungan	Persen	70	71	5,351,566,000	72	5,511,042,667	73	5,821,314,369	74	8,033,413,829	75	9,871,458,913	75	13,392,608,308	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Terwujudnya Angkutan Yang Selamat, Aman, Nyaman, Terjangkau dan Terpadu	Persen	80	81	51,379,000	82	52,910,094	83	55,888,933	84	77,126,727	85	94,773,322	85	128,578,966	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terciptanya Lalu Lintas Yang Aman, Tertib dan Lancar	Persen	70	71	763,000,000	72	785,737,400	73	829,974,416	74	1,145,364,694	75	1,407,424,135	75	1,909,452,325	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Persen	70	71	260,000,000	72	267,748,000	73	282,822,212	74	390,294,653	75	479,594,070	75	650,665,274	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Komunikasi dan Informatika					**4,500,730,020**		**5,693,437,975**		**5,904,683,933**		**6,736,603,827**		**8,259,601,183**		**12,150,634,024**	
	Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)	Kemudahan mendapatkan informasi melalui media elektronik menuju smart city	Persen	80	80	81,000,000	82	1,135,000,000	85	1,090,000,000	87	95,000,000	90	100,000,000	90	1,090,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Persen	80	80	142,000,000	82	146,231,600	85	154,464,439	87	213,160,926	90	261,932,146	90	355,363,342	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Persentase tingkat ketercapaian penyebaran informasi Pemda Bukittinggi kepada masyarakat	'%	80	80	2,485,337,800	83	2,559,400,866	85	2,703,495,135	88	3,730,823,287	90	4,584,435,655	90	6,219,703,853	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tingkat pencapaian pelayanan informasi kepada publik	'%	80	80	419,853,220	81	432,364,846	82	456,706,987	83	630,255,642	84	774,458,133	84	1,050,707,348	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya sarana dan prasarana TIK menuju smart city	Persen	80	80	1,034,736,000	82	1,065,571,133	85	1,125,562,788	87	1,553,276,647	90	1,908,666,344	90	2,589,487,628	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat	publikasi	0	12	16,675,000	12	17,171,915	12	18,138,694	12	25,031,397	12	30,758,581	12	41,730,167	GUGUAK PANJANG
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat Melalu Media Cetak Dan Elektronik	Publikasi/Tahun	24	24	11,450,000	24	11,791,210	27	12,455,055	27	17,187,976	29	21,120,585	29	28,654,298	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan program komunikasi, informasi dan media massa	'%	100	100	0	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi di masyarakat	bulan	12	12	52,678,000	12	54,247,804	12	57,301,956	12	79,076,699	12	97,169,448	12	131,829,790	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan Telekomunikasi	Persen	80	80	257,000,000	82	264,658,600	85	279,558,879	87	385,791,253	90	474,060,292	90	643,157,598	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					**1,012,000,000**		**1,042,157,600**		**1,100,831,073**		**1,519,146,881**		**1,866,727,687**		**2,532,589,453**	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	82.52	83	217,000,000	84	223,466,600	85	236,047,770	86	325,745,922	87	400,276,589	87	543,055,248	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang tersentuh pembiayaan	'%	30	33	45,000,000	36	46,341,000	39	48,949,998	42	67,550,998	45	83,006,666	45	112,615,144	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	unit	3	20	460,000,000	20	473,708,000	20	500,377,760	20	690,521,309	20	848,512,585	20	1,151,177,024	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
		Jumlah UMKM	unit	9236	9,236		9,246	0	9,256	0	9,266	0	9,276	0	9,276	0	
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi sehat	unit	11	12	290,000,000	13	298,642,000	14	315,455,545	15	435,328,652	16	534,931,847	16	725,742,037	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Penanaman Modal					**1,404,302,900**		**1,546,151,126**		**1,657,569,435**		**2,233,045,820**		**2,590,366,704**		**3,514,350,507**	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor	Perusahaan	70	80	32,806,100	90	33,783,722	100	35,685,745	110	49,246,329	120	60,513,889	120	82,099,193	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	persen	2500000000	10	114,286,000	10	117,691,723	10	124,317,767	10	171,558,518	10	210,811,107	10	286,007,429	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi	dokumen	0	0	0	1	100,000,000	1	130,000,000	1	125,000,000	1	0	1		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Lancarnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase	100	100	377,525,700	100	388,775,966	100	410,664,053	100	566,716,393	100	696,381,103	100	944,780,243	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	nilai mutu	7.2	7	293,324,000	7	302,065,055	8	319,071,318	8	440,318,419	8	541,063,273	8	734,060,542	GUGUAK PANJANG

	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	'%	80	85	586,361,100	90	603,834,661	90	637,830,552	90	880,206,162	90	1,081,597,332	90	1,467,403,100	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Kepemudaan dan Olahraga					**5,510,165,350**		**5,674,368,277**		**6,218,835,211**		**8,511,492,592**		**10,419,010,097**		**13,789,512,498**	
	Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah capaian program pembinaan kepemudaan	'%	0	100	931,257,100	100	959,008,562	100	1,013,000,744	100	1,397,941,026	100	1,717,789,933	100	2,330,525,602	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	'%	0	100	368,905,750	100	379,899,141	100	401,287,463	100	553,776,699	100	680,480,808	100	923,208,312	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai	unit	3	3	3,385,741,500	3	3,486,636,597	4	3,682,934,237	5	5,082,449,247	6	6,245,313,635	6	8,473,017,009	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	'%	100	100	824,261,000	100	848,823,978	100	896,612,768	100	1,237,325,619	100	1,520,425,721	100	2,062,761,576	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan	'%	100	0	0	20	0	40	145,000,000	60	155,000,000	80	165,000,000	80		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	persentase sekolah yang bebas narkoba	'%	0	0	0	0	0	20	80,000,000	40	85,000,000	60	90,000,000	60		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Statistik					**273,905,300**		**332,067,678**		**355,448,088**		**471,168,362**		**570,243,683**		**685,464,105**	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pemenuhan Data pembangunan Daerah	'%	66	70	244,655,500	80	251,946,234	85	266,130,807	90	367,260,513	100	451,289,719	100	612,264,762	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD	Persen	10	0	0	20	50,000,000	30	57,500,000	40	60,000,000	50	65,000,000	50		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi statistik daerah	persen	100	100	29,249,800	100	30,121,444	100	31,817,281	100	43,907,848	100	53,953,964	100	73,199,343	Dinas Pertanian
	Persandian					**1,105,865,000**		**1,126,995,977**		**1,680,325,351**		**1,918,948,984**		**1,627,391,711**		**2,494,633,435**	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan TIK OLeh SKPD dan Layanan Kepada Publik dalam mewujudkan smart city	Persen	80	81	531,000,000	82	535,000,000	83	1,055,000,000	84	1,056,000,000	85	567,000,000	85	1,056,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	'%	80	80	574,865,000	82	591,995,977	85	625,325,351	88	862,948,984	90	1,060,391,711	90	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
	Kebudayaan					**2,103,766,500**		**3,537,958,742**		**53,903,630,369**		**10,914,693,909**		**5,434,464,067**		**5,264,799,258**	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang dilaksanakan masyarakat	kali	4	52	363,480,000	57	374,311,704	59	395,385,453	61	545,631,925	63	670,472,510	63	909,630,054	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	sanggar	6	6	892,148,000	7	918,734,010	13	970,458,735	16	1,339,233,055	19	1,645,649,577	19	2,232,652,782	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	kali	0	1	301,845,000	1	310,839,981	1	328,340,272	1	453,109,575	1	556,781,046	1	755,384,845	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan Program Pengembangan nilai budaya	bln	0	12	75,000,000	12	77,235,000	12	81,583,331	12	112,584,996	12	138,344,443	12	187,691,906	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya aktifitas pengembangan nilai adat dan budaya di masyarakat	kegiatan	8	8	6,352,000	9	6,541,290	10	6,909,564	11	9,535,199	12	11,716,852	12	15,896,253	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya	kegiatan	0	0	0	3	374,500,000	4	426,200,000	4	426,660,000	4	448,872,000	4		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	'%	0	5	0	10	997,000,000	15	51,189,000,000	20	7,330,000,000	25	1,105,000,000	25		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Pengelolaan Kekayaan Budaya	'%	0	25	464,941,500	30	478,796,757	35	505,753,014	40	697,939,159	45	857,627,639	45	1,163,543,418	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Perpustakaan					**248,249,470**		**255,647,304**		**270,040,247**		**372,655,541**		**457,919,129**		**621,258,883**	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan	'%	100	100	248,249,470	100	255,647,304	100	270,040,247	100	372,655,541	100	457,919,129	100	621,258,883	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Kearsipan					**144,768,600**		**719,082,704**		**744,476,061**		**792,316,964**		**869,539,085**		**362,291,926**	
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan	'%	100	100	0	100	510,000,000	100	535,000,000	100	560,000,000	100	585,000,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi	'%	100	100	97,268,600	100	100,167,204	100	105,806,618	100	146,013,133	100	179,420,937	100	243,420,386	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan	'%	100	100	0	100	60,000,000	100	52,000,000	100	15,000,000	100	17,500,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	'%	100	100	47,500,000	100	48,915,500	100	51,669,443	100	71,303,831	100	87,618,147	100	118,871,541	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Urusan Pilihan					17,072,716,450											
	Kelautan dan Perikanan					**314,084,700**		**393,444,424**		**416,654,345**		**551,482,996**		**664,358,306**		**786,015,414**	
	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	persen	2	2	77,740,500	2	80,057,167	2	84,564,385	2	116,698,852	2	143,399,549	2	194,550,168	Dinas Pertanian
	Program Pengembangan Perikanan budidaya	Jumlah Produksi ikan	ton	355	351	220,693,700	352	227,270,372	353	240,065,694	354	331,290,658	355	407,089,961	355	552,298,950	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan	Meningkatnya kualitas SDM Perikanan		0	0	15,650,500	0	16,116,885	0	17,024,266	0	23,493,486	0	28,868,796	0	39,166,296	Dinas Pertanian

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Daya Saing Produk Perikanan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	persen	40	10	0	10	70,000,000	10	75,000,000	10	80,000,000	10	85,000,000	10		Dinas Pertanian
	Pariwisata					**10,534,131,950**		**83,527,230,515**		**14,181,642,393**		**15,391,866,502**		**16,920,336,758**		**5,111,145,779**	
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	meningkatnya jumlah PAD yang dikelola Dinas Pariwisata	rupiah (Milyar)	8041	10,086	8,491,764,000	10,091	81,424,000,000	10,097	11,960,000,000	10,112	12,326,000,000	10,127	13,153,000,000	10,127		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	meningkatnya jumlah wisatawan	orang	460905	483,950	2,042,367,950	508,148	2,103,230,515	533,555	2,221,642,393	560,233	3,065,866,502	588,245	3,767,336,758	588,245	5,111,145,779	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Pertanian					**1,190,397,400**		**1,225,871,243**		**1,294,887,793**		**1,786,945,155**		**2,195,798,206**		**2,979,039,427**	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi	kelompok	10	11	23,763,600	12	24,471,755	13	25,849,515	14	35,672,331	15	43,834,160	15	59,469,805	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	persen	0	5	64,257,200	5	66,172,065	5	69,897,552	5	96,458,621	5	118,528,354	5	160,807,418	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	2	2	370,088,300	2	381,116,931	2	402,573,815	2	555,551,864	2	682,662,131	2	926,167,713	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian	persen	2	2	155,835,200	2	160,479,089	2	169,514,062	2	233,929,405	2	287,452,453	2	389,986,743	Dinas Pertanian
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)	persen	70	73	306,133,100	78	315,255,866	80	333,004,772	82	459,546,585	85	564,690,844	85	766,116,067	Dinas Pertanian
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persen	100	100	139,098,800	100	143,243,944	100	151,308,578	100	208,805,838	100	256,580,614	100	348,102,919	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	1	2	43,233,800	2	44,522,167	2	47,028,765	2	64,899,696	2	79,748,747	2	108,195,124	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	kwintal/Ha	66.7	67	87,987,400	67	90,609,425	67	95,710,735	67	132,080,814	67	162,300,905	67	220,193,638	Dinas Pertanian
	Kehutanan					**61,740,800**		**63,580,676**		**67,160,268**		**92,681,170**		**113,886,621**		**154,509,979**	
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan luas lahan yang dihijaukan	persen	2	2	61,740,800	2	63,580,676	2	67,160,268	2	92,681,170	2	113,886,621	2	154,509,979	Dinas Pertanian
	Perdagangan					**4,397,357,000**		**4,528,398,239**		**4,783,347,059**		**6,601,018,942**		**8,111,332,076**		**11,004,644,227**	
	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat Pengawasan dan Ketertiban Pasar	'%	100	100	374,907,000	100	386,079,229	100	407,815,489	100	562,785,375	100	691,550,669	100	938,226,792	Dinas Pengelolaan Pasar

	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Tingkat Sarana dan Prasarana yang dikembangkan	$	100	100	2,393,450,000	100	2,464,774,810	100	2,603,541,632	100	3,592,887,452	100	4,414,940,101	100	5,989,749,235	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha	perusahaan	2553	300	554,000,000	350	570,509,200	400	602,628,868	450	831,627,838	500	1,021,904,287	500	1,386,417,546	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri	IKM	0	2	250,000,000	2	257,450,000	2	271,944,435	2	375,283,320	2	461,148,144	2	625,639,687	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL	lokasi	0	0	120,000,000	1	123,576,000	1	130,533,329	1	180,135,994	1	221,351,109	1	300,307,050	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah komoditas peredaran barang yang di awasi	jenis	20	20	705,000,000	20	726,009,000	20	766,883,307	22	1,058,298,963	22	1,300,437,766	22	1,764,303,917	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Industri					**1,765,402,000**		**1,818,010,980**		**1,920,364,998**		**2,650,103,697**		**3,256,447,423**		**4,418,022,218**	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM	'%	1	2	616,750,000	2	635,129,150	2	670,886,921	2	925,823,951	2	1,137,652,471	2	1,543,453,108	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang	unit usaha	0	5	886,125,000	10	912,531,525	15	963,907,050	20	1,330,191,729	30	1,634,539,596	30	2,217,579,870	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya nilai produksi IKM	'%	4.1113E+11	2	47,527,000	2	48,943,305	2	51,698,813	2	71,344,361	2	87,667,951	2	118,939,110	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal	&	476	7	30,000,000	7	30,894,000	7	32,633,332	7	45,033,998	7	55,337,777	7	75,076,762	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB	Persen	0.07	0	185,000,000	0	190,513,000	0	201,238,882	0	277,709,657	0	341,249,627	0	462,973,368	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Bidang Pemerintahan Umum					**31,985,962,425**		**34,595,144,105**		**36,787,467,918**		**50,031,842,727**		**61,020,343,823**		**80,046,750,073**	
	Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah Usulan Bantuan Kemasyarakatan yang direalisasikan	Proposal /Tahun	42	60	15,000,000	60	15,447,000	60	16,316,666	60	22,516,999	60	27,668,889	60	37,538,381	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	'%	80	80	71,440,000	82	73,568,912	85	77,710,842	88	107,240,962	90	131,777,694	90	178,782,797	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	'%	80	80	909,099,450	81	936,190,614	82	988,898,145	83	1,364,679,440	84	1,676,918,096	84	2,275,074,781	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH	'%	80	80	7,627,000,000	85	7,854,284,600	90	8,296,480,823	95	11,449,143,536	100	14,068,707,577	100	19,087,015,569	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	'%	80	80	245,162,000	81	252,467,828	82	266,681,766	83	368,020,837	84	452,224,005	84	613,532,308	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Kelembagaan Daerah	Peningkatan capaian kinerja daerah	peringkat nasional	74	62	721,357,000	55	742,853,439	50	784,676,087	40	1,082,853,000	35	1,330,609,767	35	1,805,238,271	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur	Jumlah penyelenggaraan diklat peningkatan profesionalisme aparatur	kegiatan	0	0	0	8	800,000,000	8	812,000,000	8	834,000,000	8	836,000,000	8		Badan Kepegawaian Daerah

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	'%	100	100	559,000,000	100	575,658,200	100	608,067,757	100	839,133,504	100	1,031,127,250	100	1,398,930,340	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Meningkatnya Program peningkatan pelayanan kelurahan	'%	100	100	380,000,000	100	391,324,000	100	413,355,541	100	570,430,647	100	700,945,179	100	950,972,324	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	persen	80	82	734,210,800	84	756,090,282	86	798,658,165	88	1,102,148,267	90	1,354,319,791	90	1,837,405,660	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	orang	80	0	30,740,000	80	31,656,052	80	33,438,288	80	46,144,837	80	56,702,776	80	76,928,656	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan	'%	0	0	0	80	11,000,000	85	11,850,000	90	12,650,000	95	13,275,000	95		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kerjasama Tugas Sekretariat DPRD se Indonesia	'%	100	100	109,500,000	100	112,763,100	100	119,111,663	100	164,374,094	100	201,982,887	100	274,030,183	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terstandarisasinya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	'%	100	100	50,000,000	100	51,490,000	100	54,388,887	100	75,056,664	100	92,229,629	100	125,127,937	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemerintahan	'%	100	100	12,522,580,525	100	12,895,753,425	100	13,621,784,342	100	18,798,062,393	100	23,099,059,068	100	31,338,493,438	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	'%	100	100	36,000,000	100	37,072,800	100	39,159,999	100	54,040,798	100	66,405,333	100	90,092,115	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Perizinan	dokumen	2	2	12,666,000	1	13,043,447	1	13,777,793	1	19,013,354	1	23,363,610	1	31,697,409	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase capaian realisasi penyelenggaraan pemerintahan	'%	81	75	762,195,900	80	784,909,338	80	829,099,734	85	1,144,157,632	90	1,405,940,899	90	1,907,440,017	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kegiatan yang dikelola dengan sistem otomisasi	kegiatan	1	1	502,385,200	3	517,356,279	5	546,483,437	7	754,147,144	7	926,696,010	7	1,257,248,477	Badan Kepegawaian Daerah
	Peningkatan Kemitraan Legislatif dengan Eksekutif	Terjalinnya kemitraan yang sinergis antara legislatif dan eksekutif	'%	100	0	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukittinggi	persen	10	15	2,092,983,550	20	2,155,354,460	30	2,276,700,916	50	3,141,847,264	75	3,860,701,918	75	5,237,814,292	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ditindaklanjutinya Pengaduan Masyarakat Secara Komprehensif	'%	100	100	0	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Penyelenggaraan Adipura	Tingkat penilaian adipura	'%	71	75	0	77	0	80	325,000,000	85	325,000,000	87	325,000,000	87		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Penegasan Batas Wilayah	Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan	'%	80	80	671,985,500	81	692,010,668	82	730,970,869	83	1,008,739,799	84	1,239,539,464	84	1,681,683,191	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	'%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat inflasi daerah	'%	2.84	9	575,800,100	6	592,958,943	5	626,342,531	5	864,352,693	4	1,062,116,590	4	1,440,973,577	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rupiah (Milyar)	28892	31,758	3,021,888,000	34,927	3,111,940,262	38,432	3,287,142,499	42,311	4,536,256,649	46,605	5,574,152,170	46,605	7,562,452,249	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD`	'%	100	100	111,720,000	100	115,049,256	100	121,526,529	100	167,706,610	100	206,077,883	100	279,585,863	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Peningkatan program peningkatan kinerja LPMK dan RT	bln	12	12	63,000,000	12	64,877,400	12	68,529,998	12	94,571,397	12	116,209,332	12	157,661,201	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pembinaan PKK	Peningkatan program pembinaan PKK	bln	12	12	92,500,000	12	95,256,500	12	100,619,441	12	138,854,829	12	170,624,813	12	231,486,684	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan RT	'%	90	80	67,748,400	85	69,767,302	90	73,695,201	95	101,699,378	100	124,968,196	100	169,544,351	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Keuangan					**4,841,271,107**		**4,985,540,986**		**5,266,226,943**		**7,267,393,182**		**8,930,172,742**		**12,115,565,359**	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi	opini	3	3	4,841,271,107	3	4,985,540,986	3	5,266,226,943	3	7,267,393,182	3	8,930,172,742	3	12,115,565,359	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Bidang Pengawasan					**1,466,804,860**		**1,510,515,645**		**1,595,557,676**		**2,201,869,592**		**2,705,657,355**		**3,670,765,334**	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	'%	100	100	319,019,650	100	328,526,436	100	347,022,474	100	478,891,014	100	588,461,278	100	798,365,416	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	'%	100	100	1,147,785,210	100	1,181,989,209	100	1,248,535,202	100	1,722,978,578	100	2,117,196,077	100	2,872,399,918	Inspektorat Daerah
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					**2,871,047,600**		**2,956,604,818**		**3,123,061,670**		**4,309,825,104**		**5,295,913,088**		**7,184,965,287**	

	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang difasilitasi mengikuti pendidikan kedinasan	orang	1500	550	2,545,102,500	550	2,620,946,555	530	2,768,505,846	535	3,820,538,067	550	4,694,677,177	550	6,369,268,525	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai sesuai standar kompetensi	'%	60	60	325,945,100	70	335,658,264	80	354,555,824	90	489,287,037	95	601,235,912	95	815,696,761	Badan Kepegawaian Daerah
	Perencanaan Pembangunan					**3,480,323,200**		**3,659,036,831**		**3,870,818,105**		**5,324,428,985**		**6,529,778,337**		**8,709,713,269**	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	'%	100	100	2,214,373,100	100	2,280,361,418	100	2,408,745,766	100	3,324,069,157	100	4,084,616,181	100	5,541,598,772	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	'%	100	100	84,875,500	100	87,404,790	100	92,325,680	100	127,409,438	100	156,560,717	100	212,405,925	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan sosial budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	'%	100	100	164,296,900	100	169,192,948	100	178,718,511	100	246,631,545	100	303,060,842	100	411,162,644	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	'%	100	100	574,865,000	100	591,995,977	100	625,325,351	100	862,948,984	100	1,060,391,711	100	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum	'%	60	100	125,647,500	100	129,391,796	100	136,676,554	100	188,613,644	100	231,768,446	100	314,440,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Pemenuhan Pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota	'%	60	65	316,265,200	70	325,689,903	75	344,026,244	80	474,756,217	85	583,380,440	85	791,472,243	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Peningkatan kualitas perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana	'%	50	50	0	60	75,000,000	65	85,000,000	70	100,000,000	75	110,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Bidang Penunjang Lainnya					**1,678,767,600**		**1,728,794,874**		**1,826,126,026**		**2,520,053,916**		**3,096,642,252**		**4,201,214,543**	
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan oleh masyarakat	kegiatan	5	5	416,710,000	5	429,127,958	5	453,287,862	5	625,537,250	5	768,660,172	5	1,042,841,256	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pendidikan politik masyarakat	Efektivitas kegiatan pendidikan politik masyarakat	kegiatan	7	3	1,088,151,500	3	1,120,578,415	3	1,183,666,979	3	1,633,460,432	3	2,007,196,178	3	2,723,163,055	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda	'% kegiatan	0	100	173,906,100	100	179,088,502	100	189,171,184	100	261,056,235	100	320,785,901	100	435,210,232	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Penunjang Fungsi Pemerintahan					**78,568,988,305**		**110,687,546,491**		**84,961,392,121**		**116,939,982,167**		**143,499,320,780**		**189,891,040,836**	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	465,300,000			100	300,000,000	100	60,000,000	100	75,000,000	100	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam menggunakan atribut kepegawaian	'%	100	100	18,000,000	100	18,536,400	100	19,579,999	100	27,020,399	100	33,202,666	100	45,046,057	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	656,988,500	100	676,566,757	100	714,657,466	100	986,227,303	100	1,211,876,110	100	1,644,152,318	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	11,550,000	100	11,894,190	100	12,563,833	100	17,338,089	100	21,305,044	100	28,904,554	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	865,000,000	100	890,777,000	100	940,927,745	100	1,298,480,288	100	1,595,572,578	100	2,164,713,317	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	22,150,000	100	22,810,070	100	24,094,277	100	33,250,102	100	40,857,726	100	55,431,676	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	683,530,700	100	703,899,915	100	743,529,480	100	1,026,070,682	100	1,260,835,655	100	1,710,575,733	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,760,000	100	4,901,848	100	5,177,822	100	7,145,394	100	8,780,261	100	11,912,180	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,987,400	100	11,314,825	100	11,951,849	100	16,493,552	100	20,267,276	100	27,496,614	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	257,387,100	100	265,057,236	100	279,979,958	100	386,372,342	100	474,774,334	100	644,126,339	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	12,150,000	100	12,512,070	100	13,216,500	100	18,238,769	100	22,411,800	100	30,406,089	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	309,798,600	100	319,030,598	100	336,992,021	100	465,048,989	100	571,452,198	100	775,289,196	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	2,300,000	100	2,368,540	100	2,501,889	100	3,452,607	100	4,242,563	100	5,755,885	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	21,300,000	100	21,934,740	100	23,169,666	100	31,974,139	100	39,289,822	100	53,304,501	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	6,300,000	100	6,487,740	100	6,853,000	100	9,457,140	100	11,620,933	100	15,766,120	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	230,200,600	100	237,060,578	100	250,407,088	100	345,561,782	100	424,626,318	100	576,090,525	Kantor Ketahanan Pangan

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	'%	100	100	353,159,200	100	363,683,344	100	384,158,716	100	530,139,029	100	651,434,838	100	883,801,645	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	1,910,300	100	1,967,227	100	2,077,982	100	2,867,615	100	3,523,725	100	4,780,638	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja	'%	100	100	17,950,000	100	18,484,910	100	19,525,610	100	26,945,342	100	33,110,437	100	44,920,930	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang berpakaian sesuai aturan	'%	100	100	18,600,000	100	19,154,280	100	20,232,666	100	27,921,079	100	34,309,422	100	46,547,593	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perentasee laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	2,020,000	100	2,080,196	100	2,197,311	100	3,032,289	100	3,726,077	100	5,055,169	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	65,000,000	100	66,937,000	100	70,705,553	100	97,573,663	100	119,898,517	100	162,666,319	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	19,000,000	100	19,566,200	100	20,667,777	100	28,521,532	100	35,047,259	100	47,548,616	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	343,857,700	100	354,104,659	100	374,040,752	100	516,176,237	100	634,277,361	100	860,524,095	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	132,000,000	100	135,933,600	100	143,586,662	100	198,149,593	100	243,486,220	100	330,337,755	Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,513,220,400	100	6,707,314,368	100	7,084,936,167	100	9,777,211,910	100	12,014,237,995	100	16,299,716,688	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	90	90	111,000,000	90	114,307,800	90	120,743,329	90	166,625,794	95	204,749,776	95	277,784,021	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	3,237,400,000	100	3,333,874,520	100	3,521,571,655	100	4,859,768,885	100	5,971,684,005	100	8,101,783,690	Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersedian Layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	5,111,604,400	100	5,263,930,211	100	5,560,289,482	100	7,673,199,485	100	9,428,827,527	100	12,792,090,306	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaiakan kinerja dan keuangann yang tersesusun tepat waktu	'%	100	100	78,666,400	100	81,010,659	100	85,571,559	100	118,088,751	100	145,107,457	100	196,867,287	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana & Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,260,897,000	100	32,280,646,000	100	1,601,292,000	100	2,436,344,000	100	2,867,171,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran & Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	169,750,000	100	174,808,550	100	184,650,271	100	254,817,374	100	313,119,590	100	424,809,347	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	46,800,000	100	48,194,640	100	50,907,998	100	70,253,038	100	86,326,933	100	117,119,749	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kesediaan layanan administrasi perkantoran		100	100	7,893,622,000	100	8,128,851,936	100	8,586,506,300	100	11,849,378,693	100	14,560,516,538	100	19,754,252,788	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persentase	100	100	9,377,500	100	9,656,950	100	10,200,636	100	14,076,877	100	17,297,667	100	23,467,745	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persentase	100	100	1,910,080,000	100	1,967,000,384	100	2,077,742,506	100	2,867,284,658	100	3,523,319,387	100	4,780,087,413	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	635,835,000	100	654,782,883	100	691,647,159	100	954,473,080	100	1,172,856,521	100	1,591,214,441	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	60	60	1,342,932,360	70	1,382,951,744	80	1,460,811,928	90	2,015,920,460	95	2,477,163,061	95	3,360,767,125	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	122,654,500	100	126,309,604	100	133,420,835	100	184,120,752	100	226,247,580	100	306,950,092	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	482,769,475	100	497,156,005	100	525,145,888	100	724,701,326	100	890,512,989	100	1,208,158,973	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	16,450,000	100	16,940,210	100	17,893,944	100	24,693,642	100	30,343,548	100	41,167,091	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	'%	100	100	878,892,100	100	905,083,085	100	956,039,262	100	1,319,334,182	100	1,621,197,843	100	2,199,479,113	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	100	214,300,000	100	220,686,140	100	233,110,770	100	321,692,862	100	395,296,189	100	536,298,340	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persentase	100	100	19,350,000	100	19,926,630	100	21,048,499	100	29,046,929	100	35,692,866	100	48,424,512	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	438,888,200	100	451,967,068	100	477,412,814	100	658,829,684	100	809,569,915	100	1,098,343,504	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase	100	100	16,165,900	100	16,647,644	100	17,584,906	100	24,267,171	100	29,819,499	100	40,456,114	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,698,700,000	100	2,779,121,260	100	2,935,585,787	100	4,051,108,386	100	4,978,001,985	100	6,753,655,293	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedispilanan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pagawai	'%	100	100	150,000,000	100	154,470,000	100	163,166,661	100	225,169,992	100	276,688,886	100	375,383,812	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesedian Layan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,153,130,000	100	2,217,293,274	100	2,342,126,885	100	3,232,135,102	100	3,971,647,613	100	5,388,334,317	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,900,000	100	11,224,820	100	11,856,777	100	16,362,353	100	20,106,059	100	27,277,890	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	1,446,300,000	100	1,489,399,740	100	1,573,252,945	100	2,171,089,065	100	2,667,834,243	100	3,619,450,717	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persen	100	100	225,225,000	100	231,936,705	100	244,994,741	100	338,092,743	100	415,448,363	100	563,638,794	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	5,562,692,900	100	5,728,461,148	100	6,050,973,511	100	8,350,343,445	100	10,260,902,026	100	13,920,965,778	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persetase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	100	11,358,000	100	11,696,468	100	12,354,980	100	17,049,872	100	20,950,882	100	28,424,062	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan Administrasi	'%	100	100	1,480,784,350	100	1,524,911,724	100	1,610,764,254	100	2,222,854,670	100	2,731,443,819	100	3,705,749,829	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capain kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	5,051,400	100	5,201,932	100	5,494,800	100	7,582,825	100	9,317,775	100	12,641,425	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	86,000,000	100	88,562,800	100	93,548,886	100	129,097,462	100	158,634,962	100	215,220,052	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	59,400,000	100	61,170,120	100	64,613,998	100	89,167,317	100	109,568,799	100	148,651,990	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	474,236,200	100	488,368,439	100	515,863,582	100	711,891,743	100	874,772,574	100	1,186,803,951	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,900,000	100	5,046,020	100	5,330,111	100	7,355,553	100	9,038,504	100	12,262,538	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	102,983,800	100	106,052,717	100	112,023,485	100	154,592,410	100	189,963,153	100	257,723,010	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	23,000,000	100	23,685,400	100	25,018,888	100	34,526,065	100	42,425,629	100	57,558,851	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	418,985,000	100	431,470,753	100	455,762,556	100	628,952,328	100	772,856,620	100	1,048,534,577	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	107,580,000	100	110,785,884	100	117,023,129	100	161,491,918	100	198,441,269	100	269,225,270	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,367,447,130	100	2,437,997,054	100	2,575,256,289	100	3,553,853,678	100	4,366,975,400	100	5,924,675,525	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu	'%	100	100	14,575,800	100	15,010,159	100	15,855,231	100	21,880,218	100	26,886,412	100	36,476,796	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	65,100,000	100	67,039,980	100	70,814,331	100	97,723,777	100	120,082,977	100	162,916,574	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam Kehadiran dan pemakaian atribut	'%	100	100	33,300,000	100	34,292,340	100	36,222,999	100	49,987,738	100	61,424,933	100	83,335,206	Dinas Pertanian
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	907,064,550	100	934,095,074	100	986,684,626	100	1,361,624,784	100	1,673,164,535	100	2,269,982,324	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun waktu	'%	100	100	1,706,000	100	1,756,839	100	1,855,749	100	2,560,933	100	3,146,875	100	4,269,365	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	182,815,000	100	188,262,887	100	198,862,088	100	274,429,681	100	337,219,192	100	457,505,277	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,426,417,200	100	1,468,924,433	100	1,551,624,878	100	2,141,242,332	100	2,631,158,577	100	3,569,692,842	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuanagan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	3,878,500	100	3,994,079	100	4,218,946	100	5,822,145	100	7,154,252	100	9,706,174	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	173,300,000	100	178,464,340	100	188,511,882	100	260,146,398	100	319,667,893	100	433,693,431	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	unit	4	4	43,620,000	4	44,919,876	4	47,448,865	4	65,479,434	4	80,461,128	4	109,161,613	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	stel	40	40	40,500,000	40	41,706,900	40	44,054,998	40	60,795,898	40	74,705,999	40	101,353,629	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	bln	12	12	337,561,200	12	347,620,524	12	367,191,559	12	506,724,352	12	622,662,883	12	844,766,734	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen yang tersusun dengan tepat waktu	dokume n	3	3	5,980,000	3	6,158,204	3	6,504,911	3	8,976,777	3	11,030,664	3	14,965,301	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	874,400,000	100	900,457,120	100	951,152,856	100	1,312,590,941	100	1,612,911,748	100	2,188,237,369	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	40,500,000	100	41,706,900	100	44,054,998	100	60,795,898	100	74,705,999	100	101,353,629	GUGUAK PANJANG
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	339,733,200	100	349,857,249	100	369,554,212	100	509,984,813	100	626,669,339	100	850,202,292	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan YangTersusun Tepat Waktu	'%	100	100	7,989,000	100	8,227,072	100	8,690,256	100	11,992,554	100	14,736,450	100	19,992,942	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	48,600,000	100	50,048,280	100	52,865,998	100	72,955,077	100	89,647,199	100	121,624,355	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	394,870,450	100	406,637,589	100	429,531,286	100	592,753,174	100	728,375,101	100	988,186,499	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	22,114,000	100	22,772,997	100	24,055,117	100	33,196,061	100	40,791,320	100	55,341,584	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	0	100	378,400,000	100	389,676,320	100	411,615,097	100	568,028,834	100	697,993,831	100	946,968,230	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	108,000,000	100	111,218,400	100	117,479,996	100	162,122,394	100	199,215,998	100	270,276,345	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,070,114,000	100	1,102,003,397	100	1,164,046,188	100	1,606,383,740	100	1,973,924,340	100	2,678,023,152	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	55,500,000	100	57,153,900	100	60,371,665	100	83,312,897	100	102,374,888	100	138,892,011	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	410,500,000	100	422,732,900	100	446,532,762	100	616,215,212	100	757,205,252	100	1,027,300,366	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,668,453,440	100	1,718,173,353	100	1,814,906,512	100	2,504,570,987	100	3,077,616,829	100	4,175,402,752	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu	'%	100	100	9,342,400	100	9,620,804	100	10,162,455	100	14,024,188	100	17,232,922	100	23,379,905	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	740,875,000	100	762,953,075	100	805,907,333	100	1,112,152,120	100	1,366,612,525	100	1,854,083,212	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	153,000,000	100	157,559,400	100	166,429,994	100	229,673,392	100	282,222,664	100	382,891,488	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	65,250,000	100	67,194,450	100	70,977,498	100	97,948,947	100	120,359,666	100	163,291,958	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,425,988,650	100	6,617,483,112	100	6,990,047,411	100	9,646,265,427	100	11,853,330,957	100	16,081,414,109	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	39,792,100	100	40,977,905	100	43,284,961	100	59,733,246	100	73,400,212	100	99,582,068	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	4,770,756,100	80	4,912,924,632	85	5,189,522,289	90	7,161,540,758	95	8,800,101,284	95	11,939,097,412	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan dalam atribut pegawai	'%	80	85	40,000,000	90	41,192,000	95	43,511,110	100	60,045,331	100	73,783,703	100	100,102,350	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan adm perkantoran	'%	75	75	514,552,000	75	529,885,650	80	559,718,212	85	772,411,132	90	949,138,799	90	1,287,696,609	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	85	90	13,250,000	95	13,644,850	100	14,413,055	100	19,890,016	100	24,440,852	100	33,158,903	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	26,300,000	80	27,083,740	85	28,608,555	90	39,479,805	95	48,512,785	95	65,817,295	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen	90	91	153,000,000	92	157,559,400	93	166,429,994	94	229,673,392	95	282,222,664	95	382,891,488	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	90	91	1,268,502,000	92	1,306,303,360	93	1,379,848,239	94	1,904,190,569	95	2,339,869,372	95	3,174,500,777	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	Persen	90	91	13,271,000	92	13,666,476	93	14,435,898	94	19,921,540	95	24,479,588	95	33,211,457	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90	91	331,300,000	92	341,172,740	93	360,380,765	94	497,325,456	95	611,113,520	95	829,097,713	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.	'%	100	100	19,300,000	100	19,875,140	100	20,994,110	100	28,971,872	100	35,600,637	100	48,299,384	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	6,750,000	100	6,951,150	100	7,342,500	100	10,132,650	100	12,451,000	100	16,892,272	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,086,100	100	10,386,666	100	10,971,435	100	15,140,580	100	18,604,745	100	25,241,058	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	390,950,000	100	402,600,310	100	425,266,707	100	586,868,056	100	721,143,468	100	978,375,342	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	19,800,000	100	20,390,040	100	21,537,999	100	29,722,439	100	36,522,933	100	49,550,663	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layananan administrasi perkantoran	'%	100	100	407,394,800	100	419,535,165	100	443,154,995	100	611,553,893	100	751,477,424	100	1,019,529,421	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	dokumen	0	100	5,100,000	100	5,251,980	100	5,547,666	100	7,655,780	100	9,407,422	100	12,763,050	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	'%	100	100	2,150,000	100	2,214,070	100	2,338,722	100	3,227,437	100	3,965,874	100	5,380,501	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	11,300,000	100	11,636,740	100	12,291,888	100	16,962,806	100	20,843,896	100	28,278,914	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	14,850,000	100	15,292,530	100	16,153,499	100	22,291,829	100	27,392,200	100	37,162,997	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan layanan adminidtrasi perkantoran	'%	100	100	328,776,550	100	338,574,091	100	357,635,813	100	493,537,421	100	606,458,783	100	822,782,631	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	20	30	70,000,000	40	72,086,000	50	76,144,442	60	105,079,330	70	129,121,480	70	175,179,112	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	100	100	82,950,000	100	85,421,910	100	90,231,164	100	124,519,006	100	153,008,954	100	207,587,248	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tercapaianya pentaan jabatan dan informasi dibidang sumber daya aparatur	'%	90	90	120,000,000	91	123,576,000	92	130,533,329	93	180,135,994	94	221,351,109	94	300,307,050	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	persen	15	0	0	20	50,000,000	25	80,000,000	30	100,000,000	35	120,000,000	35		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	198,880,150	100	204,806,778	100	216,337,400	100	298,545,612	100	366,852,848	100	497,709,259	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	100	230,000,000	100	236,854,000	100	250,188,880	100	345,260,655	100	424,256,292	100	575,588,512	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	0	0	70	83,994,005	70	250,000,000	70	252,500,000	70	280,000,000	70		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Ketersediaan SDM sesuai Bidang Keahlian	'%	70	0	0	70	100,000,000	75	110,000,000	80	121,000,000	85	133,100,000	85		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha	persen	50	50	0	60	70,000,000	65	120,000,000	70	120,000,000	75	125,000,000	75		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal

Tabel 8.1
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2016-2021

No	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
						422,395,001,972		**749,329,601,668**		**750,467,272,748**		**802,301,132,459**		**880,007,775,939**		**935,670,577,444**	
	Urusan Wajib					**138,073,852,119**		**233,672,627,498**		**300,100,321,179**		**302,421,054,261**		**321,163,220,982**		**327,452,937,813**	
	Pendidikan					**21,044,806,653**		**21,671,941,891**		**22,892,072,220**		**31,591,059,663**		**38,819,094,114**		**52,665,864,985**	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	'% kegiatan	0	100	7,796,131,800	100	8,028,456,528	100	8,480,458,630	100	11,703,032,910	100	14,380,686,839	100	19,510,277,835	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya kegiatan untuk Pendidikan Anak Usia Dini	'%	0	100	505,396,950	100	520,457,779	100	549,759,552	100	758,668,182	100	932,251,462	100	1,264,785,558	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Menengah	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SMP	nilai	0	0	4,914,299,720	0	5,060,745,852	0	5,345,665,843	0	7,377,018,863	0	9,064,880,779	0	12,298,323,753	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Luar Biasa	Angka putus sekolah	'%	0.25	0	60,680,000	0	62,488,264	0	66,006,353	0	91,088,768	0	111,929,878	0	151,855,265	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SD	nilai	70	70	6,976,936,083	75	7,184,848,778	80	7,589,355,764	85	10,473,310,955	90	12,869,604,501	90	17,460,192,427	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Non Formal	Optimalisasi pelayanan non formal	'%	0	100	291,362,100	100	300,044,691	100	316,937,207	100	437,373,345	100	537,444,367	100	729,150,772	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya manjemen pelayanan pendidikan	'%	100	100	500,000,000	100	514,900,000	100	543,888,870	100	750,566,641	100	922,296,288	100	1,251,279,374	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Kesehatan					**19,744,900,125**		**89,115,160,717**		**70,545,369,265**		**34,475,549,586**		**45,154,904,131**		**38,554,570,535**	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	'%	85	85	0	86	120,000,000	87	150,000,000	88	160,000,000	90	180,000,000	90		Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Ratio tenaga paramedis per satuan penduduk (Bidan dan perawat)	tenaga paramedis/satuan penduduk	12.95	13	0	13	145,000,000	13	152,000,000	13	159,000,000	13	166,000,000	13		Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	'%	100	100	6,459,177,000	100	6,651,660,475	100	7,026,148,959	100	9,696,085,564	100	11,914,549,941	100	16,164,469,905	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	'%	5972	65	504,635,400	65	519,673,535	70	548,931,155	70	757,524,994	75	930,846,712	75	1,262,879,735	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada rumah sakit	'%	25	25	0	25	0	25	0	25	8,000,000,000	25	12,000,000,000	25		Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	unit	0	0	68,000,000	1	70,085,000,000	0	40,085,000,000	0	0	0	0	0		Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pengawasan dan pengendalian makanan yang memenuhi syarat	'%	90	90	38,000,000	100	39,132,400	100	41,335,554	100	57,043,065	100	70,094,518	100	95,097,232	Dinas Kesehatan

	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tingkat Pemenuhan Kualitas lingkungan	'%	40	40	208,000,000	41	214,198,400	42	226,257,770	43	312,235,722	44	383,675,256	44	520,532,220	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	'%	100	100	2,617,063,925	100	2,695,052,430	100	2,846,783,882	100	3,928,561,757	100	4,827,416,687	100	6,549,356,219	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD	'%	0	60	134,639,000	100	138,651,242	100	146,457,307	100	202,111,084	100	248,354,100	100	336,942,007	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ()	puskes mas	0	2	734,639,000	5	756,531,242	7	799,123,951	7	1,102,791,053	7	1,355,109,645	7	1,838,477,256	Dinas Kesehatan
	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan	'%	20	80	410,000,000	85	422,218,000	90	445,988,873	95	615,464,645	95	756,282,956	95	1,026,049,087	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	puskes mas	0	0	20,000,000	1	20,596,000	1	21,755,555	2	30,022,666	3	36,891,852	3	50,051,175	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas. Pustu dan Jaringannya yang dapat melaksanakan pelayanan kesehatan	'%	100	100	4,270,840,000	100	2,900,000,000	100	13,400,000,000	100	3,030,000,000	100	4,391,000,000	100		Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi lebih	'%	0	15	373,000,000	13	384,115,400	13	405,741,097	12	559,922,714	10	688,033,031	10	933,454,413	Dinas Kesehatan
	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan	'%	90	90	2,574,920,000	91	2,651,652,616	92	2,800,940,658	93	3,865,298,108	95	4,749,678,316	95	6,443,888,571	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	'%	83.8	85	193,564,000	86	199,332,207	87	210,554,610	88	290,565,362	90	357,046,717	90	484,405,281	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita	'%	57.57	60	744,750,000	70	766,943,550	80	810,122,472	90	1,117,969,011	90	1,373,760,321	90	1,863,780,627	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	100	100	368,671,800	100	379,658,220	100	401,032,977	100	553,425,509	100	680,049,265	100	922,622,838	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pelaksanaan lingkungan sehat dikecamatan dan kelurahan	bln	0	0	25,000,000	0	25,745,000	0	27,194,444	0	37,528,332	0	46,114,814	0	62,563,969	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					**23,185,390,700**		**30,774,600,415**		**47,208,094,352**		**86,121,250,039**		**90,858,058,503**		**49,906,825,615**	
	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	'%	12.5	13	680,250,000	20	700,521,450	30	739,960,808	40	1,021,145,915	50	1,254,784,100	50	1,702,365,588	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	'%	65	65	2,300,000,000	70	360,000,000	75	7,700,000,000	80	23,365,000,000	85	23,046,500,000	85		Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	'%	10	10	228,000,000	20	234,794,400	40	248,013,325	60	342,258,388	75	420,567,107	75	570,583,394	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap	'%	98	98	4,050,000,000	99	4,170,690,000	100	4,405,499,847	100	6,079,589,789	100	7,470,599,933	100	10,135,362,928	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Pembangunan gedung	Persentase Gedung Negara dan Swasta yang Laik Fugsi	'%	0	2	150,000,000	5	154,470,000	20	163,166,661	30	225,169,992	40	276,688,886	40	375,383,812	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengendalian banjir	Pengurangan titik genangan	titik	8	8	257,522,800	6	265,196,979	4	280,127,569	2	386,576,046	0	475,024,645	0	644,465,936	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	'%	48	48	943,071,400	55	2,940,000,000	70	12,104,083,333	90	23,785,170,833	100	23,937,604,375	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	'%	45	45	2,500,000,000	50	2,574,500,000	60	2,719,444,350	70	3,752,833,203	80	4,611,481,440	80	6,256,396,869	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	'%	98	0	0	98	488,000,000	99	561,200,000	100	3,420,000,000	100	3,762,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang terpelihara / normalisasi	'%	47	0	0	55	1,000,000,000	65	1,100,000,000	70	1,210,000,000	75	1,331,000,000	75		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	'%	72	72	4,819,443,900	80	4,963,063,328	85	5,242,483,794	90	7,234,627,635	95	8,889,910,438	95	12,060,941,491	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	'%	40	50	197,000,000	60	202,870,600	65	214,292,215	70	295,723,256	75	363,384,737	75	493,004,073	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota	'%	60	60	464,726,200	65	478,575,041	70	505,518,816	75	697,615,965	80	857,230,498	80	1,163,004,617	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	'%	40	50	862,629,700	70	888,336,065	75	938,349,386	80	1,294,922,152	85	1,591,200,340	85	2,158,781,502	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota	'%	60	60	0	65	250,000,000	70	0	0	0	0	0	0		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat - alat berat ke PU an / Kebinamargaan	'%	30	0	0	50	4,000,000,000	65	4,050,000,000	80	4,105,000,000	90	1,665,500,000	90		Dinas Pekerjaan Umum
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik	'%	85	85	1,009,556,000	88	1,039,640,769	90	1,098,172,544	93	1,515,478,111	95	1,862,219,503	95	2,526,473,199	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik	'%	85	85	4,723,190,700	88	4,863,941,783	90	5,137,781,705	93	7,090,138,753	95	8,712,362,500	95	11,820,062,204	Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan informasi / data base jalan	'%	20	0	0	40	1,200,000,000	0	0	80	300,000,000	100	330,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Sosial					**6,876,572,350**		**7,481,494,206**		**8,010,182,330**		**11,052,651,615**		**13,414,474,305**		**17,209,026,289**	
	Program pembinaan anak terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	'%	32	35	0	37	100,000,000	40	100,000,000	42	100,000,000	45	100,000,000	45		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	'%	60	65	1,696,650,000	68	1,747,210,170	70	1,845,578,103	73	2,546,897,782	75	3,129,627,994	75	4,245,966,299	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	'%	75	80	436,581,000	85	449,591,114	87	474,903,094	90	655,366,269	92	805,314,071	92	1,092,569,601	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	3	12	101,442,000	15	104,464,972	20	110,346,350	25	152,277,962	30	187,119,160	30	253,864,564	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial	'%	25	25	3,000,000	50	3,089,400	75	3,263,333	75	4,503,400	100	5,533,778	100	7,507,676	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang meningkat kesejahteraannya	'%	1.5	2	4,096,295,100	2	4,218,364,694	2	4,455,858,626	3	6,149,084,904	3	7,555,995,530	3	10,251,219,136	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial	'%	75	75	347,600,000	80	357,958,480	80	378,111,542	85	521,793,929	90	641,180,379	90	869,889,421	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin	'%	60	60	57,151,250	61	58,854,357	62	62,167,858	63	85,791,643	64	105,420,771	64	143,024,361	Sekretariat Daerah
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Penurunan Angka Kemiskinan	'%	54	5	137,853,000	5	141,961,019	4	149,953,425	3	206,935,726	2	254,282,620	2	344,985,231	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	2	2	0	3	300,000,000	4	430,000,000	5	630,000,000	6	630,000,000	6		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					**5,973,641,000**		**6,151,655,502**		**21,497,993,707**		**23,967,231,315**		**11,018,933,840**		**14,949,387,541**	
	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana areal pemakaman yang memadai	'%	80	80	139,484,600	80	143,641,241	85	151,728,243	85	209,384,975	90	257,292,258	90	349,068,406	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	% Jalan dengan riol yang baik	'%	40	40	3,804,507,000	55	3,917,881,309	70	4,138,458,026	90	5,711,072,076	100	7,017,765,367	100	9,521,002,274	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Pembangunan Rusunawa yang layak huni	unit	0	0	0	0	0	1	15,000,000,000	1	15,000,000,000	0	0	0		Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	'%	50	60	79,649,400	80	82,022,952	100	86,640,844	100	119,564,365	100	146,920,692	100	199,327,303	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	% Kesiap siangaan dan Tanggap terhadap Pencegahan Kebakatan Meningkat	'%	50	60	1,950,000,000	70	2,008,110,000	75	2,121,166,593	80	2,927,209,898	90	3,596,955,523	90	4,879,989,558	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					**14,971,579,700**		**15,447,732,775**		**16,315,751,130**		**22,504,336,560**		**27,646,464,765**		**37,467,257,746**	
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Terjaganya kerukunan antar dan intern umat bergama	'%	0	100	78,847,500	100	81,197,156	100	85,768,555	10	118,360,606	100	145,441,513	100	197,320,501	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan program kualitas pemahaman dan pengamalan dan pembinaan kerukunan beragama	'%	0	100	128,000,000	100	131,814,400	100	139,235,551	100	192,145,060	100	236,107,850	100	320,327,520	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Meningkatnya aktifitas keagamaan dilingkungan masyarakat	kegiatan	3	5	194,215,000	6	200,002,607	7	211,262,754	8	291,542,600	9	358,247,547	9	486,034,447	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Kelompok masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan	Kelompok masyarakat/keluarahan	9	2	469,687,000	2	483,683,673	3	510,915,063	4	705,062,787	4	866,381,153	4	1,175,419,311	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Jumlah event keagamaan ditengah masyarakat	'%	3	3	6,497,174,600	6	6,690,790,403	9	7,067,481,903	12	9,753,125,026	15	11,984,640,032	15	16,259,561,131	Sekretariat Daerah
	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, damai dan berkualitas	'%	0	0	12,636,000	0	13,012,553	0	13,745,160	85	18,968,320	85	23,308,272	85	31,622,332	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terpantaunya kegiatan orang asing, lembaga asing, dan non govenment organization serta deteksi dini dan penanggulangan konflik sosial	'%	100	100	237,889,000	100	244,978,092	100	258,770,359	100	357,103,095	100	438,808,283	100	595,331,198	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat keamananan dan kenyamanan lingkungan	'%	40	50	300,022,600	60	308,963,273	70	326,357,906	75	450,373,910	85	553,419,461	85	750,824,182	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Sistem kebencanaan	% Jumlah Data dan Informasi tentang Kebencanan terpenuhi	'%	25	100	74,970,000	100	77,204,106	100	81,550,697	100	112,539,962	100	138,289,105	100	187,616,829	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana	Kapasitas dan Kwalitas Petugas BPBD Meningkat dalam Penanggulanga Kebencanaan	'%	50	70	399,840,000	70	411,755,232	70	434,937,052	70	600,213,131	70	737,541,896	70	1,000,623,090	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	%Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meningkat	'%	50	60	2,155,520,000	70	2,219,754,496	75	2,344,726,674	80	3,235,722,810	90	3,976,056,189	90	5,394,315,432	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Peningkatan Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	bln	0	100	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Efektivitas kegiatan pemberantasan narkoba	Kegiatan	3	3	196,137,000	3	201,981,883	3	213,353,463	3	294,427,778	3	361,792,854	3	490,844,365	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Terdeteksinya potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah	'%	100	100	427,527,500	100	440,267,820	100	465,054,898	100	641,775,759	100	788,614,053	100	1,069,912,685	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	'%	20	20	124,280,900	30	127,984,471	40	135,189,997	50	186,562,195	60	229,247,625	60	311,020,253	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	kasus	722	650	3,239,993,800	600	3,336,545,615	500	3,524,393,133	400	4,863,662,524	250	5,976,468,510	250	8,108,274,827	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat	'%	100	100	76,668,300	100	78,953,015	100	83,398,070	100	115,089,337	100	141,421,777	100	191,866,925	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Tingkat pelaksanaan peringatan hari-hari besar kenegaraan	'%	100	100	208,464,500	100	214,676,742	100	226,763,043	100	312,932,999	100	384,532,069	100	521,694,658	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Peningkatan program pemberrantasan penyakit masyarakat	bln	0	0	42,000,000	0	43,251,600	0	45,686,665	0	63,047,598	0	77,472,888	0	105,107,467	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Mneingkatnya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	bln	0	0	41,000,000	0	42,221,800	0	44,598,887	0	61,546,465	0	75,628,296	0	102,604,909	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas per tahun	persen	0	10	18,377,500	10	18,925,150	10	19,990,635	10	27,587,077	10	33,899,000	10	45,990,773	GUGUAK PANJANG
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Temuan Peristiwa Gangguan Ketertiban dan Keamanan disertai laporan tertulis	Laporan /Tahun	22	15	48,328,500	12	49,768,689	10	52,570,667	7	72,547,520	5	89,146,392	5	120,944,910	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Tenaga Kerja					**1,327,649,501**		**1,367,213,456**		**1,444,187,574**		**1,992,978,852**		**2,448,972,413**		**3,322,520,873**	
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas	'%	66	77	34,000,000	88	35,013,200	90	36,984,443	95	51,038,532	100	62,716,148	100	85,086,997	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat tenaga kerja yang memiliki keahlian	'%	52	55	657,579,500	57	677,175,369	60	715,300,342	65	987,114,472	65	1,212,966,264	65	1,645,631,330	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap UU ketenagakerjaan	'%	5	5	581,070,001	6	598,385,887	7	632,075,012	8	872,263,517	9	1,071,837,410	9	1,454,161,814	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja	'%	8	15	55,000,000	17	56,639,000	19	59,827,776	21	82,562,330	23	101,452,592	23	137,640,731	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					**697,540,000**		**918,326,692**		**1,268,768,485**		**1,572,100,509**		**1,816,677,105**		**1,745,634,829**	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang	'%	70	70	345,140,000	70	355,425,172	70	375,435,609	70	518,101,141	70	636,642,682	70	863,733,126	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penurunan Kasus KDRT dan TPPO	'%	50	50	0	50	0	50	200,000,000	50	205,000,000	50	210,000,000	50		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kesejahteraan perempuan	'%	0	35	0	30	200,000,000	25	310,000,000	20	320,000,000	15	320,000,000	15		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tingkat kemiskinan menurun menjadi 2.84 %	'%	4.58	4	352,400,000	4	362,901,520	3	383,332,876	3	528,999,368	3	650,034,424	3	881,901,703	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Pangan					**680,581,800**		**700,863,138**		**740,321,732**		**1,021,643,991**		**1,255,396,136**		**1,703,195,937**	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	2400	2,400	387,248,000	2,400	398,787,990	2,400	421,239,754	2,400	581,310,861	2,400	714,314,786	2,400	969,110,870	Kantor Ketahanan Pangan
		Ketersediaan protein perkapita	gr/kap/hr	63	63		63	0	63	0	63	0	63	0	63	0	
	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	84.1	84	293,333,800	84	302,075,147	85	319,081,978	85	440,333,130	85	541,081,350	85	734,085,067	Kantor Ketahanan Pangan
	Pertanahan					**743,508,000**		**2,761,209,084**		**797,507,555**		**3,044,540,426**		**1,249,724,076**		**3,636,963,704**	
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunan tanah	'%	80	80	591,580,000	81	609,209,084	82	643,507,555	83	888,040,426	84	1,091,224,076	84	1,480,463,704	Sekretariat Daerah
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah	'%	90	90	151,928,000	91	2,152,000,000	92	154,000,000	93	2,156,500,000	94	158,500,000	94	2,156,500,000	Sekretariat Daerah
	Lingkungan Hidup					**8,509,414,250**		**10,725,114,795**		**15,978,684,758**		**19,918,084,965**		**20,766,646,806**		**19,793,773,821**	
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	Persentase	8	10	1,233,986,000	12	1,270,758,783	13	1,342,302,502	14	1,852,377,453	15	2,276,201,414	15	3,088,122,459	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH/ Non Hijau	'%	7.78	8	600,000,000	8	2,000,000,000	8	5,700,000,000	9	6,420,000,000	9	4,662,000,000	9		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase kelompok masyarakat yang memahami pengelolaan RTH	'%	10	20	0	30	0	40	110,000,000	50	115,000,000	60	120,000,000	60		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemenuhan RTH	'%	20	20	0	22	100,000,000	25	120,000,000	28	140,000,000	30	0	30		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan/pengelolaan persampahan	Persen	90	90	5,799,341,500	90	5,972,161,877	100	6,308,394,590	100	8,705,584,535	100	10,697,422,276	100	14,513,192,802	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup	'%	50	60	451,509,800	70	464,964,792	80	491,142,310	90	677,776,388	95	832,851,625	95	1,129,929,800	Kantor Lingkungan Hidup

	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	'%	80	70	424,576,950	60	437,229,343	50	461,845,355	40	637,346,590	30	783,171,490	30	1,062,528,760	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan pengendalian	'%	50	55	0	60	380,000,000	65	1,055,000,000	70	1,055,000,000	75	1,055,000,000	75		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	'%	0	0	0	50	0	55	270,000,000	60	175,000,000	65	180,000,000	65		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Informasi Lingkungan Hidup	'%	0	0	0	60	100,000,000	65	120,000,000	70	140,000,000	75	160,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					**662,010,550**		**938,838,464**		**859,880,340**		**1,121,132,069**		**1,335,310,746**		**1,656,720,293**	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat capaian pelayanan administrasi kependudukan	'%	67	70	662,010,550	75	681,738,464	80	720,120,340	85	993,766,069	90	1,221,139,746	90	1,656,720,293	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi dan kelengkapan data kependudukan	'%	0	0	0	85	257,100,000	90	139,760,000	95	127,366,000	100	114,171,000	100		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					**8,422,188,700**		**8,673,169,923**		**9,161,469,390**		**12,642,827,758**		**15,535,506,749**		**21,077,022,007**	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tiingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	'%	15	20	497,375,200	25	512,196,981	30	541,033,671	34	746,626,466	40	917,454,601	40	1,244,710,658	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	'%	15	20	1,898,758,100	25	1,955,341,091	30	2,065,426,795	34	2,850,288,977	40	3,502,435,095	40	4,751,753,693	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya peren perempuan dipedesaan	'%	100	100	184,000,000	100	189,483,200	100	200,151,104	100	276,208,524	100	339,405,034	100	460,470,810	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan program keberdayaan masyarakat pedesaan	bln	12	12	151,000,000	12	155,499,800	12	164,254,439	12	226,671,125	12	278,533,479	12	377,886,371	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	'%	100	100	640,000,000	100	659,072,000	100	696,177,754	100	960,725,300	100	1,180,539,249	100	1,601,637,599	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertahunnya	persen	802661	3	581,898,000	3	599,238,560	3	632,975,691	3	873,506,454	3	1,073,364,731	3	1,456,233,930	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun	'%	5	7	180,868,900	9	186,258,793	12	196,745,163	15	271,508,325	17	333,629,430	17	452,635,048	MANDIANGIN KOTO SELAYAN

	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Tingkat partisipasi perempuan dalam pencapaian tujuan program pemerintah	'%	100	80	341,078,000	85	351,242,124	90	371,017,056	95	512,003,537	100	629,149,947	100	853,567,733	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatkanya persentase aktifitas guna peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakn oleh pemerintah maupun masyarakat	Persen	10	10	543,400,500	10	559,593,835	10	591,098,968	10	815,716,576	10	1,002,352,528	10	1,359,891,675	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	'%	80	80	615,303,000	85	633,639,029	85	669,312,907	90	923,651,811	90	1,134,983,346	90	1,539,831,905	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	'%	15	15	2,180,510,600	20	2,245,489,816	25	2,371,910,893	30	3,273,237,032	34	4,022,153,665	34	5,456,855,877	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	'%	20	25	193,442,900	30	199,207,498	35	210,422,881	40	290,383,575	45	356,823,337	45	484,102,222	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya program peningkatan usaha ekonomi masyarakat	bln	0	0	195,538,000	0	201,365,032	0	212,701,884	0	293,528,600	0	360,687,943	0	489,345,332	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat	pelaku	0	0	141,194,000	90	145,401,581	120	153,587,690	90	211,951,013	120	260,445,404	120	353,346,280	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	'%	3	3	77,821,500	5	80,140,581	6	84,652,495	8	116,820,444	10	143,548,961	10	194,752,876	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					**2,324,370,650**		**2,414,636,895**		**2,733,398,653**		**3,709,190,141**		**4,312,516,845**		**5,816,874,103**	
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	100 % data akurat	'%	80	85	115,152,000	88	118,583,530	90	125,259,782	93	172,858,500	95	212,408,524	95	288,174,645	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program pelayanan kontrasepsi	Tercapainya program KB	'%	75	75	0	75	21,000,000	80	160,000,000	80	170,000,000	80	25,000,000	80		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 % Kelompok Kerja paham fungsi keluarga	'%	100	100	0	100	0	100	45,000,000	100	50,000,000	100	0	100		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75 % sekolah dan perguruan tinggi memiliki PIK R/M	'%	25	35	209,025,650	45	215,254,614	55	227,373,449	65	313,775,360	75	385,567,162	75	523,098,969	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Keluarga Berencana	Jumlah PUS ber KB 80 %	'%	1.77	2	1,463,946,000	2	1,507,571,591	2	1,592,447,871	1	2,197,578,062	1	2,700,383,923	1	3,663,610,869	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Peningkatan Tingkat Tahapan Kelompok Kegiatan	tingkat	0	0	71,247,000	0	73,370,161	0	77,500,901	0	106,951,243	0	131,421,687	0	178,299,803	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase Kelurahan yang memiliki WPA (Warga Peduli AIDS)	'%	8	24	465,000,000	24	478,857,000	30	505,816,649	40	698,026,976	50	857,735,548	50	1,163,689,818	Dinas Kesehatan
	Perhubungan					**6,605,945,000**		**14,602,802,161**		**8,810,799,923**		**14,216,403,893**		**13,435,277,104**		**16,531,765,447**	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berwawasan lingkungan	Persen	70	0	0	72	7,800,000,000	73	1,625,000,000	74	4,300,000,000	75	1,250,000,000	75		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Optimalisasi Peningkatan Pengoperasian Kendaraan	Persen	80	81	180,000,000	82	185,364,000	83	195,799,993	84	270,203,991	85	332,026,664	85	450,460,575	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas lalu ,intas yang memadai dan berwawasan lingkungan	Persen	70	71	5,351,566,000	72	5,511,042,667	73	5,821,314,369	74	8,033,413,829	75	9,871,458,913	75	13,392,608,308	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Terwujudnya Angkutan Yang Selamat, Aman, Nyaman, Terjangkau dan Terpadu	Persen	80	81	51,379,000	82	52,910,094	83	55,888,933	84	77,126,727	85	94,773,322	85	128,578,966	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terciptanya Lalu Lintas Yang Aman, Tertib dan Lancar	Persen	70	71	763,000,000	72	785,737,400	73	829,974,416	74	1,145,364,694	75	1,407,424,135	75	1,909,452,325	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Persen	70	71	260,000,000	72	267,748,000	73	282,822,212	74	390,294,653	75	479,594,070	75	650,665,274	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Komunikasi dan Informatika					**4,500,730,020**		**5,693,437,975**		**5,904,683,933**		**6,736,603,827**		**8,259,601,183**		**12,150,634,024**	
	Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)	Kemudahan mendapatkan informasi melalui media elektronik menuju smart city	Persen	80	80	81,000,000	82	1,135,000,000	85	1,090,000,000	87	95,000,000	90	100,000,000	90	1,090,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Persen	80	80	142,000,000	82	146,231,600	85	154,464,439	87	213,160,926	90	261,932,146	90	355,363,342	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Persentase tingkat ketercapaian penyebaran informasi Pemda Bukittinggi kepada masyarakat	'%	80	80	2,485,337,800	83	2,559,400,866	85	2,703,495,135	88	3,730,823,287	90	4,584,435,655	90	6,219,703,853	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tingkat pencapaian pelayanan informasi kepada publik	'%	80	80	419,853,220	81	432,364,846	82	456,706,987	83	630,255,642	84	774,458,133	84	1,050,707,348	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya sarana dan prasarana TIK menuju smart city	Persen	80	80	1,034,736,000	82	1,065,571,133	85	1,125,562,788	87	1,553,276,647	90	1,908,666,344	90	2,589,487,628	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat	publikasi	0	12	16,675,000	12	17,171,915	12	18,138,694	12	25,031,397	12	30,758,581	12	41,730,167	GUGUAK PANJANG
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat Melalu Media Cetak Dan Elektronik	Publikasi/Tahun	24	24	11,450,000	24	11,791,210	27	12,455,055	27	17,187,976	29	21,120,585	29	28,654,298	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan program komunikasi, informasi dan media massa	'%	100	100	0	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi di masyarakat	bulan	12	12	52,678,000	12	54,247,804	12	57,301,956	12	79,076,699	12	97,169,448	12	131,829,790	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan Telekomunikasi	Persen	80	80	257,000,000	82	264,658,600	85	279,558,879	87	385,791,253	90	474,060,292	90	643,157,598	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					**1,012,000,000**		**1,042,157,600**		**1,100,831,073**		**1,519,146,881**		**1,866,727,687**		**2,532,589,453**	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	82.52	83	217,000,000	84	223,466,600	85	236,047,770	86	325,745,922	87	400,276,589	87	543,055,248	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang tersentuh pembiayaan	'%	30	33	45,000,000	36	46,341,000	39	48,949,998	42	67,550,998	45	83,006,666	45	112,615,144	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	unit	3	20	460,000,000	20	473,708,000	20	500,377,760	20	690,521,309	20	848,512,585	20	1,151,177,024	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
		Jumlah UMKM	unit	9236	9,236		9,246	0	9,256	0	9,266	0	9,276	0	9,276	0	
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi sehat	unit	11	12	290,000,000	13	298,642,000	14	315,455,545	15	435,328,652	16	534,931,847	16	725,742,037	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Penanaman Modal					**1,404,302,900**		**1,546,151,126**		**1,657,569,435**		**2,233,045,820**		**2,590,366,704**		**3,514,350,507**	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor	Perusahaan	70	80	32,806,100	90	33,783,722	100	35,685,745	110	49,246,329	120	60,513,889	120	82,099,193	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	persen	2500000000	10	114,286,000	10	117,691,723	10	124,317,767	10	171,558,518	10	210,811,107	10	286,007,429	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi	dokumen	0	0	0	1	100,000,000	1	130,000,000	1	125,000,000	1	0	1		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Lancarnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase	100	100	377,525,700	100	388,775,966	100	410,664,053	100	566,716,393	100	696,381,103	100	944,780,243	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	nilai mutu	7.2	7	293,324,000	7	302,065,055	8	319,071,318	8	440,318,419	8	541,063,273	8	734,060,542	GUGUAK PANJANG

	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	'%	80	85	586,361,100	90	603,834,661	90	637,830,552	90	880,206,162	90	1,081,597,332	90	1,467,403,100	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Kepemudaan dan Olahraga					**5,510,165,350**		**5,674,368,277**		**6,218,835,211**		**8,511,492,592**		**10,419,010,097**		**13,789,512,498**	
	Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah capaian program pembinaan kepemudaan	'%	0	100	931,257,100	100	959,008,562	100	1,013,000,744	100	1,397,941,026	100	1,717,789,933	100	2,330,525,602	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	'%	0	100	368,905,750	100	379,899,141	100	401,287,463	100	553,776,699	100	680,480,808	100	923,208,312	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai	unit	3	3	3,385,741,500	3	3,486,636,597	4	3,682,934,237	5	5,082,449,247	6	6,245,313,635	6	8,473,017,009	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	'%	100	100	824,261,000	100	848,823,978	100	896,612,768	100	1,237,325,619	100	1,520,425,721	100	2,062,761,576	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan	'%	100	0	0	20	0	40	145,000,000	60	155,000,000	80	165,000,000	80		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	persentase sekolah yang bebas narkoba	'%	0	0	0	0	0	20	80,000,000	40	85,000,000	60	90,000,000	60		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Statistik					**273,905,300**		**332,067,678**		**355,448,088**		**471,168,362**		**570,243,683**		**685,464,105**	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pemenuhan Data pembangunan Daerah	'%	66	70	244,655,500	80	251,946,234	85	266,130,807	90	367,260,513	100	451,289,719	100	612,264,762	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD	Persen	10	0	0	20	50,000,000	30	57,500,000	40	60,000,000	50	65,000,000	50		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi statistik daerah	persen	100	100	29,249,800	100	30,121,444	100	31,817,281	100	43,907,848	100	53,953,964	100	73,199,343	Dinas Pertanian
	Persandian					**1,105,865,000**		**1,126,995,977**		**1,680,325,351**		**1,918,948,984**		**1,627,391,711**		**2,494,633,435**	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan TIK OLeh SKPD dan Layanan Kepada Publik dalam mewujudkan smart city	Persen	80	81	531,000,000	82	535,000,000	83	1,055,000,000	84	1,056,000,000	85	567,000,000	85	1,056,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	'%	80	80	574,865,000	82	591,995,977	85	625,325,351	88	862,948,984	90	1,060,391,711	90	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
	Kebudayaan					**2,103,766,500**		**3,537,958,742**		**53,903,630,369**		**10,914,693,909**		**5,434,464,067**		**5,264,799,258**	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang dilaksanakan masyarakat	kali	4	52	363,480,000	57	374,311,704	59	395,385,453	61	545,631,925	63	670,472,510	63	909,630,054	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	sanggar	6	6	892,148,000	7	918,734,010	13	970,458,735	16	1,339,233,055	19	1,645,649,577	19	2,232,652,782	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	kali	0	1	301,845,000	1	310,839,981	1	328,340,272	1	453,109,575	1	556,781,046	1	755,384,845	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan Program Pengembangan nilai budaya	bln	0	12	75,000,000	12	77,235,000	12	81,583,331	12	112,584,996	12	138,344,443	12	187,691,906	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya aktifitas pengembangan nilai adat dan budaya di masyarakat	kegiatan	8	8	6,352,000	9	6,541,290	10	6,909,564	11	9,535,199	12	11,716,852	12	15,896,253	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya	kegiatan	0	0	0	3	374,500,000	4	426,200,000	4	426,660,000	4	448,872,000	4		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	'%	0	5	0	10	997,000,000	15	51,189,000,000	20	7,330,000,000	25	1,105,000,000	25		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Pengelolaan Kekayaan Budaya	'%	0	25	464,941,500	30	478,796,757	35	505,753,014	40	697,939,159	45	857,627,639	45	1,163,543,418	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Perpustakaan					**248,249,470**		**255,647,304**		**270,040,247**		**372,655,541**		**457,919,129**		**621,258,883**	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan	'%	100	100	248,249,470	100	255,647,304	100	270,040,247	100	372,655,541	100	457,919,129	100	621,258,883	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Kearsipan					**144,768,600**		**719,082,704**		**744,476,061**		**792,316,964**		**869,539,085**		**362,291,926**	
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan	'%	100	100	0	100	510,000,000	100	535,000,000	100	560,000,000	100	585,000,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi	'%	100	100	97,268,600	100	100,167,204	100	105,806,618	100	146,013,133	100	179,420,937	100	243,420,386	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan	'%	100	100	0	100	60,000,000	100	52,000,000	100	15,000,000	100	17,500,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	'%	100	100	47,500,000	100	48,915,500	100	51,669,443	100	71,303,831	100	87,618,147	100	118,871,541	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Urusan Pilihan					17,072,716,450											
	Kelautan dan Perikanan					**314,084,700**		**393,444,424**		**416,654,345**		**551,482,996**		**664,358,306**		**786,015,414**	
	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	persen	2	2	77,740,500	2	80,057,167	2	84,564,385	2	116,698,852	2	143,399,549	2	194,550,168	Dinas Pertanian
	Program Pengembangan Perikanan budidaya	Jumlah Produksi ikan	ton	355	351	220,693,700	352	227,270,372	353	240,065,694	354	331,290,658	355	407,089,961	355	552,298,950	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan	Meningkatnya kualitas SDM Perikanan		0	0	15,650,500	0	16,116,885	0	17,024,266	0	23,493,486	0	28,868,796	0	39,166,296	Dinas Pertanian

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Daya Saing Produk Perikanan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	persen	40	10	0	10	70,000,000	10	75,000,000	10	80,000,000	10	85,000,000	10		Dinas Pertanian
	Pariwisata					**10,534,131,950**		**83,527,230,515**		**14,181,642,393**		**15,391,866,502**		**16,920,336,758**		**5,111,145,779**	
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	meningkatnya jumlah PAD yang dikelola Dinas Pariwisata	rupiah (Milyar)	8041	10,086	8,491,764,000	10,091	81,424,000,000	10,097	11,960,000,000	10,112	12,326,000,000	10,127	13,153,000,000	10,127		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	meningkatnya jumlah wisatawan	orang	460905	483,950	2,042,367,950	508,148	2,103,230,515	533,555	2,221,642,393	560,233	3,065,866,502	588,245	3,767,336,758	588,245	5,111,145,779	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Pertanian					**1,190,397,400**		**1,225,871,243**		**1,294,887,793**		**1,786,945,155**		**2,195,798,206**		**2,979,039,427**	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi	kelompok	10	11	23,763,600	12	24,471,755	13	25,849,515	14	35,672,331	15	43,834,160	15	59,469,805	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	persen	0	5	64,257,200	5	66,172,065	5	69,897,552	5	96,458,621	5	118,528,354	5	160,807,418	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	2	2	370,088,300	2	381,116,931	2	402,573,815	2	555,551,864	2	682,662,131	2	926,167,713	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian	persen	2	2	155,835,200	2	160,479,089	2	169,514,062	2	233,929,405	2	287,452,453	2	389,986,743	Dinas Pertanian
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)	persen	70	73	306,133,100	78	315,255,866	80	333,004,772	82	459,546,585	85	564,690,844	85	766,116,067	Dinas Pertanian
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persen	100	100	139,098,800	100	143,243,944	100	151,308,578	100	208,805,838	100	256,580,614	100	348,102,919	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	1	2	43,233,800	2	44,522,167	2	47,028,765	2	64,899,696	2	79,748,747	2	108,195,124	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	kwintal/Ha	66.7	67	87,987,400	67	90,609,425	67	95,710,735	67	132,080,814	67	162,300,905	67	220,193,638	Dinas Pertanian
	Kehutanan					**61,740,800**		**63,580,676**		**67,160,268**		**92,681,170**		**113,886,621**		**154,509,979**	
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan luas lahan yang dihijaukan	persen	2	2	61,740,800	2	63,580,676	2	67,160,268	2	92,681,170	2	113,886,621	2	154,509,979	Dinas Pertanian
	Perdagangan					**4,397,357,000**		**4,528,398,239**		**4,783,347,059**		**6,601,018,942**		**8,111,332,076**		**11,004,644,227**	
	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat Pengawasan dan Ketertiban Pasar	'%	100	100	374,907,000	100	386,079,229	100	407,815,489	100	562,785,375	100	691,550,669	100	938,226,792	Dinas Pengelolaan Pasar

	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Tingkat Sarana dan Prasarana yang dikembangkan	$	100	100	2,393,450,000	100	2,464,774,810	100	2,603,541,632	100	3,592,887,452	100	4,414,940,101	100	5,989,749,235	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha	perusahaan	2553	300	554,000,000	350	570,509,200	400	602,628,868	450	831,627,838	500	1,021,904,287	500	1,386,417,546	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri	IKM	0	2	250,000,000	2	257,450,000	2	271,944,435	2	375,283,320	2	461,148,144	2	625,639,687	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL	lokasi	0	0	120,000,000	1	123,576,000	1	130,533,329	1	180,135,994	1	221,351,109	1	300,307,050	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah komoditas peredaran barang yang di awasi	jenis	20	20	705,000,000	20	726,009,000	20	766,883,307	22	1,058,298,963	22	1,300,437,766	22	1,764,303,917	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Industri					**1,765,402,000**		**1,818,010,980**		**1,920,364,998**		**2,650,103,697**		**3,256,447,423**		**4,418,022,218**	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM	'%	1	2	616,750,000	2	635,129,150	2	670,886,921	2	925,823,951	2	1,137,652,471	2	1,543,453,108	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang	unit usaha	0	5	886,125,000	10	912,531,525	15	963,907,050	20	1,330,191,729	30	1,634,539,596	30	2,217,579,870	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya nilai produksi IKM	'%	4.1113E+11	2	47,527,000	2	48,943,305	2	51,698,813	2	71,344,361	2	87,667,951	2	118,939,110	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal	&	476	7	30,000,000	7	30,894,000	7	32,633,332	7	45,033,998	7	55,337,777	7	75,076,762	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB	Persen	0.07	0	185,000,000	0	190,513,000	0	201,238,882	0	277,709,657	0	341,249,627	0	462,973,368	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Bidang Pemerintahan Umum					**31,985,962,425**		**34,595,144,105**		**36,787,467,918**		**50,031,842,727**		**61,020,343,823**		**80,046,750,073**	
	Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah Usulan Bantuan Kemasyarakatan yang direalisasikan	Proposal /Tahun	42	60	15,000,000	60	15,447,000	60	16,316,666	60	22,516,999	60	27,668,889	60	37,538,381	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	'%	80	80	71,440,000	82	73,568,912	85	77,710,842	88	107,240,962	90	131,777,694	90	178,782,797	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	'%	80	80	909,099,450	81	936,190,614	82	988,898,145	83	1,364,679,440	84	1,676,918,096	84	2,275,074,781	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH	'%	80	80	7,627,000,000	85	7,854,284,600	90	8,296,480,823	95	11,449,143,536	100	14,068,707,577	100	19,087,015,569	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	'%	80	80	245,162,000	81	252,467,828	82	266,681,766	83	368,020,837	84	452,224,005	84	613,532,308	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Kelembagaan Daerah	Peningkatan capaian kinerja daerah	peringkat nasional	74	62	721,357,000	55	742,853,439	50	784,676,087	40	1,082,853,000	35	1,330,609,767	35	1,805,238,271	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur	Jumlah penyelenggaraan diklat peningkatan profesionalisme aparatur	kegiatan	0	0	0	8	800,000,000	8	812,000,000	8	834,000,000	8	836,000,000	8		Badan Kepegawaian Daerah

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	'%	100	100	559,000,000	100	575,658,200	100	608,067,757	100	839,133,504	100	1,031,127,250	100	1,398,930,340	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Meningkatnya Program peningkatan pelayanan kelurahan	'%	100	100	380,000,000	100	391,324,000	100	413,355,541	100	570,430,647	100	700,945,179	100	950,972,324	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	persen	80	82	734,210,800	84	756,090,282	86	798,658,165	88	1,102,148,267	90	1,354,319,791	90	1,837,405,660	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	orang	80	0	30,740,000	80	31,656,052	80	33,438,288	80	46,144,837	80	56,702,776	80	76,928,656	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan	'%	0	0	0	80	11,000,000	85	11,850,000	90	12,650,000	95	13,275,000	95		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kerjasama Tugas Sekretariat DPRD se Indonesia	'%	100	100	109,500,000	100	112,763,100	100	119,111,663	100	164,374,094	100	201,982,887	100	274,030,183	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terstandarisasinya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	'%	100	100	50,000,000	100	51,490,000	100	54,388,887	100	75,056,664	100	92,229,629	100	125,127,937	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemerintahan	'%	100	100	12,522,580,525	100	12,895,753,425	100	13,621,784,342	100	18,798,062,393	100	23,099,059,068	100	31,338,493,438	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	'%	100	100	36,000,000	100	37,072,800	100	39,159,999	100	54,040,798	100	66,405,333	100	90,092,115	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Perizinan	dokumen	2	2	12,666,000	1	13,043,447	1	13,777,793	1	19,013,354	1	23,363,610	1	31,697,409	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase capaian realisasi penyelenggaraan pemerintahan	'%	81	75	762,195,900	80	784,909,338	80	829,099,734	85	1,144,157,632	90	1,405,940,899	90	1,907,440,017	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kegiatan yang dikelola dengan sistem otomisasi	kegiatan	1	1	502,385,200	3	517,356,279	5	546,483,437	7	754,147,144	7	926,696,010	7	1,257,248,477	Badan Kepegawaian Daerah
	Peningkatan Kemitraan Legislatif dengan Eksekutif	Terjalinnya kemitraan yang sinergis antara legislatif dan eksekutif	'%	100	0	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukittinggi	persen	10	15	2,092,983,550	20	2,155,354,460	30	2,276,700,916	50	3,141,847,264	75	3,860,701,918	75	5,237,814,292	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ditindaklanjutinya Pengaduan Masyarakat Secara Komprehensif	'%	100	100	0	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Penyelenggaraan Adipura	Tingkat penilaian adipura	'%	71	75	0	77	0	80	325,000,000	85	325,000,000	87	325,000,000	87		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Penegasan Batas Wilayah	Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan	'%	80	80	671,985,500	81	692,010,668	82	730,970,869	83	1,008,739,799	84	1,239,539,464	84	1,681,683,191	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	'%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat inflasi daerah	'%	2.84	9	575,800,100	6	592,958,943	5	626,342,531	5	864,352,693	4	1,062,116,590	4	1,440,973,577	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rupiah (Milyar)	28892	31,758	3,021,888,000	34,927	3,111,940,262	38,432	3,287,142,499	42,311	4,536,256,649	46,605	5,574,152,170	46,605	7,562,452,249	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD`	'%	100	100	111,720,000	100	115,049,256	100	121,526,529	100	167,706,610	100	206,077,883	100	279,585,863	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Peningkatan program peningkatan kinerja LPMK dan RT	bln	12	12	63,000,000	12	64,877,400	12	68,529,998	12	94,571,397	12	116,209,332	12	157,661,201	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pembinaan PKK	Peningkatan program pembinaan PKK	bln	12	12	92,500,000	12	95,256,500	12	100,619,441	12	138,854,829	12	170,624,813	12	231,486,684	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan RT	'%	90	80	67,748,400	85	69,767,302	90	73,695,201	95	101,699,378	100	124,968,196	100	169,544,351	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Keuangan					**4,841,271,107**		**4,985,540,986**		**5,266,226,943**		**7,267,393,182**		**8,930,172,742**		**12,115,565,359**	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi	opini	3	3	4,841,271,107	3	4,985,540,986	3	5,266,226,943	3	7,267,393,182	3	8,930,172,742	3	12,115,565,359	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Bidang Pengawasan					**1,466,804,860**		**1,510,515,645**		**1,595,557,676**		**2,201,869,592**		**2,705,657,355**		**3,670,765,334**	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	'%	100	100	319,019,650	100	328,526,436	100	347,022,474	100	478,891,014	100	588,461,278	100	798,365,416	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	'%	100	100	1,147,785,210	100	1,181,989,209	100	1,248,535,202	100	1,722,978,578	100	2,117,196,077	100	2,872,399,918	Inspektorat Daerah
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					**2,871,047,600**		**2,956,604,818**		**3,123,061,670**		**4,309,825,104**		**5,295,913,088**		**7,184,965,287**	

	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang difasilitasi mengikuti pendidikan kedinasan	orang	1500	550	2,545,102,500	550	2,620,946,555	530	2,768,505,846	535	3,820,538,067	550	4,694,677,177	550	6,369,268,525	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai sesuai standar kompetensi	'%	60	60	325,945,100	70	335,658,264	80	354,555,824	90	489,287,037	95	601,235,912	95	815,696,761	Badan Kepegawaian Daerah
	Perencanaan Pembangunan					**3,480,323,200**		**3,659,036,831**		**3,870,818,105**		**5,324,428,985**		**6,529,778,337**		**8,709,713,269**	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	'%	100	100	2,214,373,100	100	2,280,361,418	100	2,408,745,766	100	3,324,069,157	100	4,084,616,181	100	5,541,598,772	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	'%	100	100	84,875,500	100	87,404,790	100	92,325,680	100	127,409,438	100	156,560,717	100	212,405,925	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan sosial budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	'%	100	100	164,296,900	100	169,192,948	100	178,718,511	100	246,631,545	100	303,060,842	100	411,162,644	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	'%	100	100	574,865,000	100	591,995,977	100	625,325,351	100	862,948,984	100	1,060,391,711	100	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum	'%	60	100	125,647,500	100	129,391,796	100	136,676,554	100	188,613,644	100	231,768,446	100	314,440,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Pemenuhan Pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota	'%	60	65	316,265,200	70	325,689,903	75	344,026,244	80	474,756,217	85	583,380,440	85	791,472,243	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Peningkatan kualitas perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana	'%	50	50	0	60	75,000,000	65	85,000,000	70	100,000,000	75	110,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Bidang Penunjang Lainnya					**1,678,767,600**		**1,728,794,874**		**1,826,126,026**		**2,520,053,916**		**3,096,642,252**		**4,201,214,543**	
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan oleh masyarakat	kegiatan	5	5	416,710,000	5	429,127,958	5	453,287,862	5	625,537,250	5	768,660,172	5	1,042,841,256	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pendidikan politik masyarakat	Efektivitas kegiatan pendidikan politik masyarakat	kegiatan	7	3	1,088,151,500	3	1,120,578,415	3	1,183,666,979	3	1,633,460,432	3	2,007,196,178	3	2,723,163,055	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda	'% kegiatan	0	100	173,906,100	100	179,088,502	100	189,171,184	100	261,056,235	100	320,785,901	100	435,210,232	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Penunjang Fungsi Pemerintahan					**23,818,411,100**		**54,001,408,080**		**24,844,932,985**		**34,158,568,560**		**41,848,712,539**		**52,874,504,906**	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	465,300,000			100	300,000,000	100	60,000,000	100	75,000,000	100	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	865,000,000	100	890,777,000	100	940,927,745	100	1,298,480,288	100	1,595,572,578	100	2,164,713,317	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	257,387,100	100	265,057,236	100	279,979,958	100	386,372,342	100	474,774,334	100	644,126,339	Kantor Lingkungan Hidup

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	21,300,000	100	21,934,740	100	23,169,666	100	31,974,139	100	39,289,822	100	53,304,501	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	17,950,000	100	18,484,910	100	19,525,610	100	26,945,342	100	33,110,437	100	44,920,930	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	65,000,000	100	66,937,000	100	70,705,553	100	97,573,663	100	119,898,517	100	162,666,319	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	3,237,400,000	100	3,333,874,520	100	3,521,571,655	100	4,859,768,885	100	5,971,684,005	100	8,101,783,690	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana & Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,260,897,000	100	32,280,646,000	100	1,601,292,000	100	2,436,344,000	100	2,867,171,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persentase	100	100	1,910,080,000	100	1,967,000,384	100	2,077,742,506	100	2,867,284,658	100	3,523,319,387	100	4,780,087,413	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	635,835,000	100	654,782,883	100	691,647,159	100	954,473,080	100	1,172,856,521	100	1,591,214,441	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	'%	100	100	878,892,100	100	905,083,085	100	956,039,262	100	1,319,334,182	100	1,621,197,843	100	2,199,479,113	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	100	214,300,000	100	220,686,140	100	233,110,770	100	321,692,862	100	395,296,189	100	536,298,340	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,698,700,000	100	2,779,121,260	100	2,935,585,787	100	4,051,108,386	100	4,978,001,985	100	6,753,655,293	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	1,446,300,000	100	1,489,399,740	100	1,573,252,945	100	2,171,089,065	100	2,667,834,243	100	3,619,450,717	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	86,000,000	100	88,562,800	100	93,548,886	100	129,097,462	100	158,634,962	100	215,220,052	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	102,983,800	100	106,052,717	100	112,023,485	100	154,592,410	100	189,963,153	100	257,723,010	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	418,985,000	100	431,470,753	100	455,762,556	100	628,952,328	100	772,856,620	100	1,048,534,577	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	65,100,000	100	67,039,980	100	70,814,331	100	97,723,777	100	120,082,977	100	162,916,574	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	173,300,000	100	178,464,340	100	188,511,882	100	260,146,398	100	319,667,893	100	433,693,431	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	unit	4	4	43,620,000	4	44,919,876	4	47,448,865	4	65,479,434	4	80,461,128	4	109,161,613	AUR BIRUGO TIGO BALEH

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	874,400,000	100	900,457,120	100	951,152,856	100	1,312,590,941	100	1,612,911,748	100	2,188,237,369	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	0	100	378,400,000	100	389,676,320	100	411,615,097	100	568,028,834	100	697,993,831	100	946,968,230	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	410,500,000	100	422,732,900	100	446,532,762	100	616,215,212	100	757,205,252	100	1,027,300,366	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	740,875,000	100	762,953,075	100	805,907,333	100	1,112,152,120	100	1,366,612,525	100	1,854,083,212	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	4,770,756,100	80	4,912,924,632	85	5,189,522,289	90	7,161,540,758	95	8,800,101,284	95	11,939,097,412	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	26,300,000	80	27,083,740	85	28,608,555	90	39,479,805	95	48,512,785	95	65,817,295	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90	91	331,300,000	92	341,172,740	93	360,380,765	94	497,325,456	95	611,113,520	95	829,097,713	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	19,300,000	100	19,875,140	100	20,994,110	100	28,971,872	100	35,600,637	100	48,299,384	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	390,950,000	100	402,600,310	100	425,266,707	100	586,868,056	100	721,143,468	100	978,375,342	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	11,300,000	100	11,636,740	100	12,291,888	100	16,962,806	100	20,843,896	100	28,278,914	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam menggunakan atribut kepegawaian	'%	100	100	18,000,000	100	18,536,400	100	19,579,999	100	27,020,399	100	33,202,666	100	45,046,057	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	22,150,000	100	22,810,070	100	24,094,277	100	33,250,102	100	40,857,726	100	55,431,676	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	12,150,000	100	12,512,070	100	13,216,500	100	18,238,769	100	22,411,800	100	30,406,089	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	6,300,000	100	6,487,740	100	6,853,000	100	9,457,140	100	11,620,933	100	15,766,120	Kantor Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	18,600,000	100	19,154,280	100	20,232,666	100	27,921,079	100	34,309,422	100	46,547,593	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	19,000,000	100	19,566,200	100	20,667,777	100	28,521,532	100	35,047,259	100	47,548,616	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	132,000,000	100	135,933,600	100	143,586,662	100	198,149,593	100	243,486,220	100	330,337,755	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran & Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	169,750,000	100	174,808,550	100	184,650,271	100	254,817,374	100	313,119,590	100	424,809,347	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	46,800,000	100	48,194,640	100	50,907,998	100	70,253,038	100	86,326,933	100	117,119,749	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	122,654,500	100	126,309,604	100	133,420,835	100	184,120,752	100	226,247,580	100	306,950,092	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persentase	100	100	19,350,000	100	19,926,630	100	21,048,499	100	29,046,929	100	35,692,866	100	48,424,512	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedispilanan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pagawai	'%	100	100	150,000,000	100	154,470,000	100	163,166,661	100	225,169,992	100	276,688,886	100	375,383,812	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persen	100	100	225,225,000	100	231,936,705	100	244,994,741	100	338,092,743	100	415,448,363	100	563,638,794	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	59,400,000	100	61,170,120	100	64,613,998	100	89,167,317	100	109,568,799	100	148,651,990	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	23,000,000	100	23,685,400	100	25,018,888	100	34,526,065	100	42,425,629	100	57,558,851	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	107,580,000	100	110,785,884	100	117,023,129	100	161,491,918	100	198,441,269	100	269,225,270	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam Kehadiran dan pemakaian atribut	'%	100	100	33,300,000	100	34,292,340	100	36,222,999	100	49,987,738	100	61,424,933	100	83,335,206	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	182,815,000	100	188,262,887	100	198,862,088	100	274,429,681	100	337,219,192	100	457,505,277	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	stel	40	40	40,500,000	40	41,706,900	40	44,054,998	40	60,795,898	40	74,705,999	40	101,353,629	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	40,500,000	100	41,706,900	100	44,054,998	100	60,795,898	100	74,705,999	100	101,353,629	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	48,600,000	100	50,048,280	100	52,865,998	100	72,955,077	100	89,647,199	100	121,624,355	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	108,000,000	100	111,218,400	100	117,479,996	100	162,122,394	100	199,215,998	100	270,276,345	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	153,000,000	100	157,559,400	100	166,429,994	100	229,673,392	100	282,222,664	100	382,891,488	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	65,250,000	100	67,194,450	100	70,977,498	100	97,948,947	100	120,359,666	100	163,291,958	Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan dalam atribut pegawai	'%	80	85	40,000,000	90	41,192,000	95	43,511,110	100	60,045,331	100	73,783,703	100	100,102,350	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen	90	91	153,000,000	92	157,559,400	93	166,429,994	94	229,673,392	95	282,222,664	95	382,891,488	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	6,750,000	100	6,951,150	100	7,342,500	100	10,132,650	100	12,451,000	100	16,892,272	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	19,800,000	100	20,390,040	100	21,537,999	100	29,722,439	100	36,522,933	100	49,550,663	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	14,850,000	100	15,292,530	100	16,153,499	100	22,291,829	100	27,392,200	100	37,162,997	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	656,988,500	100	676,566,757	100	714,657,466	100	986,227,303	100	1,211,876,110	100	1,644,152,318	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	683,530,700	100	703,899,915	100	743,529,480	100	1,026,070,682	100	1,260,835,655	100	1,710,575,733	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	309,798,600	100	319,030,598	100	336,992,021	100	465,048,989	100	571,452,198	100	775,289,196	Kantor Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	230,200,600	100	237,060,578	100	250,407,088	100	345,561,782	100	424,626,318	100	576,090,525	Kantor Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	'%	100	100	353,159,200	100	363,683,344	100	384,158,716	100	530,139,029	100	651,434,838	100	883,801,645	Inspektorat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	343,857,700	100	354,104,659	100	374,040,752	100	516,176,237	100	634,277,361	100	860,524,095	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,513,220,400	100	6,707,314,368	100	7,084,936,167	100	9,777,211,910	100	12,014,237,995	100	16,299,716,688	Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersedian Layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	5,111,604,400	100	5,263,930,211	100	5,560,289,482	100	7,673,199,485	100	9,428,827,527	100	12,792,090,306	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kesediaan layanan administrasi perkantoran		100	100	7,893,622,000	100	8,128,851,936	100	8,586,506,300	100	11,849,378,693	100	14,560,516,538	100	19,754,252,788	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	482,769,475	100	497,156,005	100	525,145,888	100	724,701,326	100	890,512,989	100	1,208,158,973	Badan Kepegawaian Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	438,888,200	100	451,967,068	100	477,412,814	100	658,829,684	100	809,569,915	100	1,098,343,504	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesedian Layan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,153,130,000	100	2,217,293,274	100	2,342,126,885	100	3,232,135,102	100	3,971,647,613	100	5,388,334,317	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	5,562,692,900	100	5,728,461,148	100	6,050,973,511	100	8,350,343,445	100	10,260,902,026	100	13,920,965,778	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan Administrasi	'%	100	100	1,480,784,350	100	1,524,911,724	100	1,610,764,254	100	2,222,854,670	100	2,731,443,819	100	3,705,749,829	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	474,236,200	100	488,368,439	100	515,863,582	100	711,891,743	100	874,772,574	100	1,186,803,951	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,367,447,130	100	2,437,997,054	100	2,575,256,289	100	3,553,853,678	100	4,366,975,400	100	5,924,675,525	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	907,064,550	100	934,095,074	100	986,684,626	100	1,361,624,784	100	1,673,164,535	100	2,269,982,324	Dinas Pertanian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,426,417,200	100	1,468,924,433	100	1,551,624,878	100	2,141,242,332	100	2,631,158,577	100	3,569,692,842	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	bln	12	12	337,561,200	12	347,620,524	12	367,191,559	12	506,724,352	12	622,662,883	12	844,766,734	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	339,733,200	100	349,857,249	100	369,554,212	100	509,984,813	100	626,669,339	100	850,202,292	GUGUAK PANJANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	394,870,450	100	406,637,589	100	429,531,286	100	592,753,174	100	728,375,101	100	988,186,499	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,070,114,000	100	1,102,003,397	100	1,164,046,188	100	1,606,383,740	100	1,973,924,340	100	2,678,023,152	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,668,453,440	100	1,718,173,353	100	1,814,906,512	100	2,504,570,987	100	3,077,616,829	100	4,175,402,752	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,425,988,650	100	6,617,483,112	100	6,990,047,411	100	9,646,265,427	100	11,853,330,957	100	16,081,414,109	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan adm perkantoran	'%	75	75	514,552,000	75	529,885,650	80	559,718,212	85	772,411,132	90	949,138,799	90	1,287,696,609	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	90	91	1,268,502,000	92	1,306,303,360	93	1,379,848,239	94	1,904,190,569	95	2,339,869,372	95	3,174,500,777	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layananan administrasi perkantoran	'%	100	100	407,394,800	100	419,535,165	100	443,154,995	100	611,553,893	100	751,477,424	100	1,019,529,421	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan layanan adminidtrasi perkantoran	'%	100	100	328,776,550	100	338,574,091	100	357,635,813	100	493,537,421	100	606,458,783	100	822,782,631	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	198,880,150	100	204,806,778	100	216,337,400	100	298,545,612	100	366,852,848	100	497,709,259	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	11,550,000	100	11,894,190	100	12,563,833	100	17,338,089	100	21,305,044	100	28,904,554	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,760,000	100	4,901,848	100	5,177,822	100	7,145,394	100	8,780,261	100	11,912,180	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,987,400	100	11,314,825	100	11,951,849	100	16,493,552	100	20,267,276	100	27,496,614	Kantor Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	2,300,000	100	2,368,540	100	2,501,889	100	3,452,607	100	4,242,563	100	5,755,885	Kantor Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	1,910,300	100	1,967,227	100	2,077,982	100	2,867,615	100	3,523,725	100	4,780,638	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perentasee laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	2,020,000	100	2,080,196	100	2,197,311	100	3,032,289	100	3,726,077	100	5,055,169	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	90	90	111,000,000	90	114,307,800	90	120,743,329	90	166,625,794	95	204,749,776	95	277,784,021	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaiakan kinerja dan keuangann yang tersesusun tepat waktu	'%	100	100	78,666,400	100	81,010,659	100	85,571,559	100	118,088,751	100	145,107,457	100	196,867,287	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persentase	100	100	9,377,500	100	9,656,950	100	10,200,636	100	14,076,877	100	17,297,667	100	23,467,745	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	16,450,000	100	16,940,210	100	17,893,944	100	24,693,642	100	30,343,548	100	41,167,091	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase	100	100	16,165,900	100	16,647,644	100	17,584,906	100	24,267,171	100	29,819,499	100	40,456,114	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,900,000	100	11,224,820	100	11,856,777	100	16,362,353	100	20,106,059	100	27,277,890	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capain kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	5,051,400	100	5,201,932	100	5,494,800	100	7,582,825	100	9,317,775	100	12,641,425	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,900,000	100	5,046,020	100	5,330,111	100	7,355,553	100	9,038,504	100	12,262,538	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu	'%	100	100	14,575,800	100	15,010,159	100	15,855,231	100	21,880,218	100	26,886,412	100	36,476,796	Dinas Pengelolaan Pasar
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun waktu	'%	100	100	1,706,000	100	1,756,839	100	1,855,749	100	2,560,933	100	3,146,875	100	4,269,365	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuanagan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	3,878,500	100	3,994,079	100	4,218,946	100	5,822,145	100	7,154,252	100	9,706,174	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun waktu	dokumen	3	3	5,980,000	3	6,158,204	3	6,504,911	3	8,976,777	3	11,030,664	3	14,965,301	AUR BIRUGO TIGO BALEH
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan YangTersusun Tepat Waktu	'%	100	100	7,989,000	100	8,227,072	100	8,690,256	100	11,992,554	100	14,736,450	100	19,992,942	GUGUAK PANJANG
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	22,114,000	100	22,772,997	100	24,055,117	100	33,196,061	100	40,791,320	100	55,341,584	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	55,500,000	100	57,153,900	100	60,371,665	100	83,312,897	100	102,374,888	100	138,892,011	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu	'%	100	100	9,342,400	100	9,620,804	100	10,162,455	100	14,024,188	100	17,232,922	100	23,379,905	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	39,792,100	100	40,977,905	100	43,284,961	100	59,733,246	100	73,400,212	100	99,582,068	Dinas Pekerjaan Umum
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	85	90	13,250,000	95	13,644,850	100	14,413,055	100	19,890,016	100	24,440,852	100	33,158,903	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	Persen	90	91	13,271,000	92	13,666,476	93	14,435,898	94	19,921,540	95	24,479,588	95	33,211,457	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,086,100	100	10,386,666	100	10,971,435	100	15,140,580	100	18,604,745	100	25,241,058	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	dokume n	0	100	5,100,000	100	5,251,980	100	5,547,666	100	7,655,780	100	9,407,422	100	12,763,050	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	'%	100	100	2,150,000	100	2,214,070	100	2,338,722	100	3,227,437	100	3,965,874	100	5,380,501	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi

Tabel 8.1
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2016-2021

No	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
						545,430,926,709		**997,566,870,124**		**906,686,827,549**		**1,012,802,216,124**		**1,136,068,013,719**		**1,258,317,076,653**	
	Urusan Wajib					**138,073,852,119**		**233,672,627,498**		**300,100,321,179**		**302,421,054,261**		**321,163,220,982**		**327,452,937,813**	
	Pendidikan					**21,044,806,653**		**21,671,941,891**		**22,892,072,220**		**31,591,059,663**		**38,819,094,114**		**52,665,864,985**	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	'% kegiatan	0	100	7,796,131,800	100	8,028,456,528	100	8,480,458,630	100	11,703,032,910	100	14,380,686,839	100	19,510,277,835	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya kegiatan untuk Pendidikan Anak Usia Dini	'%	0	100	505,396,950	100	520,457,779	100	549,759,552	100	758,668,182	100	932,251,462	100	1,264,785,558	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Menengah	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SMP	nilai	0	0	4,914,299,720	0	5,060,745,852	0	5,345,665,843	0	7,377,018,863	0	9,064,880,779	0	12,298,323,753	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Luar Biasa	Angka putus sekolah	'%	0.25	0	60,680,000	0	62,488,264	0	66,006,353	0	91,088,768	0	111,929,878	0	151,855,265	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SD	nilai	70	70	6,976,936,083	75	7,184,848,778	80	7,589,355,764	85	10,473,310,955	90	12,869,604,501	90	17,460,192,427	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Non Formal	Optimalisasi pelayanan non formal	'%	0	100	291,362,100	100	300,044,691	100	316,937,207	100	437,373,345	100	537,444,367	100	729,150,772	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya manjemen pelayanan pendidikan	'%	100	100	500,000,000	100	514,900,000	100	543,888,870	100	750,566,641	100	922,296,288	100	1,251,279,374	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Kesehatan					**19,744,900,125**		**89,115,160,717**		**70,545,369,265**		**34,475,549,586**		**45,154,904,131**		**38,554,570,535**	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	'%	85	85	0	86	120,000,000	87	150,000,000	88	160,000,000	90	180,000,000	90		Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Ratio tenaga paramedis per satuan penduduk (Bidan dan perawat)	tenaga paramedis/satuan penduduk	12.95	13	0	13	145,000,000	13	152,000,000	13	159,000,000	13	166,000,000	13		Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	'%	100	100	6,459,177,000	100	6,651,660,475	100	7,026,148,959	100	9,696,085,564	100	11,914,549,941	100	16,164,469,905	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	'%	5972	65	504,635,400	65	519,673,535	70	548,931,155	70	757,524,994	75	930,846,712	75	1,262,879,735	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada rumah sakit	'%	25	25	0	25	0	25	0	25	8,000,000,000	25	12,000,000,000	25		Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	unit	0	0	68,000,000	1	70,085,000,000	0	40,085,000,000	0	0	0	0	0		Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pengawasan dan pengendalian makanan yang memenuhi syarat	'%	90	90	38,000,000	100	39,132,400	100	41,335,554	100	57,043,065	100	70,094,518	100	95,097,232	Dinas Kesehatan

	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tingkat Pemenuhan Kualitas lingkungan	'%	40	40	208,000,000	41	214,198,400	42	226,257,770	43	312,235,722	44	383,675,256	44	520,532,220	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	'%	100	100	2,617,063,925	100	2,695,052,430	100	2,846,783,882	100	3,928,561,757	100	4,827,416,687	100	6,549,356,219	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD	'%	0	60	134,639,000	100	138,651,242	100	146,457,307	100	202,111,084	100	248,354,100	100	336,942,007	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ()	puskes mas	0	2	734,639,000	5	756,531,242	7	799,123,951	7	1,102,791,053	7	1,355,109,645	7	1,838,477,256	Dinas Kesehatan
	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan	'%	20	80	410,000,000	85	422,218,000	90	445,988,873	95	615,464,645	95	756,282,956	95	1,026,049,087	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	puskes mas	0	0	20,000,000	1	20,596,000	1	21,755,555	2	30,022,666	3	36,891,852	3	50,051,175	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas. Pustu dan Jaringannya yang dapat melaksanakan pelayanan kesehatan	'%	100	100	4,270,840,000	100	2,900,000,000	100	13,400,000,000	100	3,030,000,000	100	4,391,000,000	100		Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi lebih	'%	0	15	373,000,000	13	384,115,400	13	405,741,097	12	559,922,714	10	688,033,031	10	933,454,413	Dinas Kesehatan
	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan	'%	90	90	2,574,920,000	91	2,651,652,616	92	2,800,940,658	93	3,865,298,108	95	4,749,678,316	95	6,443,888,571	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	'%	83.8	85	193,564,000	86	199,332,207	87	210,554,610	88	290,565,362	90	357,046,717	90	484,405,281	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita	'%	57.57	60	744,750,000	70	766,943,550	80	810,122,472	90	1,117,969,011	90	1,373,760,321	90	1,863,780,627	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	100	100	368,671,800	100	379,658,220	100	401,032,977	100	553,425,509	100	680,049,265	100	922,622,838	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pelaksanaan lingkungan sehat dikecamatan dan kelurahan	bln	0	0	25,000,000	0	25,745,000	0	27,194,444	0	37,528,332	0	46,114,814	0	62,563,969	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					**23,185,390,700**		**30,774,600,415**		**47,208,094,352**		**86,121,250,039**		**90,858,058,503**		**49,906,825,615**	
	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	'%	12.5	13	680,250,000	20	700,521,450	30	739,960,808	40	1,021,145,915	50	1,254,784,100	50	1,702,365,588	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	'%	65	65	2,300,000,000	70	360,000,000	75	7,700,000,000	80	23,365,000,000	85	23,046,500,000	85		Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	'%	10	10	228,000,000	20	234,794,400	40	248,013,325	60	342,258,388	75	420,567,107	75	570,583,394	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap	'%	98	98	4,050,000,000	99	4,170,690,000	100	4,405,499,847	100	6,079,589,789	100	7,470,599,933	100	10,135,362,928	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Pembangunan gedung	Persentase Gedung Negara dan Swasta yang Laik Fugsi	'%	0	2	150,000,000	5	154,470,000	20	163,166,661	30	225,169,992	40	276,688,886	40	375,383,812	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengendalian banjir	Pengurangan titik genangan	titik	8	8	257,522,800	6	265,196,979	4	280,127,569	2	386,576,046	0	475,024,645	0	644,465,936	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	'%	48	48	943,071,400	55	2,940,000,000	70	12,104,083,333	90	23,785,170,833	100	23,937,604,375	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	'%	45	45	2,500,000,000	50	2,574,500,000	60	2,719,444,350	70	3,752,833,203	80	4,611,481,440	80	6,256,396,869	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	'%	98	0	0	98	488,000,000	99	561,200,000	100	3,420,000,000	100	3,762,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang terpelihara / normalisasi	'%	47	0	0	55	1,000,000,000	65	1,100,000,000	70	1,210,000,000	75	1,331,000,000	75		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	'%	72	72	4,819,443,900	80	4,963,063,328	85	5,242,483,794	90	7,234,627,635	95	8,889,910,438	95	12,060,941,491	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	'%	40	50	197,000,000	60	202,870,600	65	214,292,215	70	295,723,256	75	363,384,737	75	493,004,073	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota	'%	60	60	464,726,200	65	478,575,041	70	505,518,816	75	697,615,965	80	857,230,498	80	1,163,004,617	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	'%	40	50	862,629,700	70	888,336,065	75	938,349,386	80	1,294,922,152	85	1,591,200,340	85	2,158,781,502	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota	'%	60	60	0	65	250,000,000	70	0	0	0	0	0	0		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat - alat berat ke PU an / Kebinamargaan	'%	30	0	0	50	4,000,000,000	65	4,050,000,000	80	4,105,000,000	90	1,665,500,000	90		Dinas Pekerjaan Umum
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik	'%	85	85	1,009,556,000	88	1,039,640,769	90	1,098,172,544	93	1,515,478,111	95	1,862,219,503	95	2,526,473,199	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik	'%	85	85	4,723,190,700	88	4,863,941,783	90	5,137,781,705	93	7,090,138,753	95	8,712,362,500	95	11,820,062,204	Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan informasi / data base jalan	'%	20	0	0	40	1,200,000,000	0	0	80	300,000,000	100	330,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Sosial					**6,876,572,350**		**7,481,494,206**		**8,010,182,330**		**11,052,651,615**		**13,414,474,305**		**17,209,026,289**	
	Program pembinaan anak terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	'%	32	35	0	37	100,000,000	40	100,000,000	42	100,000,000	45	100,000,000	45		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	'%	60	65	1,696,650,000	68	1,747,210,170	70	1,845,578,103	73	2,546,897,782	75	3,129,627,994	75	4,245,966,299	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	'%	75	80	436,581,000	85	449,591,114	87	474,903,094	90	655,366,269	92	805,314,071	92	1,092,569,601	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	3	12	101,442,000	15	104,464,972	20	110,346,350	25	152,277,962	30	187,119,160	30	253,864,564	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial	'%	25	25	3,000,000	50	3,089,400	75	3,263,333	75	4,503,400	100	5,533,778	100	7,507,676	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang meningkat kesejahteraannya	'%	1.5	2	4,096,295,100	2	4,218,364,694	2	4,455,858,626	3	6,149,084,904	3	7,555,995,530	3	10,251,219,136	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial	'%	75	75	347,600,000	80	357,958,480	80	378,111,542	85	521,793,929	90	641,180,379	90	869,889,421	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin	'%	60	60	57,151,250	61	58,854,357	62	62,167,858	63	85,791,643	64	105,420,771	64	143,024,361	Sekretariat Daerah
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Penurunan Angka Kemiskinan	'%	54	5	137,853,000	5	141,961,019	4	149,953,425	3	206,935,726	2	254,282,620	2	344,985,231	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	2	2	0	3	300,000,000	4	430,000,000	5	630,000,000	6	630,000,000	6		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					**5,973,641,000**		**6,151,655,502**		**21,497,993,707**		**23,967,231,315**		**11,018,933,840**		**14,949,387,541**	
	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana areal pemakaman yang memadai	'%	80	80	139,484,600	80	143,641,241	85	151,728,243	85	209,384,975	90	257,292,258	90	349,068,406	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	% Jalan dengan riol yang baik	'%	40	40	3,804,507,000	55	3,917,881,309	70	4,138,458,026	90	5,711,072,076	100	7,017,765,367	100	9,521,002,274	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Pembangunan Rusunawa yang layak huni	unit	0	0	0	0	0	1	15,000,000,000	1	15,000,000,000	0	0	0		Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	'%	50	60	79,649,400	80	82,022,952	100	86,640,844	100	119,564,365	100	146,920,692	100	199,327,303	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	% Kesiap siangaan dan Tanggap terhadap Pencegahan Kebakatan Meningkat	'%	50	60	1,950,000,000	70	2,008,110,000	75	2,121,166,593	80	2,927,209,898	90	3,596,955,523	90	4,879,989,558	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					**14,971,579,700**		**15,447,732,775**		**16,315,751,130**		**22,504,336,560**		**27,646,464,765**		**37,467,257,746**	
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Terjaganya kerukunan antar dan intern umat bergama	'%	0	100	78,847,500	100	81,197,156	100	85,768,555	10	118,360,606	100	145,441,513	100	197,320,501	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan program kualitas pemahaman dan pengamalan dan pembinaan kerukunan beragama	'%	0	100	128,000,000	100	131,814,400	100	139,235,551	100	192,145,060	100	236,107,850	100	320,327,520	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Meningkatnya aktifitas keagamaan dilingkungan masyarakat	kegiatan	3	5	194,215,000	6	200,002,607	7	211,262,754	8	291,542,600	9	358,247,547	9	486,034,447	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Kelompok masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan	Kelompok masyarakat/kelurahan	9	2	469,687,000	2	483,683,673	3	510,915,063	4	705,062,787	4	866,381,153	4	1,175,419,311	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Jumlah event keagamaan ditengah masyarakat	'%	3	3	6,497,174,600	6	6,690,790,403	9	7,067,481,903	12	9,753,125,026	15	11,984,640,032	15	16,259,561,131	Sekretariat Daerah
	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, damai dan berkualitas	'%	0	0	12,636,000	0	13,012,553	0	13,745,160	85	18,968,320	85	23,308,272	85	31,622,332	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terpantaunya kegiatan orang asing, lembaga asing, dan non govenment organization serta deteksi dini dan penanggulangan konflik sosial	'%	100	100	237,889,000	100	244,978,092	100	258,770,359	100	357,103,095	100	438,808,283	100	595,331,198	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat keamananan dan kenyamanan lingkungan	'%	40	50	300,022,600	60	308,963,273	70	326,357,906	75	450,373,910	85	553,419,461	85	750,824,182	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Sistem kebencanaan	% Jumlah Data dan Informasi tentang Kebencanan terpenuhi	'%	25	100	74,970,000	100	77,204,106	100	81,550,697	100	112,539,962	100	138,289,105	100	187,616,829	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana	Kapasitas dan Kwalitas Petugas BPBD Meningkat dalam Penanggulanga Kebencanaan	'%	50	70	399,840,000	70	411,755,232	70	434,937,052	70	600,213,131	70	737,541,896	70	1,000,623,090	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	%Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meningkat	'%	50	60	2,155,520,000	70	2,219,754,496	75	2,344,726,674	80	3,235,722,810	90	3,976,056,189	90	5,394,315,432	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Peningkatan Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	bln	0	100	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Efektivitas kegiatan pemberantasan narkoba	Kegiatan	3	3	196,137,000	3	201,981,883	3	213,353,463	3	294,427,778	3	361,792,854	3	490,844,365	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Terdeteksinya potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah	'%	100	100	427,527,500	100	440,267,820	100	465,054,898	100	641,775,759	100	788,614,053	100	1,069,912,685	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	'%	20	20	124,280,900	30	127,984,471	40	135,189,997	50	186,562,195	60	229,247,625	60	311,020,253	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	kasus	722	650	3,239,993,800	600	3,336,545,615	500	3,524,393,133	400	4,863,662,524	250	5,976,468,510	250	8,108,274,827	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat	'%	100	100	76,668,300	100	78,953,015	100	83,398,070	100	115,089,337	100	141,421,777	100	191,866,925	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Tingkat pelaksanaan peringatan hari-hari besar kenegaraan	'%	100	100	208,464,500	100	214,676,742	100	226,763,043	100	312,932,999	100	384,532,069	100	521,694,658	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Peningkatan program pemberrantasan penyakit masyarakat	bln	0	0	42,000,000	0	43,251,600	0	45,686,665	0	63,047,598	0	77,472,888	0	105,107,467	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Mneingkatnya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	bln	0	0	41,000,000	0	42,221,800	0	44,598,887	0	61,546,465	0	75,628,296	0	102,604,909	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas per tahun	persen	0	10	18,377,500	10	18,925,150	10	19,990,635	10	27,587,077	10	33,899,000	10	45,990,773	GUGUAK PANJANG
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Temuan Peristiwa Gangguan Ketertiban dan Keamanan disertai laporan tertulis	Laporan /Tahun	22	15	48,328,500	12	49,768,689	10	52,570,667	7	72,547,520	5	89,146,392	5	120,944,910	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Tenaga Kerja					**1,327,649,501**		**1,367,213,456**		**1,444,187,574**		**1,992,978,852**		**2,448,972,413**		**3,322,520,873**	
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas	'%	66	77	34,000,000	88	35,013,200	90	36,984,443	95	51,038,532	100	62,716,148	100	85,086,997	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat tenaga kerja yang memiliki keahlian	'%	52	55	657,579,500	57	677,175,369	60	715,300,342	65	987,114,472	65	1,212,966,264	65	1,645,631,330	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap UU ketenagakerjaan	'%	5	5	581,070,001	6	598,385,887	7	632,075,012	8	872,263,517	9	1,071,837,410	9	1,454,161,814	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja	'%	8	15	55,000,000	17	56,639,000	19	59,827,776	21	82,562,330	23	101,452,592	23	137,640,731	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					**697,540,000**		**918,326,692**		**1,268,768,485**		**1,572,100,509**		**1,816,677,105**		**1,745,634,829**	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang	'%	70	70	345,140,000	70	355,425,172	70	375,435,609	70	518,101,141	70	636,642,682	70	863,733,126	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penurunan Kasus KDRT dan TPPO	'%	50	50	0	50	0	50	200,000,000	50	205,000,000	50	210,000,000	50		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kesejahteraan perempuan	'%	0	35	0	30	200,000,000	25	310,000,000	20	320,000,000	15	320,000,000	15		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tingkat kemiskinan menurun menjadi 2.84 %	'%	4.58	4	352,400,000	4	362,901,520	3	383,332,876	3	528,999,368	3	650,034,424	3	881,901,703	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Pangan					**680,581,800**		**700,863,138**		**740,321,732**		**1,021,643,991**		**1,255,396,136**		**1,703,195,937**	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	2400	2,400	387,248,000	2,400	398,787,990	2,400	421,239,754	2,400	581,310,861	2,400	714,314,786	2,400	969,110,870	Kantor Ketahanan Pangan
		Ketersediaan protein perkapita	gr/kap/hr	63	63		63	0	63	0	63	0	63	0	63	0	
	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	84.1	84	293,333,800	84	302,075,147	85	319,081,978	85	440,333,130	85	541,081,350	85	734,085,067	Kantor Ketahanan Pangan
	Pertanahan					**743,508,000**		**2,761,209,084**		**797,507,555**		**3,044,540,426**		**1,249,724,076**		**3,636,963,704**	
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunan tanah	'%	80	80	591,580,000	81	609,209,084	82	643,507,555	83	888,040,426	84	1,091,224,076	84	1,480,463,704	Sekretariat Daerah
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah	'%	90	90	151,928,000	91	2,152,000,000	92	154,000,000	93	2,156,500,000	94	158,500,000	94	2,156,500,000	Sekretariat Daerah
	Lingkungan Hidup					**8,509,414,250**		**10,725,114,795**		**15,978,684,758**		**19,918,084,965**		**20,766,646,806**		**19,793,773,821**	
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	Persentase	8	10	1,233,986,000	12	1,270,758,783	13	1,342,302,502	14	1,852,377,453	15	2,276,201,414	15	3,088,122,459	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH/ Non Hijau	'%	7.78	8	600,000,000	8	2,000,000,000	8	5,700,000,000	9	6,420,000,000	9	4,662,000,000	9		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase kelompok masyarakat yang memahami pengelolaan RTH	'%	10	20	0	30	0	40	110,000,000	50	115,000,000	60	120,000,000	60		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemenuhan RTH	'%	20	20	0	22	100,000,000	25	120,000,000	28	140,000,000	30	0	30		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan/pengelolaan persampahan	Persen	90	90	5,799,341,500	90	5,972,161,877	100	6,308,394,590	100	8,705,584,535	100	10,697,422,276	100	14,513,192,802	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup	'%	50	60	451,509,800	70	464,964,792	80	491,142,310	90	677,776,388	95	832,851,625	95	1,129,929,800	Kantor Lingkungan Hidup

	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	'%	80	70	424,576,950	60	437,229,343	50	461,845,355	40	637,346,590	30	783,171,490	30	1,062,528,760	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan pengendalian	'%	50	55	0	60	380,000,000	65	1,055,000,000	70	1,055,000,000	75	1,055,000,000	75		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	'%	0	0	0	50	0	55	270,000,000	60	175,000,000	65	180,000,000	65		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Informasi Lingkungan Hidup	'%	0	0	0	60	100,000,000	65	120,000,000	70	140,000,000	75	160,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					**662,010,550**		**938,838,464**		**859,880,340**		**1,121,132,069**		**1,335,310,746**		**1,656,720,293**	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat capaian pelayanan administrasi kependudukan	'%	67	70	662,010,550	75	681,738,464	80	720,120,340	85	993,766,069	90	1,221,139,746	90	1,656,720,293	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi dan kelengkapan data kependudukan	'%	0	0	0	85	257,100,000	90	139,760,000	95	127,366,000	100	114,171,000	100		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					**8,422,188,700**		**8,673,169,923**		**9,161,469,390**		**12,642,827,758**		**15,535,506,749**		**21,077,022,007**	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tiingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	'%	15	20	497,375,200	25	512,196,981	30	541,033,671	34	746,626,466	40	917,454,601	40	1,244,710,658	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	'%	15	20	1,898,758,100	25	1,955,341,091	30	2,065,426,795	34	2,850,288,977	40	3,502,435,095	40	4,751,753,693	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya peren perempuan dipedesaan	'%	100	100	184,000,000	100	189,483,200	100	200,151,104	100	276,208,524	100	339,405,034	100	460,470,810	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan program keberdayaan masyarakat pedesaan	bln	12	12	151,000,000	12	155,499,800	12	164,254,439	12	226,671,125	12	278,533,479	12	377,886,371	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	'%	100	100	640,000,000	100	659,072,000	100	696,177,754	100	960,725,300	100	1,180,539,249	100	1,601,637,599	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertahunnya	persen	802661	3	581,898,000	3	599,238,560	3	632,975,691	3	873,506,454	3	1,073,364,731	3	1,456,233,930	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun	'%	5	7	180,868,900	9	186,258,793	12	196,745,163	15	271,508,325	17	333,629,430	17	452,635,048	MANDIANGIN KOTO SELAYAN

	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Tingkat partisipasi perempuan dalam pencapaian tujuan program pemerintah	'%	100	80	341,078,000	85	351,242,124	90	371,017,056	95	512,003,537	100	629,149,947	100	853,567,733	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatkanya persentase aktifitas guna peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakn oleh pemerintah maupun masyarakat	Persen	10	10	543,400,500	10	559,593,835	10	591,098,968	10	815,716,576	10	1,002,352,528	10	1,359,891,675	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	'%	80	80	615,303,000	85	633,639,029	85	669,312,907	90	923,651,811	90	1,134,983,346	90	1,539,831,905	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	'%	15	15	2,180,510,600	20	2,245,489,816	25	2,371,910,893	30	3,273,237,032	34	4,022,153,665	34	5,456,855,877	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	'%	20	25	193,442,900	30	199,207,498	35	210,422,881	40	290,383,575	45	356,823,337	45	484,102,222	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya program peningkatan usaha ekonomi masyarakat	bln	0	0	195,538,000	0	201,365,032	0	212,701,884	0	293,528,600	0	360,687,943	0	489,345,332	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat	pelaku	0	0	141,194,000	90	145,401,581	120	153,587,690	90	211,951,013	120	260,445,404	120	353,346,280	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	'%	3	3	77,821,500	5	80,140,581	6	84,652,495	8	116,820,444	10	143,548,961	10	194,752,876	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					**2,324,370,650**		**2,414,636,895**		**2,733,398,653**		**3,709,190,141**		**4,312,516,845**		**5,816,874,103**	
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	100 % data akurat	'%	80	85	115,152,000	88	118,583,530	90	125,259,782	93	172,858,500	95	212,408,524	95	288,174,645	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program pelayanan kontrasepsi	Tercapainya program KB	'%	75	75	0	75	21,000,000	80	160,000,000	80	170,000,000	80	25,000,000	80		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 % Kelompok Kerja paham fungsi keluarga	'%	100	100	0	100	0	100	45,000,000	100	50,000,000	100	0	100		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75 % sekolah dan perguruan tinggi memiliki PIK R/M	'%	25	35	209,025,650	45	215,254,614	55	227,373,449	65	313,775,360	75	385,567,162	75	523,098,969	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Keluarga Berencana	Jumlah PUS ber KB 80 %	'%	1.77	2	1,463,946,000	2	1,507,571,591	2	1,592,447,871	1	2,197,578,062	1	2,700,383,923	1	3,663,610,869	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Peningkatan Tingkat Tahapan Kelompok Kegiatan	tingkat	0	0	71,247,000	0	73,370,161	0	77,500,901	0	106,951,243	0	131,421,687	0	178,299,803	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase Kelurahan yang memiliki WPA (Warga Peduli AIDS)	'%	8	24	465,000,000	24	478,857,000	30	505,816,649	40	698,026,976	50	857,735,548	50	1,163,689,818	Dinas Kesehatan
	Perhubungan					**6,605,945,000**		**14,602,802,161**		**8,810,799,923**		**14,216,403,893**		**13,435,277,104**		**16,531,765,447**	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berwawasan lingkungan	Persen	70	0	0	72	7,800,000,000	73	1,625,000,000	74	4,300,000,000	75	1,250,000,000	75		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Optimalisasi Peningkatan Pengoperasian Kendaraan	Persen	80	81	180,000,000	82	185,364,000	83	195,799,993	84	270,203,991	85	332,026,664	85	450,460,575	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas lalu ,intas yang memadai dan berwawasan lingkungan	Persen	70	71	5,351,566,000	72	5,511,042,667	73	5,821,314,369	74	8,033,413,829	75	9,871,458,913	75	13,392,608,308	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Terwujudnya Angkutan Yang Selamat, Aman, Nyaman, Terjangkau dan Terpadu	Persen	80	81	51,379,000	82	52,910,094	83	55,888,933	84	77,126,727	85	94,773,322	85	128,578,966	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terciptanya Lalu Lintas Yang Aman, Tertib dan Lancar	Persen	70	71	763,000,000	72	785,737,400	73	829,974,416	74	1,145,364,694	75	1,407,424,135	75	1,909,452,325	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Persen	70	71	260,000,000	72	267,748,000	73	282,822,212	74	390,294,653	75	479,594,070	75	650,665,274	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Komunikasi dan Informatika					**4,500,730,020**		**5,693,437,975**		**5,904,683,933**		**6,736,603,827**		**8,259,601,183**		**12,150,634,024**	
	Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)	Kemudahan mendapatkan informasi melalui media elektronik menuju smart city	Persen	80	80	81,000,000	82	1,135,000,000	85	1,090,000,000	87	95,000,000	90	100,000,000	90	1,090,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Persen	80	80	142,000,000	82	146,231,600	85	154,464,439	87	213,160,926	90	261,932,146	90	355,363,342	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Persentase tingkat ketercapaian penyebaran informasi Pemda Bukittinggi kepada masyarakat	'%	80	80	2,485,337,800	83	2,559,400,866	85	2,703,495,135	88	3,730,823,287	90	4,584,435,655	90	6,219,703,853	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tingkat pencapaian pelayanan informasi kepada publik	'%	80	80	419,853,220	81	432,364,846	82	456,706,987	83	630,255,642	84	774,458,133	84	1,050,707,348	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya sarana dan prasarana TIK menuju smart city	Persen	80	80	1,034,736,000	82	1,065,571,133	85	1,125,562,788	87	1,553,276,647	90	1,908,666,344	90	2,589,487,628	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat	publikasi	0	12	16,675,000	12	17,171,915	12	18,138,694	12	25,031,397	12	30,758,581	12	41,730,167	GUGUAK PANJANG
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat Melalu Media Cetak Dan Elektronik	Publikasi/Tahun	24	24	11,450,000	24	11,791,210	27	12,455,055	27	17,187,976	29	21,120,585	29	28,654,298	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan program komunikasi, informasi dan media massa	'%	100	100	0	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi di masyarakat	bulan	12	12	52,678,000	12	54,247,804	12	57,301,956	12	79,076,699	12	97,169,448	12	131,829,790	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan Telekomunikasi	Persen	80	80	257,000,000	82	264,658,600	85	279,558,879	87	385,791,253	90	474,060,292	90	643,157,598	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					**1,012,000,000**		**1,042,157,600**		**1,100,831,073**		**1,519,146,881**		**1,866,727,687**		**2,532,589,453**	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	82.52	83	217,000,000	84	223,466,600	85	236,047,770	86	325,745,922	87	400,276,589	87	543,055,248	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang tersentuh pembiayaan	'%	30	33	45,000,000	36	46,341,000	39	48,949,998	42	67,550,998	45	83,006,666	45	112,615,144	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	unit	3	20	460,000,000	20	473,708,000	20	500,377,760	20	690,521,309	20	848,512,585	20	1,151,177,024	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
		Jumlah UMKM	unit	9236	9,236		9,246	0	9,256	0	9,266	0	9,276	0	9,276	0	
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi sehat	unit	11	12	290,000,000	13	298,642,000	14	315,455,545	15	435,328,652	16	534,931,847	16	725,742,037	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Penanaman Modal					**1,404,302,900**		**1,546,151,126**		**1,657,569,435**		**2,233,045,820**		**2,590,366,704**		**3,514,350,507**	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor	Perusahaan	70	80	32,806,100	90	33,783,722	100	35,685,745	110	49,246,329	120	60,513,889	120	82,099,193	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	persen	2500000000	10	114,286,000	10	117,691,723	10	124,317,767	10	171,558,518	10	210,811,107	10	286,007,429	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi	dokumen	0	0	0	1	100,000,000	1	130,000,000	1	125,000,000	1	0	1		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Lancarnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase	100	100	377,525,700	100	388,775,966	100	410,664,053	100	566,716,393	100	696,381,103	100	944,780,243	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	nilai mutu	7.2	7	293,324,000	7	302,065,055	8	319,071,318	8	440,318,419	8	541,063,273	8	734,060,542	GUGUAK PANJANG

	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	'%	80	85	586,361,100	90	603,834,661	90	637,830,552	90	880,206,162	90	1,081,597,332	90	1,467,403,100	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Kepemudaan dan Olahraga					**5,510,165,350**		**5,674,368,277**		**6,218,835,211**		**8,511,492,592**		**10,419,010,097**		**13,789,512,498**	
	Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah capaian program pembinaan kepemudaan	'%	0	100	931,257,100	100	959,008,562	100	1,013,000,744	100	1,397,941,026	100	1,717,789,933	100	2,330,525,602	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	'%	0	100	368,905,750	100	379,899,141	100	401,287,463	100	553,776,699	100	680,480,808	100	923,208,312	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai	unit	3	3	3,385,741,500	3	3,486,636,597	4	3,682,934,237	5	5,082,449,247	6	6,245,313,635	6	8,473,017,009	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	'%	100	100	824,261,000	100	848,823,978	100	896,612,768	100	1,237,325,619	100	1,520,425,721	100	2,062,761,576	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan	'%	100	0	0	20	0	40	145,000,000	60	155,000,000	80	165,000,000	80		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	persentase sekolah yang bebas narkoba	'%	0	0	0	0	0	20	80,000,000	40	85,000,000	60	90,000,000	60		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Statistik					**273,905,300**		**332,067,678**		**355,448,088**		**471,168,362**		**570,243,683**		**685,464,105**	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pemenuhan Data pembangunan Daerah	'%	66	70	244,655,500	80	251,946,234	85	266,130,807	90	367,260,513	100	451,289,719	100	612,264,762	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD	Persen	10	0	0	20	50,000,000	30	57,500,000	40	60,000,000	50	65,000,000	50		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi statistik daerah	persen	100	100	29,249,800	100	30,121,444	100	31,817,281	100	43,907,848	100	53,953,964	100	73,199,343	Dinas Pertanian
	Persandian					**1,105,865,000**		**1,126,995,977**		**1,680,325,351**		**1,918,948,984**		**1,627,391,711**		**2,494,633,435**	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan TIK OLeh SKPD dan Layanan Kepada Publik dalam mewujudkan smart city	Persen	80	81	531,000,000	82	535,000,000	83	1,055,000,000	84	1,056,000,000	85	567,000,000	85	1,056,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	'%	80	80	574,865,000	82	591,995,977	85	625,325,351	88	862,948,984	90	1,060,391,711	90	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
	Kebudayaan					**2,103,766,500**		**3,537,958,742**		**53,903,630,369**		**10,914,693,909**		**5,434,464,067**		**5,264,799,258**	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang dilaksanakan masyarakat	kali	4	52	363,480,000	57	374,311,704	59	395,385,453	61	545,631,925	63	670,472,510	63	909,630,054	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	sanggar	6	6	892,148,000	7	918,734,010	13	970,458,735	16	1,339,233,055	19	1,645,649,577	19	2,232,652,782	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	kali	0	1	301,845,000	1	310,839,981	1	328,340,272	1	453,109,575	1	556,781,046	1	755,384,845	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan Program Pengembangan nilai budaya	bln	0	12	75,000,000	12	77,235,000	12	81,583,331	12	112,584,996	12	138,344,443	12	187,691,906	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya aktifitas pengembangan nilai adat dan budaya di masyarakat	kegiatan	8	8	6,352,000	9	6,541,290	10	6,909,564	11	9,535,199	12	11,716,852	12	15,896,253	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya	kegiatan	0	0	0	3	374,500,000	4	426,200,000	4	426,660,000	4	448,872,000	4		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	'%	0	5	0	10	997,000,000	15	51,189,000,000	20	7,330,000,000	25	1,105,000,000	25		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Pengelolaan Kekayaan Budaya	'%	0	25	464,941,500	30	478,796,757	35	505,753,014	40	697,939,159	45	857,627,639	45	1,163,543,418	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Perpustakaan					**248,249,470**		**255,647,304**		**270,040,247**		**372,655,541**		**457,919,129**		**621,258,883**	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan	'%	100	100	248,249,470	100	255,647,304	100	270,040,247	100	372,655,541	100	457,919,129	100	621,258,883	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Kearsipan					**144,768,600**		**719,082,704**		**744,476,061**		**792,316,964**		**869,539,085**		**362,291,926**	
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan	'%	100	100	0	100	510,000,000	100	535,000,000	100	560,000,000	100	585,000,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi	'%	100	100	97,268,600	100	100,167,204	100	105,806,618	100	146,013,133	100	179,420,937	100	243,420,386	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan	'%	100	100	0	100	60,000,000	100	52,000,000	100	15,000,000	100	17,500,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	'%	100	100	47,500,000	100	48,915,500	100	51,669,443	100	71,303,831	100	87,618,147	100	118,871,541	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Urusan Pilihan					**17,072,716,450**		**90,330,664,833**		**21,369,169,063**		**25,287,153,307**		**29,066,361,184**		**21,474,337,618**	
	Kelautan dan Perikanan					**314,084,700**		**393,444,424**		**416,654,345**		**551,482,996**		**664,358,306**		**786,015,414**	
	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	persen	2	2	77,740,500	2	80,057,167	2	84,564,385	2	116,698,852	2	143,399,549	2	194,550,168	Dinas Pertanian
	Program Pengembangan Perikanan budidaya	Jumlah Produksi ikan	ton	355	351	220,693,700	352	227,270,372	353	240,065,694	354	331,290,658	355	407,089,961	355	552,298,950	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan	Meningkatnya kualitas SDM Perikanan		0	0	15,650,500	0	16,116,885	0	17,024,266	0	23,493,486	0	28,868,796	0	39,166,296	Dinas Pertanian

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Daya Saing Produk Perikanan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	persen	40	10	0	10	70,000,000	10	75,000,000	10	80,000,000	10	85,000,000	10		Dinas Pertanian
	Pariwisata					**10,534,131,950**		**83,527,230,515**		**14,181,642,393**		**15,391,866,502**		**16,920,336,758**		**5,111,145,779**	
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	meningkatnya jumlah PAD yang dikelola Dinas Pariwisata	rupiah (Milyar)	8041	10,086	8,491,764,000	10,091	81,424,000,000	10,097	11,960,000,000	10,112	12,326,000,000	10,127	13,153,000,000	10,127		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	meningkatnya jumlah wisatawan	orang	460905	483,950	2,042,367,950	508,148	2,103,230,515	533,555	2,221,642,393	560,233	3,065,866,502	588,245	3,767,336,758	588,245	5,111,145,779	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Pertanian					**1,190,397,400**		**1,225,871,243**		**1,294,887,793**		**1,786,945,155**		**2,195,798,206**		**2,979,039,427**	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi	kelompok	10	11	23,763,600	12	24,471,755	13	25,849,515	14	35,672,331	15	43,834,160	15	59,469,805	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	persen	0	5	64,257,200	5	66,172,065	5	69,897,552	5	96,458,621	5	118,528,354	5	160,807,418	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	2	2	370,088,300	2	381,116,931	2	402,573,815	2	555,551,864	2	682,662,131	2	926,167,713	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian	persen	2	2	155,835,200	2	160,479,089	2	169,514,062	2	233,929,405	2	287,452,453	2	389,986,743	Dinas Pertanian
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)	persen	70	73	306,133,100	78	315,255,866	80	333,004,772	82	459,546,585	85	564,690,844	85	766,116,067	Dinas Pertanian
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persen	100	100	139,098,800	100	143,243,944	100	151,308,578	100	208,805,838	100	256,580,614	100	348,102,919	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	1	2	43,233,800	2	44,522,167	2	47,028,765	2	64,899,696	2	79,748,747	2	108,195,124	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	kwintal/Ha	66.7	67	87,987,400	67	90,609,425	67	95,710,735	67	132,080,814	67	162,300,905	67	220,193,638	Dinas Pertanian
	Kehutanan					**61,740,800**		**63,580,676**		**67,160,268**		**92,681,170**		**113,886,621**		**154,509,979**	
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan luas lahan yang dihijaukan	persen	2	2	61,740,800	2	63,580,676	2	67,160,268	2	92,681,170	2	113,886,621	2	154,509,979	Dinas Pertanian
	Perdagangan					**4,397,357,000**		**4,528,398,239**		**4,783,347,059**		**6,601,018,942**		**8,111,332,076**		**11,004,644,227**	
	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat Pengawasan dan Ketertiban Pasar	'%	100	100	374,907,000	100	386,079,229	100	407,815,489	100	562,785,375	100	691,550,669	100	938,226,792	Dinas Pengelolaan Pasar

	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Tingkat Sarana dan Prasarana yang dikembangkan	$	100	100	2,393,450,000	100	2,464,774,810	100	2,603,541,632	100	3,592,887,452	100	4,414,940,101	100	5,989,749,235	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha	perusahaan	2553	300	554,000,000	350	570,509,200	400	602,628,868	450	831,627,838	500	1,021,904,287	500	1,386,417,546	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri	IKM	0	2	250,000,000	2	257,450,000	2	271,944,435	2	375,283,320	2	461,148,144	2	625,639,687	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL	lokasi	0	0	120,000,000	1	123,576,000	1	130,533,329	1	180,135,994	1	221,351,109	1	300,307,050	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah komoditas peredaran barang yang di awasi	jenis	20	20	705,000,000	20	726,009,000	20	766,883,307	22	1,058,298,963	22	1,300,437,766	22	1,764,303,917	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Industri					**1,765,402,000**		**1,818,010,980**		**1,920,364,998**		**2,650,103,697**		**3,256,447,423**		**4,418,022,218**	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM	'%	1	2	616,750,000	2	635,129,150	2	670,886,921	2	925,823,951	2	1,137,652,471	2	1,543,453,108	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang	unit usaha	0	5	886,125,000	10	912,531,525	15	963,907,050	20	1,330,191,729	30	1,634,539,596	30	2,217,579,870	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya nilai produksi IKM	'%	4.1113E+11	2	47,527,000	2	48,943,305	2	51,698,813	2	71,344,361	2	87,667,951	2	118,939,110	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal	&	476	7	30,000,000	7	30,894,000	7	32,633,332	7	45,033,998	7	55,337,777	7	75,076,762	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB	Persen	0.07	0	185,000,000	0	190,513,000	0	201,238,882	0	277,709,657	0	341,249,627	0	462,973,368	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah					**123,035,924,737**		**157,906,603,624**		**134,850,385,738**		**185,213,930,358**		**226,993,876,597**		**301,172,161,591**	
	Bidang Pemerintahan Umum					**31,985,962,425**		**34,595,144,105**		**36,787,467,918**		**50,031,842,727**		**61,020,343,823**		**80,046,750,073**	
	Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah Usulan Bantuan Kemasyarakatan yang direalisasikan	Proposal /Tahun	42	60	15,000,000	60	15,447,000	60	16,316,666	60	22,516,999	60	27,668,889	60	37,538,381	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	'%	80	80	71,440,000	82	73,568,912	85	77,710,842	88	107,240,962	90	131,777,694	90	178,782,797	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	'%	80	80	909,099,450	81	936,190,614	82	988,898,145	83	1,364,679,440	84	1,676,918,096	84	2,275,074,781	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH	'%	80	80	7,627,000,000	85	7,854,284,600	90	8,296,480,823	95	11,449,143,536	100	14,068,707,577	100	19,087,015,569	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	'%	80	80	245,162,000	81	252,467,828	82	266,681,766	83	368,020,837	84	452,224,005	84	613,532,308	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Kelembagaan Daerah	Peningkatan capaian kinerja daerah	peringkat nasional	74	62	721,357,000	55	742,853,439	50	784,676,087	40	1,082,853,000	35	1,330,609,767	35	1,805,238,271	Sekretariat Daerah

	Program Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur	Jumlah penyelenggaraan diklat peningkatan profesionalisme aparatur	kegiatan	0	0	0	8	800,000,000	8	812,000,000	8	834,000,000	8	836,000,000	8		Badan Kepegawaian Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	'%	100	100	559,000,000	100	575,658,200	100	608,067,757	100	839,133,504	100	1,031,127,250	100	1,398,930,340	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Meningkatnya Program peningkatan pelayanan kelurahan	'%	100	100	380,000,000	100	391,324,000	100	413,355,541	100	570,430,647	100	700,945,179	100	950,972,324	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	persen	80	82	734,210,800	84	756,090,282	86	798,658,165	88	1,102,148,267	90	1,354,319,791	90	1,837,405,660	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	orang	80	0	30,740,000	80	31,656,052	80	33,438,288	80	46,144,837	80	56,702,776	80	76,928,656	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan	'%	0	0	0	80	11,000,000	85	11,850,000	90	12,650,000	95	13,275,000	95		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kerjasama Tugas Sekretariat DPRD se Indonesia	'%	100	100	109,500,000	100	112,763,100	100	119,111,663	100	164,374,094	100	201,982,887	100	274,030,183	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terstandarisasinya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	'%	100	100	50,000,000	100	51,490,000	100	54,388,887	100	75,056,664	100	92,229,629	100	125,127,937	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemerintahan	'%	100	100	12,522,580,525	100	12,895,753,425	100	13,621,784,342	100	18,798,062,393	100	23,099,059,068	100	31,338,493,438	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	'%	100	100	36,000,000	100	37,072,800	100	39,159,999	100	54,040,798	100	66,405,333	100	90,092,115	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Perizinan	dokumen	2	2	12,666,000	1	13,043,447	1	13,777,793	1	19,013,354	1	23,363,610	1	31,697,409	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase capaian realisasi penyelenggaraan pemerintahan	'%	81	75	762,195,900	80	784,909,338	80	829,099,734	85	1,144,157,632	90	1,405,940,899	90	1,907,440,017	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kegiatan yang dikelola dengan sistem otomisasi	kegiatan	1	1	502,385,200	3	517,356,279	5	546,483,437	7	754,147,144	7	926,696,010	7	1,257,248,477	Badan Kepegawaian Daerah

	Peningkatan Kemitraan Legislatif dengan Eksekutif	Terjalinnya kemitraan yang sinergis antara legislatif dan eksekutif	'%	100	0	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukittinggi	persen	10	15	2,092,983,550	20	2,155,354,460	30	2,276,700,916	50	3,141,847,264	75	3,860,701,918	75	5,237,814,292	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ditindaklanjutinya Pengaduan Masyarakat Secara Komprehensif	'%	100	100	0	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Penyelenggaraan Adipura	Tingkat penilaian adipura	'%	71	75	0	77	0	80	325,000,000	85	325,000,000	87	325,000,000	87		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Penegasan Batas Wilayah	Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan	'%	80	80	671,985,500	81	692,010,668	82	730,970,869	83	1,008,739,799	84	1,239,539,464	84	1,681,683,191	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	'%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat inflasi daerah	'%	2.84	9	575,800,100	6	592,958,943	5	626,342,531	5	864,352,693	4	1,062,116,590	4	1,440,973,577	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rupiah (Milyar)	28892	31,758	3,021,888,000	34,927	3,111,940,262	38,432	3,287,142,499	42,311	4,536,256,649	46,605	5,574,152,170	46,605	7,562,452,249	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD`	'%	100	100	111,720,000	100	115,049,256	100	121,526,529	100	167,706,610	100	206,077,883	100	279,585,863	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Peningkatan program peningkatan kinerja LPMK dan RT	bln	12	12	63,000,000	12	64,877,400	12	68,529,998	12	94,571,397	12	116,209,332	12	157,661,201	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pembinaan PKK	Peningkatan program pembinaan PKK	bln	12	12	92,500,000	12	95,256,500	12	100,619,441	12	138,854,829	12	170,624,813	12	231,486,684	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan RT	'%	90	80	67,748,400	85	69,767,302	90	73,695,201	95	101,699,378	100	124,968,196	100	169,544,351	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Keuangan					**4,841,271,107**		**4,985,540,986**		**5,266,226,943**		**7,267,393,182**		**8,930,172,742**		**12,115,565,359**	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi	opini	3	3	4,841,271,107	3	4,985,540,986	3	5,266,226,943	3	7,267,393,182	3	8,930,172,742	3	12,115,565,359	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Bidang Pengawasan					**1,466,804,860**		**1,510,515,645**		**1,595,557,676**		**2,201,869,592**		**2,705,657,355**		**3,670,765,334**	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	'%	100	100	319,019,650	100	328,526,436	100	347,022,474	100	478,891,014	100	588,461,278	100	798,365,416	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	'%	100	100	1,147,785,210	100	1,181,989,209	100	1,248,535,202	100	1,722,978,578	100	2,117,196,077	100	2,872,399,918	Inspektorat Daerah

	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					**2,871,047,600**		**2,956,604,818**		**3,123,061,670**		**4,309,825,104**		**5,295,913,088**		**7,184,965,287**	
	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang difasilitasi mengikuti pendidikan kedinasan	orang	1500	550	2,545,102,500	550	2,620,946,555	530	2,768,505,846	535	3,820,538,067	550	4,694,677,177	550	6,369,268,525	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai sesuai standar kompetensi	'%	60	60	325,945,100	70	335,658,264	80	354,555,824	90	489,287,037	95	601,235,912	95	815,696,761	Badan Kepegawaian Daerah
	Perencanaan Pembangunan					**3,480,323,200**		**3,659,036,831**		**3,870,818,105**		**5,324,428,985**		**6,529,778,337**		**8,709,713,269**	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	'%	100	100	2,214,373,100	100	2,280,361,418	100	2,408,745,766	100	3,324,069,157	100	4,084,616,181	100	5,541,598,772	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	'%	100	100	84,875,500	100	87,404,790	100	92,325,680	100	127,409,438	100	156,560,717	100	212,405,925	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan sosial budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	'%	100	100	164,296,900	100	169,192,948	100	178,718,511	100	246,631,545	100	303,060,842	100	411,162,644	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	'%	100	100	574,865,000	100	591,995,977	100	625,325,351	100	862,948,984	100	1,060,391,711	100	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum	'%	60	100	125,647,500	100	129,391,796	100	136,676,554	100	188,613,644	100	231,768,446	100	314,440,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Pemenuhan Pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota	'%	60	65	316,265,200	70	325,689,903	75	344,026,244	80	474,756,217	85	583,380,440	85	791,472,243	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Peningkatan kualitas perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana	'%	50	50	0	60	75,000,000	65	85,000,000	70	100,000,000	75	110,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Bidang Penunjang Lainnya					**1,678,767,600**		**1,728,794,874**		**1,826,126,026**		**2,520,053,916**		**3,096,642,252**		**4,201,214,543**	
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan oleh masyarakat	kegiatan	5	5	416,710,000	5	429,127,958	5	453,287,862	5	625,537,250	5	768,660,172	5	1,042,841,256	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pendidikan politik masyarakat	Efektivitas kegiatan pendidikan politik masyarakat	kegiatan	7	3	1,088,151,500	3	1,120,578,415	3	1,183,666,979	3	1,633,460,432	3	2,007,196,178	3	2,723,163,055	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda	'% kegiatan	0	100	173,906,100	100	179,088,502	100	189,171,184	100	261,056,235	100	320,785,901	100	435,210,232	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Sekretariat					**76,711,747,945**		**108,470,966,363**		**82,381,127,400**		**113,558,516,851**		**139,415,369,000**		**185,243,187,726**	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	23,818,411,100	100	54,001,408,080	100	24,844,932,985	100	34,158,568,560	100	41,848,712,539	100	52,874,504,906	

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam menggunakan atribut kepegawaian	'%	100	100	2,058,324,500	100	2,119,662,570	100	2,238,999,573	100	3,089,819,410	100	3,796,770,092	100	5,151,077,983	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	50,344,238,545	100	51,844,496,854	100	54,763,342,027	100	75,573,411,997	100	92,864,608,661	100	125,989,414,571	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	490,773,800	100	505,398,859	100	533,852,815	100	736,716,885	100	905,277,708	100	1,228,190,266	

Tabel 8.1
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2016-2021

No	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
						281,230,131,066		**485,352,347,325**		**460,195,028,495**		**518,090,548,396**		**583,503,208,749**		**657,726,329,558**	
	Urusan Wajib					**138,073,852,119**		**233,672,627,498**		**300,100,321,179**		**302,421,054,261**		**321,163,220,982**		**327,452,937,813**	
	Pendidikan					**21,044,806,653**		**21,671,941,891**		**22,892,072,220**		**31,591,059,663**		**38,819,094,114**		**52,665,864,985**	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	'% kegiatan	0	100	7,796,131,800	100	8,028,456,528	100	8,480,458,630	100	11,703,032,910	100	14,380,686,839	100	19,510,277,835	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya kegiatan untuk Pendidikan Anak Usia Dini	'%	0	100	505,396,950	100	520,457,779	100	549,759,552	100	758,668,182	100	932,251,462	100	1,264,785,558	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Menengah	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SMP	nilai	0	0	4,914,299,720	0	5,060,745,852	0	5,345,665,843	0	7,377,018,863	0	9,064,880,779	0	12,298,323,753	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Luar Biasa	Angka putus sekolah	'%	0.25	0	60,680,000	0	62,488,264	0	66,006,353	0	91,088,768	0	111,929,878	0	151,855,265	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SD	nilai	70	70	6,976,936,083	75	7,184,848,778	80	7,589,355,764	85	10,473,310,955	90	12,869,604,501	90	17,460,192,427	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Non Formal	Optimalisasi pelayanan non formal	'%	0	100	291,362,100	100	300,044,691	100	316,937,207	100	437,373,345	100	537,444,367	100	729,150,772	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya manjemen pelayanan pendidikan	'%	100	100	500,000,000	100	514,900,000	100	543,888,870	100	750,566,641	100	922,296,288	100	1,251,279,374	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Kesehatan					**19,744,900,125**		**89,115,160,717**		**70,545,369,265**		**34,475,549,586**		**45,154,904,131**		**38,554,570,535**	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	'%	85	85	0	86	120,000,000	87	150,000,000	88	160,000,000	90	180,000,000	90		Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Ratio tenaga paramedis per satuan penduduk (Bidan dan perawat)	tenaga paramedis/satuan penduduk	12.95	13	0	13	145,000,000	13	152,000,000	13	159,000,000	13	166,000,000	13		Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	'%	100	100	6,459,177,000	100	6,651,660,475	100	7,026,148,959	100	9,696,085,564	100	11,914,549,941	100	16,164,469,905	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	'%	5972	65	504,635,400	65	519,673,535	70	548,931,155	70	757,524,994	75	930,846,712	75	1,262,879,735	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada rumah sakit	'%	25	25	0	25	0	25	0	25	8,000,000,000	25	12,000,000,000	25		Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	unit	0	0	68,000,000	1	70,085,000,000	0	40,085,000,000	0	0	0	0	0		Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pengawasan dan pengendalian makanan yang memenuhi syarat	'%	90	90	38,000,000	100	39,132,400	100	41,335,554	100	57,043,065	100	70,094,518	100	95,097,232	Dinas Kesehatan

	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tingkat Pemenuhan Kualitas lingkungan	'%	40	40	208,000,000	41	214,198,400	42	226,257,770	43	312,235,722	44	383,675,256	44	520,532,220	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	'%	100	100	2,617,063,925	100	2,695,052,430	100	2,846,783,882	100	3,928,561,757	100	4,827,416,687	100	6,549,356,219	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD	'%	0	60	134,639,000	100	138,651,242	100	146,457,307	100	202,111,084	100	248,354,100	100	336,942,007	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ()	puskes mas	0	2	734,639,000	5	756,531,242	7	799,123,951	7	1,102,791,053	7	1,355,109,645	7	1,838,477,256	Dinas Kesehatan
	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan	'%	20	80	410,000,000	85	422,218,000	90	445,988,873	95	615,464,645	95	756,282,956	95	1,026,049,087	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	puskes mas	0	0	20,000,000	1	20,596,000	1	21,755,555	2	30,022,666	3	36,891,852	3	50,051,175	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas. Pustu dan Jaringannya yang dapat melaksanakan pelayanan kesehatan	'%	100	100	4,270,840,000	100	2,900,000,000	100	13,400,000,000	100	3,030,000,000	100	4,391,000,000	100		Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi lebih	'%	0	15	373,000,000	13	384,115,400	13	405,741,097	12	559,922,714	10	688,033,031	10	933,454,413	Dinas Kesehatan
	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan	'%	90	90	2,574,920,000	91	2,651,652,616	92	2,800,940,658	93	3,865,298,108	95	4,749,678,316	95	6,443,888,571	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	'%	83.8	85	193,564,000	86	199,332,207	87	210,554,610	88	290,565,362	90	357,046,717	90	484,405,281	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita	'%	57.57	60	744,750,000	70	766,943,550	80	810,122,472	90	1,117,969,011	90	1,373,760,321	90	1,863,780,627	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	100	100	368,671,800	100	379,658,220	100	401,032,977	100	553,425,509	100	680,049,265	100	922,622,838	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pelaksanaan lingkungan sehat dikecamatan dan kelurahan	bln	0	0	25,000,000	0	25,745,000	0	27,194,444	0	37,528,332	0	46,114,814	0	62,563,969	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					**23,185,390,700**		**30,774,600,415**		**47,208,094,352**		**86,121,250,039**		**90,858,058,503**		**49,906,825,615**	
	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	'%	12.5	13	680,250,000	20	700,521,450	30	739,960,808	40	1,021,145,915	50	1,254,784,100	50	1,702,365,588	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	'%	65	65	2,300,000,000	70	360,000,000	75	7,700,000,000	80	23,365,000,000	85	23,046,500,000	85		Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	'%	10	10	228,000,000	20	234,794,400	40	248,013,325	60	342,258,388	75	420,567,107	75	570,583,394	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap	'%	98	98	4,050,000,000	99	4,170,690,000	100	4,405,499,847	100	6,079,589,789	100	7,470,599,933	100	10,135,362,928	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Pembangunan gedung	Persentase Gedung Negara dan Swasta yang Laik Fugsi	'%	0	2	150,000,000	5	154,470,000	20	163,166,661	30	225,169,992	40	276,688,886	40	375,383,812	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengendalian banjir	Pengurangan titik genangan	titik	8	8	257,522,800	6	265,196,979	4	280,127,569	2	386,576,046	0	475,024,645	0	644,465,936	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	'%	48	48	943,071,400	55	2,940,000,000	70	12,104,083,333	90	23,785,170,833	100	23,937,604,375	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	'%	45	45	2,500,000,000	50	2,574,500,000	60	2,719,444,350	70	3,752,833,203	80	4,611,481,440	80	6,256,396,869	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	'%	98	0	0	98	488,000,000	99	561,200,000	100	3,420,000,000	100	3,762,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang terpelihara / normalisasi	'%	47	0	0	55	1,000,000,000	65	1,100,000,000	70	1,210,000,000	75	1,331,000,000	75		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	'%	72	72	4,819,443,900	80	4,963,063,328	85	5,242,483,794	90	7,234,627,635	95	8,889,910,438	95	12,060,941,491	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	'%	40	50	197,000,000	60	202,870,600	65	214,292,215	70	295,723,256	75	363,384,737	75	493,004,073	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota	'%	60	60	464,726,200	65	478,575,041	70	505,518,816	75	697,615,965	80	857,230,498	80	1,163,004,617	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	'%	40	50	862,629,700	70	888,336,065	75	938,349,386	80	1,294,922,152	85	1,591,200,340	85	2,158,781,502	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota	'%	60	60	0	65	250,000,000	70	0	0	0	0	0	0		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat - alat berat ke PU an / Kebinamargaan	'%	30	0	0	50	4,000,000,000	65	4,050,000,000	80	4,105,000,000	90	1,665,500,000	90		Dinas Pekerjaan Umum
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik	'%	85	85	1,009,556,000	88	1,039,640,769	90	1,098,172,544	93	1,515,478,111	95	1,862,219,503	95	2,526,473,199	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik	'%	85	85	4,723,190,700	88	4,863,941,783	90	5,137,781,705	93	7,090,138,753	95	8,712,362,500	95	11,820,062,204	Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan informasi / data base jalan	'%	20	0	0	40	1,200,000,000	0	0	80	300,000,000	100	330,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Sosial					**6,876,572,350**		**7,481,494,206**		**8,010,182,330**		**11,052,651,615**		**13,414,474,305**		**17,209,026,289**	
	Program pembinaan anak terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	'%	32	35	0	37	100,000,000	40	100,000,000	42	100,000,000	45	100,000,000	45		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	'%	60	65	1,696,650,000	68	1,747,210,170	70	1,845,578,103	73	2,546,897,782	75	3,129,627,994	75	4,245,966,299	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	'%	75	80	436,581,000	85	449,591,114	87	474,903,094	90	655,366,269	92	805,314,071	92	1,092,569,601	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	3	12	101,442,000	15	104,464,972	20	110,346,350	25	152,277,962	30	187,119,160	30	253,864,564	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial	'%	25	25	3,000,000	50	3,089,400	75	3,263,333	75	4,503,400	100	5,533,778	100	7,507,676	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang meningkat kesejahteraannya	'%	1.5	2	4,096,295,100	2	4,218,364,694	2	4,455,858,626	3	6,149,084,904	3	7,555,995,530	3	10,251,219,136	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial	'%	75	75	347,600,000	80	357,958,480	80	378,111,542	85	521,793,929	90	641,180,379	90	869,889,421	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin	'%	60	60	57,151,250	61	58,854,357	62	62,167,858	63	85,791,643	64	105,420,771	64	143,024,361	Sekretariat Daerah
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Penurunan Angka Kemiskinan	'%	54	5	137,853,000	5	141,961,019	4	149,953,425	3	206,935,726	2	254,282,620	2	344,985,231	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	2	2	0	3	300,000,000	4	430,000,000	5	630,000,000	6	630,000,000	6		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					**5,973,641,000**		**6,151,655,502**		**21,497,993,707**		**23,967,231,315**		**11,018,933,840**		**14,949,387,541**	
	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana areal pemakaman yang memadai	'%	80	80	139,484,600	80	143,641,241	85	151,728,243	85	209,384,975	90	257,292,258	90	349,068,406	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	% Jalan dengan riol yang baik	'%	40	40	3,804,507,000	55	3,917,881,309	70	4,138,458,026	90	5,711,072,076	100	7,017,765,367	100	9,521,002,274	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Pembangunan Rusunawa yang layak huni	unit	0	0	0	0	0	1	15,000,000,000	1	15,000,000,000	0	0	0		Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	'%	50	60	79,649,400	80	82,022,952	100	86,640,844	100	119,564,365	100	146,920,692	100	199,327,303	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	% Kesiap siangaan dan Tanggap terhadap Pencegahan Kebakatan Meningkat	'%	50	60	1,950,000,000	70	2,008,110,000	75	2,121,166,593	80	2,927,209,898	90	3,596,955,523	90	4,879,989,558	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					**14,971,579,700**		**15,447,732,775**		**16,315,751,130**		**22,504,336,560**		**27,646,464,765**		**37,467,257,746**	
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Terjaganya kerukunan antar dan intern umat bergama	'%	0	100	78,847,500	100	81,197,156	100	85,768,555	10	118,360,606	100	145,441,513	100	197,320,501	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan program kualitas pemahaman dan pengamalan dan pembinaan kerukunan beragama	'%	0	100	128,000,000	100	131,814,400	100	139,235,551	100	192,145,060	100	236,107,850	100	320,327,520	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Meningkatnya aktifitas keagamaan dilingkungan masyarakat	kegiatan	3	5	194,215,000	6	200,002,607	7	211,262,754	8	291,542,600	9	358,247,547	9	486,034,447	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Kelompok masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan	Kelompok masyarakat/kelurahan	9	2	469,687,000	2	483,683,673	3	510,915,063	4	705,062,787	4	866,381,153	4	1,175,419,311	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Jumlah event keagamaan ditengah masyarakat	'%	3	3	6,497,174,600	6	6,690,790,403	9	7,067,481,903	12	9,753,125,026	15	11,984,640,032	15	16,259,561,131	Sekretariat Daerah
	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, damai dan berkualitas	'%	0	0	12,636,000	0	13,012,553	0	13,745,160	85	18,968,320	85	23,308,272	85	31,622,332	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terpantaunya kegiatan orang asing, lembaga asing, dan non govenment organization serta deteksi dini dan penanggulangan konflik sosial	'%	100	100	237,889,000	100	244,978,092	100	258,770,359	100	357,103,095	100	438,808,283	100	595,331,198	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat keamananan dan kenyamanan lingkungan	'%	40	50	300,022,600	60	308,963,273	70	326,357,906	75	450,373,910	85	553,419,461	85	750,824,182	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Sistem kebencanaan	% Jumlah Data dan Informasi tentang Kebencanan terpenuhi	'%	25	100	74,970,000	100	77,204,106	100	81,550,697	100	112,539,962	100	138,289,105	100	187,616,829	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana	Kapasitas dan Kwalitas Petugas BPBD Meningkat dalam Penanggulanga Kebencanaan	'%	50	70	399,840,000	70	411,755,232	70	434,937,052	70	600,213,131	70	737,541,896	70	1,000,623,090	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	%Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meningkat	'%	50	60	2,155,520,000	70	2,219,754,496	75	2,344,726,674	80	3,235,722,810	90	3,976,056,189	90	5,394,315,432	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Peningkatan Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	bln	0	100	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Efektivitas kegiatan pemberantasan narkoba	Kegiatan	3	3	196,137,000	3	201,981,883	3	213,353,463	3	294,427,778	3	361,792,854	3	490,844,365	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Terdeteksinya potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah	'%	100	100	427,527,500	100	440,267,820	100	465,054,898	100	641,775,759	100	788,614,053	100	1,069,912,685	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	'%	20	20	124,280,900	30	127,984,471	40	135,189,997	50	186,562,195	60	229,247,625	60	311,020,253	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	kasus	722	650	3,239,993,800	600	3,336,545,615	500	3,524,393,133	400	4,863,662,524	250	5,976,468,510	250	8,108,274,827	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat	'%	100	100	76,668,300	100	78,953,015	100	83,398,070	100	115,089,337	100	141,421,777	100	191,866,925	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Tingkat pelaksanaan peringatan hari-hari besar kenegaraan	'%	100	100	208,464,500	100	214,676,742	100	226,763,043	100	312,932,999	100	384,532,069	100	521,694,658	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Peningkatan program pemberrantasan penyakit masyarakat	bln	0	0	42,000,000	0	43,251,600	0	45,686,665	0	63,047,598	0	77,472,888	0	105,107,467	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Mneingkatnya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	bln	0	0	41,000,000	0	42,221,800	0	44,598,887	0	61,546,465	0	75,628,296	0	102,604,909	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas per tahun	persen	0	10	18,377,500	10	18,925,150	10	19,990,635	10	27,587,077	10	33,899,000	10	45,990,773	GUGUAK PANJANG
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Temuan Peristiwa Gangguan Ketertiban dan Keamanan disertai laporan tertulis	Laporan /Tahun	22	15	48,328,500	12	49,768,689	10	52,570,667	7	72,547,520	5	89,146,392	5	120,944,910	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Tenaga Kerja					**1,327,649,501**		**1,367,213,456**		**1,444,187,574**		**1,992,978,852**		**2,448,972,413**		**3,322,520,873**	
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas	'%	66	77	34,000,000	88	35,013,200	90	36,984,443	95	51,038,532	100	62,716,148	100	85,086,997	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat tenaga kerja yang memiliki keahlian	'%	52	55	657,579,500	57	677,175,369	60	715,300,342	65	987,114,472	65	1,212,966,264	65	1,645,631,330	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap UU ketenagakerjaan	'%	5	5	581,070,001	6	598,385,887	7	632,075,012	8	872,263,517	9	1,071,837,410	9	1,454,161,814	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja	'%	8	15	55,000,000	17	56,639,000	19	59,827,776	21	82,562,330	23	101,452,592	23	137,640,731	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					**697,540,000**		**918,326,692**		**1,268,768,485**		**1,572,100,509**		**1,816,677,105**		**1,745,634,829**	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang	'%	70	70	345,140,000	70	355,425,172	70	375,435,609	70	518,101,141	70	636,642,682	70	863,733,126	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penurunan Kasus KDRT dan TPPO	'%	50	50	0	50	0	50	200,000,000	50	205,000,000	50	210,000,000	50		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kesejahteraan perempuan	'%	0	35	0	30	200,000,000	25	310,000,000	20	320,000,000	15	320,000,000	15		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tingkat kemiskinan menurun menjadi 2.84 %	'%	4.58	4	352,400,000	4	362,901,520	3	383,332,876	3	528,999,368	3	650,034,424	3	881,901,703	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Pangan					**680,581,800**		**700,863,138**		**740,321,732**		**1,021,643,991**		**1,255,396,136**		**1,703,195,937**	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	2400	2,400	387,248,000	2,400	398,787,990	2,400	421,239,754	2,400	581,310,861	2,400	714,314,786	2,400	969,110,870	Kantor Ketahanan Pangan
		Ketersediaan protein perkapita	gr/kap/hr	63	63		63	0	63	0	63	0	63	0	63	0	
	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	84.1	84	293,333,800	84	302,075,147	85	319,081,978	85	440,333,130	85	541,081,350	85	734,085,067	Kantor Ketahanan Pangan
	Pertanahan					**743,508,000**		**2,761,209,084**		**797,507,555**		**3,044,540,426**		**1,249,724,076**		**3,636,963,704**	
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunan tanah	'%	80	80	591,580,000	81	609,209,084	82	643,507,555	83	888,040,426	84	1,091,224,076	84	1,480,463,704	Sekretariat Daerah
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah	'%	90	90	151,928,000	91	2,152,000,000	92	154,000,000	93	2,156,500,000	94	158,500,000	94	2,156,500,000	Sekretariat Daerah
	Lingkungan Hidup					**8,509,414,250**		**10,725,114,795**		**15,978,684,758**		**19,918,084,965**		**20,766,646,806**		**19,793,773,821**	
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	Persentase	8	10	1,233,986,000	12	1,270,758,783	13	1,342,302,502	14	1,852,377,453	15	2,276,201,414	15	3,088,122,459	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH/ Non Hijau	'%	7.78	8	600,000,000	8	2,000,000,000	8	5,700,000,000	9	6,420,000,000	9	4,662,000,000	9		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase kelompok masyarakat yang memahami pengelolaan RTH	'%	10	20	0	30	0	40	110,000,000	50	115,000,000	60	120,000,000	60		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemenuhan RTH	'%	20	20	0	22	100,000,000	25	120,000,000	28	140,000,000	30	0	30		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan/pengelolaan persampahan	Persen	90	90	5,799,341,500	90	5,972,161,877	100	6,308,394,590	100	8,705,584,535	100	10,697,422,276	100	14,513,192,802	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup	'%	50	60	451,509,800	70	464,964,792	80	491,142,310	90	677,776,388	95	832,851,625	95	1,129,929,800	Kantor Lingkungan Hidup

	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	'%	80	70	424,576,950	60	437,229,343	50	461,845,355	40	637,346,590	30	783,171,490	30	1,062,528,760	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan pengendalian	'%	50	55	0	60	380,000,000	65	1,055,000,000	70	1,055,000,000	75	1,055,000,000	75		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	'%	0	0	0	50	0	55	270,000,000	60	175,000,000	65	180,000,000	65		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Informasi Lingkungan Hidup	'%	0	0	0	60	100,000,000	65	120,000,000	70	140,000,000	75	160,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					**662,010,550**		**938,838,464**		**859,880,340**		**1,121,132,069**		**1,335,310,746**		**1,656,720,293**	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat capaian pelayanan administrasi kependudukan	'%	67	70	662,010,550	75	681,738,464	80	720,120,340	85	993,766,069	90	1,221,139,746	90	1,656,720,293	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi dan kelengkapan data kependudukan	'%	0	0	0	85	257,100,000	90	139,760,000	95	127,366,000	100	114,171,000	100		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					**8,422,188,700**		**8,673,169,923**		**9,161,469,390**		**12,642,827,758**		**15,535,506,749**		**21,077,022,007**	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tiingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	'%	15	20	497,375,200	25	512,196,981	30	541,033,671	34	746,626,466	40	917,454,601	40	1,244,710,658	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	'%	15	20	1,898,758,100	25	1,955,341,091	30	2,065,426,795	34	2,850,288,977	40	3,502,435,095	40	4,751,753,693	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya peren perempuan dipedesaan	'%	100	100	184,000,000	100	189,483,200	100	200,151,104	100	276,208,524	100	339,405,034	100	460,470,810	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan program keberdayaan masyarakat pedesaan	bln	12	12	151,000,000	12	155,499,800	12	164,254,439	12	226,671,125	12	278,533,479	12	377,886,371	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	'%	100	100	640,000,000	100	659,072,000	100	696,177,754	100	960,725,300	100	1,180,539,249	100	1,601,637,599	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertahunnya	persen	802661	3	581,898,000	3	599,238,560	3	632,975,691	3	873,506,454	3	1,073,364,731	3	1,456,233,930	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun	'%	5	7	180,868,900	9	186,258,793	12	196,745,163	15	271,508,325	17	333,629,430	17	452,635,048	MANDIANGIN KOTO SELAYAN

	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Tingkat partisipasi perempuan dalam pencapaian tujuan program pemerintah	'%	100	80	341,078,000	85	351,242,124	90	371,017,056	95	512,003,537	100	629,149,947	100	853,567,733	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatkanya persentase aktifitas guna peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakn oleh pemerintah maupun masyarakat	Persen	10	10	543,400,500	10	559,593,835	10	591,098,968	10	815,716,576	10	1,002,352,528	10	1,359,891,675	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	'%	80	80	615,303,000	85	633,639,029	85	669,312,907	90	923,651,811	90	1,134,983,346	90	1,539,831,905	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	'%	15	15	2,180,510,600	20	2,245,489,816	25	2,371,910,893	30	3,273,237,032	34	4,022,153,665	34	5,456,855,877	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	'%	20	25	193,442,900	30	199,207,498	35	210,422,881	40	290,383,575	45	356,823,337	45	484,102,222	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya program peningkatan usaha ekonomi masyarakat	bln	0	0	195,538,000	0	201,365,032	0	212,701,884	0	293,528,600	0	360,687,943	0	489,345,332	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat	pelaku	0	0	141,194,000	90	145,401,581	120	153,587,690	90	211,951,013	120	260,445,404	120	353,346,280	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	'%	3	3	77,821,500	5	80,140,581	6	84,652,495	8	116,820,444	10	143,548,961	10	194,752,876	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					**2,324,370,650**		**2,414,636,895**		**2,733,398,653**		**3,709,190,141**		**4,312,516,845**		**5,816,874,103**	
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	100 % data akurat	'%	80	85	115,152,000	88	118,583,530	90	125,259,782	93	172,858,500	95	212,408,524	95	288,174,645	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program pelayanan kontrasepsi	Tercapainya program KB	'%	75	75	0	75	21,000,000	80	160,000,000	80	170,000,000	80	25,000,000	80		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 % Kelompok Kerja paham fungsi keluarga	'%	100	100	0	100	0	100	45,000,000	100	50,000,000	100	0	100		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75 % sekolah dan perguruan tinggi memiliki PIK R/M	'%	25	35	209,025,650	45	215,254,614	55	227,373,449	65	313,775,360	75	385,567,162	75	523,098,969	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Keluarga Berencana	Jumlah PUS ber KB 80 %	'%	1.77	2	1,463,946,000	2	1,507,571,591	2	1,592,447,871	1	2,197,578,062	1	2,700,383,923	1	3,663,610,869	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Peningkatan Tingkat Tahapan Kelompok Kegiatan	tingkat	0	0	71,247,000	0	73,370,161	0	77,500,901	0	106,951,243	0	131,421,687	0	178,299,803	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase Kelurahan yang memiliki WPA (Warga Peduli AIDS)	'%	8	24	465,000,000	24	478,857,000	30	505,816,649	40	698,026,976	50	857,735,548	50	1,163,689,818	Dinas Kesehatan
	Perhubungan					**6,605,945,000**		**14,602,802,161**		**8,810,799,923**		**14,216,403,893**		**13,435,277,104**		**16,531,765,447**	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berwawasan lingkungan	Persen	70	0	0	72	7,800,000,000	73	1,625,000,000	74	4,300,000,000	75	1,250,000,000	75		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Optimalisasi Peningkatan Pengoperasian Kendaraan	Persen	80	81	180,000,000	82	185,364,000	83	195,799,993	84	270,203,991	85	332,026,664	85	450,460,575	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas lalu ,intas yang memadai dan berwawasan lingkungan	Persen	70	71	5,351,566,000	72	5,511,042,667	73	5,821,314,369	74	8,033,413,829	75	9,871,458,913	75	13,392,608,308	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Terwujudnya Angkutan Yang Selamat, Aman, Nyaman, Terjangkau dan Terpadu	Persen	80	81	51,379,000	82	52,910,094	83	55,888,933	84	77,126,727	85	94,773,322	85	128,578,966	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terciptanya Lalu Lintas Yang Aman, Tertib dan Lancar	Persen	70	71	763,000,000	72	785,737,400	73	829,974,416	74	1,145,364,694	75	1,407,424,135	75	1,909,452,325	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Persen	70	71	260,000,000	72	267,748,000	73	282,822,212	74	390,294,653	75	479,594,070	75	650,665,274	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Komunikasi dan Informatika					**4,500,730,020**		**5,693,437,975**		**5,904,683,933**		**6,736,603,827**		**8,259,601,183**		**12,150,634,024**	
	Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)	Kemudahan mendapatkan informasi melalui media elektronik menuju smart city	Persen	80	80	81,000,000	82	1,135,000,000	85	1,090,000,000	87	95,000,000	90	100,000,000	90	1,090,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Persen	80	80	142,000,000	82	146,231,600	85	154,464,439	87	213,160,926	90	261,932,146	90	355,363,342	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Persentase tingkat ketercapaian penyebaran informasi Pemda Bukittinggi kepada masyarakat	'%	80	80	2,485,337,800	83	2,559,400,866	85	2,703,495,135	88	3,730,823,287	90	4,584,435,655	90	6,219,703,853	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tingkat pencapaian pelayanan informasi kepada publik	'%	80	80	419,853,220	81	432,364,846	82	456,706,987	83	630,255,642	84	774,458,133	84	1,050,707,348	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya sarana dan prasarana TIK menuju smart city	Persen	80	80	1,034,736,000	82	1,065,571,133	85	1,125,562,788	87	1,553,276,647	90	1,908,666,344	90	2,589,487,628	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat	publikasi	0	12	16,675,000	12	17,171,915	12	18,138,694	12	25,031,397	12	30,758,581	12	41,730,167	GUGUAK PANJANG
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat Melalu Media Cetak Dan Elektronik	Publikasi/Tahun	24	24	11,450,000	24	11,791,210	27	12,455,055	27	17,187,976	29	21,120,585	29	28,654,298	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan program komunikasi, informasi dan media massa	'%	100	100	0	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi di masyarakat	bulan	12	12	52,678,000	12	54,247,804	12	57,301,956	12	79,076,699	12	97,169,448	12	131,829,790	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan Telekomunikasi	Persen	80	80	257,000,000	82	264,658,600	85	279,558,879	87	385,791,253	90	474,060,292	90	643,157,598	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					**1,012,000,000**		**1,042,157,600**		**1,100,831,073**		**1,519,146,881**		**1,866,727,687**		**2,532,589,453**	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	82.52	83	217,000,000	84	223,466,600	85	236,047,770	86	325,745,922	87	400,276,589	87	543,055,248	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang tersentuh pembiayaan	'%	30	33	45,000,000	36	46,341,000	39	48,949,998	42	67,550,998	45	83,006,666	45	112,615,144	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	unit	3	20	460,000,000	20	473,708,000	20	500,377,760	20	690,521,309	20	848,512,585	20	1,151,177,024	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
		Jumlah UMKM	unit	9236	9,236		9,246	0	9,256	0	9,266	0	9,276	0	9,276	0	
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi sehat	unit	11	12	290,000,000	13	298,642,000	14	315,455,545	15	435,328,652	16	534,931,847	16	725,742,037	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Penanaman Modal					**1,404,302,900**		**1,546,151,126**		**1,657,569,435**		**2,233,045,820**		**2,590,366,704**		**3,514,350,507**	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor	Perusahaan	70	80	32,806,100	90	33,783,722	100	35,685,745	110	49,246,329	120	60,513,889	120	82,099,193	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	persen	2500000000	10	114,286,000	10	117,691,723	10	124,317,767	10	171,558,518	10	210,811,107	10	286,007,429	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi	dokumen	0	0	0	1	100,000,000	1	130,000,000	1	125,000,000	1	0	1		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Lancarnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase	100	100	377,525,700	100	388,775,966	100	410,664,053	100	566,716,393	100	696,381,103	100	944,780,243	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	nilai mutu	7.2	7	293,324,000	7	302,065,055	8	319,071,318	8	440,318,419	8	541,063,273	8	734,060,542	GUGUAK PANJANG

	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	'%	80	85	586,361,100	90	603,834,661	90	637,830,552	90	880,206,162	90	1,081,597,332	90	1,467,403,100	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Kepemudaan dan Olahraga					**5,510,165,350**		**5,674,368,277**		**6,218,835,211**		**8,511,492,592**		**10,419,010,097**		**13,789,512,498**	
	Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah capaian program pembinaan kepemudaan	'%	0	100	931,257,100	100	959,008,562	100	1,013,000,744	100	1,397,941,026	100	1,717,789,933	100	2,330,525,602	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	'%	0	100	368,905,750	100	379,899,141	100	401,287,463	100	553,776,699	100	680,480,808	100	923,208,312	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai	unit	3	3	3,385,741,500	3	3,486,636,597	4	3,682,934,237	5	5,082,449,247	6	6,245,313,635	6	8,473,017,009	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	'%	100	100	824,261,000	100	848,823,978	100	896,612,768	100	1,237,325,619	100	1,520,425,721	100	2,062,761,576	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan	'%	100	0	0	20	0	40	145,000,000	60	155,000,000	80	165,000,000	80		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	persentase sekolah yang bebas narkoba	'%	0	0	0	0	0	20	80,000,000	40	85,000,000	60	90,000,000	60		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Statistik					**273,905,300**		**332,067,678**		**355,448,088**		**471,168,362**		**570,243,683**		**685,464,105**	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pemenuhan Data pembangunan Daerah	'%	66	70	244,655,500	80	251,946,234	85	266,130,807	90	367,260,513	100	451,289,719	100	612,264,762	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD	Persen	10	0	0	20	50,000,000	30	57,500,000	40	60,000,000	50	65,000,000	50		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi statistik daerah	persen	100	100	29,249,800	100	30,121,444	100	31,817,281	100	43,907,848	100	53,953,964	100	73,199,343	Dinas Pertanian
	Persandian					**1,105,865,000**		**1,126,995,977**		**1,680,325,351**		**1,918,948,984**		**1,627,391,711**		**2,494,633,435**	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan TIK OLeh SKPD dan Layanan Kepada Publik dalam mewujudkan smart city	Persen	80	81	531,000,000	82	535,000,000	83	1,055,000,000	84	1,056,000,000	85	567,000,000	85	1,056,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	'%	80	80	574,865,000	82	591,995,977	85	625,325,351	88	862,948,984	90	1,060,391,711	90	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
	Kebudayaan					**2,103,766,500**		**3,537,958,742**		**53,903,630,369**		**10,914,693,909**		**5,434,464,067**		**5,264,799,258**	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang dilaksanakan masyarakat	kali	4	52	363,480,000	57	374,311,704	59	395,385,453	61	545,631,925	63	670,472,510	63	909,630,054	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	sanggar	6	6	892,148,000	7	918,734,010	13	970,458,735	16	1,339,233,055	19	1,645,649,577	19	2,232,652,782	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	kali	0	1	301,845,000	1	310,839,981	1	328,340,272	1	453,109,575	1	556,781,046	1	755,384,845	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan Program Pengembangan nilai budaya	bln	0	12	75,000,000	12	77,235,000	12	81,583,331	12	112,584,996	12	138,344,443	12	187,691,906	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya aktifitas pengembangan nilai adat dan budaya di masyarakat	kegiatan	8	8	6,352,000	9	6,541,290	10	6,909,564	11	9,535,199	12	11,716,852	12	15,896,253	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya	kegiatan	0	0	0	3	374,500,000	4	426,200,000	4	426,660,000	4	448,872,000	4		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	'%	0	5	0	10	997,000,000	15	51,189,000,000	20	7,330,000,000	25	1,105,000,000	25		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Pengelolaan Kekayaan Budaya	'%	0	25	464,941,500	30	478,796,757	35	505,753,014	40	697,939,159	45	857,627,639	45	1,163,543,418	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Perpustakaan					**248,249,470**		**255,647,304**		**270,040,247**		**372,655,541**		**457,919,129**		**621,258,883**	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan	'%	100	100	248,249,470	100	255,647,304	100	270,040,247	100	372,655,541	100	457,919,129	100	621,258,883	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Kearsipan					**144,768,600**		**719,082,704**		**744,476,061**		**792,316,964**		**869,539,085**		**362,291,926**	
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan	'%	100	100	0	100	510,000,000	100	535,000,000	100	560,000,000	100	585,000,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi	'%	100	100	97,268,600	100	100,167,204	100	105,806,618	100	146,013,133	100	179,420,937	100	243,420,386	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan	'%	100	100	0	100	60,000,000	100	52,000,000	100	15,000,000	100	17,500,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	'%	100	100	47,500,000	100	48,915,500	100	51,669,443	100	71,303,831	100	87,618,147	100	118,871,541	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Urusan Pilihan					**17,072,716,450**		**90,330,664,833**		**21,369,169,063**		**25,287,153,307**		**29,066,361,184**		**21,474,337,618**	
	Kelautan dan Perikanan					**314,084,700**		**393,444,424**		**416,654,345**		**551,482,996**		**664,358,306**		**786,015,414**	
	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	persen	2	2	77,740,500	2	80,057,167	2	84,564,385	2	116,698,852	2	143,399,549	2	194,550,168	Dinas Pertanian
	Program Pengembangan Perikanan budidaya	Jumlah Produksi ikan	ton	355	351	220,693,700	352	227,270,372	353	240,065,694	354	331,290,658	355	407,089,961	355	552,298,950	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan	Meningkatnya kualitas SDM Perikanan		0	0	15,650,500	0	16,116,885	0	17,024,266	0	23,493,486	0	28,868,796	0	39,166,296	Dinas Pertanian

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Daya Saing Produk Perikanan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	persen	40	10	0	10	70,000,000	10	75,000,000	10	80,000,000	10	85,000,000	10		Dinas Pertanian
	Pariwisata					**10,534,131,950**		**83,527,230,515**		**14,181,642,393**		**15,391,866,502**		**16,920,336,758**		**5,111,145,779**	
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	meningkatnya jumlah PAD yang dikelola Dinas Pariwisata	rupiah (Milyar)	8041	10,086	8,491,764,000	10,091	81,424,000,000	10,097	11,960,000,000	10,112	12,326,000,000	10,127	13,153,000,000	10,127		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	meningkatnya jumlah wisatawan	orang	460905	483,950	2,042,367,950	508,148	2,103,230,515	533,555	2,221,642,393	560,233	3,065,866,502	588,245	3,767,336,758	588,245	5,111,145,779	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Pertanian					**1,190,397,400**		**1,225,871,243**		**1,294,887,793**		**1,786,945,155**		**2,195,798,206**		**2,979,039,427**	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi	kelompok	10	11	23,763,600	12	24,471,755	13	25,849,515	14	35,672,331	15	43,834,160	15	59,469,805	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	persen	0	5	64,257,200	5	66,172,065	5	69,897,552	5	96,458,621	5	118,528,354	5	160,807,418	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	2	2	370,088,300	2	381,116,931	2	402,573,815	2	555,551,864	2	682,662,131	2	926,167,713	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian	persen	2	2	155,835,200	2	160,479,089	2	169,514,062	2	233,929,405	2	287,452,453	2	389,986,743	Dinas Pertanian
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)	persen	70	73	306,133,100	78	315,255,866	80	333,004,772	82	459,546,585	85	564,690,844	85	766,116,067	Dinas Pertanian
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persen	100	100	139,098,800	100	143,243,944	100	151,308,578	100	208,805,838	100	256,580,614	100	348,102,919	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	1	2	43,233,800	2	44,522,167	2	47,028,765	2	64,899,696	2	79,748,747	2	108,195,124	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	kwintal/Ha	66.7	67	87,987,400	67	90,609,425	67	95,710,735	67	132,080,814	67	162,300,905	67	220,193,638	Dinas Pertanian
	Kehutanan					**61,740,800**		**63,580,676**		**67,160,268**		**92,681,170**		**113,886,621**		**154,509,979**	
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan luas lahan yang dihijaukan	persen	2	2	61,740,800	2	63,580,676	2	67,160,268	2	92,681,170	2	113,886,621	2	154,509,979	Dinas Pertanian
	Perdagangan					**4,397,357,000**		**4,528,398,239**		**4,783,347,059**		**6,601,018,942**		**8,111,332,076**		**11,004,644,227**	
	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat Pengawasan dan Ketertiban Pasar	'%	100	100	374,907,000	100	386,079,229	100	407,815,489	100	562,785,375	100	691,550,669	100	938,226,792	Dinas Pengelolaan Pasar

	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Tingkat Sarana dan Prasarana yang dikembangkan	$	100	100	2,393,450,000	100	2,464,774,810	100	2,603,541,632	100	3,592,887,452	100	4,414,940,101	100	5,989,749,235	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha	perusahaan	2553	300	554,000,000	350	570,509,200	400	602,628,868	450	831,627,838	500	1,021,904,287	500	1,386,417,546	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri	IKM	0	2	250,000,000	2	257,450,000	2	271,944,435	2	375,283,320	2	461,148,144	2	625,639,687	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL	lokasi	0	0	120,000,000	1	123,576,000	1	130,533,329	1	180,135,994	1	221,351,109	1	300,307,050	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah komoditas peredaran barang yang di awasi	jenis	20	20	705,000,000	20	726,009,000	20	766,883,307	22	1,058,298,963	22	1,300,437,766	22	1,764,303,917	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Industri					**1,765,402,000**		**1,818,010,980**		**1,920,364,998**		**2,650,103,697**		**3,256,447,423**		**4,418,022,218**	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM	'%	1	2	616,750,000	2	635,129,150	2	670,886,921	2	925,823,951	2	1,137,652,471	2	1,543,453,108	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang	unit usaha	0	5	886,125,000	10	912,531,525	15	963,907,050	20	1,330,191,729	30	1,634,539,596	30	2,217,579,870	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya nilai produksi IKM	'%	4.1113E+11	2	47,527,000	2	48,943,305	2	51,698,813	2	71,344,361	2	87,667,951	2	118,939,110	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal	&	476	7	30,000,000	7	30,894,000	7	32,633,332	7	45,033,998	7	55,337,777	7	75,076,762	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB	Persen	0.07	0	185,000,000	0	190,513,000	0	201,238,882	0	277,709,657	0	341,249,627	0	462,973,368	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah					**123,035,924,737**		**157,906,603,624**		**134,850,385,738**		**185,213,930,358**		**226,993,876,597**		**301,172,161,591**	
	Bidang Pemerintahan Umum					**31,985,962,425**		**34,595,144,105**		**36,787,467,918**		**50,031,842,727**		**61,020,343,823**		**80,046,750,073**	
	Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah Usulan Bantuan Kemasyarakatan yang direalisasikan	Proposal /Tahun	42	60	15,000,000	60	15,447,000	60	16,316,666	60	22,516,999	60	27,668,889	60	37,538,381	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	'%	80	80	71,440,000	82	73,568,912	85	77,710,842	88	107,240,962	90	131,777,694	90	178,782,797	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	'%	80	80	909,099,450	81	936,190,614	82	988,898,145	83	1,364,679,440	84	1,676,918,096	84	2,275,074,781	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH	'%	80	80	7,627,000,000	85	7,854,284,600	90	8,296,480,823	95	11,449,143,536	100	14,068,707,577	100	19,087,015,569	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	'%	80	80	245,162,000	81	252,467,828	82	266,681,766	83	368,020,837	84	452,224,005	84	613,532,308	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Kelembagaan Daerah	Peningkatan capaian kinerja daerah	peringkat nasional	74	62	721,357,000	55	742,853,439	50	784,676,087	40	1,082,853,000	35	1,330,609,767	35	1,805,238,271	Sekretariat Daerah

	Program Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur	Jumlah penyelenggaraan diklat peningkatan profesionalisme aparatur	kegiatan	0	0	0	8	800,000,000	8	812,000,000	8	834,000,000	8	836,000,000	8		Badan Kepegawaian Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	'%	100	100	559,000,000	100	575,658,200	100	608,067,757	100	839,133,504	100	1,031,127,250	100	1,398,930,340	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Meningkatnya Program peningkatan pelayanan kelurahan	'%	100	100	380,000,000	100	391,324,000	100	413,355,541	100	570,430,647	100	700,945,179	100	950,972,324	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	persen	80	82	734,210,800	84	756,090,282	86	798,658,165	88	1,102,148,267	90	1,354,319,791	90	1,837,405,660	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	orang	80	0	30,740,000	80	31,656,052	80	33,438,288	80	46,144,837	80	56,702,776	80	76,928,656	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan	'%	0	0	0	80	11,000,000	85	11,850,000	90	12,650,000	95	13,275,000	95		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kerjasama Tugas Sekretariat DPRD se Indonesia	'%	100	100	109,500,000	100	112,763,100	100	119,111,663	100	164,374,094	100	201,982,887	100	274,030,183	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terstandarisasinya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	'%	100	100	50,000,000	100	51,490,000	100	54,388,887	100	75,056,664	100	92,229,629	100	125,127,937	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemerintahan	'%	100	100	12,522,580,525	100	12,895,753,425	100	13,621,784,342	100	18,798,062,393	100	23,099,059,068	100	31,338,493,438	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	'%	100	100	36,000,000	100	37,072,800	100	39,159,999	100	54,040,798	100	66,405,333	100	90,092,115	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Perizinan	dokumen	2	2	12,666,000	1	13,043,447	1	13,777,793	1	19,013,354	1	23,363,610	1	31,697,409	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase capaian realisasi penyelenggaraan pemerintahan	'%	81	75	762,195,900	80	784,909,338	80	829,099,734	85	1,144,157,632	90	1,405,940,899	90	1,907,440,017	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kegiatan yang dikelola dengan sistem otomisasi	kegiatan	1	1	502,385,200	3	517,356,279	5	546,483,437	7	754,147,144	7	926,696,010	7	1,257,248,477	Badan Kepegawaian Daerah

	Peningkatan Kemitraan Legislatif dengan Eksekutif	Terjalinnya kemitraan yang sinergis antara legislatif dan eksekutif	'%	100	0	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukittinggi	persen	10	15	2,092,983,550	20	2,155,354,460	30	2,276,700,916	50	3,141,847,264	75	3,860,701,918	75	5,237,814,292	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ditindaklanjutinya Pengaduan Masyarakat Secara Komprehensif	'%	100	100	0	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Penyelenggaraan Adipura	Tingkat penilaian adipura	'%	71	75	0	77	0	80	325,000,000	85	325,000,000	87	325,000,000	87		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Penegasan Batas Wilayah	Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan	'%	80	80	671,985,500	81	692,010,668	82	730,970,869	83	1,008,739,799	84	1,239,539,464	84	1,681,683,191	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	'%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat inflasi daerah	'%	2.84	9	575,800,100	6	592,958,943	5	626,342,531	5	864,352,693	4	1,062,116,590	4	1,440,973,577	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rupiah (Milyar)	28892	31,758	3,021,888,000	34,927	3,111,940,262	38,432	3,287,142,499	42,311	4,536,256,649	46,605	5,574,152,170	46,605	7,562,452,249	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD`	'%	100	100	111,720,000	100	115,049,256	100	121,526,529	100	167,706,610	100	206,077,883	100	279,585,863	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Peningkatan program peningkatan kinerja LPMK dan RT	bln	12	12	63,000,000	12	64,877,400	12	68,529,998	12	94,571,397	12	116,209,332	12	157,661,201	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pembinaan PKK	Peningkatan program pembinaan PKK	bln	12	12	92,500,000	12	95,256,500	12	100,619,441	12	138,854,829	12	170,624,813	12	231,486,684	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan RT	'%	90	80	67,748,400	85	69,767,302	90	73,695,201	95	101,699,378	100	124,968,196	100	169,544,351	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Keuangan					**4,841,271,107**		**4,985,540,986**		**5,266,226,943**		**7,267,393,182**		**8,930,172,742**		**12,115,565,359**	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi	opini	3	3	4,841,271,107	3	4,985,540,986	3	5,266,226,943	3	7,267,393,182	3	8,930,172,742	3	12,115,565,359	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Bidang Pengawasan					**1,466,804,860**		**1,510,515,645**		**1,595,557,676**		**2,201,869,592**		**2,705,657,355**		**3,670,765,334**	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	'%	100	100	319,019,650	100	328,526,436	100	347,022,474	100	478,891,014	100	588,461,278	100	798,365,416	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	'%	100	100	1,147,785,210	100	1,181,989,209	100	1,248,535,202	100	1,722,978,578	100	2,117,196,077	100	2,872,399,918	Inspektorat Daerah

	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					**2,871,047,600**		**2,956,604,818**		**3,123,061,670**		**4,309,825,104**		**5,295,913,088**		**7,184,965,287**	
	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang difasilitasi mengikuti pendidikan kedinasan	orang	1500	550	2,545,102,500	550	2,620,946,555	530	2,768,505,846	535	3,820,538,067	550	4,694,677,177	550	6,369,268,525	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai sesuai standar kompetensi	'%	60	60	325,945,100	70	335,658,264	80	354,555,824	90	489,287,037	95	601,235,912	95	815,696,761	Badan Kepegawaian Daerah
	Perencanaan Pembangunan					**3,480,323,200**		**3,659,036,831**		**3,870,818,105**		**5,324,428,985**		**6,529,778,337**		**8,709,713,269**	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	'%	100	100	2,214,373,100	100	2,280,361,418	100	2,408,745,766	100	3,324,069,157	100	4,084,616,181	100	5,541,598,772	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	'%	100	100	84,875,500	100	87,404,790	100	92,325,680	100	127,409,438	100	156,560,717	100	212,405,925	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan sosial budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	'%	100	100	164,296,900	100	169,192,948	100	178,718,511	100	246,631,545	100	303,060,842	100	411,162,644	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	'%	100	100	574,865,000	100	591,995,977	100	625,325,351	100	862,948,984	100	1,060,391,711	100	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum	'%	60	100	125,647,500	100	129,391,796	100	136,676,554	100	188,613,644	100	231,768,446	100	314,440,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Pemenuhan Pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota	'%	60	65	316,265,200	70	325,689,903	75	344,026,244	80	474,756,217	85	583,380,440	85	791,472,243	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Peningkatan kualitas perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana	'%	50	50	0	60	75,000,000	65	85,000,000	70	100,000,000	75	110,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Bidang Penunjang Lainnya					**1,678,767,600**		**1,728,794,874**		**1,826,126,026**		**2,520,053,916**		**3,096,642,252**		**4,201,214,543**	
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan oleh masyarakat	kegiatan	5	5	416,710,000	5	429,127,958	5	453,287,862	5	625,537,250	5	768,660,172	5	1,042,841,256	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pendidikan politik masyarakat	Efektivitas kegiatan pendidikan politik masyarakat	kegiatan	7	3	1,088,151,500	3	1,120,578,415	3	1,183,666,979	3	1,633,460,432	3	2,007,196,178	3	2,723,163,055	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda	'% kegiatan	0	100	173,906,100	100	179,088,502	100	189,171,184	100	261,056,235	100	320,785,901	100	435,210,232	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Sekretariat					**76,711,747,945**		**108,470,966,363**		**82,381,127,400**		**113,558,516,851**		**139,415,369,000**		**185,243,187,726**	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	23,818,411,100	100	54,001,408,080	100	24,844,932,985	100	34,158,568,560	100	41,848,712,539	100	52,874,504,906	Perangkat Daerah

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam menggunakan atribut kepegawaian	'%	100	100	2,058,324,500	100	2,119,662,570	100	2,238,999,573	100	3,089,819,410	100	3,796,770,092	100	5,151,077,983	Perangkat Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	50,344,238,545	100	51,844,496,854	100	54,763,342,027	100	75,573,411,997	100	92,864,608,661	100	125,989,414,571	Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	490,773,800	100	505,398,859	100	533,852,815	100	736,716,885	100	905,277,708	100	1,228,190,266	Perangkat Daerah

Tabel 8.1
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2016-2021

No	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
						281,230,131,066		**485,352,347,325**		**460,195,028,495**		**518,090,548,396**		**583,503,208,749**		**657,726,329,558**	
	Urusan Wajib					**138,073,852,119**		**233,672,627,498**		**300,100,321,179**		**302,421,054,261**		**321,163,220,982**		**327,452,937,813**	
	Pendidikan					**21,044,806,653**		**21,671,941,891**		**22,892,072,220**		**31,591,059,663**		**38,819,094,114**		**52,665,864,985**	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	'% kegiatan	0	100	7,796,131,800	100	8,028,456,528	100	8,480,458,630	100	11,703,032,910	100	14,380,686,839	100	19,510,277,835	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya kegiatan untuk Pendidikan Anak Usia Dini	'%	0	100	505,396,950	100	520,457,779	100	549,759,552	100	758,668,182	100	932,251,462	100	1,264,785,558	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Menengah	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SMP	nilai	0	0	4,914,299,720	0	5,060,745,852	0	5,345,665,843	0	7,377,018,863	0	9,064,880,779	0	12,298,323,753	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Luar Biasa	Angka putus sekolah	'%	0.25	0	60,680,000	0	62,488,264	0	66,006,353	0	91,088,768	0	111,929,878	0	151,855,265	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan nilai rata rata 8 SNP SD	nilai	70	70	6,976,936,083	75	7,184,848,778	80	7,589,355,764	85	10,473,310,955	90	12,869,604,501	90	17,460,192,427	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pendidikan Non Formal	Optimalisasi pelayanan non formal	'%	0	100	291,362,100	100	300,044,691	100	316,937,207	100	437,373,345	100	537,444,367	100	729,150,772	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terwujudnya manjemen pelayanan pendidikan	'%	100	100	500,000,000	100	514,900,000	100	543,888,870	100	750,566,641	100	922,296,288	100	1,251,279,374	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Kesehatan					**19,744,900,125**		**89,115,160,717**		**70,545,369,265**		**34,475,549,586**		**45,154,904,131**		**38,554,570,535**	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	'%	85	85	0	86	120,000,000	87	150,000,000	88	160,000,000	90	180,000,000	90		Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Ratio tenaga paramedis per satuan penduduk (Bidan dan perawat)	tenaga paramedis/satuan penduduk	12.95	13	0	13	145,000,000	13	152,000,000	13	159,000,000	13	166,000,000	13		Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	'%	100	100	6,459,177,000	100	6,651,660,475	100	7,026,148,959	100	9,696,085,564	100	11,914,549,941	100	16,164,469,905	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	'%	5972	65	504,635,400	65	519,673,535	70	548,931,155	70	757,524,994	75	930,846,712	75	1,262,879,735	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada rumah sakit	'%	25	25	0	25	0	25	0	25	8,000,000,000	25	12,000,000,000	25		Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	unit	0	0	68,000,000	1	70,085,000,000	0	40,085,000,000	0	0	0	0	0		Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pengawasan dan pengendalian makanan yang memenuhi syarat	'%	90	90	38,000,000	100	39,132,400	100	41,335,554	100	57,043,065	100	70,094,518	100	95,097,232	Dinas Kesehatan

	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tingkat Pemenuhan Kualitas lingkungan	'%	40	40	208,000,000	41	214,198,400	42	226,257,770	43	312,235,722	44	383,675,256	44	520,532,220	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	'%	100	100	2,617,063,925	100	2,695,052,430	100	2,846,783,882	100	3,928,561,757	100	4,827,416,687	100	6,549,356,219	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD	'%	0	60	134,639,000	100	138,651,242	100	146,457,307	100	202,111,084	100	248,354,100	100	336,942,007	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ()	puskes mas	0	2	734,639,000	5	756,531,242	7	799,123,951	7	1,102,791,053	7	1,355,109,645	7	1,838,477,256	Dinas Kesehatan
	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan	'%	20	80	410,000,000	85	422,218,000	90	445,988,873	95	615,464,645	95	756,282,956	95	1,026,049,087	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	puskes mas	0	0	20,000,000	1	20,596,000	1	21,755,555	2	30,022,666	3	36,891,852	3	50,051,175	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas. Pustu dan Jaringannya yang dapat melaksanakan pelayanan kesehatan	'%	100	100	4,270,840,000	100	2,900,000,000	100	13,400,000,000	100	3,030,000,000	100	4,391,000,000	100		Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi lebih	'%	0	15	373,000,000	13	384,115,400	13	405,741,097	12	559,922,714	10	688,033,031	10	933,454,413	Dinas Kesehatan
	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan	'%	90	90	2,574,920,000	91	2,651,652,616	92	2,800,940,658	93	3,865,298,108	95	4,749,678,316	95	6,443,888,571	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	'%	83.8	85	193,564,000	86	199,332,207	87	210,554,610	88	290,565,362	90	357,046,717	90	484,405,281	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita	'%	57.57	60	744,750,000	70	766,943,550	80	810,122,472	90	1,117,969,011	90	1,373,760,321	90	1,863,780,627	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	100	100	368,671,800	100	379,658,220	100	401,032,977	100	553,425,509	100	680,049,265	100	922,622,838	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya pelaksanaan lingkungan sehat dikecamatan dan kelurahan	bln	0	0	25,000,000	0	25,745,000	0	27,194,444	0	37,528,332	0	46,114,814	0	62,563,969	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					**23,185,390,700**		**30,774,600,415**		**47,208,094,352**		**86,121,250,039**		**90,858,058,503**		**49,906,825,615**	
	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	'%	12.5	13	680,250,000	20	700,521,450	30	739,960,808	40	1,021,145,915	50	1,254,784,100	50	1,702,365,588	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	'%	65	65	2,300,000,000	70	360,000,000	75	7,700,000,000	80	23,365,000,000	85	23,046,500,000	85		Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	'%	10	10	228,000,000	20	234,794,400	40	248,013,325	60	342,258,388	75	420,567,107	75	570,583,394	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap	'%	98	98	4,050,000,000	99	4,170,690,000	100	4,405,499,847	100	6,079,589,789	100	7,470,599,933	100	10,135,362,928	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Pembangunan gedung	Persentase Gedung Negara dan Swasta yang Laik Fugsi	'%	0	2	150,000,000	5	154,470,000	20	163,166,661	30	225,169,992	40	276,688,886	40	375,383,812	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengendalian banjir	Pengurangan titik genangan	titik	8	8	257,522,800	6	265,196,979	4	280,127,569	2	386,576,046	0	475,024,645	0	644,465,936	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	'%	48	48	943,071,400	55	2,940,000,000	70	12,104,083,333	90	23,785,170,833	100	23,937,604,375	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	'%	45	45	2,500,000,000	50	2,574,500,000	60	2,719,444,350	70	3,752,833,203	80	4,611,481,440	80	6,256,396,869	Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik	'%	98	0	0	98	488,000,000	99	561,200,000	100	3,420,000,000	100	3,762,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang terpelihara / normalisasi	'%	47	0	0	55	1,000,000,000	65	1,100,000,000	70	1,210,000,000	75	1,331,000,000	75		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	'%	72	72	4,819,443,900	80	4,963,063,328	85	5,242,483,794	90	7,234,627,635	95	8,889,910,438	95	12,060,941,491	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	'%	40	50	197,000,000	60	202,870,600	65	214,292,215	70	295,723,256	75	363,384,737	75	493,004,073	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian pola ruang kota	'%	60	60	464,726,200	65	478,575,041	70	505,518,816	75	697,615,965	80	857,230,498	80	1,163,004,617	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	'%	40	50	862,629,700	70	888,336,065	75	938,349,386	80	1,294,922,152	85	1,591,200,340	85	2,158,781,502	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan pola ruang kota	'%	60	60	0	65	250,000,000	70	0	0	0	0	0	0		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat - alat berat ke PU an / Kebinamargaan	'%	30	0	0	50	4,000,000,000	65	4,050,000,000	80	4,105,000,000	90	1,665,500,000	90		Dinas Pekerjaan Umum
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan yang Berkondisi Baik	'%	85	85	1,009,556,000	88	1,039,640,769	90	1,098,172,544	93	1,515,478,111	95	1,862,219,503	95	2,526,473,199	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik	'%	85	85	4,723,190,700	88	4,863,941,783	90	5,137,781,705	93	7,090,138,753	95	8,712,362,500	95	11,820,062,204	Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan informasi / data base jalan	'%	20	0	0	40	1,200,000,000	0	0	80	300,000,000	100	330,000,000	100		Dinas Pekerjaan Umum
	Sosial					**6,876,572,350**		**7,481,494,206**		**8,010,182,330**		**11,052,651,615**		**13,414,474,305**		**17,209,026,289**	
	Program pembinaan anak terlantar	Tingkat anak terlantar yang terentaskan	'%	32	35	0	37	100,000,000	40	100,000,000	42	100,000,000	45	100,000,000	45		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil rehabilitasi yang memiliki kemandirian sosial	'%	60	65	1,696,650,000	68	1,747,210,170	70	1,845,578,103	73	2,546,897,782	75	3,129,627,994	75	4,245,966,299	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS aktif yang memiliki keahlian	'%	75	80	436,581,000	85	449,591,114	87	474,903,094	90	655,366,269	92	805,314,071	92	1,092,569,601	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tingkat penyandang cacat trauma yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	3	12	101,442,000	15	104,464,972	20	110,346,350	25	152,277,962	30	187,119,160	30	253,864,564	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Panti asuhan/jompo yang memenuhi standar pelayanan sosial	'%	25	25	3,000,000	50	3,089,400	75	3,263,333	75	4,503,400	100	5,533,778	100	7,507,676	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang meningkat kesejahteraannya	'%	1.5	2	4,096,295,100	2	4,218,364,694	2	4,455,858,626	3	6,149,084,904	3	7,555,995,530	3	10,251,219,136	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	tingkat partisipasi lembaga orsos yang menangani permasalahan sosial	'%	75	75	347,600,000	80	357,958,480	80	378,111,542	85	521,793,929	90	641,180,379	90	869,889,421	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga miskin	'%	60	60	57,151,250	61	58,854,357	62	62,167,858	63	85,791,643	64	105,420,771	64	143,024,361	Sekretariat Daerah
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Penurunan Angka Kemiskinan	'%	54	5	137,853,000	5	141,961,019	4	149,953,425	3	206,935,726	2	254,282,620	2	344,985,231	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Tingkat Eks Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya	'%	2	2	0	3	300,000,000	4	430,000,000	5	630,000,000	6	630,000,000	6		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					**5,973,641,000**		**6,151,655,502**		**21,497,993,707**		**23,967,231,315**		**11,018,933,840**		**14,949,387,541**	
	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana areal pemakaman yang memadai	'%	80	80	139,484,600	80	143,641,241	85	151,728,243	85	209,384,975	90	257,292,258	90	349,068,406	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	% Jalan dengan riol yang baik	'%	40	40	3,804,507,000	55	3,917,881,309	70	4,138,458,026	90	5,711,072,076	100	7,017,765,367	100	9,521,002,274	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Pembangunan Rusunawa yang layak huni	unit	0	0	0	0	0	1	15,000,000,000	1	15,000,000,000	0	0	0		Dinas Pekerjaan Umum

	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	'%	50	60	79,649,400	80	82,022,952	100	86,640,844	100	119,564,365	100	146,920,692	100	199,327,303	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	% Kesiap siangaan dan Tanggap terhadap Pencegahan Kebakatan Meningkat	'%	50	60	1,950,000,000	70	2,008,110,000	75	2,121,166,593	80	2,927,209,898	90	3,596,955,523	90	4,879,989,558	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					**14,971,579,700**		**15,447,732,775**		**16,315,751,130**		**22,504,336,560**		**27,646,464,765**		**37,467,257,746**	
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Terjaganya kerukunan antar dan intern umat bergama	'%	0	100	78,847,500	100	81,197,156	100	85,768,555	10	118,360,606	100	145,441,513	100	197,320,501	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Peningkatan program kualitas pemahaman dan pengamalan dan pembinaan kerukunan beragama	'%	0	100	128,000,000	100	131,814,400	100	139,235,551	100	192,145,060	100	236,107,850	100	320,327,520	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Meningkatnya aktifitas keagamaan dilingkungan masyarakat	kegiatan	3	5	194,215,000	6	200,002,607	7	211,262,754	8	291,542,600	9	358,247,547	9	486,034,447	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Kelompok masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan	Kelompok masyarakat/kelurahan	9	2	469,687,000	2	483,683,673	3	510,915,063	4	705,062,787	4	866,381,153	4	1,175,419,311	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	Jumlah event keagamaan ditengah masyarakat	'%	3	3	6,497,174,600	6	6,690,790,403	9	7,067,481,903	12	9,753,125,026	15	11,984,640,032	15	16,259,561,131	Sekretariat Daerah
	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, damai dan berkualitas	'%	0	0	12,636,000	0	13,012,553	0	13,745,160	85	18,968,320	85	23,308,272	85	31,622,332	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terpantaunya kegiatan orang asing, lembaga asing, dan non govenment organization serta deteksi dini dan penanggulangan konflik sosial	'%	100	100	237,889,000	100	244,978,092	100	258,770,359	100	357,103,095	100	438,808,283	100	595,331,198	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat keamananan dan kenyamanan lingkungan	'%	40	50	300,022,600	60	308,963,273	70	326,357,906	75	450,373,910	85	553,419,461	85	750,824,182	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Sistem kebencanaan	% Jumlah Data dan Informasi tentang Kebencanan terpenuhi	'%	25	100	74,970,000	100	77,204,106	100	81,550,697	100	112,539,962	100	138,289,105	100	187,616,829	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana	Kapasitas dan Kwalitas Petugas BPBD Meningkat dalam Penanggulanga Kebencanaan	'%	50	70	399,840,000	70	411,755,232	70	434,937,052	70	600,213,131	70	737,541,896	70	1,000,623,090	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	%Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meningkat	'%	50	60	2,155,520,000	70	2,219,754,496	75	2,344,726,674	80	3,235,722,810	90	3,976,056,189	90	5,394,315,432	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Peningkatan Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	bln	0	100	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Efektivitas kegiatan pemberantasan narkoba	Kegiatan	3	3	196,137,000	3	201,981,883	3	213,353,463	3	294,427,778	3	361,792,854	3	490,844,365	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Terdeteksinya potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas daerah	'%	100	100	427,527,500	100	440,267,820	100	465,054,898	100	641,775,759	100	788,614,053	100	1,069,912,685	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan	'%	20	20	124,280,900	30	127,984,471	40	135,189,997	50	186,562,195	60	229,247,625	60	311,020,253	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda	kasus	722	650	3,239,993,800	600	3,336,545,615	500	3,524,393,133	400	4,863,662,524	250	5,976,468,510	250	8,108,274,827	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat	'%	100	100	76,668,300	100	78,953,015	100	83,398,070	100	115,089,337	100	141,421,777	100	191,866,925	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	Tingkat pelaksanaan peringatan hari-hari besar kenegaraan	'%	100	100	208,464,500	100	214,676,742	100	226,763,043	100	312,932,999	100	384,532,069	100	521,694,658	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Peningkatan program pemberrantasan penyakit masyarakat	bln	0	0	42,000,000	0	43,251,600	0	45,686,665	0	63,047,598	0	77,472,888	0	105,107,467	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Mneingkatnya program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	bln	0	0	41,000,000	0	42,221,800	0	44,598,887	0	61,546,465	0	75,628,296	0	102,604,909	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas per tahun	persen	0	10	18,377,500	10	18,925,150	10	19,990,635	10	27,587,077	10	33,899,000	10	45,990,773	GUGUAK PANJANG
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Temuan Peristiwa Gangguan Ketertiban dan Keamanan disertai laporan tertulis	Laporan /Tahun	22	15	48,328,500	12	49,768,689	10	52,570,667	7	72,547,520	5	89,146,392	5	120,944,910	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Tenaga Kerja					**1,327,649,501**		**1,367,213,456**		**1,444,187,574**		**1,992,978,852**		**2,448,972,413**		**3,322,520,873**	
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan	Persentase pegawai teknis ketenagakerjaan yang berkualitas	'%	66	77	34,000,000	88	35,013,200	90	36,984,443	95	51,038,532	100	62,716,148	100	85,086,997	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat tenaga kerja yang memiliki keahlian	'%	52	55	657,579,500	57	677,175,369	60	715,300,342	65	987,114,472	65	1,212,966,264	65	1,645,631,330	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap UU ketenagakerjaan	'%	5	5	581,070,001	6	598,385,887	7	632,075,012	8	872,263,517	9	1,071,837,410	9	1,454,161,814	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat peningkatan penempatan pencari kerja	'%	8	15	55,000,000	17	56,639,000	19	59,827,776	21	82,562,330	23	101,452,592	23	137,640,731	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					**697,540,000**		**918,326,692**		**1,268,768,485**		**1,572,100,509**		**1,816,677,105**		**1,745,634,829**	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya pengarusutamaan gender di berbagai bidang	'%	70	70	345,140,000	70	355,425,172	70	375,435,609	70	518,101,141	70	636,642,682	70	863,733,126	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penurunan Kasus KDRT dan TPPO	'%	50	50	0	50	0	50	200,000,000	50	205,000,000	50	210,000,000	50		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kesejahteraan perempuan	'%	0	35	0	30	200,000,000	25	310,000,000	20	320,000,000	15	320,000,000	15		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tingkat kemiskinan menurun menjadi 2.84 %	'%	4.58	4	352,400,000	4	362,901,520	3	383,332,876	3	528,999,368	3	650,034,424	3	881,901,703	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Pangan					**680,581,800**		**700,863,138**		**740,321,732**		**1,021,643,991**		**1,255,396,136**		**1,703,195,937**	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	2400	2,400	387,248,000	2,400	398,787,990	2,400	421,239,754	2,400	581,310,861	2,400	714,314,786	2,400	969,110,870	Kantor Ketahanan Pangan
		Ketersediaan protein perkapita	gr/kap/hr	63	63		63	0	63	0	63	0	63	0	63	0	
	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	84.1	84	293,333,800	84	302,075,147	85	319,081,978	85	440,333,130	85	541,081,350	85	734,085,067	Kantor Ketahanan Pangan
	Pertanahan					**743,508,000**		**2,761,209,084**		**797,507,555**		**3,044,540,426**		**1,249,724,076**		**3,636,963,704**	
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunan tanah	'%	80	80	591,580,000	81	609,209,084	82	643,507,555	83	888,040,426	84	1,091,224,076	84	1,480,463,704	Sekretariat Daerah
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah	'%	90	90	151,928,000	91	2,152,000,000	92	154,000,000	93	2,156,500,000	94	158,500,000	94	2,156,500,000	Sekretariat Daerah
	Lingkungan Hidup					**8,509,414,250**		**10,725,114,795**		**15,978,684,758**		**19,918,084,965**		**20,766,646,806**		**19,793,773,821**	
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	Persentase	8	10	1,233,986,000	12	1,270,758,783	13	1,342,302,502	14	1,852,377,453	15	2,276,201,414	15	3,088,122,459	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH/ Non Hijau	'%	7.78	8	600,000,000	8	2,000,000,000	8	5,700,000,000	9	6,420,000,000	9	4,662,000,000	9		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase kelompok masyarakat yang memahami pengelolaan RTH	'%	10	20	0	30	0	40	110,000,000	50	115,000,000	60	120,000,000	60		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemenuhan RTH	'%	20	20	0	22	100,000,000	25	120,000,000	28	140,000,000	30	0	30		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan/pengelolaan persampahan	Persen	90	90	5,799,341,500	90	5,972,161,877	100	6,308,394,590	100	8,705,584,535	100	10,697,422,276	100	14,513,192,802	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses dan informasi lingkungan hidup	'%	50	60	451,509,800	70	464,964,792	80	491,142,310	90	677,776,388	95	832,851,625	95	1,129,929,800	Kantor Lingkungan Hidup

	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	'%	80	70	424,576,950	60	437,229,343	50	461,845,355	40	637,346,590	30	783,171,490	30	1,062,528,760	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan pengendalian	'%	50	55	0	60	380,000,000	65	1,055,000,000	70	1,055,000,000	75	1,055,000,000	75		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	'%	0	0	0	50	0	55	270,000,000	60	175,000,000	65	180,000,000	65		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Informasi Lingkungan Hidup	'%	0	0	0	60	100,000,000	65	120,000,000	70	140,000,000	75	160,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					**662,010,550**		**938,838,464**		**859,880,340**		**1,121,132,069**		**1,335,310,746**		**1,656,720,293**	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat capaian pelayanan administrasi kependudukan	'%	67	70	662,010,550	75	681,738,464	80	720,120,340	85	993,766,069	90	1,221,139,746	90	1,656,720,293	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi dan kelengkapan data kependudukan	'%	0	0	0	85	257,100,000	90	139,760,000	95	127,366,000	100	114,171,000	100		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					**8,422,188,700**		**8,673,169,923**		**9,161,469,390**		**12,642,827,758**		**15,535,506,749**		**21,077,022,007**	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tiingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	'%	15	20	497,375,200	25	512,196,981	30	541,033,671	34	746,626,466	40	917,454,601	40	1,244,710,658	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	'%	15	20	1,898,758,100	25	1,955,341,091	30	2,065,426,795	34	2,850,288,977	40	3,502,435,095	40	4,751,753,693	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya peren perempuan dipedesaan	'%	100	100	184,000,000	100	189,483,200	100	200,151,104	100	276,208,524	100	339,405,034	100	460,470,810	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan program keberdayaan masyarakat pedesaan	bln	12	12	151,000,000	12	155,499,800	12	164,254,439	12	226,671,125	12	278,533,479	12	377,886,371	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	'%	100	100	640,000,000	100	659,072,000	100	696,177,754	100	960,725,300	100	1,180,539,249	100	1,601,637,599	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertahunnya	persen	802661	3	581,898,000	3	599,238,560	3	632,975,691	3	873,506,454	3	1,073,364,731	3	1,456,233,930	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kenaikan nilai swadaya masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan per tahun	'%	5	7	180,868,900	9	186,258,793	12	196,745,163	15	271,508,325	17	333,629,430	17	452,635,048	MANDIANGIN KOTO SELAYAN

	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Tingkat partisipasi perempuan dalam pencapaian tujuan program pemerintah	'%	100	80	341,078,000	85	351,242,124	90	371,017,056	95	512,003,537	100	629,149,947	100	853,567,733	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatkanya persentase aktifitas guna peningkatan keberdayaan masyarakat yang dilaksanakn oleh pemerintah maupun masyarakat	Persen	10	10	543,400,500	10	559,593,835	10	591,098,968	10	815,716,576	10	1,002,352,528	10	1,359,891,675	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase keberdayaan masyarakat dalam mendukung program pemerintah	'%	80	80	615,303,000	85	633,639,029	85	669,312,907	90	923,651,811	90	1,134,983,346	90	1,539,831,905	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	'%	15	15	2,180,510,600	20	2,245,489,816	25	2,371,910,893	30	3,273,237,032	34	4,022,153,665	34	5,456,855,877	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	'%	20	25	193,442,900	30	199,207,498	35	210,422,881	40	290,383,575	45	356,823,337	45	484,102,222	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya program peningkatan usaha ekonomi masyarakat	bln	0	0	195,538,000	0	201,365,032	0	212,701,884	0	293,528,600	0	360,687,943	0	489,345,332	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbinanya kelompok/ pelaku usaha kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat	pelaku	0	0	141,194,000	90	145,401,581	120	153,587,690	90	211,951,013	120	260,445,404	120	353,346,280	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tingkat perkembangan potensi usaha ekonomi masyarakat	'%	3	3	77,821,500	5	80,140,581	6	84,652,495	8	116,820,444	10	143,548,961	10	194,752,876	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					**2,324,370,650**		**2,414,636,895**		**2,733,398,653**		**3,709,190,141**		**4,312,516,845**		**5,816,874,103**	
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	100 % data akurat	'%	80	85	115,152,000	88	118,583,530	90	125,259,782	93	172,858,500	95	212,408,524	95	288,174,645	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program pelayanan kontrasepsi	Tercapainya program KB	'%	75	75	0	75	21,000,000	80	160,000,000	80	170,000,000	80	25,000,000	80		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 % Kelompok Kerja paham fungsi keluarga	'%	100	100	0	100	0	100	45,000,000	100	50,000,000	100	0	100		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75 % sekolah dan perguruan tinggi memiliki PIK R/M	'%	25	35	209,025,650	45	215,254,614	55	227,373,449	65	313,775,360	75	385,567,162	75	523,098,969	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Keluarga Berencana	Jumlah PUS ber KB 80 %	'%	1.77	2	1,463,946,000	2	1,507,571,591	2	1,592,447,871	1	2,197,578,062	1	2,700,383,923	1	3,663,610,869	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Peningkatan Tingkat Tahapan Kelompok Kegiatan	tingkat	0	0	71,247,000	0	73,370,161	0	77,500,901	0	106,951,243	0	131,421,687	0	178,299,803	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase Kelurahan yang memiliki WPA (Warga Peduli AIDS)	'%	8	24	465,000,000	24	478,857,000	30	505,816,649	40	698,026,976	50	857,735,548	50	1,163,689,818	Dinas Kesehatan
	Perhubungan					**6,605,945,000**		**14,602,802,161**		**8,810,799,923**		**14,216,403,893**		**13,435,277,104**		**16,531,765,447**	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berwawasan lingkungan	Persen	70	0	0	72	7,800,000,000	73	1,625,000,000	74	4,300,000,000	75	1,250,000,000	75		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Optimalisasi Peningkatan Pengoperasian Kendaraan	Persen	80	81	180,000,000	82	185,364,000	83	195,799,993	84	270,203,991	85	332,026,664	85	450,460,575	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pembangunan sarana dan fasilitas lalu ,intas yang memadai dan berwawasan lingkungan	Persen	70	71	5,351,566,000	72	5,511,042,667	73	5,821,314,369	74	8,033,413,829	75	9,871,458,913	75	13,392,608,308	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Terwujudnya Angkutan Yang Selamat, Aman, Nyaman, Terjangkau dan Terpadu	Persen	80	81	51,379,000	82	52,910,094	83	55,888,933	84	77,126,727	85	94,773,322	85	128,578,966	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terciptanya Lalu Lintas Yang Aman, Tertib dan Lancar	Persen	70	71	763,000,000	72	785,737,400	73	829,974,416	74	1,145,364,694	75	1,407,424,135	75	1,909,452,325	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas	Persen	70	71	260,000,000	72	267,748,000	73	282,822,212	74	390,294,653	75	479,594,070	75	650,665,274	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Komunikasi dan Informatika					**4,500,730,020**		**5,693,437,975**		**5,904,683,933**		**6,736,603,827**		**8,259,601,183**		**12,150,634,024**	
	Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)	Kemudahan mendapatkan informasi melalui media elektronik menuju smart city	Persen	80	80	81,000,000	82	1,135,000,000	85	1,090,000,000	87	95,000,000	90	100,000,000	90	1,090,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Persen	80	80	142,000,000	82	146,231,600	85	154,464,439	87	213,160,926	90	261,932,146	90	355,363,342	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Persentase tingkat ketercapaian penyebaran informasi Pemda Bukittinggi kepada masyarakat	'%	80	80	2,485,337,800	83	2,559,400,866	85	2,703,495,135	88	3,730,823,287	90	4,584,435,655	90	6,219,703,853	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase tingkat pencapaian pelayanan informasi kepada publik	'%	80	80	419,853,220	81	432,364,846	82	456,706,987	83	630,255,642	84	774,458,133	84	1,050,707,348	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya sarana dan prasarana TIK menuju smart city	Persen	80	80	1,034,736,000	82	1,065,571,133	85	1,125,562,788	87	1,553,276,647	90	1,908,666,344	90	2,589,487,628	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat	publikasi	0	12	16,675,000	12	17,171,915	12	18,138,694	12	25,031,397	12	30,758,581	12	41,730,167	GUGUAK PANJANG
	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Disebarluaskan Kepada Masyarakat Melalu Media Cetak Dan Elektronik	Publikasi/Tahun	24	24	11,450,000	24	11,791,210	27	12,455,055	27	17,187,976	29	21,120,585	29	28,654,298	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan program komunikasi, informasi dan media massa	'%	100	100	0	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100		AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan penyebaran informasi di masyarakat	bulan	12	12	52,678,000	12	54,247,804	12	57,301,956	12	79,076,699	12	97,169,448	12	131,829,790	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan Telekomunikasi	Persen	80	80	257,000,000	82	264,658,600	85	279,558,879	87	385,791,253	90	474,060,292	90	643,157,598	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					**1,012,000,000**		**1,042,157,600**		**1,100,831,073**		**1,519,146,881**		**1,866,727,687**		**2,532,589,453**	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	persen	82.52	83	217,000,000	84	223,466,600	85	236,047,770	86	325,745,922	87	400,276,589	87	543,055,248	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang tersentuh pembiayaan	'%	30	33	45,000,000	36	46,341,000	39	48,949,998	42	67,550,998	45	83,006,666	45	112,615,144	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	unit	3	20	460,000,000	20	473,708,000	20	500,377,760	20	690,521,309	20	848,512,585	20	1,151,177,024	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
		Jumlah UMKM	unit	9236	9,236		9,246	0	9,256	0	9,266	0	9,276	0	9,276	0	
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi sehat	unit	11	12	290,000,000	13	298,642,000	14	315,455,545	15	435,328,652	16	534,931,847	16	725,742,037	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Penanaman Modal					**1,404,302,900**		**1,546,151,126**		**1,657,569,435**		**2,233,045,820**		**2,590,366,704**		**3,514,350,507**	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Jumlah Investor	Perusahaan	70	80	32,806,100	90	33,783,722	100	35,685,745	110	49,246,329	120	60,513,889	120	82,099,193	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	persen	2500000000	10	114,286,000	10	117,691,723	10	124,317,767	10	171,558,518	10	210,811,107	10	286,007,429	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya data dan informasi potensi dan peluang investasi	dokumen	0	0	0	1	100,000,000	1	130,000,000	1	125,000,000	1	0	1		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Lancarnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase	100	100	377,525,700	100	388,775,966	100	410,664,053	100	566,716,393	100	696,381,103	100	944,780,243	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	nilai mutu	7.2	7	293,324,000	7	302,065,055	8	319,071,318	8	440,318,419	8	541,063,273	8	734,060,542	GUGUAK PANJANG

	Porgram Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat	Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	'%	80	85	586,361,100	90	603,834,661	90	637,830,552	90	880,206,162	90	1,081,597,332	90	1,467,403,100	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Kepemudaan dan Olahraga					**5,510,165,350**		**5,674,368,277**		**6,218,835,211**		**8,511,492,592**		**10,419,010,097**		**13,789,512,498**	
	Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah capaian program pembinaan kepemudaan	'%	0	100	931,257,100	100	959,008,562	100	1,013,000,744	100	1,397,941,026	100	1,717,789,933	100	2,330,525,602	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	'%	0	100	368,905,750	100	379,899,141	100	401,287,463	100	553,776,699	100	680,480,808	100	923,208,312	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai	unit	3	3	3,385,741,500	3	3,486,636,597	4	3,682,934,237	5	5,082,449,247	6	6,245,313,635	6	8,473,017,009	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	'%	100	100	824,261,000	100	848,823,978	100	896,612,768	100	1,237,325,619	100	1,520,425,721	100	2,062,761,576	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang telah memiliki pelatihan kewirausahaan	'%	100	0	0	20	0	40	145,000,000	60	155,000,000	80	165,000,000	80		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	persentase sekolah yang bebas narkoba	'%	0	0	0	0	0	20	80,000,000	40	85,000,000	60	90,000,000	60		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Statistik					**273,905,300**		**332,067,678**		**355,448,088**		**471,168,362**		**570,243,683**		**685,464,105**	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pemenuhan Data pembangunan Daerah	'%	66	70	244,655,500	80	251,946,234	85	266,130,807	90	367,260,513	100	451,289,719	100	612,264,762	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD	Persen	10	0	0	20	50,000,000	30	57,500,000	40	60,000,000	50	65,000,000	50		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi statistik daerah	persen	100	100	29,249,800	100	30,121,444	100	31,817,281	100	43,907,848	100	53,953,964	100	73,199,343	Dinas Pertanian
	Persandian					**1,105,865,000**		**1,126,995,977**		**1,680,325,351**		**1,918,948,984**		**1,627,391,711**		**2,494,633,435**	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan TIK OLeh SKPD dan Layanan Kepada Publik dalam mewujudkan smart city	Persen	80	81	531,000,000	82	535,000,000	83	1,055,000,000	84	1,056,000,000	85	567,000,000	85	1,056,000,000	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	'%	80	80	574,865,000	82	591,995,977	85	625,325,351	88	862,948,984	90	1,060,391,711	90	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
	Kebudayaan					**2,103,766,500**		**3,537,958,742**		**53,903,630,369**		**10,914,693,909**		**5,434,464,067**		**5,264,799,258**	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang dilaksanakan masyarakat	kali	4	52	363,480,000	57	374,311,704	59	395,385,453	61	545,631,925	63	670,472,510	63	909,630,054	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	sanggar	6	6	892,148,000	7	918,734,010	13	970,458,735	16	1,339,233,055	19	1,645,649,577	19	2,232,652,782	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama seni budaya	kali	0	1	301,845,000	1	310,839,981	1	328,340,272	1	453,109,575	1	556,781,046	1	755,384,845	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan Program Pengembangan nilai budaya	bln	0	12	75,000,000	12	77,235,000	12	81,583,331	12	112,584,996	12	138,344,443	12	187,691,906	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya aktifitas pengembangan nilai adat dan budaya di masyarakat	kegiatan	8	8	6,352,000	9	6,541,290	10	6,909,564	11	9,535,199	12	11,716,852	12	15,896,253	GUGUAK PANJANG
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya	kegiatan	0	0	0	3	374,500,000	4	426,200,000	4	426,660,000	4	448,872,000	4		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	'%	0	5	0	10	997,000,000	15	51,189,000,000	20	7,330,000,000	25	1,105,000,000	25		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Pengelolaan Kekayaan Budaya	'%	0	25	464,941,500	30	478,796,757	35	505,753,014	40	697,939,159	45	857,627,639	45	1,163,543,418	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Perpustakaan					**248,249,470**		**255,647,304**		**270,040,247**		**372,655,541**		**457,919,129**		**621,258,883**	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	tingkat terlaksananya pengembangan budaya baca dan pemeliharaan perpustakaan	'%	100	100	248,249,470	100	255,647,304	100	270,040,247	100	372,655,541	100	457,919,129	100	621,258,883	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Kearsipan					**144,768,600**		**719,082,704**		**744,476,061**		**792,316,964**		**869,539,085**		**362,291,926**	
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan	'%	100	100	0	100	510,000,000	100	535,000,000	100	560,000,000	100	585,000,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	tingkat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan informasi	'%	100	100	97,268,600	100	100,167,204	100	105,806,618	100	146,013,133	100	179,420,937	100	243,420,386	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	tingkat pelaksanaan perbaikan sistem administrasi kearsipan	'%	100	100	0	100	60,000,000	100	52,000,000	100	15,000,000	100	17,500,000	100		Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	tingkat tercapainya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	'%	100	100	47,500,000	100	48,915,500	100	51,669,443	100	71,303,831	100	87,618,147	100	118,871,541	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Urusan Pilihan					**17,072,716,450**		**90,330,664,833**		**21,369,169,063**		**25,287,153,307**		**29,066,361,184**		**21,474,337,618**	
	Kelautan dan Perikanan					**314,084,700**		**393,444,424**		**416,654,345**		**551,482,996**		**664,358,306**		**786,015,414**	
	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan	persen	2	2	77,740,500	2	80,057,167	2	84,564,385	2	116,698,852	2	143,399,549	2	194,550,168	Dinas Pertanian
	Program Pengembangan Perikanan budidaya	Jumlah Produksi ikan	ton	355	351	220,693,700	352	227,270,372	353	240,065,694	354	331,290,658	355	407,089,961	355	552,298,950	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan	Meningkatnya kualitas SDM Perikanan		0	0	15,650,500	0	16,116,885	0	17,024,266	0	23,493,486	0	28,868,796	0	39,166,296	Dinas Pertanian

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Daya Saing Produk Perikanan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	persen	40	10	0	10	70,000,000	10	75,000,000	10	80,000,000	10	85,000,000	10		Dinas Pertanian
	Pariwisata					**10,534,131,950**		**83,527,230,515**		**14,181,642,393**		**15,391,866,502**		**16,920,336,758**		**5,111,145,779**	
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	meningkatnya jumlah PAD yang dikelola Dinas Pariwisata	rupiah (Milyar)	8041	10,086	8,491,764,000	10,091	81,424,000,000	10,097	11,960,000,000	10,112	12,326,000,000	10,127	13,153,000,000	10,127		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	meningkatnya jumlah wisatawan	orang	460905	483,950	2,042,367,950	508,148	2,103,230,515	533,555	2,221,642,393	560,233	3,065,866,502	588,245	3,767,336,758	588,245	5,111,145,779	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Pertanian					**1,190,397,400**		**1,225,871,243**		**1,294,887,793**		**1,786,945,155**		**2,195,798,206**		**2,979,039,427**	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbentuknya kelompok UP3HP aktif Kota Bukittinggi	kelompok	10	11	23,763,600	12	24,471,755	13	25,849,515	14	35,672,331	15	43,834,160	15	59,469,805	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Pendapatan Petani	persen	0	5	64,257,200	5	66,172,065	5	69,897,552	5	96,458,621	5	118,528,354	5	160,807,418	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	2	2	370,088,300	2	381,116,931	2	402,573,815	2	555,551,864	2	682,662,131	2	926,167,713	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil hasil pertanian	persen	2	2	155,835,200	2	160,479,089	2	169,514,062	2	233,929,405	2	287,452,453	2	389,986,743	Dinas Pertanian
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tercapainya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (zoonosis)	persen	70	73	306,133,100	78	315,255,866	80	333,004,772	82	459,546,585	85	564,690,844	85	766,116,067	Dinas Pertanian
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persen	100	100	139,098,800	100	143,243,944	100	151,308,578	100	208,805,838	100	256,580,614	100	348,102,919	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pemasaran produksi peternakan unggulan daerah	Persen	1	2	43,233,800	2	44,522,167	2	47,028,765	2	64,899,696	2	79,748,747	2	108,195,124	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	kwintal/Ha	66.7	67	87,987,400	67	90,609,425	67	95,710,735	67	132,080,814	67	162,300,905	67	220,193,638	Dinas Pertanian
	Kehutanan					**61,740,800**		**63,580,676**		**67,160,268**		**92,681,170**		**113,886,621**		**154,509,979**	
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan luas lahan yang dihijaukan	persen	2	2	61,740,800	2	63,580,676	2	67,160,268	2	92,681,170	2	113,886,621	2	154,509,979	Dinas Pertanian
	Perdagangan					**4,397,357,000**		**4,528,398,239**		**4,783,347,059**		**6,601,018,942**		**8,111,332,076**		**11,004,644,227**	
	Program Pengawasan dan Penertiban Pasar	Tingkat Pengawasan dan Ketertiban Pasar	'%	100	100	374,907,000	100	386,079,229	100	407,815,489	100	562,785,375	100	691,550,669	100	938,226,792	Dinas Pengelolaan Pasar

	Program Peningkatan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Tingkat Sarana dan Prasarana yang dikembangkan	$	100	100	2,393,450,000	100	2,464,774,810	100	2,603,541,632	100	3,592,887,452	100	4,414,940,101	100	5,989,749,235	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha	perusahaan	2553	300	554,000,000	350	570,509,200	400	602,628,868	450	831,627,838	500	1,021,904,287	500	1,386,417,546	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah perusahaan yang melakukan pemasaran ke luar negeri	IKM	0	2	250,000,000	2	257,450,000	2	271,944,435	2	375,283,320	2	461,148,144	2	625,639,687	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tertatanya lokasi PKL	lokasi	0	0	120,000,000	1	123,576,000	1	130,533,329	1	180,135,994	1	221,351,109	1	300,307,050	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah komoditas peredaran barang yang di awasi	jenis	20	20	705,000,000	20	726,009,000	20	766,883,307	22	1,058,298,963	22	1,300,437,766	22	1,764,303,917	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Industri					**1,765,402,000**		**1,818,010,980**		**1,920,364,998**		**2,650,103,697**		**3,256,447,423**		**4,418,022,218**	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penambahan nilai penjualan IKM	'%	1	2	616,750,000	2	635,129,150	2	670,886,921	2	925,823,951	2	1,137,652,471	2	1,543,453,108	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang	unit usaha	0	5	886,125,000	10	912,531,525	15	963,907,050	20	1,330,191,729	30	1,634,539,596	30	2,217,579,870	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya nilai produksi IKM	'%	4.1113E+11	2	47,527,000	2	48,943,305	2	51,698,813	2	71,344,361	2	87,667,951	2	118,939,110	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri non formal menjadi industri formal	&	476	7	30,000,000	7	30,894,000	7	32,633,332	7	45,033,998	7	55,337,777	7	75,076,762	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Peningkatan pendapatan anggota KUB	Persen	0.07	0	185,000,000	0	190,513,000	0	201,238,882	0	277,709,657	0	341,249,627	0	462,973,368	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah					**123,214,397,497**		**158,394,388,877**		**135,604,524,433**		**186,075,341,758**		**227,981,186,125**		**301,618,800,158**	
	Bidang Pemerintahan Umum					**31,985,962,425**		**34,595,144,105**		**36,787,467,918**		**50,031,842,727**		**61,020,343,823**		**80,046,750,073**	
	Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah Usulan Bantuan Kemasyarakatan yang direalisasikan	Proposal /Tahun	42	60	15,000,000	60	15,447,000	60	16,316,666	60	22,516,999	60	27,668,889	60	37,538,381	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Pemenuhan struktur organisasi pemerintah daerah	'%	80	80	71,440,000	82	73,568,912	85	77,710,842	88	107,240,962	90	131,777,694	90	178,782,797	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang - undangan	'%	80	80	909,099,450	81	936,190,614	82	988,898,145	83	1,364,679,440	84	1,676,918,096	84	2,275,074,781	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH	'%	80	80	7,627,000,000	85	7,854,284,600	90	8,296,480,823	95	11,449,143,536	100	14,068,707,577	100	19,087,015,569	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama antar daerah	'%	80	80	245,162,000	81	252,467,828	82	266,681,766	83	368,020,837	84	452,224,005	84	613,532,308	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Kelembagaan Daerah	Peningkatan capaian kinerja daerah	peringkat nasional	74	62	721,357,000	55	742,853,439	50	784,676,087	40	1,082,853,000	35	1,330,609,767	35	1,805,238,271	Sekretariat Daerah

	Program Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur	Jumlah penyelenggaraan diklat peningkatan profesionalisme aparatur	kegiatan	0	0	0	8	800,000,000	8	812,000,000	8	834,000,000	8	836,000,000	8		Badan Kepegawaian Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	'%	100	100	559,000,000	100	575,658,200	100	608,067,757	100	839,133,504	100	1,031,127,250	100	1,398,930,340	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Meningkatnya Program peningkatan pelayanan kelurahan	'%	100	100	380,000,000	100	391,324,000	100	413,355,541	100	570,430,647	100	700,945,179	100	950,972,324	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	persen	80	82	734,210,800	84	756,090,282	86	798,658,165	88	1,102,148,267	90	1,354,319,791	90	1,837,405,660	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	Tingkat profesionalisme dan kinerja aparatur	orang	80	0	30,740,000	80	31,656,052	80	33,438,288	80	46,144,837	80	56,702,776	80	76,928,656	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Peran Kehumasan	Persentase keberhasilan mediasi masyarakat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian informasi aktual dan transparan	'%	0	0	0	80	11,000,000	85	11,850,000	90	12,650,000	95	13,275,000	95		MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kerjasama Tugas Sekretariat DPRD se Indonesia	'%	100	100	109,500,000	100	112,763,100	100	119,111,663	100	164,374,094	100	201,982,887	100	274,030,183	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terstandarisasinya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	'%	100	100	50,000,000	100	51,490,000	100	54,388,887	100	75,056,664	100	92,229,629	100	125,127,937	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pemerintahan	'%	100	100	12,522,580,525	100	12,895,753,425	100	13,621,784,342	100	18,798,062,393	100	23,099,059,068	100	31,338,493,438	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	'%	100	100	36,000,000	100	37,072,800	100	39,159,999	100	54,040,798	100	66,405,333	100	90,092,115	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Perizinan	dokumen	2	2	12,666,000	1	13,043,447	1	13,777,793	1	19,013,354	1	23,363,610	1	31,697,409	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase capaian realisasi penyelenggaraan pemerintahan	'%	81	75	762,195,900	80	784,909,338	80	829,099,734	85	1,144,157,632	90	1,405,940,899	90	1,907,440,017	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kegiatan yang dikelola dengan sistem otomisasi	kegiatan	1	1	502,385,200	3	517,356,279	5	546,483,437	7	754,147,144	7	926,696,010	7	1,257,248,477	Badan Kepegawaian Daerah

	Peningkatan Kemitraan Legislatif dengan Eksekutif	Terjalinnya kemitraan yang sinergis antara legislatif dan eksekutif	'%	100	0	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukittinggi	persen	10	15	2,092,983,550	20	2,155,354,460	30	2,276,700,916	50	3,141,847,264	75	3,860,701,918	75	5,237,814,292	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Ditindaklanjutinya Pengaduan Masyarakat Secara Komprehensif	'%	100	100	0	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Penyelenggaraan Adipura	Tingkat penilaian adipura	'%	71	75	0	77	0	80	325,000,000	85	325,000,000	87	325,000,000	87		Kantor Lingkungan Hidup
	Program Penegasan Batas Wilayah	Persentase terwujudnya batas wilayah antara kecamatan dan kelurahan	'%	80	80	671,985,500	81	692,010,668	82	730,970,869	83	1,008,739,799	84	1,239,539,464	84	1,681,683,191	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Meningkatnya tingkat perekonomian	'%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian	Tingkat inflasi daerah	'%	2.84	9	575,800,100	6	592,958,943	5	626,342,531	5	864,352,693	4	1,062,116,590	4	1,440,973,577	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rupiah (Milyar)	28892	31,758	3,021,888,000	34,927	3,111,940,262	38,432	3,287,142,499	42,311	4,536,256,649	46,605	5,574,152,170	46,605	7,562,452,249	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD`	'%	100	100	111,720,000	100	115,049,256	100	121,526,529	100	167,706,610	100	206,077,883	100	279,585,863	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Peningkatan program peningkatan kinerja LPMK dan RT	bln	12	12	63,000,000	12	64,877,400	12	68,529,998	12	94,571,397	12	116,209,332	12	157,661,201	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pembinaan PKK	Peningkatan program pembinaan PKK	bln	12	12	92,500,000	12	95,256,500	12	100,619,441	12	138,854,829	12	170,624,813	12	231,486,684	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Tingkat Capaian Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan RT	'%	90	80	67,748,400	85	69,767,302	90	73,695,201	95	101,699,378	100	124,968,196	100	169,544,351	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Keuangan					**4,841,271,107**		**4,985,540,986**		**5,266,226,943**		**7,267,393,182**		**8,930,172,742**		**12,115,565,359**	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi	opini	3	3	4,841,271,107	3	4,985,540,986	3	5,266,226,943	3	7,267,393,182	3	8,930,172,742	3	12,115,565,359	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Bidang Pengawasan					**1,466,804,860**		**1,510,515,645**		**1,595,557,676**		**2,201,869,592**		**2,705,657,355**		**3,670,765,334**	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	'%	100	100	319,019,650	100	328,526,436	100	347,022,474	100	478,891,014	100	588,461,278	100	798,365,416	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	'%	100	100	1,147,785,210	100	1,181,989,209	100	1,248,535,202	100	1,722,978,578	100	2,117,196,077	100	2,872,399,918	Inspektorat Daerah

	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					**2,871,047,600**		**2,956,604,818**		**3,123,061,670**		**4,309,825,104**		**5,295,913,088**		**7,184,965,287**	
	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Aparatur yang difasilitasi mengikuti pendidikan kedinasan	orang	1500	550	2,545,102,500	550	2,620,946,555	530	2,768,505,846	535	3,820,538,067	550	4,694,677,177	550	6,369,268,525	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai sesuai standar kompetensi	'%	60	60	325,945,100	70	335,658,264	80	354,555,824	90	489,287,037	95	601,235,912	95	815,696,761	Badan Kepegawaian Daerah
	Perencanaan Pembangunan					**3,480,323,200**		**3,659,036,831**		**3,870,818,105**		**5,324,428,985**		**6,529,778,337**		**8,709,713,269**	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	'%	100	100	2,214,373,100	100	2,280,361,418	100	2,408,745,766	100	3,324,069,157	100	4,084,616,181	100	5,541,598,772	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	'%	100	100	84,875,500	100	87,404,790	100	92,325,680	100	127,409,438	100	156,560,717	100	212,405,925	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan sosial budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	'%	100	100	164,296,900	100	169,192,948	100	178,718,511	100	246,631,545	100	303,060,842	100	411,162,644	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Terwujudnya administrasi pembangunan	'%	100	100	574,865,000	100	591,995,977	100	625,325,351	100	862,948,984	100	1,060,391,711	100	1,438,633,435	Sekretariat Daerah
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum	'%	60	100	125,647,500	100	129,391,796	100	136,676,554	100	188,613,644	100	231,768,446	100	314,440,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Pemenuhan Pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota	'%	60	65	316,265,200	70	325,689,903	75	344,026,244	80	474,756,217	85	583,380,440	85	791,472,243	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Peningkatan kualitas perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana	'%	50	50	0	60	75,000,000	65	85,000,000	70	100,000,000	75	110,000,000	75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penunjang Urusan Pemerintahan					**78,568,988,305**		**110,687,546,491**		**84,961,392,121**		**116,939,982,167**		**143,499,320,780**		**189,891,040,836**	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	465,300,000			100	300,000,000	100	60,000,000	100	75,000,000	100	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam menggunakan atribut kepegawaian	'%	100	100	18,000,000	100	18,536,400	100	19,579,999	100	27,020,399	100	33,202,666	100	45,046,057	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	656,988,500	100	676,566,757	100	714,657,466	100	986,227,303	100	1,211,876,110	100	1,644,152,318	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	11,550,000	100	11,894,190	100	12,563,833	100	17,338,089	100	21,305,044	100	28,904,554	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	865,000,000	100	890,777,000	100	940,927,745	100	1,298,480,288	100	1,595,572,578	100	2,164,713,317	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	22,150,000	100	22,810,070	100	24,094,277	100	33,250,102	100	40,857,726	100	55,431,676	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	683,530,700	100	703,899,915	100	743,529,480	100	1,026,070,682	100	1,260,835,655	100	1,710,575,733	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,760,000	100	4,901,848	100	5,177,822	100	7,145,394	100	8,780,261	100	11,912,180	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,987,400	100	11,314,825	100	11,951,849	100	16,493,552	100	20,267,276	100	27,496,614	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	257,387,100	100	265,057,236	100	279,979,958	100	386,372,342	100	474,774,334	100	644,126,339	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	12,150,000	100	12,512,070	100	13,216,500	100	18,238,769	100	22,411,800	100	30,406,089	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	309,798,600	100	319,030,598	100	336,992,021	100	465,048,989	100	571,452,198	100	775,289,196	Kantor Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	2,300,000	100	2,368,540	100	2,501,889	100	3,452,607	100	4,242,563	100	5,755,885	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	21,300,000	100	21,934,740	100	23,169,666	100	31,974,139	100	39,289,822	100	53,304,501	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	6,300,000	100	6,487,740	100	6,853,000	100	9,457,140	100	11,620,933	100	15,766,120	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	230,200,600	100	237,060,578	100	250,407,088	100	345,561,782	100	424,626,318	100	576,090,525	Kantor Ketahanan Pangan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	'%	100	100	353,159,200	100	363,683,344	100	384,158,716	100	530,139,029	100	651,434,838	100	883,801,645	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	1,910,300	100	1,967,227	100	2,077,982	100	2,867,615	100	3,523,725	100	4,780,638	Inspektorat Daerah

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja	'%	100	100	17,950,000	100	18,484,910	100	19,525,610	100	26,945,342	100	33,110,437	100	44,920,930	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang berpakaian sesuai aturan	'%	100	100	18,600,000	100	19,154,280	100	20,232,666	100	27,921,079	100	34,309,422	100	46,547,593	Inspektorat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perentasee laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	2,020,000	100	2,080,196	100	2,197,311	100	3,032,289	100	3,726,077	100	5,055,169	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	65,000,000	100	66,937,000	100	70,705,553	100	97,573,663	100	119,898,517	100	162,666,319	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	19,000,000	100	19,566,200	100	20,667,777	100	28,521,532	100	35,047,259	100	47,548,616	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	343,857,700	100	354,104,659	100	374,040,752	100	516,176,237	100	634,277,361	100	860,524,095	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	132,000,000	100	135,933,600	100	143,586,662	100	198,149,593	100	243,486,220	100	330,337,755	Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,513,220,400	100	6,707,314,368	100	7,084,936,167	100	9,777,211,910	100	12,014,237,995	100	16,299,716,688	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	90	90	111,000,000	90	114,307,800	90	120,743,329	90	166,625,794	95	204,749,776	95	277,784,021	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	3,237,400,000	100	3,333,874,520	100	3,521,571,655	100	4,859,768,885	100	5,971,684,005	100	8,101,783,690	Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersedian Layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	5,111,604,400	100	5,263,930,211	100	5,560,289,482	100	7,673,199,485	100	9,428,827,527	100	12,792,090,306	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaiakan kinerja dan keuangann yang tersesusun tepat waktu	'%	100	100	78,666,400	100	81,010,659	100	85,571,559	100	118,088,751	100	145,107,457	100	196,867,287	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana & Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,260,897,000	100	32,280,646,000	100	1,601,292,000	100	2,436,344,000	100	2,867,171,000	100		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran & Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	169,750,000	100	174,808,550	100	184,650,271	100	254,817,374	100	313,119,590	100	424,809,347	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	100	46,800,000	100	48,194,640	100	50,907,998	100	70,253,038	100	86,326,933	100	117,119,749	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kesediaan layanan administrasi perkantoran		100	100	7,893,622,000	100	8,128,851,936	100	8,586,506,300	100	11,849,378,693	100	14,560,516,538	100	19,754,252,788	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	persentase	100	100	9,377,500	100	9,656,950	100	10,200,636	100	14,076,877	100	17,297,667	100	23,467,745	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	persentase	100	100	1,910,080,000	100	1,967,000,384	100	2,077,742,506	100	2,867,284,658	100	3,523,319,387	100	4,780,087,413	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	635,835,000	100	654,782,883	100	691,647,159	100	954,473,080	100	1,172,856,521	100	1,591,214,441	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	60	60	1,342,932,360	70	1,382,951,744	80	1,460,811,928	90	2,015,920,460	95	2,477,163,061	95	3,360,767,125	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	122,654,500	100	126,309,604	100	133,420,835	100	184,120,752	100	226,247,580	100	306,950,092	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	482,769,475	100	497,156,005	100	525,145,888	100	724,701,326	100	890,512,989	100	1,208,158,973	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	16,450,000	100	16,940,210	100	17,893,944	100	24,693,642	100	30,343,548	100	41,167,091	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	'%	100	100	878,892,100	100	905,083,085	100	956,039,262	100	1,319,334,182	100	1,621,197,843	100	2,199,479,113	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	100	214,300,000	100	220,686,140	100	233,110,770	100	321,692,862	100	395,296,189	100	536,298,340	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persentase	100	100	19,350,000	100	19,926,630	100	21,048,499	100	29,046,929	100	35,692,866	100	48,424,512	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	438,888,200	100	451,967,068	100	477,412,814	100	658,829,684	100	809,569,915	100	1,098,343,504	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase	100	100	16,165,900	100	16,647,644	100	17,584,906	100	24,267,171	100	29,819,499	100	40,456,114	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	2,698,700,000	100	2,779,121,260	100	2,935,585,787	100	4,051,108,386	100	4,978,001,985	100	6,753,655,293	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedispilanan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pagawai	'%	100	100	150,000,000	100	154,470,000	100	163,166,661	100	225,169,992	100	276,688,886	100	375,383,812	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesedian Layan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,153,130,000	100	2,217,293,274	100	2,342,126,885	100	3,232,135,102	100	3,971,647,613	100	5,388,334,317	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,900,000	100	11,224,820	100	11,856,777	100	16,362,353	100	20,106,059	100	27,277,890	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	1,446,300,000	100	1,489,399,740	100	1,573,252,945	100	2,171,089,065	100	2,667,834,243	100	3,619,450,717	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	Persen	100	100	225,225,000	100	231,936,705	100	244,994,741	100	338,092,743	100	415,448,363	100	563,638,794	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	5,562,692,900	100	5,728,461,148	100	6,050,973,511	100	8,350,343,445	100	10,260,902,026	100	13,920,965,778	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persetase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	100	11,358,000	100	11,696,468	100	12,354,980	100	17,049,872	100	20,950,882	100	28,424,062	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan Administrasi	'%	100	100	1,480,784,350	100	1,524,911,724	100	1,610,764,254	100	2,222,854,670	100	2,731,443,819	100	3,705,749,829	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capain kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	5,051,400	100	5,201,932	100	5,494,800	100	7,582,825	100	9,317,775	100	12,641,425	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	86,000,000	100	88,562,800	100	93,548,886	100	129,097,462	100	158,634,962	100	215,220,052	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	59,400,000	100	61,170,120	100	64,613,998	100	89,167,317	100	109,568,799	100	148,651,990	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	474,236,200	100	488,368,439	100	515,863,582	100	711,891,743	100	874,772,574	100	1,186,803,951	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	4,900,000	100	5,046,020	100	5,330,111	100	7,355,553	100	9,038,504	100	12,262,538	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	102,983,800	100	106,052,717	100	112,023,485	100	154,592,410	100	189,963,153	100	257,723,010	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	23,000,000	100	23,685,400	100	25,018,888	100	34,526,065	100	42,425,629	100	57,558,851	Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	418,985,000	100	431,470,753	100	455,762,556	100	628,952,328	100	772,856,620	100	1,048,534,577	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	107,580,000	100	110,785,884	100	117,023,129	100	161,491,918	100	198,441,269	100	269,225,270	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,367,447,130	100	2,437,997,054	100	2,575,256,289	100	3,553,853,678	100	4,366,975,400	100	5,924,675,525	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Tepat Waktu	'%	100	100	14,575,800	100	15,010,159	100	15,855,231	100	21,880,218	100	26,886,412	100	36,476,796	Dinas Pengelolaan Pasar
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	65,100,000	100	67,039,980	100	70,814,331	100	97,723,777	100	120,082,977	100	162,916,574	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam Kehadiran dan pemakaian atribut	'%	100	100	33,300,000	100	34,292,340	100	36,222,999	100	49,987,738	100	61,424,933	100	83,335,206	Dinas Pertanian
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	persen	100	100	907,064,550	100	934,095,074	100	986,684,626	100	1,361,624,784	100	1,673,164,535	100	2,269,982,324	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun waktu	'%	100	100	1,706,000	100	1,756,839	100	1,855,749	100	2,560,933	100	3,146,875	100	4,269,365	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	182,815,000	100	188,262,887	100	198,862,088	100	274,429,681	100	337,219,192	100	457,505,277	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,426,417,200	100	1,468,924,433	100	1,551,624,878	100	2,141,242,332	100	2,631,158,577	100	3,569,692,842	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuanagan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	3,878,500	100	3,994,079	100	4,218,946	100	5,822,145	100	7,154,252	100	9,706,174	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	173,300,000	100	178,464,340	100	188,511,882	100	260,146,398	100	319,667,893	100	433,693,431	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	unit	4	4	43,620,000	4	44,919,876	4	47,448,865	4	65,479,434	4	80,461,128	4	109,161,613	AUR BIRUGO TIGO BALEH

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	stel	40	40	40,500,000	40	41,706,900	40	44,054,998	40	60,795,898	40	74,705,999	40	101,353,629	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	bln	12	12	337,561,200	12	347,620,524	12	367,191,559	12	506,724,352	12	622,662,883	12	844,766,734	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen yang tersusun dengan tepat waktu	dokumen	3	3	5,980,000	3	6,158,204	3	6,504,911	3	8,976,777	3	11,030,664	3	14,965,301	AUR BIRUGO TIGO BALEH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	874,400,000	100	900,457,120	100	951,152,856	100	1,312,590,941	100	1,612,911,748	100	2,188,237,369	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	40,500,000	100	41,706,900	100	44,054,998	100	60,795,898	100	74,705,999	100	101,353,629	GUGUAK PANJANG
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	339,733,200	100	349,857,249	100	369,554,212	100	509,984,813	100	626,669,339	100	850,202,292	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan YangTersusun Tepat Waktu	'%	100	100	7,989,000	100	8,227,072	100	8,690,256	100	11,992,554	100	14,736,450	100	19,992,942	GUGUAK PANJANG
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	48,600,000	100	50,048,280	100	52,865,998	100	72,955,077	100	89,647,199	100	121,624,355	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	394,870,450	100	406,637,589	100	429,531,286	100	592,753,174	100	728,375,101	100	988,186,499	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	22,114,000	100	22,772,997	100	24,055,117	100	33,196,061	100	40,791,320	100	55,341,584	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	0	100	378,400,000	100	389,676,320	100	411,615,097	100	568,028,834	100	697,993,831	100	946,968,230	MANDIANGIN KOTO SELAYAN
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	108,000,000	100	111,218,400	100	117,479,996	100	162,122,394	100	199,215,998	100	270,276,345	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,070,114,000	100	1,102,003,397	100	1,164,046,188	100	1,606,383,740	100	1,973,924,340	100	2,678,023,152	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	55,500,000	100	57,153,900	100	60,371,665	100	83,312,897	100	102,374,888	100	138,892,011	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	410,500,000	100	422,732,900	100	446,532,762	100	616,215,212	100	757,205,252	100	1,027,300,366	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	1,668,453,440	100	1,718,173,353	100	1,814,906,512	100	2,504,570,987	100	3,077,616,829	100	4,175,402,752	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu	'%	100	100	9,342,400	100	9,620,804	100	10,162,455	100	14,024,188	100	17,232,922	100	23,379,905	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	740,875,000	100	762,953,075	100	805,907,333	100	1,112,152,120	100	1,366,612,525	100	1,854,083,212	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	153,000,000	100	157,559,400	100	166,429,994	100	229,673,392	100	282,222,664	100	382,891,488	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	65,250,000	100	67,194,450	100	70,977,498	100	97,948,947	100	120,359,666	100	163,291,958	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	'%	100	100	6,425,988,650	100	6,617,483,112	100	6,990,047,411	100	9,646,265,427	100	11,853,330,957	100	16,081,414,109	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	39,792,100	100	40,977,905	100	43,284,961	100	59,733,246	100	73,400,212	100	99,582,068	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	4,770,756,100	80	4,912,924,632	85	5,189,522,289	90	7,161,540,758	95	8,800,101,284	95	11,939,097,412	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan dalam atribut pegawai	'%	80	85	40,000,000	90	41,192,000	95	43,511,110	100	60,045,331	100	73,783,703	100	100,102,350	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan adm perkantoran	'%	75	75	514,552,000	75	529,885,650	80	559,718,212	85	772,411,132	90	949,138,799	90	1,287,696,609	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	85	90	13,250,000	95	13,644,850	100	14,413,055	100	19,890,016	100	24,440,852	100	33,158,903	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	70	75	26,300,000	80	27,083,740	85	28,608,555	90	39,479,805	95	48,512,785	95	65,817,295	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen	90	91	153,000,000	92	157,559,400	93	166,429,994	94	229,673,392	95	282,222,664	95	382,891,488	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	90	91	1,268,502,000	92	1,306,303,360	93	1,379,848,239	94	1,904,190,569	95	2,339,869,372	95	3,174,500,777	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	Persen	90	91	13,271,000	92	13,666,476	93	14,435,898	94	19,921,540	95	24,479,588	95	33,211,457	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90	91	331,300,000	92	341,172,740	93	360,380,765	94	497,325,456	95	611,113,520	95	829,097,713	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.	'%	100	100	19,300,000	100	19,875,140	100	20,994,110	100	28,971,872	100	35,600,637	100	48,299,384	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	6,750,000	100	6,951,150	100	7,342,500	100	10,132,650	100	12,451,000	100	16,892,272	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	'%	100	100	10,086,100	100	10,386,666	100	10,971,435	100	15,140,580	100	18,604,745	100	25,241,058	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparaur	'%	100	100	390,950,000	100	402,600,310	100	425,266,707	100	586,868,056	100	721,143,468	100	978,375,342	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	'%	100	100	19,800,000	100	20,390,040	100	21,537,999	100	29,722,439	100	36,522,933	100	49,550,663	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layananan administrasi perkantoran	'%	100	100	407,394,800	100	419,535,165	100	443,154,995	100	611,553,893	100	751,477,424	100	1,019,529,421	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	dokume n	0	100	5,100,000	100	5,251,980	100	5,547,666	100	7,655,780	100	9,407,422	100	12,763,050	Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	'%	100	100	2,150,000	100	2,214,070	100	2,338,722	100	3,227,437	100	3,965,874	100	5,380,501	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	'%	100	100	11,300,000	100	11,636,740	100	12,291,888	100	16,962,806	100	20,843,896	100	28,278,914	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	'%	100	100	14,850,000	100	15,292,530	100	16,153,499	100	22,291,829	100	27,392,200	100	37,162,997	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat ketersediaan layanan adminidtrasi perkantoran	'%	100	100	328,776,550	100	338,574,091	100	357,635,813	100	493,537,421	100	606,458,783	100	822,782,631	Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	20	30	70,000,000	40	72,086,000	50	76,144,442	60	105,079,330	70	129,121,480	70	175,179,112	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	'%	100	100	82,950,000	100	85,421,910	100	90,231,164	100	124,519,006	100	153,008,954	100	207,587,248	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tercapaianya pentaan jabatan dan informasi dibidang sumber daya aparatur	'%	90	90	120,000,000	91	123,576,000	92	130,533,329	93	180,135,994	94	221,351,109	94	300,307,050	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	persen	15	0	0	20	50,000,000	25	80,000,000	30	100,000,000	35	120,000,000	35		Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	198,880,150	100	204,806,778	100	216,337,400	100	298,545,612	100	366,852,848	100	497,709,259	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan Nagari
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	100	230,000,000	100	236,854,000	100	250,188,880	100	345,260,655	100	424,256,292	100	575,588,512	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi	'%	0	0	0	70	83,994,005	70	250,000,000	70	252,500,000	70	280,000,000	70		Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Ketersediaan SDM sesuai Bidang Keahlian	'%	70	0	0	70	100,000,000	75	110,000,000	80	121,000,000	85	133,100,000	85		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan secara profesional pada masyarakat dan dunia usaha	persen	50	50	0	60	70,000,000	65	120,000,000	70	120,000,000	75	125,000,000	75		Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal